



**PENGANTAR  
LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI KLATEN  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**



## **BUPATI KLATEN**

### **PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KLATEN KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023**

*Bismillahirrahmannirrahiim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Yang terhormat,

- Saudara Ketua DPRD Kabupaten Klaten;
- Saudara Komandan Kodim 0723 Klaten;
- Saudara Kapolres Klaten;
- Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Klaten;
- Saudara Ketua Pengadilan Negeri Klaten;
- Saudara Ketua Pengadilan Agama Klaten;
- Saudara Komandan Dodiklatpur;
- Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten dan Anggota DPRD Kabupaten Klaten;
- Saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, serta Hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang baik ini dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati tahun 2023, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala nikmat yang diberikan berupa rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga kita semua masih diberikan kekuatan, ketabahan, keteguhan iman, kesabaran, keikhlasan serta kemampuan untuk menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa, negara serta masyarakat dengan penuh tanggungjawab.

Menyertai rasa syukur tadi, kami memohon semoga Allah Subhanahu Wata'ala agar senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan serta kekuatan pada kita semua sehingga mampu melewati berbagai masalah yang ada dalam menjalankan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya.

Perkenankan pula dalam forum yang terhormat ini, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Klaten yang telah menjalankan peran dan fungsinya, terutama sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Demikian pula kepada Bapak/Ibu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para tokoh masyarakat serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten.

**Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan laporan yang harus disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Sedangkan RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yang memuat Visi Pemerintah Kabupaten Klaten yaitu : **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**.

Sedangkan **Misi** yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mencapai Visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

**Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ringkasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Capaian indikator kinerja ekonomi makro Kabupaten Klaten Tahun 2023;
2. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023;
3. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan selama Tahun 2023;

4. Pelaksanaan Tugas Pembantuan selama Tahun Anggaran 2023;
5. Prestasi dan Penghargaan yang diterima oleh Kepala Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Klaten selama Tahun 2023.

Ringkasan ini selengkapnya tersaji dalam Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun 2023.

***Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,***

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,7%. Capaian tersebut merupakan suatu capaian yang membanggakan kita semua dikarenakan pada tahun 2023 Capaian Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten yang sebesar 5,7% di atas Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 4,98% dan Pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05%.

Inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 sebesar 3,2%. Berdasarkan penggolongannya, inflasi di Kabupaten Klaten masih terkendali. Hal ini disebabkan oleh terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan berfungsinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten. Pada tahun 2023 tingkat inflasi Kabupaten Klaten diambil dari tingkat inflasi Kota

Surakarta yaitu sebesar 3,2%. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2021 penghitungan inflasi di Jawa Tengah Tengah hanya dilakukan di 6 (enam) Kabupaten/Kota dengan SBH (Standar Biaya Hidup) yaitu Cilacap, Purwokerto, Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal.

Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 menunjukkan penurunan jika dibandingkan Tahun 2022, Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 144.870 jiwa turun menjadi 144.430 jiwa pada tahun 2023. Demikian pula dengan Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 12,33% turun menjadi sebesar 12,28%. Penurunan Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja positif Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menanggulangi kemiskinan.

Kualitas Pembangunan manusia di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Klaten pada tahun 2023 mencapai 77,59 meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang besarnya 76,95. Capaian IPM di Kabupaten Klaten yang sebesar 76,95 di atas IPM Jawa Tengah yang sebesar 73,39 dan IPM nasional yang sebesar 74,39.

Pada Tahun 2023 beberapa komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami

peningkatan jika dibandingkan Tahun 2022. Usia Harapan Hidup mengalami peningkatan dari 76,95 tahun pada tahun 2022 menjadi 77,07 tahun pada tahun 2023. Angka Harapan Lama Sekolah meningkat dari 13,40 tahun pada tahun 2022 menjadi 13,41 tahun pada tahun 2023. Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 9,09 tahun pada tahun 2022 menjadi 9,27 tahun pada tahun 2023. pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Klaten per tahun mengalami kenaikan dari Rp12.522.000,- pada tahun 2022 menjadi Rp12.968.000,- pada tahun 2023.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 sebesar 4,20%. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 turun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,31%.

***Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,***

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pelaporan pengelolaan keuangan daerah, kami sampaikan ringkasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 berdasarkan data keuangan per Tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut :



## **1. Pendapatan Daerah**

Pada tahun 2023 Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.674.775.213.427,00 dari target pendapatan sebesar Rp2.651.538.742.197,00 Sehingga dari pendapatan tersebut terealisasi sebesar 100,88% dari target yang telah ditentukan. Rincian realisasi pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 sebesar Rp339.039.059.562,00 atau mencapai 103,86% dari target yang diharapkan sebesar Rp326.447.398.322,00.
- b. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.321.236.153.865,00 atau mencapai 100,45% dari target yang direncanakan sebesar Rp2.310.851.343.875,00.
- c. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp14.500.000.000,00 atau mencapai 101,83% dari target yang direncanakan sebesar Rp14.240.000.000,00.

## **2. Belanja Daerah**

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.141.832.418.499,00 dan dapat direalisasikan Rp2.843.755.495.798,00 atau mencapai 90,51%. Rincian realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.048.368.740.309,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.813.918.311.416,00 atau sebesar 88,55%.
- b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp332.747.086.931,00 dan direalisasikan sebesar Rp295.594.876.519,00 atau sebesar 88,83%.
- c. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp21.382.536.680,00 dan direalisasikan sebesar Rp657.130.800,00 atau sebesar 3,07%.
- d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp739.334.054.579,00 dan terealisasi sebesar Rp733.585.177.063,00 atau sebesar 99,22%.

### **3. Pembiayaan Daerah**

Realisasi penerimaan pembiayaan Daerah sebesar Rp529.593.676.302,00 dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp39.300.000.000,00 Sehingga realisasi pembiayaan netto sebesar Rp490.293.676.302,00

Secara keseluruhan realisasi total pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp2.674.775.213.427,00 dan realisasi belanja sebesar Rp2.843.755.495.798 sehingga defisit sebesar minus Rp168.980.282.371,00 Berdasarkan realisasi Pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, maka terdapat SILPA sebesar Rp321.313.393.931,00

## **Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya akan kami sampaikan tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah selama tahun 2023. Capaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang kami sampaikan merupakan ringkasan capaian kinerja yang secara rinci dan lengkap tersaji dalam Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun 2023. Ringkasan dari beberapa Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

### **A. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

#### **1. Urusan Pendidikan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Pendidikan pada tahun 2023 antara lain :

- 1) Harapan Lama Sekolah (HLS) realisasi 13,41 tahun dari target 13,62 tahun dengan capaian kinerja 98,46%
- 2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) realisasi 9,27 tahun dari target 8,72 tahun dengan capaian kinerja 106,31%

#### **2. Urusan Kesehatan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH) realisasi mencapai 77,07 tahun dari target 76,89 tahun dengan capaian kinerja 100,23%

### **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

- 1) Persentase jalan dalam kondisi mantap realisasi 91,79% dari target 91,26% dengan capaian 100,58%
- 2) Persentase drainase dalam kondisi baik realisasi 62,31% dari target 62,29% dengan capaian kinerja 100,03%
- 3) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik realisasi 49% dari target 43,60% dengan capaian kinerja 112,39%
- 4) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang realisasi 99,09% dari target 95,03% dengan capaian kinerja dengan capaian kinerja 104,27%

### **4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi) realisasi 97,66% dari target 98,87% dengan capaian kinerja 98,7%

## **5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

- 1) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) realisasi 0,94 dari target 0,92 dengan capaian kinerja 102,17%
- 2) Persentase perda dan perkara yang ditegakkan realisasi 100% dari target 97% dengan capaian kinerja sebesar 103%

## **6. Urusan Sosial**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Sosial adalah Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani sebesar 86,31% dari target 85% dengan capaian kinerja 101,54%

## **B. Penyelenggaraan Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar**

### **1. Urusan Tenaga Kerja**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Tenaga Kerja adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) realisasi sebesar 4,20% dari target 5% dengan capaian kinerja 116%

## **2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak**

Capaian kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) realisasi sebesar 69,39 (capaian 2022) dari target 73,67 dengan capaian kinerja 94,19%
- 2) Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) realisasi 723,67 dari target 740 dengan capaian kinerja 97,79%

## **3. Urusan Pangan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pangan adalah Skor Pola Pangan Harapan realiasasi sebesar 89,6 dari target 90,75 dengan capaian kinerja 98,73%

## **4. Urusan Lingkungan Hidup**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Lingkungan Hidup antara lain :

- 1) Indeks kualitas air realisasi sebesar 58,46 dari target 47,69 dengan capaian kinerja 122%
- 2) Indeks kualitas udara realisasi 88,16 dari target 87,85 dengan capaian kinerja 100,35%
- 3) Indeks kualitas tutupan lahan realisasi 25,26 dari target 43,08 dengan capaian kinerja 61,65%

4) Indeks kinerja Pengelolaan Persampahan (IPKS) realisasi 60,14 dari target 61,95 dengan capaian kinerja 98%

#### **5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM) realisasi sebesar 92,1 dari target 88,90 dengan capaian kinerja 103,6%

#### **6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Capaian Kinerja pada pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Masyarakat desa adalah Indeks Desa Membangun realisasi sebesar 0,716 dari target 0,7034 dengan capaian kinerja 101,79%

#### **7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) realisasi 0,78% dari target 0,26% dengan capaian kinerja -100%

## **8. Urusan Perhubungan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Perhubungan adalah Kinerja Lalu Lintas (*Level Of Service*) realisasi 0,61 dari target 0,61 dengan capaian kinerja 100%

## **9. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Capaian Kinerja pada pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Komunikasi dan Informatika adalah Indeks SPBE realisasi 3,7 dari target 3,4 dengan capaian kinerja 108,8%

## **10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Pertumbuhan Usaha Mikro realisasi 0,14% dari target 0,14% dengan capaian kinerja 100%

## **11. Urusan Penanaman Modal**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Penanaman Modal antara lain:

- 1) Persentase peningkatan investasi PMDN realisasi 26% dari target 50% dengan capaian kinerja 52%
- 2) Persentase peningkatan PMA realisasi 16% dari target 15% dengan capaian kinerja 105%



## **12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah Tingkat Prestasi Pemuda dan Olahraga realisasi 37% dari target 40% dengan capaian kinerja 92,5%

## **13. Urusan Statistik**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Statistik adalah Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah realisasi 40% dari target 40% dengan capaian kinerja 100%

## **14. Urusan Kebudayaan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kebudayaan adalah Persentase Pemajuan Kebudayaan realisasi 5% dari target 5% dengan capaian kinerja 100%

## **15. Urusan Perpustakaan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Perpustakaan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan realisasi 86,55 dari target 78,01 dengan capaian kinerja 110,95%

## **16. Urusan Kearsipan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kearsipan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan realisasi 86,55 dari target 78,01 dengan capaian kinerja 110,95%

## **17. Urusan Persandian**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Persandian adalah Indeks Keamanan Informasi (KAMI) realisasi 72,86 dari target 68 dengan capaian kinerja 107,14%

## **18. Urusan Pertanahan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Pertanahan adalah Persentase lahan milik pemerintah yang bersertifikat realisasi 83,88% dari target 78,30% dengan capaian kinerja 107,13%

## **C. Urusan Pilihan yang dilaksanakan**

### **1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan pilihan di bidang Kelautan dan Perikanan adalah Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap realisasi 30.831,6 ton dari target 30.586 ton dengan capaian kinerja 100,8%

## **2. Urusan Pariwisata**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan pilihan di bidang Pariwisata adalah Pertumbuhan PAD sektor pariwisata realisasi 31,87% dari target 3,44% dengan capaian kinerja 926,45%

## **3. Urusan Pertanian**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pilihan di bidang Pertanian adalah Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan realisasi 1,21% dari target 2,09% dengan capaian kinerja 57,89%

## **4. Urusan Perdagangan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan pilihan di bidang Perdagangan adalah Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan realisasi 3,68% dari target 5,39% dengan capaian kinerja 68,27%

## **5. Urusan Perindustrian**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan pilihan di bidang Perindustrian adalah Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan realisasi 5,85% dari target 4,19% dengan capaian kinerja 139,61%

## **6. Urusan Transmigrasi**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan pilihan di bidang Transmigrasi adalah Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigrasi realisasi 100% dari target 80% dengan capaian kinerja 125%

## **D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

### **1. Sekretariat Daerah**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Sekretariat Daerah antara lain:

- 1) Peringkat/Nilai SAKIP realisasi 66,27 dari target 67 dengan capaian kinerja 98,91%
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasi 85,62 dari target 83,46 dengan capaian kinerja 102,56%

### **2. Pengawasan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Pengawasan adalah Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) realisasi 78,84 dari target 81 dengan capaian kinerja 97,33%

### **3. Perencanaan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Perencanaan adalah Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah realisasi 21,39 dari target 24 dengan capaian kinerja 89,13%

### **4. Keuangan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Keuangan adalah Opini Laporan Keuangan realisasi WTP dari target WTP dengan capaian kinerja 100%

## **5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Indeks Penerapan Sistem Merit realisasi 265,5 dari target 259 dengan capaian kinerja 102,31%

## **6. Penelitian dan Pengembangan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan adalah Indeks Inovasi Daerah realisasi 69,65 dari target 66,79 dengan capaian kinerja 104,3%

## **7. Sekretariat DPRD**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Sekretariat DPRD adalah Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD realisasi 80,53 dari target 81,56 dengan capaian kinerja 98,72%

## **8. Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kecamatan realisasi 88,11 dari target 80,99 dengan capaian kinerja 108,79%

## **9. Kesatuan Bangsa dan Politik**

Capaian Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan realisasi 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%

### ***Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,***

Pemerintah Kabupaten Klaten juga melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi. Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp202.474.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp201.250.200,00 atau sebesar 98,96%. Adapun rincian pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
  - a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, dan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian. Adapun alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp110.719.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp110.617.800,00 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,91%.

- b) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Adapun alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp56.175.000,00 dan terealisasi sebesar Rp56.132.400,00 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,92%.

## 2. Bidang Tanaman Pangan

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari Kegiatan Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan dan Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan. Adapun alokasi anggaran Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp35.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.500.000,00 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 96,96%.

### ***Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,***

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023, terdapat beberapa prestasi dan penghargaan yang diberikan kepada Bupati Klaten maupun Pemerintah Kabupaten Klaten, diantaranya :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022
2. Penghargaan Adipura Tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3. Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023 kategori Padapa dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Penghargaan Sertifikat Bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
6. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan Republik Indonesia
7. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat NINDYA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
8. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
9. Penghargaan Satyalancana Wira Karya kepada Bupati Klaten dari Presiden Republik Indonesia
10. Penghargaan Adhikarya Pratama Pembangunan Pertanian kepada Bupati Klaten dari Menteri Pertanian Republik Indonesia
11. Penghargaan TOP Pembina BUMD kepada Bupati Klaten dari TOP BUMD Award 2023



12. Penghargaan Tokoh Perempuan Inovatif Dalam Pelayanan Publik (Ibu Bupati Klaten) dari detik.com
13. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kategori Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
14. Penghargaan Pemanfaatan SRIKANDI terbanyak peringkat 1 Nasional Kategori Pemerintah Kabupaten dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
15. Predikat zona hijau (kualitas tertinggi) pada penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (opini pengawasan Ombudsman RI) Tahun 2023

Selain penghargaan dan prestasi tersebut, berbagai prestasi dan penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah termuat dalam Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun 2023.

***Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,***

Demikian Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2023 telah kami sampaikan, dan pada kesempatan ini kami serahkan 3 (tiga) Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2023 yang terdiri dari :

1. Buku Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun 2023;
2. Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun 2023;
3. Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun 2023.

***Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,***

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten termasuk jajaran pemerintahan Desa dan masyarakat Kabupaten Klaten secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan program pembangunan daerah.

***Saudara Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan Yang Terhormat,***

Demikian pidato “Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Klaten Tahun 2023” telah kami sampaikan. Selanjutnya kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan serta hadirin yang telah mengikuti dengan seksama Laporan Pertanggungjawaban ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas perjuangan kita bersama dalam melaksanakan tugas-tugas untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya bagi warga masyarakat Klaten yang kita cintai.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**Klaten, 13 Maret 2024**

**BUPATI KLATEN**



**HJ SRI MULYANI, S.M., M.Si**



**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI KLATEN  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klaten Tahun 2023 ini diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klaten Tahun 2023 dituangkan dalam tiga buku yang terdiri dari : Buku Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2023, Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2023 dan Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2023.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan ini merupakan ringkasan dari Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2023 yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dapat dievaluasi, sekaligus mohon saran dan masukan guna perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klaten Tahun 2023, dan tidak lupa kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Klaten yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Klaten dan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Klaten demi Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Klaten, 13 Maret 2024



Hj. SRI MULYANI, S.M., M.Si

## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar dan Daftar Tabel .....	iv
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Dasar Hukum .....	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	2
1.3 Data Umum Daerah .....	18
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>34</b>
2.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah dan Realisasi Pendapatan Daerah .....	38
2.2 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Daerah .....	42
2.3 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah dan Realisasi Pembiayaan Daerah .....	46
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....</b>	<b>49</b>
3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	49
1 Urusan Pendidikan .....	49
2 Urusan Kesehatan .....	59
3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	68
4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	78
5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	87
6 Urusan Sosial .....	103
3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	112
1 Urusan Tenaga Kerja.....	112
2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	120
3 Urusan Pangan .....	125
4 Urusan Lingkungan Hidup .....	131
5 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .....	141
6 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	148
7 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	154

8	Urusan Perhubungan .....	162
9	Urusan Komunikasi dan Informatika .....	169
10	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	175
11	Urusan Penanaman Modal .....	181
12	Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....	189
13	Urusan Statistik.....	206
14	Urusan Persandian .....	209
15	Urusan Kebudayaan.....	214
16	Urusan Perpustakaan .....	219
17	Urusan Kearsipan .....	225
18	Urusan Pertanahan .....	230
3.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan.....	235
1	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	235
2	Urusan Pariwisata.....	241
3	Urusan Pertanian.....	248
4	Urusan Perdagangan.....	257
5	Urusan Perindustrian.....	263
6	Urusan Transmigrasi.....	268
3.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.....	271
1	Sekretariat Daerah.....	271
2	Pengawasan .....	288
3	Perencanaan .....	295
4	Keuangan .....	302
5	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .....	310
6	Penelitian dan Pengembangan .....	315
7	Sekretariat DPRD .....	321
8	Kesatuan Bangsa dan Politik.....	325
9	Kewilayahan-Adminitrasi Pemerintahan.....	329
<b>BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN</b>		
<b>DAN PENUGASAN .....</b>		<b>339</b>
4.1	Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan.....	339
4.2	Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan	
	Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.....	348
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>349</b>

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	<b>Hal</b>
Gambar 1.1 Perkembangan antar waktu Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten tahun 2019 – 2023.....	27
Gambar 1.2 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2019 – 2023.....	27
Gambar 1.3 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2018 – 2023.....	24
Gambar 1.4 Inflasi di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2018 – 2023 .....	31
Gambar 1.5 Ketimpangan Pendapatan ( <i>Gini Ratio</i> ) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023 .....	33
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan tahun 2023 .....	19
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Kelompok Umur Tahun 2023.....	20
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2023.....	21
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan di Kabupaten Klaten tahun 2022-2023.....	23
Tabel 1.5 Data ASN Pemerintah Kabupaten Klaten menurut Unit Kerja Tahun 2023 .....	23
Tabel 1.6 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023.....	24
Tabel 1.7 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 .....	25
Tabel 1.8 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 .....	26
Tabel 1.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 .....	29
Tabel 1.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % di Kabupaten Klaten tahun 2019 – 2023 .....	31
Tabel 1.11 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	32



Tabel 2.1	Perkembangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama tahun 2023 .....	36
Tabel 2.2	Perubahan dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023 .....	40
Tabel 2.3	Perubahan dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2023 .....	44
Tabel 2.4	Perubahan dan Realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2023 .....	47
Tabel 3.1	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2023.....	50
Tabel 3.2	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan Tahun 2023.....	46
Tabel 3.3	Prestasi Pelaksanaan program urusan Pendidikan Tahun 2023.....	53
Tabel 3.4	Kebijakan Strategis Urusan Pendidikan Tahun 2023.....	54
Tabel 3.5	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan pendidikan .....	56
Tabel 3.6	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pendidikan tahun 2023 .....	58
Tabel 3.7	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2023.....	59
Tabel 3.8	Inovasi Pelaksanaan program urusan Kesehatan Tahun 2023 .....	64
Tabel 3.9	Prestasi Pelaksanaan program urusan Kesehatan Tahun 2023.....	65
Tabel 3.10	Kebijakan Strategis Pelaksanaan Urusan Kesehatan Tahun 2023.....	66
Tabel 3.11	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan kesehatan.....	67
Tabel 3.12	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kesehatan tahun 2023.....	68
Tabel 3.13	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 .....	69

Tabel 3.14 Data Inovasi pelaksanaan Program urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023.....	72
Tabel 3.15 Kebijakan Strategis Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 .....	73
Tabel 3.16 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	74
Tabel 3.17 Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 ....	78
Tabel 3.18 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Tahun 2023.....	79
Tabel 3.19 Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023 .....	81
Tabel 3.20 Kebijakan Strategis Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Tahun 2023.....	82
Tabel 3.21 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	84
Tabel 3.22 Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman tahun 2023 .....	87
Tabel 3.23 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023.....	88
Tabel 3.24 Inovasi pelaksanaan program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023.....	92
Tabel 3.25 Kebijakan Strategis Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023.....	93
Tabel 3.26 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat .....	98
Tabel 3.27 Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2023 .....	102
Tabel 3.28 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Sosial tahun 2023 .....	103

Tabel 3.29	Inovasi pelaksanaan program Urusan Sosial Tahun 2021 .....	105
Tabel 3.30	Kebijakan Strategis Urusan Sosial Tahun 2023.....	105
Tabel 3.31	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Sosial .....	110
Tabel 3.32	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Sosial tahun 2023 .....	111
Tabel 3.33	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja tahun 2023.....	112
Tabel 3.34	Kebijakan Strategis Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023 .....	114
Tabel 3.35	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Tenaga kerja.....	117
Tabel 3.36	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Tenaga kerja tahun 2023 .....	119
Tabel 3.37	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2023 .....	121
Tabel 3.38	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023.....	122
Tabel 3.39	Prestasi pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2023 .....	123
Tabel 3.40	Kebijakan Strategis urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 .....	124
Tabel 3.41	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.....	124
Tabel 3.42	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2023 ....	125
Tabel 3.43	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pangan tahun 2023.....	126
Tabel 3.44	Prestasi Pelaksanaan program urusan Pangan Tahun 2023 .....	127
Tabel 3.45	Kebijakan Strategis urusan Pangan Tahun 2023.....	128

Tabel 3.46 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pangan.....	129
Tabel 3.47 Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pangan tahun 2023 .....	131
Tabel 3.48 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup tahun 2023 .....	132
Tabel 3.49 Inovasi pelaksanaan Program urusan Lingkungan Hidup tahun 2023 .....	134
Tabel 3.50 Prestasi pelaksanaan Program urusan Lingkungan Hidup tahun 2023 .....	135
Tabel 3.51 Kebijakan Strategis Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023 .....	137
Tabel 3.52 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup.....	138
Tabel 3.53 Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup tahun 2023 .....	141
Tabel 3.54 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2023 .....	142
Tabel 3.55 Inovasi pelaksanaan program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 .....	143
Tabel 3.56 Prestasi Pelaksanaan program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2023.....	144
Tabel 3.57 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	145
Tabel 3.58 Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 .....	147
Tabel 3.59 Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023.....	148
Tabel 3.60 Prestasi pelaksanaan program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.....	149
Tabel 3.61 Kebijakan Strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.....	150

Tabel 3.62	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	152
Tabel 3.63	Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 .....	154
Tabel 3.64	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana tahun 2023 .....	155
Tabel 3.65	Inovasi pelaksanaan program urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana tahun 2023 .....	157
Tabel 3.66	Prestasi Pelaksanaan program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 .....	157
Tabel 3.67	Kebijakan Strategis Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Tahun 2023 .....	160
Tabel 3.68	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana .....	160
Tabel 3.69	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana tahun 2023 .....	161
Tabel 3.70	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perhubungan tahun 2023 .....	162
Tabel 3.71	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Perhubungan Tahun 2023 .....	164
Tabel 3.72	Kebijakan Strategis Urusan Perhubungan tahun 2023 .....	165
Tabel 3.73	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Perhubungan.....	166
Tabel 3.74	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perhubungan tahun 2023 .....	168
Tabel 3.75	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2023 .....	169
Tabel 3.76	Inovasi pelaksanaan program urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2023 .....	171
Tabel 3.77	Prestasi/penghargaan dalam pelaksanaan program urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2023 .....	171

Tabel 3.78	
Kebijakan Strategis urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.....	172
Tabel 3.79	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika.....	173
Tabel 3.80	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2023 .....	175
Tabel 3.81	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023.....	176
Tabel 3.82	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	178
Tabel 3.83	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023.....	181
Tabel 3.84	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal tahun 2023 .....	181
Tabel 3.85	
Inovasi Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal tahun 2023.....	183
Tabel 3.86	
Prestasi Pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal tahun 2023 .....	184
Tabel 3.87	
Kebijakan Strategis Urusan Penanaman Modal tahun 2023 .....	185
Tabel 3.88	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Penanaman Modal .....	186
Tabel 3.89	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Penanaman Modal tahun 2023 .....	188
Tabel 3.90	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 .....	189
Tabel 3.91	
Prestasi/Penghargaan Pelaksanaan Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 .....	190
Tabel 3.92	
Kebijakan Strategis Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 .....	203
Tabel 3.93	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	204
Tabel 3.94	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 .....	205

Tabel 3.95	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Statistik tahun 2023 .....	206
Tabel 3.96	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Statistik .....	208
Tabel 3.97	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Statistik tahun 2023.....	209
Tabel 3.98	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Persandian tahun 2023 .....	210
Tabel 3.99	
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Persandian Tahun 2023.....	211
Tabel 3.100	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Persandian .....	212
Tabel 3.101	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Persandian tahun 2023 .....	214
Tabel 3.102	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan kebudayaan tahun 2023 .....	215
Tabel 3.103	
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kebudayaan tahun 2023.....	216
Tabel 3.104	
Prestasi Pelaksanaan program urusan Kebudayaan Tahun 2023 .....	216
Tabel 3.105	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Kebudayaan .....	217
Tabel 3.106	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kebudayaan tahun 2023.....	218
Tabel 3.107	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan tahun 2023.....	220
Tabel 3.108	
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan tahun 2023.....	221
Tabel 3.109	
Prestasi Pelaksanaan program urusan Perpustakaan Tahun 2023 .....	222
Tabel 3.110	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Perpustakaan .....	223
Tabel 3.111	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perpustakaan tahun 2023.....	224

Tabel 3.112	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan tahun 2023 .....	225
Tabel 3.113	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan tahun 2023 .....	227
Tabel 3.114	Prestasi Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan tahun 2023 .....	227
Tabel 3.115	Kebijakan Strategis Urusan Kearsipan tahun 2023 .....	228
Tabel 3.116	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Kearsipan.....	229
Tabel 3.117	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kearsipan tahun 2023 .....	230
Tabel 3.118	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pertanahan tahun 2023 .....	231
Tabel 3.119	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pertanahan tahun 2023.....	232
Tabel 3.120	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pertanahan.....	233
Tabel 3.121	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pertanahan tahun 2023 .....	234
Tabel 3.122	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2023 .....	235
Tabel 3.123	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.....	237
Tabel 3.124	Kebijakan Strategis Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2023.....	238
Tabel 3.125	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan.....	239
Tabel 3.126	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2023 .....	241
Tabel 3.127	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata tahun 2023 .....	242



Tabel 3.128	
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pariwisata Tahun 2023 .....	243
Tabel 3.129	
Prestasi pelaksanaan program	
Urusan Pariwisata tahun 2023 .....	244
Tabel 3.130	
Kebijakan Strategis Urusan Pariwisata tahun 2023 .....	245
Tabel 3.131	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan	
Urusan Pariwisata .....	246
Tabel 3.132	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan	
Urusan Pariwisata tahun 2023 .....	247
Tabel 3.133	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
Urusan Pertanian tahun 2023 .....	248
Tabel 3.134	
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pertanian tahun 2023 .....	250
Tabel 3.135	
Prestasi Pelaksanaan Program	
Urusan Pertanian tahun 2023 .....	251
Tabel 3.136	
Kebijakan Strategis Urusan Pertanian tahun 2023 .....	252
Tabel 3.137	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan	
Urusan Pertanian .....	255
Tabel 3.138	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan	
Urusan Pertanian tahun 2023 .....	256
Tabel 3.139	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
Urusan Perdagangan tahun 2023 .....	257
Tabel 3.140	
Kebijakan Strategis Urusan Perdagangan tahun 2023 .....	260
Tabel 3.141	
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan	
Urusan Perdagangan .....	261
Tabel 3.142	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan	
Urusan Perdagangan tahun 2023 .....	263
Tabel 3.143	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
Urusan Perindustrian tahun 2023 .....	264
Tabel 3.144	
Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Perindustrian tahun 2023 .....	265

Tabel 3.145	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Perindustrian .....	266
Tabel 3.146	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Perindustrian tahun 2023.....	268
Tabel 3.147	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi tahun 2023.....	268
Tabel 3.148	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Transmigrasi .....	270
Tabel 3.149	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Transmigrasi tahun 2023.....	271
Tabel 3.150	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah tahun 2023 .....	272
Tabel 3.151	Inovasi Pelaksanaan Program Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2023 .....	275
Tabel 3.152	Prestasi Pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2023 .....	277
Tabel 3.153	Kebijakan Strategis Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2023 .....	278
Tabel 3.154	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah.....	281
Tabel 3.155	Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	287
Tabel 3.156	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan tahun 2023 .....	288
Tabel 3.157	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2023.....	290
Tabel 3.158	Kebijakan Strategis Urusan Penunjang Pengawasan tahun 2023 .....	291
Tabel 3.159	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan .....	292

Tabel 3.160	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan urusan penunjang Pengawasan tahun 2023 .....	294
Tabel 3.161	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan tahun 2023.....	295
Tabel 3.162	Inovasi pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan tahun 2023.....	297
Tabel 3.163	Prestasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Tahun 2023.....	298
Tabel 3.164	Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan tahun 2023 .....	298
Tabel 3.165	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan .....	300
Tabel 3.166	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan tahun 2023.....	302
Tabel 3.167	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan tahun 2023 .....	303
Tabel 3.168	Inovasi pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan tahun 2023 .....	305
Tabel 3.169	Prestasi pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan tahun 2023 .....	305
Tabel 3.170	Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan tahun 2023 .....	306
Tabel 3.171	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan.....	308
Tabel 3.172	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan tahun 2023 .....	309
Tabel 3.173	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan tahun 2023 .....	310
Tabel 3.174	Inovasi pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan tahun 2023 .....	312

Tabel 3.175	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan .....	313
Tabel 3.176	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan tahun 2023 .....	315
Tabel 3.177	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 .....	316
Tabel 3.178	Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 .....	317
Tabel 3.179	Prestasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 .....	318
Tabel 3.180	Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 .....	318
Tabel 3.181	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan ...	319
Tabel 3.182	Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 .....	320
Tabel 3.183	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD tahun 2023....	322
Tabel 3.184	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD tahun 2023....	324
Tabel 3.185	Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 .....	325
Tabel 3.186	Inovasi pelaksanaan program Urusan Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 .....	327
Tabel 3.187	Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 .....	328

Tabel 3.188	
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi	
Pemerintahan tahun 2023 .....	329
Tabel 3.189	
Inovasi pelaksanaan program Urusan Penunjang	
Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan tahun 2023 .....	331
Tabel 3.190	
Prestasi/Penghargaan pelaksanaan program	
Urusan Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan tahun 2023 .....	335
Tabel 3.191	
Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pelaksanaan	
Urusan Penunjang	
Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan tahun 2023 .....	337
Tabel 4.1	
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi	
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten	
Tahun Anggaran 2023.....	341

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 DASAR HUKUM**

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagai wilayah Daerah Otonom dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam bidang pemerintahan, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, dimana jabatan Kepala Daerah dipangku oleh Fungsionalis, sehingga Bupati tidak lagi merangkap sebagai Kepala Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1957 Nomor : Pem.10/2/18, yang membentuk jabatan baru di lingkungan pamong praja, yaitu Pejabat Bupati atau disingkat Pd. Bupati yang dipangku oleh Patih setempat. Patih inilah sebagai Kepala Corps Pamong Praja yang sehari-harinya disertai tugas-tugas Pemerintahan Pusat, sedangkan Bupati diberikan kedudukan sebagai Bupati dp (diperbantukan) Residen (Surakarta) yang bertempat tinggal di Daerah Swatantra Tingkat II (Kabupaten) Klaten, sejak tanggal 1 Agustus 1958. Disamping itu juga masih ada pejabat yang disebut Kepala Daerah, yang dalam prakteknya bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Swatantra yang bersangkutan yang menjalankan tugas-tugas otonomi dan medebewind, sehingga ada dualisme jabatan.

Pada Tahun 1959 terbitlah Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, yang menetapkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh sebuah badan yang bernama Badan Pemerintahan Harian. Disamping itu, Penetapan Presiden ini juga memuat tentang penyerahan tugas-tugas Pemerintahan Umum kepada Pemerintahan Daerah. Namun demikian peraturan tersebut baru direalisasikan pada Tahun 1963 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 jo. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963. Sehingga dengan diterbitkannya peraturan tersebut berdampak dihapusnya dualisme dalam Pemerintahan Daerah, dimana telah disatukan kembali Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan bekas Pamong Praja ke dalam corps Pemerintahan Daerah. Bersamaan dengan itu, maka hapuslah pula Pemerintahan Kawedanan dengan Wedananya dan beralih sebagai fungsionaris pembantu/penghubung Bupati Kepala Daerah. Dengan demikian, maka Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Pamong Praja juga disatukan lagi pada satu tempat. Kemudian untuk menyempurnakan struktur

Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 1965 diterbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Melihat sejarah-sejarah yang terjadi di Kabupaten Klaten seperti di atas, maka tim penggali Hari Jadi Kabupaten Klaten memilih tanggal pendirian benteng Klaten sebagai hari dan tanggal kelahiran Kabupaten Klaten. Hal ini didasarkan pada peristiwa awal munculnya nama Klaten dalam sumber sejarah (dasar nomenklatur) dan asas kontinuitas peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Klaten. Di samping itu dukungan sumber sejarah tertulis tentang pendirian Benteng Klaten juga menjadi dasar dipilihnya tanggal 28 Juli 1804 sebagai hari lahirnya Kabupaten Klaten dan telah ditetapkan dengan Perda Nomor 12 tahun 2007, tanggal 18 Juni 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Klaten.

## 1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

- **Kabupaten Klaten**, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Maju**, merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.
  - Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
  - Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
  - Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
  - Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya

terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

- **Mandiri**, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.
- **Sejahtera**, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai. Selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupun non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.



Strategi Pembangunan Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

**1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi.**

Misi pertama ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas). Sasaran yang ingin diciptakan, yaitu: terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pengendalian konflik sosial dan kesadaran politik masyarakat;
- b. Meningkatkan penegakan perda dan pemberdayaan linmas;
- c. Meningkatkan kinerja pemadaman kebakaran.

**2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi.**

Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah, dan
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta ekstensifikasi dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru;
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- d. Meningkatkan pengawasan intern dan pengawasan khusus, serta pengendalian risiko;
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- f. Memperkuat inovasi dan tata kelola kelitbangan dalam mendukung pencapaian prioritas daerah;
- g. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang Smart City;
- h. Meningkatkan pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi;
- i. Meningkatkan implementasi pengembangan single data Kabupaten Klaten;

- j. Mengoptimalkan penerapan merit sistem dalam manajemen kepegawaian;
- k. Meningkatkan ASN yang berkualitas;
- l. Meningkatkan sinergitas peran dunia usaha dalam pembangunan daerah;
- m. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- n. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- o. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan;
- p. Meningkatkan layanan kearsipan dan pengelolaan arsip secara baku di seluruh Perangkat Daerah;
- q. Meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- r. Meningkatkan kualitas layanan sekretariat DPRD kepada DPRD.

**3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan.**

Misi ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, dengan indikator kinerja tujuan adalah pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan
- 2) Meningkatnya investasi daerah.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan destinasi wisata, optimalisasi promosi dan pemasaran, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan;
- c. Mengembangkan industri kecil berbahan baku lokal yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing;
- d. Mengembangkan usaha mikro dan koperasi melalui pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, teknologi produksi dan pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City;
- e. Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana prasarana dan pengendalian bencana pertanian;
- f. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap, pengembangan produk olahan ikan dan meningkatkan tingkat konsumsi ikan;
- g. Meningkatkan investasi sesuai rencana induk penanaman modal daerah terutama pada sektor pertanian, pariwisata dan potensi investasi dengan adanya jalan tol.

**4. Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.** Misi keempat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik dan 2) Rasio konektivitas. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas pembangunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026
- 2) Meningkatnya capaian universal access (100-0- 100)
- 3) Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang; dan
- 4) Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pembangunan jalan dan penataan sistem drainase untuk menunjang konektivitas dan pengembangan wilayah;
- b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang irigasi pertanian;
- c. Meningkatkan kualitas bangunan gedung guna mendukung pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap air bersih;
- e. Meningkatkan akses sanitasi dan perilaku higienis;
- f. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh;
- g. Peningkatan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya;
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan terintegrasi.

**5. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender.** Misi kelima ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2) Persentase Penduduk Miskin; dan 3) Indeks Pembangunan Gender. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing;
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
- 4) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs;
- b. Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan;
- c. Meningkatkan aktualisasi budaya dalam kehidupan masyarakat;
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis keluarga;
- e. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
- f. Meningkatkan kegemaran dan budaya olahraga dikalangan masyarakat;
- g. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana;
- h. Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- i. Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dan pengembangan BUMDes;
- j. Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian (skill) sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;
- k. Fasilitasi dan penguatan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah;
- l. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan.

**6. Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.** Misi keenam ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan,
- 2) Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3);
- 3) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau;
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan;
- d. Memperkuat kapasitas dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan masa darurat bencana, dan penanganan pasca bencana.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2023 diarahkan untuk **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkelanjutan”**. Penekanan “Pertumbuhan Ekonomi” mengandung makna

bahwa kemampuan daerah dalam mengembalikan dan memulihkan pertumbuhan ekonomi daerah akibat Pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diarahkan melalui penguatan sumber daya manusia dan sarana prasarana wilayah di semua sector. Sedangkan makna “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah” diarahkan untuk pengembangan/optimalisasi sektor/produk unggulan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam penjabarannya, dirumuskan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

### **1. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal**

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing. Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan, pengembangan daya Tarik wisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan dan pengembangan produk asli Kabupaten Klaten. Hal ini untuk meningkatkan daya tarik Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan Investasi Daerah. Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Nasional yakni Ekonomi. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan melalui program unggulan: Klaten Mapan, Klaten Keren, Klaten Laris dan Klaten Santer.

- 1) **Klaten Mapan**, Mapan singkatan dari Mandiri Pangan. Mandiri Pangan yang dimaksud adalah Kabupaten Klaten mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok utama (Padi dan Jagung) masyarakat secara mandiri dan menjadi penyangga kebutuhan pangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Mandiri Pangan juga dapat diartikan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan. Klaten Mapan dengan fokus sebagai berikut:
  - a. Pengembangan dan branding padi Rojolele varietas Srinar dan Srinuk; pengembangan ternak unggul berbasis potensi lokal; peningkatan dan pengembangan produk unggulan perkebunan;
  - b. Pengembangan pertanian organik; intensifikasi pengolahan; pembangunan pertanian berbasis kawasan dan teknologi; intensifikasi usaha tani; penggunaan benih bermutu dan bersertifikat; pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi; pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian; pencegahan, pengendalian, dan penanganan pasca panen serta promosi pemasaran;
  - c. Pengembangan infrastruktur pertanian;
  - d. Pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
  - e. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian, revitalisasi penyuluhan pertanian dan penguatan kelompok tani,
  - f. Peningkatan dan pengembangan Lumbung Pangan; dan penguatan

- kelembagaan pangan;
- g. Pemberdayaan usaha nelayan tangkap dan pembudidaya ikan skala kecil; peningkatan fasilitasi usaha; pengembangan produk olahan ikan; dan meningkatkan konsumsi ikan dikalangan masyarakat;
  - h. Penyediaan dan pendistribusian benih unggul; restocking di perairan umum; penguatan teknologi pemasaran produksi perikanan;
  - i. Kemudahan perijinan dengan optimalisasi teknologi informasi dan mall pelayanan publik; dan penyediaan basis data informasi investasi;
  - j. Peningkatkan iklim investasi dan promosi investasi berkelanjutan sesuai potensi dan peluang investasi; peningkatan kapasitas SDM; pengembangan pola kemitraan dan kerjasama investasi.
- 2) **Klaten Keren**, Keren berarti Kabupaten Klaten memiliki berbagai daya Tarik wisata dan ekonomi kreatif yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan dan membelanjakan uangnya di Klaten, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Klaten. Klaten Keren dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pengembangan Kawasan Pariwisata, desa wisata dan destinasi wisata berbasis potensi lokal yang terintegrasi dengan program nasional dalam menciptakan Klaten sebagai salah satu daerah tujuan wisata (single destination tourism) dan peningkatan kemitraan antar pelaku industri pariwisata;
  - b. Penerapan CHSE (Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan)); penyelenggaraan event budaya dan MICE; promosi digital dan partisipasi dalam pemasaran pariwisata tingkat nasional dan internasional;
  - c. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan didukung basis data ekonomi kreatif yang terintegrasi.
  - d. Membranding produk unggulan dan penguatan gerakan “Aku Cinta Produk Klaten” dan pengembangan basis data koperasi dan UKM.
- 3) **Klaten Laris**, Laris berarti sebuah ajakan untuk membeli dan mencintai produk asli Kabupaten Klaten diharapkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Klaten Laris dengan fokus sebagai berikut:
- a. Penguatan sentra industri dan 11 klaster industri; fasilitasi pemberdayaan IKM, mengintensifkan pembinaan teknologi produksi, perijinan usaha dan akses pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City; fasilitasi sertifikasi

- pekerja industri, serta pengembangan pola kemitraan industri kecil dengan industri menengah dan besar;
- b. Membranding produk unggulan dan penguatan gerakan “Aku Cinta Produk Klaten” dan pengembangan basis data koperasi dan UKM;
  - c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; penguatan kelembagaan koperasi dan UKM; pemberdayaan Klaster UKM berbasis teknologi informasi; fasilitasi akses permodalan dengan program subsidi bunga; dan serta peningkatan daya saing UKM dan koperasi.
- 4) **Klaten Santer**, Santer singkatan dari Sahabat Investor, dimana Kabupaten Klaten merupakan wilayah strategis yang berada diantara Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta, yang memiliki keunggulan kepariwisataan, pertanian dan zona Industri, serta memiliki konektivitas yang terintergrasi dan Kabupaten Klaten merupakan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN). Klaten Santer dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pengembangan kemitraan pemasaran produk unggulan daerah; mengembangkan promosi dan pameran; meningkatkan pengawasan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat; pengendalian ijin pasar modern dan perlindungan konsumen;
  - b. Peningkatan kualitas pasar tradisional;
  - c. Penambahan display khas produk klaten; Pemutakhiran basis data Industri Kecil Menengah; dan pengembangan kawasan peruntukan industri yang selaras dengan tata ruang;
  - d. Kemudahan perijinan dengan optimalisasi teknologi informasi dan mall pelayanan publik; dan penyediaan basis data informasi investasi;
  - e. Peningkatkan iklim investasi dan promosi investasi berkelanjutan sesuai potensi dan peluang investasi; peningkatan kapasitas SDM; pengembangan pola kemitraan dan kerjasama investasi.

## **2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran**

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Nasional yakni kemiskinan dan pengangguran. Persoalan kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan data verval BPS menunjukkan kenaikan persentase rumah tangga miskin dan peningkatan rumah tangga miskin serta Isu strategis lain terkait penanggulangan kemiskinan adalah mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan

sebagai salah satu prioritas pembangunan. Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada sinergitas dan harmonisasi penanganan kemiskinan berbagai sektor dan berbagai unsur pemangku kepentingan. Perluasan lapangan pekerjaan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM tenaga kerja. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan melalui program unggulan: Klaten Subur, Klaten Cetar, dan Klaten Tangkis.

- 1) **Klaten Subur**, Subur singkatan dari Subsidi Bunga Ringan, berarti memberikan kemudahan akses permodalan usaha bagi UMKM dengan cara memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 80% dari bunga bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

Klaten Subur dengan fokus sebagai berikut:

- a. Memperkuat kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, termasuk pengelolaan anggaran dan aset desa;
- b. Pembentukan dan penguatan tata kelola BUMDes dalam pengembangan potensi unggulan desa, dan mengembangkan kerjasama antar desa;
- c. Pemberian kemudahan akses permodalan usaha bagi UMKM.

- 2) **Klaten Cetar**, Cetar singkatan dari Cerdas dan Trampil, berarti meningkatkan kapasitas tenaga kerja di Kabupaten Klaten dari sisi soft skill dan hard skill dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan potensi pasar kerja, serta mampu menciptakan lapangan kerja/beriwirausaha. Klaten Cetar dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan jenis pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dunia usaha dan industri melalui Balai Latihan Kerja; Peningkatan peran lembaga pelatihan kerja swasta dan Balai Latihan Kerja Komunitas; pelatihan wirausaha; perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya; Tenaga Kerja Mandiri (TKM); Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG); Tenaga Kerja Sukarela (TKS);
- b. Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui Job fair dan Bursa Kerja online; fasilitasi hubungan industrial ketenagakerjaan dan industri; peningkatan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri, serta kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- 3) **Klaten Tangkis**, Tangkis singkatan dari Tangani Kemiskinan oleh seluruh perangkat daerah, didukung peran serta dunia usaha dan masyarakat. Penanganan kemiskinan dilaksanakan melalui program-program yang mengarah pada peningkatan akses pekerjaan yang layak, peningkatan pendapatan, dan pengurangan



beban pengeluaran, dan perlindungan sosial penduduk miskin. Klaten Tangkis dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar; penguatan terhadap fungsi rumah singgah serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- b. Penyempurnaan sistem perlindungan sosial termasuk didalamnya optimalisasi, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- c. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara terpadu dan lintas sektor.

### **3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional yakni Sumber Daya Manusia. Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya, kualitas kesehatan, dan kualitas pendidikan. Peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya difokuskan pada peningkatan kerukunan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang melibatkan lintas program dan sektoral. Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klaten. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan program unggulan: Klaten Toleran, Klaten Waras, dan Klaten Tuntas.

- 1) **Klaten Toleran**, Toleran berarti kerukunan masyarakat di Kabupaten Klaten terus terjaga salah satunya melalui peningkatan semangat “Gotong Royong” masyarakat dalam proses pembangunan, peningkatan nilai-nilai keagamaan, pengembangan kebudayaan, pembentukan FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) hingga tingkat Desa/Kelurahan. Klaten Toleran dengan fokus sebagai berikut:
  - a. Peningkatan sinergitas pencegahan dan pengendalian konflik sosial; penguatan sistem peringatan dini di lingkungan masyarakat;
  - b. Pembinaan revolusi mental berlandaskan ideologi Pancasila;
  - c. Pengkoordinasian penyusunan Perkada sebagai tindak lanjut Perda yang mengandung sanksi; optimalisasi pelaksanaan

- patroli; meningkatkan kuantitas anggota Satpol PP, dan Pemberdayaan petugas linmas;
  - d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi anggota Damkar;
  - e. Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran.
- 2) **Klaten Waras**, Waras berarti memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Klaten yang melibatkan lintas program dan lintas sektor dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengembangan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, dan peningkatan lingkungan kesehatan masyarakat, seperti Program Waskita (Klaten Wajib Awasi Bersama Untuk Kesehatan Ibu Bayi dan Balita) dan Program Seruling Bambu (Serbu dan Buru Stunting, Bekali Anak Menjadi Bibit Unggul), dan lain-lain. Klaten Waras dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pengendalian Covid-19 melalui pelaksanaan vaksin, penerapan protokol kesehatan, dan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat;
  - b. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita; optimalisasi penanganan penyakit, peningkatan edukasi terkait permasalahan kesehatan; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan;
  - c. Penyediaan pangan yang merata diseluruh wilayah, terjangkau dan terjamin keamanannya serta didukung penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah berbasis sumber daya lokal;
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga; meningkatkan pembinaan olahraga; meningkatkan kapasitas dan sertifikasi pelatih olahraga, serta meningkatkan kapasitas pemuda pelopor dan wirausaha muda;
  - e. Peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang dan pengembangan Kampung KB untuk meningkatkan Partisipasi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R);
  - f. Peningkatan pemberdayaan perempuan; implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak, serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis keluarga.
- 3) **Klaten Tuntas**, Tuntas singkatan dari turunkan anak tidak sekolah. Penanganan anak tidak sekolah merupakan wujud pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yaitu bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Klaten Tuntas dengan fokus sebagai berikut:
- a. Penyediaan Sarana dan prasarana PAUD;

- b. Pemberian insentif berupa beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu;
- c. Meningkatkan fasilitas pendidikan kesetaraan;
- d. Pembangunan taman budaya dan museum daerah;
- e. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

4. **Percepatan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah;**

Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur ditetapkan dalam rangka peningkatan aksesibilitas pusat-pusat pengembangan perekonomian wilayah dan penyediaan sarana prasarana dasar yang memadai bagi masyarakat. Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur diprioritaskan pada peningkatan kualitas jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung, serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan program unggulan: **Klaten Mantap. Klaten Mantap**, Mantap berarti Kabupaten Klaten dengan kualitas infrastruktur (jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah dalam kondisi mantap. Klaten Mantap dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan serta sistem drainase termasuk dukungan dalam pengendalian banjir khususnya Sungai Dengkeng, Sungai Bengawan Solo;
- b. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasaran sumberdaya air irigasi sumberdaya air secara merata termasuk di Rowojombor untuk menunjang irigasi pertanian, air minum, dan aktivitas pembidayaan perikanan;
- c. Peningkatan Pembangunan gedung pemerintah daerah;
- d. Pengembangan dan peningkatan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan;
- e. Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi;
- f. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi), peremajaan (revitalisasi) dan permukiman kembali (relokasi);
- g. Penyusunan rencana tata ruang;
- h. Pengendalian perijinan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang serta rencana detail tata ruang;

- i. Peningkatan perencanaan jaringan lalu lintas angkutan jalan; perencanaan dan penataan jaringan trayek;
- j. Pengelolaan terminal tipe C; penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan; penyediaan angkutan orang dan barang; penataan parkir, dan mendorong kepemilikan KIR kendaraan bermotor.

## 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prioritas ini difokuskan pada peningkatan perwujudan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan diprioritaskan pada pengelolaan persampahan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten diprioritaskan pada peningkatan kapasitas masyarakat Kabupaten Klaten dalam menghadapi bencana. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan program unggulan: Program Klaten Tangguh dan Klaten Lestari.

- 1) **Klaten Tangguh**, Tangguh berarti masyarakat Kabupaten Klaten mampu beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta mampu memulihkan diri dari dampak bencana yang dialami. Klaten Tangguh dengan fokus sebagai berikut:
  - a. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana, dan pelayanan informasi kebencanaan;
  - b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; penanganan pasca bencana; peningkatan kerjasama dan pembinaan relawan.
- 2) **Klaten Lestari**, Lestari berarti mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas secara berkelanjutan dan memiliki sistem pengelolaan sampah yang terpadu didukung peran serta masyarakat, serta penyediaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sampai ke tingkat Desa/Kelurahan. Klaten Lestari dengan fokus sebagai berikut:
  - a. Peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan dokumen lingkungan dan pemantauan kualitas air, tanah dan udara secara berkala;
  - b. Pembangunan taman; pengelolaan hutan kota, taman kota dan ruang publik lainnya.
  - c. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah; optimalisasi kinerja TPA; pengurangan sampah

dengan TPS 3R dan Bank Sampah; serta pengawasan dan pengendalian terhadap limbah dan bahan bercun berbahaya (B3).

d. Pemenuhan sarana dan prasarana persampahan hingga tingkat desa.

## 6. **Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi**

Prioritas ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada peningkatan inovasi pelayanan publik secara profesional, transparan dan akuntabel berorientasi pada good and clean governance. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan program unggulan: Klaten Cerdas dan Klaten Cekatan.

- 1) **Klaten Cerdas**, Cerdas adalah Klaten Smart City, merupakan Kota yang memanfaatkan berbagai sumberdaya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan Kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Klaten Smart City mencakup Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living dan Smart Environment, salah satu upayanya dalam mendorong Klaten Cerdas dengan mengupayakan internet masuk desa. Klaten Cerdas dengan fokus sebagai berikut:
  - a. Penguatan perangkat daerah terkait sistem perencanaan pembangunan; monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas; perbaikan sistem pengendalian intern pemerintah; pencegahan tindak pidana korupsi; pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; penjaminan mutu layanan; penerapan SOP; diklat aparatur; analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas; manajemen sumberdaya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur; manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur; pengukuran kinerja daerah; pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi;
  - b. Menyusun kajian potensi pajak dan retribusi daerah; dan perbaikan regulasi pajak dan retribusi daerah;
  - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola PAD; pemanfaatan teknologi informasi dalam penarikan pajak dan retribusi daerah; penertiban izin usaha;
  - d. Pengamanan administrasi (dan pengamanan fisik Barang Milik Daerah serta perbaikan tata kelola Barang Milik Daerah;
  - e. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; pengembangan zona integritas, dan peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;

- f. Perbaikan mekanisme dan harmonisasi dalam perumusan kebijakan, dan penguatan kapasitas aparatur perencana perangkat daerah.

## 2) **Klaten Cekatan**

Cekatan singkatan dari Cepat, Kreatif, Akuntabel dan Transparan, merupakan program unggulan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat sesuai standar, kreatif (inovatif), transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance, seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), Sipon Keduten, Matur Dokter, Titip Bandaku, dan lain-lain. Peningkatan pelayanan publik didorong agar berkualitas melalui digitalisasi pelayanan.

Klaten Cekatan dengan fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan;
- b. Pengembangan jaringan, sarana prasarana, dan aplikasi teknologi penunjang smart city;
- c. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
- d. Pelayanan persandian dalam pengamanan informasi;
- e. Peningkatan penyediaan data dan informasi single data Kabupaten Klaten;
- f. Perbaikan perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi kepegawaian;
- g. Penerimaan ASN sesuai dengan kebutuhan, dan peningkatan kompetensi ASN dengan pendidikan dan pelatihan;
- h. Peningkatan forum Corporate Social Responsibility (CSR).
- i. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah;
- j. Pelayanan dokumen administrasi dan kependudukan dengan jemput bola; pelayanan keliling ke desa dan kelurahan; pelayanan bagi masyarakat difabel dan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan;
- k. Penambahan dan peningkatan kualitas SDM Pustakawan; Pengembangan bahan bacaan dan perbaikan sarana prasarana perpustakaan;
- l. Pengembangan layanan buku digital;
- m. Penambahan dan Peningkatan kualitas SDM Arsiparis, dan peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan;
- n. Penyediaan layanan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan;

- o. Penyediaan layanan sekretariat DPRD kepada DPRD yang berkualitas;
- p. Peningkatan penyediaan data dan informasi single data Kabupaten Klaten;
- q. Perbaikan perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi kepegawaian;
- r. Penerimaan ASN sesuai dengan kebutuhan, dan peningkatan kompetensi ASN dengan pendidikan dan pelatihan;
- s. Peningkatan forum Corporate Social Responsibility (CSR);
- t. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah;
- u. Pelayanan dokumen administrasi dan kependudukan dengan jemput bola; pelayanan keliling ke desa dan kelurahan; pelayanan bagi masyarakat difabel dan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan;
- v. Penambahan dan peningkatkan kualitas SDM Pustakawan; Pengembangan bahan bacaan dan perbaikan sarana prasarana perpustakaan;
- w. Pengembangan layanan buku digital;
- x. Penambahan dan Peningkatan kualitas SDM Arsiparis, dan peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan;
- y. Penyediaan layanan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- z. Penyediaan layanan sekretariat DPRD kepada DPRD yang berkualitas.

### **1.3 DATA UMUM DAERAH**

#### **1. Data Geografis Wilayah**

##### **a. Letak Wilayah**

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kabupaten Klaten terletak antara 7<sup>o</sup>32`19" Lintang Selatan sampai 7<sup>o</sup>48`33" Lintang Selatan dan antara 110<sup>o</sup>26`14" Bujur Timur sampai 110<sup>o</sup>47`51" Bujur Timur. Dengan batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali,

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY),  
dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY)

**b. Luas Wilayah**

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan dengan luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 70.152,02 ha atau seluas 2,15 % dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha).

**2. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten semester II tahun 2023 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 1.296.692 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 644.914 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 651.778 jiwa. Jumlah penduduk di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan**  
**Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PRAMBANAN	26.148	26.564	52.712
2	GANTIWARNO	19.488	19.603	39.091
3	WEDI	26.166	26.550	52.716
4	BAYAT	32.189	32.185	64.374
5	CAWAS	28.810	29.529	58.339
6	TRUCUK	40.505	40.063	80.568
7	KEBONARUM	9.800	10.111	19.911
8	JOGONALAN	29.957	29.936	59.893
9	MANISRENGGO	21.777	22.133	43.910
10	KARANGNONGKO	18.505	18.915	37.420
11	CEPER	32.871	33.047	65.918
12	PEDAN	23.788	23.798	47.586
13	KARANGDOWO	21.703	22.170	43.873
14	JUWIRING	29.513	29.685	59.198
15	WONOSARI	31.925	32.138	64.063
16	DELANGGU	21.093	21.467	42.560
17	POLANHARJO	20.382	20.989	41.371
18	KARANGANOM	23.310	23.869	47.179
19	TULUNG	27.335	27.521	54.856
20	JATINOM	30.792	30.734	61.526
21	KEMALANG	20.065	20.307	40.372
22	NGAWEN	23.246	23.079	46.325



NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
23	KALIKOTES	18.757	18.852	37.609
24	KLATEN UTARA	24.217	24.686	48.903
25	KLATEN TENGAH	20.411	21.146	41.557
26	KLATEN SELATAN	22.161	22.701	44.862
<b>TOTAL</b>		<b>644.914</b>	<b>651.778</b>	<b>1.296.692</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2024

Berdasarkan kelompok umur penduduk di Kabupaten Klaten, 68,67% penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara umur 15 – 64 tahun yang mencapai 890.502 jiwa. Sedangkan 20,70% lainnya yaitu 268.470 jiwa merupakan penduduk usia non produktif dari usia 0-14 tahun dan 10,62% atau 137.720 jiwa adalah penduduk usia 65 tahun ke atas. Rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten**  
**Menurut Kelompok Umur Tahun 2023**

NO	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (JIWA)	%
1	0 - 4 tahun	39.924	37.569	77.493	5,98
2	5 - 9 tahun	47.900	44.241	92.141	7,11
3	10 - 14 tahun	50.755	48.081	98.836	7,62
4	15 - 19 tahun	49.399	46.536	95.935	7,40
5	20 - 24 tahun	48.644	46.247	94.891	7,32
6	25 - 29 tahun	46.117	43.708	89.825	6,93
7	30 - 34 tahun	43.911	42.888	86.799	6,69
8	35 - 39 tahun	45.389	44.994	90.383	6,97
9	40 - 44 tahun	50.643	49.422	100.065	7,72
10	45 - 49 tahun	45.924	45.858	91.782	7,08
11	50 - 54 tahun	43.148	45.092	88.240	6,81
12	55 - 59 tahun	38.669	43.345	82.014	6,32
13	60 - 64 tahun	32.769	37.799	70.568	5,44
14	65 - 69 tahun	24.700	27.616	52.316	4,03
15	70 - 74 tahun	16.842	19.073	35.915	2,77
16	>= 75 tahun	20.180	29.309	49.489	3,82
<b>JUMLAH</b>		<b>644.914</b>	<b>651.778</b>	<b>1.296.692</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2024

Kondisi penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan jenis pekerjaannya sangat beragam. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Klaten memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian lepas sebanyak 353.845 jiwa, kemudian jumlah terbanyak kedua adalah penduduk dengan status pelajar/mahasiswa sebanyak

274.892 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pekerjaan**  
**Tahun 2023**

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	AKUNTAN	5	6	11
2	ANGGOTA BPK	2	-	2
3	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	33	8	41
4	ANGGOTA DPRD PROVINSI	1	2	3
5	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	1.122	1.466	2.588
6	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	1	-	1
7	APOTEKER	24	158	182
8	ARSITEK	33	5	38
9	BELUM/TIDAK BEKERJA	101.291	95.316	196.607
10	BIARAWAN/BIARAWATI	4	16	20
11	BIDAN	-	733	733
12	BUPATI	-	1	1
13	BURUH HARIAN LEPAS	210.696	143.149	353.845
14	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	59	27	86
15	BURUH PETERNAKAN	143	37	180
16	BURUH TANI/PERKEBUNAN	15.591	13.815	29.406
17	DOKTER	225	368	593
18	DOSEN	417	350	767
19	GURU	3.217	7.241	10.458
20	IMAM MESJID	12	-	12
21	INDUSTRI	182	93	275
22	JURU MASAK	18	27	45
23	KARYAWAN BUMD	274	180	454
24	KARYAWAN BUMN	1.557	829	2.386
25	KARYAWAN HONORER	1.622	2.313	3.935
26	KARYAWAN SWASTA	72.747	52.854	125.601
27	KEPALA DESA	335	30	365
28	KEPOLISIAN RI	1.501	74	1.575
29	KONSTRUKSI	200	17	217
30	KONSULTAN	72	10	82
31	MEKANIK	696	-	696
32	MENGURUS RUMAH TANGGA	30	141.557	141.587
33	NELAYAN/PERIKANAN	24	1	25
34	NOTARIS	27	37	64
35	PARAJI	2	11	13
36	PARANORMAL	5	1	6
37	PASTOR	28	-	28
38	PEDAGANG	8.076	11.684	19.760
39	PEGAWAI NEGERI SIPIL	8.064	7.674	15.738
40	PELAJAR/MAHASISWA	143.760	131.132	274.892
41	PELAUT	398	9	407
42	PEMBANTU RUMAH TANGGA	7	339	346
43	PENATA BUSANA	2	16	18
44	PENATA RAMBUT	11	54	65

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
45	PENATA RIAS	13	144	157
46	PENDETA	114	16	130
47	PENELITI	11	2	13
48	PENGACARA	58	9	67
49	PENSIUNAN	9.188	4.843	14.031
50	PENTERJEMAH	7	2	9
51	PENYIAR RADIO	2	1	3
52	PENYIAR TELEVISI			-
53	PERANCANG BUSANA	3	9	12
54	PERANGKAT DESA	2.108	628	2.736
55	PERAWAT	363	1.455	1.818
56	PERDAGANGAN	3.798	5.691	9.489
57	PETANI/PEKEBUN	11.004	8.465	19.469
58	PETERNAK	457	132	589
59	PIALANG	4	2	6
60	PROMOTOR ACARA	1	-	1
61	PSIKIATER/PSIKOLOG	1	11	12
62	SENIMAN	219	74	293
63	SOPIR	2.531	1	2.532
64	TABIB	13	2	15
65	TEKNISI	1	-	1
66	TENAGA TATA USAHA	1	1	2
67	TENTARA NASIONAL INDONESIA	1.723	19	1.742
68	TRANSPORTASI	375	10	385
69	TUKANG BATU	1.942	2	1.944
70	TUKANG CUKUR	72	3	75
71	TUKANG GIGI	17	2	19
72	TUKANG JAHIT	537	1.764	2.301
73	TUKANG KAYU	3.456	2	3.458
74	TUKANG LAS/PANDAI BESI	305	2	307
75	TUKANG LISTRIK	84	1	85
76	TUKANG SOL SEPATU	28	5	33
77	USTADZ/MUBALIGH	66	13	79
78	WAKIL BUPATI	1	-	1
79	WARTAWAN	75	14	89
80	WIRASWASTA	33.813	16.806	50.619
81	PEKERJAAN LAINNYA	9	7	16
	<b>TOTAL</b>	<b>644.914</b>	<b>651.778</b>	<b>1.296.692</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2024

### 3. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2023 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 1.296.692 jiwa sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 1.286.711 jiwa sehingga pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,776%. Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klaten pada tahun 2022-2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk**  
**di Kabupaten Klaten tahun 2022-2023**

Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
2022	2023	2022-2023
1.286.711	1.296.692	0,776

*Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2024*

#### 4. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten, Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 7.503 PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 2.709 PPPK, sehingga Total ASN di Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2023 sebanyak 10.212 ASN. Dengan rincian jumlah ASN laki-laki sebanyak 3.483 ASN dan jumlah ASN perempuan sebanyak 6.729 ASN. Rincian data ASN di Pemerintah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.5**  
**Data ASN Pemerintah Kabupaten Klaten**  
**menurut Perangkat Daerah Tahun 2023**

No	Perangkat Daerah	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26	21	5
2	Inspektorat Daerah	55	24	31
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	34	31	3
4	Sekretariat Daerah	135	80	55
5	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata	39	23	16
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34	13	21
7	Dinas Kesehatan	1.604	283	1.321
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	256	170	86
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	27	18	9
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	113	85	28
11	Dinas Lingkungan Hidup	123	111	12
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	184	151	33
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22	13	9
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	7	7
15	Dinas Pendidikan	6.802	2.005	4.797
16	Dinas Perhubungan	47	33	14
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	29	16	13
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26	9	17
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	32	23	9
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	33	15	18
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40	25	15
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16	13	3
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	12	5

No	Perangkat Daerah	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	74	44	30
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	32	17	15
26	Kecamatan Bayat	15	10	5
27	Kecamatan Cawas	10	5	5
28	Kecamatan Ceper	16	11	5
29	Kecamatan Delanggu	13	9	4
30	Kecamatan Gantiwarno	11	7	4
31	Kecamatan Jatinom	16	11	5
32	Kecamatan Jogonalan	12	5	7
33	Kecamatan Juwiring	13	7	6
34	Kecamatan Kalikotes	17	11	6
35	Kecamatan Karanganom	11	6	5
36	Kecamatan Karangdowo	16	10	6
37	Kecamatan Karangnongko	17	13	4
38	Kecamatan Kebonarum	13	8	5
39	Kecamatan Kemalang	13	10	3
40	Kecamatan Klaten Selatan	16	5	11
41	Kecamatan Klaten Tengah	34	19	15
42	Kecamatan Klaten Utara	22	11	11
43	Kecamatan Manisrenggo	14	11	3
44	Kecamatan Ngawen	14	7	7
45	Kecamatan Pedan	13	9	4
46	Kecamatan Polanharjo	16	13	3
47	Kecamatan Prambanan	17	8	9
48	Kecamatan Trucuk	11	4	7
49	Kecamatan Tulung	14	10	4
50	Kecamatan Wedi	16	8	8
51	Kecamatan Wonosari	18	13	5
	<b>TOTAL</b>	<b>10.212</b>	<b>3.483</b>	<b>6.729</b>

Sumber : BKPSDM Kabupaten Klaten tahun 2023 (Data 31 Desember 2023)

## 5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pada tahun 2023 Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten ditargetkan sebesar Rp2.651.538.742.197,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp2.674.775.213.427,00 Sehingga dari pendapatan tersebut terealisasi sebesar 100,88% dari target yang telah ditentukan. Adapun rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.6**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>326.447.398.322</b>	<b>339.039.059.562</b>	<b>103,86</b>
1	Pajak Daerah	155.000.000.000	165.852.621.120	107,00
2	Retribusi Daerah	16.054.516.821	18.784.804.890	117,01
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.741.480.894	21.741.480.548	100,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	133.651.400.607	132.660.153.004	99,26

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
<b>II</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.310.851.343.875</b>	<b>2.321.236.153.865</b>	<b>100,45</b>
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	2.064.148.165.567	<b>2.321.236.153.865</b>	<b>100,45</b>
	1 Dana perimbangan	1.671.963.836.567	1.695.216.201.456	101,39
	2 Insentif Fiskal	11.882.483.000	11.882.483.000	100,00
	3 Dana Desa	380.301.846.000	380.301.846.000	100,00
	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	246.703.178.308	233.835.623.409	94,78
	1 Pendapatan bagi hasil	235.191.178.308	222.908.195.166	94,78
	2 Bantuan Keuangan	11.512.000.000	10.927.428.243	94,92
<b>III</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>14.240.000.000</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>101,83</b>
	1 Pendapatan Hibah	14.240.000.000	14.500.000.000	101,83
<b>PENDAPATAN</b>		<b>2.651.538.742.197</b>	<b>2.674.775.213.427</b>	<b>100,88</b>

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2024 (data per tanggal 26 Februari 2024)

## 6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.141.832.418.499,00 dan dapat direalisasikan Rp2.843.755.495.798,00 atau mencapai 90,51%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.7**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023**

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.048.368.740.309</b>	<b>1.813.918.311.416</b>	<b>88,55</b>
1 Belanja Pegawai	1.104.348.700.587	974.218.788.878	88,22
2 Belanja Barang dan Jasa	835.553.082.222	734.742.952.742	87,93
3 Belanja Subsidi	2.000.000.000	1.907.074.332	95,35
4 Belanja Hibah	92.154.157.500	89.978.195.464	97,64
5 Belanja Bantuan Sosial	14.312.800.000	13.071.300.000	91,33
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>332.747.086.931</b>	<b>295.594.876.519</b>	<b>88,83</b>
1 Belanja Modal Tanah	5.562.000.000	5.009.187.370	90,06
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.245.784.370	103.690.199.242	89,97
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.316.519.808	81.821.621.133	80,76
4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.425.735.262	93.344.039.187	94,84
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.197.047.491	11.729.829.587	96,17
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>21.382.536.680</b>	<b>657.130.800</b>	<b>3,07</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>739.334.054.579</b>	<b>733.585.177.063</b>	<b>99,22</b>
1 Belanja Bagi Hasil	21.333.031.019	18.057.136.463	84,64
2 Belanja Bantuan Keuangan	718.001.023.560	715.528.040.600	99,66
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>3.141.832.418.499</b>	<b>2.843.755.495.798</b>	<b>90,51</b>

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2024 (data per tanggal 26 Februari 2024)

## 7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Total pendapatan, total belanja, total pembiayaan dan SILPA tahun 2023 serta SILPA tahun sebelumnya di Kabupaten Klaten secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.8**  
**Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023**

URAIAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	2.651.538.742.197	2.674.775.213.427
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	3.141.832.418.499	2.843.755.495.798
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	-490.293.676.302	-168.980.282.371
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>A</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	529.593.676.302	529.593.676.302
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	529.593.676.302	529.593.676.302
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	39.300.000.000	39.300.000.000
	1. Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000
	2. Penyertaan Modal Daerah	24.300.000.000	24.300.000.000
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	490.293.676.302	490.293.676.302
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>321.313.393.931</b>

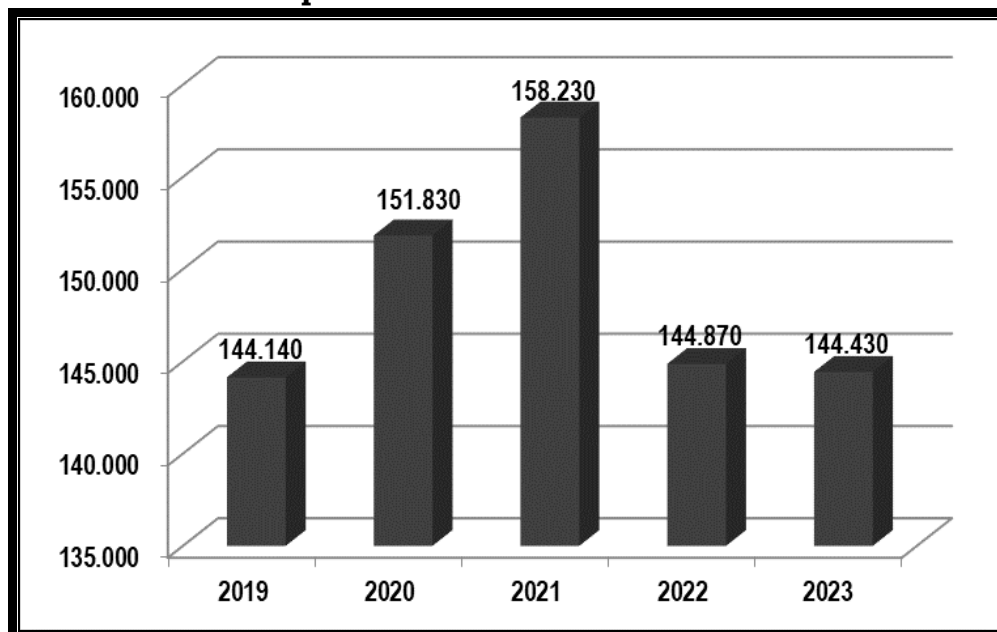
Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2024 (data per tanggal 26 Februari 2024)

## 8. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.

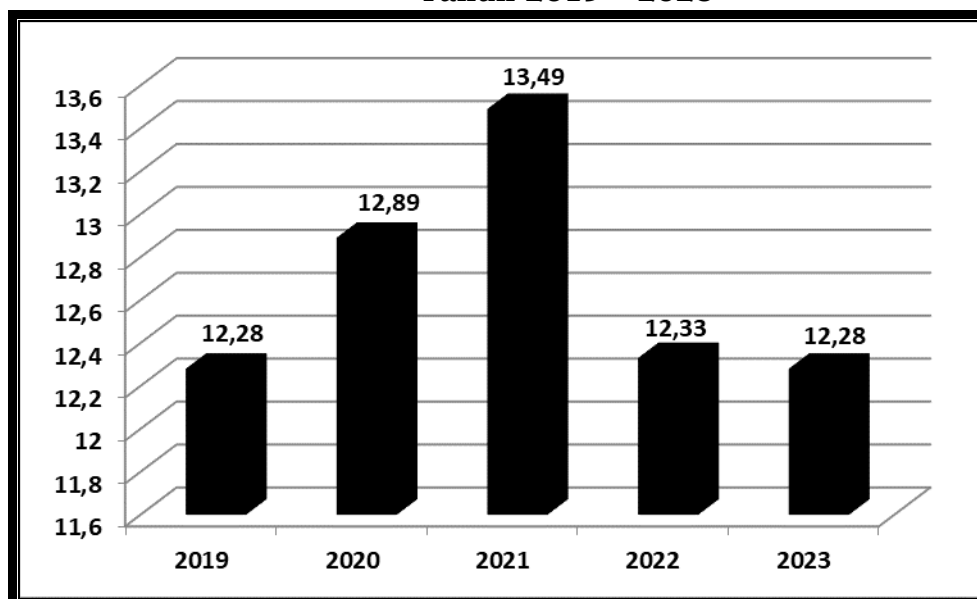
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten, garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 sebesar Rp488.102,00 sedangkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada Tahun 2023 sebanyak 144.430 jiwa dengan persentase 12,28%. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada rentang tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2.

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan antar waktu Jumlah Penduduk Miskin**  
**di Kabupaten Klaten tahun 2019 – 2023**



*Sumber : BPS Kab. Klaten Tahun 2023*

**Gambar 1.2**  
**Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2019 – 2023**



*Sumber: BPS Kabupaten Klaten, Tahun 2023*

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten pada tahun 2022-2023 menunjukkan grafik penurunan yang signifikan, Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 144.870 jiwa turun menjadi 144.430 jiwa pada tahun 2023. Demikian pula dengan Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 12,33% turun menjadi sebesar 12,28%.

Penurunan Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja positif Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menanggulangi kemiskinan. Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang telah dilakukan di Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai berikut :



1) **Pengurangan Beban Pengeluaran**

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DISSOSP3PPKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, BPBD. Melalui Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pelayanan Kesehatan termasuk jaminan kesehatan (termasuk KIS & PBI) Matur Dokter Klaten, pendataan dan pengelolaan fakir miskin dan PMKS, pemberian jaminan sosial, penanggulangan bencana, fasilitasi kependudukan, peningkatan ketahanan pangan keluarga, promosi dan konseling kesehatan reproduksi

2) **Peningkatan Pendapatan**

Perangkat Daerah : DISSOSP3PPKB, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Melalui Pembentukan KUBE (Kelompok Usaha Bersama), Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan, Pembentukan wirausaha baru, pemberdayaan PKK dalam masyarakat, fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil, sosialisasi Budaya baca dan literasi, pemberian bantuan kemitraan usaha, pengembangan kapasitas kelembagaan petani, Padat karya tunai desa, pemberian subsidi bunga

3) **Penurunan Kantong Kemiskinan**

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan. Melalui Pembangunan sarana prasarana pendidikan, rehab jaringan irigasi, rehab bendung irigasi, pembangunan SPAM, Pembangunan SPAL, Jasa penyedotan lumpur tinja, pembangunan rumah baru layak huni, Rusunawa, Penyediaan Sarpras utilitas umum di perumahan, penyediaan lumbung pangan antisipasi kerawanan pangan, penyediaan Angkutan umum, pembangunan sarana prasarana untuk petani, penyuluhan dan pelatihan transmigrasi, fasilitasi peningkatan dan kerjasama desa.

**4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten sudah mencapai 76,95 pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 77,59.

Capaian IPM di Kabupaten Klaten yang sebesar 76,95 di atas IPM Jawa Tengah yang sebesar 73,39 dan IPM nasional yang sebesar 74,39.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia. yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per kapita. Adapun Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.9**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2019-2023**

Indikator IPM	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup (tahun)	76,68	76,78	76,86	76,95	77,07
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,24	13,25	13,39	13,40	13,41
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,31	8,58	8,81	9,09	9,27
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)	12.074	11.921	12.017	12.522	12.968
<b>IPM</b>	<b>75,29</b>	<b>75,56</b>	<b>76,12</b>	<b>76,95</b>	<b>77,59</b>

*Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Selama periode 2022 - 2023, beberapa komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan. Usia Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun, Usia Harapan hidup saat lahir di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dari 76,95 tahun pada tahun 2022 menjadi 77,07 tahun pada tahun 2023.

Dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2023, kedua indikator ini meningkat dibanding tahun 2022. Angka Harapan Lama Sekolah meningkat dari 13,40 tahun pada tahun 2022 menjadi 13,41 tahun pada tahun 2023. Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 9,09 tahun pada tahun 2022 menjadi 9,27 tahun pada tahun 2023.

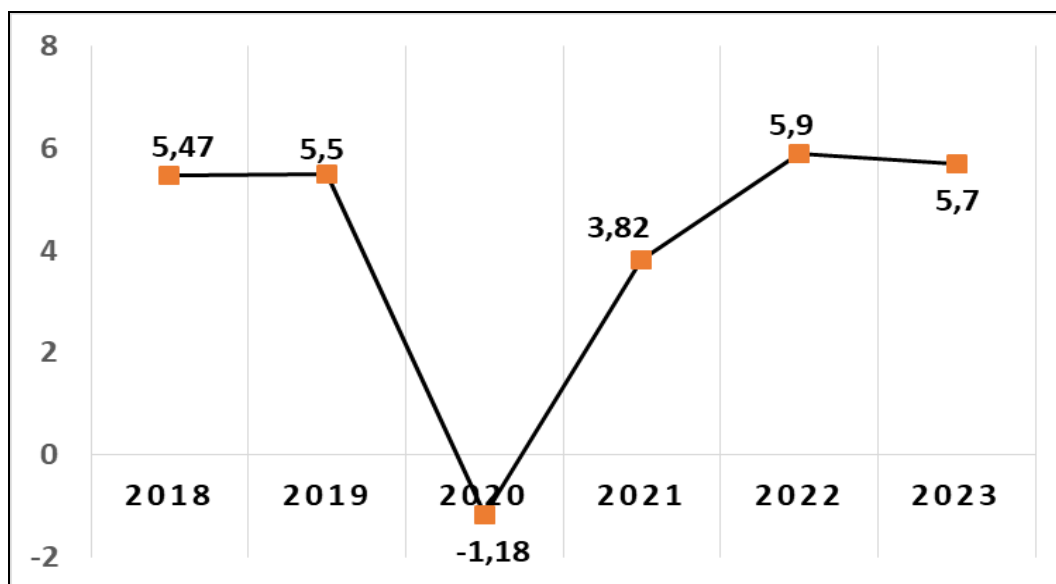
Dimensi yang mewakili standar hidup layak, direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Klaten per tahun mengalami kenaikan dari Rp12.522.000,- pada tahun 2022 menjadi Rp12.968.000,- pada tahun 2023.

## 5) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,7%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang sebesar 5,7% sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang sebesar 5,9%.

Capaian Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten yang sebesar 5,7% di atas Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 4,98% dan Pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten selama tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam gambar 1.3

**Gambar 1.3**  
**Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten (%)**  
**Tahun 2018 – 2023**

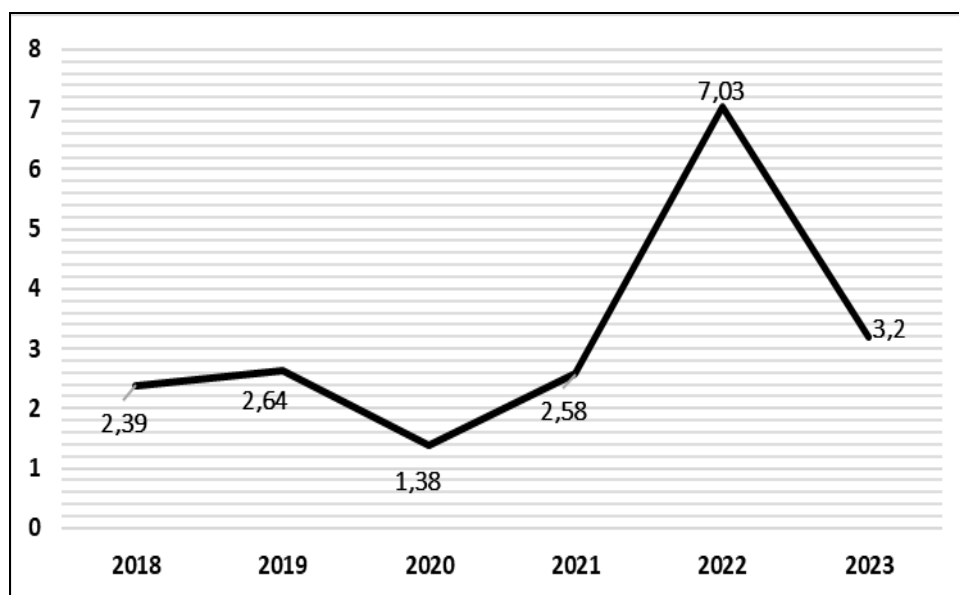


Sumber : BPS Kabupaten Klaten tahun 2024

## 6) Inflasi

Perkembangan inflasi tahunan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2023 sangat fluktuatif. Pada tahun 2022 Inflasi tahunan di Kabupaten Klaten sebesar 7,03% dan pada tahun 2023 sebesar 3,2%. Pada tahun 2021, 2022 dan 2023, tingkat inflasi tahunan Kabupaten Klaten diambil dari tingkat inflasi tahunan Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2021 penghitungan inflasi di Jawa Tengah hanya dilakukan di 6 (enam) Kabupaten/Kota dengan SBH (Standar Biaya Hidup) yaitu Cilacap, Purwokerto, Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal. Perkembangan laju inflasi tahunan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 1.4.

**Gambar 1.4**  
**Inflasi di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2018 – 2023**



*Sumber : Bagian Perekonomian Setda Klaten tahun 2024*

Berdasarkan gambar di atas, laju inflasi tahunan selama Tahun 2018-2023 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, inflasi tahunan pada tahun 2023 yang sebesar 3,2% lebih baik jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 7,03%.

**7) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 sebesar 4,20%. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 turun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,31%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 sebesar 66,71% atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 68,66%. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten pada Tahun 2019 – 2023 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam Tabel 1.10

**Tabel 1.10**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %**  
**dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %**  
**di Kabupaten Klaten tahun 2019 – 2023**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,79	68,33	66,89	68,66	66,71
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,55	5,46	5,48	4,31	4,20

*Sumber : BPS Kabupaten Klaten Tahun 2023*

## 8) Pendapatan Per Kapita

Perhitungan pendapatan per kapita tidak dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga data pendapatan per kapita menggunakan pendekatan Pengeluaran Per Kapita. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Klaten tahun 2022 sebesar Rp12.522.000,00 meningkat mejadi Rp12.968.000,00 pada tahun 2023. Adapun data pengeluaran per kapita Kabupaten Klaten tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.11**  
**Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten tahun 2019 – 2023**

Tahun	Pengeluaran Per Kapita (Dalam Rupiah)
2019	12.074.000
2020	11.921.000
2021	12.017.000
2022	12.522.000
2023	12.968.000

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

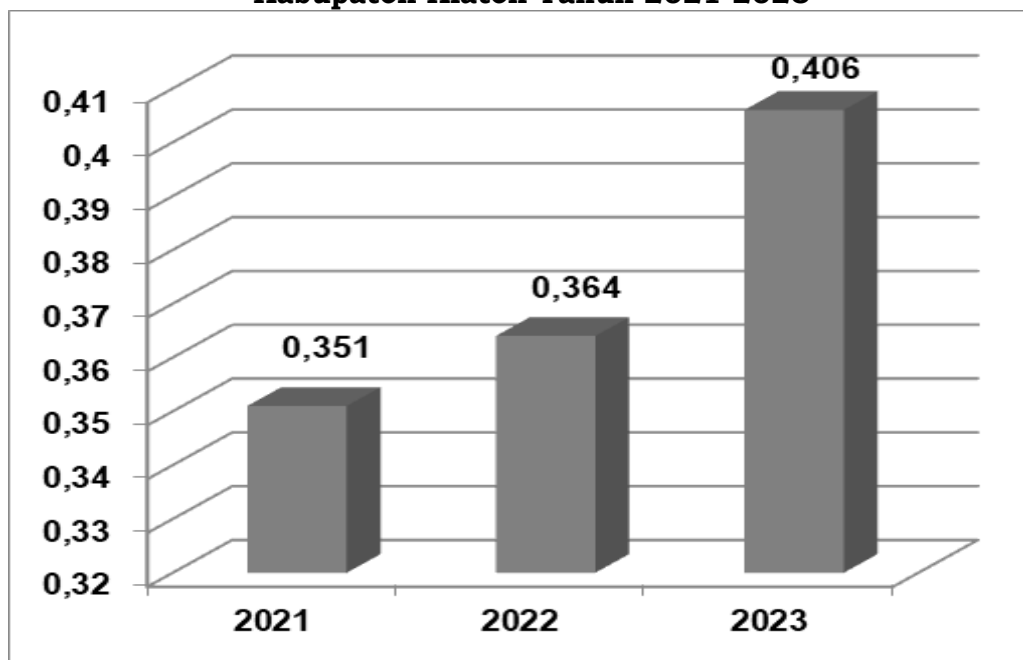
## 9) Ketimpangan Pendapatan

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Perubahan *Gini Ratio* merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,4 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”, nilai antara 0,4 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “sedang” dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Semakin besar *Gini Ratio* merupakan indikasi bahwa perbedaan pendapatan antar penduduk semakin melebar. Bantuan sosial Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah sangat membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran yang kemudian berdampak pada pengurangan ketimpangan pendapatan penduduk.

Kondisi ketimpangan di Kabupaten Klaten yang digambarkan dari angka *Gini Ratio* pada periode 2021-2023 bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tersaji dalam Gambar di bawah ini :

**Gambar 1.5**  
**Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)**  
**Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2021, *Gini Ratio* di Kabupaten Klaten sebesar 0,351 kemudian naik menjadi 0,364 di Tahun 2022 dan meningkat menjadi 0,406 di tahun 2023. *Gini Ratio* di Kabupaten Klaten sebesar 0,406 di Tahun 2023 masuk kategori “sedang” dikarenakan masih di bawah angka 0,5. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 termasuk dalam ketimpangan pendapatan “sedang”.

## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah selalu berkembang sesuai dengan tuntutan publik yang menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan dan akuntabel, untuk itu pengelolaan keuangan disesuaikan dengan perkembangan program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi prioritas dalam Pembangunan Daerah. Disamping itu Pengelolaan keuangan daerah selalu disesuaikan dengan arah kebijakan umum maupun prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Klaten yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok, dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta adanya keterpaduan program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sehingga terdapat sinergi untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Penerimaan Daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber

pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;

2. Pengeluaran Daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata sesuai prioritas daerah agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan umum, serta pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.

Dalam perjalanan di tahun anggaran 2023 terdapat dinamika perubahan yang mempengaruhi APBD Kabupaten Klaten dan berdampak terhadap penggunaan anggaran dalam rangka optimalisasi kinerja organisasi pemerintah Kabupaten Klaten. Sesuai ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan dengan merubah Penjabaran APBD dengan kriteria pergeseran antar objek dalam jenis belanja yang sama, pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja yang sama, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek belanja yang sama atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek belanja. Perubahan Penjabaran APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Kondisi-kondisi tertentu

Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan penyesuaian anggaran sebanyak (6) enam kali selama tahun anggaran 2023 yang meliputi anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan memedomani aturan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Penyesuaian anggaran tersebut diantaranya :

- a. Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang sumber dananya dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penyesuaian



program kegiatan dimaksud mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan/regulasi dan/atau petunjuk teknis yang terbit setelah APBD Kabupaten Klaten ditetapkan, diantaranya mengakomodir DBHCHT, Dana Alokasi Khusus, dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah.

- b. Pengalokasian anggaran Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya untuk Tahun Anggaran 2023
- c. Pengalokasian anggaran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada Tahun Anggaran 2023
- d. Pengelolaan dana BOS 2023

Perkembangan perubahan anggaran selama tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Perkembangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**selama Tahun 2023**

Uraian	Perda/Perkada	Dasar Hukum Perubahan
Perubahan 1	Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kab. Klaten TA 2023; Tgl 20 Maret 2023	a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
		b Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal
		c Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023
		d Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2023 2021 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2023
		e Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023
		f Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023
		g Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 30 Desember 2022 Nomor 900/0021642 perihal Penyampaian Alokasi Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Peraturan Gubernur Nomor

Uraian	Perda/Perkada	Dasar Hukum Perubahan
		38 Tahun 2022 Jawa Tengah Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023
Perubahan 2	Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kab. Klaten TA 2023; Tgl 23 Juni 2023	<p>a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/Pmk.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus</p> <p>b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023</p> <p>c Surat sediaan Sekretaris Daerah Nomor 377/30 Tanggal 28 Mei 2023 perihal Tindaklanjut Pengalokasian Anggaran DAU SG (<i>Specific Grant</i>) Tahun Anggaran 2023</p> <p>d Surat Sediaan Sekretaris Daerah Nomor 707/30 Tanggal 13 Juni 2023 perihal Tindaklanjut Pengalokasian Anggaran DAU SG (<i>Specific Grant</i>) Tahun Anggaran 2023</p>
Perubahan 3	Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kab. Klaten TA 2023; Tgl 10 Juni 2023	<p>a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023</p> <p>b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik</p> <p>c Surat Sediaan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050.4.2/3666/05/14 Tanggal 26 Juni 2023 perihal Permohonan Perubahan Rincian dan Standar Harga Belanja Bersumber Dana DAK Non Fisik (BOK Puskesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2023</p>
Perubahan 4 (Perubahan APBD)	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten Tahun Anggaran 2023; Tgl 16 Oktober 2023	<p>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2023</p> <p>b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah</p>

Uraian	Perda/Perkada	Dasar Hukum Perubahan
	Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten TA 2023; Tgl 16 Oktober 2023	c Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kab. Klaten dengan DPRD Kab. Klaten Nomor 910/518/30 dan 170/4409/10 tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023; tanggal 12 Agustus 2023 d Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kab. Klaten dengan DPRD Kab. Klaten Nomor 910/519/30 dan 170/4410/10 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023; tanggal 12 Agustus 2023 e Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/522/30 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD/RKA-SKPD Selaku SKPKD dan RBA BLUD APBD TA 2023
Perubahan 5	Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Klaten TA 2023; Tgl 13 November 2023	a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023
Perubahan 6	Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Klaten TA 2023; Tgl 7 Desember 2023	a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah

## 2.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah atau tingkat kemandirian ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang atau tingkat kemandirian keuangan daerah meningkat. Sedangkan dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan

pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Kebijakan perubahan pendapatan daerah antara lain dipengaruhi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal penyusunan APBD berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah. Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah maupun nasional dan dinamika kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022, dari sisi pendapatan perlu penyesuaian baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah.

Beberapa perubahan tersebut diantaranya :

1. Perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 30 Desember 2022 Nomor 900/0021642 perihal Penyampaian Alokasi Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 Jawa Tengah Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

Gambaran ringkas perubahan pendapatan dan realisasi pendapatan disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Perubahan dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023**

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>303.140.818.200</b>	<b>326.447.398.322</b>	<b>339.039.059.562</b>	<b>103,86</b>
1	Pajak Daerah	126.537.540.200	165.852.621.120	165.852.621.120	107,00
2	Retribusi Daerah	17.325.109.000	18.784.804.890	18.784.804.890	117,01
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.586.842.000	21.741.480.548	21.741.480.548	100,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	144.691.327.000	132.660.153.004	132.660.153.004	99,26
<b>II</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.217.331.586.237</b>	<b>2.310.851.343.875</b>	<b>2.321.236.153.865</b>	<b>100,45</b>
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	2.050.062.944.530	2.064.148.165.567	<b>2.321.236.153.865</b>	<b>100,45</b>
1	Dana perimbangan	1.680.269.248.530	1.671.963.836.567	1.695.216.201.456	101,39
2	Insentif Fiskal	0	11.882.483.000	11.882.483.000	100,00
3	Dana Desa	369.793.696.000	380.301.846.000	380.301.846.000	100,00
	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	167.268.641.707	246.703.178.308	233.835.623.409	94,78
1	Pendapatan bagi hasil	167.268.641.707	235.191.178.308	222.908.195.166	94,78
2	Bantuan Keuangan	0	11.512.000.000	10.927.428.243	94,92
<b>III</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>14.240.000.000</b>	<b>14.240.000.000</b>	<b>14.500.000.000</b>	<b>101,83</b>
1	Pendapatan Hibah	14.240.000.000	14.240.000.000	14.500.000.000	101,83
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.534.712.404.437</b>	<b>2.651.538.742.197</b>	<b>2.674.775.213.427</b>	<b>100,88</b>

*Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2024 (data per tanggal 26 Februari 2024)*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 sebesar Rp339.039.059.562,00 atau mencapai 103,86% dari target yang diharapkan sebesar Rp326.447.398.322,00.

Pendapatan Transfer terbagi menjadi dua yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Insentif Fiskal dan Dana Desa, sedangkan Tranfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan

Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2023 Pendapatan Transfer realisasi sebesar Rp2.321.236.153.865,00 atau 100,45% dari target yang direncanakan sebesar Rp2.310.851.343.875,00.

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Klaten yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Hibah. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp14.500.000.000,00 atau mencapai 101,83% dari target yang direncanakan sebesar Rp14.240.000.000,00.

Kendala-kendala secara umum dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran pajak;
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah dalam hal pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Identifikasi potensi sumber pendapatan yang belum dioptimalkan;
- e. Kemampuan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyuluhan tentang arti penting kewajiban masyarakat dalam hal perpajakan sehingga kesadaran dalam membayar pajak diharapkan dapat lebih meningkat. Penerapan teknologi informasi dan kerjasama dengan perbankan untuk mempermudah dalam hal pembayaran pajak, serta memperbanyak loket-loket pembayaran secara online dan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP);
- b. Peningkatan kualitas SDM pengelola pajak dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan bimbingan teknis ataupun pelatihan terkait pengelolaan pajak, dan membentuk sinergitas antar *stakeholder* seperti BPN, KPP Pratama, Samsat, Perijinan dan aparat penegak hukum dalam pengawasan pajak, sehingga ada persamaan persepsi untuk memaksimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah sebagai pilar utama penopang keberlangsungan proses Pemerintahan Daerah;
- c. Meningkatkan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Mendorong munculnya objek-objek baru dengan memberikan kemudahan dalam investasi dan perijinan, serta peningkatan pelayanan dan pengembangan jenis layanan baru untuk retribusi dan BLUD;
- e. Studi potensi dengan melibatkan akademisi sehingga potensi sumber pendapatan dapat teridentifikasi dengan baik sekaligus upaya meningkatkan optimalisasi pengelolaan potensi tersebut.

## **2.2 KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH DAN REALISASI BELANJA DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah disusun berdasarkan pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan standardisasi barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah kemudian dirinci menurut Program dan Kegiatan yang meliputi target dan sasaran, indikator capaian Keluaran, dan indikator capaian Hasil. Indikator capaian Hasil dan Keluaran ini disusun berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja dan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Sesuai Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun berjalan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi awal dalam KUA diperlukan perubahan APBD Tahun 2023 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah;
2. Perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2023 sesuai dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, dana transfer dari

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun anggaran 2022 dan potensi riil pendapatan asli daerah yang dapat diraih;

3. Perubahan penganggaran Belanja Daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, mengakomodir kegiatan yang bersifat sangat prioritas dan mengalami pergeseran termasuk prioritas Kepala Daerah dengan RPJMD, penyesuaian belanja yang bersumber dari dana transfer pusat, dana transfer provinsi, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022, dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang belum terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2023;

Berkaitan dengan kondisi sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan dengan asumsi belanja gaji ASN, Non ASN dan PPPK yang harus direncanakan pada Perubahan APBD Tahun 2023;
- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengalami kenaikan, untuk belanja bantuan sosial dengan asumsi peruntukan pada Bantuan sosial RTLH kawasan lokasi kemiskinan ekstrim;
- 3) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU) dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 4) Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya. Untuk itu alokasi perencanaan terhadap belanja bantuan keuangan diasumsikan untuk infrastruktur pedesaan dimana sesuai dengan prioritas daerah yaitu pemulihan ekonomi;



- 5) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam, non alam maupun bencana sosial;
- 6) Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan tanggap darurat dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta percepatan pengurangan tingkat kemiskinan;
- 7) Memenuhi belanja prioritas pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2021-2026, serta target sasaran makro tahunan yang telah ditetapkan;
- 8) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program urusan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- 9) Pengalihan belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimtek, penyuluhan, dan sejenisnya untuk difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

Gambaran ringkas perubahan belanja daerah dan realisasi belanja daerah disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Perubahan dan Realisasi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Klaten Tahun 2023**

URAIAN		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>1.927.427.282.129</b>	<b>2.048.368.740.309</b>	<b>1.813.918.311.416</b>	<b>88,55</b>
1	Belanja Pegawai	1.220.295.448.875	1.104.348.700.587	974.218.788.878	88,22
2	Belanja Barang dan Jasa	639.260.159.754	835.553.082.222	734.742.952.742	87,93
3	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	1.907.074.332	95,35
4	Belanja Hibah	56.786.873.500	92.154.157.500	89.978.195.464	97,64
5	Belanja Bantuan Sosial	9.084.800.000	14.312.800.000	13.071.300.000	91,33
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>264.930.105.350</b>	<b>332.747.086.931</b>	<b>295.594.876.519</b>	<b>88,83</b>
1	Belanja Modal Tanah	4.800.000.000	5.562.000.000	5.009.187.370	90,06
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.211.127.950	115.245.784.370	103.690.199.242	89,97
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.270.291.750	101.316.519.808	81.821.621.133	80,76
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.310.079.130	98.425.735.262	93.344.039.187	94,84
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.338.606.520	12.197.047.491	11.729.829.587	96,17
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>18.031.743.947</b>	<b>21.382.536.680</b>	<b>657.130.800</b>	<b>3,07</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>		<b>606.626.774.592</b>	<b>739.334.054.579</b>	<b>733.585.177.063</b>	<b>99,22</b>
1	Belanja Bagi Hasil	14.876.335.339	21.333.031.019	18.057.136.463	84,64
2	Belanja Bantuan Keuangan	591.750.439.253	718.001.023.560	715.528.040.600	99,66
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>2.817.015.906.018</b>	<b>3.141.832.418.499</b>	<b>2.843.755.495.798</b>	<b>90,51</b>

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2024 (data per tanggal 26 Februari 2024)

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2023 sebesar Rp2.048.368.740.309,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.813.918.311.416,00 atau sebesar 88,55%.

Belanja Modal yang meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp332.747.086.931,00 dan direalisasikan sebesar Rp295.594.876.519,00 atau sebesar 88,83%.

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp21.382.536.680,00 dan direalisasikan sebesar Rp657.130.800,00 atau sebesar 3,07%.

Belanja transfer yang meliputi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp739.334.054.579,00 dan terealisasi sebesar Rp733.585.177.063,00 atau sebesar 99,22%.

Dalam pelaksanaannya pemerintah kabupaten Klaten mengalami kendala-kendala dalam pengelolaan belanja daerah diantaranya :

- a. Pengalokasian belanja yang cukup besar pada perubahan APBD sehingga penyerapan belanja kurang maksimal.
- b. Rincian kode rekening belanja yang kurang tepat pada suatu kegiatan, sehingga harus menunggu perubahan penjabaran APBD dalam melaksanakan kegiatan.
- c. Kurangnya ketelitian dalam memprioritaskan suatu kegiatan dalam penyusunan anggaran kas, sehingga menyebabkan pencairan dana kurang optimal karena terbatas pada SPD yang sudah ditetapkan.
- d. Banyaknya pelaksanaan kegiatan yang mendekati akhir tahun anggaran.
- e. Kurangnya pemahaman terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana TU (Tambah Uang).

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan capaian realisasi belanja daerah antara lain :

- a. Mendorong perencana SKPD untuk memprioritaskan kegiatan dengan alokasi belanja yang besar pada awal tahun anggaran.
- b. Peningkatan kapasitas SDM dengan menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan perencanaan anggaran kepada perencana SKPD agar dapat memastikan pembebanan akun belanja sesuai dengan kode akun yang sesuai untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran yang berakibat pada tidak terealisasinya anggaran.

- c. Penetapan kembali atas SPD yang telah ditetapkan atas ajuan penggeseran anggaran kas dari SKPD.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan mendorong PPTK dan Bendahara Pengeluaran SKPD untuk merealisasikan program kegiatannya di awal tahun sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- e. Menghimbau perencana, PPTK, PPKom dan Bendahara SKPD lebih meningkatkan koordinasi sehingga perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban dalam berjalan dengan lancar.

### **2.3 KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Perubahan kerangka pembiayaan daerah pada APBD Tahun 2023 disusun berdasarkan pada realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah, diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2022 *Audited* BPK yang difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi dengan mempertimbangkan komponen penggunaan yang diprioritaskan untuk kegiatan lanjutan dan serta mengalokasikan ke dalam program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan tahunan.

Sedangkan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada :

- a. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah mempedomani prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- b. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Jabaran ringkas perubahan kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pembiayaan dari semula sebesar Rp306.603.501.581,00 menjadi Rp529.593.676.302,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022.
2. Pengeluaran pembiayaan dari semula sebesar Rp24.300.000.000,00 menjadi Rp39.300.000.000,00 mengakomodir pembentukan dana cadangan Pilkada sebesar Rp15.000.000.000,00 penyertaan modal pada Bank Pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp6.000.000.000,00 PT. BPR Bank Klaten sebesar Rp3.000.000.000,00, PT. Aneka Usaha (Perseroda) sebesar Rp300.000.000,00 dan Perumda Air Minum Tirta Merapi sebesar Rp15.000.000.000,00 dalam rangka program pengembangan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten.

Adapun perubahan pembiayaan daerah dan realisasi pembiayaan daerah tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Perubahan dan Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Tahun 2023**

URAIAN		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	2.534.712.404.437	2.651.538.742.197	2.674.775.213.427
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	2.817.015.906.018	3.141.832.418.499	2.843.755.495.798
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	-282.303.501.581	-490.293.676.302	-168.980.282.371
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>A</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	306.603.501.581	529.593.676.302	529.593.676.302
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	306.603.501.581	529.593.676.302	529.593.676.302
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	24.300.000.000	39.300.000.000	39.300.000.000
	1. Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	2. Penyertaan Modal Daerah	9.300.000.000	24.300.000.000	24.300.000.000
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	282.303.501.581	490.293.676.302	490.293.676.302
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.313.393.931</b>

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2024 (data per tanggal 26 Februari 2024)

Permasalahan secara umum dalam pengelolaan pembiayaan daerah yang ada di Kabupaten Klaten adalah ketergantungan terhadap SiLPA dalam pembiayaan tahunan untuk menutup defisit anggaran, sebagian besar SiLPA digunakan untuk menutup defisit belanja daerah serta hanya

sebagian kecil yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang bersifat investasi.

Dalam rangka menghadapi permasalahan di atas, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi yaitu dengan optimalisasi jenis-jenis pendapatan daerah terutama dari sektor pajak dan retribusi melalui penyesuaian aturan/kebijakan dan melakukan inovasi khususnya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, serta melakukan penghematan dan efisiensi setiap kegiatan dimulai dari saat penyusunan perencanaan penganggaran sampai dengan pelaksanaannya sehingga dapat menekan defisit anggaran secara keseluruhan.

## BAB III

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat *konkuren* atau urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yaitu semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

#### **3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Urusan Sosial.

##### **1. Urusan Pendidikan**

Pelaksana Program urusan pendidikan pada tahun 2023 adalah Dinas Pendidikan, termasuk TK Negeri Kabupaten, SD Negeri se-Kabupaten, SMP Negeri se-Kabupaten dan SKB Cawas.

##### **A. Capaian Kinerja Program**

Urusan Pendidikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp913.821.251.086,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp825.248.384.791,- atau sebesar 90,31%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp866.397.059.198,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp779.975.522.751,- atau 90,03% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp47.424.191.888,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp45.272.862.040,- atau 95,46%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pendidikan Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,62	13,41	98,46
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,72	9,27	106,31

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	88,95	91,90	103,32
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	71,6	74,40	103,91
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	89,15	92,14	103,35
	Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,75	99,68	99,93
	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	99,12	91,81	92,63
	Persentase SD berakreditasi minimal B	%	98	97,31	99,30
	Persentase SMP berakreditasi minimal B	%	86,9	85,47	98,35
	Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	%	53,5	56,31	105,25
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	96,9	98,43	101,58
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B	%	98,45	98,35	99,90

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	%	10,8	10,91	101,02
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD	%	100	100	100
	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP	%	100	100	100
	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	%	100	100	100
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/ Murid SD/ MI	Rasio	1 : 15	1 : 14	98,67
	Rasio Guru/ Murid SMP/ MTs	Rasio	1 : 16	1 : 17	101,32
	Rasio Guru/ Murid PAUD	Rasio	1 : 10	1 : 13	104,29
Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Bahasa dan Sastra Daerah yang Dibina dan Dikembangkan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01\%$	Sangat Tinggi
2	$75,01\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01\% \leq 75\%$	Sedang
4	$50,01\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 2 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator atau semua capaian indikator



Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.

- Terdapat 18 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program semuanya kategori “Sangat Tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan pendidikan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.2**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan Tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Sekolah Berintegritas	Inovasi ini kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Klaten. Sekolah Berintegritas merupakan suatu model pendekatan untuk mendorong terciptanya satuan pendidikan (sekolah) yang berintegritas dengan menerapkan prinsip-prinsip sesuai tata kelola yang baik yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif. Di tahun 2022 telah ditunjuk 26 SDN sebagai Rintisan Sekolah Berintegritas dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 139 Tahun 2022 tentang Penunjukan Rintisan Sekolah Berintegritas di Kabupaten Klaten Tahun 2022.
2	Sekolah Interaktif Terpadu (SIT)	<p>Sekolah Interaktif Terpadu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi, perlu penguatan karakter bagi peserta didik melalui restorasi pendidikan karakter di sekolah;</li> <li>Agar restorasi pendidikan karakter bagi peserta didik di sekolah lebih efektif, perlu optimalisasi peran sekolah;</li> <li>Perlunya peningkatan layanan di SD Negeri agar fenomena berkurangnya siswa di SD Negeri dapat teratasi.</li> </ol> <p>Tujuan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk menguatkan karakter peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler</li> <li>Agar peserta didik mempunyai Waktu Lebih untuk Meningkatkan Religiusitas</li> <li>Meningkatkan Nasionalisme dan rasa kebersamaan</li> <li>Meningkatkan Integritas dan kompetensi Diri</li> <li>Meningkatkan kemandirian</li> <li>Memperkuat Pendidikan keluarga</li> </ol> <p>Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Program 5 hari sekolah yang memberlakukan jam belajar antara Jam 07.00-15.00/16.00</li> <li>Program sekolah di mana proses pembelajaran dilaksanakan sehari penuh di sekolah. Dengan kebijakan seperti ini maka waktu dan kesibukan anak-anak lebih banyak dihabiskan di lingkungan sekolah dari pada di rumah. Anak-anak dapat berada di rumah lagi setelah menjelang sore</li> <li>Kegiatan penguatan karakter peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.</li> <li>Lima Hari Sekolah Tidak Mengubah Struktur Kurikulum Yang Ada</li> </ol>

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pendidikan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pendidikan tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Juara 3 Lomba O2SN SD Cabang Karate Tingkat Nasional	Jovanka Fayza Khanza Purnama - Siswa SD Sinar Fajar Cawas	Kemendikbusristek
2	Juara 3 Lomba O2SN SD Cabang Karate Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Fakhry Akmal Athailah – Siswa SD Muhammadiyah Tonggalan Klaten Tengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
3	Juara 3 Lomba O2SN SD Cabang Bulutangkis Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Revalina Ernesta Sutopo – Siswa SD Negeri Pucang Tulung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
4	Juara 3 Lomba O2SN SD Cabang Renang Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Rindy Faisa Azzahra – Siswa SDN 1 Barenglor Klaten Utara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
5	Juara 3 Lomba O2SN SD Cabang Mendongeng Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Lodra Wangsa Wiryateja - Siswa SDN 1 Barenglor Klaten Utara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
6	Juara 1 Lomba Mapsi Sd Cabang Khitobah Putra Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Haikal Pratama Sakti – Siswa SD PK Muhammadiyah Delanggu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
7	Juara 1 Lomba FLS2N Kategori Penyaji Musik Tradisional Tingkat Nasional	SMP Krista Gracia Klaten	Kemendikbusristek
8	Pemenang Dalam Seleksi Nasional Cipta Puisi 2023	Astutiati, M.Pd – Guru SD Negeri karang Wedi	Forum Indonesia Menulis

## B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

## C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pendidikan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

## D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pendidikan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Kebijakan Strategis urusan Pendidikan Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pemberian Kesra GTT/PTT berdasarkan masa kerja, dengan klasifikasi sebagai berikut: a. GTT/PTT Kategori II (K-2) sebesar Rp. 1.000.000/bulan b. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 13 tahun ke atas sebesar Rp. 550.000/bulan c. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 10 - 12 tahun sebesar Rp. 500.000/bulan d. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 7 - 9 tahun sebesar Rp. 450.000/bulan e. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 4 - 6 tahun sebesar Rp. 400.000/bulan f. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 1 - 3 tahun sebesar Rp. 330.000/bulan	Keputusan Bupati Klaten Nomor 420/93 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Nomor 420/396 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap Kategori II dan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap Non Kategori II di Kabupaten Klaten Tahun 2023	Meningkatkan kesejahteraan bagi GTT/PTT yang mengabdikan sebagai guru dan tenaga administrasi di SD dan SMP Negeri dan Korwil Pendidikan
2.	Pemberian <b>Kenaikan Indeks</b> Kesra GTT/PTT berdasarkan masa kerja, dengan klasifikasi sebagai berikut: a. GTT/PTT Kategori II (K-2) sebesar Rp. 1.000.000/bulan naik Rp. 500.000/bulan menjadi Rp. 1.500.000/bulan mulai bulan Juli 2023 b. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 13 tahun ke atas	Keputusan Bupati Klaten Nomor 420/485 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Nomor 420/396 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap Kategori II dan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak	Meningkatkan kesejahteraan bagi GTT/PTT yang mengabdikan sebagai guru dan tenaga administrasi di SD dan SMP Negeri dan Korwil Pendidikan

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>sebesar Rp. 550.000/bulan naik Rp. 300.000/bulan menjadi Rp.850.000/bulan mulai bulan Juli 2023</p> <p>c. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 10-12 tahun sebesar Rp. 500.000/bulan naik Rp.250.000/bulan menjadi 750.000/bulan mulai bulan Juli 2023</p> <p>d. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 7 - 9 tahun sebesar Rp. 450.000/bulan naik Rp.250.000/bulan menjadi 700.000/bulan mulai bulan Juli 2023</p> <p>e. GTT/PTT Non K-2 masa kerja 4 - 6 tahun sebesar Rp. 400.000/bulan naik Rp.250.000/bulan menjadi 650.000/bulan mulai bulan Juli 2023</p>	Tetap Non Kategori II di Kabupaten Klaten Tahun 2023	
3.	<p>Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2023/2024. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dimuat PPDB melalui jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua. PPDB dengan jalur-jalur pendaftaran tersebut memberikan kepastian bahwa calon peserta didik baru memiliki akses untuk mendaftar di sekolah terdekat, dapat mendaftar sekolah di luar zonasi dengan menggunakan prestasi yang dimiliki. Siswa kurang mampu dan anak berkebutuhan khusus memiliki akses yang sama untuk mendaftar di sekolah yang diinginkan sesuai dengan jalur yang dipilih.</p>	Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024	Kepastian kesamaan bagi semua calon peserta didik baru untuk mendaftar di sekolah yang diinginkan dan terdekat.

### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2023</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
1.	Urusan Pendidikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.020.415.638.456,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp785.003.838.463,00 atau sebesar 76,93%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp994.231.692.309,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp758.683.991.758,00 atau 76,31% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp26.183.946.147,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp26.319.846.705,00 atau 100,52. Secara umum realisasi Urusan Pendidikan mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir serta khusus untuk belanja operasional penurunan persentasenya perlu mendapat perhatian serius serta harus dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan anggaran	<p>Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023. Alokasi anggaran Urusan Pendidikan tahun anggaran 2023 yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan, TK Negeri, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan SKB Cawas sebesar Rp. 913.821.251.086,- dengan realisasi sebesar Rp.825.248.384.791,- atau 90,31% dengan rincian anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 866.397.059.198,- dengan realisasi sebesar Rp.825.248.384.791,- atau 90,03%, sedangkan anggaran Belanja Modal sebesar Rp.47.424.191.888,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.272.862.040,- atau sebesar 95,46%.</p> <p>Secara umum anggaran urusan pendidikan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Jika di tahun 2022 anggaran urusan pendidikan sebesar Rp.1.020.415.638.456,- dan di tahun 2023 anggaran urusan pendidikan sebesar Rp.913.821.251.086,- atau mengalami penurunan sebesar Rp.106.594.387.370,- Selanjutnya realisasi anggaran urusan pendidikan di tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun anggaran 2022. Hal ini dapat dibandingkan realisasi anggaran urusan pendidikan di tahun 2022 sebesar 76,93% dan di tahun 2023 persentase realisasi anggaran mencapai</p>	Perbaikan aspek perencanaan dan penganggaran khususnya dalam merencanakan anggaran belanja operasi

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		<p>90,31% maka mengalami kenaikan sebesar 13,38%</p> <p>Belanja Operasi di tahun anggaran 2023 persentase realisasi anggaran sebesar 90,03% mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran di tahun 2022 yang hanya mencapai 76,31% atau naik sebesar 13,72%.</p>	
2.	<p>Indikator Kinerja Sasaran Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu 13,4 tahun dari target 99,11% sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan, sedangkan untuk indikator kinerja sasaran Rata-rata Lama sekolah (RLS) telah memenuhi target. Hal ini harus menjadi fokus perhatian dan perbaikan Dinas Pendidikan dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten.</p>	<p>Indikator Kinerja Sasaran Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2023 mencapai 13,41 Tahun dari target 13,62 Tahun atau dengan capaian kinerja sebesar 98,46%. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) jika dibandingkan dengan dengan HLS tahun 2022 mengalami kenaikan 0,01 dari tahun 2022 sebesar 13,40 Tahun.</p> <p>Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten di tingkat Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi 8 dari 35 kabupaten/kota dan masih di atas capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu 12,85 Tahun.</p> <p>Namun demikian Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Pendidikan akan selalu berupaya meningkatkan capaian angka Harapan Lama Sekolah artinya lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang lebih meningkat.</p>	<p>Peningkatan capaian kinerja tujuan, sasaran maupun program yang signifikan disertai dengan efisiensi anggaran untuk dalam pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan</p>

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pendidikan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.6**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan pendidikan tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Masih terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), di Kabupaten Klaten terdapat 200 anak tidak sekolah di desa dalam kategori miskin ekstrim. Permasalahan ATS ada dua kemungkinan yaitu ATS yang sama sekali belum pernah sekolah dan ATS yang putus sekolah.	Upaya penanganan Anak Tidak Sekolah dengan melaksanakan verifikasi dan intervensi terhadap Anak Tidak Sekolah. Bentuk intervensi yang dilakukan adalah mengembalikan anak ke sekolah, ATS memiliki jalur afirmasi 100% saat mendaftar pada penerimaan peserta didik baru. Selain itu upaya untuk mencegah meningkatnya Anak Tidak Sekolah dilakukan dengan cara a. Pengembangan sistem deteksi dini anak rentan putus sekolah yang dilakukan manajemen sekolah dan guru dan berdasarkan data kehadiran anak dan pencapaian pembelajaran b. Deteksi kerentanan anak menjadi putus sekolah c. Peningkatan komunikasi dengan keluarga anak beresiko putus sekolah d. Pendekatan dan pendampingan anak rentan putus sekolah Hal tersebut selaras dengan Program Unggulan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, salah satunya adalah Klaten Tuntas. Tuntas singkatan dari turunkan anak tidak sekolah. Penanganan anak tidak sekolah merupakan wujud pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yaitu bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

## 2. Urusan Kesehatan

Pelaksana program urusan Kesehatan pada tahun 2023 adalah Dinas Kesehatan, termasuk Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah (RSD)

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp464.394.309.613,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp396.379.378.155,- atau sebesar 85,35%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp402.343.843.594,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 340.947.858.599,- atau 84,74% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp62.050.466.019,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp55.431.519.556,- atau 89,33%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.7**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Kesehatan Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,89	77,07	100,23

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100



<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	%	100	100	100
	Persentase anak usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun / balita	%	11	<b>13,92</b>	<b>73,48</b>
<p>*) Indikator negatif,, semakin rendah capaian semakin baik,  rumus capaian = <math>\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100</math></p>					
	Cakupan STBM	%	100	100	100
	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100
	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	25	61,39	245,55
	Penderita diare yang ditangani	%	7	5,93	84,66
	Angka kejadian HIV	/1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,11	0,11	99,07
<p>*) Indikator negatif,, semakin rendah capaian semakin baik,  rumus capaian = <math>\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100</math></p>					
	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	/100.000 penduduk	100	137,17	137,17
	Angka Kejadian Malaria	/100.000	<1	0,87	185,46

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	%	10	100	1000
	Angka Kejadian DBD	/100.000	46	24,42	146,91
	Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)	%	97	98,67	103,87
	Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya	%	100	100	100
	Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	%	100	100	100
	Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin	%	80	91,18	113,97
	Persentase pelayanan lab klinis dan lab air	%	100	100	100
	Persentase sistem informasi kesehatan	%	70	100	142,86
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	88,24	88,24
	Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar.	%	100	100	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan	%	58,06	74	127,45
	Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah / sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan	%	50	27,14	54,28
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	62	72	116,13

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 34 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 30 indikator, capaian kinerja “Tinggi”

sebanyak 2 indikator, Capaian Kinerja “Sedang” sebanyak 1 Indikator, Capaian Kinerja “Rendah” sebanyak 1 Indikator.

- Indikator Kinerja Program yang kategori “Rendah” adalah sebagai berikut:

1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Hal ini dikarenakan :

1. Kurangnya pengetahuan keluarga tentang stunting dan bahayanya untuk anak;
2. Pola asuh yang belum sesuai menyebabkan tumbuh kembang anak terhambat;
3. Masih adanya penggunaan akses sanitasi yang tidak baik yang bisa mempengaruhi kesehatan.

Beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

- a. meningkatkan pengetahuan orangtua atau pengasuh mengenai stunting dan pola asuh yang sesuai melalui penyuluhan, konseling dan media lain kepada masyarakat;
  - b. melakukan pendampingan dan pemantauan pencegahan stunting sesuai siklus kehidupan dengan memberdayakan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang ada beserta kader dan tenaga kesehatan terkait;
  - c. Menerapkan 5 pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).
2. Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah / sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan karena kesadaran Pelaku usaha masih rendah dan Pengurusan Ijin (IRT) secara online sehingga pengawasan sulit. Untuk meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha.

Dalam pelaksanaan program urusan Kesehatan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.8**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kesehatan tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2023</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
1	PSC 119 Matur Dokter	Merupakan Inovasi Bupati Kepala Daerah Kab. Klaten di bidang Kesehatan Untuk kemudahan akses masyarakat dalam kesehatan, mendapat layanan respon cepat terutama masalah gawat darurat kesehatan melalui aplikasi di android secara gratis. Matur Dokter merupakan kegiatan pengembangan dari PSC 119, Program Ini telah di launching oleh Bupati Katen pada Desember 2018 dan direlaunching pada November 2019

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2023</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
2.	Pelayanan Kesehatan dan Promosi Kesehatan Melalui Kegiatan Kerjasama Implementasi Rumah Sakit Tanpa Dinding (KARSA TANDING)	Inovasi tersebut merupakan kegiatan promosi kesehatan melalui kerjasama semua stakeholder yang ada di rumah sakit yang didukung dengan mitra kesehatan lain untuk melakukan promosi kesehatan dengan visitasi langsung kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan bersifat kuratif (pengobatan), promosi kesehatan, preventif (pencegahan) dan rehabilitatif (pemulihan) yang dilakukan dengan mendekat langsung kepada masyarakat melalui tim yang dibentuk.

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Kesehatan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.9**  
**Prestasi Pelaksanaan program urusan Kesehatan tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1.	Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023 kategori Padapa	Pemerintah Kabupaten Klaten	Kementerian Dalam Negeri
2.	Penghargaan Sertifikat Bebas <u>Frambusia</u>	Pemerintah Kabupaten Klaten	Kementerian Kesehatan
3.	Penghargaan Universal Health Converage (UHC) atau cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Pemerintah Kabupaten Klaten	BPJS Kesehatan
4.	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023 Dengan Hasil Indeks 4,47 ( A-) (Sangat Baik)	RSUD Bagas Waras Klaten	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kesehatan dapat dilihat pada Buku

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Kesehatan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Kebijakan Strategis urusan Kesehatan Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Implementasi UHC (Universal Health Coverage) / jaminan Kesehatan secara menyeluruh Kebijakan ini Memberikan jaminan Kesehatan bagi penduduk Kabupaten Klaten. Penduduk kabupaten Klaten yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan namun memerlukan pelayanan kesehatan atau kontrol rutin dengan hak perawatan kelas 3 dapat direkomendasikan menjadi peserta Jamkesda Implementasi kebijakannya : 1. Masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan (opname/kontrol rutin) dan belum mempunyai jaminan Kesehatan, dapat diberikan jaminan Kesehatan dengan perawatan kelas 3 ; 2. Pendaftaran peserta jamkesda yang semula 14 hari baru aktif, menjadi langsung aktif.. 3. Verifikasi dan Evaluasi pendataan jamkesda dapat dilakukan oleh desa/kelurahan setiap hari	Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pedoman Perubahan Data dan Pemberian Rekomendasi Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka Universal Health Coverage pada Program Jaminan Kesehatan Nasional.	Memberikan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat yang tidak mampu

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kesehatan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Kesehatan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Urusan Kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp466.656.166.848,28 dengan realisasi anggaran sebesar Rp355.301.598.718,28 atau sebesar 76,14%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp425.810.673.787,28 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp324.368.687.428,28 atau 76,18% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp40.845.493.061,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp30.932.911.290,00 atau 75,73%. Secara agregat realisasi anggaran urusan kesehatan menurun selama 2 tahun berturut-turut hal ini perlu menjadi perhatian serius mengingat urusan kesehatan merupakan urusan dasar yang harus dilaksanakan secara optimal</p>	<p>Pada tahun 2023 sudah ditindaklanjuti. Alokasi anggaran sebesar Rp464.394.309.613,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp396.379.378.155,- atau sebesar 85,35%. Meningkatkan jika dibandingkan tahun 2022. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp402.343.843.594,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp340.947.858.599,- atau 84,74% meningkat juga jika dibandingkan tahun 2022. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp62.050.466.019,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp55.431.519.556,- atau 89,33% meningkat dibandingkan tahun 2023</p>	<p>Meningkatnya realisasi anggaran dan fisik kegiatan</p>
2.	<p>Indikator Kinerja sasaran Usia Harapan Hidup (UHH) telah melampaui target yaitu mencapai 76,95 tahun dari target 76,84 tahun. Namun perlu menjadi fokus perhatian yaitu Persentase Puskesmas terpenuhi obat dan vaksin baru mencapai 81,75% harus menjadi konsen perbaikan, mengingat puskesmas sebagai garda terdepan Pelayanan Kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten</p>	<p>Pada tahun 2023 sudah ditindaklanjuti dengan capaian kinerja Persentase Puskesmas terpenuhi obat dan vaksin baru sebesar 112,5%</p>	<p>Meningkatnya capaian kinerja Persentase Puskesmas terpenuhi obat dan vaksin baru</p>



## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Kesehatan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.12**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Kesehatan tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Masih terdapat kasus kematian ibu dan bayi.	Pemberdayaan masyarakat untuk kawal 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Advokasi Kepala Desa untuk memihaki jaminan kesehatan bagi ibu hamil yang tidak mampu. Meningkatkan edukasi melalui Buku KIA, 1 hari membaca 1 lembar Buku KIA.
2	Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) mengalami kenaikan kasus	Meningkatkan capaian imunisasi dasar lengkap dan meningkatkan rantai dingin vaksin
3	Mengalami kendala Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia dalam Kesiapan RSUD menghadapi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan Program Prioritas Nasional KJSU (Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengoptimalkan sosialisasi KRIS.</li><li>• Membuat DED Bangunan beserta kelengkapannya berstandar KRIS.</li><li>• Membuat DED Bangunan sesuai pelayanan KJSU, mengajukan SDM sesuai syarat pelayanan KJSU dan mengadakan dan atau mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan yang menunjang pelayanan KJSU.</li></ul>

## 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksana program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2023 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 252.393.606.655 dengan realisasi anggaran sebesar Rp221.194.392.360 atau sebesar 87,64%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 95.583.231.184 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 87.384.464.017 atau 91,42 % dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 156.810.375.471 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 133.809.928.343 atau 85,33 %

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.13**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,26	91,79	100,58
Persentase drainase dalam kondisi baik	%	62,29	62,31	100,03
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	43,60	49,00	112,39
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	95,03	99,09	104,27

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,36	0,36	100
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	95,59	93,35	97,66
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik	%	100	100	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	1,48	1,43	96,62
Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	62,29	62,31	100,03
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung perkantoran dan gedung non perkantoran yang dibangun	%	60	92,86	154,77
	Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi	%	20,83	34,43	165,29
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase dokumen RTBL yang tersusun	%	20	20	100
	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	25	25	100
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	83	83
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kondisi baik	%	67,82	67,85	100,04
	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	65,81	76,19	115,77

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	%	70,5	71	100,71
	Persentase pelayanan ketataruangan	%	100	100	100
	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 4 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator.
- Terdapat 15 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 14 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator

Dalam pelaksanaan program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.14**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pekerjaan Umum**  
**dan Penataan Ruang Tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Sitaru Klaten	Sistem Informasi Penataan Ruang yang menampilkan informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten sebagai bagian dari keterbukaan informasi public dan mempercepat proses pelayanan perijinan.
2	Sistem Informasi Monitoring Kinerja	Perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk memonitor setiap kegiatan yang telah direncanakan dalam DPA, dan melakukan evaluasi terhadap masing-masing kegiatan.
3	Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Sistem informasi penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi dan telekomunikasi. Terdatanya pembinaan jasa konstruksi di kabupaten Klaten yang berupa data tenaga operator/teknisi/analisis yang bersertifikat kompetensi serta badan usaha jasa konstruksi. Sistem informasi ini berisi : database pembinaan jasa konstruksi, aplikasi perijinan, aplikasi antarmuka pembinaan jasa konstruksi dan informasi mengenai perkembangan jasa konstruksi.
4	SIMANTARU	Membangun sistem informasi basis data pemanfaatan ruang yang mampu mengumpulkan, menyimpan, mengintegrasikan, menampilkan, dan memeriksa data pemanfaatan ruang di Kabupaten Klaten serta mengintegrasikan data pemanfaatan ruang Kabupaten Klaten untuk menghindari perulangan dan tumpang tindih ajuan SITR dan KKPR dan sinkron dengan Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Klaten.
5	Sistem Informasi Jalan dan Jembatan	Peningkatan pelayanan informasi tentang kondisi jalan dan jembatan di wilayah kabupaten klaten yang dikelola oleh bidang binamarga kabupaten klaten.

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
6	Sistem Informasi Sumber Daya Air	Dengan teknologi informasi berbasis webgis ini diharapkan mampu menyajikan peta Daerah irigasi di Kabupaten Klaten sehingga dapat sebagai bahan kajian analisis dan kontrol kegiatan pengelolaan irigasi. Tersediaanya aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) yang berisi data-data Jaringan irigasi meliputi saluran, bangunan, petak sawah yang dapat diakses public maupun internal secara online.

#### B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

#### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Kebijakan Strategis urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Ketentuan tentang pengaturan urutan jenis tanaman yang akan ditanam, lokasi, luas dan jenis tanam yang direncanakan untuk tanam di dalam daerah irigasi Kabupaten Klaten untuk satu tahun tanam serta jadwal mulai dan berakhirnya masa tanam dan masing-masing jenis tanam yang bersangkutan.	Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pola Tanam Serta Rencana Tata Tanam Untuk Masa Tanam Tahun 2023-2024 di Kabupaten Klaten	Untuk memudahkan Pengelolaan Air Irigasi, diperlukan adanya pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Klaten.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
2	Lokasi dan alokasi program penyelenggaraan jalan di Kabupaten Klaten tahun 2023 yang terdiri dari pemeliharaan rutin jalan sepanjang 118,28 km, gorong-gorong dan jembatan sepanjang 0,16 km serta talut dan saluran sepanjang 0,26 km	Keputusan Bupati Klaten Nomor 620/23 Tahun 2023 Tentang Lokasi Dan Alokasi Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023	Untuk mempertahankan kondisi jalan di Kabupaten Klaten agar tetap berfungsi secara optimal untuk lalu lintas.
3	Menetapkan Dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya	Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Klaten Tahun 2023-2037	Untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat.

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 241.887.330.530,00 (dua ratus empat puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ratus tiga puluh rupiah ) dengan realisasi anggaran sebesar Rp203.518.480.319,00 (dua ratus dua milyar lima ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) atau sebesar 84,14%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi	Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023. Alokasi anggaran sebesar Rp 252.393.606.655 dengan realisasi anggaran sebesar Rp221.194.392.360 atau sebesar 87,64% meningkat jika dibandingkan tahun 2022. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 95.583.231.184 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp87.384.464.017 atau 91,42% meningkat jika dibandingkan tahun 2023. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp156.810.375.471 dengan realisasi Belanja Modal sebesar	Meningkatnya serapan anggaran.

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>sebesar Rp62.736.789.630,00 (enam puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp55.335.585.487,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 88,20% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp179.150.540.900,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar seratus lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.148.182.894.832,00 (seratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau 82,71%.</p>	<p>Rp133.809.928.343 atau 85,33% meningkat jika dibandingkan tahun 2023</p>	
2.	<p>Indikator Kinerja dan capaian kinerja dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Indikator kinerja antara lain persentase jalan dalam kondisi mantap, persentase drainase dalam kondisi baik, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, indikator kinerja persentase jalan dalam kondisi mantap tahun 2022 ditargetkan sebesar 91,06 %, realisasi sebesar 91,05% atau dengan capaian 99,99%. Keberhasilan ini</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023, Terdapat 4 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator dan terdapat 15 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 14 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator.</p>	<p>Meningkatnya Capaian Kinerja</p>



No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>tidak terlepas dari pelaksanaan program penyelenggaraan jalan. Program penyelenggaraan jalan terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Sub kegiatan Survey Kondisi Jalan /Jembatan, Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar, Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan, Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK), Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, Sub kegiatan Penggantian Jembatan, dan Sub kegiatan Pelebaran Jembatan. Tahun 2022, ruas jalan kabupaten yang diperbaiki diantaranya ruas Pasar Kembang - Jetirajeg, Ir. Soekarno, Nanggulan-Pakistan, Kepanjen Bulan, Ngimbar-Kayumas, Nangsri-Tanjungsari, Cawas - Kalisogo, Karangturi-Kaligayam, Kaliwuluh-Deles, Sidoharjo-Janti, Basin-Mipitan, Kayumas-Mundu, Ngaran-Telukon, Tangkil-Dompol, Rinjani/Tengger. Selain melakukan perbaikan jalan kabupaten, tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten juga melakukan perbaikan jembatan kabupaten diantaranya Jembatan Mundu II, Gatak 1, dan Jembatan Kadirejo. Indikator persentase drainase dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 61,47%, dengan realisasi sebesar 61,99% (capaian 100,85%). Indikator persentase irigasi dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 41,5%, dengan realisasi sebesar</p>		

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	44,91% (capaian 108,22%). Sedangkan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang ditargetkan sebesar 88,4%, dengan realisasi sebesar 95,03% (capaian 107,5).		
3.	<p>CATATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkaitan dengan realisasi anggaran DPUPR Klaten yang hanya sebesar 84,14%. Realisasi tersebut terbilang masih cukup jauh dari anggaran yang disediakan. Hal ini membuktikan masih diperlukan perbaikan dari sisi perencanaan, khususnya perencanaan anggaran.</li> <li>2. Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait bagaimana progress pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Pembangunan Jalan Tol membawa dampak negatif salah satunya adalah rusaknya jalan. Mobilitas truk yang membawa tanah urug di daerah Bayat menyebabkan jalan tersebut rusak parah.</li> <li>4. Kondisi jalan rusak khususnya di jalur evakuasi Merapi untuk segera diperbaiki mengingat saat ini Gunung Merapi sering terjadi erupsi. Selain itu, aktivitas truk galian C yang melewati jalan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tahun 2023 serapan anggaran sebesar 87,64%. Secara fisik sudah tercapai 100% namun ada sisa anggaran dikarenakan adanya sisa lelang yang menyebabkan anggaran tidak terealisasi 100%.</li> <li>2. Pada tahun 2023 sudah dijelaskan kebijakan strategis yang diambil beserta penjelasan terkait kebijakan strategis tersebut</li> <li>3. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang membuat Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Pengelola Jalan Tol (Pt. Jogja Solo Marga Makmur, Pt. Adhi Karya, Pt. Dayamulia Turangga). Perjanjian Kerjasama tersebut berisi tentang prngangkutan material dan mobilisasi Pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta pada jaringan jalan Kabupaten Klaten. Pengelola Jalan tol dimaksud bersedia dan berkewajiban memperbaiki jalan kabupaten yang rusak akibat aktivitas angkutan material ruas jalan yang sudah diperbaiki oleh DPUPR adalah ruas jalan Gatak – Grojogan – Bayat diperbaiki pada tahun anggaran 2023 melalui APBD Klaten</li> <li>4. Tahun anggaran 2023, DPUPR Klaten melaksanakan Pembangunan jalan di jalur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Serapan anggaran</li> <li>2. Penjelasan kebijakan strategis</li> <li>3. Perbaikan jalan rusak yang diakibatkan oleh mobilitas angkutan Pembangunan jalan tol menjadi kewajiban Pengelola Jalan Tol</li> <li>4. Terbangunnya jalan di Jalur Evakuasi Merapi</li> </ol>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	kabupaten. Hal ini menyebabkan ruas jalan kabupaten mengalami kerusakan cukup parah.	evakuasi Merapi antara lain ruas Kaliwuluh - Deles Jatirajeg - Surowono, Ngemplak Seneng-Panggung	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.17**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Pada program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sub kegiatan Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan terdapat paket pekerjaan Pembangunan SPAM jaringan perpipaan PKE (Penanganan Kemiskinan Ekstrim) yang tidak terlaksana karena tidak tercapainya kesepakatan antara PDAM dan Dinas.	Perlu adanya kesepakatan bersama antara Dinas dan PDAM terkait Pembangunan SPAM.

#### 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksana program urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023 adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

##### A. Capaian Kinerja program

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 26.645.634.186,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.625.779.601,00 atau sebesar 84,91%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.22.921.575.336,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.19.133.085.348,00 atau 83,47% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 3.724.058.850,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 3.492.694.253,00 atau 93,79%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara rinci

dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.18**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,87	97,66	98,7

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	0,05	0,36	99,68
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	96,43	96	99,55
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kondisi baik	%	62,24	62,24	100
	Persentase PSU yang diserahkan oleh pengembang perumahan	%	38,61	38,61	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang diterbitkan	%	100	0	0

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator
- Terdapat 7 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 indikator, dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 1 Indikator
- Capaian Kinerja Kinerja Program yang kategori “Sangat Rendah” adalah sebagai berikut:
  - Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang diterbitkan, dikarenakan belum ada kegiatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman dan langkah/tindak lanjutnya menunggu petunjuk teknis dari pusat karena sesuai nomenklatur Kepmen 050-5899 Tahun 2021.

Dalam pelaksanaan program urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.19**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	SIFASUM (Sistem Informasi Fasilitas Umum)	SIFASUM adalah system untuk monitoring penggunaan fasilitas umum Disperakim yaitu Gedung Sunan Pandanaran, Gedung Grha Bung Karno, Alun-Alun Klaten, Rusunawa dan TPU Tegal Binangun. System ini masih sebatas penggunaan internal dinas. Pencatatan secara digital terhadap penggunaan fasilitas umum tersebut dapat di akses oleh pegawai yang terkait melalui gadget kapanpun dan dimanapun secara realtime. Sehingga mempercepat pengambilan keputusan dalam melayani masyarakat.

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.20**  
**Kebijakan Strategis urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan**  
**Permukiman Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1	<p>Menentukan Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh untuk Mendukung Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem untuk 694 rumah tidak layak huni yang berlokasi di 77 desa di 22 kecamatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Bayat</li> <li>2. Kecamatan Cawas</li> <li>3. Kecamatan Ceper</li> <li>4. Kecamatan Gantiwarno</li> <li>5. Kecamatan Jatinom</li> <li>6. Kecamatan Jogonalan</li> <li>7. Kecamatan Juwiring</li> <li>8. Kecamatan Kalikotes</li> <li>9. Kecamatan Karanganom</li> <li>10. Kecamatan Karangdowo</li> <li>11. Kecamatan Karangnongko</li> <li>12. Kecamatan Kemalang</li> <li>13. Kecamatan Klaten Selatan</li> <li>14. Kecamatan Klaten Tengah</li> <li>15. Kecamatan Manisrenggo</li> <li>16. Kecamatan Ngawen</li> <li>17. Kecamatan Pedan</li> <li>18. Kecamatan Polanharjo</li> <li>19. Kecamatan Prambanan</li> <li>20. Kecamatan Trucuk</li> <li>21. Kecamatan Tulung</li> <li>22. Kecamatan Wonosari</li> </ol>	<p>Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/238 Tahun 2023 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota Pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klaten yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat melalui Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh untuk Mendukung Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem</p>
2	<p>Menentukan Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh</p>	<p>Keputusan Bupati Klaten Nomor 640/481 Tahun 2023 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	<p>Peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat melalui Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	untuk Mendukung Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem untuk rumah tidak layak huni yang berlokasi di 45 desa di 23 kecamatan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Bayat</li> <li>2. Kecamatan Cawas</li> <li>3. Kecamatan Ceper</li> <li>4. Kecamatan Delanggu</li> <li>5. Kecamatan Gantiwarno</li> <li>6. Kecamatan Jatinom</li> <li>7. Kecamatan Jogonalan</li> <li>8. Kecamatan Juwiring</li> <li>9. Kecamatan Kalikotes</li> <li>10. Kecamatan Karanganom</li> <li>11. Kecamatan Karangdowo</li> <li>12. Kecamatan Kebonarum</li> <li>13. Kecamatan Kemalang</li> <li>14. Kecamatan Klaten Selatan</li> <li>15. Kecamatan Klaten Utara</li> <li>16. Kecamatan Manisrenggo</li> <li>17. Kecamatan Ngawen</li> <li>18. Kecamatan Pedan</li> <li>19. Kecamatan Prambanan</li> <li>20. Kecamatan Trucuk</li> <li>21. Kecamatan Tulung</li> <li>22. Kecamatan Wedi</li> <li>23. Kecamatan Wonosari</li> </ol>	Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota Pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klaten yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023	Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh untuk Mendukung Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem

#### **E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.21**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat**  
**dan Kawasan Permukiman**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Beberapa catatan kritis berkenaan dengan penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditangani 2 Urusan yaitu Urusan Perumahan Rakyat &amp; Kawasan Permukiman dan Urusan Pertanahan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Menangani antara lain : Penanganan Bansos RTLH, Penyediaan SPM, Urusan Pertanahan dan Fasilitas Umum. Fasilitas Umum yang ditangani antara lain Rusunawa, Gedung Sunan Pandanaran, Gedung Grha Bung Karno, Alun-Alun Klaten dan TPU Tegal Binangun. Sumber Daya Manusia Yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Klaten sejumlah 101 orang yang terdiri dari 35 orang ASN dan 66 orang Non ASN. Sesuai Analisa jabatan ABK masih terdapat kekurangan ASN sebanyak 118 ASN.</p>	<p>Mengusulkan penambahan ASN untuk penanganan fasilitas umum</p>	<p>Terpenuhinya kebutuhan ASN dan terpeliharanya sarpras fasilitas umum</p>
2.	<p>Capaian Kinerja program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 28.333.741.021,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua puluh satu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 24.036.844.772,00 (dua puluh empat milyar tiga puluk enam juladelapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atau sebesar 84,83%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp18.518.853.421,00 (delapan</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023. Melakukan perbaikan dari sisi perencanaan, khususnya perencanaan anggaran. Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 84,91%, meningkat jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2022 yang sebesar 84,83%</p>	<p>Penyerapan anggaran lebih maksimal dari tahun sebelumnya</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>belas milyar lima ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp14.829.060.979,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) atau 80,08% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp 9.814.887.600,00 (sembilan milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp9.207.783.793,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau 93,81%.</p> <p>Capaian realisasi tersebut terbilang masih cukup jauh dari anggaran yang disediakan. Hal ini membuktikan masih diperlukan perbaikan dari sisi perencanaan, khususnya perencanaan anggaran, Melakukan perbaikan dari sisi perencanaan, khususnya perencanaan anggaran. Penyerapan anggaran lebih maksimal dari tahun sebelumnya.</p>		
3.	<p>Permasalahan dan Upaya Mengatasi Urusan Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penanganan terhadap rumah korban bencana dengan memperbaiki manajemen penanganan terhadap rumah korban bencana agar lebih efektif.</li> <li>2. Masih terdapat rumah tidak layak huni yang belum terdata dan tertangani dengan mengadakan pendataan dan penanganan/intervensi terkait rumah tidak layak huni agar dapat tertangani dengan baik.</li> <li>3. Masih banyak pengembang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan dan identifikasi perumahan di rawan bencana</li> <li>2. Sudah tersedia database RTLH</li> <li>3. Sudah melakukan sosialisasi kepada pengembang tentang penyerahan PSU</li> <li>4. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengembang perumahan melalui site plan</li> <li>5. Bekerja sama dengan CSR dan pihak lain</li> </ol>	Tuntasnya penanganan Kawasan kumuh dan pertanahan di kabupaten klaten

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKJP Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>yang belum menyerahkan PSU perumahannya kepada pemerintah dengan mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada pengembang terkait prosedur penyerahan PSU kepada pemerintah.</p> <p>4. Belum optimalnya pengawasan terhadap pengembang perumahan dengan memperbaiki manajemen pengawasan terhadap pengembang perumahan agar lebih efektif dan efisien.</p> <p>5. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah sehat dan layak huni dengan mengusulkan dan memfasilitasi penyediaan rumah sehat dan layak huni kepada pemerintah.</p> <p>6. Belum optimalnya penataan lingkungan kawasan permukiman dengan memperbaiki manajemen penataan lingkungan Kawasan permukiman dengan baik.</p> <p>7. Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan yang belum tertangani dengan melakukan pendataan dan penanganan terhadap Kawasan kumuh di perkotaan.</p> <p>8. Belum optimalnya pemenuhan sarana utilitas umum di lingkungan permukiman dengan menyediakan sarana utilitas umum yang memadai di lingkungan permukiman.</p> <p>9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas permukiman dengan melakukan sosialisasi tentang peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas permukiman.</p>	<p>dalam penyediaan rumah sehat dan layak huni</p> <p>6. Melakukan penyusunan dokumen tentang kawasan kumuh (RP2KPKPK)</p> <p>7. Membangun infrastruktur (drainase) pada Kawasan kumuh di 6 lokasi</p> <p>8. Menyediakan sarana informasi, olahraga, playground, dan sarpras disabilitas.</p> <p>9. Melakukan sosialisasi tentang penanganan kumuh</p>	

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut

**Tabel 3.22**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Bidang Perumahan		
1	Masih terdapat rumah tidak layak huni yang belum terdata dan tertangani	Mengadakan pendataan terkait rumah tidak layak huni agar dapat tertangani dengan baik
2	Masih banyak pengembang yang belum menyerahkan PSU perumahannya kepada pemerintah	Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada pengembang terkait prosedur penyerahan PSU kepada pemerintah
3	Belum optimalnya pengawasan terhadap pengembang perumahan	Memperbaiki manajemen pengawasan terhadap pengembang perumahan agar lebih efektif dan efisien
4	Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah sehat dan layak huni	Mengusulkan dan memfasilitasi penyediaan rumah sehat dan layak huni kepada pemerintah
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Bidang Kawasan Permukiman		
5	Belum optimalnya penataan lingkungan kawasan permukiman	Memperbaiki manajemen penataan lingkungan Kawasan permukiman dengan baik
6	Belum optimalnya pemenuhan sarana utilitas umum di lingkungan permukiman	Menyediakan sarana utilitas umum yang memadai di lingkungan permukiman
7	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas permukiman	Melakukan sosialisasi tentang peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas permukiman

## 5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Pelaksana program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2023 adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Pemadam Kebakaran yang pelaksanaan programnya dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten dan sub urusan bencana yang pelaksanaan programnya dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Klaten.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp28.506.136.806,00 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp24.225.553.567,00 atau sebesar 84,98%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp26.269.722.417,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp22.115.330.317,00 atau 84,19% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp2.236.414.389,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.110.223.250,00 atau 94,36%. Rincian anggaran per sub urusan sebagai berikut :

- Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Pemadam Kebakaran mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.19.133.605.936 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.552.071.410 atau sebesar 86,51%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.17.177.689.496 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar 14.656.973.160 atau 85,33% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.1.955.916.440 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.895.098.250 atau 96,89%.
- Sub Urusan Bencana mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.372.530.870,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.673.482.157,00 atau sebesar 81,87%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp 9.092.032.921,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 7.458.357.157,00 atau 82,03% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp 280.497.949,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp215.125.000,00 atau 76,69%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.23**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**  
**Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92	0,94	102,17
Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	97	100	103

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan yang Terkondisikan	%	43,00	43,00	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	97	100	103
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	92,40	93,69	101
	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	%	100	100	100
Program Pencegahan, Penggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	70	58,99	84,27
	Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran	Menit	15	18,84	74,40
	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
Program Penanggulangan Bencana	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	%	51	51	100
	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	62	62	100
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	73	73	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Pemadam Kebakaran

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator
- Terdapat 7 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator, dan Capaian Kinerja “sedang” sebanyak 1 Indikator
- Capaian Kinerja Program yang kategori “sedang” adalah sebagai berikut:

**Indikator Kinerja Program :**

Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran (Kategori Sangat Rendah)

**Program :**

Pencegahan, Penggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Indikator kinerja Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran masih kategori sangat rendah dikarenakan wilayah kerja Kabupaten Klaten termasuk luas 701,52 Km<sup>2</sup> sehingga keterjangkauan jarak kantor pelayanan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten yang hanya satu dengan tempat yang akan ditangani masih belum bisa menjangkau wilayah yang jauh. Pada tahun 2023 terdapat 41,01% kejadian kebakaran dengan jarak lebih dari 7 km dari pos damkar klaten sehingga membutuhkan lebih dari 15 menit untuk menjangkau wilayah tersebut. Tindak lanjut Satpol PP dan Damkar telah melaksanakan pembangunan 1 pos damkar pada Anggaran Perubahan 2023 yaitu di Dukuh Penggung, RT.01 RW 03 Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Penambahan 1 pos titik pemadam di wilayah Kabupaten Klaten diharapkan agar dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dengan *response time* yang lebih cepat.

2) Sub urusan bencana :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator, capaian kinerja “sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.



**Tabel 3.24**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman,**  
**Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
<b>Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Pemadam Kebakaran</b>		
1	DAMKAR GOES TO SCHOOL	<p>Damkar Goes to school adalah salah satu upaya membangun strategi dalam peningkatan kapasitas masyarakat atau komunitas. Sekolah adalah sebuah bagian dari masyarakat atau komunitas yang dapat dibidik menjadi intelijen-intelijen untuk dapat mengetahui potensi bahaya kebakaran beserta penanggulungannya.</p> <p>Target sasaran dari kegiatan ini adalah warga sekolah baik guru, siswa dan staff yang ada di sekolah tersebut. Warga sekolah itulah yang perlu ditingkatkan kapasitasnya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan potensi bahaya kebakaran baik pada tahapan pra kejadian yang meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tahapan saat kejadian yang meliputi pemadaman kebakaran dan evakuasi dan penanganan korban dan tahapan pasca kejadian yang meliputi rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Walaupun yang menjadi sasaran adalah warga sekolah tetapi keluaran dari peningkatan kapasitas tersebut diharapkan tidak hanya untuk kepentingan sekolah saja, tetapi juga untuk masyarakat darimana warga sekolah tersebut tinggal. Sehingga sangat diharapkan bahwa mereka akan dapat memanfaatkan kemampuannya di sekolah dan masyarakat.</p>
<b>Sub Urusan Bencana</b>		
1	SiVabel	Aplikasi ini digunakan untuk Tim Relawan, Tim Evakuasi dan Tim SAR untuk melakukan evakuasi khususnya untuk kaum difabel di desa Paseduluran. Bias diunduh melalui playstore dengan nama SIVABEL
2	Penamas	Aplikasi Pelaporan bencana dari masyarakat berbasis website melalui link : <a href="https://bit.ly/pena-mas">bit.ly/pena-mas</a> .

## B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

## C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

## D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.25**  
**Kebijakan Strategis urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	<p>Penunjukan petugas pengamanan fasilitas umum di Kawasan alun-alun, Taman Kota Dan Depan Masjid Raya Klaten Tahun Anggaran 2023 yang mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <p>a. Melakukan patroli di Kawasan Alun-alun, Taman Kota, dan depan Masjid Raya Klaten;</p> <p>b. Melakukan pembinaan bagi pedagang kaki lima (PKL) dan jasa mainan yang melakukan kegiatan/berjualan di Kawasan alun-alun, Taman Kota, dan depan Masjid Raya Klaten;</p> <p>c. Mengamankan barang milik milik pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati untuk dibawa ke Kantor Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten;</p> <p>d. Melakukan pendataan.pengadministrasian barang milik pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang dibawa ke Kantor Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten;</p> <p>Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kegiatan Patroli</p>	<p>Keputusan Bupati Klaten Nomor 027.8/237/ Tahun 2023 tentang Penunjukan Petugas Pengamanan Fasilitas Umum Di Kawasan Alun-Alun, Taman Kota Dan Depan Masjid Raya Klaten Tahun Anggaran 2023</p>	<p>a. Bertujuan untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban fasilitas umum di Kawasan alun-alun, Taman Kota, dan Depan Masjid Raya Klaten Tahun Anggaran 2023</p> <p>b. Sebagai bentuk pengaturan terhadap pemanfaatan sarana prasarana publik yang aman, tertib, bersih, indah dan rapi</p>

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
	dilaksanakan setiap hari Senin s.d.Minggu pukul 17.00-21.00 WIB oleh petugas Regu yang terjadwal (Terdapat 3 Regu)		
2.	Menetapkan Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Nomor 360/37 tangaal 9 Februari 2023 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten
3.	Menetapkan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 untuk Mengantisipasi ancaman bencana di kabupaten Klaten yang terdiri dari ancaman bencana banjir, angin, kekeringan,gerakan tanah, gempa, letusan gunung merapi dan untuk memitigasi bencana yang ada perlu langkah-langkah antisipasi sebelum terjadi bencana (pra bencana)	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/24 tanggal 2 february 2023 Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023	Mempersiapkan langkah-langkah antisipasi (mitigasi) didaerah rawan bencana
4.	Menetapkan Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Nomor 360/105 tangaal 27 Maret 2023 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
5.	Menetapkan Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencan	Keputusan Bupati Nomor 360/153 tangaal 27 April 2023 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten
6.	Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2023. Untuk mengantisipasi ancaman bahaya kekeringan yang merupakan salah satu ancaman bahaya yang ada dikabupaten Klaten perlu dilakukan koordinsi dengan pihak terkait penanganan bencana kekeringan	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/193 tangaal 9 Juni 2023 Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2023	Dalam rangka koordinasi dengan berbagai pihak terkait langkah antisipasi ancaman bencana kekeringan
7.	Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Geologi (Gempa Bumi) di Kabupaten Klaten untuk mengantisipasi dan mengambil langkah langkah antisipatif dan koordinasi dengan pihak terkait dan lintas OPD akibat terjadinya gempa bumi	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/206 tanggal 1 Juli 2023 Status Tanggap Darurat Bencana Geologi (Gempa Bumi) di Kabupaten Klaten	Dalam rangka koordinasi dengan pihak terkait untuk mengambil langkah akibat terjadinya bencana gempa bumi
8.	Menetapkan Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencan	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/211 tanggal 3 Juli 2023 Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
9.	Menetapkan Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/211 tanggal 14 Juli 2023 Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten
10.	Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023. Dalam rangka mengantisipasi dan untuk mengambil langkah langkah antisipatif dan koordinasi dengan pihak terkait dan mengambil langkah langkah antisipatif ancaman bahaya kekeringan berupa kebakaran hutan dan lahan di lilyah kabupaten Klaten	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/248 tanggal 18 Agustus 2023 Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Klaten
11.	Menetapkan Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana	Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/537 tanggal 5 Desember 2023 Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten	Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
12.	<p>Menetapkan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Klaten Tahun 2023-2024</p> <p>Untuk mengantisipasi ancaman bahaya hidrometeorologi yang merupakan salah satu ancaman bahaya yang ada di kabupaten Klaten perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait penanganan bencana hidrometeorologi</p>	<p>Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/544 tanggal 22 Desember 2023</p> <p>Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Klaten Tahun 2023-2024</p>	<p>Dalam rangka koordinasi dengan berbagai pihak terkait langkah antisipasi ancaman bencana Hidrometeorologi</p>
13.	<p>Menetapkan Pembentukan Tim Penanganan Dampak Musim Hujan sebelum Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana. Untuk mengantisipasi ancaman bahaya dampak musim hujan yang merupakan salah satu ancaman bahaya yang ada di kabupaten Klaten perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait penanganan dampak musim hujan</p>	<p>Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/542 tanggal 8 Desember 2023</p> <p>Pembentukan Tim Penanganan Dampak Musim Hujan sebelum Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana</p>	<p>Dalam rangka koordinasi dengan berbagai pihak terkait langkah antisipasi penanganana dampak musim hujan</p>
14.	<p>Menetapkan Perpanjangan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten berdasarkan surat BPPTKG perihal peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada level III menjadi siaga level III dan dalam rangka menjalin koordinasi dengan para pihak terkait dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana</p>	<p>Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/549 tanggal 23 Desember 2023</p> <p>Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi Di Kabupaten Klaten</p>	<p>Dalam rangka menjalin koordinasi dengan perangkat daerah dan para pihak terkait serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi penanganan bencana Letusan Gunung Merapi di Kabupaten Klaten</p>

#### **E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.26**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan**  
**Perlindungan Masyarakat**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Pemadam Kebakaran mendapat alokasi anggaran sebesar Rp11.620.747.864,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.969.346.222,00 atau sebesar 85,79% Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp11.011.171.499 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp9.366.286.789,00 atau 85,06% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp609.576.365,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp603.059.433 atau 98,93%</p>	<p>Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Pemadam Kebakaran mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.19.133.605.936 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.552.071.410 atau sebesar 86,51%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.17.177.689.496 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar 14.656.973.160 atau 85,33% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.1.955.916.440 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.895.098.250 atau 96,89%. Alokasi anggaran meningkat dengan adanya kebutuhan penambahan/pembangunan Pos Pemadam Kebakaran</p>	<p>Tujuan penyusunan anggaran yang disesuaikan kebutuhan adalah untuk meningkatkan capaian kinerja dan efektivitas penanganan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan pelayanan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran</p>
2.	<p>Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”. Terdapat 7 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 indikator” dan capaian kinerja “rendah” sebanyak 1 indikator. Capaian Kinerja Program kategori “rendah” adalah Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dikarenakan wilayah kerja Kabupaten Klaten termasuk luas</p>	<p>Tindak lanjut Satpol PP dan Damkar telah melaksanakan pembangunan 1 pos damkar pada Anggaran Perubahan 2023 yaitu di Dukuh Penggung, RT.01 RW 03 Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Penambahan 1 pos titik pemadam di wilayah kab.Klaten diharapkan agar dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dengan <i>response time</i> yang lebih cepat.</p>	<p>Upaya untuk memenuhi response time 15 menit penanganan kebakaran</p>

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2023</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>701,52 Km2 sehingga keterjangkauan jarak kantor pelayanan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten yang hanya satu dengan tempat yang akan ditangani masih belum bisa menjangkau wilayah yang jauh. Sesuai kajian RISPK 2011 (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Klaten), dalam pelayanan pemadaman kebakaran dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dengan response time yang lebih cepat, Satpol PP dan Damkar membutuhkan 13 pos titik pemadam di wilayah Kabupaten Klaten serta membutuhkan penambahan SDM pemadam kebakaran. Upaya untuk memenuhi response time 15 menit 7 Km di Kabupaten Klaten yaitu mengusulkan pembuatan 5 pos damkar, sarana prasarana pemadam kebakaran serta penambahan SDM pemadam kebakaran.</p>		
3.	<p>Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.</p>	<p>Optimalisasi penanganan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan perda dan perkara dengan melaksanakan kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Reklame secara rutin berupa patroli ketertiban oleh Satgas Trantibum sebanyak 10-15 kali dalam satu bulan di wilayah Kab.Klaten</p>	<p>Pengaturan yang optimal terhadap pemanfaatan sarana prasarana publik yang aman, tertib, bersih, indah dan rapi dan Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Klaten</p>



No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
4.	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti.		
5.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi.		
	<b>SUB URUSAN BENCANA</b>		
1.	Bahwa untuk capaian program di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan target, realisasi dan capaian sebesar yang telah ditetapkan adapun programnya meliputi: a. Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana b. Prosentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana c. Prosentase kelompok relawan bencana yang aktif d. Prosentase pemulihan pasca bencana	Pada Tahun 2023 seluruh Program Kegiatan BPBD dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan, seluruh capaian kinerja mencapai 100%	Capaian kinerja sesuai target
2.	Kabupaten Klaten adalah daerah rawan bencana dengan ancaman gunung berapi, banjir, gempa, longsor, angin puting beliung maka yang perlu mendapatkan perhatian dan didorong pada tahun 2023 adalah penambahan sarana prasarana dan logistik dalam penanganan bencana meliputi: a. Pemeliharaan di 3 (selter) yaitu: Shelter Prambanan, Shelter	Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023 dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : a. Telah dilaksanakan pemeliharaan 3 shelter yang berlokasi di Shelter Prambanan, Shelter Demakijo dan Shelter Menden pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor atau bangunan lainnya dan Penyediaan	Ketersediaan sarana prarana penanggulangan bencana

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>Demakijo dan Shelter Menden</p> <p>b. Peralatan kebencanaan meliputi: Tenda darurat (dan perawatannya), Perahu Karet (dan perawatannya) Armada Evakuasi, mobil dapur umum,</p> <p>c. Pengadaan Chainsaw</p> <p>d. Pengadaan HT dan Reapiter dikarenakan reapiter sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>e. Pengadaan Terpal, seng, usuk untuk penanganan darurat</p> <p>f. Pengadaan zak dan beronjong kawat untuk penanganan banjir</p>	<p>Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>b. Telah dilaksanakan Pemeliharaan Peralatan kebencanaan meliputi: Tenda darurat (dan perawatannya), Perahu Karet (dan perawatannya) Armada Evakuasi, mobil dapur umum pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>c. Pengadaan chainsaw, HT dan Reapiter belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dengan mengalokasikan anggaran pemeliharaan sarana prasaramna tersebut</p> <p>d. Pengadaan Terpal, seng, usuk untuk penanganan darurat Dan Pengadaan zak dan beronjong kawat untuk penanganan banjir sudah dilaksanakan pada sub kegiatan Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota</p>	
3.	Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin lama semakin berkurang dimana Jumlah ASN saat ini 24 orang (2023) akan menjadi 18 orang pada akhir tahun 2024.	Pada Tahun 2023 Jumlah ASN di BPBD sejumlah 17 orang, keterbatasan ASN tersebut diatasi dengan mengoptimalkan SDM yang ada dan mengoptimalkan peran relawan dan TRC Penanggulangan Bencana	Ketersediaan SDM di BPBD

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.27**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan**  
**Masyarakat tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Pemadam Kebakaran</b>		
1.	Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran yang masih belum memenuhi 15 menit	Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten melakukan pembangunan/penambahan 1 pos pemadam kebakaran diharapkan semakin optimal dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan bisa memenuhi <i>response time</i> yang ditetapkan dalam satu wilayah manajemen kebakaran 7,5 km dalam 15 menit.
<b>Sub Urusan Bencana</b>		
1.	Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai per jenis ancaman bencana yang ada di Kabupaten Klaten	Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui peningkatan kompetensi SDM, penyediaan SDM yang handal serta koordinasi yang cepat dan tepat
2.	Sarana prasarana penanggulangan bencana yang kurang memadai	Menyusun rencana kebutuhan peralatan kebencanaan dan berkordinasi dengan BNPB untuk pelaksanaan hibah barang peralatan kebencanaan

## 6. Urusan Sosial

Pelaksana program urusan Sosial pada tahun 2023 adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 21.696.686.605,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.973.419.213,- atau sebesar 87,45%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.21.266.792.105,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.18.569.922.213,- atau 87,32% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.429.894.500,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.403.497.000,- atau 93,86%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Sosial dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.28**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Sosial Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Persentase PMKS yang tertangani	%	85	86,31	101,54

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase potensi Sumber Kesejahteraan social yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	97,5	96,54	99,01
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial di luar panti	%	66	86,01	130,31
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	%	89	136,35	153,20

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang telah mendapat bantuan perlindungan sosial	%	100	100	100
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman makam pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan taman makam pahlawan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 indikator.

Dalam pelaksanaan program urusan Sosial, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.29**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Sosial tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2023</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
<b>1</b>	Lomba Kreasi Gizi Isi Piringku	Lomba yang diikuti oleh KPM PKH dengan menyajikan menu makanan untuk ibu menyusui. Lomba ini bertujuan untuk mengedukasi Masyarakat khususnya KPM PKH dalam Upaya pencegahan dan penanganan stunting. Kegiatan diadakan mulai Tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Sosial dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Sosial yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.30**  
**Kebijakan Strategis urusan Sosial Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1.	Menetapkan Petunjuk Teknis sebagai pedoman untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten bersumber dari DBHCHT Tahun 2023 sebanyak 6.331 orang dengan besaran Rp. 300.000,- selama 4 bulan. Petunjuk Teknis sudah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penyaluran BLT DBHCHT dari bulan Mei s.d Agustus	Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023	Mengurangi beban pengeluaran dan menjaga daya beli buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>2023, yang diberikan dalam 1 tahap sekaligus pada bulan September 2023.</p> <p>Dari target 6.331 penerima, realisasi sebesar 6.279 penerima</p>		
2.	<p>Menetapkan Petunjuk Teknis sebagai pedoman untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten bersumber dari DBHCHT pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 sebanyak 675 orang dengan besaran Rp. 300.000,- selama 4 bulan.</p> <p>Petunjuk Teknis sudah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penyaluran BLT DBHCHT dari bulan September s.d Desember 2023 , yang diberikan dalam 1 tahap sekaligus pada bulan Desember 2023.</p> <p>Dari target 675 penerima, realisasi sebesar 669 penerima</p>	<p>Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Mengurangi beban pengeluaran dan menjaga daya beli buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten</p>
3.	<p>Menetapkan sasaran Penerima BLT DBHCHT di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sebanyak 6.331 orang dengan besaran Rp. 300.000,- selama 4 bulan.</p>	<p>SK Bupati Klaten Nomor 460/252 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Klaten Tahun 2023</p>	<p>Memberikan BLT DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau dan atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>
4.	<p>Menetapkan sasaran Penerima BLT DBHCHT di Kabupaten Klaten pada Perubahan Tahun</p>	<p>SK Bupati Klaten Nomor 460/539 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan</p>	<p>Memberikan BLT DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau dan</p>

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
	Anggaran 2023 sebanyak 675 orang dengan besaran Rp. 300.000,- selama 4 bulan.	Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Klaten yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5.	<p>Membentuk Tim untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT di Kabupaten Klaten. Tim melakukan tugas sesuai perannya masing masing</p> <p>Keanggotaan Tim terdiri dari Asisten Ekbang dan Kesra, Bagian Perencanaan, Dissosp3APPKB, Disperinaker, DKPP, Bagian Hukum, BPKPAD dan Disdukcapil.</p> <p>Tim sudah melakukan proses monev dimulai dari proses menyandingkan data, pengusulan data dan memantau pelaksanaan di lapangan dan menyusun laporan hasil penyaluran</p>	SK Bupati Klaten Nomor 460/ 231 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Batuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023	Memantau agar pelaksanaan BLT DBHCHT di Kabupaten Klaten sesuai ketentuan. Tim ini terdiri dari personel Dissosp3appkb dan petugas lapangan verifikator data sasaran
6.	<p>Membentuk Tim yang bertugas untuk memberikan arahan dalam mendukung kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Keluarga Sejahtera di Kabupaten Klaten. Tim ini terdiri dari Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala Dissosp3appkb serta secretariat tim pelaksana.</p> <p>Pelaksanaan dari kebijakan</p>	SK Bupati Klaten Nomor 460/ 88 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023	Menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kesejahteraan keluarga di Kabupaten Klaten



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>strategis tersebut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kegiatan penanganan khusus bagi penerima Bansos;</li> <li>- Melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana</li> </ul> <p>Hasil dari Pelaksanaan dari kebijakan strategis tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para penerima Bansos terfasilitasi</li> <li>- Tertib administrasi data penyaluran bansos</li> </ul>		
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk Tim Koordinasi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Klaten. Keanggotaan Tim terdiri dari : Bupati, Sekda, Ass Pemkesra, Bappedalitbang, DissosP3APPKB, Kemenag, Dinkes, Disdik, Diskominfo, Disdukcapil, BPS, Bagian Kesra dan seluruh Camat.</li> <li>- Pelaksanaan dari kebijakan strategis tersebut :</li> <li>- Menyediakan informasi dan sosialisasi terkait PKH</li> <li>- Melakukan monev pelaksanaan PKH</li> <li>- Menyusun laporan berkala</li> <li>- Menyelesaikan masalah yang timbul.</li> </ul>	SK Bupati Klaten nomor 460/43 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023	Membentuk Tim Koordinasi untuk mengkoordinasikan ketersediaan pelayanan bagi peserta Program Keluarga Harapan, mensosialisasikan Program Keluarga Harapan di Tingkat Kabupaten, mengkaji perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Hasil dari Pelaksanaan dari kebijakan strategis tersebut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia informasi Program baik di Sekreatariat PKH maupun di SDM PKH</li> <li>- Kendala dan permasalahan di lapangan dapat terdeksi lebih cepat</li> <li>- Mengetahui perkembangan Program PKH dengan lebih detail</li> <li>- Menyelesaikan aduan masyarakat lebih cepat</li> </ul>		
8.	<p>Membentuk Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Klaten serta mengkoordinasikan perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan monev. Keanggotaan Tim terdiri dari : Bupati, Sekda, Ass Pemkesra, Kabid Dayalinjamsos, Subkoor Pemberdayaan Sosial dan Korkab PKH.</p> <p>Hasil dari Pelaksanaan dari kebijakan strategis tersebut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya anggaran kegiatan untuk PKH</li> <li>- Terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan PKH</li> <li>- Terlaksananya monev atas pelaksanaan kegiatan PKH</li> </ul>	SK Bupati Klaten nomor 460/44 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023	Sebagai pedoman untuk melakukan koordinasi, pendampingan, pelatihan teknis, dan pengembangan sistem informasi dan manajemen dalam rangka pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Tim ini beranggotakan Kepala Dissosp3appkb, Kepala Bidang Dayalinjamsos, Kepala Bidang Rehabsos, Koordinator Kabupaten SDM PKH dan Sekretariat.
9.	Membentuk Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Program	SK Bupati Klaten nomor 460/438 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati	Sebagai pedoman untuk melakukan koordinasi, pendampingan, pelatihan teknis, dan pengembangan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Keluarga Harapan di Kabupaten Klaten serta mengkoordinasikan perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan monev. Keanggotan Tim terdiri dari : Bupati, Sekda, Ass Pemkesra, Kabid Dayalinjamsos, Subkoor Pemberdayaan Sosial dan Korkab PKH.</p> <p>Hasil dari Pelaksanaan dari kebijakan strategis tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya anggaran kegiatan untuk PKH</li> <li>- Terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan PKH</li> <li>- Terlaksananya monev atas pelaksanaan kegiatan PKH</li> </ul>	<p>Klaten Nomor 460/44 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023</p>	<p>sistem informasi dan manajemen dalam rangka pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Tim ini beranggotakan Kepala Dissosp3appkb, Kepala Bidang Dayalinjamsos, Kepala Bidang Rehabsos, Koordinator Kabupaten SDM dan Sekretariat.</p>

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Sosial pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.31**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Sosial**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Urusan Sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp22.749.418.171,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp16.876.125.000,00 atau sebesar 74,18%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp22.204.520.916,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp16.382.490.000,00 atau 73,78% dan Alokasi Belanja Modal sebesar</p>	<p>Telah ditindaklanjuti di Tahun 2023 anggaran sebesar Rp21.696.686.605,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp18.973.419.213,00 atau sebesar 87,45% meningkat jika dibandingkan tahun 2022</p>	<p>Peningkatan realisasi anggaran</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	Rp544.897.255,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp493.635.000,00 atau 90,59%. Secara agregat realisasi ini menurun cukup signifikan dari tahun 2021 yang mampu mencapai 91,6% sehingga perlu adanya perbaikan dalam hal perencanaan anggaran untuk urusan sosial		
2.	Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani adalah 129,46% atau telah melampaui target	Tahun 2023 Indikator Target Kinerja Sasaran Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani adalah 85% dengan realisasi 86,31% atau dengan capaian kinerja 101,54%, sesuai dengan target kinerja yang direncanakan dan telah melampaui target.	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani melebihi target yang direncanakan

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Sosial beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.32**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Sosial tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Terpadu (DT) Jateng, Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum berjalan secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa/ Kelurahan</li> <li>b. Perbaikan tata kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui penguatan regulasi di tingkat kabupaten</li> <li>c. Peningkatan kapasitas SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pelatihan pengelolaan Data Terpadu (DT) Jawa Tengah, Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</li> <li>d. Mendorong penganggaran desa dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</li> </ul>

### 3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Urusan Pangan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi Informatika, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan, Urusan Kearsipan dan Urusan Pertanahan

#### 1. Urusan Tenaga Kerja

Pelaksana program urusan Tenaga Kerja pada tahun 2023 adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

##### A. Capaian Kinerja program

Urusan Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14.215.336.270 dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.168.086.953 atau sebesar 71,53%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp14.215.336.270 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 10.168.086.953 atau 71,53 %

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Tenaga Kerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.33**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,00	4,20	116,00
*) <i>Indikator negatif,, semakin rendah capaian semakin baik, rumus capaian =</i> Target – (Realisasi - Target) $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$				

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	%	87	70	80,46
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	12	12,48	104,03
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	22,5	14,05	62,44
Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator dan Capaian Kinerja “Rendah” sebanyak 1 Indikator.
- Capaian Kinerja Program kategori “Rendah” adalah Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui mekanisme

layanan antar kerja dalam wilayah. Capaian kinerja “Rendah” dikarenakan:

- 1) Belum adanya kesesuaian antara lowongan kerja yang ada dengan keahlian dan kelulusan pencari kerja yang ada.
- 2) Pada Tahun 2023 tidak ada penempatan AKAD ( Antar Kerja Antar Daerah)

Tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- 1) Optimalisasi Penyelenggaraan Job Fair dalam rangka penempatan pencari kerja di Perusahaan.
- 2) Mengupayakan pelatihan untuk meningkatkan skill bagi tenaga kerja yang perusahaanya belum mempunyai Lembaga pelatihan.
- 3) Melaksanakan Pelatihan Kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sebagai contoh pelatihan Jahit garmen dan pelatihan otomasi industri, bekerjasama dengan perusahaan terkait

### **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

### **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

### **D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Tenaga Kerja yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.34**  
**Kebijakan Strategis urusan Tenaga Kerja Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Klaten dengan Tugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dan Pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Klaten. Pelaksanaan Rapat koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit dengan membahas isu-isu strategis ketenagakerjaan antara lain yaitu :	Keputusan Bupati No.560/115 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Klaten	Peran pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif, maka dalam mengambil berbagai kebijakan khususnya kebijakan ketenagakerjaan  Masalah yang diselesaikan untuk membangun sarana

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>1. Penutupan Perusahaan Sritex di Surakarta yang berakibat banyak tenaga kerja Klaten kena PHK, sehingga perlu adanya koordinasi dengan perusahaan di Klaten agar bisa menampung tenaga kerja yang terkena PHK.</p> <p>2. Pencegahan mogok kerja.</p> <p>3. Penentuan UMK Kabupaten Klaten.</p> <p>Hasil : Proses Pengusulan UMK Tahun 2024 Kabupaten Klaten ke Bupati lalu dilanjutkan ke Provinsi.</p> <p>Kebijakan: Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang UMK Jawa Tengah Tahun 2024.</p>		<p>hubungan industrial yang strategis untuk memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah serta pihak lain yang terkait di bidang ketenagakerjaan.</p>
2	<p>Membentuk Tim Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Kabupaten Klaten</p> <p>Proses kegiatan dilaksanakan dengan cara monitoring, evaluasi ke perusahaan dengan melakukan pembinaan perusahaan yang belum mengikutkan tenaga kerjanya dalam kepesertaan BPJS, perusahaan yang baru mengikutkan sebagian program BPJS, pembinaan perusahaan yang menunggak iuran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan</p> <p>Hasil kegiatan adalah meningkatnya kepesertaan BPJS bagi para pekerja di perusahaan.</p>	<p>Keputusan Bupati Klaten No. 560/113 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Kabupaten Klaten</p>	<p>Melaksanakan program jaminan sosial bagi pekerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan peningkatan fasilitasi kesejahteraan pekerja di Kabupaten Klaten</p>
3	<p>Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Klaten dengan proses pelaksanaan kegiatan adalah dengan melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Pengupahan Kabupaten Klaten untuk mengusulkan UMK Kabupaten Klaten dan melakukan sosialisasi terkait UMK Kabupaten Klaten Tahun 2024.</p> <p>Proses kegiatan dilaksanakan dengan cara monitoring, evaluasi ke perusahaan tentang penerapan UMK Tahun 2024 Kabupaten Klaten di perusahaan.</p>	<p>Keputusan Bupati Klaten No. 560/114 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Klaten.</p>	<p>Mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja di Kabupaten Klaten, untuk mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya.</p>



<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
4	<p>Membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten. Pelaksanaan dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi bagi disabilitas dan launching Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten. Hasil dari kegiatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan sosialisasi dengan perusahaan dan para penyandang disabilitas.</li> <li>2. Dilaksanakan seleksi minat bakat bagi para penyandang disabilitas.</li> <li>3. Pendataan tenaga kerja disabilitas di perusahaan serta lowongan untuk penyandang disabilitas.</li> </ol>	Keputusan Bupati Klaten No. 560/230 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten	Memberikan kemudahan akses terhadap layanan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten kepada penyandang disabilitas.
5	<p>Menunjuk Peserta pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Tahun Anggaran 2023, yang berasal dari kelompok buruh tani tembakau/ keluarganya dan warganya yang ditetapkan dengan keputusan bupati, jenis pelatihan yang dilaksanakn adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan Otomotif dengan peserta sebanyak 40 Orang.</li> <li>b. Pelatihan Las dengan peserta sebanyak 67 orang</li> <li>c. Pelatihan Menjahit dengan peserta sebanyak 85 orang</li> </ol> <p>Peserta Pelatihan telah mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai nilai tambah dalam meningkatkan skill untuk bekal untuk mencari pekerjaan</p>	Keputusan Bupati Klaten No.563/178 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Peserta Pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Tahun Anggaran 2023	Menunjuk peserta pada kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi tahun anggaran 2023 dalam rangka meningkatkan ketrampilan bagi pencari kerja

### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.35**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Tenaga Kerja**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan program urusan wajib bukan pelayanan dasar yang berkaitan dengan tenaga kerja mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.706.526.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.055.495.833,00 atau sebesar 71,07%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp5.692.006.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp4.055.495.833,00 atau 71,25%.	Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023. Urusan Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14.215.336.270 dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.168.086.953 atau sebesar 71,53% meningkat jika dibandingkan tahun 2023. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp14.215.336.270 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 10.168.086.953 atau 71,53 % meningkat jika dibandingkan tahun 2023	Meningkatnya serapan anggaran
2.	Realisasi anggaran belanja (71,25%) lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya (74,05%). Namun demikian realisasi anggaran tersebut masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi pada tahun 2022 anggaran belum terserap secara optimal disebabkan beberapa hal, antara lain adalah: 1. Dana bantuan social penciptaan lapangan kerja kepada pekerja rentan social hanya terserap Rp 655.200.000 yaitu 32,36% dikarenakan calon penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan sebagai amanah Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Belanja Wajib Perlindungan Sosial Dalam Rangka	Sudah ditindaklanjuti dengan :  1. Tidak ada anggaran Dana Bansos pada tahun 2023 2. Tidak mengalokasikan anggaran untuk pelatihan CPMI karena biaya pelatihan dibebankan langsung kepada CPMI	

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2023</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>Mendukung Penanganan Dampak inflasi Yang Pendanaannya Bersumber Daeri Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.</p> <p>2. Anggaran Subkegiatan peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia(PMI) tidak terserap dikarenakan P3MI masih membebankan biaya kepada CPMI sehingga perubahan anggaran pagu sialihkan atau di nol kan.</p> <p>Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Tenaga Kerja sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>		
3.	<p>Terdapat 2 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Program dengan realisasi Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 (tiga) indikator, kategori “Sangat Rendah” sebanyak 1 (satu) Indikator. Adapun indikator sasaran dengan kategori sangat rendah tersebut adalah persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (34,13%) Capaian indikator sasaran program yang mendapatkan kategori sangat rendah sudah diberikan penjelasan dan alasannya. Pada tahun berikutnya diharapkan urusan Tenaga kerja memberikan lebbih perhatian terhadap indikator kinerja sasaran dan kinerja program yang masih mendapatkan</p>	<p>Pada tahun 2023 telah Melakukan penyeselarasan indikator dan target-target kinerja yang tertuang pada dokumen perencanaan Disperinaker dengan RPJMD sehingga capaian kinerja meningkat.</p>	<p>Peningkatan capaian kinerja sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	kategori sedang dan sangat rendah.		
4.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, sudah diberikan penjelasan terkait kebijakan strategis tersebut.	Pada tahun 2023 telah diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan.	Memberikan penjelasan terkait informasi kebijakan strategis yang ditetapkan
5.	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti.		
6.	Uraian masalah dan solusi pada Urusan Tenaga Kerja telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi.		

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Tenaga Kerja beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.36**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Tenaga Kerja tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Belum adanya kesesuaian antara lowongan kerja yang ada dengan keahlian dan kelulusan pencari kerja yang ada.	Melaksanakan Pelatihan Kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sebagai contoh pelatihan Jahit garmen dan pelatihan otomasi industri, bekerjasama dengan perusahaan terkait.
2	Masih Adanya Perusahaan Yang Belum Melaksanakan UMK.	Melakukan koordinasi dengan Satuan Pengawas Ketenagakerjaan tingkat Provinsi, melakukan pembinaan kepada perusahaan, Menerbitkan Surat Edaran kepada Perusahaan menengah besar untuk melaksanakan UMK

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.	Belum tersedia BLK tingkat Kabupaten, sehingga berakibat perencanaan pelatihan terhadap tenaga kerja itu terbatas. Sehingga tenaga kerja bersertifikat kompetensi masih rendah.	Mengusulkan pemihakan anggaran kepada Daerah, Provinsi dan Pusat untuk mendirikan BLK di tingkat Kabupaten. Optimalisasi Lembaga Pelatihan di Perusahaan untuk meningkatkan skill tenaga kerja di perusahaan. Mengupayakan pelatihan untuk meningkatkan skill bagi tenaga kerja yang perusahaannya belum mempunyai Lembaga pelatihan.
4	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah	Upaya yang dilakukan adalah dengan dukungan keikutsertaan Program BPJS Ketenagakerjaan melalui peningkatan kerjasama BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Klaten. Tindak lanjut dari kerjasama tersebut, telah dilakukan kegiatan bersama dengan BPJS ketenagakerjaan, Polri, Kejaksaan dan stakeholder terkait untuk pembinaan kepada perusahaan yang menunggak iuran BPJS ketenagakerjaan dan Perusahaan yang mendaftarkan sebagian program jaminan sosial ketenagakerjaan.
5	Masih banyak Perusahaan yang belum memenuhi ketentuan penyusunan Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama serta struktur skala upah bagi perusahaan yang memiliki lebih dari 10 karyawan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerbitkan Surat Edaran kepada Perusahaan baik dari Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Klaten</li> <li>- Melaksanakan Bintek penyusunan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja bersama dan Struktur Skala Upah</li> </ul>

## 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksana program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.569.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.517.539.870,- atau sebesar 96,70%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.569.250.000,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 1.569.250.000,- atau 96,70 %.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara

rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.37**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,67	69,39 *	94,19
*Data belum rilis dari BPS, menggunakan data tahun 2022				
Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	740	723,67	97,79

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	0,60	2,18	363
Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar	%	100	100	100
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	100	100	100
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	%	46,20	50	108,22
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa/Kelurahan layak anak	%	76,3	100	131
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 2 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator
- Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 indikator.

Dalam pelaksanaan program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.38**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
<b>1</b>	SITIE KEDELAK	Sebuah inovasi melalui aplikasi untuk mengetahui / evaluasi dalam pemenuhan hak anak di tingkat kecamatan, Desa maupun kelurahan.
<b>2</b>	KATCA KETAWA	Sebuah layanan online untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Katca Ketawa yang artinya Angkat Bicara untuk kesehatan Jiwa)

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.39**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Tahun 2023**

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Kabupaten Layak Anak Tingkat NINDYA	Pemerintah Kabupaten Klaten	Kementrian PPPA-RI
2	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Pemerintah Kabupaten Klaten	Kementrian PPPA-RI
3	PPEP (Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan) Juara 2 Tingkat provinsi Jawa Tengah	DISSOSP3APPKB Kab. Klaten	DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.40**  
**Kebijakan Strategis urusan Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Menetapkan dan membentuk pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara Kabupaten Klaten Masa Bakti 2023-2026. Pengurus ini terdiri dari lintas sector dengan pihak terkait. Lembaga ini telah berperan secara optimal dalam penanganan kasus korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Klaten.	SK Bupati Klaten Nomor 464/245 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mutiara Kabupaten Klaten Masa Bakti 2023-2026.	Meningkatkan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak agar memperoleh layanan yang memadai dan optimal

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.41**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan**  
**dan Perlindungan Anak**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp946.073.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp854.544.480,00 atau sebesar 90,33%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp918.858.500,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp829.796.480,00 atau 90,31% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp27.215.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp24.748.000,00 atau 90,94 %. Secara agregat meningkat signifikan dibanding tahun 2021	Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.569.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.517.539.870,- atau sebesar 96,70%. Realisasi sebesar 96,70% meningkat secara signifikan dibanding tahun 2022.	Peningkatan serapan anggaran

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
2.	Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Skor Kabupaten Layak Anak belum dapat memenuhi target yang ditetapkan	Tahun 2023 untuk Skor Kabupaten Layak Anak meningkat dan tingkatan KLA juga meningkat dari KLA Madya menjadi KLA Nindya.	Peningkatan capaian kinerja Kinerja Sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Skor Kabupaten Layak Anak

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.42**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Keterbatasan SDM di Bidang PPPA dengan personil Kabid, 1 Subkor 1 dan 1 staf serta 1 THL yang mengakibatkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kurang optimal terutama terkait pendampingan dan penjangkauan.	Sudah mengajukan penambahan personil ke BKPSDM dan sudah mendapatkan tambahan 1 personil

### 3. Urusan Pangan

Pelaksana program urusan Pangan pada tahun 2023 adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

#### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp33.678.287.038,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp30.076.172.214,- atau sebesar 89,30%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp33.575.379.538,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp29.974.642.214,- atau 89,28% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp102.907.500,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp101.530.000,- atau 98,66 %.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.43**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pangan Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Skor Pola Pangan Harapan	Skor	90,75	89,6	98,73

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan utama/beras	Ton	275.720	286.141	103,78
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi	K.kal/kapita/hari	3.045	2.862	93,99
	Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	85,5	79,41	92,88
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	12	10,25	85,42
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	84	81	96,43

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1.
- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator.

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pangan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.44**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pangan Tahun 2023**

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Juara III Lomba Kreasi Olahan Pangan Lokal	TP PKK Kabupaten Klaten	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pangan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pangan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.45**  
**Kebijakan Strategis urusan Pangan Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	<p>Menetapkan lokasi dan alokasi kegiatan pembelian gabah kering dalam penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembelian gabah kering sebanyak 30.000 kg untuk 3 (tiga) gabungan kelompok tani masing-masing mendapat 10.000 kg.</li> <li>- Gabungan kelompok tani penerima gabah kering antara lain : Gapoktan Jujur Makmur Desa Demak Ijo Kecamatan Karangnongko, Gapoktan Ngudi Raharjo Desa Joho Kecamatan Prambanan dan Gapoktan Budi Raharjo Desa Pundungan Kecamatan Juwiring.</li> <li>- Alokasi bantuan pembelian gabah kering telah dikelola dan dimanfaatkan oleh gabungan kelompok tani.</li> </ul>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 521/186 Tanggal 30 Mei 2023 tentang Lokasi dan Alokasi Kegiatan Pembelian Gabah Kering dalam Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Mendukung peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten dengan pemberian bantuan gabah kering untuk pengisian lumbung pangan masyarakat sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dan masyarakat.</p>
2	<p>Menetapkan lokasi dan alokasi kegiatan pembangunan lumbung pangan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota untuk 2 (dua) gapoktan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gapoktan Tani Subur Desa Tambak Kecamatan Karangdowo mendapat alokasi berupa</li> </ul>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 521/187 Tanggal 30 Mei 2023 tentang Lokasi dan Alokasi Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada</p>	<p>Mendukung peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Klaten dengan penyediaan fisik prasarana dan sarana lumbung pangan masyarakat.</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>pembangunan lumbung pangan masyarakat, Pembangunan rumah <i>Rice Milling Unit</i> dan bed drayer, pembangunan lantai jemur dan pengadaan <i>Rice Milling Unit</i> dengan total anggaran Rp774.000.000,-</p> <p>- Gapoktan Sri Mulih Desa Cokro Kecamatan Tulung mendapat alokasi berupa pembangunan rumah <i>Rice Milling Unit</i> dan bed drayer, pengadaan <i>Rice Milling Unit</i> dan pengadaan bed drayer dengan total anggaran Rp 615.000.000,-</p>	<p>Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023</p>	

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pangan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.46**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pangan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Program urusan wajib non pelayanan dasar Pangan dilaksanakan oleh OPD Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, di Tahun 2022, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.722.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.567.425.100,00 atau sebesar 95,83%.</p> <p>Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp3.722.500.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar</p>	<p>Mempertahankan capaian realisasi anggaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya</p> <p>Tahun 2023 urusan pangan mendapat alokasi anggaran lebih besar dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp33.678.287.038,- dengan realisasi anggaran sebesar</p>	<p>Penyerapan realisasi anggaran dapat tercapai secara optimal</p> <p>Perencanaan anggaran sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN lebih cermat dengan memperhitungkan jumlah pegawai</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	Rp3.567.425.100,00 atau 95,83%. Realisasi anggaran belanja Urusan Pangan pada tahun 2022 sebesar 95,83% masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja tahun 2021 yaitu sebesar 81,14%.	Rp30.085.716.514,- atau sebesar 89,33%.  Hal ini dikarenakan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam DPA tahun 2023 masuk dalam urusan pangan dimana anggaran terbesar ada di subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan silpa anggaran besar pada sub kegiatan tersebut sehingga berpengaruh pada realisasi anggaran yang dicapai untuk urusan pangan.	
2.	Urusan Pangan memperlihatkan capaian indikator kinerjanya yang cukup bagus, dari total 1 indikator Kinerja Sasaran, dengan capaian “Sangat Tinggi”. Terdapat 5 Indikator Kinerja Program, dengan kategori “Sangat Tinggi” ada 4 indikator dan kategori “Tinggi” ada 1 indikator.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada Tahun 2023 Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1.</li> <li>• Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator.</li> </ul>	Mempertahankan Capaian Kinerja “sangat tinggi” dan “tinggi”

#### **F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pangan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.47**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pangan tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Beras Rojolele Srinuk yang beredar di masyarakat belum terjamin kualitasnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pendampingan dan fasilitasi alat pembersih beras kepada gapoktan produsen beras Rojolele Srinuk</li> <li>2. Dilakukan pengawasan proses produksi sampai pengemasan secara terpadu oleh pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)</li> <li>3. Dilakukan pemantauan, pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pengoplosan beras</li> </ol>
2.	Masyarakat belum memanfaatkan secara maksimal lahan pekarangan	Memberikan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui kegiatan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

#### **4. Urusan Lingkungan Hidup**

Pelaksana program urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2023 adalah Dinas Lingkungan Hidup.

##### **A. Capaian Kinerja Program**

Urusan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran sebesar Rp42.022.417.862,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp38.224.820.865,00 atau sebesar 91,01 %. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp31.131.302.837,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp28.854.957.910,00 atau 92,69% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp10.891.115.025,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp9.389.862.955,00 atau 86,22 %

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



**Tabel 3.48**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Indeks kualitas air	Indeks	47,69	58,46	122
Indeks kualitas udara	Indeks	87,85	88,16	100,35
Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	43,08	26,56	61,65
Indeks kinerja Pengelolaan Persampahan (IPKS)	Indeks	61,95	60,14	98

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100	100	100
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	100	100	100
	Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100	100	100
	Persentase kampung iklim yang terbentuk	%	40	40	100
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik yang dikelola dengan baik	%	100	100	100
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	%	100	100	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	65	63	97,44

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100	100	100
	Persentase saka kalpataru yang dibina	%	100	100	100
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	kelompok	3	5	167
	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	%	100	100	100
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	%	100	100	100
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	%	76,32	72,62	95,15
	Persentase jumlah sampah yang berkurang	%	28	29,64	105,86

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 4 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 indikator Capaian Kinerja “Rendah” sebanyak 1 Indikator
- Terdapat 14 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 14 indikator,
- Capaian Kinerja Sasaran, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang kategori “Rendah” adalah sebagai berikut:

Indeks Kualitas tutupan lahan dengan capaian kinerja hanya 61,65 %. Hal ini disebabkan karena adanya kendala beberapa data yang belum bisa diinput, Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi hal ini yaitu

- a. Peninjauan ulang luasan wilayah beserta luas wilayah kehutanan dari wali data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- b. Verifikasi terhadap data yg diunggah di sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup KLHK. Titik/luasan yang dimasukkan DLH diverifikasi dan dikoreksi KLHK
- c. Adanya pembobotan (koefisien) terhadap tutupan lahan meliputi hutan primer, hutan sekunder, belukar, Ruang Terbuka Hijau, turus jalan, sempadan sungai dan lain-lain

Dalam pelaksanaan program urusan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.49**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2023</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
1.	Sistem Informasi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (SI TPA)	Sistem Informasi Tempat Pembuangan Akhir (SI TPA) adalah aplikasi website yang dapat membantu penggunanya untuk melakukan pencatatan masuk nya sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari berbagai Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Pada Aplikasi ini juga terdapat fitur yang dapat membantu penggunanya untuk menganalisis hasil dari pengolahan sampah.

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2023</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
2.	SIMBAH LESTARI (Siapa Bahagia Sumbang Bibit untuk Klaten Lestari)	Aplikasi Ekosistem Kebutuhan Penghijauan, Penyedia Bibit, Pecinta Lingkungan dan masyarakat untuk meningkatkan Indek Kualitas Tutupan Lapah (IKTL), pengurangan dan pencegahan lahan kritis serta meningkatkan keanekaragaman hayati
3.	SUSU KALI (Sak Uwong Sak Uwit Klaten Lestari)	Slogan dan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup yang dimaksudkan untuk meningkatkan Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Jika setiap penduduk di Kabupaten Klaten menanam 1 pohon setiap tahun, maka pohon yang tertanam lebih dari 1 juta pohon
4.	LILAH SUBAIDAH (Limbah Rumah Terolah, Lingkungan Sehat, Sungai Bersih dan Indah)	Jejaring upaya pengolahan limbah domestik (rumah tangga) dalam upaya sanitasi lingkungan dan peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Klaten
5.	SIKEHATI (Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati)	Dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat tentang keanekaragaman hayati tumbuhan dan manfaatnya melalui pemasangan kode barcode di Ruang Terbuka Hijau

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.50**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1.	Penghargaan Adipura Tahun 2023	Pemerintah Kabupaten Klaten	Menteri LHK
2.	Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional	SMPN 2 Karangnongko Klaten	Menteri LHK dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi RI

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
3.	Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Tengah	SMPN 1 Kalikotes Klaten	Gubernur Jawa Tengah
4.	Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Tengah	SMPN 1 Woonosari Klaten	Gubernur Jawa Tengah
5.	Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Tengah	SMPN 4 Klaten	Gubernur Jawa Tengah
6.	Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Tengah	SMPN 6 Klaten	Gubernur Jawa Tengah
7.	Desa Mandiri Sampah kategori Madya Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Desa Bugisan Prambanan	Gubernur Jawa Tengah

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Lingkungan Hidup yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.51**  
**Kebijakan Strategis urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1.	Membentuk Tim Review Kajian Lahan Kritis Lereng Merapi di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023. Tim di ketuai oleh Kepala Dinas DLH beranggotakan pejabat struktural DLH serta unsur dari PUPR , DKPP, BPBD dan Unwida. Tim ini bertugas membantu menyediakan data dan/atau informasi yang diperlukan dalam Review Kajian Lahan Kritis Lereng Merapi di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023; b. berpartisipasi aktif dalam focus group discussion untuk penetapan isu prioritas yang menjadi program utama dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup di daerah Kabupaten Klaten; C. menyampaikan saran, masukan, dan koreksi terhadap Review Kajian Lahan Kritis Lereng Merapi di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 yang disusun dalam batas kewenangan; dan d. melakukan validasi data dan/atau informasi sesuai dengan format laporan Review Kajian Lahan Kritis Lereng Merapi	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 660.1 / 127 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Review Kajian Lahan Kritis Lereng Merapi di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023	Validasi data lahan kritis lereng Merapi
2.	Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2023. Tim di Ketuai oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, personelnnya terdiri dari internal DLH, Unsur BPDAS dan Hutan Lindung Solo, Unsur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X, Dinas LHK Provinsi Jawa	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 660.1 / 128 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 660.1/41 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023	Memberikan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Klaten

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Tengah, Unsur Seksi Konservasi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah, Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten, Unsur Dinas Dukcapil Kabupaten Klaten, Unsur DPUPR Kabupaten Klaten, Unsur BPBD Kabupaten Klaten, Unsur DKPP Kabupaten Klaten, Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Unsur Akademisi Perguruan Tinggi dan Unsur LSM. Setiap Tim mempunyai tugas memberikan Data dan Informasi sesuai dengan Tupoksi masing-masing terkait pengelolaan lingkungan hidup.		

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.52**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Komisi 3 DPRD Kabupaten Klaten menyampaikan apresiasi dan selamat atas perolehan Adipura untuk Tahun penilaian 2022, namun masih ada permasalahan yang perlu kita perhatikan dan dicari solusi bersama diantaranya: 1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perkantoran, bangunan gedung yang kurang memadai. (Kondisi saat ini kantor masih menjadi 2 lokasi,	1. Pada Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan pengadaan beberapa sarana prasarana , di antaranya adalah : a. Pengadaan Buldozer sebanyak 1 unit b. Pengadaan Excavator kapasitas 13 ton sebanyak 1 unit c. Pengadaan Dump Truck sejumlah 2 unit d. Pengadaan truck Armroll container	1. Optimalisasi sarana prasarana dan SDM sebagai pendukung kinerja DLH 2. Penerapan teknologi tepat guna dalam rangka penanganan sampah di TPA agar tidak terjadi gunungan sampah

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>ditambah garasi / workshop).</p> <p>2. Kurangnya SDM secara Kualitas dan Kuantitas, khususnya SDM Teknis.</p> <p>3. Penanganan Persampahan / Pengangkutan belum dapat mengcover semua wilayah karena keterbatasan Armada dan personel untuk pengangkutan. (Kondisi saat ini armada sebagian ada yang rusak, sebagian ada yang kurang layak).</p> <p>4. Penanganan Air Lindi di TPA Troketon belum dapat dilaksanakan dikarenakan mekanisme yang digunakan tidak sesuai.</p> <p>5. Pengembangan TPA Troketon tidak hanya perluasan area tetapi perlu adanya Teknologi Tepat Guna untuk penanganan sehingga dapat mengurangi timbulan sampah yang ada.</p>	<p>sebanyak 1 unit</p> <p>e. Pengadaan Kendaraan pengangkut sampah beroda 3 sebanyak 3 unit</p> <p>f. Pengadaan Gerobag pilah sebanyak 9 unit</p> <p>g. Pengadaan container sampah kapasitas 6 m<sup>3</sup> sebanyak 3 unit</p> <p>h. Pengadaan container sampah tertutup sebanyak 3 unit</p> <p>i. Pembangunan penambahan Gedung kerja</p> <p>2. Pada tahun 2023 telah ada penambahan tenaga teknis sebanyak 3(tiga) orang</p> <p>3. Pada tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan pengadaan armada pengangkut sampah sebanyak 6 (enam) unit sehingga diharapkan bisa mengatasi permasalahan pengangkutan sampah.</p> <p>4. Untuk Penanganan Air Lindi di TPA Troketon pada anggaran 2023 perubahan ini melalui DPUPR Bidang Cipta Karya telah melakukan penyusunan DED Instalasi Pengolah Lindi (IPL) dan di tahun anggaran 2024 akan direncanakan pembangunan IPL baru sehingga untuk dapat mengolah air lindi dengan baik,terutama saat debitnya tinggi di musim penghujan. sedangkan untuk</p>	



No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		<p>memperbaiki proses di IPL eksisting saat ini, pada tahun 2024 direncanakan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di TPA Troketon yang dapat mengolah lindi dengan tepat sesuai karakteristiknya.</p> <p>Selama ini air lindi di TPA Troketon dapat terkondisikan dengan baik dan tidak menjadi permasalahan hingga keluar area TPA dikarenakan telah dilakukan resirkulasi lindi ke zona landfill. langkah ini juga sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kelembaban di zona landfill untuk mengantisipasi kebakaran TPA musim kemarau panjang ini.</p> <p>5. Pada tahun 2023 DLH menerima permohonan kerjasama dari pihak swasta terkait pengolahan sampah di TPA Troketon dengan cara pemanfaatan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) yang memanfaatkan sampah lama (mining landfill) dan sampah baru dengan kapasitas pengolahan 200 ton per hari. saat ini permohonan kerjasama tersebut memasuki penyusunan dokumen studi kelayakan (FS) yang dilakukan oleh pihak swasta/investor</p>	

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Lingkungan Hidup beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.53**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Tidak terlaksananya pengadaan tanah uruk untuk TPA Troketon dikarenakan tidak ditemui kesepakatan harga antara penyedia dan pejabat pengadaan di sistem nego e-katalog	Pada tahun anggaran 2024 akan diadakan pengadaan tanah uruk di awal tahun
2.	Tidak terlaksananya kegiatan disebabkan belum adanya regulasi/payung hukum dalam kerjasama penanganan pengumpulan limbah B3	Akan diusulkan regulasi dalam pengumpulan limbah B3

## 5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksana program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil pada tahun 2023 adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.10.784.263.836 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.436.744.608 atau sebesar 87,50% Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.9.483.513.816 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.8.267.284.658 atau 87,18% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.1.300.750.020 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.169.459.950 atau 88,91%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.54**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil**  
**Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	88,90	92,1	103,6

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik	%	99,75	99,29	99,54
	Cakupan Kepemilikan KK	%	99,9	99,97	100,07
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	67,2	68,17	101,45
Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%	98,94	99,04	100,10
	Cakupan penerbitan akta kematian	%	100	100	100
	Cakupan penerbitan akta perkawinan	%	100	100	100
	Cakupan penerbitan akta perceraian	%	100	100	100
	Cakupan penerbitan akta pengesahan anak	%	100	100	100
	Cakupan penerbitan pengangkatan anak	%	100	100	100
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan database kependudukan	%	100	100	100
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	22	96,08	436,72

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan tahunan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 (satu) indikator.
- Terdapat 12 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 12 (dua belas) indikator.

Dalam pelaksanaan program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.55**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	GOLEK ANYELIR	Google Form, Google Spreadsheet dan e-Leaflet untuk Aduan Layanan Pembetulan Akta Kelahiran. Merupakan layanan yang memudahkan Layanan konsultasi terkait pengajuan pembetulan akta kelahiran.

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2023</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
2	ISLA	Asistensi Layanan Adminduk merupakan sistem yang berguna untuk membantu pelayanan administrasi kependudukan seperti pengisian formulir dan yang lainnya. Dalam pengajuan administrasi kependudukan diperlukan adanya formulir dimana masih dilakukan secara manual atau tulis tangan dan kurang jelasnya tulisan pada formulir dapat memperlambat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pelayanan administrasi kependudukan, maka diperlukan adanya sistem yang digunakan untuk mengisi formulir secara otomatis dan menghasilkan keluaran secara otomatis yang diharapkan bisa membantu mempermudah masyarakat dalam mengisi formulir dan juga mempermudah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.
3	MELATI POS	Mengantar Layanan Adminduk dengan sepenuh hati melalui pos. Inovasi ini memudahkan pengiriman dokumen adminduk kepada masyarakat dengan melalui POS Indonesia dimana masyarakat dalam pengambilan dokumen adminduk tidak harus ke kantor bisa melalui pos.

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.56**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil**  
**Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 (Nilai 94,83 – Zona Hijau)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ombudsman RI

## B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

## C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

## D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2023, tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil yang ditetapkan Kepala Daerah

## E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.57**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan**  
**dan Pencatatan sipil**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10.363.477.638,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.989.224.945,00 atau sebesar 86,74%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp9.814.811.388,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp8.468.952.943,00 atau 86,29% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp548.666.250,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp520.272.002,00 atau 94,82%. Pada tahun 2022, pelaksanaan program	Alokasi anggaran sebesar Rp.10.784.263.836 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.436.744.608 atau sebesar 87,50% realisasi anggaran tahun 2023 meningkat jika dibandingkan tahun 2022  Dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan sudah disiapkan seoptimal mungkin dengan tujuan kegiatan bisa berjalan lancar dan bisa mencapai target yang telah ditetapkan dengan mengedepankan prinsip efisien dan	Peningkatan serapan anggaran disertai Efisiensi dan efektivitas anggaran  Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>urusan wajib bukan pelayanan dasar yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Realisasi ditargetkan Tercapai dari yang ditargetkan sebesar 88,23% kemudian realisasinya sebesar 88,9%.</p>	<p>efektivitas</p> <p>Pada tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditargetkan 88,90 dan terealisasi sebesar 92,1 sehingga capaian kinerja sebesar 103,6%.</p>	
2.	<p>Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 (satu) indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”. Terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 12 (dua belas) indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “Sangat Tinggi”.</p>	<p>Pada tahun 2023 Capaian Kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruhnya “sangat tinggi” baik untuk Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator kinerja program</p>	<p>Mempertahankan capaian kinerja “sangat tinggi”</p>
3.	<p>Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya terkait serapan anggaran belum dapat ditindaklanjuti.</p>	<p>Tahun 2023 telah ditindaklanjuti terkait untuk optimalisasi serapan anggaran, serapan anggaran tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022, pada tahun 2022 serapan sebesar 86,74% dan meningkat menjadi 87,50% pada tahun 2023</p>	<p>Meningkatnya Serapan anggaran</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
4.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi.	Sudah ada mitigasi permasalahan, tindaklanjut dan monitoring evaluasinya	Tindak lanjut terhadap Permasalahan dan kendala yang ada

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.58**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil tahun 2023**

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Gedung Dukcapil masih menempati Gedung Bappeda dan Disnakertrans dengan kondisi ruangan yang terbatas dan belum sesuai standar untuk unit penyelenggara pelayanan publik	Sudah diusulkan dalam anggaran perubahan 2023 terkait pindahan kantor. Tetapi sampai akhir tahun belum bisa direalisasikan.
2.	Kondisi peralatan perekaman KTP di kecamatan sudah out of date dan perlu peremajaan alat rekam	Sudah dianggarkan di perubahan 2023 dan dibelanjakan untuk pembelian alat rekam berupa finger print sebanyak 10 buah
3.	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan updating data kependudukan	Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat lebih intensif melalui iklan di radio, pelayanan di <i>Car Free Day</i> , Peningkatan informasi di sosial media



## 6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksana program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten.

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.546.953.826,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.597.331.096,- atau sebesar 91,78%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 11.436.953.826,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 10.492.623.096,- atau 91,74 % dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 110.000.000,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 104.708.000,- atau 95,19 %

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.59**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7034	0,716	101,79 %

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	%	100	140	140
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase BUMDes berkembang dan maju	%	15,86	14,28	90,04
	Prosentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	%	100	100	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase PKK aktif	%	100	100	100
	Prosentase Posyandu aktif	%	100	100	100
	Prosentase Posyantek aktif	%	29,41	29,41	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 indikator.

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.60**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Pembina BUMDesa Terbaik II	Dispermasdes Kab. Klaten	Gubernur Jawa Tengah

## B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

## C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

## D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.61**  
**Kebijakan Strategis urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Mengatur tentang besaran rincian pagu alokasi dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDes dan melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembayaran iuran/premi BPJS Kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan RT/RW di Kabupaten dengan ketentuan: - Iuran sebesar 4% dibayarkan langsung dari APBD Kabupaten	Peraturan Bupati Klaten Nomor 974.16/472 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 974.16/378 Tahun 2022 tentang lokasi dan alokasi bantuan keuangan kepada desa untuk alokasi dana desa kabupaten klaten tahun anggaran 2023	Pedoman pelaksanaan kegiatan yang di danai dari ADD bagi seluruh desa di Kab. Klaten.  Manfaat dari kegiatan dimaksud adalah terselenggaranya program jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan RT/RW untuk menunjang kesejahteraan Aparatur Desa

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Klaten yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dispermasdes Kabupaten Klaten</p> <p>- Iuran sebesar 1% dibayarkan langsung dari ADD yang disalurkan setiap bulan berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan</p> <p>Manfaat dari kegiatan dimaksud adalah terselenggaranya program jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan RT/RW untuk menunjang kesejahteraan Aparatur Desa.</p>		
2	<p>Penetapan desa binaan sejumlah 52 Desa/Kelurahan yang diusulkan oleh Camat masing-masing 2 Desa/Kelurahan dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima pembinaan secara intensif</li> <li>2. Menerima evaluasi 10 program pokok PKK</li> <li>3. Menerima bimbingan, penilaian, pengendalian dan pelaporan program</li> </ol> <p>Adapun tujuan diadakannya Evaluasi dan Lomba Administrasi Desa Binaan adalah untuk:</p> <p>Memonitoring Kegiatan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Tertib Administrasi PKK Selama 3 Tahun</p> <p>Diadakan lomba-lomba antara lain :</p> <p>-Tertib Administrasi</p>	<p>SK Bupati NO. 0202/133. Tahun 2023 tanggal tentang Lokasi Desa Binaan Pemberdayaan tentang Lokasi Desa Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Tahun 2023</p>	<p>Penentuan Lokasi Desa/ Kelurahan Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Tahun 2023 Tertib administrasi di 52 Desa Binaan dapat tertata sesuai dengan Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021</p> <p>Kegiatan-kegiatan 10 Program Pokok PKK dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	PKK dan Dasawisma -Simulasi PAAR (Pokja I) -Tertib Administrasi UP2K-PKK (Pokja 2) -HATINYA PKK (Pokja 3) -Posyandu (Pokja 4)		

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.62**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.568.317.872,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.192.014.588,00 atau sebesar 85,62%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp9.568.317.872,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp8.192.014.588,00 atau 85,62%. Pada tahun 2022, pelaksanaan program urusan wajib bukan pelayanan dasar yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan serta Kelurahan. Diukur dalam Indeks Desa Membangun kemudian indeks yang ditargetkan sebesar 0,7034, ini menunjukkan Hasil Tercapai dari yang ditargetkan sebesar 0,7034.	Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023. alokasi anggaran sebesar Rp.11.546.953.826,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.597.331.096,- atau sebesar 91,78% meningkat jika dibandingkan tahun 2022. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.11.436.953.826,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.10.492.623.096,- atau 91,74%, meningkat jika dibandingkan tahun 2022. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.110.000.000,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.104.708.000,- atau 95,19 %  pada tahun 2023 Indeks Desa membangun ditargetkan sebesar 0,6914 dan terealisasi sebesar 0,716 atau 103,5%	Meningkatnya serapan anggaran dan capaian kinerja

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
2.	Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori "sangat tinggi". Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 6 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori "sangat tinggi".	Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023, seluruh capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa mencapai kategori "sangat tinggi"	Mempertahankan capaian kinerja "sangat tinggi"
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran. Kebijakan tersebut telah disertai dasar hukum dan tujuan/masalah yang diselesaikan.	Pada Tahun 2023 telah dijelaskan Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa disertai dasar hukum dan tujuan/masalah yang diselesaikan.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
4.	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti.	Pada Tahun 2023 Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti.	Tindak lanjut atas rekomendasi DPRD pada tahun anggaran sebelumnya

#### **F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.63**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat dan desa, dalam hal ini seluruh Desa di Kabupaten Klaten telah terbentuk LPMD akan tetapi peran dan fungsi LPMD belum dirasakan dampaknya kepada masyarakat	Mengoptimalkan peran dan fungsi LPMD dengan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
2.	Belum Optimalnya pemanfaatan potensi desa melalui BUMDes dimana seluruh Desa di Kabupaten telah membentuk BUMDes, sejauh ini BUMDes yang memiliki kategori berkembang sebesar 33 dan untuk BUMDes dengan kategori maju sebesar 20.	Melakukan pembinaan terhadap BUMDes untuk meningkatkan dan menggali potensi desa untuk dimanfaatkan.

## **7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pelaksana program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

### **A. Capaian Kinerja program**

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapat alokasi anggaran sebesar Rp15.445.815.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.525.433.557,00 atau sebesar 87,57%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp14.425.015.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp12.571.194.807,00 atau 87,15% dan Alokasi Belanja Modal sebesar R1.020.800.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp954.238.750,00 atau 93,48%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.64**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,26	0,78	-100
<p>*) <i>Indikator negatif,, semakin rendah capaian semakin baik, rumus capaian =</i></p> $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$				

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengendalian Penduduk	Persentase ketersediaan data pembangunan berkawasan kependudukan	%	100	<b>100</b>	<b>100</b>
	Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berkawasan kependudukan	%	85,71	85,71	100
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	%	72	65,88	91,5
	Cakupan PUS yang ingin ber_KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%	15,45	12,54*	118,8
<p>*) <i>Indikator negatif,, semakin rendah capaian semakin baik, rumus capaian =</i></p> $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$					
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB	%	82	79,48	96,9



<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB	%	75,42	88,48	117,3
	Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB	%	64,88	62,90	96,9
	Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB	%	63,29	73,43	116

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Rendah” sebanyak 1 Indikator
- Terdapat 8 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 8 indikator.
- Capaian Kinerja Sasaran, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kategori “Sangat Rendah” adalah sebagai berikut:
- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Rendah” sebanyak 1 Indikator. Indikator ini merupakan indikator kinerja regresif, semakin rendah capaian semakin baik. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Nasional 1,13 dan LPP Jateng 1,17 sedangkan LPP Klaten 0,78. Sehingga LPP Kabupaten Klaten masih dibawah angka Nasional dan Jateng. Upaya yang dilakukan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk dalam aspek Keluarga

Berencana adalah mengoptimalkan penggerakan dan penyuluhan keluarga berencana dengan intervensi di berbagai program kegiatan. Akan tetapi selain terkait program keluarga berencana masih banyak upaya lintas sector yang harus dilakukan untuk mengatasi pengendalian laju pertumbuhan penduduk diantaranya pemerataan kepadatan penduduk, pemerataan lapangan kerja, penetapan usia minimal pernikahan dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.65**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2023</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
1.	Algae untuk penurunan stunting	Inovasi tersebut merupakan inovasi untuk penurunan stunting. Sasaran utama adalah balita usia 24 -59 bulan dengan stunting di desa lokus stunting. Tujuan dari pemberian algae adalah meningkatkan daya tahan tubuh, memberikan tambahan zat gizi berupa spirulina sehingga diharapkan akan terjadi perbaikan status gizi. Pemberian Algae yg merupakan produk murni dari Kabupaten Klaten tersebut diberikan 2 kapsul/hari selama 60 hari

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.66**  
**Prestasi Pelaksanaan program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Satya lancana Wira karya	Bupati Klaten	Presiden RI
2	Capaian tertinggi Baksos Pelayanan KB dalam rangka Milad Aisyiah Se Jawa Tengah	Aisyiah Klaten	Gubernur Jawa Tengah

## B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

## C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

## D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.67**  
**Kebijakan Strategis urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Menetapkan terkait kewenangan Desa/Kelurahan dalam percepatan penurunan stunting yang akan digunakan sebagai pedoman Desa/Kelurahan dalam melakukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitive, dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi sinergi dan sinkronisasi di Kabupaten Klaten. Angka prevalensi stunting saat ini 14,41%, sehingga masih memerlukan intervensi yang terpadu agar dapat menurunkan angka stunting lebih optimal.	Perbup No. 46 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting	Mempercepat Penurunan Stunting
2	Menetapkan dan Menunjuk Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Penerima Alat dan Obat Kontrasepsi di Kabupaten Klaten, terdapat 95 Fasilitas Kesehatan yang ditunjuk untuk menerima Alat dan Obat kontrasepsi secara berkala. Pelaksanaan pada tahun 2023 terlaksana secara merata sesuai kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi di masing-masing fasilitas kesehatan.	SK Bupati Klaten Nomor 463/155 Tahun 2023 tentang Penunjukan Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Penerima Alat dan Obat Kontrasepsi di Kabupaten Klaten Tahun 2023.	Mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten.

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
3	Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Klaten untuk menunjang efektivitas dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Tim ini terdiri dari Lintas Sektor sebagai Ketua Pelaksana adalah Wakil Bupati Klaten dengan keanggotaan melibatkan seluruh jajaran dan pihak terkait.	SK Bupati Klaten Nomor 476/240 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 463/59 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Klaten Tahun 2022-2026.	Mempercepat Penurunan Stunting
4	Membentuk Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024 untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting.  Tim Audit Stunting bertugas menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan rencana tindak lanjutnya, memberikan arahan dan petunjuk terkait audit kasus stunting, mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan. Tim Audit Kasus Stunting dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Pakar. Tim Teknis yang terdiri dari lintas sector Dissosp3appkb, Dinas Kesehatan, RSD Bagas waras, Camat se-Kabupaten Klaten, Kepala Puskesmas, Penyuluh KB, Tim Pendamping Keluarga, Kader Posyandu se-Kabupaten Klaten serta Tim Pakar yang terdiri dari Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Obsgyn, Ahli Gizi dan Psikolog .	SK Bupati Klaten Nomor 476/188 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024.	Mempercepat Penurunan Stunting
5	Menetapkan dan Menunjuk Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan di Kabupaten Klaten Tahun 2023 untuk pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi tumbuh kembang anak melalui pengasuhan yang memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ditunjuk menjadi Kelompok BKB HI unggulan adalah Bina Keluarga Balita Anggrek yang beralamat di Dusun Pulegede, Desa Panggang, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.	SK Bupati Klaten Nomor 476/251 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan di Kabupaten Klaten Tahun 2023	Meningkatkan kualitas pengasuhan Seribu Hari Pertama Kehidupan, optimalisasi tumbuh kembang anak serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Kelompok BKB HI ini bertugas melaksanakan Kelas BKB tentang pengasuhan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 hak pasien dan keluarga) serta menjamin komitmen penyelenggaraan layanan, serta bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.		

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.68**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk**  
**dan Keluarga Berencana**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapat alokasi anggaran sebesar Rp15.312.942.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.762.798.760,00 atau sebesar 63,76%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp14.072.557.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp8.798.432.760,00 atau 62,52% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp1.240.385.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp964.366.000,00 atau 77,75%. Secara umum realisasi sudah meningkat dari tahun 2021 namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai presentase ideal yaitu diatas 95%	Sudah ditindaklanjuti pada Tahun 2023. Total anggaran Rp.15.445.815.000 penyerapan sebesar Rp.13.525.433.557,- atau sebesar 87,57% sudah meningkat dibandingkan tahun 2022	Meningkatnya serapan anggaran
2.	Indikator Kinerja Sasaran Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yaitu 0,11 atau mencapai 160,71% dari target	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Nasional 1,13 dan LPP Jateng 1,17 sedangkan LPP Klaten 0,78. Sehingga LPP Kabupaten Klaten masih dibawah angka Nasional dan Jateng	Pengendalian Laju Pertumbuhan penduduk

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.69**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga**  
**Berencana Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Kurangannya dukungan untuk operasional Kelompok kegiatan yang sangat mendukung penurunan stunting yaitu kelompok BKB (Bina Keluarga Balita)	Pembinaan kelompok BKB yang sudah ada oleh Penyuluh KB sesuai tupoksi
2	Masih kurangnya pencapaian peserta KB Aktif (65,88 %) karena : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya akseptor peserta KB Baru</li> <li>- Adanya pemutakhiran data BNBA melalui Aplikasi SIGA (data lebih valid)</li> <li>- Target Renstra 72% dengan sumber data berbeda (tidak ada BNBA)</li> </ul>	Memberikan support dan reward kader yang mendapat akseptor baru
3.	Masih kurangnya capaian KB paska salin (mendukung penurunan stunting) yaitu 43%, karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya edukasi kepada sasaran (bumil dan bulin)</li> <li>- Kurangnya peran support faskes memberikan layanan KBPP khususnya pasien BPJS karena tidak ada reward pembayaran khusus utk pelayananan KB paska melahirkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk Edukasi KB Pasca Persalinan (KBPP) saat pendampingan</li> <li>- Membuat edaran Bupati tentang keharusan meningkatkan capaian KBPP</li> </ul>
4	Kurangannya SDM baik di OPD dan Lapangan ( balai KB Kecamatan) yaitu ratio 1:8 (1 PLKB mengampu 8 Desa)	Berupaya mengoptimalkan tenaga yang ada meskipun banyak mengalami kendala karena keterbatasan SDM , karena ratio ideal adalah 1 PLKB : 2 desa
5	Kurang optimalnya peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam upaya penurunan stunting	Koordinasi secara berkala, pada saat perencanaan, monitoring kegiatan dan evaluasi kegiatan

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6	Pengolahan data melalui SIGA membutuhkan data layanan yang sangat rigid, sehingga sering menyebabkan tidak semua pelayanan terlupakan	Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan untuk pelaporan dengan mengoptimalkan peran kader KB

## 8. Urusan Perhubungan

Pelaksana program urusan Perhubungan pada tahun 2023 adalah Dinas Perhubungan

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Perhubungan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp54.795.245.081,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.880.462.369,- atau sebesar 96,51 %. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp45.826.556.231,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp44.397.178.720,- atau 96,88 % dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp8.968.688.850,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp8.483.283.649,- atau 94,59 %

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Perhubungan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.70**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Perhubungan Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
Kinerja Lalu Lintas ( <i>Level Of Service</i> )	Nilai	0,61	0,61	100

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kecelakaan Lalu Lintas	%	0,7	0,49*	142,85
<p>*) Indikator negatif,, semakin rendah capaian semakin baik,  rumus capaian = <math display="block">\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100</math></p>					

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Perhubungan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.



**Tabel 3.71**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Perhubungan**  
**Tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	SITARU (Sistem Pendaftaran Online Uji Kendaraan Bermotor)	Pendaftaran online uji KIR melalui aplikasi ANDROID
2.	ANAK BUS (Ayo Naik Bus Sekolah)	Program antar jemput anak sekolah gratis dengan titik antar jemput sesuai yang telah ditetapkan dalam jalur trayek
3.	TRC MRL (Tim Reaksi Cepat Manajemen Rekayasa Lalu Lintas)	"Tim yang dibentuk untuk menindaklanjuti aduan masyarakat melalui <i>social media</i> dan <i>whatsapp</i> terkait rekayasa lalu lintas baik Penerangan Jalan Umum (PJU) maupun <i>traffic light</i>
4.	SIMANUK (Sistem Informasi Manajemen Uji Kendaraan)	Aplikasi pelayanan uji kendaraan untuk mengolah data kendaraan lulus uji menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan Kementerian perhubungan

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perhubungan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Perhubungan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.72**  
**Kebijakan Strategis urusan Perhubungan Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1.	<p>Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Klaten memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekayasa lalu lintas dengan menetapkan ruas Jalan Kabupaten yang diijinkan untuk dilalui armada angkutan galian golongan C di Kabupaten Klaten</li> <li>- Menetapkan langkah penindakan atas pelanggaran galian golongan C yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di atasnya</li> <li>- Mengatur pemberian rekomendasi / ijin insidental maupun ijin masuk kota</li> <li>- Rekayasa lalu lintas dengan pemberlakuan sistem jalan satu arah pada ruas jalan tertentu di jalan kabupaten Kabupaten Klaten</li> <li>- Mengatur pembentukan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Klaten</li> </ul>	Perbup No.65 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Klaten	<p>Adapun masalah yang dapat diselesaikan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armada angkutan galian golongan C hanya diperbolehkan melalui jalur yang sudah ditetapkan, selain itu penindakan di lapangan yang tidak diatur pada undang-undang di atasnya tetap dapat dilakukan sesuai perda untuk dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar sehingga dapat meminimalisir kerusakan jalan yang lebih luas dan meningkatkan keselamatan lalu lintas</li> <li>- Dinas Perhubungan tetap dapat memberikan ijin rekomendasi penggunaan ruas jalan tertentu diluar perda yang telah ditetapkan dalam kondisi tertentu.</li> <li>- Rekayasa lalu lintas dengan pemberlakuan sistem jalan satu arah dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kinerja lalu lintas</li> <li>- Dapat memfasilitasi forum lalu lintas angkutan jalan di kabupaten klaten dalam</li> </ul>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
			menyelesaikan permasalahan-permasalahan lalu lintas di Kabupaten Klaten yang harus dilaksanakan lintas OPD / lintas Sektoral.

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perhubungan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.73**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Perhubungan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Beberapa catatan kritis berkenaan dengan penyelenggaraan urusan Perhubungan:</p> <p>KENDALA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJU baru terpasang 5.539 unit dari jumlah total kebutuhan 14.318 unit (38,69%)</li> <li>2. Kurangnya SDM Perhubungan yang memiliki kompetensi sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri sipil)</li> <li>3. Fungsi pemeliharaan PJU, Traffic light dan perlengkapan jalan lainnya sesuai status jalan, namun fungsi tersebut belum berjalan secara optimal.</li> <li>4. Zona industri di Kabupaten Klaten berada di jalan kelas 2, sehingga armada berorientasi melanggar kelas jalan</li> <li>5. Armada urug proyek</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan dan Pemasangan PJU Listrik PLN sejumlah 218 Titik dengan Pagu Rp.3.180.724.640,- dan PJU Tenaga Surya sejumlah 25 Set dengan PAGU Rp811.447.550,-</li> <li>2. Telah mengirimkan 2 (dua) personel untuk mengikuti diklat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pada TA 2023</li> <li>3. Mengoptimalkan dengan pembagian tim PJU dan Tim Traffic Light dalam melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan sesuai dengan kewenangannya yaitu di jalan kabupaten.</li> <li>4. Melakukan pemasangan rambu kelas jalan 3 sesuai dengan kelas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJU yang terpasang bertambah sehingga meningkatkan jumlah jalan yang terang yang bermanfaat bagi keselamatan lalu lintas</li> <li>2. Telah mempunyai 2 (dua) personil yang memiliki sertifikasi PPNS. Sehingga dapat melaksanakan penyidikan / penindakan di lapangan dengan didampingi LANTAS POLRES Klaten</li> <li>3. PJU dan Traffic Light yang ada kendala dapat ditangani dengan optimal.</li> <li>4. Jalan di Kawasan zona</li> </ol>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>tol Jogja - Solo banyak yang melanggar jalur yang sudah ditentukan sesuai Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah kabupaten klaten dengan Jogja Solo Marga Makmur</p> <p>SOLUSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambah kuantitas PJU</li> <li>2. Mengirimkan ASN untuk mengikuti diklat PPNS</li> <li>3. Melaksanakan pemeliharaan jalan sesuai kewenangan masing-masing</li> <li>4. Operasi Gabungan dan Penindakan</li> <li>5. Peningkatan kelas jalan untuk zona industri</li> <li>6. Peningkatan Pengawasan</li> </ol> <p>TINDAK LANJUT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan usulan pengadaan PJU kepada TAPD dalam penganggaran tahun mendatang</li> <li>2. Mengajukan usulan pembiayaan diklat PPNS kepada TAPD dalam penganggaran tahun mendatang</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan pemeliharaan perlengkapan jalan baik Kementerian Perhubungan maupun Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<p>jalannya, berkoordinasi dengan DPUPR tentang kelas jalan di Kawasan zona industri minimal harus kelas 2 sehingga harus dinaikan kualitas daya dukung jalan menjadi minimal kelas 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Membentuk tim gabungan yang beranggotakan Dishub, Polres, Kodim, Satpol PP dan DPU untuk melaksanakan operasi gabungan sesuai laporan masyarakat.</li> </ol>	<p>industri dapat disesuaikan sesuai dengan alat angkut yang digunakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Bisa menindak lanjuti setiap aduan masyarakat / penyimpangan di lapangan terkait jalur mobilitas pembangunan tol yang sudah ditentukan sesuai Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah kabupaten klaten dengan Jogja Solo Marga Makmur</li> </ol>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	4. Koordinasi dengan Polres klaten untuk melaksanakan operasi gabungan 5. Koordinasi dengan DPUPR kabupaten klaten terkait usulan atau rencana peningkatan kelas jalan 6. penambahan personil dan penambahan pos pantau armada pengangkut material jalan tol, 7. Koordinasi dengan instansi lain seperti Polres dan DPUPR dalam pengawasan		

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Perhubungan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.74**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Perhubungan Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Kerusakan traffic light dan PJU di jalan nasional yang merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan tetapi Kabupaten yang memperbaikinya, sehingga mengurangi anggaran dan persediaan barang Dinas Perhubungan.	Menyampaikan laporan dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam hal perbaikan.
2.	Prosentase jumlah PJU kewenangan Kabupaten masih minim yaitu hanya 38,69% dari kebutuhan total	Melakukan pemasangan PJU tiap tahun anggaran sehingga prosentase jumlah PJU terpasang mengalami peningkatan.
3.	Adanya Proyek Strategis Nasional jalan tol Solo-Yogya menimbulkan dampak kemacetan arus lalu lintas dan kerusakan jalan yang signifikan	Berkoordinasi dengan pengelola jalan tol, Kepolisian dan DPUPR dan melaksanakan operasi gabungan

## 9. Urusan Komunikasi Informatika

Pelaksana program urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Komunikasi dan Informatika mendapat alokasi anggaran sebesar Rp21.157.629.255 dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.633.878.391 atau sebesar 92,95%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp19.898.436.841 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp18.694.106.741 atau 94% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp1.259.192.414 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp939.771.650 atau 75%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.75**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Indeks SPBE	Indeks	3,4	3,7	108,8

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Disampaikan Ke Masyarakat	%	100	100	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan	%	36,36	36,36	100
Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	72,22	75	103,85
	Persentase Penambahan Akses Internet Di Ruang Publik	%	75	100	133,3
	Persentase Penambahan Akses (Titik) Internet Di OPD Yang Disediakan Dinas Kominfo	%	62,75	100	159,36

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.

- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Komunikasi dan Informatika, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.76**  
**Inovasi Pelaksanaan Program**  
**Urusan Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2023</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
1	Rolasan (Obrolan Asik Santai)	Obrolan Asyik Santai (Rolasan) merupakan sebuah talk show yang menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas melalui media Youtube. Program Rolasan dipandu oleh 2 orang pembawa acara dengan menghadirkan Narasumber yang sesuai dengan tema. Beberapa tema yang diambil adalah wisata, kuliner, UMKM, produk unggulan, lokasi religi, dll.

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Komunikasi dan Informatika yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.77**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Badan Publik Kategori Informatif, Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Tahun 2023 dengan skor 92,06	Pemerintah Kabupaten Klaten	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

#### **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.



### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.78**  
**Kebijakan Strategis urusan Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Menetapkan Kebijakan strategis Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Kebijakan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi 4 (empat) domain yaitu 1. Domain Kebijakan SPBE 2. Domain Tata Kelola SPBE, 3. Domain Manajemen SPBE 4. Domain Layanan SPBE Pada domain Tata Kelola SPBE dengan memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, Domaian Manajemen SPBE meliputi a. manajemen resiko; b. manajemen keamanan informasi; c. manajemen data; d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi; e. manajemen sumber daya manusia; f. manajemen pengetahuan; g. manajemen perubahan; dan h. manajemen Layanan SPBE. Layanan SPBE terdiri atas: a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; b. Layanan publik berbasis elektronik.  Implementasi SPBE yang telah dilakukan tahun 2023 yakni : 1. Penyusunan kebijakan tim koordinasi SPBE 2. Penyusunan kebijakan	Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten	a) memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu;  b) mendorong penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;  c) meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas penyelenggaraan layanan pemerintahan dan publik;  d) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;  e) mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah serta audit teknologi informasi dan komunikasi;

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	arsitektur SPBE 3. Penyusunan kebijakan peta rencana SPBE 4. Penyusunan dan penetapan kebijakan manajemen risiko SPBE 5. Evaluasi & perbaikan kinerja tim helpdesk TIK 6. Membuat postingan keamanan informasi pada media informasi 7. Evaluasi dan perbaikan manajemen keamanan informasi 8. Pembangunan aplikasi 9. Pemeliharaan aplikasi 10. Pembentukan tim audit aplikasi SPBE 11. Penyelenggaraan Training SDM SPBE (Basic)		f) memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.79**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan Komunikasi dan Informatika mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14.451.261.017,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.723.697.148,00 atau sebesar 88,05%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp12.772.683.854,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp11.311.241.333,00 atau 88,56% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp1.678.577.163,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.412.455.815,00 atau 84,15%. Pada tahun 2022, pelaksanaan program urusan wajib bukan pelayanan dasar yang	Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023. Urusan Komunikasi dan Informatika mendapat alokasi anggaran sebesar Rp21.157.629.255 dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.633.878.391 atau sebesar 93% meningkat jika dibandingkan tahun 2022  Sudah ditindaklanjuti pada Tahun 2023. Target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,4 terealisasi sebesar 3,7 atau sebesar 108,8%	Meningkatnya serapan anggaran dan capaian kinerja

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2023</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
	berkaitan dengan urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas diukur dalam Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan hasil belum tercapai, indeks yang ditargetkan sebesar 3,2 namun realisasi yang didapat sebesar 2,74		
2.	Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “tinggi”. Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”	Seluruh capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 mencapai kategori “sangat tinggi”	Meningkatnya Capaian Kinerja
3.	Pada tahun 2022, tidak ada Kebijakan Strategis Urusan Komunikasi Informatika yang ditetapkan Kepala Daerah.	Pada tahun 2023 Sudah ditetapkan kebijakan strategis Urusan Komunikasi Informatika yakni Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten	kebijakan strategis ini untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu serta meningkatkan indeks SPBE pada tahun sebelumnya
4.	Sudah ada upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya.		

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
5.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi.		

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Komunikasi Informatika beserta upaya mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.80**  
**Permasalahan dan Upaya Mengatasi permasalahan urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Kemungkinan terjadinya keterlambatan pengunggahan berita di media sosial maupun di kanal lainnya, yang disebabkan karena padatnya jadwal dan kegiatan liputan sehingga kecepatan informasi yang disampaikan sering tertinggal dengan informasi yang disampaikan oleh media lain.	Penyusunan Agenda Setting, perencanaan pembagian jadwal dan penerapan tugas.

#### 10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelaksana program urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2023 adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kabupaten Klaten .

##### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 20.914.913.049,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp18.134.898.013,- atau sebesar 86,71%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 20.426.836.799,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.17.753.961.013,- atau 86,91% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 488.076.250,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 380.937.000,- atau 78,05 %

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara rinci dapat

dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.81**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,14	0,14	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	71,20	34,32	48,20
	Persentase Koperasi yang patuh	%	25,9	34,32	132,51
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus/ pengawas/ pengelola koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	31,6	32,12	101,65
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usahaKecil dan Usaha Mikro (UMKM )	Pertumbuhan usaha mikro	%	0,14	0,14	100
	Persentase UMKM yang melakukan Kemitraan	%	0,32	0,30	93,75
Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi/ pendampingan	%	3,50	3,35	95,71

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 (satu) indikator.
- Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 (lima) indikator, dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 1 (satu) Indikator
- Capaian Kinerja Sasaran, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program yang kategori “Rendah” dan “Sangat Rendah” adalah sebagai berikut:
- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator prosentase koperasi aktif dimana dari 909 koperasi yang ada di kabupaten klaten hanya 312 koperasi yang masih aktif sehingga realisasi kinerjanya hanya 34,32% dari targetnya 71,20%. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengurus koperasi dan anggotanya belum mampu melakukan manajemen keanggotaan dengan baik sehingga kemampuan mengelola koperasi pun belum maksimal, penyebab lain adalah partisipasi anggota yang hanya dilakukan di awal pada saat dibentuknya koperasi membuat perkembangan koperasi terhambat, khususnya dalam bidang permodalan yang berdampak bangkrutnya koperasi tersebut serta sulitnya prosedur pembubaran koperasi yang sudah tidak aktif lagi.

#### **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

#### **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada Tahun 2023, tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan Kepala Daerah.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.82**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2023</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
1.	<p>Pelaksanaan Program urusan wajib bukan Pelayanan Dasar yang berkaitan dengan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp22.100.052.476,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.036.498.511,00 atau sebesar 86,14%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp21.199.052.476,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp18.250.937.061,00 atau 86,09% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp901.000.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp785.561.450,00 atau 87,19%</p> <p>Realisasi anggaran belanja (86,14%) tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan persentase capaian realisasi anggaran tahun sebelumnya (84,91%). Namun demikian realisasi anggaran tersebut masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi yang tidak sesuai target bukan saja kurang memanfaatkan dana yang</p>	<p>Telah disusun perencanaan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp 20.914.913.049 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 17.659.939.013 atau sebesar 84,44%.</p>	<p>Perencanaan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai sehingga serapan anggaran bisa lebih baik</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>telah dialokasikan yang berarti mengganggu jalannya percepatan pembangunan, tetapi juga penyusunan perencanaan program dan penganggaran kurang matang, sekaligus menyimpang dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam APBD TA 2022. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya</p>		
2	<p>Terdapat satu 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Tinggi” sebanyak satu 1 indikator. Terdapat 10 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator, Capaian Kinerja “Rendah” sebanyak 1 Indikator dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 4 Indikator. Capaian Kinerja Program kategori “sangat rendah” adalah persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya, persentase pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang telah mendapatkan Pendidikan dan pelatihan. Persentase koperasi yang telah mengakses Lembaga keuangan, persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/pendampingan. Sudah ada penjelasan terkait capaian lima indikator yang memperoleh kategori “sangat</p>	<p>Sudah ada peningkatan dari tahun 2022 dimana realisasi pada tahun 2023 sudah terlaksana penilaian kesehatan KSP/USP dan pelatihan pendidikan pengurus/pengawas/penge lola yang sudah mencapai 100 koperasi.</p> <p>Pada tahun 2023 telah ditindaklanjuti melalui pendampingan kepada pelaku usaha mikro dengan menggunakan 2 (dua) tenaga pendamping yang dibiayai dari APBD (DAK Nf PK2UMK) persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/pendampingan dari target 3,50 terealisasi sebesar 3,35 atau 95,70 sehingga sudah masuk ke kategori “sangat tinggi”</p>	<p>Penilaian kesehatan KSP / USP dan pendidikan dan pelatihan pengurus / pengawas pengelola koperasi</p> <p>Realisasi persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/pendampingan di tahun 2023 telah masuk kategori sangat tinggi</p>



No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	rendah". Kedua indikator tersebut masih membutuhkan perhatian pada tahun berikutnya.		
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, adapun kebijakan strategis yang diambil adalah Bantuan Sosial kepada Pelaku Usaha Mikro dalam rangka mendukung penanganan dampak inflasi membantu penambahan modal dalam menjalankan usaha sehingga para pelaku usaha mikro mampu bertahan dalam mengelola usahanya dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat akibat kenaikan harga BBM.	Pada tahun 2023 tidak ada bantuan sosial kepada pelaku usaha mikro  Kebijakan Strategis pada tahun 2023 diselenggarakan UMKM Coffee Festival dan UMKM Klaten Expo 2023 sebagai salah satu upaya untuk mempromosikan produk-produk unggulan UMKM di Kabupaten Klaten serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	
4.	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti.		
5.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya namun telah menggambarkan secara komprehensif permasalahan pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.		

#### **F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.83**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Upaya Mengatasi Permasalahan</b>
1.	Banyaknya koperasi yang sudah tidak aktif	1. Melakukan pembinaan dan pendekatan kepada pengurus agar mengaktifkan kembali kegiatan perkoperasiannya.  2. Agar bisa di anggarkan untuk kegiatan pengusulan pembubaran koperasi yang sudah tidakaktif dan tidak diketemukan alamat dan pengurus
2.	Terbatasnya personil dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi	Perlu penambahan pengawas koperasi

### **11. Urusan Penanaman Modal**

Pelaksana program urusan Penanaman Modal pada tahun 2023 adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten

#### **A. Capaian Kinerja program**

Urusan Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.793.848.058,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.718.410.424,00 atau sebesar 84,17%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp6.242.214.953,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp5.203.019.484,- atau 83,35 % dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp551.633.105,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp515.390.940,- atau 93,43 %

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Penanaman Modal dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.84**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Penanaman Modal Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Persentase peningkatan investasi PMDN	%	50	26	52
Persentase peningkatan investasi PMA	%	15	16	105

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi	%	80	76,89	96,11
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan	%	80	80	100
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	%	80	76,87	96,09
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	80	80	100
Program pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	80	75	93,75

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 2 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator dan capaian kinerja “rendah” sebanyak 1 indikator.

- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 indikator.
- Adapun capaian kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kategori “rendah” adalah Persentase peningkatan investasi PMDN. Capaian Kinerja “rendah” dikarenakan Target Persentase Peningkatan investasi PMDN semula ditargetkan 10% pada awal tahun 2023, berubah menjadi 50% pada perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Diharapkan Realisasi Investasi PMDN pada Tahun 2023 tinggi berasal dari Investasi Pembangunan Tol Solo-Jogja, namun belum terealisasi sampai akhir tahun 2023. Upaya yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase Peningkatan investasi PMDN adalah :
  1. Mempermudah perijinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS)
  2. Memfasilitasi Penanaman Modal melalui pendampingan kepada Investor mulai dari pendaftaran perijinan sampai dengan operasional perusahaan.
  3. Meningkatkan Promosi Investasi melalui kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi dan melaksanakan Bisnis Forum setiap tahun.

Dalam pelaksanaan program urusan Penanaman Modal, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.85**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal**  
**tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2023</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
1	JEMPOL MANIS (Jemput Bola Pelayanan Izin Online Aman dan Gratis)	Pelayanan perizinan menggunakan mobil pelayanan keliling dengan jadwal rutin di setiap kecamatan di Kabupaten Klaten
2	ASIKIN LKPM (Asistensi dan Konsultasi Input Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Kewajiban Perusahaan PMA dan PMDN untuk melaporkan perkembangan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara online melalui OSS
3.	SI CANTIK CLOUD Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu	Aplikasi Perizinan Non Berusaha Sicantik Berbasiskan Cloud yang dikelola oleh Kementerian Diskominfo untuk kementerian BKPM
4.	OTEWE (Info Terkini proses Izin Via Whatsapp Gateway)	Aplikasi Tracking proses perizinan sicantik Cloud lewat Whatsapp Gateway

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2023</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
5.	PISTOL MANTAP  (Pendampingan izin usaha terintegrasi secara Online aman dan Terpadu)	Pendampingan dan fasilitas Online Single Submission, mulai dari konsultasi, penerbitan NIB, Pemenuhan persyaratan, serta fasilitasi kendala dalam proses di OSS RBA, baik secara tatap muka maupun online dengan waktu yang terjadwal. Pendampingan dan fasilitas izin usaha non OSS, baik secara tatap muka maupun online dengan waktu yang terjadwal.

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.86**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Penanaman Modal Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1.	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 dengan predikat “Zona Hijau” dengan nilai 91,43	DPMPSTSP Kabupaten Klaten	OMBUDSMAN RI
2.	Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2023 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Klaten dengan nilai 82,25 Predikat Sangat Baik	DPMPSTSP Kabupaten Klaten	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

#### **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Penanaman Modal yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.87**  
**Kebijakan Strategis urusan Penanaman Modal**  
**Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	<p>Kebijakan Pengendalian Penanaman Modal</p> <p>Ruang Lingkup Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal mencakup Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemantauan, kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal. Jumlah kegiatan pada tahun 2023 sejumlah 11 kegiatan.</li><li>2. Pembinaan, kegiatan untuk memberikan bimtek atau sosialisasi berkaitan dengan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Jumlah kegiatan pada tahun 2023 sejumlah 17 kegiatan.</li><li>3. Pengawasan, kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan Penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk</li></ol>	<p>Keputusan Bupati Klaten No 503/91 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Pemenuhan Komitmen Investor atau Pelaku Usaha</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	penggunaan fasilitas penanaman modal. Jumlah kegiatan pada tahun 2023 sejumlah 9 kegiatan		

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Penanaman Modal pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.88**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**Terhadap Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Urusan Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7.888.396.948,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.617.568.975 atau sebesar 83,89% Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp5.767.844.448,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp4.645.672.235,00 atau 80,54% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp2.120.552.500,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.971.896.740,00 atau 92,99%. Pada tahun 2022, pelaksanaan program urusan wajib bukan pelayanan dasar yang berkaitan dengan Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Bagian Perekonomian diukur dalam Presentase peningkatan investasi PMDN dan Persentase peningkatan investasi PMA. Persentase peningkatan investasi PMDN didapatkan pencapaian yang sangat baik sebesar 158% dari yang ditargetkan sebesar</p>	<p>- Pada tahun 2023 sudah ditindaklanjuti. Urusan Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran Rp6.793.848.058,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.718.410.424,00 atau sebesar 84,17%. Realisasi tersebut meningkat jika dibandingkan Tahun 2022</p>	<p>Meningkatnya serapan anggaran</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	50%. Untuk persentase peningkatan investasi PMA juga didapatkan pencapaian yang sangat baik sebesar 139% dari yang ditargetkan sebesar 1%.		
2.	Terdapat 2 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 2 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori "sangat tinggi".Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 4 indikator, capaian kinerja "Tinggi" sebanyak 1 indikator	Meningkatkan dan mempertahankan Upaya agar agar indikator kinerja tetap mencapai hasil dengan kategori Sangat Tinggi	Perbaikan dan peningkatan indikator kinerja
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan Penanaman Modal telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan	Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023. Kebijakan strategis yang diambil dijelaskan secara rinci.	Penjelasan kebijakan strategis
4.	Sudah ada upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya, namun demikian tindak lanjut terkait penentuan indikator sasaran belum kelihatan dalam laporan ini	Penentuan Indikator Kinerja sudah disesuaikan dengan dokumen perencanaan RPJMD 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023	
5.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan	Tetap menyampaikan masalah dan solusi telah dinyatakan secara	Penjelasan masalah dan upaya



No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi.	rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi.	penyelesaian masalah

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Penanaman Modal beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.89**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Penanaman Modal**  
**Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Beberapa perusahaan berskala nasional yang sudah masuk ke Kabupaten Klaten mengalami kendala dalam merealisasikan proyeknya yang disebabkan oleh masalah internal perusahaan (kendala mendapatkan lahan), belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan	Pemerintah Kabupaten Klaten memaksimalkan kinerja Satgas Percepatan realisasi investasi dalam bentuk fasilitasi permasalahan dan kendala yang dialami perusahaan dalam proses realisasi investasi
2.	Belum adanya jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi, yang berakibat investor akan mengalami resiko investasi biaya tinggi (High cost investment) ditunjang adanya konflik antar urusan terutama urusan penanaman modal dengan kebijakan sawah lestari	Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian insentif dan kemudahan investasi
3.	Belum memadainya infrastruktur lahan yang mendukung untuk berinvestasi di Kabupaten Klaten	Terkait dengan RDTR (Rencana Desain Tata Ruang) terutama dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten belum terselesaikan semua sehingga menghambat para pelaku usaha, terutama untuk mencari perizinan dasar terutama kesesuaian tata ruang.

## 12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksana program urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2023 adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Kepemudaan dan Olahraga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp20.055.924.029,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.242.277.240,00 atau sebesar 95,94%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp13.773.928.249,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp13.203.124.240,00 atau 95,86% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp6.281.995.780,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp6.039.153.000,00 atau 96,13 %

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.90**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Tingkat Prestasi Pemuda dan Olahraga	%	40	37	92,5

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,08	1,67	155
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	4,45	4,3	97
Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase Atlet Berprestasi	%	4,29	53,07	1237

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator
- Terdapat 3 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.91**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023**

No.	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Juara 2 Tari Kreasi Daerah (Putri) Jambore Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Asri Mulyani	Disporapar Provinsi Jawa Tengah
2	Juara 2 Video Inovasi Pemuda (Putri) Jambore Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Santi Nur Haliza	Disporapar Provinsi Jawa Tengah
3	Medali Emas Para Tenis Meja Double Mix TT-1-3 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Listiana Herawati	NPCI Jateng
4	Medali Emas Para Tenis Meja Double Mix TT-1-4 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Andi Santoso	NPCI Jateng
5	Medali Perunggu Para Tenis Meja Double Mix TT1-5 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Suranto	NPCI Jateng

<b>No.</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
6	Medali Perunggu Para Tenis Meja Double Mix TT1-5 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Menik Sumini	NPCI Jateng
7	Medali Emas Para Tenis Meja Tunggal Putri TT-1-3 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Listiana Herawati	NPCI Jateng
8	Medali Emas Beregu Putra Blind Judo PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Gilang Indra Setiawan	NPCI Jateng
9	Medali Emas Beregu Putra Blind Judo PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Rizky Agung Wibowo	NPCI Jateng
10	Medali Emas Beregu Putra Blind Judo PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Suroto	NPCI Jateng
11	Medali emas Para Atletik Lari 100 m Putri T45-47 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah di Pati.	Ririn Dwi Asih	NPCI Jateng
12	Medali emas Para Atletik Lari 200 m Putra T54 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah di Pati	Akhmad Saidah	NPCI Jateng
13	Medali emas Para Atletik Lari 200 m Putri T45-47 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah di Pati.	Ririn Dwi Asih	NPCI Jateng
14	Medali emas Para Atletik Lari 400 m Putra T54 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah di PATI	Akhmad Saidah	NPCI Jateng
15	Medali emas Para Atletik Lompat Jauh Putri T45-47 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah di Pati.	Ririn Dwi Asih	NPCI Jateng
16	Medali Emas Para Renang Gaya Dada Putra 50 M PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Miswan	NPCI Jateng
17	Medali Emas Para Renang Gaya Dada Putra 50 M PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Miswan	NPCI Jateng
18	Medali Emas Aduan Mix Team Compound Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Hanun Nailal Husna	KONI Jateng
19	Medali Emas Aduan Mix Team Compound Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Irfan Ginting Prabowo	KONI Jateng
20	Medali Emas Aduan Triple Compound Putra Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Irfan Ginting Prabowo	KONI Jateng
21	Medali Emas Aduan Triple Compound Putra Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Wahyu Aryo Baskoro	KONI Jateng
22	Medali Emas Aduan Triple Compound Putra Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Wijdan Fauz Musyaffa	KONI Jateng

<b>No.</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
23	Medali Emas Boccia Individual BC1 Female PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Ajeng Zelya Rahmawati	NPCI Jateng
24	Medali Emas Boccia Individual BC2 Female PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Dhia Salsabilla Aufferini	NPCI Jateng
25	Medali Emas Boccia Pairs BC4 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Muhammad Asnan Hafidh	NPCI Jateng
26	Medali Emas Boccia Pairs BC4 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Danar Fitrah Akbariza	NPCI Jateng
27	Medali Emas Durasi Kelas B Gantolle PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Isah Iriawan, S.Pd	KONI Jateng
28	Medali Emas Gaya Bebas 48 Kg Putri Gulat PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Anisa Funky Wiwin P	KONI Jateng
29	Medali Emas Gaya Bebas 52 Kg Putra Gulat PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Muhammad Iqbal	KONI Jateng
30	Medali Emas HBA Circle Track Putra Berkuda PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Muhammad Shalahudin Al Ayyubi	KONI Jateng
31	Medali Emas HBA Serial Shoot Putra Berkuda PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Muhammad Shalah Syahada	KONI Jateng
32	Medali Emas Hyung (Rangkaian Jurus) Kelas Senior Individu Putra Hapkido PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Benigno Christo Wijaya	KONI Jateng
33	Medali Emas Hyung (Rangkaian Jurus) Kelas Senior Individu Putri Hapkido PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Erilly Adelya Melliana	KONI Jateng
34	Medali Emas Kelas A Pencak Silat Sea Games Tahun 2023	Khoiruddin Mustakim	Kamboja SEA Games Organizing Committe (CAMSOC)
35	Medali Emas Kelas Senior Berpasangan Authorized Hosinsult Competition Hapkido PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Muhatha Hibbanu Mahdy	KONI Jateng
36	Medali Emas Kelas Senior Berpasangan Authorized Hosinsult Competition Hapkido PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Revaldo Andhika Pratama	KONI Jateng
37	Medali emas Para Angkat Berat Kelas sampai 54 kg Best Lift PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah di Pati	Sugiyo	NPCI Jateng

<b>No.</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
38	Medali emas Para Angkat Berat Kelas sampai 54 kg Total Lift PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah di Pati	Sugiyo	NPCI Jateng
39	Medali emas Para Atletik lari 400 m Putra T52 - 53 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah di Pati	Jaka Sriyana	NPCI Jateng
40	Medali emas Para Atletik lempar Cakram putra F37 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah di Pati	Jaka Sehanta	NPCI Jateng
41	Medali Emas Para Panahan Nasional Aduan Perorangan putri PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Harsinah	NPCI Jateng
42	Medali Emas Para Panahan Nasional Double Putri PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Harsinah	NPCI Jateng
43	Medali Emas Para Panahan Nasional Double Putri PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Sri Susilowati	NPCI Jateng
44	Medali Emas Para Panahan Nasional Mixed Team PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Harsinah	NPCI Jateng
45	Medali Emas Para Panahan Nasional Mixed Team PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Sriyono	NPCI Jateng
46	Medali emas Para Renang 50m Gaya Dada putra S6 PEPARPEDA Jawa Tengah 2023	Muhamad Rafi Purnomo	Disporapar Jateng
47	Medali emas Para Renang 50m Gaya Bebas putra S6 PEPARPEDA Jawa Tengah 2023	Muhamad Rafi Purnomo	Disporapar Jateng
48	Medali Emas Rugby 7's Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Achmad Roji Afifuddin	KONI Jateng
49	Medali Emas Rugby 7's Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Aria Satya Nugraha	KONI Jateng
50	Medali Emas Rugby 7's Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Bangkit Riska Priagung	KONI Jateng
51	Medali Emas Rugby 7's Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Fajar Tri Yulianto	KONI Jateng
52	Medali Emas Rugby 7's Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Muhammad Orlando	KONI Jateng
53	Medali Emas Rugby 7's Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Muhammad Rizky A	KONI Jateng

<b>No.</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
54	Medali Emas Rugby 7's Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Rifo Eko Wibowo	KONI Jateng
55	Medali Emas Rugby 7's Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Yogy Setyawan	KONI Jateng
56	Medali Emas Rugby 7's Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Yonas Febrianto	KONI Jateng
57	Medali Emas Rugby 7's Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Yusron Akbar Nur R	KONI Jateng
58	Medali Emas Total Sesi Compound Putri Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Hanun Nailal Husna	KONI Jateng
59	Medali Perak Para Renang Gaya Bebas Putri 50 M S-11 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Fini Septiani	NPCI Jateng
60	Medali Perak Para Renang Gaya Dada Putra 50 M SB-8 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Adi Riyanto	NPCI Jateng
61	Medali Perak Para Renang Gaya Punggung Putri 50 M S-11 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Fini Septiani	NPCI Jateng
62	Medali Perak Para Panahan Compound Aduan Perorangan PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Bayu Nurochim	NPCI Jateng
63	Medali Perak Para Renang Gaya Bebas Putra 50 M SB-8 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Adi Riyanto	NPCI Jateng
64	Medali Perak Aduan Triple Compound Putri Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Artika Listiyana Safitri	KONI Jateng
65	Medali Perak Aduan Triple Compound Putri Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Azizah Isnaini Jannah	KONI Jateng
66	Medali Perak Aduan Triple Compound Putri Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Hanun Nailal Husna	KONI Jateng
67	Medali Perak Aduan Triple Nasional Putri Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Febrianisa Asti Salsabila	KONI Jateng

<b>No.</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
68	Medali Perak Aduan Triple Nasional Putri Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Kamila Atha Az Zahra	KONI Jateng
69	Medali Perak Aduan Triple Nasional Putri Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Kinanti Pitaning Asih	KONI Jateng
70	Medali Perak Aduan Triple Recurve Putra Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Gema Tri Romadhona	KONI Jateng
71	Medali Perak Aduan Triple Recurve Putra Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Martono	KONI Jateng
72	Medali Perak Aduan Triple Recurve Putra Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Ryan Satria Wicaksana	KONI Jateng
73	Medali Perak Aduan Triple Recurve Putri Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Kinara Lintang S	KONI Jateng
74	Medali Perak Aduan Triple Recurve Putri Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Qorina Qoshirotuththorfi	KONI Jateng
75	Medali Perak Aduan Triple Recurve Putri Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Santika Maharani L	KONI Jateng
76	Medali Perak Anggar Sabel Beregu Putra POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Ilyasa Habibburahman	Disporapar Jateng
77	Medali Perak Anggar Sabel Beregu Putra POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Muhammad Naufal Kurniawan Shidiq	Disporapar Jateng
78	Medali Perak Anggar Sabel Beregu Putra POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Muhammad Raafi Risnianto	Disporapar Jateng
79	Medali Perak Anggar Sabel Beregu Putra POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Riva Jivi Kusuma	Disporapar Jateng
80	Medali Perak Beregu Putra Gateball PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Adhimas Romanza Dewa	KONI Jateng
81	Medali Perak Beregu Putra Gateball PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Dedi Raharjo	KONI Jateng
82	Medali Perak Beregu Putra Gateball PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Nova Budi Santosa	KONI Jateng



<b>No.</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
83	Medali Perak Beregu Putra Gateball PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Totok Anton Nugroho	KONI Jateng
84	Medali Perak Beregu Putra Gateball PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Zidane Utwardana Kuswanandra	KONI Jateng
85	Medali Perak Boccia Individual BC2 Male PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Dwi Kristanto	NPCI Jateng
86	Medali Perak Boccia Individual BC4 Male PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Muhammad Asnan Hafidh	NPCI Jateng
87	Medali Perak Boccia Pairs BC1/BC2 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Dhia Salsabilla Aufarini	NPCI Jateng
88	Medali Perak Boccia Pairs BC1/BC2 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Dwi Kristanto	NPCI Jateng
89	Medali Perak Combat Putra Kelas -58 Kg Sambo PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Aditya	KONI Jateng
90	Medali Perak Devisi Recurve Total Mixed POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Muhammad Basith Marchal	Disporapar Jateng
91	Medali Perak Devisi Recurve Total Mixed POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Qorina Qoshirotuththorfi	Disporapar Jateng
92	Medali Perak Double Campuran Gateball PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Nurdiana	KONI Jateng
93	Medali Perak Double Campuran Gateball PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Wahyudi	KONI Jateng
94	Medali Perak Equestrian Dressage Preliminary German Test Individu Berkuda PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Prima Puji Wahyudi	KONI Jateng
95	Medali Perak Kelas +90 kg (J1)(J2) Blind Judo PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Suroto	NPCI Jateng
96	Medali Perak Kelas B Putra Pencak Silat PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Alfian Nur Ghosali Anhar	KONI Jateng
97	Medali Perak Kelas Light Putri Taekwondo PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Gabriel Agustiar P	KONI Jateng
98	Medali Perak Kelas Sanda 56 Kg Putri Wushu PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Dzarina Rizki Amelia	KONI Jateng
99	Medali Perak Ketepatan Mendarat Kelas A Gantolle PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Muhammad Fajar Hidayah	KONI Jateng

<b>No.</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
100	Medali Perak Lintas Alam Kelas A Gantolle PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Isah Iriawan, S.Pd	KONI Jateng
101	Medali Perak Nomor Kolam Putri 100M Surface Selam PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Fadilla Putri Rinjani	KONI Jateng
102	Medali Perak Nomor Laut Putri 3000 M Fin Swimming Selam PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Tere Artika Cahyajati	KONI Jateng
103	Medali Perak Panahan Devisi Compound Total Sesi Putra POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Irfan Ginting Prabowo	Disporapar Jateng
104	Medali Perak Panahan Devisi Recurve Total Sesi Putri POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Qorina Qoshirotuththorfi	Disporapar Jateng
105	Medali Perak Para Renang Gaya Dada Putri 50 M S-11 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Fina Septiani	NPCI Jateng
106	Medali perak Para Angkat Berat kelas 65 kg Best Lift PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah di Pati	Nanang Wijanarko	NPCI Jateng
107	Medali perak Para Angkat Berat kelas kelas 65 kg Total Lift PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah di Pati	Nanang Wijanarko	NPCI Jateng
108	Medali perak Para Atletik Lari 100m putra T42-44 PEPARPEDA Jawa Tengah 2023	Ryoshiki Alvaro Pradinata	Disporapar Jateng
109	Medali perak Para Atletik Lari 100m putri T47 PEPARPEDA Jawa Tengah 2023	Nafara Putri Salsabilla	Disporapar Jateng
110	Medali perak Para Atletik lari 100 m putra T52-53 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah di Pati	Jaka Sriyana	NPCI Jateng
111	Medali Perak Para Atletik Lari 100 m Putra T54 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah di PATI	Akhmad Saidah	NPCI Jateng
112	Medali Perak Para Atletik Lari 1500 m putra T36-38 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Cornelius Vito Wardhana	NPCI Jateng
113	Medali perak Para Atletik lari 200 m Putra T52-53 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Pati	Jaka Sriyana	NPCI Jateng
114	Medali Perak Para Atletik Lari 800 m putra T36-38 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Cornelius Vito Wardhana	NPCI Jateng
115	Medali perak Para Atletik Tolak Peluru putra F37 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah di Pati	Jaka Sehanta	NPCI Jateng

<b>No.</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
116	Medali perak Para Renang 100 m Gaya Bebas Putra S6 PEPARPEDA Jawa Tengah 2023	Muhamad Rafi Purnomo	Disporapar Jateng
117	Medali Perak Para Renang Gaya Dada Putra 100 M SB-7 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Miswan	NPCI Jateng
118	Medali Perak Para Renang Gaya Dada Putra 100 M SB-8 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Adi Riyanto	NPCI Jateng
119	Medali Perak Para Tenis Meja Beregu Putra TT3 Asean Para Game XII 2023 Kamboja	Andi Santoso	ASEAN Para Sports Federation and Cambodian ASEAN Para Games Organizing Committee (CAMAPGOC)
120	Medali Perak Para Tenis Meja Beregu Putri TT3 Asean Para Game XII 2023 Kamboja	Listyana herawati	ASEAN Para Sports Federation and Cambodian ASEAN Para Games Organizing Committee (CAMAPGOC)
121	Medali perak Para Tenis Meja Single putra TT5 PEPARPEDA Jawa Tengah 2023	Muhamad Anas Mustofa	Disporapar Jateng
122	Medali Perak Para Tenis Meja Single putra Tuna Grahita PEPARPEDA Jawa Tengah 2023	Khoiril Farel Bintoro	Disporapar Jateng
123	Medali Perak Para Tenis Meja Tunggal Putra PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Andi Santoso	NPCI Jateng
124	Medali Perak Single Bola 9 Putri Biliar PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Agnes Ryan Sinatra	KONI Jateng
125	Medali Perak Tenis Lapangan Tunggal Putri POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Ressjalina Nur Afifah	Disporapar Jateng
126	Medali Perak Triple Campuran Gateball PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Farah Aulia Safina	KONI Jateng
127	Medali Perak Triple Campuran Gateball PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Kelvin Permana Putra	KONI Jateng
128	Medali Perak Triple Campuran Gateball PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Vina Rosita Putri	KONI Jateng
129	Medali Perak X-Rugby Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Achmad Roji Afifuddin	KONI Jateng
130	Medali Perak X-Rugby Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Aria Satya Nugraha	KONI Jateng

<b>No.</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
131	Medali Perak X-Rugby Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Bangkit Riska Priagung	KONI Jateng
132	Medali Perak X-Rugby Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Fajar Tri Yulianto	KONI Jateng
133	Medali Perak X-Rugby Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Muhammad Orlando	KONI Jateng
134	Medali Perak X-Rugby Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Muhammad Rizky A	KONI Jateng
135	Medali Perak X-Rugby Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Rifo Eko Wibowo	KONI Jateng
136	Medali Perak X-Rugby Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Yogy Setyawan	KONI Jateng
137	Medali Perak X-Rugby Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Yonas Febrianto	KONI Jateng
138	Medali Perak X-Rugby Putra Rugby PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Yusron Akbar Nur R	KONI Jateng
139	Medali perunggu Para Atletik Lari 100 m Putra T35-36 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah di Pati.	Sachio Rafael Patra Anggana	NPCI Jateng
140	Medali perunggu Para Atletik Lari 200 m Putra T35-36 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah di Pati.	Sachio Rafael Patra Anggana	NPCI Jateng
141	Medali Perunggu Para Panahan Compound Aduan Perorangan PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Tri Nur Solichin	NPCI Jateng
142	Medali Perunggu Para Panahan Nasional Double Putra PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Indrayana	NPCI Jateng
143	Medali Perunggu Para Panahan Nasional Double Putra PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Sriyono	NPCI Jateng
144	Medali Perunggu Aduan Individual Compound Putra Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Irfan Ginting Prabowo	KONI Jateng
145	Medali Perunggu Anggar Degen Beregu Putra POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Bari Ramadhan Ginastyo	Disporapar Jateng
146	Medali Perunggu Anggar Degen Beregu Putra POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Muhammad Naufal Kurniawan Shidiq	Disporapar Jateng
147	Medali Perunggu Anggar Degen Beregu Putra POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Muhammad Raafi Risnianto	Disporapar Jateng

<b>No.</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
148	Medali Perunggu Anggar Degen Beregu Putra POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Riva Jivi Kusuma	Disporapar Jateng
149	Medali Perunggu Anggar Degen Beregu Putri POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Alifia Rahma Hadi	Disporapar Jateng
150	Medali Perunggu Anggar Degen Beregu Putri POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Azalia Shafa Sabela	Disporapar Jateng
151	Medali Perunggu Anggar Degen Beregu Putri POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Vinanda Marsha	Disporapar Jateng
152	Medali Perunggu Anggar Degen Beregu Putri POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Yeni Nur'Aini	Disporapar Jateng
153	Medali Perunggu Anggar Sabel Individu Putra POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Muhammad Naufal Kurniawan Shidiq	Disporapar Jateng
154	Medali Perunggu Anggar Sabel Individu Putri POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Thohiroh Anisah Samaah	Disporapar Jateng
155	Medali Perunggu BMX Putra Balap Sepeda PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Fadhlan Arrozaq	KONI Jateng
156	Medali Perunggu Combat Putra Kelas -53 Kg Sambo PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Agus Rifai	KONI Jateng
157	Medali Perunggu Combat Putra Kelas -58 Kg Sambo PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Irawan Guntur Aria P	KONI Jateng
158	Medali Perunggu Combat Putra Kelas -64 Kg Sambo PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Muhammad Khoirudin Angsori	KONI Jateng
159	Medali Perunggu Combat Putri Kelas -46 Kg Sambo PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Hardiyanti Pujiastuti	KONI Jateng
160	Medali Perunggu Devisi Revolver Menembak PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Herman Bambang S., SH	KONI Jateng
161	Medali Perunggu Double Putra Balap Motor Beregu PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Aditya Yana Saputra	KONI Jateng
162	Medali Perunggu Double Putra Balap Motor Beregu PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Ervantona Pandu Mahardhika	KONI Jateng
163	Medali Perunggu Durasi Kelas A Gantolle PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Isah Iriawan, S.Pd	KONI Jateng
164	Medali Perunggu Equestrian Dressage Preliminary Fei Test Individu Berkuda PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Aurelianne Sulistomo	KONI Jateng
165	Medali Perunggu Fighting System -69 Kg Putra Ju-Jitsu PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Luqman Habib Ash Shidiq	KONI Jateng

<b>No.</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
166	Medali Perunggu HBA Circle Track Putra Berkuda PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Muhammad Shalah Syahada	KONI Jateng
167	Medali Perunggu HPR 3 Posisi 100M Ring Target Individual Menembak PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Naila Zumrota Salsabila	KONI Jateng
168	Medali Perunggu Individual Putri Anggar PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Novelia Natasyafira Ramadhian	KONI Jateng
169	Medali Perunggu ITT Putri Balap Sepeda PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Aisharifah Apriliani	KONI Jateng
170	Medali Perunggu Kelas -55 kg Blind Judo PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Rizky Agung Wibowo	NPCI Jateng
171	Medali Perunggu Kelas Bantam Putri Taekwondo PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Sophia Dira Azizah	KONI Jateng
172	Medali Perunggu Kelas F Putra Pencak Silat PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Muhammad Sulaiman	KONI Jateng
173	Medali Perunggu Kelas H Putra Pencak Silat PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Firja Ahmad Zulkarnaen	KONI Jateng
174	Medali Perunggu Kelas Senior Berpasangan Free Hosinsult Competition Hapkido PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Muhatha Hibbanu Mahdy	KONI Jateng
175	Medali Perunggu Kelas Senior Berpasangan Free Hosinsult Competition Hapkodi PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Marciello Octavianus Ryangel	KONI Jateng
176	Medali Perunggu Lompat Jauh Putra Atletik PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Tomy Priya Dinata	KONI Jateng
177	Medali Perunggu Low Kick Putra 54 Kg Kick Boxing PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Fajar Adi Pradana	KONI Jateng
178	Medali Perunggu Low Kick Putra 57 Kg Kick Boxing PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Nukhi Fajar Nalendra	KONI Jateng
179	Medali Perunggu MTB Putra Balap Sepeda PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Joko Supriyanto	KONI Jateng
180	Medali Perunggu Nomor Kolam Putri 200M Bifing Selam PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Fadilla Putri Rinjani	KONI Jateng
181	Medali Perunggu Nomor Laut Putri OBA 5 Points Selam PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Tere Artika Cahyajati	KONI Jateng

No.	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
182	Medali Perunggu Panahan Devisi Recurve Eliminasi Individu Putri POPDA Provinsi Jateng Tahun 2023	Qorina Qoshirotuththorfi	Disporapar Jateng
183	Medali Perunggu Para Atletik Lari 200m putri T47 PEPARPEDA Jawa Tengah 2023	Nafara Putri Salsabilla	Disporapar Jateng
184	Medali perunggu Para Atletik Lari 100 m putra T37 PEPARPEDA Jawa Tengah 2023	Sachio Rafael Patra Anggana	Disporapar Jateng
185	Medali Perunggu Para Atletik Lari 100 m putra T52-53 PEPARPEDA Jawa Tengah 2023	Widodo	Disporapar Jateng
186	Medali Perunggu Para Atletik Lari 200 m putra T52-53 PEPARPEDA Jawa Tengah 2023	Widodo	Disporapar Jateng
187	Medali Perunggu Para Bulutangkis Tunggal Putra Upper 5 PEPARPEDA Jawa Tengah 2023	Rama Dwi Irianto	Disporapar Jateng
188	Medali Perunggu Para Tenis Meja Tunggal Putra TT1-5 PEPARPROV IV 2023 Jawa Tengah Di Pati	Suranto	NPCI Jateng
189	Medali Perunggu Total Sesi Compound Putra Panahan PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Irfan Ginting Prabowo	KONI Jateng
190	Medali Perunggu Triple Putri Anggaran PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Cahyaning Tyas	KONI Jateng
191	Medali Perunggu Triple Putri Anggaran PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Novelia Natasyafira Ramadhian	KONI Jateng
192	Medali Perunggu Triple Putri Anggaran PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023	Thohiroh Anisah Samaah	KONI Jateng

## **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

## **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.92**  
**Kebijakan Strategis urusan Kepemudaan dan Olahraga**  
**Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar. Serta juga dalam peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota</p> <p>Rincian Pemberian hibah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepada KONI sebesar Rp.4.756.450.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan</li> <li>2. NPCI sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)</li> <li>3. KNPI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)</li> </ol> <p>Penggunaan dari hibah kepada KONI meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran untuk 44 (empat puluh empat) cabang olahraga anggota KONI Kabupaten Klaten</li> <li>b. Anggaran mengikuti PORPROV XVI Jawa Tengah Tahun 2023;</li> <li>c. Kebutuhan insentif atlet, pelatih dan official;</li> <li>d. Training camp/pemusatan latihan cabang olahraga;</li> <li>e. Asuransi ketenagakerjaan profesi.</li> </ol> <p>Penggunaan dari hibah kepada NPCI meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemusatan Latihan Daerah persiapan PEPARPROV IV 2023</li> <li>b. Fasilitas pengiriman kontingen multi event PEPARPROV IV 2023</li> <li>c. Tes prestasi dan tes kesehatan para calon atlet PEPARPROV IV 2023</li> <li>d. Diskusi Lintas sektoral dalam dukungan pencapaian-pencapaian prestasi</li> <li>e. Penyediaan Tenaga Ahli</li> </ol>	<p>SK Bupati Klaten Nomor : 900/488 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/190 Tahun 2023 Tentang Penerima Hibah Pada dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata tahun Anggaran 2023</p>	<p>Pemberian hibah kepada KONI dan NPCI sehingga kegiatan olahraga prestasi di Klaten dapat terlaksana.</p> <p>Serta pemberian hibah kepada KNPI guna meningkatkan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan.</p>



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Konsultan Keolahragaan bidanag peningkatan dan pengembangan prestasi</p> <p>f. Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana cabang olahraga unggulan</p> <p>Penggunaan dari hibah kepada KNPI meliputi salah satunya untuk pelantikan DPD KNPI 2022-2025</p>		
2.	<p>Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten Klaten untuk Memberi apresiasi dan memotivasi kepada insan olahraga yang telah berprestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Klaten di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional.</p> <p>Anggaran untuk pemberian penghargaan Olah Raga di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk atlet 127, 49 pelatih, dan 51 official total yang menerima penghargaan yaitu 227.</p>	<p>SK Bupati Klaten nomor: 434/476 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 tanggal 10 November 2023</p>	<p>Mengapresiasi insan olahraga yang telah berprestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Klaten di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional</p>

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.93**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Urusan Kepemudaan dan Olahraga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.443.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.299.864.140,00 atau sebesar 97,77%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp6.299.864.040,00 dengan realisasi Belanja Operasi</p>	<p>Berupaya melakukan perbaikan terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan melakukan evaluasi kegiatan agregat realisasi anggaran meningkat</p> <p>Realisasi belanja tahun 2023 belum 100%,</p>	<p>Efisiensi anggaran</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	sebesar Rp6.229.864.040,00 atau 97,77%. Secara agregat realisasi anggaran urusan Kepemudaan dan Olahraga sedikit menurun dari tahun lalu sehingga perlu adanya evaluasi dan perbaikan khususnya dalam perencanaan anggaran.	namun target kinerja sudah tercapai, sehingga anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi anggaran	
2.	Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Prestasi Pemuda dan Olahraga telah memenuhi target yaitu 148%, hal ini menunjukkan potensi prestasi olah raga di Kabupaten Klaten yang cukup tinggi sehingga kedepan perlu ada penambahan alokasi anggaran dan peningkatan program kegiatan dalam rangka menunjang aktivitas kepemudaan dan untuk mendorong prestasi atlet-atlet yang ada di Kabupaten Klaten baik pada tingkat Lokal, Provinsi, Nasional, maupun Internasional	Alokasi anggaran untuk pemberian penghargaan kepada atlet dan insan olahraga berprestasi mengalami peningkatan sebagai wujud apresiasi Pemerintah Kabupaten Klaten kepada insan olahraga. Tahun 2022 sebesar Rp655.000.000,- dan Tahun 2023 sebesar Rp5.269.000.000,-	Pemberian penghargaan pada insan olahraga berprestasi sudah merata sesuai kemampuan daerah

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Kepemudaan dan Olahraga beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.94**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga**  
**Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum adanya payung hukum, Koordinasi lintas sektoral, Optimalisasi Pendanaan, Dukungan Sarpras dan Pembinaan kepemudaan dan olahraga secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengupayakan adanya payung hukum (direncanakan Tahun 2025) dalam bentuk Perda terkait Perda Kepemudaan dan Perda Olahraga</li> <li>2. Koordinasi lintas sektoral, Optimalisasi Pendanaan, Dukungan Sarpras dan Pembinaan kepemudaan dan olahraga secara berkelanjutan</li> <li>3. Mengupayakan pembentukan Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah di Kabupaten Klaten</li> </ol>

### 13. Urusan Statistik

Pelaksana program urusan Statistik pada tahun 2023 adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten

#### A. Capaian Kinerja program

Urusan Statistik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp152.105.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp130.389.322 atau sebesar 86%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp152.105.000 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp130.389.322 atau 86 %

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Statistik secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Statistik dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.95**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Statistik Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	%	40	40	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Statistik Sektoral Yang Memiliki Standar Data Dan Metadata Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	%	40	40	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut.

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

#### **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Statistik secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

#### **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Statistik dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

#### **D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada Tahun 2023, tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Statistik yang ditetapkan Kepala Daerah.

#### **E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Statistik pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.96**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Statistik**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Pelaksana program urusan Statistik pada tahun 2022 adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Urusan Statistik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp101.095.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp82.420.450,00 atau sebesar 81,53%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp101.095.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp82.420.450,00 atau 81,53%. Pada tahun 2022, pelaksanaan program urusan wajib bukan pelayanan dasar yang berurusan dengan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika diukur Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah menunjukkan hasil sudah tercapai dari yang ditargetkan sebesar 30% realisasi yang didapat sebesar 30%. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Statistik sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023. Urusan Statistik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp152.105.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp130.389.322 atau sebesar 86% meningkat jika dibandingkan tahun 2022</p>	<p>Meningkatnya serapan anggaran</p>
2.	<p>Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”Terdapat 1 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program</p>	<p>Pada tahun 2023 seluruh capaian kinerja Urusan Statistik masuk kategori “sangat tinggi”.</p>	<p>Mempertahankan capaian kinerja</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”		
3.	Tidak terdapat kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Statistik selama satu tahun anggaran	Pada Tahun 2023 tidak terdapat kebijakan strategis urusan statistik	
4.	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti.		
5.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi		

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Urusan Statistik adalah sebagai berikut

**Tabel 3.97**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan statistik tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Kurang akuratnya data statistik atau terjadinya redudansi data.	Menyesuaikan dengan standar data yang telah ditetapkan oleh Pembina data, dan memaksimalkan komunikasi melalui Forum Data.

#### 14. Urusan Persandian

Pelaksana program urusan Persandian pada tahun 2023 adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten

##### A. Capaian Kinerja program

Urusan Persandian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp388.642.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp368.003.216 atau sebesar 95%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp388.642.000 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp368.003.216 atau 95%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Persandian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Persandian dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.98**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Persandian Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	68	72,86	107,14

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi (E-Sign/Tanda Tangan Elektronik) Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	39,22	100	254,97
	Persentase Sistem Informasi Perangkat Daerah Yang Diamankan Dengan Sertifikat Elektronik	%	38,00	38,00	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Persandian, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.99**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Persandian**  
**Tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Pengembangan kompetensi agen <i>Computer Security Incident Response Team Kabupaten Klaten</i> (Klaten Kab-CSIRT)	Pengembangan kompetensi agen <i>Computer Security Incident Response Team Kabupaten Klaten</i> (Klaten Kab-CSIRT) merupakan langkah penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani insiden keamanan komputer yang dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah kabupaten Klaten dengan BSSN melalui bimbingan teknis Cyber Drill Klatenkab CSIRT

**B. Capaian Kinerja Keluaran masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Persandian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Persandian dapat dilihat pada



Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada Tahun 2023, tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Persandian yang ditetapkan Kepala Daerah

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Persandian pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.100**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Persandian**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksana program urusan persandian pada tahun 2022 adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, di Tahun 2022 Urusan Persandian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp205.822.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp198.502.870,00 atau sebesar 96,44%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp205.822.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp198.502.870,00 atau 96,44%. Hal ini dimungkinkan karena peningkatan jumlah anggaran yang sangat tinggi sehingga capaian realisasi menurun. Akan tetapi dari sisi presentase menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan di urusan Persandian telah berjalan dengan cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal. Pada tahun 2022, pelaksanaan program urusan wajib bukan pelayanan dasar yang berkaitan dengan persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatikadiukur dengan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang menunjukkan Tercapainya Realisasi sebesar 75 dari Rencana target sebesar 60.	<p>Pada tahun 2023 Proses penyusunan perencanaan anggaran sudah disusun secara lebih cermat, dengan memperhitungkan kebutuhan anggaran.</p> <p>Pada tahun 2023 target Indeks KAMI sebesar 68 dan terealisasi sebesar 72,86 atau capaian kinerja sebesar 107,14%</p>	Efektivitas dan efisiensi anggaran serta tercapainya target kinerja

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
2.	Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”. Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.	Pada tahun 2023 seluruh capaian kinerja urusan Persandian masuk kategori “sangat tinggi”	Capaian Kinerja Urusan Persandian optimal
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan Persandian telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait bagaimana progress pelaksanaan kebijakan strategis tersebut sekaligus hasilnya. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait detail pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.	<p>Terkait progress pelaksanaan kebijakan strategis Membentuk Computer Security Incident Response Team Kabupaten Klaten (Klaten Kab-CSIRT) Diskominfo bekerjasama dengan BSSN melalui pengadaan peningkatan kompetensi bagi agen Klaten Kab-CSIRT berupa kegiatan bimtek cyber drill . Selain itu juga dilakukan beberapa sosialisasi tentang keamanan informasi melalui tatap muka dan media sosial.</p> <p>Terkait progress pelaksanaan kebijakan strategis Penerbitan Sertifikat Elektronik dan implementasi tanda tangan elektronik di lingkup pemerintah kabupaten Klaten pelaksanaannya telah dilakukan diseluruh OPD sampai ke tingkat kelurahan dan puskesmas. Namun untuk TTE masih terbatas bagi</p>	<p>Melalui kegiatan bimtek cyber drill dan sosialisasi keamanan informasi dapat memberikan peningkatan kompetensi bagi agen Klaten Kab-CSIRT agar lebih paham dan waspada terhadap serangan siber.</p> <p>Pemanfaatan TTE bagi seluruh OPD memudahkan dalam hal efisiensi proses, kecepatan dan kemudahan dalam pelaksanaan tanda tangan, serta keamanan dan keaslian dokumen.</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		Pimpinan Perangkat Daerah	
4.	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti.		
5.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi.		

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Persandian beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.101**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Persandian Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Pengamanan informasi, data dan dokumen belum dimengerti dan diketahui secara tepat dan baik oleh pengguna system elektronik.	Dilakukan sosialisasi tentang tata cara pengamanan informasi, data dan dokumen.
2.	Rawan terjadi serangan cyber pada sistem informasi yang digunakan	Dilakukan bimtek cyber drill dan sosialisasi keamanan informasi untuk meningkatkan kompetensi agen Klaten Kab-CSIRT. Untuk Diskominfo sendiri telah dilakukan kontrol akses administrator pada saat mengakses database serta melakukan sanitasi pada setiap inputan.

### 15. Urusan Kebudayaan

Pelaksana program urusan Kebudayaan pada tahun 2023 adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.

#### A. Capaian Kinerja program

Urusan Kebudayaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp12.893.453.383,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.268.363.866,00 atau sebesar 87,39%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp12.493.099.458,00 dengan realisasi

Belanja Operasi sebesar Rp. 10.883.256.366,00 atau 87,11% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp400.353.925,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp385.107.500,00 atau 96,19%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Kebudayaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.102**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Kebudayaan Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	5	5	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase adat dan ritus yang dilestarikan	%	25	25	100
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten	%	40	35	95
Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan sejarah	%	35	35	100
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	%	17	17	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian kinerja sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator.

Dalam pelaksanaan program urusan Kebudayaan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.103**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kebudayaan tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Maraton Senja	Sebuah Inovasi dalam mengelola pegelaran/Pertunjukan kesenian dengan menggunakan media digital yaitu live streaming, sehingga masyarakat bisa menikmati pertunjukan jarak jauh

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Kebudayaan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.104**  
**Prestasi Pelaksanaan program urusan Kebudayaan Tahun 2023**

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Juara II Festival Dalang Anak Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	David Prajma Raditya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
2.	Juara II Festival Dalang Anak Tingkat Nasional Jawa Tengah Tahun 2023	David Prajma Raditya	Pepadi Pusat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

#### B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

#### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kebudayaan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada Tahun 2023, tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Kebudayaan yang ditetapkan Kepala Daerah.

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kebudayaan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.105**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan urusan Kebudayaan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan Kebudayaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.222.999.632,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.203.654.589,00 atau sebesar 99,13%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp2.106.334.632 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp2.090.989.589,00 atau 99,27% dan Alokasi Belanja Modal sebesar	Urusan Kebudayaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp12.893.453.383,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.268.363.866,00 atau sebesar 87,39%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp12.493.099.458,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 10.883.256.366,00 atau	Kegiatan event seni budaya lebih ditingkatkan, dilestarikan dan dikembangkan

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	Rp116.665.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp112.665.000,00 atau 96,57%. Secara umum realisasi anggaran urusan kebudayaan selalu meningkat dalam 2 tahun terakhir dengan presentase realisasi sangat baik yaitu di atas 95% sehingga patut mendapat apresiasi dan performanya harus dipertahankan	87,11% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp400.353.925,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp385.107.500,00 atau 96,19%  Ada 1 (satu) kegiatan standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tutunan serapan 0 dikarenakan pelaku seni pedalangan yang akan diajukan untuk sertifikasi sesuai skema dari LSP keraton jadwal kegiatannya padat dan tidak menentu hal tersebut dibuktikan dengan surat tanggapan dari PEPADI Nomor : 003/PPD/II/2023 tanggal 15 November 2023	
2.	Indikator Kinerja sasaran Persentase Pemajuan Kebudayaan telah memenuhi target 100%, namun diharapkan kedepan target Pemajuan kebudayaan perlu untuk ditingkatkan.	Pelaksanaan kesenian kebudayaan dilakukan lebih maksimal sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Untuk memaksimalkan kegiatan pemajuan kebudayaan

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Kebudayaan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.106**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Kebudayaan**  
**Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum terpenuhinya permintaan sekolah yang mengajukan Permohonan pemutaran film Bioskop Keliling (Bioling) dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun 2023	Menganggarkan penambahan anggaran untuk pemutaran film Bioskop Keliling (Bioling) di tahun 2024

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.	Kabupaten Klaten belum mempunyai Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), sehingga kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi	Akan dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan menganggarkan penambahan anggaran untuk sertifikasi TACB Kabupaten sebanyak 5 (lima) orang pada Triwulan III dan IV Tahun 2024
3.	Masih belum optimalnya pendataan pelaku budaya, kesenian daerah dan tradisional, lembaga dan komunitas yang berhubungan dengan seni budaya tradisional di Tingkat Kecamatan/Desa	Membuat form pendataan pelaku seni budaya bekerjasama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan
4.	Masih banyak Lembaga/ paguyuban/ organisasi yang belum memahami Pentingnya pengakuan secara Hukum/ Legalitas tentang keberadaan suatu sanggar atau organisasi kesenian	Mengadakan sosialisasi, pembinaan, FGD dan diskusi tentang tata kelola kelembagaan untuk komunitas, lembaga, organisasi dan pelaku budaya
5.	Kurangnya pembinaan terhadap pelaku seni dan budaya terkait keberadaan sanggar seni	Diadakan suatu pelatihan dan workshop untuk para pelaku budaya
6.	Belum terdatanya potensi daerah yang masuk Dalam kategori 10 Objek Pemajuan Kebudayaan	Sudah dilaksanakan Pendataan ke tingkat Kecamatan/Desa

## 16. Urusan Perpustakaan

Pelaksana program urusan Perpustakaan pada tahun 2023 adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Perpustakaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp365.863.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp334.314.959 atau sebesar 91,38%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp273.331.600 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 252.061.457 atau 92,22% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp95.231.400 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 82.253.502 atau 88,89%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.



Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Perpustakaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.107**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Perpustakaan Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan		Indeks	78,01	86,55	110,95
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pembinaan Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	51.962	51.377	98,87
	Persentase perpustakaan yang dibina	%	25	34,78	139,13

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 (satu) Indikator atau semua capaian

indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.

- Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 (dua) Indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Perpustakaan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.108**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan**  
**Tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	Program Inovasi Mobil Buku Anak Keliling Mari Datang Kesini (Mbak Marsini)	Program inovasi ini memberikan pelayanan Mbak Marsini yang mudah di akses masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk layanan perpustakaan keliling di seluruh wilayah Kabupaten Klaten, memberikan pelayanan Mbak Marsini yang mudah di akses masyarakat dengan mengirim surat permohonan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten lewat layanan online Whatsapp atau Email, memberikan kesempatan kepada pemustaka agar dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan secara optimal, terutama terhadap koleksi buku teks melalui mobil keliling dan meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dengan memberikan kemudahan pemustaka dalam pemanfaatan layanan koleksi baca di tempat. Adapun target sasaran pada program inovasi ini yaitu masyarakat umum/desa/sekolahan/anak-anak sekolah.

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2023</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
2	Program Inovasi Pinjam Buku Cara Online (Jambu Carlin)	Program inovasi ini memberikan kemudahan akses perpustakaan bagi masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk layanan antara jemput buku ( <i>delivery service</i> ) di seluruh wilayah Kabupaten Klaten agar pemustaka dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan secara optimal baik segi waktu, biaya dan tenaga.

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.109**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Perpustakaan Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1.	SDM Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Tahun 2023 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Tersertifikasi Ramah Anak	Samino, S.Kom.  (Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perpustakaan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada Tahun 2023, tidak terdapat Kebijakan Strategis yang ditetapkan Kepala Daerah terkait urusan Perpustakaan

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perpustakaan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.110**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Perpustakaan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan Perpustakaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp344.370.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp306.354.432,00 atau sebesar 88,96%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp250.540.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp223.721.732,00 Atau 89,30% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp93.830.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp82.632.700,00 atau 88,07%. Secara umum realisasi anggaran urusan perpustakaan sudah meningkat dari Tahun 2021 namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai presentase ideal yaitu di atas 95%	Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023. Urusan Perpustakaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp365.863.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp334.314.959 atau sebesar 91,38%. Meningkatkan jika dibandingkan tahun 2022. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp273.331.600 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 252.061.457 atau 92,22% meningkat jika dibandingkan tahun 2022. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp95.231.400 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 82.253.502 atau 88,89% meningkat jika dibandingkan tahun 2022.	Meningkatnya realisasi anggaran
2.	Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan adalah 87,7 dari target 89 atau mencapai 99% sehingga perlu untuk ditingkatkan lagi hingga mampu melampaui target sasaran yang telah ditetapkan	Sudah ditindaklanjuti, pada tahun 2023 Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan sebesar 110,95%	Meningkatnya Capaian Kinerja

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Perpustakaan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.111**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Perpustakaan**  
**Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Upaya Mengatasi Permasalahan</b>
1.	Masih kurangnya koleksi buku perpustakaan	a. Meningkatkan anggaran pengadaan buku b. Membuat proposal untuk ajuan bantuan buku-buku perpustakaan ke Perpunas dan CSR c. Menerima bantuan buku dari donator
2.	Masih banyaknya Desa yang belum memiliki perpustakaan untuk dibina	Melaksanakan pelatihan pengelola perpustakaan desa secara online dan memberikan pemahaman dalam kegiatan tersebut bahwa ADD Desa dapat dipergunakan untuk pengelolaan perpustakaan desa
3.	Masih banyaknya sekolah (SD dan SMP) yang belum mempunyai petugas pengelola perpustakaan yang memahami tentang perpustakaan	Ajuan personil yang menangani Bimbingan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten kepada petugas pengelola perpustakaan sekolah
4.	Minimnya anggaran sehingga program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Mengajukan anggaran kembali baik pada anggaran murni maupun perubahan untuk dapat melaksanakan program/kegiatan agar dapat dilaksanakan secara maksimal
5.	Masih kurangnya jumlah SDM perpustakaan	Mengoptimalkan SDM perpustakaan yang sudah ada
6.	Belum optimalnya sarana dan prasarana khususnya mobil perpustakaan keliling untuk pelaksanaan perpustakaan keliling, program inovasi Bejanaku, Mbak Marsini dan sepeda motor untuk pelaksanaan program inovasi Jambu Carlin serta belum tersedianya tangga untuk pengunjung disabilitas.	Mengajukan anggaran untuk perawatan sarana dan prasarana (kendaraan) dan pengadaan tangga untuk pengunjung disabilitas pada tahun anggaran berikutnya.

## 17. Urusan Kearsipan

Pelaksana program urusan Kearsipan pada tahun 2023 adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

### A. Capaian Kinerja program

Urusan Kearsipan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.313.275.924 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.681.619.023 atau sebesar 88,11%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp4.983.311.024 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp4.367.491.523 atau 87,64 % dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 329.964.900 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp314.127.500 atau 95,2%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Kearsipan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.112**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Kearsipan Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan	Indeks	78,01	86,55	110,95

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang diakusisi	%	100	100	100
	Persentase pengawasan kearsipan internal	%	100	117,65	117,65
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Arsip usul musnah	Meter Lari	60	17	28,33
	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	25	37,96	151,85

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 indikator dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 1 Indikator.
- Capaian Kinerja Sasaran, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program yang kategori “Sedang”, “Rendah” dan “Sangat Rendah” adalah sebagai berikut:
  - Indikator Kinerja Arsip usul musnah Target akhir periode Renstra pada tahun 2026 sebesar 60 Meter lari, maka apabila dibagi selama 5 tahun jadi target per tahun sebesar 12 Meter lari dan realisasi akan diakumulasi mulai tahun 2021 – 2026.
  - Hal ini sudah ditindaklanjuti untuk perbaikan di tahun berikutnya dengan mengoptimalkan jadwal serta tetap melaksanakan tahapan-tahapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun sesuai peraturan yang berlaku sesuai daftar penilaian arsip usul musnah. Selain itu akan diusulkan perubahan target kinerja tahunan untuk Indikator Kinerja Arsip usul musnah, dikarenakan target tahunan yang ada merupakan target akumulasi akhir Renstra ( 5 tahunan).

Dalam pelaksanaan program urusan Kearsipan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.113**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan**  
**tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2023</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
1.	Penyelamatan Arsip daerah rawan bencana di Kabupaten Klaten Titip Berkas Arsip Digitalku (Titip Bandaku)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten memberikan layanan inovasi berupa alih media arsip menjadi Digital disertai Berita Acara dan diautentikan : a. Penyelamatan Arsip Daerah rawan bencana baik perorangan maupun lembaga b. Layanan penitipan Arsip Perorangan c. Layanan Digitalisasi Arsip Perorangan
2.	PEAR MANIS (Perbaikan Arsip Masyarakat dan Instansi)	Program perlindungan dan penyelamatan arsip yang dilakukan dengan cara memperbaiki arsip milik masyarakat, pemerintah desa dan instansi pemerintah yang mengalami kerusakan.

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Kearsipan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.114**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Kearsipan Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1.	Pemanfaatan SRIKANDI terbanyak peringkat 1 Nasional Kategori Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Klaten	ANRI

#### **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

#### **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kearsipan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

#### **D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Kearsipan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.115**  
**Kebijakan Strategis urusan Kearsipan**  
**Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1.	Penyusunan dasar hukum tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka untuk menyesuaikan Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku pembina teknis guna mendukung implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sehingga disusun Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.	Peraturan Bupati Klaten Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten	Tertib pengelolaan arsip dinamis

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kearsipan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.116**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan**  
**urusan Kearsipan**

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2023</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
1.	<p>Urusan Kearsipan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.707.404.804,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.246.318.319,00 atau sebesar 90,2%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp4.634.040.829,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp4.191.153.589,00 atau 90,44% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp73.363.975,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp55.164.730 atau 75,19%. Secara umum realisasi urusan kearsipan sedikit menurun dari tahun 2021 yang mencapai 95,19% sehingga ini menjadi tanda untuk lebih fokus dalam perbaikan perencanaan</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023. Urusan Kearsipan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.313.275.924 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.681.619.023 atau sebesar 88,11%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp4.983.311.024 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp4.367.491.523 atau 87,64 % dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp329.964.900 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 314.127.500 atau 95,2%.</p>	<p>Meningkatnya realisasi anggaran.</p>
2.	<p>Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kearsipan adalah 87,7 dari target 89 atau mencapai 99% sehingga perlu untuk ditingkatkan lagi hingga mampu melampaui target sasaran yang telah ditetapkan</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kearsipan pada tahun 2023 sebesar 86,55 dengan target sebesar 78,01 sehingga persentase capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar 110,95%.</p>	<p>Meningkatnya kinerja sasaran.</p>

**F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Kearsipan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.117**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Kearsipan**  
**Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Masih banyak Perangkat Daerah yang belum menyediakan SDM Kearsipan	<p>a. Meneruskan rekomendasi penetapan kebutuhan jabatan fungsional Arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dari ANRI kepada Bagian Organisasi</p> <p>b. Mengoptimalkan SDM kearsipan melalui pembinaan kearsipan secara online</p>

### **18. Urusan Pertanahan**

Pelaksana program urusan Pertanahan pada tahun 2023 adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

#### **A. Capaian Kinerja Program**

Urusan Pertanahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.5.927.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.231.051.495,00 atau sebesar 88,26%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.365.000.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.221.864.125,00 atau 60,78% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.5.562.000.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.5.009.187.370,00 atau 90,06%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pertanahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.118**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pertanahan Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Persentase lahan milik pemerintah yang bersertifikat	%	78,30	83,88	107,13

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penyelesaian sengketa tanah garapan	Presentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	%	100	100	100
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Presentase pengadaan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	%	100	100	100
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tanah milik pemerintah daerah yang terfasilitasi pensertifikatannya	%	50	50	100
Program Penatagunaan Tanah	Presentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator.

Dalam pelaksanaan program urusan Pertanahan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.119**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pertanahan tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	SIFASUM (Sistem Informasi Fasilitas Umum)	SIFASUM adalah system untuk monitoring penggunaan fasilitas umum Disperakim yaitu Gedung Sunan Pandanaran, Gedung Grha Bung Karno, Alun-Alun Klaten, Rusunawa dan TPU Tegal Binangun. System ini masih sebatas penggunaan internal dinas. Pencatatan secara digital terhadap penggunaan fasilitas umum tersebut dapat di akses oleh pegawai yang terkait melalui gadget kapanpun dan dimanapun secara realtime. Sehingga mempercepat pengambilan keputusan dalam melayani masyarakat.

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanahan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2023, tidak ada Kebijakan Strategis Urusan Pertanahan yang ditetapkan Kepala Daerah.

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pertanahan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.120**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pertanahan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Urusan Pertanahan Pelaksana program urusan Pertanahan pada tahun 2022 adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.</p> <p>Capaian Kinerja Program Urusan Pertanahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 837.232.000,00(delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp766.344.775,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 91,53%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp786.432.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp716.344.775,00 (tujuh ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 91,09% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp50.800.000,00 (lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan realisasi Belanja Modal</p>	<p>Pada tahun 2023 Urusan Pertanahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.5.927.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.231.051.495,00 atau sebesar 88,26%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.365.000.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.221.864.125,00 atau 60,78% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.5.562.000.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.5.009.187.370,00 atau 90,06%</p> <p>Pada tahun 2023 terjadi efisiensi anggaran Belanja Modal untuk Pengadaan Tanah TPA Troketon</p>	<p>Efektivitas dan efisiensi anggaran</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau 98,43.%		
2.	Pada tahun 2022, belum ada Kebijakan Strategis Urusan Pertanahan yang ditetapkan Kepala Daerah.	Pada tahun 2023, belum ada Kebijakan Strategis Urusan Pertanahan yang ditetapkan Kepala Daerah	
3.	<p>Permasalahan dan Upaya Mengatasi Urusan Pertanahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terinventarisirnya tanah garapan yang mengalami sengketa dengan melakukan pendataan terkait tanah garapan yang mengalami sengketa dan berkoordinasi dengan BPN.</li> <li>2. Belum optimalnya penatagunaan pertanahan dengan mengkoordinasikan data base penatagunaan pertanahan dengan instansi terkait.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah melakukan koordinasi dengan BPN tentang inventarisasi tanah garapan yang mengalami sengketa</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang DPUPR, bidang asset BPKPAD dan BPN</li> </ol>	Upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Pertanahan

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pertanahan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.121**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pertanahan tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum terinventarisirnya tanah garapan yang mengalami sengketa.	Melakukan pendataan terkait tanah garapan yang mengalami sengketa dan berkoordinasi dengan BPN
2	Belum optimalnya penatagunaan pertanahan.	Mengkoordinasikan database penatagunaan pertanahan dengan bidang terkait

### 3.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian dan Urusan Transmigrasi.

#### 1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pelaksana program urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten.

##### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.310.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.210.370.900,- atau sebesar 92,37%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp1.307.900.000,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.207.870.900,- atau 92,35 % dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp2.500.000,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.500.000,- atau 100%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.122**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	30.586	30.831,6	100,8

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan budidaya	Ton	30.039	30.461,15	101,41
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	547	370,45	67,72
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan dan Kelautan	Cakupan tebar benih ikan/restocking perairan umum	%	23	23	100



<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk olahan ikan	Kg	1.191.958	1.544.976	129,62

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 indikator, dan Capaian Kinerja “Sedang” sebanyak 1 Indikator.
- Capaian Kinerja Program yang kategori “Sedang” adalah produksi perikanan tangkap dengan capaian kinerja sebesar 67,72%. Hal ini disebabkan karena dampak revitalisasi Rowo Jombor, sehingga jumlah pelaku usaha perikanan tangkap menjadi berkurang. Selain itu juga disebabkan oleh proses *restocking* di perairan umum belum maksimal. Upaya yang dilakukan oleh DKPP selaku OPD pelaksana urusan Kelautan dan Perikanan antara lain :
  - 1) Menambah volume ikan yang disebar dalam kegiatan *stocking dan restocking* benih ikan di perairan umum di wilayah Kabupaten Klaten.

- 2) Sosialisasi kepada nelayan tangkap untuk menyesuaikan ukuran jaring supaya ikan/benih ikan yang belum memenuhi standar tetap aman.
- 3) Sosialisasi untuk tidak melakukan penangkapan dengan setrum/obat/bom dan menegakkan Peraturan terkait penangkapan ikan dip perairan umum.

Dalam pelaksanaan program urusan Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.123**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Kelautan dan Perikanan**  
**Tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Bunila Mapan	Bunila Mapan merupakan akronim dari Budidaya Nila Bioflok untuk Kemandirian Pangan. Budidaya nila bioflok merupakan alih teknologi budidaya bioflok dan teknologi tepat guna lainnya, sehingga perikanan budidaya dapat dilakukan lebih intensif walaupun dengan luasan terbatas.

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.124**  
**Kebijakan Strategis urusan Kelautan dan Perikanan**  
**Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	<p>Menetapkan lokasi dan alokasi hibah sarana produksi budidaya perikanan untuk 17 (tujuh belas) kelompok dengan rincian yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah untuk 12 (dua belas) kelompok pembudi daya ikan, masing-masing kelompok mendapatkan bibit lele 2000 ekor dan pelet ikan 6 zak.</li> <li>- Hibah untuk 5 (lima) kelompok wanita tani, masing-masing kelompok mendapatkan bibit lele 2000 ekor, pelet ikan 5 zak, probiotik 2 liter, dan kolam terpal bulat 3 buah.</li> </ul>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 523/215 Tanggal 13 Juli 2023 tentang Lokasi dan Alokasi Hibah Sarana Produksi Budidaya Perikanan dalam Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dalam Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Mengembangkan usaha budidaya perikanan bagi pembudidaya ikan kecil.</p>
2	<p>Menetapkan lokasi dan alokasi hibah paket prasarana pembudidayaan ikan yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paket Budidaya Lele diberikan untuk 10 (sepuluh) kelompok pembudidaya ikan dan masing-masing kelompok menerima kolam terpal 10 buah, pelet ikan 40 zak, pompa air 1 paket, dan benih lele 10.000 ekor.</li> <li>2. Paket Budidaya Gurame diberikan untuk 4 (empat) kelompok pembudidaya ikan dan masing-masing kelompok menerima pupuk padat 100 kg, pelet ikan 50 zak, pompa air 1 paket, benih gurame 4.000 ekor, drum plastik 4 buah dan <i>fish bush</i> 1 buah.</li> <li>3. Paket Budidaya Nila diberikan untuk 4 (empat) kelompok pembudidaya ikan dan masing-masing kelompok menerima</li> </ol>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 640/227 Tanggal 21 Juli 2023 tentang Lokasi dan Alokasi Hibah Paket Prasarana Pembudidayaan Ikan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan dalam Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Mengembangkan usaha budidaya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten.</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	kolam terpal 4 buah, pelet ikan 23 zak, blower 1 paket, instalasi aerasi 4 set, benih nila 50 kg, molase 45 liter, vitamin 6 paket dan probiotik 1 paket.		

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.125**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPD Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan Program urusan pilihan yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp665.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp635.336.030,00 atau sebesar 95,54%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp644.000.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp614.456.030,00 atau 95,41%. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp21.000.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp20.880.000,00 atau 99,43%. Realisasi belanja pada tahun 2022 sebesar 95,54% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebelumnya (2021) yaitu sebesar 92,30%. Realisasi anggaran sebesar 95,54% mendekati dari anggaran yang ditetapkan. Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 1 (satu).	Pada Tahun 2023 Urusan Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.310.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.210.370.900,- atau sebesar 92,37%. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan memperbaiki penyusunan anggaran dengan lebih teliti dan cermat sesuai dengan kebutuhan anggaran	Perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
2.	<p>Terdapat 1 indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran Kategori “sangat tinggi” (103,25%), sebanyak 1 indikator. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 (tiga) indikator, dan kategori “Sedang” sebanyak 1 (satu) Indikator. Indikator program dengan kategori sedang tersebut adalah produksi perikanan tangkap 68,67%. Untuk capaian indikator program yang mendapatkan kategori sedang telah diberikan penjelasan dan alasannya. Pada tahun berikutnya diharapkan Urusan kelautan dan Perikanan lebih memberikan perhatian terhadap indikator kinerja program yang masih mendapatkan kategori sedang agar capaian kategorinya mendapatkan kenaikan.</p>	<p>Indikator kinerja program yang masih mendapatkan kategori “sedang” di tahun 2022, pada tahun 2023 capaian kategorinya tidak berubah.</p> <p>Indikator kinerja program dengan kategori sedang tersebut adalah produksi perikanan tangkap 67,72%. Hal ini disebabkan karena dampak revitalisasi Rawa Jombor sehingga jumlah pelaku usaha perikanan tangkap menjadi berkurang.</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh DKPP selaku OPD pelaksana urusan Kelautan dan Perikanan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah volume ikan yang disebar dalam kegiatan <i>stocking</i> dan <i>restocking</i> benih ikan di perairan umum di wilayah Kabupaten Klaten.</li> <li>- Sosialisasi kepada nelayan tangkap untuk menyesuaikan ukuran jaring supaya ikan/benih ikan yang belum memenuhi standar tetap aman.</li> <li>- Sosialisasi untuk tidak melakukan penangkapan dengan setrum/obat/ bom dan menegakkan Peraturan terkait penangkapan ikan di perairan umum.</li> </ul>	<p>Meningkatkan capaian kinerja agar lebih optimal</p>

## F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Kelautan dan Perikanan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.126**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan**  
**Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Capaian kinerja dari produksi perikanan tangkap termasuk kategori “Sedang” yaitu 67,72% disebabkan karena dampak revitalisasi Rawa Jombor dan proses <i>restocking</i> di perairan umum belum maksimal.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menambah volume ikan yang disebar dalam kegiatan <i>stocking dan restocking</i> benih ikan di perairan umum di wilayah Kabupaten Klaten.</li><li>- Sosialisasi kepada nelayan tangkap untuk menyesuaikan ukuran jaring supaya ikan/benih ikan yang belum memenuhi standar tetap aman.</li><li>- Sosialisasi untuk tidak melakukan penangkapan dengan setrum/obat/bom dan menegakkan Peraturan terkait penangkapan ikan di perairan umum.</li></ul>
2	Ketersediaan benih ikan yang belum memenuhi kualitas dan jumlah yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menjalin kerjasama dengan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan atau dengan Lembaga-lembaga yang kompeten.</li><li>- Pengadaan induk unggul berkualitas dalam pelaksanaan sub kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.</li></ul>

## 2. Urusan Pariwisata

Pelaksana program urusan Pariwisata pada tahun 2023 adalah Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.311.141.883,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.388.376.411,00 atau sebesar 93,07%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp6.734.035.883,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp6.469.776.229,00 atau 96,08% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp6.577.106.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp5.918.600.182,00 atau 89,99%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pariwisata dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.127**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pariwisata Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	3,44	31,87	926,45

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Terkelola	%	74	74	100
Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat Intensitas promosi pariwisata	%	70	70	100
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi hki (Hak Kekayaan Intelektual)	%	15	15	100
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang kompeten	%	30	30	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Pariwisata, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.128**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pariwisata**  
**Tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	APIK (Ayo Piknik )	Platform media informasi tentang kepariwisataan di Kabupaten Klaten (Aplikasi) melalui alamat : apik.klaten.go.id
2.	E - Ticket	Platform media pembayaran digital di destinasi wisata (Candi Plaosan & Candi Sojiwan) melalui alamat : vx.apik.klaten.go.id
3.	Klaten Spring Paradise	Smart Branding Pariwisata Klaten dengan menonjolkan potensi wisata tirta dengan slogan dan logo “Klaten Kota Seribu Umbul”

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pariwisata yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



**Tabel 3.129**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pariwisata Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1.	Juara 1 Kategori Cinderamata (Lurik Klaten)	Lurik Klaten	Anugerah Pesona Indonesia
2.	Juara 4 Kategori Souvenir	Tatah Wayang Desa Sidowarno	Anugerah Desa Wisata Indonesia (Kemenparekraf)
3.	Stand Terbaik	Desa Wisata Jarum	Jateng Fair di PRPP Semarang
4.	Terbaik ke 5 Destinasi Pariwisata Unggulan di Indonesia	Sidoguro, Girpasang,	Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia (APPI) Kemenparekraf
5.	Juara 2 kategori Desiminasi Penghargaan Kampanye Sadar Wisata	Desa Wisata Bugisan	Kemenparekraf

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pariwisata dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pariwisata yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.130**  
**Kebijakan Strategis urusan Pariwisata**  
**Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Menetapkan Desa Wisata di Kabupaten Klaten. Desa wisata merupakan bentuk integritas antara potensi daya Tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata hasil buatan manusia dalam satu Kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, maka Desa Wisata ditetapkan setelah dinyatakan memenuhi syarat.</p> <p>Berdasarkan penelitian administrasi serta peninjauan di lokasi terhadap yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Desa Kebonolas Kec. Manisrenggo Kab. Klaten sebagai Desa Wisata;</li> <li>b. Desa Kahuman Kec. Polanharjo Kab. Klaten Sebagai Desa Wisata;</li> <li>c. Desa Janti Kec. Polanharjo Kab. Klaten Sebagai Desa Wisata;</li> <li>d. Desa Balerante Kec. Kemalang Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata;</li> <li>e. Desa Ngering Kec. Jogonalan Kab. Klaten Sebagai Desa Wisata; dan</li> <li>f. Desa Kranggan Kec. Manisrenggo Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata</li> </ol> <p>oleh tim penilaian Kabupaten Klaten dinyatakan telah memenuhi syarat, maka perlu ditetapkan sebagai desa wisata.</p> <p>Dengan ditetapkannya sebagai Desa Wisata,</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 435/41 Tahun 2023 tentang Desa Kebonolas Kec. Manisrenggo Kab. Klaten sebagai Desa Wisata</li> <li>2. Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 435/39 Tahun 2023 tentang Desa Kahuman Kec. Polanharjo Kab. Klaten Sebagai Desa Wisata</li> <li>3. Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 435/235 Tahun 2023 tentang Desa Janti Kec. Polanharjo Kab. Klaten Sebagai Desa Wisata</li> <li>4. Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 435/42 Tahun 2023 tentang Desa Balerante Kec. Kemalang Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata</li> <li>5. Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 435/38 Tahun 2023 tentang Desa Ngering Kec. Jogonalan Kab. Klaten Sebagai Desa Wisata</li> <li>6. Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 435/40 Tahun 2023 tentang Desa Kranggan Kec. Manisrenggo Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata</li> </ol>	<p>Mewujudkan Pengembangan Pariwisata dengan Pemberdayaan masyarakat dan potensi lokal</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat lokal pada desa tersebut. Tahapan setelah ditetapkan sebagai Desa Wisata, maka perlu dilakukan pengembangan guna meningkatkan daya Tarik wisatawan. Bentuk dari Pengembangan Desa Wisata meliputi :</p> <p>a. Pengembangan infrastruktur Desa Wisata;</p> <p>b. Pemasaran Desa Wisata</p> <p>c. Pengembangan Kelembagaan Desa Wisata; dan</p> <p>d. Kerjasama Kemitraan.</p>		

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pariwisata pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.131**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pariwisata**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Urusan Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14.396.684.230,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.131.999.010,00 atau sebesar 91,22%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp8.556.172.230,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp7.815.889.010,00 atau 91,35% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp5.840.512.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp5.316.110.000 atau 91,02%. Realisasi pada tahun 2022 sedikit menurun dari tahun sebelumnya sehingga perlu menjadikan perhatian dan perbaikan agar di tahun mendatang tidak terjadi penurunan kembali</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023 Urusan Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.311.141.883,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.388.376.411,00 atau sebesar 93,07% meningkat jika dibandingkan tahun 2022.</p>	<p>Meningkatnya serapan anggaran pada tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2022</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
2.	Indikator sasaran Pertumbuhan PAD sektor pariwisata tahun 2022 mencapai 2049,2% jauh melebihi target hal ini menjadi indikasi bahwa potensi PAD dari bidang pariwisata sangat menjanjikan dan target yang ditetapkan dalam perencanaan sangat tidak relevan dengan potensi yang ada sehingga perlu adanya studi potensi pariwisata yang komprehensif untuk mengetahui potensi pariwisata secara valid, yaitu dengan melibatkan akademisi,perguruan tinggi serta profesional di bidang kepariwisataan	Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023 dengan melibatkan akademisi, perguruan tinggi serta profesional di bidang kepariwisataan dalam pelaksanaan pengembangan Desa Wisata	Peningkatan validitas data potensi pariwisata di Kabupaten Klaten

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pariwisata beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.132**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pariwisata**  
**Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Rendahnya SDM pengelola Daya Tarik Wisata yang dikelola oleh Desa/BUMDes	Peningkatan kualitas SDM pengelola Desa Wisata melalui pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata Berkelanjutan
2.	Masih rendahnya kualitas SDM Ekonomi Kreatif yang paham Hak Kekayaan Intelektual	Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 435/34 Tahun 2023 tentang Pembentukan Ekonomi Kreatif Kabupaten Klaten Tahun 2023-2026
3.	Belum ada efektifitas dan sinergitas pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengupayakan efektifitas dan sinergitas pemasaran pariwisata melalui pengembangan teknologi dan informasi serta event pariwisata di Daerah</li> <li>- Melaksanakan kerjasama paket wisata dengan Biro Jasa/travel agen untuk memperkenalkan wisata Kabupaten Klaten</li> </ul>

### 3. Urusan Pertanian

Pelaksana program urusan Pertanian pada tahun 2023 adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten.

#### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp16.026.175.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp14.713.754.628,- atau sebesar 91,81%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp15.030.625.600,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp13.773.501.628,- atau 91,64% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp995.550.000,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp940.253.000,- atau 94,45 %

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pertanian dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.133**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pertanian Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,09	1,21	57,89

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ku/ha	67,01	68,81	102,69
	Produktivitas cabe	ku/ha	9,06	13,29	146,69
	Produktivitas tembakau rajangan	ku/ha	12,21	21,8	178,54
	Produktivitas tembakau asep-an	ku/ha	9,86	28	283,97
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional	%	38	37*	97,37

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
	Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	%	42	38	90,48
	Jumlah Populasi ternak ruminansia besar dan kecil	ekor	288.384	211.529	73,35
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	22	50	227,27
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan penanganan gangguan OPT dan potensi bencana pertanian lainnya	%	60	60	100
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani madya dan utama	%	9,13	8	87,62

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Rendah” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 10 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 8 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator, dan Capaian Kinerja “Sedang” sebanyak 1 Indikator
- Capaian Kinerja Sasaran, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kategori “Rendah” adalah pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan

perikanan dengan capaian kinerja 57,89%. Hal ini disebabkan dampak dari pembangunan jalan tol Solo-Yogya yang berakibat pada berkurangnya lahan pertanian selain itu juga disebabkan dampak *el nino* sehingga mempengaruhi perolehan nilai PDRB sektor pertanian dan perikanan tahun 2023. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PDRB sektor pertanian dan perikanan antara lain :

- Meningkatkan potensi sektor pertanian dan perikanan melalui optimalisasi faktor-faktor produksi (penggunaan bibit/benih unggul, sarana prasarana dan teknologi).
- Menumbuhkan minat masyarakat khususnya pemuda milenial pada sektor pertanian dan perikanan dengan memberikan fasilitasi/akses permodalan, informasi teknologi juga akses pemasaran.
- Capaian Kinerja Program yang kategori “Sedang” adalah jumlah populasi ternak ruminansia besar dan kecil dengan capaian kinerja 73,35%. Hal ini disebabkan jumlah peternak ruminansia besar berkurang karena sebagian beralih ke ternak unggas akibat dari terjadinya wabah yang menyerang ternak ruminansia besar tahun 2023 yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK) dan LSD (*Lumpy Skin Disease*). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan populasi ternak ruminansia antara lain :
  - Mengembangkan wilayah-wilayah sentra produksi ternak seperti kambing PE di daerah Kemalang.
  - Melaksanakan kegiatan yang bersifat pencegahan, penanggulangan dan pengobatan *zoonosis* pada hewan ternak ruminansia.
  - Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kepada peternak secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan program urusan Pertanian, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.134**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pertanian**  
**tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Si Topan	Si Topan (Sinten Tlaten Open Bakal Panen) merupakan inovasi aplikasi dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) agar penanganannya bisa lebih cepat dan terpadu sehingga bisa mengantisipasi meluasnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2023</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
2	Pojok Simanis	Pojok Simanis merupakan singkatan dari Pojok Konsultasi Agribisnis dan merupakan kegiatan inovasi di Bidang SP3UP (Sarana Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Pertanian) yang melaksanakan salah satu tupoksi yaitu penyuluhan pertanian.
3	Gelora Nonik	Gelora Nonik merupakan singkatan dari Gerak Langkah Ora Lali Nambah Organik. Gerakan ini dimaksudkan untuk mencapai target produktivitas padi dan bahan pangan lainnya melalui peningkatan intervensi bahan organik sebagai upaya perbaikan kualitas dan kesuburan lahan pertanian.

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pertanian yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.135**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pertanian Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Juara II Lomba Kelompok Tani Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Komoditas Itik	Kelompok Pemuda Peternak Bebek (KPPB) Desa Babadan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Gubernur Jawa Tengah
2	Adhikarya Pratama Pembangunan Pertanian	Hj. Sri Mulyani, S.M.	Menteri Pertanian Republik Indonesia

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pertanian dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.



#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Urusan Pertanian yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.136**  
**Kebijakan Strategis urusan Pertanian**  
**Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Menetapkan lokasi dan alokasi bantuan hibah pada kegiatan pembangunan prasarana pertanian sub kegiatan Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2023 - Rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk kelompok tani / gabungan kelompok tani sebanyak 46 poktan/gapoktan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.277.500.000,- - Hasil kegiatan pembangunan prasarana pertanian telah digunakan dan dikelola oleh kelompok tani / gabungan kelompok tani penerima kegiatan.	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 521/170 Tanggal 22 Mei 2023 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Hibah pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023	Mendukung peningkatan ketahanan pangan
2	Menetapkan lokasi dan alokasi bantuan hibah uang pada Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang bersumber dari dana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 - Transfer uang yang diberikan kepada 6 (enam) Kelompok Ternak yaitu : 1) Kelompok Nanggala Farm Dukuh Nanggulan Desa Nanggulan Kecamatan Cawas dengan alokasi Rp 60.000.000,- untuk budidaya kambing 2) Kelompok Berkah Tani 1 Dukuh	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 524/462 Tanggal 24 Oktober 2023 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Hibah Uang Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023	Memberikan penguatan bagi peternak/ pembudidaya hewan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Banyuaeng Rt 01 Rw 02 Desa Banyuaeng Kecamatan Karangnongko dengan alokasi Rp30.000.000,- untuk budidaya burung Murai Batu</p> <p>3) Kelompok Karya Makmur Desa Jambakan Kecamatan Bayat dengan alokasi Rp100.000.000,- untuk budidaya kambing</p> <p>4) Kelompok Ngudi Mulyo Desa Banyuaeng Kecamatan Karangnongko dengan alokasi Rp98.000.000,- untuk budidaya kambing</p> <p>5) Kelompok ternak Burung Akaratu dukuh Brijolor Rt 16 Rw 04 Desa Kalikebo Kecamatan Trucuk dengan alokasi Rp50.000.000,- untuk budidaya burung Murai Batu</p> <p>6) Kelompok ternak Perpatin Dukuh Joho Rt 04 Rw 02 Desa Gumul Kecamatan Karangnongko dengan alokasi Rp98.000.000,- untuk budidaya domba</p> <p>- Bantuan transfer uang telah digunakan dan dikelola untuk penguatan kelompok ternak penerima kegiatan.</p>		
3	<p>Menetapkan lokasi dan alokasi bantuan hibah bibit ternak pada kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2023.</p> <p>- Alokasi bantuan hibah bibit ternak sebanyak 1 ekor domba jantan dan 5 ekor domba betina</p>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 524/87 Tanggal 20 Maret 2023 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Hibah Bibit Ternak Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian di</p>	<p>Meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok ternak/peternak</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>untuk 23 (dua puluh tiga) kelompok ternak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan hibah bibit ternak telah diterima dan dikelola oleh kelompok ternak penerima.</li> </ul>	<p>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023</p>	
4	<p>Menetapkan lokasi dan alokasi kegiatan dan hibah hasil kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian pada sub kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi dari dana APBD Tahun Anggaran 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi pupuk ZA 1000 kg, pupuk organik cair 200 liter dan bibit tanaman alpukat 1110 batang untuk kelompok tani Tegal Subur Desa Tegalmulyo Kecamatan Kemalang.</li> <li>- Alokasi alat perajang tembakau penggerak mesin 3,5 PK masing-masing 1 unit untuk 14 kelompok tani.</li> <li>- Bantuan hibah prasarana pertanian (pupuk dan alat perajang tembakau) telah diterima dan dimanfaatkan oleh kelompok tani.</li> </ul>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/526 tanggal 28 November 2023 tentang Lokasi dan Alokasi Kegiatan dan Hibah Hasil Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Menyediakan dan mengembangkan prasarana pertanian</p>
5	<p>Menetapkan lokasi dan alokasi belanja hibah pada kegiatan pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten/kota pada sub kegiatan pemanfaatan sumber daya genetik hewan/tanaman dari dana APBD tahun anggaran 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja hibah untuk pengembangan Rojolele Srinuk seluas 100 Ha dengan alokasi jenis bantuan 2500 kg benih Rojolele Srinuk, 300 liter pupuk organik cair dan 6000 kg pupuk organik padat yang tersebar di 71 kelompok tani/gabungan</li> </ul>	<p>Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 521/122 tanggal 30 Maret 2023 tentang Lokasi dan Alokasi Belanja Hibah pada Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Peningkatan produktivitas dan produksi ketahanan pangan</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	kelompok tani. - Bantuan hibah benih dan pupuk telah diterima dan dimanfaatkan oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima.		

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pertanian pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.137**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pertanian**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksanaan Program urusan pilihan yang berkaitan dengan Pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp46.690.280.426,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp40.045.801.422,00 atau sebesar 85,77%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp44.524.670.926,00. Dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp38.171.368.842,00 atau 85,73% . Alokasi Belanja Modal sebesar Rp2.165.609.500,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.874.432.580,00 atau 86,55%. Realisasi anggaran belanja urusan pertanian pada tahun 2022 sebesar 85,77% masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja tahun 2021 yaitu sebesar 83,67%.	Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023. alokasi anggaran sebesar Rp16.026.175.600,- dapat terealisasi sebesar Rp14.713.754.628,- atau sebesar 91,81% meningkat jika dibandingkan tahun 2022	Meningkatnya serapan anggaran
2.	Terdapat 3 indikator kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran kategori "sangat tinggi" sebanyak 2 indikator dan kategori "Tinggi" sebanyak 1 indikator. Terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja	Meningkatkan capaian realisasi indikator program sehingga di tahun 2023 sudah tidak ada lagi capaian indikator kinerja program dengan kategori	Meningkatnya capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>Program dengan Realisasi Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 8 (delapan) indikator, kategori “Tinggi” sebanyak 1 (satu) indikator, dan “Sangat Rendah” sebanyak 1 (satu) Indikator.</p> <p>Sudah ada penjelasan dan alasan terkait capaian indikator program yang mendapatkan kategori sangat rendah. Pada tahun berikutnya Urusan Pertanian diharapkan mempertahankan capaian indikatornya baik indikator sasaran maupun indikator program yang mendapatkan kategori sangat tinggi. Selain itu Urusan Pertanian harus lebih memberikan perhatian terhadap indikator kinerja program yang masih mendapatkan kategori sangat rendah.</p>	“sangat rendah”.	

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pertanian beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.138**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pertanian**  
**Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Kinerja program jumlah populasi ternak ruminansia besar dan kecil masuk kategori “sedang” (capaian kinerja 73,35%) disebabkan karena jumlah peternak ruminansia besar berkurang karena sebagian beralih ke ternak unggas akibat dari terjadinya wabah yang menyerang ternak ruminansia besar yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK) dan LSD ( <i>Lumpy Skin Disease</i> ).	Melaksanakan kegiatan yang bersifat pencegahan, penanggulangan dan pengobatan <i>zoonosis</i> pada hewan ternak dan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kepada peternak secara berkelanjutan.

#### 4. Urusan Perdagangan

Pelaksana program urusan Perdagangan pada tahun 2023 adalah Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan Kabupaten Klaten .

##### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Perdagangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.808.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.664.935.839,- atau sebesar 97,53%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp3.201.953.250,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.058.489.089,- atau 95,52% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp2.606.646.750,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.606.446.750,- atau 99,99 %

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Perdagangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.139**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Perdagangan Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	5,39	3,68	68,27

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat/tradisional terrevitalisasi	%	46,00	44	95,65
	Persentase PKL yang terbina	%	51,40	61,35	119,4
	Jumlah pendapatan retribusi pasar	Rp	6.921.294.864	7.793.234.744	112,6
Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pasar yang diawasi	%	100	100	100

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
	Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting )	%	6	5,56*	107,3
	*) Indikator negatif,, semakin rendah capaian semakin baik, rumus capaian = $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$				
	Persentase Kinerja Pupuk	%	96	85,06	88,6
Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Komoditas yang mampu ekspor	Jenis	2	2	100
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	%	70	75	107
Program Penggunaan dan Pemasaran produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri	orang	14	22	157,14

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “sedang” sebanyak 1 indikator

- Terdapat 9 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 8 indikator dan Capaian Kinerja “tinggi” sebanyak 1 indikator
- Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kategori “sedang” adalah Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan dari target 5,39% terealisasi 3,68% sehingga capaian 68,27%
- Capaian Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan belum optimal dikarenakan Perlambatan pertumbuhan perdagangan disebabkan karena beberapa komoditas utama perdagangan di Klaten juga mengalami perlambatan pertumbuhan seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selain hal tersebut juga diakibatkan belum optimalnya nilai ekspor. Langkah yang dilakukan untuk mamacu Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan dengan mendorong sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyediaan infrastuktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai perlu dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor, optimalisasi sarana prasarana perdagangan seperti dengan optimalisasi dan revitalisasi Pasar, pelatihan pemasaran online serta pameran dagang baik ditingkat lokal maupun nasional

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perdagangan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Perdagangan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.140**  
**Kebijakan Strategis urusan Perdagangan**  
**Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1.	<p>Membentuk Tim Pengelolaan Pasar Gedhe Klaten yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pengelolaan Pasar Gedhe Klaten, Melakukan koordinasi dengan instansi lintas sektor terkait Pengelolaan Pasar Gedhe Klaten, Menempatkan kembali pedagang Pasar Gedhe Klaten, Melaksanakan pengelolaan Pasar Gedhe yang meliputi pengelolaan pedagang, pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelola Pasar, dan pengelolaan fasilitas Umum. Sampai saat ini Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pasar Gedhe Klaten berjalan dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasar Gedhe Klaten sudah selesai direvitalisasi dengan anggaran Rp.90.782.329.000,- dari Kementrian PUPR, adapun Berita Acara Serah Terima tertanggal 4 Juni 2023.</li> <li>- Pencocokan data pedagang, persiapannya serta Berita Acara Verifikasi data pedagang telah dilaksanakan pada bulan Mei s/d Juni 2023.</li> <li>- Adapun Jumlah Kios: 442, Jumlah Los: 719</li> <li>- Penataan pedagang dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2023.</li> <li>- Pedagang Pasar Gedhe mulai berjualan mulai tanggal 10 Agustus 2023</li> </ul>	Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 506/ 169 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pasar Gedhe Klaten	Kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pasar Gedhe Klaten yang meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Pasar Gedhe Klaten dan terwujudnya keterpaduan dan kserasian penaganangan Pasar Gedhe Klaten dalam satu wadah Koordinasi Daerah

### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perdagangan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.141**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Perdagangan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan Perdagangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.954.029.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.020.703.759,00 atau sebesar 81,16%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp3.936.478.014,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.197.491.809,00 atau 81,23%. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp1.017.551.586,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp823.211.950,00 atau 80,90%. Realisasi anggaran baik belanja operasi (81,23%) maupun belanja modal (80,90%) yang merupakan hasil efisiensi anggaran, akan tetapi perlu adanya perencanaan program dan penganggaran yang lebih matang pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Perdagangan sebaiknya penyusunan memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.	Telah disusun perencanaan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp5.808.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.664.955.839,- atau sebesar 97,53% meningkat dibandingkan tahun 2022	Meningkatnya serapan anggaran

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
2.	<p>Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “Sangat tinggi”. Terdapat 10 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 9 indikator dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 1 Indikator.</p> <p>Pada tahun berikutnya Urusan Perdagangan diharapkan mempertahankan capaian indikatornya baik indikator sasaran maupun indikator program yang mendapatkan kategori sangat tinggi.</p> <p>Selain itu urusan perdagangan harus lebih memberikan perhatian terhadap indikator kinerja program yang masih mendapatkan kategori sangat rendah. Adapun indikator yang mempunyai kategori rendah, sangat rendah dan tidak tercapai adalah: indikator kinerja persentase PKL yang terbina dengan capaian kinerja sebesar 24,35%. Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Perdagangan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, adapun kebijakan strategis yang diambil adalah penetapan lokasi PKL dengan adanya perpindahan/relokasi PKL alun-alun sudah ditertibkan di jalan Bali (arena kuliner) dan Taman Nyi Ageng Rakit Rowo jombor Krakitan (Non Kuliner dan Wahana Permainan).</p>	<p>Pada Tahun 2023 Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “sedang” sebanyak 1 indikator Terdapat 9 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 8 indikator dan Capaian Kinerja “tinggi’ sebanyak 1 indikator</p> <p>Telah dilaksanakan pembinaan PKL baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan maupun pelaksanaan event bagi PKL</p>	Perbaikan Capaian Kinerja
3.	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti.		
4.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi.		

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Perdagangan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.142**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Perdagangan**  
**Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Belum optimalnya cakupan bina kelompok dan bina usaha informal	Melaksanakan pembinaan PKL baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan maupun pelaksanaan event bagi PKL
2	Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif	Melaksanakan revitalisasi 1 unit pasar yaitu Pasar Babadan Teloyo Wonosari
3	Belum terkendalinya lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting ) tertentu.	Melaksanakan pasar murah di beberapa titik wilayah

#### 5. Urusan Perindustrian

Pelaksana program urusan Perindustrian pada tahun 2023 adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

##### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Perindustrian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.17.416.784.615 dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.318.448.405 atau sebesar 76,47%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 16.448.706.615 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 12.527.048.405 atau 76,16 % dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 968.078.000 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 791.400.000 atau 81,75%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Perindustrian dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.143**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Perindustrian Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	4,19	5,85	139,61

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	%	21,44	18,97	88,49
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%	2	3,03	151,60

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.

- Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator.

Dalam pelaksanaan program urusan Perindustrian, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.144**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Perindustrian**  
**tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	Bisnis Industri Center	<p>BIC adalah salah satu wadah bagi IKM Klaten dalam mengembangkan produk dan daya saing. Pelayanan BIC terdiri dari 3 layanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan informasi dan konsultasi bisnis.</li> <li>2. Layanan informasi dan konsultasi perlindungan produk.</li> </ol> <p>Layanan pendampingan Industri Kecil Menengah (IKM).</p>

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Perindustrian dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada tahun 2023, Tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Perindustrian yang ditetapkan Kepala Daerah.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Perindustrian pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.145**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Perindustrian**

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2023</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
1.	<p>Pelaksanaan Program urusan yang berkaitan dengan Perindustrian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10.298.335.030,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.006.639.324,00 atau sebesar 87,46%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp9.974.508.980,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp8.733.119.324,00 atau 87,55% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp323.826.050,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp273.520.000,00 atau 84,47%. Realisasi anggaran urusan perindustrian tahun 2022 (87,46%) lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2021 (82,82%). Realisasi anggaran baik belanja operasi (87,55%) maupun belanja modal (84,47%) masih jauh dari anggaran yang ditetapkan.</p> <p>Realisasi pada tahun 2022 belum terserap optimal disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya efisiensi anggaran dalam penyerapan anggaran dikarenakan selisih harga antara pagu dan harga nego dari lelang</li> <li>2. Pada sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat yang bersumber dana alokasi khusus non fisik (DAK Non Fisik) tidak terserap dikarenakan IKM pakaian bayi dan</li> </ol>	<p>Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023. Urusan Perindustrian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.17.416.784.615 dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.318.448.405 atau sebesar 76,47% meningkat jika dibandingkan tahun 2022.</p>	<p>Meningkatnya serapan anggaran</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>batik mark tidak memenuhi kelengkapan persyaratan SNI, sehingga mempengaruhi peningkatan daya saing mutu, desain dan kemasan produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi.</p> <p>Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Perindustrian sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.</p>		
2.	<p>Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator. Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sedang” sebanyak 1 (satu) Indikator dan Capaian Kinerja “Sangat Rendah” sebanyak 1 (satu) Indikator.</p>	<p>Pada tahun 2023 telah Melakukan penyesuaian indikator dan target-target kinerja yang tertuang pada dokumen perencanaan Disperinaker dengan RPJMD sehingga capaian kinerja meningkat.</p>	<p>Peningkatan capaian kinerja sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan</p>
3.	<p>Tidak ada kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Perindustrian telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran.</p>		
4.	<p>Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti.</p>		
5.	<p>Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi.</p>		

#### **F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Perindustrian beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.



**Tabel 3.146**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Perindustrian**  
**Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Adanya penduduk masyarakat miskin ekstrim	Memberikan bekal pelatihan ketrampilan menjadi Wira Usaha Baru (WUB) agar masyarakat tersebut mampu menambah kesejahteraan keluarga, sehingga diharapkan jumlah masyarakat miskin ekstrim di Klaten jumlahnya menurun.
2	Masih rendahnya Industri Kecil dan Menengah yang bisa memenuhi Tingkat komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%	Memberikan sosialisasi Industri Kecil Menengah berupa cara memperoleh Sertifikat Tingkat komponen Dalam Negeri (TKDN) serta masuk dalam sistem e-Katalog

## 6. Urusan Transmigrasi

Pelaksana program urusan Transmigrasi pada tahun 2023 adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Transmigrasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp55.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp32.074.850 atau sebesar 57,28%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp55.000.000 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp32.074.850 atau 57,28%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transmigrasi secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Transmigrasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.147**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Transmigrasi Tahun 2023**

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi	%	80	<b>100</b>	<b>125</b>

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja

dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1(satu) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1(satu) indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transmigrasi secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Transmigrasi dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada Tahun 2023 tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Transmigrasi yang ditetapkan Kepala Daerah.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Transmigrasi pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.148**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Transmigrasi**

<b>No</b>	<b>Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022</b>	<b>Tindak Lanjut Tahun 2023</b>	<b>Tujuan/ Masalah yang diselesaikan</b>
1.	Pelaksanaan Program urusan pilihan yang berkaitan dengan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran sebesar Rp81.474.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp34.381.500,00 atau sebesar 42,20%. Realisasi anggaran belanja (42,20%), masih jauh dari anggaran yang ditetapkan. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, apabila kondisi sudah normal maka OPD pelaksana Urusan Transmigrasi sebaiknya mengajukan kembali anggarannya sesuai dengan kebutuhannya.	Sudah direncanakan dan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan urusan pilihan transmigrasi pada tahun 2023	Penganggaran pelaksanaan urusan transmigrasi di tahun 2023
2.	Terdapat 1(satu) Indikator Kinerja sasaran dengan capaian Kinerja “Sangat Tinggi” sebanyak 1(satu) indikator. Terdapat 1(satu) Indikator Kinerja Program dengan capaian Kinerja “sangat tinggi” dikarenakan pada tahun 2022, mendapat 2 kuota keberangkatan transmigrasi dari Pemerintah Pusat.	Pada tahun 2023 Disperinaker sudah berupaya untuk menganggarkan lagi pelaksanaan penempatan transmigrasi untuk 10 KK, akan tetapi hanya mendapatkan kuota dari Provinsi sebanyak 1 KK sehingga Disperinaker hanya memberangkatkan 1 KK.	Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3.	Tidak ada kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Transmigrasi selama satu tahun anggaran.		
4.	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti.		
5.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi.		

#### **F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Transmigrasi beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.149**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Transmigrasi Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Upaya Mengatasi Permasalahan</b>
1	Target alokasi calon Transmigrasi ditentukan oleh Provinsi, antara target Kabupaten dan Provinsi tidak sama.	Penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan melakukan fasilitasi dan mediasi ( MOU ) antara daerah asal dengan Provinsi/ Kabupaten daerah penempatan.

#### **3.4 Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan**

Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi Sekretariat Daerah, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat DPRD, Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan, Kesatuan Bangsa dan Politik

##### **1. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah**

Pelaksana program Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah pada tahun 2023 adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang terdiri dari Sembilan Bagian.

##### **A. Capaian Kinerja Program**

Pelaksanaan Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp65.818.524.006,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp56.034.533.984,00 atau sebesar 85,13%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.63.666.213.286,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp54.161.748.455,00 atau 85,07% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp2.152.310.720,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.872.785.529,00 atau 87,01%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.150**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Peringkat/ Nilai SAKIP	Skor	67,00	66,27	98,91
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,48	85,62	102,56

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Administrasi Umum	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	%	100	100	100
	Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik	%	100	100	100
	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun	%	100	100	100
	Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	%	100	100	100
	Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik	%	100	100	100
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana	%	100	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	Persentase Kecamatan Mencapai Kategori "WASANA"	%	30,77	57,69	187,49
	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	%	100	100	100
	Persentase kasus Hukum yang meninpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum	%	100	160	160
	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	%	100	79	79
Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan	%	100	100	100
	Prosentase Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement	%	100	100	100
	Pertumbuhan Setoran Bagian Laba BUMD kepada Pemerintah Daerah	%	5	14,76	295,23
	Persentase BLUD yang Mendapatkan Pembinaan Teknis	%	100	100	100
	Persentase Rekomendasi Tim Pengendali Inflasi Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	Pertumbuhan Jumlah Unit Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan	%	5	-41,08	-821,56
	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang Terlaksana Sesuai dengan Ketentuan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 2 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator
- Terdapat 17 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 15 indikator, capaian kinerja “Tinggi” sebanyak 1 indikator dan capaian kinerja “sangat rendah” sebanyak 1 indikator
- Capaian Kinerja Program yang kategori “Sangat Rendah” adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program kategori sangat rendah adalah Pertumbuhan Jumlah Unit Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan. Dari target Indikator Kinerja Pertumbuhan jumlah unit Usaha Mikro yang mendapatkan Akses Keuangan ditargetkan 5% dan terealisasi minus, kondisi ini disebabkan oleh karena :

1. Adanya ketentuan bahwa calon Debitur KUR dipersyaratkan tidak pernah menikmati kredit komersial sebelumnya.
2. ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN saat ini tidak diperkenankan mengambil fasilitas KUR, walaupun mempunyai usaha .
3. Adanya peraturan Rate Progressive, untuk Tahun 2023 ditetapkan peraturan untuk kredit KUR yakni bagi Debitur yang punya historis pinjaman yang sudah lunas tidak diperbolehkan untuk pengajuan kredit KUR kembali disamping itu juga diberlakukan peraturan Bunga berjenjang yakni jika sudah pernah menikmati KUR 6% untuk selanjutnya dikenakan KUR 7% dan seterusnya, berbeda dengan kondisi di tahun sebelumnya tahun 2022 tidak ada peraturan Rate Progressive

Dalam pelaksanaan program Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.151**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Penunjang**  
**urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	Aplikasi SIMPELBANG (Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan)	Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk pemantauan dan pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Klaten.  Sistem pengumpulan laporan realisasi fisik dan keuangan berbasis online melalui aplikasi agar laporan dapat terintegrasi dengan baik dan tepat waktu/real time.  Dengan adanya aplikasi SIMPELBANG maka diharapkan dapat digunakan sebagai media pelaporan agar lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung evaluasi capaian realisasi fisik sub kegiatan dan serapan anggaran.
2.	JDIH Kabupaten Klaten	Website yang berisikan integrasi dari semua peraturan produk hukum baik yang ada di Desa, Kabupaten, Propinsi dan Nasional
3.	Bankumaskin	Bantuan pendampingan Hukum bagi masyarakat miskin kabupaten klaten yang berpekerja di pengadilan Negeri. Sosialisasi sudah dilaksanakan kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa sejak Tahun 2019
4.	Gerakan Cinta Masjid	Gerakan memotivasi jamaah/masyarakat umum dan ASN agar melaksanakan sholat berjamaah di masjid Pemda (Terutama sholat jumat, dhuhur dan asar).



NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
5.	Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)	Penilaian Kinerja Kecamatan yang meliputi aspek sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;</li> <li>2. Aspek Pelayanan Publik;</li> <li>3. Aspek Kearsipan;</li> <li>4. Aspek Pelaporan Kinerja Pemerintahan Kecamatan;</li> <li>5. Aspek Pembinaan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;</li> <li>6. Aspek Transparansi Publik;</li> <li>7. Aspek Inovasi.</li> </ol>
6.	SPM On-Clinic (SOC)	Inovasi dalam peningkatan pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten, melalui layanan konsultasi dan berbagi informasi terkait pelaksanaan SPM secara online dan offline
7.	e-SKM	Inovasi aplikasi untuk melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Data SKM diperlukan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur penyebab keluhan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan.
8.	Sistem Informasi Pinjam Ruang	Sistem Informasi/Aplikasi terkait Peminjaman Ruang Bagian Umum Setda Kabupaten Klaten melalui
9.	Siketan Bubuk (Sistem Informasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Klaten)	Bagian dari Web Prokopim yang Berisikan Tentang Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Klaten
10.	Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kab. Klaten Tahun 2023	Upaya memfasilitasi pelaku usaha Mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan dan dalam rangka pemulihan ekonomi.
11.	Tuku Ben Payu	Pemasangan Iklan bagi masyarakat luas di Instagram Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten Pada Waktu Bulan Ramadhan

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.152**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi**  
**Pemerintahan Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Tokoh Perempuan Inovatif Dalam Pelayanan Publik	Bupati Klaten (Hj. Sri Mulyani, S.M, M.Si)	Detik.com
2.	Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Peringkat 10 Besar Nasional	Pemerintah Kabupaten Klaten	Menteri Hukum dan Ham RI
3.	Peringkat 4 Nasional Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terbaik Kategori Kabupaten dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award 2023	Pemerintah Kabupaten Klaten	Kementerian Dalam Negeri
4.	Predikat zona hijau (kualitas tertinggi) pada penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (opini pengawasan Ombudsman RI) Tahun 2023	Pemerintah Kabupaten Klaten	Ombudsman RI
5.	TOP Pembina BUMD	Ibu Bupati Klaten Bupati Klaten (Hj. Sri Mulyani, S.M, M.Si)	TOP BUMD AWARDS 2023
6.	TOP CEO BUMD 2023	Irawan Margono Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Merapi Kab. Klaten	Institut Otonom Daerah (i-OTDA)
7.	TOP BUMD AWARDS 2023 – BINTANG 5	Perumda Air Minum Tirta Merapi Kab. Klaten	Institut Otonom Daerah (i-OTDA)
8.	TOP HUMAN CAPITAL AWARDS 2023 #STAR 3	Perumda Air Minum Tirta Merapi Kab. Klaten	Top Business
9.	TOP PEMBINA BUMD TOP BUMD AWARD 2023 PEMENANG KATEGORI “TOP CEO BUMD 2023”	PT. BPR BANK KLATEN (PERSERODA) KAB. KLATEN	TOP BUMD AWARDS 2023
10.	TOP BUMD AWARDS 2023#BPR BINTANG 4	PT. BPR BANK KLATEN (PERSERODA) KAB. KLATEN	TOP BUMD AWARDS 2023
11.	The Finance sebagai BPR Berpredikat bintang 1 dengan kategori aset 100 milyar ke atas yang tumbuh pesat selama 3 Tahun	PT. BPR BANK KLATEN (PERSERODA) KAB. KLATEN	TOP 100 BPR THE FINANCE 2023
12.	Infobank Award dengan Predikat “Sangat Bagus” atas Kinerja Keuangan selama Tahun 2022	PT. BPR BANK KLATEN (PERSERODA) KAB. KLATEN	INFOBANK

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
13.	Infobank Golden Award dengan Predikat “Sangat Bagus” atas Kinerja Keuangan selama Tahun 2018-2022	PT. BPR BANK KLATEN (PERSERODA) KAB. KLATEN	GOLDEN AWARD 2023

#### B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

#### C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

#### D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.153**  
**Kebijakan Strategis Penunjang urusan Pemerintahan**  
**Sekretariat Daerah Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2023. Bantuan berupa dana dari APBD untuk Subsidi Bunga Pinjaman kepada pelaku usaha Mikro di Kabupaten Klaten, dengan pagu Anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan Realisasi 278 Debitur baru.	Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Petunjuk pelaksanaan program subsidi bunga kepada usaha mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2023	Tujuannya dalam upaya memfasilitasi pelaku Usaha mikro guna mendapatkan akses keuangan/perbankan, dan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019), Pemerintah Daerah hadir memfasilitasi pelaku usaha mikro yang berorientasi kepada pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan, Realisasi sebesar Rp. 1.990.595.554,- atau (95,2%) dengan 278 Debitur.
2.	Menetapkan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten	Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar	1. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>Tahun 2023-2027. Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Lingkup kegiatan Penyusunan Renaksi Penerapan SPM meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib;</li> <li>2. Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM;</li> <li>3. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 urusan wajib;</li> <li>4. Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM;</li> <li>5. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan;</li> <li>6. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber</li> </ol>	<p>Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten Tahun 2023-2027</p>	<p>evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah dan jangka pendek dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengoptimalkan capaian Penerapan SPM Kabupaten Klaten</li> </ol>

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
	<p>pendanaan alternative dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM;</p> <p>7. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.</p>		
3.	<p>Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024 sebagai upaya untuk optimalisasi dan penyesuaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi terhadap arah kebijakan nasional dan memberi arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.</p> <p>Sesuai dengan fokus double track pelaksanaan RB Nasional, pembangunan RB di Pemerintah Kabupaten Klaten terdiri atas :</p> <p>1. RB Tematik bertujuan untuk menjawab problem hilir yang berfokus mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional, meliputi tema:</p>	<p>Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024</p>	<p>Perbaiki kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>Kemiskinan; Peningkatan Investasi; Digitalisasi Pemerintahan Stunting; Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan Inflasi.</p> <p>2. RB General bertujuan untuk menjawab problem hulu yang berfokus memperbaiki manajemen internal Pemerintah Kabupaten Klaten, meliputi sasaran strategis: Tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional.</p>		

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.154**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan Penunjang urusan Pemerintahan**  
**Sekretariat Daerah**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp58.754.002.960,00 dengan realisasi anggaran sebesar	Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023. Alokasi anggaran sebesar Rp65.818.524.006,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp56.034.533.984,00	Meningkatnya serapan anggaran Tahun 2023 jika dibandingkan tahun sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	Rp49.371.963.226,00 atau sebesar 84,03%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp52.715.389.227,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp44.270.322.506,00 atau 83,98% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.6.038.613.733,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp5.101.640.720,00 atau 84,48	atau sebesar 85,13% meningkat jika dibandingkan tahun 2022. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp63.666.213.286,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp54.161.748.455,00 atau 85,07% meningkat jika dibandingkan tahun 2022. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp2.152.310.720,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.872.785.529,00 atau 87,01% meningkat jika dibandingkan tahun 2023	
2.	Peringkat/ Nilai SAKIP dengan skor 65,14 ini menunjukkan Tercapainya Realisasi dari target dari rencana dengan skor 62. Indeks terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu sebesar 83,46 ini menunjukkan Belum tercapainya Target dari rencana yaitu 82.	Pada Tahun 2023 Peringkat/ Nilai SAKIP dengan skor 66,28 ini menunjukkan belum tercapainya Realisasi dari target dari rencana dengan skor 67 karena masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Indeks terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu sebesar 85,62 ini menunjukkan tercapainya Target dari rencana yaitu 83,48	Perbaikan Capaian Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3.	Terdapat 2 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 2 indikator. Terdapat 17 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 15 indikator, capaian kinerja "Tinggi" sebanyak 2 indikator	Pada Tahun 2023 Terdapat 2 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 2 indikator. Terdapat 17 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 15 indikator, capaian kinerja "Tinggi" sebanyak 1 indikator dan capaian "sangat rendah" sebanyak 1 indikator	Perbaikan Capaian Kinerja

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
4.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib Administrasi telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan	Pada tahun 2023 sudah diberikan penjelasan terkait kebijakan strategis yang diambil	Penjelasan kebijakan strategis
5.	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti.	Rekomendasi DPRD tahun 2022 sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023	Tindak lanjut dari Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya
6.	<p>Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan 2 program (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Perekonomian dan Pembangunan) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.361.433.800;</p> <p>Adapun capaian realisasi anggaran sebesar Rp.2.649.454.100; atau sebesar 78,81%.</p> <p>Rincian anggaran tersebut terdiri dari “</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.334.433.800; dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 827.204.100; atau 61,98%.</li> <li>- Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 27.000.000; dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.26.300.000; atau 97%.</li> <li>- Alokasi Belanja subsidi sebesar Rp. 2.000.000.000; pada kegiatan pengawasan Kebijakan Perekonomian sub kegiatan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dengan realisasi</li> </ul>	Tindak lanjut melaksanakan kegiatan sesuai DPA Tahun Anggaran 2023 dan telah mencapai Realisasi sebesar Rp. 2.622.763.489,- atau (86,83%) Kegiatan telah terlaksana 100% dengan efisiensi anggaran.	Efektifitas kegiatan dan efisiensi anggaran



No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>Rp1.795.750.000; atau 89,79% karena apabila direalisasikan 100% maka anggaran subsidi 2023 sebesar Rp.2.000.000.000; tidak akan cukup.</p> <p>Realisasi anggaran belanja pada tahun ini sebesar Rp.2.649.454.100; (78,81%) besarnya lebih kecil namun prosentasenya lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.7.536.101.157; (71,85%).</p> <p>Namun demikian realisasi secara keseluruhan masih dibawah target yang telah ditentukan.</p>		
7.	<p>Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Program Perekonomian dan Pembangunan adalah telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, yaitu Program Subsidi Bunga 80% dengan anggaran APBD Rp.2.000.000.000;</p> <p>Untuk Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Klaten sesuai Peraturan Bupati No 2 Tahun 2022; dan pelaksanaan Belanja Wajib Perlindungan Sosial dalam rangka antisipasi dampak inflasi akibat kenaikan BBM tahun 2022 dengan Pemberian Bansos sesuai Peraturan Bupati No 54 tahun 2022.</p>	<p>Melanjutkan Program Subsidi Bunga Tahun anggaran APBD 2023 sebesar Rp.2.000.000.000,- Realisasi sebesar Rp.1.907.074.322,- atau (95,2%) untuk 278 debitur dan Pelaku Usaha Ultra Mikro diberikan Program Kredit Lurik PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) dengan plafon Rp. 2.000.000,- dengan 43 Debitur, Pagu Anggaran Rp.100.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp.82.000.000,-</p>	<p>Akses Permodalan pelaku Usaha Mikro dan Ultra Mikro Kabupaten Klaten.</p>
8.	<p>Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi.</p>	<p>Pada tahun 2023 Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi.</p>	<p>Uraian Masalah disertai solusi yang telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang ada</p>
9.	<p>Beberapa catatan kritis berkenaan dengan penyelenggaraan penunjang</p>	<p>1. Realisasi Fisik kegiatan APBD Tahun anggaran 2023 sudah</p>	<p>Penyelesaian Permasalahan di Bagian</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta program perekonomian dan pembangunan adalah: Laporan Permasalahan dan Kendala yang dialami Bagian Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara fisik realisasi kegiatan APBD Tahun anggaran sudah sesuai dengan target yang ditentukan, berkat optimalisasi pengendalian internal dan eksternal sehingga bisa dimitigasi kendala-kendala yg dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.</li> <li>2. Masih adanya kegiatan-kegiatan yang tidak selesai tepat waktu karena lemahnya perencanaan kegiatan sehingga ada beberapa kegiatan yang mengalami keterlambatan</li> <li>3. Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya persediaan sehingga tidak dapat terlaksana secara maksimal karena terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi, seperti perjadi, Fasilitas kunjungan tamu,dll</li> <li>4. Dalam pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor dianggaran perubahan terdapat beberapa opd mengalami kesulitan dalam proses pengadaannya dikarenakan beberapa hal diantaranya spesifikasi barang yang dibutuhkan tidak ada di ekatalog,</li> </ol>	<p>sesuai dengan target yang ditentukan yaitu realisasi 97% dari target 97% sehingga deviasi 0%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghimbau kepada PA/KPA untuk mengoptimalkan pengendalian internal baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan tepat waktu dan tepat mutu</li> <li>3. Terdapat kegiatan yang sifatnya persediaan</li> <li>4. Melakukan mitigasi terhadap barang yang akan dibeli pada saat proses penyusunan RKA/DPA</li> <li>5. Terdapat efisiensi anggaran dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan</li> </ol>	<p>Administrasi Pembangunan</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>barang yang akan dibeli tingkat TKDNnya rendah, proses pengiriman barang lebih dari tahun anggaran berjalan.</p> <p>5. Untuk realisasi keuangan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terserap maksimal karena efisiensi anggaran</p>		
10.	<p>Beberapa Catatan terkait Penguatan BLP dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Klaten TA 2022</p> <p>1. Perlunya penambahan SDM Fungsional PBJ sebagai salah satu penguatan Organisasi Layanan Pengadaan dalam Melakukan Proses Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa. Sekaligus juga dalam rangka mendukung MCP KPK. Berdasarkan rekomendasi LKPP, ideal SDM fungsional PBJ di Kabupaten Klaten sebanyak 26 orang, dan yang tersedia saat ini baru 4 orang</p> <p>2. Perlunya ketaatan atas implementasi Regulasi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa oleh masing-masing OPD, agar proses pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari tahap persiapan sampai dengan penandatanganan kontrak oleh PPKom dapat berjalan dengan baik. (Mis. Input RUP yang masih sering terlambat)</p> <p>3. Dalam mendukung Inpres No 2 Tahun 2022 tentang P3DN (Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) masing masing OPD</p>	<p>1. Pada tahun 2023 kondisi SDM fungsional PBJ di Kabupaten Klaten sebanyak 4 orang dari kebutuhan 26 orang. Sudah dilaksanakan pengisian melalui formasi PPPK namun belum ada yang memenuhi syarat.</p> <p>2. Pada tahun 2023 sudah dilaksanakan teguran kepada OPD</p> <p>3. Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023 dengan membuat Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2023 tentang Belanja Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.</p> <p>- Laporan Rencana dan Realisasi atas PDN yaitu : Terdapat Komitmen PDN sebesar Rp.478.013.435.841,- (dengan Presentase TKDN 81,97%) dari Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.583.145.813.533,- Dan Realisasi Penyerapan KDN</p>	<p>Penyelesaian Permasalahan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	agar dapat mempedomani, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang lebih mengutamakan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk luar negeri, OPD harus bisa melaporkan kepada Bupati terkait Rencana dan Realisasi stas Penggunaan Produk dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).	sebesar Rp.410.044.950.208,- (Presentase TKDN 85,62%) dari nilai Kontrak sebesar Rp.478.899.223.807,-	

**F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.155**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan Penunjang urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Dalam penyusunan produk hukum daerah seringkali produk hukum belum bisa ditetapkan dalam satu tahun anggaran	Monitoring secara berkala terhadap OPD yang mengajukan produk hukum daerah
2.	Pengelolaan dan pemanfaatan website JDIH belum maksimal	Pembinaan ke anggota JDIH kabupaten secara berkala dan sosialisasi website JDIH lewat media sosial dan tatap muka

## 2. Pengawasan

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan pada tahun 2023 adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp15.873.801.826,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.745.128.825,00 atau sebesar 80,29%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp15.353.323.518,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp12.316.338.825,00 atau 77,58 % dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp520.478.308,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp428.790.000,00 atau 82,38 %

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.156**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2022**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	81	78,84	97,33

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1	%	100	110,9	110,9
	Prosentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2	%	100	110,9	110,9
	Prosentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3	%	100	110,9	110,9

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
	Prosentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	%	100	110,9	110,9
	Prosentase pelaksanaan pengawasan khusus	%	100	571,43	571,43
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Prosentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Wilayah 1	%	100	164	164
	Prosentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Wilayah 2	%	100	164	164
	Prosentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Wilayah 3	%	100	164	164
	Prosentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Wilayah 4	%	100	164	164
	Prosentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Khusus	%	100	137,09	137,09

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01\%$	Sangat Tinggi
2	$75,01\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01\% \leq 75\%$	Sedang
4	$50,01\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator
- Terdapat 10 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 10 indikator.

Dalam pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.157**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan**  
**Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2023</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
1.	INSTING (Inspektorat In House Training)	Salah satu bentuk layanan konsultasi oleh Inspektorat Daerah, yang akan dilaksanakan dengan metode pembelajaran tatap muka/daring (menyesuaikan kondisi) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi/kapabilitas bagi APIP itu sendiri maupun kepada kelompok sasaran Perangkat Daerah sampai dengan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten
2.	Sekolah Berintegritas	Salah satu bentuk layanan konsultasi oleh Inspektorat Daerah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, dengan kelompok sasaran SD dan SMP di Kabupaten Klaten. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat memberikan edukasi tentang antikorupsi sejak Pendidikan Tingkat dasar sehingga terbentuk karakter budaya antikorupsi sejak dini.

## **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

## **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

## **D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.158**  
**Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1.	Menetapkan kewajiban bagi penyelenggara negara di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk melaporkan kekayaannya, Wajib lapor penyelenggara negara ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Klaten yang terdiri dari pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan kepala desa di Kabupaten Klaten. setelah penetapan wajib lapor dilakukan sosialisasi dan pelatihan tentang tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, sehingga target pelaporan akan selesai pada tanggal 31 Januari 2024 akan bisa tercapai.	Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten	Sebagai bentuk pencegahan korupsi dengan perbaikan sistem dengan menutup celah terjadinya korupsi, disamping untuk memberi arahan, landasan dan kepastian hukum kepada pejabat pada pemerintah daerah dan kepala desa di Kabupaten Klaten dalam melaporkan harta kekayaannya.



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
2.	Menetapkan kewajiban pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, untuk memastikan visi dan misi Kabupaten Klaten dapat dicapai dengan melakukan penilaian risiko pada tingkat strategis pemerintah daerah dan tingkat strategis serta operasional perangkat daerah. Pelaksanaan manajemen risiko mengikuti proses bisnis yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi, sehingga diharapkan mulai awal tahun 2024 bisa dimulai dengan pelaksanaan perencanaan untuk tahun 2024.	Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten	Sebagai petunjuk/pedoman dalam pelaksanaan manajemen risiko baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Dengan pelaksanaan manajemen risiko maka bisa dilakukan tindak pengendalian terhadap risiko-risiko yang menghambat pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misinya. Disamping itu dengan manajemen risiko dapat dilakukan pengawasan yang tepat yaitu terhadap risiko-risiko tinggi yang dapat menghambat tujuan pembangunan di Kabupaten Klaten.

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.159**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan**  
**Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan pada tahun 2022 adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp15.640.231.091,00 dengan realisasi anggaran sebesar	Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp15.873.801.826,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.745.128.825,00 atau sebesar 80,29%	Meningkatnya serapan anggaran dan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>Rp12.149.471.138,00 atau sebesar 77,68%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp14.585.213.011,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp11.131.080.168,00 atau 76,32% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp1.055.01.080,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.018.390.970,00 atau 96,53%. Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) target 71 realisasi 75,91 dengan capaian kinerja 106,9%. Ini menunjukkan bahwa target telah tercapai.</p>	<p>meningkat jika dibandingkan tahun 2022</p> <p>Pada tahun 2023 Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) 78,84 meningkat jika dibandingkan Tahun 2022 yang sebesar 75,91</p>	
2.	<p>Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”. Terdapat 11 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 11 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.</p>	<p>Pada tahun 2023 seluruh capaian kinerja urusan pengawasan masuk kategori “sangat tinggi”</p>	<p>Mempertahankan capaian kinerja “sangat tinggi”</p>
3.	<p>Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Pengawasan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan</p>	<p>Pada Tahun 2023 sudah dijelaskan terkait kebijakan strategis</p>	<p>Penjelasan kebijakan strategis</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
4.	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti.	-	-
5.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi	-	-

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.160**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang**  
**Pengawasan Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Dalam konsep <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM) dikenal adanya konsep <i>three lines of defense</i> (konsep tiga lini pertahanan), Inspektorat selaku APIP berada pada lini ketiga. Namun sayangnya lini pertama (unit pelaksana kegiatan) dan lini kedua (unit kepatuhan) belum berperan secara optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.</li> <li>- Melakukan sosialisasi dan pendampingan manajemen risiko ke seluruh OPD.</li> </ul>
2.	Pelaksanaan SPIP di tingkat pemerintah kabupaten belum berjalan secara optimal sehingga Inspektorat yang seharusnya berperan sebagai Penjamin Kualitas harus bekerja ekstra untuk mengawal jalannya kegiatan dari awal pelaksanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk tim teknis Koordinator Penyelenggaraan Manajemen Risiko yang terdiri dari Bappedalitbang, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Klaten dan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten;</li> <li>- Mendorong penyusunan register risiko strategis Tingkat Pemda.</li> </ul>
3.	Dengan banyaknya jumlah mitra pengawasan yang ada di Kabupaten Klaten, maka sesuai dengan perhitungan gugus tugas dari BPKP seharusnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan program kerja pengawasan tahunan yang berbasis risiko. Pengawasan dalam bentuk <i>assurance</i> diprioritaskan kepada mitra pengawasan yang memiliki</li> </ul>

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten terdiri dari tiga gugus tugas dengan rekomendasi jumlah auditor 94 orang dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) 26 orang. Namun rekomendasi tersebut belum dapat terlaksana.	risiko tinggi dan dengan periode pengawasan lebih sering, sedangkan untuk mitra pengawasan dengan risiko sedang/rendah pengawasan dilakukan dalam bentuk pendampingan/asistensi/konsultasi

### 3. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan pada tahun 2023 adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

#### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.372.236.696,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.875.175.129,00 atau sebesar 84,03%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp9.314.131.696,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp7.834.250.329,00 atau 84,11% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp58.105.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp40.924.800,00 atau 70,43%.

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.161**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**  
**Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah	Skor	24	21,39	89,13

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100
	Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	%	78	84,89	108,83
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	82,18	82,18
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	86,44	86,44

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator dan Capaian Kinerja Program kategori “Tinggi” sebanyak 2 indikator

Dalam pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.162**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan**  
**Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	Musrenbang CSR Tahun 2023	Dalam rangka mensinergiskan prioritas program pembangunan daerah dengan program CSR agar lebih tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat maka dilaksanakan Musrenbang CSR dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan daerah dengan program CSR, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan CSR, meningkatkan kemitraan antara dunia usaha dengan pemerintah daerah dan membantu percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2.	Penyusunan Website Forum CSR	Adanya Website Forum CSR harapannya program/kegiatan CSR yang dilakukan Perusahaan dapat dilaporkan secara teratur dan periodik, sehingga dapat mempermudah akses dan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta dukungan dunia usaha yang sudah berjalan baik selama ini bisa terus berlanjut dan dapat lebih di tingkatkan lagi. Selain itu, terdapat profil perusahaan yang dapat lebih memudahkan masyarakat dalam mengetahui informasi bahwa perusahaan yang ada juga ikut berkontribusi dan berperan aktif dalam pembangunan daerah serta sebagai ajang promosi dan menciptakan citra baik perusahaan

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.163**  
**Prestasi Pelaksanaan Program**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**  
**Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1.	Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	Kabupaten Klaten	Gubernur Jawa Tengah

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.164**  
**Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang**  
**Perencanaan Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
1.	Menetapkan Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Perluasan Kesempatan Kerja (Forum For Economic Development and Employment Promotion) Kabupaten Klaten Fungsi FEDEP adalah memberikan rekomendasi dan memfasilitasi dalam hal prioritas program peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi lokal.	Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/182 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Perluasan Kesempatan Kerja (Forum For Economic Development and Employment Promotion) Kabupaten Klaten tanggal 26 Mei 2023	Dalam rangka meningkatkan kinerja Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Klaten

<b>No</b>	<b>Kebijakan Strategis</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Tujuan / Masalah yang diselesaikan</b>
2.	<p>Penetapan Lokasi Klaster Usaha Kecil dan Menengah dilakukan dalam rangka pemberdayaan UKM secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha kecil dan menengah dalam usaha mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan</p>	<p>Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/225 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/216 Tahun 2022 tentang Lokasi Klaster Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten tanggal 20 Juli 2023</p>	<p>Dalam rangka penambahan lokasi klaster usaha kecil dan menengah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan</p>
3.	<p>Menetapkan Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Klaten, dimana tugas Komisi Irigasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi</li> <li>• Merekomendasikan prioritas alokasi dan pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan</li> <li>• Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas/instansi terkait</li> <li>• Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asset irigasi, penetapan hak guna atas air untuk irigasi, proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi, upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan system irigasi, serta mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan bencana alam lainnya.</li> </ul>	<p>Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/229 tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Klaten tanggal 26 Juli 2023</p>	<p>Dalam rangka meningkatkan kinerja dan fungsi irigasi</p>
4.	<p>Menetapkan Pembentukan Tim Project Implementation Unit (PIU), Tim Pengawas Verifikasi, dan Tim Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum di Kabupaten Klaten</p>	<p>Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/423 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Project Implementation Unit (PIU), Tim Pengawas Verifikasi, dan Tim Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan</p>	<p>Sebagai Pedoman dalam Pengelolaan Program Hibah Air Minum</p>



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		dan Perdesaan Kabupaten Klaten tanggal 2 Oktober 2023	

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.165**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan pada tahun 2022 adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.216.789.056,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.005.027.654,00 atau sebesar 86,65%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp9.124.139.056,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp7.913.512.654,00 atau 86,73% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp92.650.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp91.515.000,00 atau 98,77%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan inventarisir dan evaluasi rincian belanja dalam sub kegiatan di DPA. Jika dalam sub kegiatan tersebut masih ada ketidaksesuaian rincian belanja, maka akan dilakukan perubahan dalam penyusunan anggaran perubahan.</li> <li>- Alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.9.372.236.696,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.875.175.129,00 atau sebesar 84,03% Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp9.314.131.696,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar</li> </ul>	Perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan perbaikan serapan anggaran di Tahun 2023

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		<p>Rp7.834.250.329,00 atau 84,11% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp58.105.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp40.924.800,00 atau 70,43%.</p> <p>Capaian kinerja sebesar 100% sehingga anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi anggaran, terutama untuk anggaran pembayaran gaji dan tunjangan sisa sebesar Rp1.089.931.002,00</p>	
2.	<p>Dalam urusan Perencanaan Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”. Terdapat 4 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 3 indikator dan kategori “Tinggi” sebanyak 1 indikator.</p>	<p>Melakukan monitoring, pengendalian evaluasi internal secara berkala dalam rangka memantau capaian realisasi kinerja</p>	<p>Penyelenggaraan tulus sesuai dengan urusannya masing-masing mendasari regulasi yang ada</p>
3.	<p>Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Perencanaan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama</p>	<p>Sudah dijelaskan lebih detil terkait Kebijakan strategis tahun 2023.</p>	<p>Penjelasan kebijakan strategis secara lebih detil</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	satu tahun anggaran, namun belum ada penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis tersebut. Oleh karena itu, pada tahun mendatang perlu diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.		
4.	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti.		
5.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi		

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.166**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang**  
**Perencanaan Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum optimalnya proses pengendalian dan evaluasi sebagai pedoman perumusan kebijakan perencanaan pembangunan	Pelaksanaan Desk Verifikasi agar didaptkam data yang valid dan akurat

#### 4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan pada tahun 2023 adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 801.532.956.856,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 770.422.509.961,- atau sebesar 96,12%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari :

- Alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 37.348.270.147,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 32.945.682.693,- atau 88,21 %
- Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.3.468.095.450,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 3.234.519.405,- atau 93,27 %
- Alokasi Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp.21.382.536.680,- dengan realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 657.130.800,- atau 3,07%
- Alokasi Belanja Transfer sebesar Rp. 739.334.054.579,- dengan realisasi Belanja Transfer sebesar Rp.733.585.177.063,- atau 99,22%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.167**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP Opini WTP yang di terima tahun 2023 atas LKPD Tahun 2022	100%

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	%	100,00	100,00	100,00

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	%	100,00	100,00	100,00
	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	%	84,50	90,51	107,12
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	%	100,00	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	%	10,50	12,68	120,72

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 (Satu) indikator,
- Terdapat 5 (Lima) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 (Lima) indikator.

Dalam pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.168**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan**  
**Fungsi Penunjang Bidang Keuangan tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2023</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
1	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET (SIM ASET)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM ASET) Online, yang berbasis web, Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi tentang Pengelolaan BMD secara baik dan efisien dan menyajikan data secara akurat dan akuntabel dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.169**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**  
**Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Opini WTP atas Laporan Keuangan	Pemerintah Kabupaten Klaten	BPK RI

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.170**  
**Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**  
**Bidang Keuangan**  
**Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Menetapkan Penjabaran APBD Kab. Klaten Tahun Anggaran 2023. Untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2022 Tentang APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023, Maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023. APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 Berjumlah Rp. 2.817.715.454.194,-	Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Kab. Klaten Tahun Anggaran 2023	Mengatur Kebijakan Penjabaran APBD TA 2023 dan Terakomodirnya seluruh rencana Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pembiayaan
2.	Menetapkan Penjabaran Perubahan APBD Kab. Klaten Tahun Anggaran 2023 Untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023, Maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023. APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.2.817.715.454.194,- bertambah sebesar Rp.302.295.864.737,- Sehingga menjadi Rp.3.119.311.770.755,-	Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Klaten Tahun Anggaran 2023	Mengatur Kebijakan Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 dan Terakomodirnya seluruh rencana Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah secara lebih terinci
3.	Menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 Untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, perlu	Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022	Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;</p> <p>Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan Rp.2.587.693.432.935,- Belanja Rp.1.873.841.539.069,28 dan Pembiayaan Rp.469.519.575.841,28 dengan SILPA sebesar Rp.529.593.676.302,00</p>		
4.	<p>Menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Untuk Optimalisasi penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghapusbukukan dan menghapustagihkan piutang daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah serta beberapa sector pendapatan lainnya .</p>	<p>Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah</p>	<p>Memberikan Pedoman Tatacara Penghapusan Piutang Daerah</p>

#### **E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.171**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**  
**Bidang Keuangan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp714.860.263.210,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp689.894.300.252,00 atau sebesar 96,51%.</p> <p>Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp30.927.397.545,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp27.426.710.247,00 atau 88,68%</p> <p>Alokasi Belanja Modal sebesar Rp946.649.100,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp895.719.500,00 atau 94,62%</p> <p>Alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp25.945.719.619,00 dengan Realisasi sebesar Rp7.794.077.100,00 atau 30,04%</p> <p>Alokasi belanja Transfer sebesar Rp657.040.496.946,00 dengan realisasi sebesar Rp653.777.793.405,00 atau 99,50%</p> <p>Realisasi anggaran belanja pada tahun ini sebesar (96,51%) jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebesar (92,05%).</p>	<p>Pada tahun 2023 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.801.532.956.856,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.770.422.509.961,- atau sebesar 96,12%.</p> <p>Rincian anggaran tersebut terdiri dari :  Alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.37.348.270.147,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.32.945.682.693,- atau 88,21 %</p> <p>Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.3.468.095.450,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 3.234.519.405,- atau 93,27 %</p> <p>Alokasi Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp.21.382.536.680,- dengan realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 657.130.800,- atau 3,07%</p> <p>Alokasi Belanja Transfer sebesar Rp.739.334.054.579,- dengan realisasi Belanja Transfer sebesar Rp.733.585.177.063,- atau 99,22%</p>	Optimalisasi anggaran

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
2.	Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator. Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan realisasi Kinerja Program seluruhnya kategori “Sangat Tinggi”.	Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator. Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan realisasi Kinerja Program seluruhnya kategori “Sangat Tinggi”	Mempertahankan capaian kinerja sangat tinggi
3.	Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Keuangan telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran dan telah ada penjelasan terkait kebijakan strategis tersebut.		
4.	Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti.	-	-
5.	Uraian masalah dan solusi telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi.	-	-

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.172**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan**  
**Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Pengendalian dan Pengawasan atas Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Belum Memadai	Sudah dilaksanakan pembinaan kepada Bendahara Desa dengan melibatkan KPP Pratama Kabupaten Klaten terkait sosialisasi pengenaan pajak terhadap bantuan Keuangan.

## 5. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2023 adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten.

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp12.579.649.150,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.579.799.912 atau sebesar 92,05%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp12.480.849.150,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp11.488.009.912 atau 92,05% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.98.800.000,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp91.790.000 atau 92,9%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.173**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	259	265,5	102.31

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	%	80	84,38	105,47
	Persentase Kinerja ASN bernilai baik	%	100	115,12	115,12
	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan	%	95	92,31	92,31

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
	Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	%	75	98,82	104,02
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya	%	100	217,93	272,41

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 5 indikator.

Dalam pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.174**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	Ngopi Kawan (Ngobrol Pintar Kepegawaian)	Forum yang memberikan informasi lebih detail terkait bidang kepegawaian yang diperuntukkan untuk ASN.
2.	SIDIKLAT (Aplikasi Sistem Informasi Diklat Klaten)	Aplikasi yang digunakan untuk memberi kemudahan bagi PNS maupun OPD dalam melakukan usulan diklat dan pelaporan diklat.
3.	SAENAGA (Sistem Informasi Presensi Elektronik Abdi Satya Negara)	Aplikasi presensi kehadiran ASN berbasis Android yang dirancang untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, dan disiplin ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4.	SRIMANGANTI (Sistem Informasi Manajemen Pemberian Cuti)	Aplikasi terintegrasi yang dirancang khusus untuk mengelola izin dan laporan cuti bagi ASN di Kabupaten Klaten.

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada Tahun 2023, belum ada Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang ditetapkan Kepala Daerah.

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.175**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang**  
**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2022 adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten. Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.122.554.230,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.629.479.402,00 atau sebesar 88,62%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp13.022.554.230,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp11.567.572.402,00 atau 88,83% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp61.907.000,00 atau 61%. Indeks Penerapan Sistem Merit ASN, indeks yang dicapai sebesar 258 hal ini menunjukkan Target telah tercapai dari rencana sebesar 202. Sebagai catatan dalam pembahasan RAPBD untuk tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana bidang Kepegawaian sebaiknya memperbaiki penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhannya</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023. Sudah melakukan perbaikan penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp12.579.649.150,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.579.799.912 atau sebesar 92,05%. Realisasi tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2022</p>	<p>Meningkatnya serapan anggaran</p>
2.	<p>Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”. Terdapat 5 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 4 indikator dan Capaian Kinerja “Rendah” sebanyak 1 Indikator. Capaian Kinerja Rendah adalah indikator</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti pada tahun 2023 seluruh capaian kinerja masuk kategori “sangat tinggi” dan “tinggi”</p>	<p>Meningkatnya Capaian Kinerja</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	<p>Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya dikarenakan anggaran untuk peningkatan kompetensi di Tahun 2022 difokuskan untuk latihan dasar CPNS yang sempat tertunda di Tahun 2021 karena pandemi Covid. Menghadapi hal tersebut BKPSDM mengalokasikan Rp562.812.650,00 untuk pengembangan kompetensi teknis dan Rp2.032.658.450,00 untuk sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional pada Tahun 2023. Pada tahun mendatang diharapkan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan hendaknya dapat mempertahankan indikator sasaran dan indikator program yang capaiannya mendapatkan kategori “sangat tinggi”</p>		
3.	<p>Tidak terdapat Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selama satu tahun anggaran.</p>		
4.	<p>Rekomendasi tindak lanjut oleh DPRD pada tahun anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti.</p>		
5.	<p>Uraian masalah, solusi dan tindak lanjutnya telah dinyatakan secara rasional hubungannya. Solusi yang ditawarkan sudah memberikan gambaran penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Tindak lanjut juga telah memberikan arah di masa mendatang terkait apa yang akan dilakukan atas solusi yang dipilih.</p>		

**F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.176**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang**  
**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Belum terintegrasi secara optimal sistem informasi kepegawaian	Proses menginterintegrasikan sistem informasi kepegawaian
2.	Belum kuatnya sistem reward dan punishment di kepegawaian	Menyusun Raperbub tentang reward dan punishment untuk ASN
3.	Belum optimalnya penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensinya serta Belum adanya sistem pola karier yang jelas dan terukur.	Penyusunan Raperbub Pola Karir

## **6. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2023 adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

### **A. Capaian Kinerja program**

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.410.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.276.154.751,00 atau sebesar 90,51%, dimana anggaran tersebut seluruhnya terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp1.410.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.276.154.751,00 atau sebesar 90,51%,

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



**Tabel 3.177**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang**  
**Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Indeks Inovasi Daerah	Skor	2.051	2.139	104,3
		66,79	69,65	104,3
Pada tahun 2021 terjadi perubahan penilaian Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga skor yang diperoleh berbeda dengan tahun 2019				

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	59,40	54,50	91,80
	Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	%	15,00	14,90	99,30

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.

- Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori “sangat tinggi”.

Dalam pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdapat inovasi yang dilakukan pada tahun 2023 sebagai berikut.

**Tabel 3.178**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**  
**Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023**

No	Inovasi	Deskripsi Inovasi
1.	KKN Mbangun Ndeso	Pemetaan dan penempatan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat serta program prioritas Pemerintah Kabupaten Klaten. Pemetaan lokasi KKN disesuaikan dengan kebutuhan desa dan potensi pengembangan masing-masing desa dan kecamatan.
2.	Pojok Konsultasi Inovasi Daerah	Pojok Konsultasi Inovasi Daerah merupakan inovasi untuk memunculkan ide-ide inovasi bagi perangkat daerah maupun desa yang inovasinya belum jalan atau belum punya inovasi, sehingga tujuan satu perangkat daerah minimal satu inovasi pertahun dapat tercapai.
3.	PENDAKI KLATEN (Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Klaten)	Pendampingan dan perlindungan terhadap produk-produk unggulan memperkuat daya saing dengan produk lainnya. Salah satu bentuk penguatan daya saing adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha tersebut atau lebih dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
4.	Inovasi Pengembangan Padi Rojolele Srinuk	Penanaman padi Rojolele Srinuk dan jumlah petani yang menanam padi Rojolele Srinuk meningkat hampir enam kali lipat sehingga mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Klaten, inovasi ini untuk menjaga keberlangsungan kuantitas dan kualitas agar sesuai dengan hasil penelitian.

Pada Tahun 2023 ada prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.179**  
**Prestasi Pelaksanaan Program**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan**  
**Tahun 2023**

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	Innovative Government Award (IGA) 2023	Pemerintah Kabupaten Klaten	Kementerian Dalam Negeri

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan yang ditetapkan Kepala Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.180**  
**Kebijakan Strategis urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**  
**Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Penetapan program Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2023 untuk mengetahui sejauh mana inovasi yang dilaksanakan Perangkat daerah dalam mendukung dan mempercepat terwujudnya program-program unggulan daerah tahun 2021 – 2026. Kegiatan yang dilakukan:  a. Pendataan Inovasi yang dilaksanakan oleh OPD dan mensikronkan program unggulan Daerah.	Keputusan Bupati Nomor 300/262 Tahun 2023 tentang Program Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten	Tujuan Inovasi Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	<p>b. Pendataan inovasi daerah diperlukan dalam kegiatan Innovative Government Award di Kenterian Dalam Negeri</p> <p>c. Selain itu diadakannya lomba kreatifitas dan inovasi untuk menjaring inovasi dari masyarakat dan pelajar.</p> <p>d. Keikutsertaan dalam lomba kranifitas dan Inovasi di Soloraya dan provinsi serta penjangingan inovasi di provinsi Tawa Tengah</p>		

#### E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Tahun Anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.181**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**  
**terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan**  
**Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan**

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	<p>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.030.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp754.652.579,00 atau sebesar 73,27%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp1.020.000.000,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp744.952.579,00 atau 73,03% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp10.000.000,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp9.700.000,00 atau 97,00%.</p>	<p>Alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.410.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.276.154.751,00 atau sebesar 90,51% meningkat signifikan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 yang sebesar 73,03%</p>	<p>Meningkatnya serapan anggaran</p>

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2022	Tindak Lanjut Tahun 2023	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
2.	Dalam urusan Penelitian dan Pengembangan Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 1 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori "sangat tinggi". Terdapat 2 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori "Sangat Tinggi" sebanyak 2 indikator atau semua capaian indikator Kinerja Program masuk kategori "sangat tinggi"	Untuk capaian indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program pada Tahun 2023 seluruhnya berkategori "sangat tinggi", sehingga dapat disimpulkan realisasi indikator kinerja sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan	Tercapaiannya realisasi kinerja sesuai dengan perencanaan yang ada

#### F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.182**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Realisasi Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan belum tercapai, sehingga perlu pemanfaatan hasil kelitbangan dari berbagai Lembaga Kelitbangan.	Fasilitasi, Sosialisasi dan Hilirisasi hasil-hasil kelitbangan ke OPD dan masyarakat umum  Penjajakan Kerjasama ke Lembaga kelitbangan, Perguruan Tinggi dan Kementerian untuk pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Klaten.
2.	Walaupun pertumbuhan inovasi di tahun 2023 sudah sangat tinggi namun masih ada OPD yang belum mempunyai Inovasi	Pendataan dan desk pelaksanaan inovasi OPD Tahun 2023  Penjajakan Kerjasama untuk replikasi inovasi.

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.	Pemanfaatan Perguruan Tinggi yang melaksanakan penelitian, KKN, Magang dan PKL di Kabupaten Klaten belum dapat dimanfaatkan secara Optimal	Penawaran program dan kegiatan Perguruan tinggi ke OPD agar dapat dimanfaatkan.  Penentuan lokasi KKN oleh Bappedalitbang untuk dapat mempercepat penyelesaian kemiskinan ekstrim di 80 Desa di Kabupaten Klaten
4.	Masih banyaknya OPD yang belum memanfaatkan kerjasama dan pemanfaatan hasil litbang perguruan tinggi dalam pelaksanaan pembangunan	Fasilitasi dan sosialisasi MoU yang sudah ada untuk dapat ditindaklanjuti oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya
5.	SDM yang berkecimpung di bidang penelitian dan pengembangan masih kurang baik kualitas maupun kuantitas	Menfaatkan dosen dan peneliti BRIN yang ada di sekitar Klaten untuk dapat membantu kegiatan kelitbang di Klaten.

## 7. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD pada tahun 2023 adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 68.732.054.044,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.320.597.102,- atau sebesar 92,13%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 67.446.376.044,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 62.181.859.642,- atau 92,19% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.285.678.000,- dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.138.737.460,- atau 88,57%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.183**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD**  
**Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2023	REALI SASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)	
Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	81,56	80,53	98,72	
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda	%	75	53,8	71,7
	Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran	%	100	100	100
	Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan	%	100	100	100

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori capaian kinerja “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator.
- Terdapat 3 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 2 indikator, Capaian Kinerja Program kategori “Sedang” sebanyak 1 indikator
- Capaian Kinerja Program yang kategori “Sedang” adalah sebagai berikut :
  1. Persentase Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda.

Adapun capaian kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda dalam kategori “sedang” dikarenakan dari 13 Rancangan Perda yang masuk dalam Program Pembentukan Perda Kabupaten Klaten Tahun 2023 baru dibisa ditetapkan sebanyak 7 Rancangan Perda dan masih terdapat 6 Rancangan Perda yang masih dalam proses pembahasan.

Alasan masih terdapat 6 Rancangan Perda yang masih proses pembahasan dikarenakan :

1. Proses Evaluasi Gubernur dalam rangka pengkajian dan penilaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Diantaranya adalah Rancangan Perda sebagai berikut :
  - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
  - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Ada Rancangan Perda yang masih menunggu Peraturan di atasnya. Diantaranya adalah Rancangan Perda sebagai berikut :
  - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pengendalian Penyakit Menular
3. Beberapa Rancangan Perda penyampaiannya di akhir tahun 2023, sehingga sampai saat ini masih proses atau tahap pembahasan. Diantaranya adalah Rancangan Perda sebagai berikut :
  - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Bangunan Gedung
  - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak



**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada tahun 2023, tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD yang ditetapkan Kepala Daerah

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Pada tahun 2022, tidak terdapat rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD

**F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.184**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur di Sekretariat DPRD belum optimal dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengusulkan penambahan pegawai sesuai Anjab ABK.</li><li>- Mengirim ASN Potensial untuk mengikuti Diklat sesuai kebutuhan.</li><li>- Mengoptimalkan tenaga non ASN yang ada.</li></ul>
2	Evaluasi kelembagaan guna mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan tugas	Melakukan kajian terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dinamika organisasi yang berkembang saat ini.

## 8. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp35.979.314.126,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp34.951.313.792,- atau sebesar 97,14%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp35.979.314.126,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp34.951.313.792,- atau 97,14 %

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.185**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan		%	100	100	100
NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan	%	4	3,97	99,26
	Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	4	4	100

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	4	2,17	54,17
	Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	%	65	100	153,85
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	100	100	100
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa terbentuk	%	67	100	149,25
	Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar	%	12	12,9	107,47
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	%	100	100	100
	Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	%	80	100	125

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,01 %	Sangat Tinggi
2	75,01 % ≤ 90%	Tinggi
3	65,01 % ≤ 75 %	Sedang
4	50,01 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Kinerja kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 (Satu) indikator atau semua capaian indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk kategori “sangat tinggi”.
- Terdapat 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 8 (delapan) indikator, capaian kinerja “rendah” sebanyak 1 (satu) indikator
- Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik, hal ini dikarenakan banyaknya pemilih pemula di Kabupaten Klaten yaitu 30.000 orang sementara anggaran yang ada hanya dapat memberikan sosialisasi pendidikan politik. Untuk mengatasi masalah tersebut akan dilakukan kerja sama dengan instansi terkait ( KPU, BAWASLU) dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula.

Dalam pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.186**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan**  
**Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1	Penyempurnaan SIAP KOMANDAN	<p>Aplikasi SIAP KOMANDAN merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Pelaporan Konflik dan Kewaspadaan Dini Masyarakat. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri no 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 46 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri no 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mempermudah pembuatan laporan Konflik dan Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam upaya meningkatkan Kewaspadaan Dini di Daerah/Wilayah, menciptakan situasi yang aman, kondusif dan untuk mengantisipasi adanya gangguan serta ancaman terhadap Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya baik dari dalam maupun dari luar.</li> <li>2. Mempermudah tindak lanjut atas laporan dari daerah/wilayah melalui koordinasi dengan dinas/instansi terkait.</li> <li>3. Agar hasil/data pelaporan tersimpan dan dapat dimanfaatkan setiap saat tanpa harus khawatir hilang atau terhapus dari memori.</li> </ol>

**B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

**D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada Tahun 2023, tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan Kepala Daerah

**E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Tidak terdapat rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam LKPJ Tahun 2022

**F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.187**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan**  
**Bangsa dan Politik Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kasus Narkoba Di kabupaten Klaten, tertinggi se Jawa Tengah	Mengusulkan agar adanya PERDA tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika ( P4GN)
2	Klaten Masuk kategori besar dalam jumlah Eks Narapidana Teroris (se Solo Raya), dengan jumlah Eks Napiter 32 orang	Melakukan/melaksanakan pencegahan dini penanganan konflik sosial

## 9. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan

Pelaksana program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan pada tahun 2023 adalah Kecamatan dan Kelurahan.

### A. Capaian Kinerja Program

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp91.126.932.135,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp78.356.556.318,00 atau sebesar 85,99%. Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi Belanja Operasi sebesar Rp86.821.408.718,00 dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp74.187.541.483,00 atau 85,45% dan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp4.305.523.417,00 dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp4.169.014.835,00 atau 96,83%

Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

Indikator Kinerja dan capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan keberhasilan dari pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.188**  
**Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**  
**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi**  
**Pemerintahan Tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kecamatan	Indeks	80,99	88,11	108,79

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	95	97,56	102,7
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	%	96	98,02	102,1

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial di Kecamatan yang tertangani	%	96	95,71	99,7
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	97	98,48	101,5
	Persentase Desa tertib administrasi	%	95	97,49	102,6
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan Publik (PATEN)	%	100	99,25	99,25

Skala Nilai berdasarkan Peringkat Kinerja menurut Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$\geq 90,01 \%$	Sangat Tinggi
2	$75,01 \% \leq 90\%$	Tinggi
3	$65,01 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$50,01 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Sasaran kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 1 indikator
- Terdapat 6 Indikator Kinerja Program dengan Capaian Kinerja Program kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 6 indikator

Dalam pelaksanaan program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan, terdapat beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.189**  
**Inovasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**  
**Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan Tahun 2023**

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
1.	Cawas <i>Coaching Clinic</i>	Menyediakan tempat representatif dan membentuk Tim Petugas yang menerima keluhan dan konsultasi terkait pelayanan yang ada di Kecamatan Cawas. Serta menerima konsultasi dari Pemerintah Desa terkait Pengelolaan Keuangan Desa, dan lainnya.
2.	Halo Delanggu	Inovasi Penyajian informasi pelayanan dan media penyampaian aduan, pertanyaan, kritik dan saran yang dapat diakses melalui aplikasi Whatsapp.
3.	Seroja	Inovasi pelayanan publik untuk membantu masyarakat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan serta mendukung program pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan di Wilayah Kecamatan Delanggu.
4.	PojoK Konsultasi Kecamatan Karangdowo	Menyediakan tempat representatif dan membentuk Tim Petugas yang menerima keluhan dan konsultasi terkait pelayanan yang ada di Kecamatan Karangdowo.
5.	Matur Den Bei (Kecamatan Kebonarum)	Media konsultasi melalui website yang memfasilitasi pelayanan antar pejabat kecamatan kebonarum dan masyarakat. Mewujudkan adanya pelayanan yang efektif dan efisien.
6.	Pesan Singkat Masyarakat (PESAT)	Pesan singkat via whatsapp dari masyarakat terkait pertanyaan pelayanan yang diberikan Kecamatan Klaten Tengah
7.	Kegiatan Jumat Berkah (JUMANGKAH)	Kegiatan Jumat Berkah yang dimaksud berupa: makan gratis disediakan oleh Kantor Kecamatan Klaten tengah dengan memberdayakan potensi UMKM di wilayah Kecamatan Klaten Tengah. Bertempat di Halaman Kecamatan Klaten Tengah setiap hari Jumat diperuntukkan bagi seluruh Masyarakat. Kegiatan Jumat Berkah dimulai Pukul 07.30 WIB sampai dengan menu habis. Dokumentasi kegiatan berupa vidio pelaksanaan kegiatan Jumat Berkah;
8.	Subuh Keliling Berjamaah Kecamatan Klaten Tengah (SULING BERKAH)	Kegiatan Subuh Keliling Berjamaah Kecamatan Klaten Tengah (Suling Berkah) pada Kecamatan Klaten Tengah sebagai kegiatan rutin setiap bulan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
9.	Klinik Desa Ngawen Gumbregah	Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dan demi kelancaran pelaksanaan Kegiatan dan Administrasi Desa di Kecamatan Ngawen diperlukan Pembinaan dan Pengawasan untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dibentuklah Klinik Desa Ngawen Gumbregah. Tim Klinik Desa Ngawen Gumregah Terdiri dari Internal kecamatan, Pendamping Desa, TKSK, PKH, PLKB, Dinas Pertanian yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Ngawen Nomor 19 Tahun 2022



NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
10.	Palayanan Jemput Bola Khusus Disabilitas dan Lansia "JEMPOL DILAN"	Palayanan Jemput Bola Khusus Disabilitas dan Lansia "JEMPOL DILAN" adalah terobosan atau inovasi dari Kecamatan Ngawen di bidang pelayanan publik. Tujuan dari inovasi JEMPOL DILAN adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada Disabilitas dan Lansia. Selain itu inovasi ini juga bertujuan agar pemerintah dalam hal ini OPD Kecamatan Ngawen bisa mengetahui kondisi nyata dari warga masyarakatnya. Dalam proses pelaksanaannya inovasi ini dilaksanakan oleh Tim Khusus yang telah dibentuk oleh Camat Ngawen, Tim ini akan mengantarkan berkas pelayanan dari masyarakat yang masuk dalam Disabilitas dan Lansia sehingga mereka tidak perlu menunggu lama sampai proses dikatakan selesai. Selain mengantarkan berkas pelayanan yang sudah jadi, Tim ini juga akan mengadakan survey kondisi dari masyarakat yang menjadi target sasaran JEMPOL DILAN, apabila dirasa memerlukan bantuan maka Tim Khusus tersebut akan melaporkan kepada Sekretaris Kecamatan Ngawen (Selaku Ketua BAZNAS kecamatan Ngawen) dan Camat Ngawen untuk kemudian diteruskan kepada BAZNAS Kabupaten Klaten untuk diajukan agar mendapatkan bantuan.
11.	Ketahanan Pangan Kecamatan Tulung (KETANKALUNG)	Merupakan Inovasi Pemerintah Kecamatan Tulung yang telah berjalan sejak tahun 2021 berupa inovasi koordinasi dan pendampingan program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Dilatarbelakangi oleh permasalahan pemerintah saat ini yaitu kerawanan stunting dan kemiskinan ekstrim. Inovasi ini ditujukan agar kegiatan ketahanan pangan ditingkat desa se-kecamatan Tulung dapat terencana, terbiayai, terlaksana dan hasilnya dapat dirasakan untuk penanganan kerawanan stunting dan kemiskinan ekstrim di kecamatan Tulung
12.	Inovasi Ketapang Milenia ( Melon Sweet Net )	Inovasi Budidaya Melon dari Desa Bogem Kecamatan Bayat dengan menggunakan Greenhouse, dikarenakan kondisi geografis tanah di desa bogem tadah hujan maka timbul pemikiran untuk mengoptimalkan tanah yang semula tidak produktif menjadi produktif dengan Green house
13.	LATAR DINI (Layanan Terpadu Antar Dispensasi Nikah)	Merupakan bentuk dari inovasi pelayanan yang ada di Kecamatan Kalikotes diperuntukkan untuk pemohon layanan rekomendasi surat dispensasi nikah dengan mengirim surat yang sudah bertandatangan Camat melalui kantor pos.
14.	GERAK CEPAT PENANGANAN STUNTING KLATEN UTARA	GERCEP (GERAK CEPAT) PENANGANAN STUNTING Terkait program unggulan kabupaten Klaten kategori "Waras". Inovasi gerak cepat penanganan stunting ini melibatkan Tim Relawan di Tingkat Kecamatan, Desa, RW,RT dan Dasawisma. 1. Melakukan antisipasi dengan pendampingan calon pengantin dan ibu hamil; 2. Pendampingan anak stunting dalam tumbuh kembang; 3. Mendeteksi secara dini adanya laporan stunting dan melakukan penanganan stunting secara cepat dan tepat; serta Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan stunting
15.	Sistem Informasi Andalan Pelayanan Publik Kecamatan Pedan (SIAPP NDAN!)	Sistem Informasi Andalan Pelayanan Publik Kecamatan Pedan yang selanjutnya disebut SIAPP NDAN! adalah layanan informasi publik satu pintu secara daring melalui <i>whatsapp</i> dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel. Informasi yang ditampilkan merupakan informasi yang disediakan dan diperbaharui langsung oleh admin SIPP di lingkungan

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
		<p>Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar Pelayanan Publik di Kecamatan Pedan. Selain itu masyarakat juga dapat berkomunikasi secara langsung dengan admin SIPP Kecamatan Pedan secara dua arah.</p> <p>Pada tahun 2023 Inovasi Sistem Informasi Andalan Pelayanan Publik Kecamatan Pedan SIAPP NDAN! Meraih peringkat 1 Klaten Innovation Award kategori Inovasi Digital Kecamatan.</p>
16.	Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan Kecamatan Pedan  ( Pancanaka Kecamatan Pedan )	Pengelolaan sumber dana dari pengusaha, pelaku usaha dan masyarakat pedan dalam rangka tanggap terhadap masalah kemanusiaan dan bencana alam untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa kepedulian bersama terhadap lingkungan dan meringankan beban penderitaan keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh sewa ambulance gratis untuk masyarakat dibantu anggaran dari pelaku usaha di Kecamatan Pedan.
17.	Pak Dilan	Suatu inovasi dalam melayani kebutuhan Masyarakat khususnya Masyarakat Difabel dan Lansia. Pelayanan Publik Disabilitas dan Lansia atau disingkat Pak Dilan merupakan suatu inovasi di bidang pelayanan publik, dimana Petugas pelayanan dari kecamatan akan langsung mendatangi ke rumah (door to door) bagi yang memerlukan pelayanan, petugas akan mengambil berkas kemudian memprosesnya di kantor, jika hari itu bisa jadi maka petugas pelayanan akan menyerahkan kembali kepada yang bersangkutan ke rumahnya. Inovasi ini akan terus dikembangkan tentunya dengan beberapa evaluasi sehingga bisa memenuhi kepuasan Masyarakat difabel dan Lansia di kecamatan Ceper.
18.	Pangling Bejana	Serangkaian kegiatan penyampaian pesan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana alam di Kecamatan Gantiwarno. Penyuluhan tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan berbagai informasi serta mampu berperan dalam membangun kehidupannya. Penyuluhan sosial dilakukan agar setiap prosespenanggulangan bencana memiliki dampak sosial,ekonomi, dan lingkungan yang positif danberkelanjutan, baik terhadap masyara kat yang terkena bencana maupun terhadap pihak terkait lainnya
19.	WA kita (Kec. Jogonalan)	Platform yang bertujuan untuk mempercepat proses Pelayanan Kecamatan dan Platform cepat tanggap penerima aduan masyarakat guna pelayanan Publik yang lebih efisien, akuntabel dan transparant
20.	STUNTING TUNTAS	Pemerintah Kecamatan Juwiring mencetuskan inovasi STUNTING TUNTAS yang mengandung maksud bahwa Pemerintah Kecamatan juwiring berkomitmen untuk menekan angka stunting ke angka yang paling bawah sendiri yaitu 0% (nol persen) agar generasi di Kecamatan Juwiring menjadi Tangguh Unggul Nyata dengan Target yang dihasilkan Anak Sehat. Tujuan dari Inovasi ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan sinergitas semua elemen dan masyarakat di Kecamatan Juwiring untuk dapat bersama-sama mewujudkan Juwiring bebas stunting.</li> <li>2. Menurunkan angka prevelensi stunting di Kecamatan Juwiring.</li> </ol> meningkatkan persentase keikutsertaan ibu hamil di kelas ibu hamil melalui kehadiran ibu balita ke posyandu

NO	INOVASI TAHUN 2023	DESKRIPSI TENTANG INOVASI
21.	MATUR KEKAR (MATUR KECAMATAN KARANGANOM)	Penyediaan Nomor Kontak Khusus Kantor Kecamatan Karangnom sebagai wadah untuk warga Masyarakat yang ingin bertanya terkait permasalahan yang dihadapi seperti untuk system KTP, KK, dan lain sebagainya.
22.	CC CENTER ( Pusat Koordinasi dan Konsultasi Publik ) Kec. Karangnongko	Inovasi Pelayanan publik ini adalah suatu usaha Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut di pusatkan dalam satu layanan di CC Center untuk koodinasi dan konsultasi dan akan mendapatkan pelayanan sesuai yang dbutuhkan dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan.
23.	LAYADUMAS (Layanan Pengaduan Masyarakat)	Penanganan Aduan permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat Kecamatan Kemalang melalui hotline khusus dengan <i>WhatsApp</i>
24.	SELASA KELIMIIS (Selalu Setia Koordinasi Evaluasi Lengkap Intensif Mencari Ide Inspirasi dan Solusi)	Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Klaten Selatan, maka dibutuhkan media koordinasi yang efektif dan efisien untuk membahas secara intern dengan karyawan – karyawan Kecamatan Klaten Selatan dan stakeholders agar semua permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik dan dalam rangka mewujudkan tujuan diatas maka dibentuk Tim Pelaksana Inovasi SELASA KELIMIIS dengan Surat Keputusan Camat Klaten Selatan Nomor 043 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023. SELASA KELIMIIS dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi intern maupun lintas sektoral sesuai dengan kebutuhan dan pemecahan masalah yang ingin dicapai pada saat itu
25.	BERANTAS “ BERSAMA ALGAE TUNTAS STUNTING “	Melalui gerakan masyarakat sadar <i>stunting</i> untuk pencegahan dan pemberantasan <i>Stunting</i> . Untuk program Kecamatan Polanharjo dalam rangka percepatan penurunan <i>stunting</i> “BRANTAS” ( Bersama Alga Tuntaskan Stunting ) Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan <i>stunting</i> antara lain: Edukasi tentang pola makan yang seimbang dan asupan gizi yang cukup pada anak-anak dan ibu hamil serta upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang <i>stunting</i> dan dampak buruknya pada pertumbuhan dan perkembangan anak, Peningkatan akses pada: layanan kesehatan (termasuk pemeriksaan rutin dan imunisasi bagi anak-anak), air bersih, dan sanitasi yang memadai, serta ketersediaan dan akses pada bahan makanan yang kaya nutrisi, seperti sayuran dan buah-buahan, Edukasi terkait pemenuhan kebutuhan gizi sejak hamil, pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan dan informasi terkait MPASI yang sehat, Edukasi terkait pentingnya pemantauan perkembangan anak dan memeriksakan anak ke posyandu secara teratur, Edukasi terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
26.	RAPENTING (Gerakan Peduli Stunting)	Upaya yang dilakukan Kecamatan Prambanan dalam review posyandu dan <i>stunting</i> bagi kader dengan mengundang <i>Master of Training</i> (MOT) Kementerian Kesehatan RI. Memberikan motivasi di 16 desa dengan mengundang Dokter Spesialis Anak (DSA) untuk menganalisa hasil penapisan awal dari Puskesmas tentang <i>stunting</i> di anggaran perubahan desa untuk 16 desa semua diharuskan untuk menganggarkan.
27.	Rapedas (Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa)	Laporan penggunaan dana desa di Kecamatan Trucuk secara online untuk mempermudah pelaporan realisasi dana desa yang akan di gunakan sebagai data base monev tim kecamatan berbasis google spread sheet.

<b>NO</b>	<b>INOVASI TAHUN 2023</b>	<b>DESKRIPSI TENTANG INOVASI</b>
28.	Kecamatan Wedi Nyawiji Edi Peni	Tujuan utama dari program inovasi NYAWIJI EDI PENI ini adalah untuk mengatasi masalah utama yaitu keterbatasan yang dialami warga dalam mengurus dokumen kependudukan dan dokumen lainnya. Warga yang tidak dapat mengurus dokumen kependudukan pada hari dan jam kerja reguler tetap dapat terlayani dengan menggunakan whatshap atau media sosial lainnya pada sore hingga malam hari dan juga pada hari libur (Minggu). dengan diantar berkerjasama dengan GOJEK atau lewat kantor pos dengan biaya ditanggung Masyarakat.
29.	Si Centil's	Aplikasi Si Centil's (Sistem Informasi Cek Calon Pengantin Lawan Stunting) adalah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pendamping catin di Kecamatan Wedi dengan menghubungkan mitra TPK, Tenaga Kesehatan Puskesmas dan KUA. Pendampingan Catin di Kecamatan Wedi menjadi sebuah tugas nyata untuk mencegah stunting dari Hulu serta dalam pemutusan rantai stunting. Dengan adanya aplikasi Si Centil's ini dapat membantu pendampingan catin dan mempermudah menghubungkan mitra kerja terkait di kecamatan
30.	SIPROBANDES (Digitalisasi Proposal dan RKO Bantuan Keuangan Desa) Kecamatan Wonosari	SIPROBANDES adalah sebuah Inovasi Aplikasi yang mengubah penyimpanan Dokumen dari Hard copy menjadi penyimpanan dokumen secara soft copy yang bertujuan untuk digitalisasi dalam pengelolaan Dokumen Proposal dan RKO Bantuan Keuangan Desa. Dengan manfaat memudahkan dalam menemukan kembali dokumen yang dibutuhkan, menjamin Keamanan dokumen serta efisiensi anggaran

Pada tahun 2023 terdapat prestasi dalam pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.190**  
**Prestasi Pelaksanaan program**  
**urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi**  
**Pemerintahan Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	Pelayanan Publik Terbaik Kecamatan Nomor 16 Nasional	Kecamatan Klaten Utara	Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
2.	Desa Antikorupsi Tingkat Jawa Tengah TA 2023	Desa Kecamatan Karanganom Jeblog	Gubernur Jawa Tengah
3	Komitmen Pembentukan Desa Anti Korupsi Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Kepala Desa Kecamatan Karanganom Jeblog	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
4.	Juara I dalam Kegiatan lomba Komunitas Peduli Sungai KPS tingkat provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	KSP Sungai Poitan Desa Jagalan Kecamatan Karangnongko	Gubernur Jawa Tengah
5.	Juara III Lomba Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) Tingkat Propinsi Jawa Tengah Tahun 2023	TP PKK Desa Kanoman Kecamatan Karangnongko	TP PKK Propinsi Jawa Tengah
6.	Juara I Nasional Lomba Desa Pangan Aman yang digelar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI	Desa Randusari, Kecamatan Prambanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia
7.	Juara II Kategori Diseminasi Sadar Wisata Program Kampanye Sadar Wisata 5.0	Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

#### **B. Capaian Kinerja masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Capaian Kinerja masing-masing Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

#### **C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program**

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan dapat dilihat pada Buku Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023.

#### **D. Kebijakan Strategis yang ditetapkan**

Pada Tahun 2023, tidak terdapat Kebijakan Strategis Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan Kepala Daerah

#### **E. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Pada tahun 2022 Tidak terdapat rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan sehingga tidak terdapat Tindak Lanjut pada Tahun 2023

#### **F. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan beserta upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 3.191**  
**Permasalahan dan Upaya mengatasi permasalahan**  
**Pelaksanaan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Upaya Mengatasi Permasalahan</b>
1.	Belum Semua Kecamatan dapat melakukan perekaman KTP dikarenakan belum tersedianya alat rekam KTP di semua Kecamatan dan terjadi kerusakan Alat rekam KTP di beberapa Kecamatan	- Mengusulkan kepada Dinas Dukcapil untuk pergantian alat rekam KTP dan pengadaan alat Rekam KTP baru - Melakukan perekaman KTP di Kantor Dukcapil atau di Kecamatan lain terdekat yang sudah memiliki alat rekam KTP
2.	Masih ada Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tidak tepat waktu	Mengadakan pembinaan kepada Perangkat Desa agar membuat perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai jadwal yang ditentukan dan meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
3.	Penetapan pagu Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terlalu mepet di akhir Tahun Anggaran sehingga Pemerintah Desa tidak dapat menetapkan APBDes tepat waktu	Mengoptimalkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin dan mengacu pagu Tahun sebelumnya dalam APBDes
4.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa) di tingkat Kecamatan	Mengajukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa di Kecamatan

<b>No.</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Upaya Mengatasi Permasalahan</b>
5.	Belum optimalnya pemahaman dan penguasaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan terkait penggunaan Aplikasi baru dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan	Mengusulkan adanya Bimbingan Teknis dan pelatihan terkait penggunaan aplikasi baru kepada Perangkat Daerah terkait
6.	Pembangunan sarana dan prasarana umum di tingkat Kelurahan belum optimal dikarenakan keterbatasan anggaran	Mengusulkan alokasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana umum di tingkat Kelurahan melalui Forum Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan

## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa.

#### **4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan**

Urusan Pemerintahan yang diberi Tugas Pembantuan pada Tahun 2023 adalah Urusan pertanian. Tugas Pembantuan tersebut diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten

##### **4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya**

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada kementerian/lembaga/Pemerintah Provinsi yang memberikan penugasan. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten. Program dan Kegiatan dalam Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp202.474.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp201.250.200,00 atau sebesar 98,96%. Adapun rincian pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut adalah sebagai berikut :

##### **A. Bidang Sarana dan Prasarana pertanian**

- a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan



Alat Mesin Pertanian, Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, dan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian. Adapun alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp110.719.000,00 dan terealisasi sebesar Rp110.617.800,00 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,91%.

- b) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Adapun alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp56.175.000,00 dan terealisasi sebesar Rp56.132.400,00 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,92%.

#### B. Bidang Tanaman Pangan

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari Kegiatan Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan dan Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan. Adapun alokasi anggaran Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp35.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.500.000,00 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 96,96%.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas pembantuan Provinsi yang diterima Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten selama tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi**  
**yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023**

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran.	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/4 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Pada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023	<p><b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b></p> <p><i>1. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian</i></p>	Klaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<p><b>Terlaksananya operasional kegiatan</b></p> <p><i>Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian</i></p>	<p><b>110.719.000</b></p> <p><i>15.000.000</i></p>	<p><b>110.617.800</b></p> <p><i>14.959.800</i></p>	<p><b>99,91%</b></p> <p><i>99,73%</i></p>	<p><b>Terlaksananya operasioanal kegiatan</b></p> <p><i>Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian</i></p>	<p><b>100</b></p> <p><i>100</i></p>	

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran.	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			a. Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian									
			2. Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			Bimtek lingkup pupuk dan pestisida, data penerima pupuk bersubsidi, verval penyaluran pupuk bersubsidi	79.671.000	79.671.000	100%	Terlaksananya bimtek lingkup pupuk dan pestisida, data penerima pupuk bersubsidi, verval penyaluran pupuk bersubsidi	100	
			a. Persiapan, pelaksanaan bimbingan teknis lingkup pupuk dan pestisida (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KP3)				17.700.000	17.700.000	100	Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida di Kabupaten Klaten	100	

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran.	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			b. Penetapan penerima pupuk bersubsidi (e-RDKK)				5.200.000	5.200.000	100	Tersedianya data penerima pupuk bersubsidi TA 2024	100	
			c. Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi (Verval)				56.771.000	56.771.000	100	Terlaksananya verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi	100	
			3. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian			Fasilitasi pembiayaan pertanian	16.048.000	15.987.000	99,62%	Terlaksananya kegiatan asuransi pertanian	100	
			a. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Pertanian									

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran.	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>Terlaksananya dukungan manajemen</b>	<b>56.175.000</b>	<b>56.132.400</b>	<b>99,92%</b>	<b>Terlaksananya dukungan manajemen</b>	<b>100</b>	
			<i>1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian</i>			<i>Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian</i>	<i>56.175.000</i>	<i>56.132.400</i>	<i>99,92%</i>	<i>Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian</i>	<i>100</i>	
			a. Layanan Manajemen Keuangan									

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran.	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Bidang Tanaman Pangan	Peraturan Gubernur No 911/4 Tahun 2023b Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian pada provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	Klaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<b>Terlaksananya Bantuan Benih Padi, jagung, Kedelai dan Saprodi</b>	<b>35.580.000</b>	<b>34.500.000</b>	<b>96,96</b>	<b>Terlaksananya Bantuan Benih Padi, jagung dan Kedelai</b>	<b>100</b>	
			<i>1. Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan</i>			<i>Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Monev Bantuan Benih Kedelai dan Saprodi seluas 1.755 HA</i>	<i>12.600.000</i>	<i>12.600.000</i>	<i>100</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Monev Bantuan Benih Kedelai dan Saprodi seluas 1.755 HA</i>	<i>100</i>	
			Sub kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi									
			Keluaran (output) Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Monev									

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran.	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Rincian kegiatan/Sub Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan dan Monev Kegiatan Akabi Kabupaten									
			2. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan			Koordinasi, Monev dan Pelaporan kegiatan Padi OPIP/IP 400 seluas 3000 ha	22.980.000	21.900.000	95,30	Terlaksananya Koordinasi, Monev dan Pelaporan kegiatan Padi OPIP/IP 400 seluas 3000 ha	100	
			Sub kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi									
			Keluaran (output) Terlaksananya Koordinasi, Monev dan Pelaporan									

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/ kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran.	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Rincian kegiatan/Sub Kegiatan Sosialisasi dan Identifikasi CPCL Bantuan Benih Padi Kabupaten									
<b>TOTAL ANGGARAN</b>							<b>202.474.000</b>	<b>201.250.200</b>	<b>98,96</b>			

*Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2023*



#### **4.2 Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.**

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ditemukan hambatan/permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan.

## BAB V

### PENUTUP

Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua *stakeholders* pembangunan mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing, yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil-hasil pencapaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2023 diarahkan untuk ***“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkelanjutan”***. Penekanan “Pertumbuhan Ekonomi” mengandung makna bahwa kemampuan daerah dalam mengembalikan dan memulihkan pertumbuhan ekonomi daerah akibat Pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diarahkan melalui penguatan sumber daya manusia dan sarana prasarana wilayah di semua sektor. Sedangkan makna “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah” diarahkan untuk pengembangan/optimalisasi sektor/produk unggulan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pencapaian kinerja makro pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik. Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 menunjukkan penurunan jika dibandingkan Tahun 2022. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 144.870 jiwa turun menjadi 144.430 jiwa pada tahun 2023. Demikian pula dengan Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 12,33% turun menjadi sebesar 12,28% pada tahun 2023. Penurunan Jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja positif Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 juga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2022 sebesar 4,31% turun menjadi sebesar 4,20% pada tahun 2023

Kualitas Pembangunan manusia di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten. Berdasarkan data dari BPS

Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Klaten pada tahun 2023 mencapai 77,59 meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang besarnya 76,95. Capaian IPM di Kabupaten Klaten yang sebesar 76,95 di atas IPM Jawa Tengah yang sebesar 73,39 dan IPM nasional yang sebesar 74,39. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2023 beberapa komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan jika dibandingkan Tahun 2022. Usia Harapan Hidup mengalami peningkatan dari 76,95 tahun pada tahun 2022 menjadi 77,07 tahun pada tahun 2023. Angka Harapan Lama Sekolah meningkat dari 13,40 tahun pada tahun 2022 menjadi 13,41 tahun pada tahun 2023. Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 9,09 tahun pada tahun 2022 menjadi 9,27 tahun pada tahun 2023. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Klaten per tahun mengalami kenaikan dari Rp12.522.000,- pada tahun 2022 menjadi Rp12.968.000,- pada tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,7%. Capaian tersebut merupakan suatu capaian yang membanggakan dikarenakan pada tahun 2023 Capaian Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten yang sebesar 5,7% di atas Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 4,98% dan Pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05%.

Capaian kinerja pembangunan daerah yang sudah dijalankan diharapkan dapat menjadi sebuah prestasi sekaligus catatan kritis untuk merefleksikan pelaksanaan pembangunan daerah yang terus dituntut untuk senantiasa lebih baik, bermanfaat, inovatif, dan memiliki tingkat keberlanjutan serta berkualitas. Capaian Kinerja Tahun 2023 ini menjadi evaluasi penting terhadap pelaksanaan tahun-tahun selanjutnya agar pencapaian sasaran daerah menjadi lebih optimal.

Sebagai bagian akhir penyampaian LKPJ ini, ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten sebagai mitra yang selama ini telah menjalin sinergitas hubungan yang harmonis serta memberikan motivasi, kritik yang konstruktif kepada kami dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada segenap stakeholder maupun masyarakat Kabupaten Klaten atas partisipasi, dukungan, masukan, saran yang diberikan untuk ikut serta bersama-sama dalam Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023 yang dapat kami sampaikan, dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

Klaten, 13 Maret 2024

**BUPATI KLATEN**  
  
**Hj. SRI MULYANI, S.M., M.Si**



# LAMPIRAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KLATEN TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

**DAFTAR ISI**  
**LAMPIRAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KLATEN**  
**TAHUN 2023**

	<b>Halaman</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	i
<b>Lampiran Pelaksanaan Program Dan Kegiatan</b>	
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
1. Urusan Pendidikan .....	1
2. Urusan Kesehatan .....	23
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	49
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	67
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	83
6. Urusan Sosial .....	102
<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>	
7. Urusan Tenaga Kerja .....	113
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	118
9. Urusan Pangan.....	125
10. Urusan Lingkungan Hidup .....	132
11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil . .....	145
12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	154
13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	161
14. Urusan perhubungan.....	169
15. Urusan Komunikasi dan Informatika .....	177
16. Urusan Koperasi dan UKM .....	185
17. Urusan Penanaman Modal .....	191

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....	198
19. Urusan Statistik .....	203
20. Urusan Persandian .....	204
21. Urusan Kebudayaan.....	205
22. Urusan Perpustakaan .....	210
23. Urusan Kearsipan.....	212
24. Urusan Pertanahan.....	219
<b>Urusan Pilihan</b>	
25. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	221
26. Urusan Pariwisata.....	224
27. Urusan Pertanian .....	228
28. Urusan Perdagangan.....	232
29. Urusan Perindustrian .....	235
30. Urusan Transmigrasi.....	240
<b>Urusan Fungsi Penunjang</b>	
31. Pengawasan.....	241
32. Perencanaan .....	250
33. Keuangan .....	261
34. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .....	271
35. Penelitian dan Pengembangan .....	276
36. Sekretariat DPRD.....	278
37. Kesatuan Bangsa dan Politik .....	284
38. Sekretariat Daerah.....	291
39. Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan .....	317
<b>Lampiran Tingkat Kesesuaian Indikator Kegiatan Terhadap Indikator Program.....</b>	<b>470</b>

**URUSAN : PENDIDIKAN  
DINAS PENDIDIKAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>674.524.112.491</b>	<b>599.368.526.580</b>	<b>89</b>			
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>246.179.000</b>	<b>166.185.250</b>	<b>68</b>			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	4	Dokumen	100	32.000.000	10.792.500	34	100		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	100	37.800.000	22.892.650	61	100		
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	100	27.000.000	11.881.800	44	100		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	4	Dokumen	100	42.000.000	24.751.300	59	100		
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	100	107.379.000	95.867.000	89	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	100	%	100	%	100	671.222.464.491	596.433.158.948	89			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6000	Orang	6000	Orang	100	671.167.464.491	596.387.954.398	89	100		
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	Dokumen	4	Dokumen	100	55.000.000	45.204.550	82	100		
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi</b>	100	%	100	%	100	411.000.000	377.320.515	92			
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Dokumen	4	Dokumen	100	411.000.000	377.320.515	92	100		
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu</b>	100	%	100	%	100	70.250.000	58.748.700	84			
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5800	Dokumen	5800	Dokumen	100	70.250.000	58.748.700	84	100		
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	100	%	100	%	100	860.007.000	760.247.818	88			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	Unit	11	Unit	100	19.921.000	19.604.500	98	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Unit	5	Unit	100	320.686.000	311.999.250	97	100		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Eksemplar	4	Eksemplar	100	18.000.000	17.949.200	100	100		
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Kali	12	Kali	100	54.000.000	53.994.900	100	100		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Kali	300	Kali	100	248.000.000	189.136.568	76	100		
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Unit	2	Unit	100	199.400.000	167.563.400	84	100		
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>389.291.000</b>	<b>361.444.000</b>	<b>93</b>			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	2	Unit	100	389.291.000	361.444.000	93	100		
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.056.106.000</b>	<b>943.125.756</b>	<b>89</b>	<b>100</b>		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	<b>12</b>	<b>%</b>	<b>12</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	249.000.000	146.510.817	59	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	12	Bulan	100	807.106.000	796.614.939	99	100		
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase arana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>268.815.000</b>	<b>268.295.593</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	225	Unit	225	Unit	100	249.000.000	248.645.593	100	100		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100	19.815.000	19.650.000	99	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	88,95	%	91,90	%	103,32	73.929.867.191	68.675.836.011	93			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	71,6	%	74,40	%	103,91						
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	89,15	%	92,14	%	103,35						
		Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,75	%	99,68	%	99,93						
		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	99,12	%	91,81	%	92,63						
		Persentase SD berakreditasi minimal B	98	%	97,31	%	99,30						
		Persentase SMP berakreditasi minimal B	86,9	%	85,47	%	98,35						
		Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	53,5	%	56,31	%	105,25						
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	96,9	%	98,43	%	101,58						
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B	98,45	%	98,35	%	99,90						
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	10,8	%	10,91	%	101,02						
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik	73	%	67,10	%	91,92	24.293.606.191	22.338.627.247	92			
		Persentase siswa SD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	63,6	%	57,11	%	89,80						
		Persentase SD terakreditasi	99,8	%	98,73	%	98,93						
		Persentase guru SD bersertifikat pendidik	42	%	33,12	%	78,86						

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5	Ruang	5	Ruang	100	1.419.230.000	1.232.462.492	87	100		
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8	Ruang	8	Ruang	100	742.339.750	715.113.290	96	100		
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	Unit	1	Unit	100	228.739.150	225.697.500	99	100		
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7	Unit	7	Unit	100	1.035.732.700	1.015.054.172	98	100		
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	64	Ruang	62	Ruang	97	5.932.000.000	5.517.918.593	93	100		
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Paket	2	Paket	100	88.000.000	83.759.800	95	100		
7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	46	Siswa	46	Siswa	100	1.650.000.000	1.574.980.250	95	100		
8	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4000	Siswa	4000	Siswa	100	900.000.000	878.732.000	98	100		
9	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	56945	Paket	56945	Paket	100	98.200.000	77.767.000	79	100		
10	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	25	Siswa	25	Siswa	100	4.094.635.591	3.686.169.350	90	100		
11	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	738	Pendidik	738	Pendidik	100	169.000.000	127.232.800	75	100		
12	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	738	Jenis	738	Jenis	100	166.500.000	148.489.900	89	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1200	Jenis	1200	Jenis	100	997.700.000	744.040.000	75	100		
14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300	Sekolah	300	Sekolah	100	3.493.800.000	3.216.469.000	92	100		
15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	738	Orang	738	Orang	100	590.000.000	501.699.900	85	100		
16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	738	Orang	738	Orang	100	855.000.000	804.266.300	94	100		
17	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	7	Ruang	7	Ruang	100	1.832.729.000	1.788.774.900	98	100		
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik</b>	<b>82,7</b>	<b>%</b>	<b>82,7</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>26.464.836.000</b>	<b>25.011.010.714</b>	<b>95</b>			
		<b>Persentase siswa SMP yang menerima pembebasan biaya pendidikan</b>	<b>60,5</b>	<b>%</b>	<b>60,42</b>	<b>%</b>	<b>99,87</b>						
		<b>Persentase SMP terakreditasi</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>94,87</b>	<b>%</b>	<b>97,80</b>						
		<b>Persentase guru SMP bersertifikat pendidik</b>	<b>55,3</b>	<b>%</b>	<b>46,25</b>	<b>%</b>	<b>83,63</b>						

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	Ruang	1	Ruang	100	250.000.000	244.285.440	98	100		
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	Ruang	2	Ruang	100	954.938.000	742.314.420	78	100		
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4	Ruang	4	Ruang	100	889.112.000	856.512.700	96	100		
4	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3	Ruang	3	Ruang	100	1.563.381.000	1.455.054.850	93	100		
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13	Unit	13	Unit	100	7.135.595.000	6.731.878.050	94	100		
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	84	Ruang	84	Ruang	100	7.136.980.000	6.921.484.732	97	100		
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	1	Ruang	100	125.000.000	122.888.622	98	100		
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	1	Ruang	100	90.015.000	87.598.700	97	100		
9	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	12	Paket	12	Paket	100	397.968.000	396.741.300	100	100		
10	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	5330	Paket	5330	Paket	100	1.671.157.000	1.648.003.150	99	100		
11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	27098	Peserta Didik	27098	Peserta Didik	100	146.635.000	64.906.300	44	100		
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	65	Paket	65	Paket	100	1.960.000.000	1.938.970.900	99	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	15534	Peserta Didik	15534	Peserta Didik	100	156.392.000	151.206.000	97	100		
14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	116	Satuan Pendidikan	116	Satuan Pendidikan	100	218.595.000	191.083.400	87	100		
15	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300	Peserta Didik	300	Peserta Didik	100	819.557.000	713.464.000	87	100		
16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	454	Orang	454	Orang	100	970.000.000	829.021.050	85	100		
17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	65	Satuan Pendidikan	65	Satuan Pendidikan	100	1.741.000.000	1.687.535.600	97	100		
18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	116	Orang	116	Orang	100	238.511.000	228.061.500	96	100		
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik</b>	<b>72</b>	<b>%</b>	<b>68,69</b>	<b>%</b>	<b>95,40</b>	<b>21.398.525.000</b>	<b>19.589.596.600</b>	<b>92</b>			
		<b>Persentase siswa PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan</b>	<b>1,3</b>	<b>%</b>	<b>1,23</b>	<b>%</b>	<b>94,62</b>						
		<b>Persentase PAUD Terakreditasi</b>	<b>44,5</b>	<b>%</b>	<b>61,67</b>	<b>%</b>	<b>138,58</b>						
		<b>Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik</b>	<b>55,4</b>	<b>%</b>	<b>53,52</b>	<b>%</b>	<b>97</b>						



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1	Unit	1	Unit	100	182.599.000	175.578.600	96	100		
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1	Unit	1	Unit	100	118.314.000	114.678.500	97	100		
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	1	Unit	100	99.655.000	97.746.900	98	100		
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	1	Unit	100	99.755.000	97.243.900	97	100		
5	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1	Paket	1	Paket	100	49.455.000	45.907.800	93	100		
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	26	Paket	26	Paket	100	325.000.000	320.235.800	99	100		
7	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1180	Peserta Didik	1180	Peserta Didik	100	172.729.000	122.532.900	71	100		
8	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	300	Satuan Pendidikan	300	Satuan Pendidikan	100	74.000.000	59.666.400	81	100		
9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450	Orang	450	Orang	100	769.952.000	489.199.200	64	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200	Satuan Pendidikan	200	Satuan Pendidikan	100	278.000.000	211.920.900	76	100		
11	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1150	Satuan Pendidikan	1150	Satuan Pendidikan	100	19.111.200.000	17.744.112.000	93	100		
12	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1150	Orang	1150	Orang	100	117.866.000	110.773.700	94	100		
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana PKBM dalam kondisi baik</b>	<b>48</b>	<b>%</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>104</b>	<b>1.772.900.000</b>	<b>1.736.601.450</b>	<b>98</b>			
		<b>Persentase Siswa PKBM yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan</b>	<b>76,5</b>	<b>%</b>	<b>88,92</b>	<b>%</b>	<b>116</b>						
		<b>Persentase PKBM Terakreditasi</b>	<b>16</b>	<b>%</b>	<b>30,77</b>	<b>%</b>	<b>192</b>						
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	1	Unit	100	99.700.000	97.609.800	98	100		
2	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1	Paket	1	Paket	100	49.900.000	48.554.400	97	100		
3	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	600	Peserta Didik	600	Peserta Didik	100	50.000.000	49.465.650	99	100		
4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	200	Satuan Pendidikan	200	Satuan Pendidikan	100	45.000.000	32.895.500	73	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18	Satuan Pendidikan	18	Satuan Pendidikan	100	86.000.000	67.762.300	79	100		
6	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	9	Satuan Pendidikan	9	Satuan Pendidikan	100	1.442.300.000	1.440.313.800	100	100		
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.074.464.000</b>	<b>3.488.374.300</b>	<b>86</b>			
		<b>Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>						
		<b>Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>						
<b>1</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal</b>	<b>99</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>101</b>	<b>3.820.464.000</b>	<b>3.268.402.300</b>	<b>86</b>			
1	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	11378	Buku	11378	Buku	100	2.191.820.000	1.728.840.500	79	100		
2	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	1500	Orang	1500	Orang	100	1.628.644.000	1.539.561.800				

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	<b>Persentase lembaga PAUD dan PNF menerapkan kurikulum muatan lokal</b>	<b>98,5</b>	<b>%</b>	<b>99,60</b>	<b>%</b>	<b>101</b>	<b>254.000.000</b>	<b>219.972.000</b>	<b>87</b>			
1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2	Dokumen	2	Dokumen	100	154.000.000	125.851.500	82	100		
2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	100	Dokumen	100	Dokumen	100	100.000.000	94.120.500	94	100		
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Rasio Guru/ Murid SD/ MI</b>	<b>1 : 15</b>	<b>Rasio</b>	<b>1 : 14</b>	<b>Rasio</b>	<b>98,67</b>	<b>24.523.965.000</b>	<b>19.584.315.500</b>	<b>80</b>			
		<b>Rasio Guru/ Murid SMP/ MTs</b>	<b>1 : 16</b>	<b>Rasio</b>	<b>1 : 17</b>	<b>Rasio</b>	<b>101,32</b>						
		<b>Rasio Guru/ Murid PAUD</b>	<b>1 : 10</b>	<b>Rasio</b>	<b>1 : 13</b>	<b>Rasio</b>	<b>104,29</b>						
1	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase guru pada satuan pendidikan dasar dengan beban mengajar sama dengan atau lebih dari 24 jam</b>	<b>88</b>	<b>%</b>	<b>84,31</b>	<b>%</b>	<b>95,81</b>	<b>24.523.965.000</b>	<b>19.584.315.500</b>	<b>80</b>			
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4	Dokumen	4	Dokumen	100	24.523.965.000	19.584.315.500	80	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>	Persentase bahasa dan sastra daerah yang dibina dan dikembangkan	100	%	100	%	100	85.000.000	81.974.650	96			
1	<b>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase satuan pendidikan formal dan non formal yang menerapkan pendidikan bahasa dan sastra Jawa	97,25	%	97,24	%	100	85.000.000	81.974.650	96			
1	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1	Bahasa	1	Bahasa	100	40.000.000	38.029.650	95	100		
2	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	70	Peserta Didik	70	Peserta Didik	100	45.000.000	43.945.000	98	100		
	<b>JUMLAH</b>							<b>777.137.408.682</b>	<b>691.199.027.041</b>	<b>89</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>SUB UNIT : TK NEGERI</b>													
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>44.949.000</b>	<b>35.908.344</b>	<b>80</b>			
<b>1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13.949.000</b>	<b>7.560.800</b>	<b>54</b>			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	Paket	11	Unit	100	2.000.000	1.993.500	100	100		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	15	Unit	300	7.000.000	3.859.900	55	100		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	4	Eksemplar	100	4.949.000	1.707.400	34	100		
<b>2</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>31.000.000</b>	<b>28.347.544</b>	<b>91</b>			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	8.000.000	5.895.544	74	100		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	23.000.000	22.452.000	98	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>APK PAUD</b>	<b>89,15</b>	%	<b>92,14</b>	%	<b>103,36</b>	<b>58.800.000</b>	<b>58.799.760</b>	<b>100</b>			
		<b>Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B</b>	<b>36,95</b>	%	<b>37,65</b>	%	<b>101,90</b>						
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<b>Persentase PAUD terakreditasi</b>	<b>1,3</b>	%	<b>1,3</b>	%	<b>100</b>	58.800.000	58.799.760	100	100		
		<b>Persentase siswa PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan</b>	<b>42,32</b>	%	<b>44,49</b>	%	<b>105,13</b>						
1	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1	Satuan Pendidikan	1	Satuan Pendidikan	100	58.800.000	58.799.760	100	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>103.749.000</b>	<b>94.708.104</b>	<b>91</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>SUB UNIT : SEKOLAH DASAR (SD)</b>													
No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Persentase SD berakreditasi minimal B  Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	88,95 98,00  96,9	% %  %	91,90 97,31  98,43	% %  %	103,32 99,30  101,58	80.142.451.810	78.375.495.043	97,80			
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase siswa SD yang menerima pembebasan biaya pendidikan  Persentase SD terakreditasi	63,6  99,8	%  %	63,22  98,79	%  %	99,40  98,99	80.142.451.810	78.375.495.043	97,80			
1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	734	Satuan Pendidikan	734	Satuan Pendidikan	100	80.142.451.810	78.375.495.043	97,80	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>80.142.451.810</b>	<b>78.375.495.043</b>	<b>97,80</b>	<b>100</b>		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>SUB UNIT : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)</b>													
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	71,6	%	74,40	%	103,91	55.320.591.594	54.521.154.103	98,55			
		Persentase SMP berakreditasi minimal B	86,9	%	85,47	%	98,35						
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B	98,45	%	98,35	%	99,90						
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya biaya operasional pendidikan SMP	100	%	100,00	%	100,00	55.320.591.594	54.521.154.103	98,55			
1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	116	Satuan Pendidikan	116	Satuan Pendidikan	100	55.320.591.594	54.521.154.103	98,55	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>55.320.591.594</b>	<b>54.521.154.103</b>	<b>98,55</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

SUB UNIT : SKB CAWAS

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>254.229.000</b>	<b>248.813.000</b>	<b>97,87</b>			
1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>21.931.000</b>	<b>21.721.500</b>	<b>99,04</b>			
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	15	Jenis	15	Jenis	100	6.800.000	6.695.500	98,46	100		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	6	Jenis	6	Jenis	100	7.315.000	7.211.000	98,58	100		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	30	Eks	30	Eks	100	2.000.000	2.000.000	100,00	100		
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	6	Kali	6	Kali	100	5.396.000	5.395.000	99,98	100		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2	Kali	2	Kali	100	420.000	420.000	100,00	100		
2	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>28.200.000</b>	<b>27.300.000</b>	<b>96,81</b>			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1	Unit	1	Unit	100	28.200.000	27.300.000	96,81	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>132.198.000</b>	<b>130.501.900</b>	<b>98,72</b>			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12	Bulan	12	Bulan	100	26.544.000	25.288.860	95,27	100		
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16	Unit	16	Unit	100	15.000.000	14.560.000	97,07	100		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5	Orang	5	Orang	100	90.654.000	90.653.040	100,00	100		
4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>71.900.000</b>	<b>69.289.600</b>	<b>96,37</b>			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	1	Unit	1	Unit	100	3.950.000	3.899.000	98,71	100		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	2	Unit	2	Unit	100	65.460.000	62.900.600	96,09	100		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	5	Unit	5	Unit	100	2.490.000	2.490.000	100,00	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	88,95	%	91,90	%	103,32	862.821.000	809.187.500	93,78			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	71,6	%	74,40	%	103,91						
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	89,15	%	92,14	%	103,35						
		Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,75	%	99,68	%	99,93						
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	96,9	%	98,43	%	101,58						
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B	98,45	%	98,35	%	99,90						
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	10,8	%	10,91	%	101,02						
1	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Persentase siswa PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>23.400.000</b>	<b>23.400.000</b>	<b>100</b>			
1	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik mengikuti pembelajaran PAUD	24	Orang	24	24 Orang	100	15.000.000	15.000.000	100	100		
2	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1	Satuan Pendidikan	1	Satuan Pendidikan	100	8.400.000	8.400.000	100	100		
2	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase siswa kesetaraan/ nonformal yang menerima pembebasan biaya kependidikan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>839.421.000</b>	<b>785.787.500</b>	<b>93,61</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3	Unit	3	Unit	100	445.000.000	436.623.500	98,12	100		
2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik mengikuti pendidikan nonformal/kesetaraan	314	Orang	314	Orang	100	60.421.000	60.164.000	99,57	100		
3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1	Satuan Pendidikan	1	Satuan Pendidikan	100	334.000.000	289.000.000	86,53	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>1.117.050.000</b>	<b>1.058.000.500</b>	<b>94,71</b>	<b>100</b>		

**URUSAN : KESEHATAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>DINAS KESEHATAN</b>													
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>140.373.451.320</b>	<b>126.035.699.316</b>	<b>89,79</b>	<b>98,63</b>		
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>338.607.916</b>	<b>331.265.754</b>	<b>97,83</b>	<b>100,00</b>		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2	Dokumen	2	Dokumen	100	58.350.000	58.074.000	<b>99,53</b>	100,00		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	100	136.840.000	136.532.254	<b>99,78</b>	100,00		
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	100	30.000.000	29.360.000	<b>97,87</b>	100,00		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100	15.000.000	14.897.000	<b>99,31</b>	100,00		
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41	Laporan	41	Laporan	100	98.417.916	92.402.500	<b>93,89</b>	100,00		
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>132.319.876.433</b>	<b>118.746.406.871</b>	<b>89,74</b>	<b>100,00</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.371	orang / Bulan	1.332	orang / Bulan	97,16	131.733.579.233	118.174.500.823	<b>89,71</b>	100,00	adanya pegawai yang mutasi dan pensiun	tahun berikutnya, melakukan penghitungan yang mendekati kebutuhan sehingga silpa tidak terlalu banyak
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	Dokumen	100	24.000.000	23.850.000	<b>99,38</b>	100,00		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	125	Dokumen	213	Dokumen	170,4	481.041.200	467.218.848	<b>97,13</b>	100,00		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100	81.256.000	80.837.200	<b>99,48</b>	100,00		
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>244.642.000</b>	<b>210.047.800</b>	<b>85,86</b>	<b>100,00</b>		
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	unit	2	unit	100	244.642.000	210.047.800	<b>85,86</b>	100,00		
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>603.434.000</b>	<b>589.126.918</b>	<b>97,63</b>	<b>100,00</b>		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	paket	10	paket	100	22.528.000	22.521.750	<b>99,97</b>	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	paket	15	paket	100	52.014.000	50.524.000	<b>97,14</b>	100,00		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	130.000	paket	130.000	paket	100	45.000.000	38.425.000	<b>85,39</b>	100,00		
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	82	Laporan	82	Laporan	100	80.450.000	74.810.000	<b>92,99</b>	100,00		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110	Laporan	110	Laporan	100	403.442.000	402.846.168	<b>99,85</b>	100,00		
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.632.075.800</b>	<b>1.566.424.738</b>	<b>95,98</b>	<b>100,00</b>		
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	55	unit	51	unit	92,73	183.999.800	180.663.900	<b>98,19</b>	100,00		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	unit	20	unit	100	713.576.000	655.473.938	<b>91,86</b>	100,00		
3	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	57	unit	57	unit	100	734.500.000	730.286.900	<b>99,43</b>	100,00		
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.608.435.171</b>	<b>3.525.164.622</b>	<b>97,69</b>	<b>100,00</b>		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000	Laporan	8.500	Laporan	141,67	12.660.000	4.625.000	<b>36,53</b>	100,00	karena sudah menggunakan srikandi sehingga kebutuhan surat menyurat manual berkurang	menyesuaikan anggaran di tahun berikutnya



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	36	Laporan	100	380.000.000	375.549.794	<b>98,83</b>	100,00		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	3.215.775.171	3.144.989.828	<b>97,80</b>	100,00		
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.268.780.000</b>	<b>727.182.613</b>	<b>57,31</b>	<b>89,00</b>		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan DinasJabatan yangDipelihara dandibayarkan Pajaknya	52	unit	52	unit	100	234.155.000	216.142.528	<b>92,31</b>	100,00		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KendaraanDinas Operasionalatau Lapangan yangDipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya	52	unit	52	unit	100	143.890.000	142.901.601	<b>99,31</b>	100,00		
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18	unit	1	unit	5,56	15.000.000	14.960.000	<b>99,73</b>	100,00		
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	unit	24	unit	100	55.650.000	55.650.000	<b>100,00</b>	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	2	unit	66,67	820.085.000	297.528.484	<b>36,28</b>	45,00	Kesalahan input RKA perubahan di SIPD sehingga pengadaannya harus tender. Karena pertimbangan waktu di anggaran perubahan, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan tender.	tdak jadi dilaksanakan di 2023 dan akan direncanakan lagi di tahun 2024.
<b>8</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase layanan BLUD sesuai SOP</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100	<b>357.600.000</b>	<b>340.080.000</b>	<b>95,10</b>	<b>100,00</b>		
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	umlah kegiatan pembinaan BLUD Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSD Bagas Waras	35	unit kerja	35	unit kerja	100	357.600.000	340.080.000	<b>95,10</b>	100,00		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	100	%	100,00	%	100	<b>109.404.387.647</b>	<b>100.251.554.971</b>	<b>91,63</b>	99,94		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%	100,00	%	100						
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%	100,00	%	100						
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%	100,00	%	100						
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	100,00	%	100						

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	100,00	%	100						
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	100,00	%	100						
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	100,00	%	100						
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	100,00	%	100						
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	100,00	%	100						
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	100,00	%	100						
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	100,00	%	100						
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	11	%	13,92	%	73,48						
		Cakupan STBM	100	%	100,00	%	100						
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	%	100,00	%	100						

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	%	100,00	%	100						
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	25	%	61,39	%	245,552383						
		Penderita diare yang ditangani	7	%	5,93	%	84,66						
		Angka Kejadian HIV	0,11	/1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,11	/1000 penduduk yang tidak terinfeksi	99,07						
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	100 /100.000 penduduk	/100.000 penduduk	137,17	/100.000 penduduk	137,17						
		Angka kejadian Malaria	< 6 / 100.000	/100.000	0,87	/100.000	185,46						
		Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	10	%	100,00	%	1000						
		Angka Kejadian DBD	46	/100.000	24,42	/100.000	146,91						
		Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)	95	%	98,67	%	103,87						
		Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya	100	%	100,00	%	100						
		Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	100	%	100,00	%	100						
		Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin	80	%	91,18	%	113,97						
		Persentase pelayanan lab klinis dan lab air	100	%	100,00	%	100						
		Persentase Sistem Informasi Kesehatan	70	%	100,00	%	142,86						

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	100	<b>37.300.684.197</b>	<b>32.240.906.973</b>	<b>86,44</b>	<b>99,75</b>		
1	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1	unit	1	unit	100	3.059.571.200	3.051.541.200	<b>99,74</b>	100,00		
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	8	unit	8	unit	100	5.742.090.500	5.657.993.400	<b>98,54</b>	100,00		
3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4	unit	4	unit	100	1.136.241.000	1.107.580.000	<b>97,48</b>	100,00		
4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	340	unit	339	unit	99,71	17.396.298.658	15.498.695.223	<b>89,09</b>	99,00	Pengadaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) tidak terlaksana	Menunggu Gedung Labkesda baru
5	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	34	Paket	34	Paket	100	4.347.981.539	3.052.648.282	<b>70,21</b>	100,00	kesenjangan harga satuan obat di SSH Daerah dengan harga pasar/ harga ekatalog, dimana harga SSH lebih besar daripada harga ekatalog	peninjauan ulang rencana kebutuhan obat di tahun berjalan sangat penting dilakukan oleh tim perencana obat.
6	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	34	Paket	34	Paket	100	5.411.791.300	3.710.400.428	<b>68,56</b>	99,00	Pengadaan Obat tidak terealisasi karena kenaikan harga obat	merencanakan ulang di tahun berikutnya
7	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	2	Unit	2	Unit	100	173.710.000	131.680.340	<b>75,80</b>	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
8	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2	Unit	2	Unit	100	33.000.000	30.368.100	92,02	100,00		
2	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase balita gizi buruk	0,4	%	0,41	%	102,5	69.901.130.450	67.312.254.220	96,30	100,00		
		Prevalensi balita gizi kurang	7,8	%	15,06	%	193,08						
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	4,6	%	7,8	%	30,43						
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	10	%	7,27	%	72,70						
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	84,5	%	87,74	%	103,83						
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	85	%	67,41	%	79,31						
		Cakupan Kunjungan Bayi	98,11	%	89,05	%	90,77						
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	56,08	%	62,23	%	110,97						
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	83,35	%	100	%	119,98						
		Cakupan pelayanan nifas	97,59	%	85,99	%	88,11						
		Persentase tatanan yang dilaksanakan pembinaan menuju Kabupaten Kota Sehat	40	%	40	%	100,00						
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	94,6	%	88,9	%	93,97						

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	6	per 100.000 penduduk	18	per 100.000 penduduk	300,00						
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	%	100	%	100,00						
		Respon PIE (Penyakit Infeksi Emerging) < 24 jam	100	%	100	%	100,00						
		Persentase desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	94,6	%	88,8	%	93,87						
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	80	%	81	%	101,25						
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90	%	88,29	%	98,10						
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	%	100	%	100						
		Tingkat kematian akibat malaria	< 1 -		0	0	100						
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	%	100	%	100						
		Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional sesuai standar	88,24	%	100	%	113,33						
		Persentase puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga	100	%	100	%	100						

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.320	orang	14.429	orang	88,41	120.623.000	119.733.800	<b>99,26</b>	100,00		
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.300	orang	13.288	orang	86,85	98.346.000	91.042.000	<b>92,57</b>	100,00		
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.300	orang	13.326	orang	87,10	133.000.000	132.076.200	<b>99,31</b>	100,00		
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61.200	orang	64.821	orang	105,92	49.032.000	46.750.750	<b>95,35</b>	100,00		
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.340	orang	164.123	orang	946,50	35.000.000	34.020.000	<b>97,20</b>	100,00		
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	819.387	orang	795.413	orang	97,07	123.890.000	115.967.600	<b>93,61</b>	100,00		
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142.800	orang	220.200	orang	154,20	41.384.000	39.981.550	<b>96,61</b>	100,00		
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95.750	orang	324.122	orang	338,51	407.718.750	377.220.000	<b>92,52</b>	100,00		
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	353.761	orang	34.706	orang	9,81	1.234.827.000	1.014.565.800	<b>82,16</b>	100,00		
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.938	orang	2.938	orang	100,00	34.000.000	31.449.800	<b>92,50</b>	100,00		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10.400	orang	10.471	orang	100,68	150.000.000	146.137.500	<b>97,43</b>	100,00		
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12.540	orang	17.437	orang	139,05	961.980.000	930.305.200	<b>96,71</b>	100,00		
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4	dokumen	4	dokumen	100	119.775.000	119.057.200	<b>99,40</b>	100,00		
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelola Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4	dokumen	4	dokumen	100	75.000.000	74.059.580	<b>98,75</b>	100,00		
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	41	dokumen	41	dokumen	100	20.590.318.000	20.354.508.000	<b>98,85</b>	100,00		
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	34	dokumen	34	dokumen	100	287.740.000	279.090.900	<b>96,99</b>	100,00		
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	34	dokumen	34	dokumen	100	621.970.000	587.953.700	<b>94,53</b>	100,00		
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi	10	dokumen	10	dokumen	100	350.000.000	329.734.300	<b>94,21</b>	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	34	dokumen	34	dokumen	100	97.000.000	94.309.900	<b>97,23</b>	100,00		
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	dokumen	4	dokumen	100	132.418.100	123.047.800	<b>92,92</b>	100,00		
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	orang	100	orang	100	18.630.000	15.230.000	<b>81,75</b>	100,00		
22	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	dokumen	68	dokumen	97,14	916.000.000	898.785.200	<b>98,12</b>	100,00		
23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	dokumen	2	dokumen	100	762.179.900	634.331.386	<b>83,23</b>	100,00		
24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	dokumen	1	dokumen	100	39.610.729.200	37.990.569.600	<b>95,91</b>	100,00		
25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	80	paket	60	paket	75	29.537.000	25.889.400	<b>87,65</b>	100,00		
26	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	dokumen	1	dokumen	100	816.100.000	738.149.327	<b>90,45</b>	100,00		
27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34	unit	34	unit	100	880.492.500	810.288.500	<b>92,03</b>	100,00		
28	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2	jenis	2	jenis	100	99.000.000	92.974.500	<b>93,91</b>	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
29	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safet Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	unit	1	unit	100	1.052.600.000	1.022.048.327	<b>97,10</b>	100,00		
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5	orang	12	orang	240	51.840.000	42.976.400	<b>82,90</b>	100,00		
<b>3</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase Sistem Informasi Kesehatan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100	<b>268.198.000</b>	<b>242.339.250</b>	<b>90,36</b>	<b>100,00</b>		
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2	dokumen	2	dokumen	100	118.300.000	113.835.500	<b>96,23</b>	100,00		
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	dokumen	1	dokumen	100	45.000.000	35.589.000	<b>79,09</b>	100,00		
3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	2	unit	2	unit	100	104.898.000	92.914.750	<b>88,58</b>	100,00		
<b>4</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C dan D serta Fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penerbitan rekomendasi perijinan rumah sakit dan fasyankes</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100	<b>1.934.375.000</b>	<b>456.054.528</b>	<b>23,58</b>	<b>100,00</b>		
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	85	unit	85	unit	100	20.000.000	19.743.000	<b>98,72</b>	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	34	unit	1	unit	2,94	1.914.375.000	436.311.528	22,79	100,00	penambahan anggaran pendampingan akreditasi puskesmas yang cukup besar di perubahan dari DAU dan DAK Non Fisik, sehingga tidak terserap maksimal	membiarkan silpa karena waktu yang mepet di perubahan
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase puskesmas Memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100	%	88	%	88,24	1.565.021.000	1.426.533.285	91,15	98,33		
		Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar	100	%	100	%	100						
1	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan pemberian rekomendasi perizinan praktik tenaga kesehatan</b>	100	%	100	%	100	53.000.000	51.636.700	97,43	100,00		
1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.500	dokumen	1.500	dokumen	100	20.000.000	19.692.200	98,46	100,00		
2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100	dokumen	100	dokumen	100	33.000.000	31.944.500	96,80	100,00		
2	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM</b>	100	%	88	%	88,24	158.175.000	152.781.000	96,59	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	dokumen	2	dokumen	100	40.000.000	39.666.000	<b>99,17</b>	100,00		
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100	orang	100	orang	100	28.590.000	27.595.000	<b>96,52</b>	100,00		
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	Dokumen	1	Dokumen	50	89.585.000	85.520.000	<b>95,46</b>	100,00		
<b>3</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase meningkatnya kompetensi Teknis SDM tingkat kabupaten</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.353.846.000</b>	<b>1.222.115.585</b>	<b>90,27</b>	<b>95,00</b>		
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	255	orang	255	orang	100,00	1.353.846.000	1.222.115.585	<b>90,27</b>	95,00	1 pelatihan PTM tidak terlaksana	

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
IV	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan	58,06	%	74,00	%	127,45	664.146.000	566.962.850	<b>85,37</b>	99,00		
		Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan	50	%	27,14	%	54,28					Kesadaran Pelaku usaha masih rendah	Dilakukan Pembinaan dan pendampingan Terhadap industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan
1	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, UMOT yang diberikan izin dan diawasi</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	100	<b>159.730.000</b>	<b>140.112.450</b>	<b>87,72</b>	<b>100,00</b>		
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT)	50	dokumen	46	dokumen	92	66.000.000	56.555.450	<b>85,69</b>	100,00		
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	sarana	100	sarana	100	93.730.000	83.557.000	<b>89,15</b>	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	%	100	%	100	280.450.000	240.673.500	85,82	100,00		
4	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasanserta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	60	dokumen	60	dokumen	100	280.450.000	240.673.500	85,82	100,00		
3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	%	100	%	100	30.000.000	21.505.000	71,68	95,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	40	dokumen	40	dokumen	100	30.000.000	21.505.000	<b>71,68</b>	95,00	ada dua kegiatan: pemeriksaan air bersih dan pemeriksaan air minum, yang terlaksana pemeriksaan air minum	
4	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>Persentase terlaksananya penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	100	<b>35.000.000</b>	<b>31.880.000</b>	<b>91,09</b>	<b>100,00</b>		
1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	40	dokumen	40	dokumen	100	35.000.000	31.880.000	<b>91,09</b>	100,00		
5	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	100	<b>158.966.000</b>	<b>132.791.900</b>	<b>83,53</b>	<b>100,00</b>		
1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan/Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30	unit	30	unit	100	158.966.000	132.791.900	<b>83,53</b>	100,00		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
V	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62	%	72	%	116,13	998.984.000	972.071.450	<b>97,31</b>	100,00		
1	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kebijakan kesehatan yang dibuat di tingkat kabupaten</b>	<b>13</b>	<b>kebijakan</b>	<b>13</b>	<b>kebijakan</b>	100	<b>327.050.000</b>	<b>318.172.750</b>	<b>97,29</b>	<b>100,00</b>		
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10	dokumen	10	dokumen	100	327.050.000	318.172.750	<b>97,29</b>	100,00		
2	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)</b>	<b>98</b>	%	<b>93</b>	%	94,90	<b>80.000.000</b>	<b>79.120.800</b>	<b>98,90</b>	<b>100,00</b>		
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	11	dokumen	35	dokumen	318,18	80.000.000	79.120.800	<b>98,90</b>	100,00		
3	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	100	<b>591.934.000</b>	<b>574.777.900</b>	<b>97,10</b>	<b>100,00</b>		
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.430	dokumen	1.307	dokumen	91,40	591.934.000	574.777.900	<b>97,10</b>	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>RSUD BAGAS WARAS</b>													
No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	114.448.621.036	86.210.643.985	75	100		
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	%	100	%	100	16.449.462.582	15.392.447.375	94	100		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	198	org	199	org	100,5	16.449.462.582	15.392.447.375	94	100		
2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100	%	100	%	100	97.999.158.454,00	70.818.196.610	72	100		
a	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit kerja	1	unit kerja	100	97.999.158.454,00	70.818.196.610	72	100	Belum optimalnya tata kelola RSUD baik secara manajerial dan pelayanan	Memperbaiki secara terus menerus dan berkelanjutan tata kelola RSUD pelayanan
<b>PUSKESMAS</b>													
No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	100	%	100	68.234.255.610	57.318.918.493	84,00	100		
1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100	%	100	%	100	68.234.255.610	57.318.918.493	84,00	100		
a	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	umlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	34	unit kerja	34	unit kerja	100	68.234.255.610	57.318.918.493	84,00	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
II	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100,00	%	100	27.662.206.930	22.655.200.805	81,90	94		
1	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	100,00	%	100	27.662.206.930	22.655.200.805	81,90	94		
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.429	orang	14.429	orang	100,00	2.207.775.472	2.068.874.460	93,71	100		
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.288	orang	13.288	orang	100,00	24.020.000	12.960.000	53,96	100	masyarakat lebih memilih rumah sakit untuk melakukan persalinan	meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan SDM puskesmas terutama untuk persalinan sehingga masyarakat tertarik melakukan persalinan di puskesmas
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.326	orang	13.326	orang	100,00	62.112.460	40.100.000	64,56	100		
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64.821	orang	64.821	orang	100,00	871.267.407	805.964.690	92,50	100		
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	164.123	orang	164.123	orang	100,00	717.810.000	653.749.500	91,08	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	795.413	orang	795.413	orang	100,00	439.729.450	392.508.500	<b>89,26</b>	100		
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	220.200	orang	220.200	orang	100,00	78.105.000	73.529.000	<b>94,14</b>	100		
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	324.122	orang	324.122	orang	100,00	53.632.000	41.726.000	<b>77,80</b>	100		
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34.706	orang	34.706	orang	100,00	14.040.000	12.180.000	<b>86,75</b>	100		
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.938	orang	2.938	orang	100,00	145.743.000	131.226.500	<b>90,04</b>	100		
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10.471	orang	10.471	orang	100,00	369.209.032	299.569.600	<b>81,14</b>	100		
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17.437	orang	17.437	orang	100,00	67.521.000	52.422.500	<b>77,64</b>	100		
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4	dokumen	4	dokumen	100	53.820.000	32.220.000	<b>59,87</b>	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaaa Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4	dokumen	4	dokumen	100	1.260.000	0	0,00	20	Tidak ada masyarakat yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana sehingga anggaran Tidak terserap	
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	41	dokumen	41	dokumen	100	11.450.128.000	10.051.633.345	87,79	100		
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	34	dokumen	34	dokumen	100	267.530.004	223.159.000	83,41	100		
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan KesehatanLingkungan	34	dokumen	34	dokumen	100	552.215.000	493.355.000	89,34	100		
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi	10	dokumen	10	dokumen	100	2.315.018.572	1.965.482.720	84,90	100		
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	34	dokumen	34	dokumen	100	35.605.000	22.625.000	63,54	100	efisiensi anggaran	
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	dokumen	4	dokumen	100	222.860.000	164.850.000	73,97	100		
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	%		%		63.612.000	47.915.000	75,32	100		
22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	dokumen	2	dokumen	100	2.126.667.529	1.804.176.300	84,84	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
23	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	80	paket	60	paket	75	30.690.000	17.100.000	<b>55,72</b>	100	efisiensi anggaran	
24	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	34	Dokumen	34	Dokumen	100	5.436.316.004	3.217.643.690	<b>59,19</b>	100	efisiensi anggaran untuk insentif UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dari BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)	
25	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	34	Laporan	34	Laporan	100	17.190.000	5.310.000	<b>30,89</b>	100	KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) tidak banyak	
26	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2	jenis	2	jenis	100	990.000	0	<b>0,00</b>	20	Tidak ada wabah di Kabupaten Klaten	
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50	Orang	52	Orang	104	10.080.000	8.730.000	<b>86,61</b>	100		
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5	orang	12	orang	240	27.260.000	16.190.000	<b>59,39</b>	100	efisiensi anggaran	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif	62	%	72	%	116,13	1.043.236.078	941.793.000	<b>90,28</b>	100		
<b>1</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kebijakan kesehatan yang dibuat di tingkat kabupaten</b>	<b>13</b>	<b>kebijakan</b>	<b>13</b>	<b>kebijakan</b>	<b>100</b>	<b>128.600.000</b>	<b>118.030.000</b>	<b>91,78</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10	dokumen	10	dokumen	100	128.600.000	118.030.000	91,78	100		
2	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100	<b>914.636.078</b>	<b>823.763.000</b>	<b>90,06</b>	<b>100</b>		
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.430	dokumen	1.307	dokumen	91,40	914.636.078	823.763.000	90,06	100		
		<b>JUMLAH</b>						<b>464.394.309.613</b>	<b>396.379.378.155</b>	<b>85,35</b>			

**URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**OPD : DPU PR**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>29.783.424.407</b>	<b>26.064.272.758</b>	<b>87,51</b>			
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000.000</b>	<b>189.313.000</b>	<b>94,66</b>			
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	4	dokumen	4	dokumen	100,00	100.000.000	92.640.200	92,64	100		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersusun	4	dokumen	4	dokumen	100,00	100.000.000	96.672.800	96,67	100		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>19.013.493.587</b>	<b>16.995.990.218</b>	<b>89,39</b>			
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202	orang/bulan	202	orang/bulan	100,00	18.573.943.587	16.666.292.118	89,73	100		
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	dokumen	1	dokumen	100,00	78.750.000	42.731.500	54,26	100		
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1	laporan	100,00	30.000.000	28.224.500	94,08	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	2	laporan	2	laporan	100,00	310.800.000	239.265.100	76,98	100		
e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	1	dokumen	100,00	20.000.000	19.477.000	97,39	100		
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>380.636.000</b>	<b>279.162.300</b>	<b>73,34</b>			
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	1	dokumen	100,00	350.636.000	249.372.000	71,12	100		
b	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	1	laporan	100,00	30.000.000	29.790.300	99,30	100		
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>677.000.000</b>	<b>572.033.300</b>	<b>84,50</b>			
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	1	paket	100,00	164.000.000	163.424.200	99,65	100		
b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	290	dokumen	290	dokumen	100,00	50.000.000	42.314.000	84,63	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	dokumen	2	dokumen	100,00	147.000.000	134.980.100	91,82	100		
d	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	orang	0	orang	0,00	25.000.000	3.236.000	12,94	20	tidak adanya pengiriman atau pelaksanaan diklat	Pelaksanaan diklat akan direncanakan lebih awal
e	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80	orang	80	orang	100,00	291.000.000	228.079.000	78,38	100		
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>1.082.007.500</b>	<b>973.669.323</b>	<b>89,99</b>			
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	100,00	20.000.000	14.708.000	73,54	100		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	100,00	260.000.000	253.168.050	97,37	100		
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	1	paket	100,00	92.097.500	90.855.000	98,65	100		
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	4	paket	100,00	100.000.000	97.249.500	97,25	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	2	dokumen	100,00	15.000.000	14.256.000	95,04	100		
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	144	laporan	144	laporan	100,00	181.750.000	121.394.000	66,79	100		
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73	laporan	73	laporan	100,00	413.160.000	382.038.773	92,47	100		
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>1.805.239.000</b>	<b>1.626.502.400</b>	<b>90,10</b>			
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	unit	3	unit	100,00	142.210.000	135.260.500	95,11	100		
b	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	158	unit	60	unit	37,97	418.500.000	345.871.000	82,65	100		
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	jenis	8	jenis	100,00	1.244.529.000	1.145.370.900	92,03	100		
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>2.818.056.120</b>	<b>2.084.127.078</b>	<b>73,96</b>			
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	1	laporan	100,00	15.000.000	14.748.450	98,32	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	12	rekening	12	rekening	100,00	800.000.000	443.814.574	55,48	100		
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	88	unit	88	unit	100,00	200.000.000	196.588.880	98,29	100		
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	100,00	1.803.056.120	1.428.975.174	79,25	100		
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>3.806.992.200</b>	<b>3.343.475.139</b>	<b>87,82</b>			
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33	unit	27	unit	81,82	484.780.000	368.571.609	76,03	100		
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	unit	1	unit	50,00	32.500.000	8.520.000	26,22	60	tidak adanya THL sopir sehingga honor gaji sopir tidak dapat terserap	penyusunan rincian sub kegiatan akan lebih dioptimalkan kembali
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	unit	7	unit	100,00	3.289.712.200	2.966.383.530	90,17	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi</b>	<b>0,36</b>	%	<b>0,36</b>	%	<b>100,00</b>	<b>20.873.000.000</b>	<b>19.172.559.613</b>	<b>91,85</b>			
1	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase embung yang berfungsi dengan baik</b>	<b>80,38</b>	%	<b>76,75</b>	%	<b>95,48</b>	<b>3.475.000.000</b>	<b>3.187.682.700</b>	<b>91,73</b>			
a	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1	dokumen	1	dokumen	100,00	75.000.000	68.950.000	91,93	100		
b	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1	dokumen	1	dokumen	100,00	50.000.000	47.099.500	94,20	100		
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	2	unit	2	unit	100,00	300.000.000	283.396.000	94,47	100		
c	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1	km	1	km	100,00	2.990.000.000	2.737.300.300	91,55	95		
d	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang	50	orang	100,00	60.000.000	50.936.900	84,89	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,31	%	0,36	%	116,13	17.398.000.000	15.984.876.913	91,88			
		Tercapainya irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	43,6	%	49	%	112,39						
a	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	16	dokumen	10	dokumen	62,50	1.225.000.000	1.196.913.000	97,71	100		
b	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,1	km	1,1	km	100,00	275.000.000	255.647.600	92,96	100		
c	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,7	km	2,7	km	100,00	7.143.000.000	6.719.914.900	94,08	100		
d	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	5	bendung	5	bendung	100,00	1.850.000.000	1.773.413.200	95,86	100		
e	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	km	5	km	100,00	6.905.000.000	6.038.988.213	87,46	100		
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak</b>	<b>95,59</b>	<b>%</b>	<b>93,35</b>	<b>%</b>	<b>97,66</b>	<b>3.544.149.000</b>	<b>3.147.150.680</b>	<b>88,80</b>			
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>96,00</b>	<b>%</b>	<b>93,35</b>	<b>%</b>	<b>97,24</b>	<b>3.544.149.000</b>	<b>3.147.150.680</b>	<b>88,80</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	dokumen	1	dokumen	100,00	100.000.000	83.941.825	83,94	100		
a	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan /Peningkatan /Perluasan /Optimalisasi SPAM	1	dokumen	1	dokumen	100,00	100.000.000	96.413.188	96,41	100		
b	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	400	SR	772	SR	193,00	2.100.000.000	1.833.859.125	87,33	100		
c	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	1	kelompok masyarakat	1	kelompok masyarakat	100,00	200.000.000	181.049.550	90,52	100		
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	1	penyelenggara SPAM	1	penyelenggara SPAM	100,00	100.000.000	52.644.992	52,64	100		
d	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	355	SR	426	SR	120,00	944.149.000	899.242.000	95,24	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
IV	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100,00	2.703.820.000	2.662.249.715	98,46			
1	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100,00	2.703.820.000	2.662.249.715	98,46			
a	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	200	rumah tangga	200	rumah tangga	100,00	2.400.000.000	2.387.758.200	99,49	100		
b	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	2	kegiatan	2	kegiatan	100,00	303.820.000	274.491.515	90,35	100		
V	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman</b>	<b>1,48</b>	<b>%</b>	<b>1,43</b>	<b>%</b>	96,62	8.015.479.600	7.653.179.248	95,48			
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100,00	8.015.479.600	7.653.179.248	95,48			



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1	dokumen	1	dokumen	100,00	200.000.000	180.957.615	90,48	100		
b	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1	rumah tangga	1	rumah tangga	100,00	3.400.000.000	3.391.422.600	99,75	100		
c	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2	kelompok	2	kelompok	100,00	700.000.000	626.109.230	89,44	100		
d	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	150	rumah tangga	172	rumah tangga	114,67	1.801.990.000	1.800.000.000	99,89	100		
e	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	3	unit	3	unit	100,00	946.000.000	794.130.650	83,95	100		
f	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	400	rumah tangga	288	rumah tangga	72,00	550.000.000	486.320.953	88,42	100		
	Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	14	MA <sup>3</sup> /Hari	14	MA <sup>3</sup> /Hari	100,00	417.489.600	374.238.200	89,64	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
VI	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	62,29	%	62,31	%	100,03	2.893.894.000	2.798.093.280	96,69			
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	61	%	62,31	%	102,15	2.893.894.000	2.798.093.280	96,69			
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1	dokumen	1	dokumen	100,00	220.000.000	215.751.980	98,07	100		
b	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	1400	meter	896,6	meter	64,04	2.373.894.000	2.310.330.150	97,32	100		
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	200	M	242,8	M	121,40	200.000.000	191.194.200	95,60	100		
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	500	M	600	M	120,00	100.000.000	80.816.950	80,82	100		
VII	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase gedung perkantoran dan gedung non perkantoran yang dibangun	60	%	92,86	%	154,77	83.321.690.648	64.891.785.537	77,88			
		Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi	20,83	%	34,43	%	165,29						

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi</b>	100	%	100	%	100,00	83.321.690.648	64.891.785.537	77,88			
a	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1	dokumen	1	dokumen	100,00	600.000.000	531.483.250	88,58	100		
b	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10	dokumen	10	dokumen	100,00	64.171.690.648	46.152.445.287	71,92	70		
	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	1	dokumen	1	dokumen	100,00	100.000.000	52.726.900	52,73	100		
c	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang terehabilitasi, terenovasi dan ubahsuai	4	unit	4	unit	100,00	18.450.000.000	18.155.130.100	98,40	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
VIII	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase dokumen RTBL yang tersusun</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>1.910.000.000</b>	<b>1.727.745.625</b>	<b>90,46</b>			
		<b>Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya</b>	<b>25</b>	<b>%</b>	<b>25</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>						
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase dokumen penataan bangunan dan lingkungan yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>1.910.000.000</b>	<b>1.727.745.625</b>	<b>90,46</b>			
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1	dokumen	1	dokumen	100,00	300.000.000	236.251.950	78,75	100		
b	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5	kawasan	5	kawasan	100,00	1.510.000.000	1.436.678.675	95,14	100		
c	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1	dokumen	1	dokumen	100,00	100.000.000	54.815.000	54,82	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
IX	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	%	83	%	83,00	350.000.000	202.579.700	57,88			
1	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	Persentase pelatihan tenaga terampil konstruksi yang diselenggarakan	100	%	83	%	83,00	200.000.000	144.519.600	72,26			
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	%	83	%	83,00						
a	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	200	orang	166	orang	83,00	200.000.000	144.519.600	72,26	100		
2	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang terdata di SIPJAKI Kabupaten Klaten	100	%	100	%	100,00	50.000.000	46.407.750	92,82			
		Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang terdata di SIPJAKI Kabupaten Klaten	100	%	100	%	100,00						
a	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1	laporan	1	laporan	100,00	50.000.000	46.407.750	92,82	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Prosentase badan usaha konstruksi berizin yang terpantau	85	%	85	%	100,00	100.000.000	11.652.350	11,65			
		Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	%	83	%	83,00						
a	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	50	dokumen	0	dokumen	0,00	50.000.000	0	0	0	tidak terlaksana karena kewenangan sudah beralih ke pusat	sub kegiatan akan diganti dengan sub kegiatan lainnya
b	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	1	dokumen	1	dokumen	100,00	50.000.000	11.652.350	23,30	100		
X	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase jalan kondisi baik</b>	<b>67,82</b>	<b>%</b>	<b>67,85</b>	<b>%</b>	<b>100,04</b>	<b>97.799.467.000</b>	<b>91.950.379.894</b>	<b>94,02</b>			
		<b>Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik</b>	<b>65,81</b>	<b>%</b>	<b>76,19</b>	<b>%</b>	<b>115,77</b>						
1	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik</b>	<b>67,82</b>		<b>67,85</b>		<b>100,04</b>	<b>97.799.467.000</b>	<b>91.950.379.894</b>	<b>94,02</b>			
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	4	dokumen	4	dokumen	100,00	300.000.000	281.177.430	93,73	100		
b	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2	dokumen	2	dokumen	100,00	660.000.000	635.237.000	96,25	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	6,71	Km	9,09	Km	135,47	19.347.849.000	18.547.414.985	95,86	100		
d	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	14,17	Km	14,17	Km	100,00	52.056.000.000	49.139.637.461	94,40	100		
e	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2,93	Km	2,93	Km	100,00	3.942.900.000	3.533.247.650	89,61	100		
f	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	109	ruas	109	ruas	100,00	21.492.718.000	19.813.665.368	92,19	100		
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun</b>	<b>70,5</b>	<b>%</b>	<b>71</b>	<b>%</b>	<b>100,71</b>	<b>1.198.682.000</b>	<b>924.396.310</b>	<b>77,12</b>			
		<b>Persentase pelayanan ketataruangan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>						
		<b>Persentase pengendalian pemanfaatan ruang</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>						
<b>1</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten yang ditetapkan</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>363.682.000</b>	<b>267.319.186</b>	<b>73,50</b>			
a	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	dokumen	1	dokumen	100,00	263.682.000	214.579.186	81,38	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1	dokumen	1	dokumen	100,00	100.000.000	52.740.000	52,74	100		
<b>2</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perencanaan tata ruang daerah</b>	<b>66</b>	<b>%</b>	<b>65,99</b>	<b>%</b>	<b>99,98</b>	<b>300.000.000</b>	<b>205.808.800</b>	<b>68,60</b>			
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	dokumen	1	dokumen	100,00	200.000.000	154.268.000	77,13	100		
b	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1	dokumen	1	dokumen	100,00	100.000.000	51.540.800	51,54	100		
<b>3</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pelayanan ketataruangan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>75,00</b>	<b>200.000.000</b>	<b>170.319.908</b>	<b>85,16</b>			
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	dokumen	1	dokumen	100,00	100.000.000	79.798.993	79,80	100		
b	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	dokumen	1	dokumen	100,00	100.000.000	90.520.915	90,52	100		
<b>4</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengendalian pemanfaatan ruang</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>335.000.000</b>	<b>280.948.416</b>	<b>83,87</b>			



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1	dokumen	1	dokumen	100,00	200.000.000	189.481.116	94,74	100		
b	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	dokumen	1	dokumen	100,00	135.000.000	91.467.300	67,75	100		
		<b>JUMLAH</b>						<b>252.393.606.655</b>	<b>221.194.392.360</b>	<b>87,64</b>			

**URUSAN : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DISPERAKIM**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100	%	100	%	100	10.130.398.286	8.337.589.838	82,30	100,00		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100	%	100	%	100	80.000.000	75.538.500	94,42	100,00		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	55	Dokumen	55	Dokumen	100	40.000.000	39.333.550	98,33	100,00		
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	15	Dokumen	15	Dokumen	100	10.000.000	8.732.400	87,32	100,00		
c	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	15	Dokumen	15	Dokumen	100	10.000.000	9.496.800	94,97	100,00		
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LKJIP tersusun	10	Laporan	10	Laporan	100	10.000.000	9.345.250	93,45	100,00		
e	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	Laporan	50	Laporan	100	10.000.000	8.630.500	86,31	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	%	100	%	100	4.368.345.706	3.612.233.580	82,69	100,00		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	35	Orang/bulan	36	Orang/bulan	103	4.184.345.706	3.440.462.230	82,22	100,00		
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	Dokumen	100	144.000.000	138.476.100	96,16	100,00		
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	100	10.000.000	4.704.800	47,05	100,00		
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	3	Laporan	100	10.000.000	9.479.150	94,79	100,00		
e	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10	Dokumen	10	Dokumen	100	10.000.000	9.200.000	92,00	100,00		
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	25	Laporan	25	Laporan	100	10.000.000	9.911.300	99,11	100,00		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi	100	%	100	%	100	20.000.000	17.577.750	87,89	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	100	5.000.000	4.843.250	96,87	100,00		
b	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	1	Laporan	1	Laporan	100	10.000.000	7.856.000	78,56	100,00		
c	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100	5.000.000	4.878.500	97,57	100,00		
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi pendapatan kewenangan daerah tepat waktu	100	%	100	%	100	45.000.000	42.791.050	95,09	100,00		
a	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	100	10.000.000	9.642.000	96,42	100,00		
b	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	50	Laporan	50	Laporan	100	25.000.000	24.576.050	98,30	100,00		
c	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	100	10.000.000	8.573.000	85,73	100,00		
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100	%	100	%	100	145.000.000	102.322.720	70,57	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1	Dokumen	100	10.000.000	9.767.680	97,68	100,00		
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	Orang	20	Orang	100	10.000.000	9.000.000	90,00	100,00		
c	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	300	Orang	100	125.000.000	83.555.040	66,84	100,00		
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	100	%	100	385.000.000	374.437.235	97,26	100,00		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	Paket	50	Paket	100	20.000.000	19.459.206	97,30	100,00		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	60	Paket	100	25.000.000	24.337.229	97,35	100,00		
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	20	Paket	100	20.000.000	19.699.300	98,50	100,00		
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40	Paket	40	Paket	100	25.000.000	24.070.500	96,28	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	50	Dokumen	50	Dokumen	100	15.000.000	14.291.800	95,28	100,00		
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	80	Laporan	80	Laporan	100	80.000.000	75.014.200	93,77	100,00		
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	85	Laporan	85	200.000.000	197.565.000	98,78	100,00		
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	%	100	%	100	1.224.404.250	1.048.032.770	85,60	100,00		
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit	4	Unit	100	506.493.750	410.725.000	81,09	100,00		
b	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	10	Unit	10	Unit	100	82.000.000	80.577.000	98,26	100,00		
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	15	Unit	100	585.910.500	508.635.770	86,81	100,00		
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	5	Unit	100	50.000.000	48.095.000	96,19	100,00		
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	%	100	%	100	3.267.648.330	2.527.961.703	77,36	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250	Laporan	250	Laporan	100	20.000.000	19.774.200	98,87	100,00		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	48	Laporan	100	1.372.227.930	832.837.061	60,69	100,00		
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Laporan	8	Laporan	80	50.000.000	43.590.000	87,18	100,00		
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	624	Laporan	260	Laporan	42	1.825.420.400	1.631.760.442	89,39	100,00		
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	100	%	100	595.000.000	536.694.530	90,20	100,00		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	12	Unit	12	Unit	100	310.000.000	262.072.763	84,54	100,00		
b	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	Unit	20	Unit	100	10.000.000	9.977.800	99,78	100,00		
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	20	Unit	20	Unit	100	10.000.000	8.645.267	86,45	100,00		
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1	Unit	1	Unit	100	200.000.000	192.479.000	96,24	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	30	Unit	30	Unit	100	65.000.000	63.519.700	97,72	100,00		
II	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni</b>	100	%	100	%	100	1.171.175.900	724.607.978	61,87	100,00		
		<b>Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni</b>	100	%	100	%	100				100,00		
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata	100	%	100	%	100	344.831.000	296.634.280	86,0230896	100,00		
a	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100	112.121.000	104.156.580	92,8965849	100,00		
b	Identifikasi LahanLahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	113.418.000	105.007.200	92,5842459	100,00		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	Dokumen	0	Dokumen	-	6.538.000	-	0	0,00		
d	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	Dokumen	0	Dokumen	-	12.754.000	-	0	0,00		
e	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1	Dokumen	1	Dokumen	100	100.000.000	87.470.500	87,4705	100,00		
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana atau relokasi yang mengikuti sosialisasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	100	%	100	%	100	98.794.900	76.273.200	77,20	100,00		
a	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	Orang	100	Orang	100	64.240.500	55.186.200	85,91	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	20	Orang	20	Orang	100	22.478.400	21.087.000	93,81	100,00		
c	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	1	Orang	0	Orang	-	3.709.500	-	0,00	0,00		
d	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	8.366.500	-	0,00	0,00		
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana yang terbangun dan/ atau terehabilitasi	100	%	100	%	100	381.350.000	58.550.100	15,35	100,00		
a	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang terehabilitasi	13	Unit	13	Unit	100	200.000.000	58.550.100	29,28	100,00		
b	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100	5.350.000	-	0,00	0,00		
c	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Ha	1	Ha	100	6.000.000	-	0,00	0,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
d	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang terbangun	3	Unit	3	Unit	100	170.000.000	-	0,00	0,00		
4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase distribusi dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program yang dilaksanakan	100	%	100	%	100	5.000.000	-	0,00	0,00		
a	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan	100	5.000.000	-	0,00	0,00		
5	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rumah susun umum yang terkelola	100	%	100	%	100	271.200.000	253.449.478	93,45	100,00		
a	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	5	Laporan	2	Laporan	40	221.200.000	205.741.650	93,01	100,00		
b	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	Dokumen	1	Dokumen	100	50.000.000	47.707.828	95,42	100,00		
6	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah izin pembangunan dan perumahan yang diterbitkan	100	%	100	%	100	70.000.000	39.700.920	56,72	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5	Laporan	5	Laporan	100	70.000.000	39.700.920	56,72	100,00		
<b>III</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani</b>	0,05	%	0,36	%	100	1.485.000.000	1.232.740.552	83,01	100,00		
1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase dokumen pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang tersusun	100	%	100	%	100	25.000.000	10.733.350	42,93	100,00		
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1	Laporan	1	Laporan	100	25.000.000	10.733.350	42,93	100,00		
2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase penanganan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang dilakukan	7	%	3	%	43	310.000.000	164.546.200	53,08	100,00		
a	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen hasil survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh tersusun	1	Dokumen	0	Dokumen	-	10.000.000	3.292.000	32,92	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1	Dokumen	1	Dokumen	100	50.000.000	44.494.250	88,99	100,00		
c	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	Laporan	0	Laporan	-	50.000.000	-	0,00	0,00		
d	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	Laporan	1	Laporan	100	50.000.000	6.728.800	13,46	100,00		
e	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1	Dokumen	1	Dokumen	100	150.000.000	110.031.150	73,35	100,00		
3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase RTLH di kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang terhabilitasi	5	%	5	%	100	1.150.000.000	1.057.461.002	91,95	100,00		
a	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100	100.000.000	94.075.175	94,08	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	5	Dokumen	5	Dokumen	100	200.000.000	180.130.900	90,07	100,00		
c	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	1	Ha	1	Ha	100	800.000.000	775.147.927	96,89	100,00		
d	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	1	Unit	0	Unit	-	50.000.000	8.107.000	16,21	100,00		
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani</b>	96,43	%	96	%	100	11.659.000.000	10.434.398.406	89,50	100,00		
1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	96	%	96	%	100	11.659.000.000	10.434.398.406	89,50	100,00		
a	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	844	Unit Rumah	844	Unit Rumah	100	11.434.000.000	10.225.547.925	89,43	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3	Dokumen	3	Dokumen	100	225.000.000	208.850.481	92,82	100,00		
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik</b>	62,24	%	62,24	%	100	2.150.060.000	1.896.442.827	88,20	100,00		
		<b>Persentase PSU yang diserahkan oleh pengembang perumahan</b>	38,61	%	38,61	%	100				100,00		
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU yang diserahkan oleh pengembang perumahan	100	%	100	%	100	2.150.060.000	1.896.442.827	88,20	100,00		
a	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	50.000.000	41.505.000	83,01	100,00		
b	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Penunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	5	Lokasi	5	Lokasi	100	1.885.960.000	1.697.067.122	89,98	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10	Laporan	10	Laporan	100	100.000.000	84.500.465	84,50	100,00		
d	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10	Laporan	10	Laporan	100	114.100.000	73.370.240	64,30	100,00		
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang diterbitkan	100	%	0	%	-	50.000.000	-	0,00	0,00		
1	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil yang dilakukan	100	%	5	%	5	50.000.000	-	0,00	0,00		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	12	Laporan	3	Laporan	25	50.000.000	-	0,00	0,00		
	<b>JUMLAH</b>							<b>26.645.634.186</b>	<b>22.625.779.601</b>	<b>84,91</b>			

**URUSAN : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat**

**Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dan BPBD**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>8.211.516.760</b>	<b>6.057.961.448</b>	<b>74</b>	<b>100</b>		
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>134.784.782</b>	<b>127.326.700</b>	<b>94</b>	<b>100</b>		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dokumen	7	dokumen	100	37.784.782	34.937.000	92	100		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	laporan	10	laporan	100	97.000.000	92.389.700	95	100		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>6.142.366.702</b>	<b>4.080.226.361</b>	<b>66</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	orang/bulan	33	orang/bulan	100	6.086.806.702	4.028.673.561	66	100		
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360	dokumen	360	dokumen	100	31.000.000	28.144.900	91	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16	Laporan	16	Laporan	100	24.560.000	23.407.900	95	100		
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>365.028.000</b>	<b>344.776.500</b>	<b>94</b>	<b>100</b>		
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	115	paket	135	paket	100	349.850.000	337.684.500	97	100		
b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20	Dokumen	20	Dokumen	100	7.878.000	7.092.000	90	100		
c	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	orang	20	orang	7	7.300.000	0	0	7	Anggaran tidak terserap	Berdasarkan hasil desk di Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dana DBHCHT, Khusus Satpol PP dan Damkar subkegiatan ini dialihkan ke Subkegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota Semenjak (P1)
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>203.700.050</b>	<b>183.664.500</b>	<b>90</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket	2	Paket	100	20.000.000	17.699.500	88	100		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	unit	20	unit	100	15.000.050	14.858.000	99	100		
c	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	5	Paket	100	18.700.000	18.597.100	99	100		
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	dokumen	3	dokumen	100	3.000.000	2.776.900	93	100		
e	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20	Laporan	20	Laporan	100	22.000.000	16.576.000	75	100		
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Laporan	15	Laporan	100	125.000.000	113.157.000	91	100		
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>490.395.000</b>	<b>466.326.000</b>	<b>95</b>	<b>100</b>		
a	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	unit	5	unit	100	39.352.000	35.125.000	89	100		
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	1	unit	100	451.043.000	431.201.000	96	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100.282.226</b>	<b>93.508.951</b>	<b>93</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500	Laporan	1.500	Laporan	100	5.000.000	3.760.000	75	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	50.000.000	46.692.431	93	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Laporan	3	Laporan	100	45.282.226	43.056.520	95	100		
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>774.960.000</b>	<b>762.132.436</b>	<b>98</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unit	5	unit	100	561.960.000	559.761.436	100	100		
b	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	2	unit	100	200.000.000	190.131.000	95	100		
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	2	unit	100	5.000.000	4.725.000	95	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	15	unit	15	unit	100	8.000.000	7.515.000	94	100		
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan</b>	<b>43</b>	<b>%</b>	<b>43</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.933.655.393</b>	<b>5.630.776.466</b>	<b>95</b>	<b>100</b>		
		<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>103,09</b>				<b>100</b>		
		<b>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>	<b>92,40</b>	<b>%</b>	<b>93,69</b>	<b>%</b>	<b>101,40</b>				<b>101,40</b>		
		<b>Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
1	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.844.355.393</b>	<b>4.651.343.566</b>	<b>96</b>	<b>100</b>		
		<b>Cakupan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	90	kasus	90	kasus	100	3.792.855.393	3.650.561.416	96	100		
b	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	40	kasus	40	kasus	100	50.000.000	44.865.000	90	100		
c	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10	dokumen	10	dokumen	100	11.500.000	9.748.000	85	100		
d	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.000	dokumen	1.000	dokumen	100	206.500.000	196.021.400	95	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
e	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36	orang	34	orang	100	749.500.000	722.434.750	96	100	Realisasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN per triwulan dilaksanakan 100%. Realisasi Jumlah ASN semakin berkurang karena faktor pensiun atau meninggal pada TW IV	
f	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Tehnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan ketertarikan dan Ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	7	dokumen	7	dokumen	100	25.500.000	21.329.000	84	100		
g	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5	laporan	5	laporan	100	8.500.000	6.384.000	75	100		
<b>2</b>	<b>Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub di kabupaten klaten</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.086.300.000</b>	<b>976.472.900</b>	<b>90</b>	<b>100</b>		
		<b>Persentase Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	15	laporan	15	laporan	100	55.000.000	50.996.000	93	100		
b	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	364	laporan	364	laporan	100	451.000.000	415.042.400	92	100		
c	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	30	laporan	30	laporan	100	580.300.000	510.434.500	88	100		
<b>3</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Terbina</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
a	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4	laporan	4	laporan	100	3.000.000	2.960.000	99	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
III	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Tingkat waktu tanggap (response time rate ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)</b>	<b>70</b>	<b>%</b>	<b>58,99</b>	<b>%</b>	<b>84,27</b>	<b>4.988.433.783</b>	<b>4.863.333.496</b>	<b>97</b>	<b>81,69</b>		
		<b>Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran</b>	<b>15</b>	<b>Menit</b>	<b>18,84</b>	<b>Menit</b>	<b>74,4</b>				<b>47,40</b>		
		<b>Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
1	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.363.724.927</b>	<b>4.250.709.446</b>	<b>97</b>	<b>100</b>		
a	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1	dokumen	1	dokumen	100	139.011.000	68.678.500	49	100		
b	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	laporan	100	laporan	100	4.167.141.927	4.125.424.946	99	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	10	dokumen	10	dokumen	100	43.919.000	42.953.000	98	100		
d	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	27	orang	27	orang	100	13.653.000	13.653.000	100	100		
<b>2</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Cakupan pelayanan pemeriksaan dan pendataan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>24.829.000</b>	<b>24.829.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
a	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	5	dokumen	5	dokumen	100	7.108.000	7.108.000	100	100		
b	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	40	dokumen	40	dokumen	100	17.721.000	17.721.000	100	100		
<b>3</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>53.060.000</b>	<b>53.060.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50	orang	50	orang	100	21.635.000	21.635.000	100	98		
b	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2	Desa/ Kelurahan	2	Desa/ Kelurahan	100	31.425.000	31.425.000	100	100		
<b>4</b>	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Cakupan Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>546.819.856</b>	<b>534.735.050</b>	<b>98</b>	100		
a	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	10	laporan	10	laporan	100	15.600.000	14.681.000	94	100		
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	3	unit	3	unit	100	525.478.656	518.228.050	99	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	50	laporan	50	laporan	100	5.741.200	1.826.000	32	100	Serapan Anggaran masih belum maksimal	Efisiensi subkegiatan pembinaan karena keterbatasan waktu dan jumlah personil
		<b>JUMLAH</b>						<b>19.133.605.936</b>	<b>16.552.071.410</b>	<b>86,51</b>			
		<b>BPBD</b>											
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>5.760.455.920</b>	<b>4.544.561.205</b>	79	100		
1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100,00</b>	persen	<b>100,00</b>	persen	<b>100</b>	<b>48.906.000</b>	34.157.700	70	100		
a	sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00	Dokumen	3,00	Dokumen	<b>100</b>	28.906.000	20.747.700,00	72	100		
b	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	5	laporan	<b>100</b>	20.000.000	13.410.000,00	67	100		
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100,00</b>	persen	<b>100,00</b>	persen	<b>100</b>	<b>3.782.438.559</b>	<b>2.771.375.135</b>	73	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27,00	Orang/Bulan	27,00	Orang/Bulan	100	3.782.438.559	2.771.375.135	73	100		
3	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	persen	<b>100</b>	persen	<b>100</b>	<b>411.772.861</b>	323.122.699	78	100		
d	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	100	37.550.000	26.582.000,00	71	100		
e	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	100	38.057.861	34.297.000,00	90	100		
f	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	1	paket	100	45.000.000	44.285.700,00	98	100		
g	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	5.000.000	4.999.800,00	100	100		
h	Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	100	71.893.000	70.392.500,00	98	100		
i	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100	214.272.000	142.565.699,00	67	100		
4	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	persen	<b>100</b>	persen	<b>100</b>	<b>122.016.000</b>	<b>109.750.000,00</b>	90	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	3	Unit	100	49.500.000	48.300.000	98	100		
b	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	100	72.516.000	61.450.000	85	100		
5	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	persen	<b>100</b>	persen	<b>100</b>	<b>640.534.500</b>	583.205.882	91	100		
a	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100	7.000.000	6.700.000	96	100		
b	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	171.415.500	135.838.451	79	100		
c	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	155.633.500	146.211.124	94	100		
d	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	306.485.500	294.456.307	96	100		
6	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	persen	<b>100</b>	persen	<b>100</b>	<b>754.788.000</b>	<b>722.949.789</b>	96	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	Unit	29	Unit	100	483.865.000	458.173.892	95	100		
b	Sub kegiatan Pemeliharaan Meubeler	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	Unit	2	Unit	100	5.950.000	5.950.000	100	100		
c	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100	29.973.000	29.100.000	97	100		
d	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit	7	Unit	100	235.000.000	229.725.897	98	100		
II	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	<b>51</b>	persen	<b>51</b>	persen	<b>100</b>	<b>3.612.074.950</b>	3.128.920.952	87	100		
		Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	<b>62</b>	persen	<b>62</b>	persen	<b>100</b>				100		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<b>73</b>	persen	<b>73</b>	persen	<b>100</b>				100		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<b>100</b>	persen	<b>100</b>	persen	<b>100</b>				100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota</b>	<b>prosentase penduduk didaerah rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman</b>	<b>72,8</b>	persen	<b>72,8</b>	persen	<b>100</b>	<b>146.134.000</b>	<b>104.237.270,00</b>	71	100		
a	Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota ( Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500	orang	500	orang	<b>100</b>	146.134.000	104.237.270	71	100		
2	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana yang terlayani terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan bencana</b>	<b>10</b>	persen	<b>10</b>	persen	<b>100</b>	<b>1.407.108.300</b>	<b>1.226.771.567</b>	87	100		
a	Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1420	orang	1420	orang	<b>100</b>	175.000.000	118.172.228	68	100		
b	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	11	unit	11	unit	<b>100</b>	192.312.500	188.846.100	98	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c	Pengelolaan Risiko Bencana Kab/Kota	jumlah dokumen analisis resiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana	1	Dokumen	1	Dokumen	100	262.000.000	253.253.200	97	100		
d	Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4	kawasan	4	kawasan	100	183.250.600	133.215.100	73	100		
e	Penanganan Pasca bencana Kab/kota	jumlah dokumen penanganan pasca bencana kab/kota memalului pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)	2	Dokumen	2	Dokumen	100	92.128.000	67.977.182	74	100		
f	Sub kegiatan Pengembangan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	38	orang	38	orang	100	355.417.200	341.075.257	96	100		
g	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1	Dokumen	1	Dokumen	100	97.000.000	83.877.500	86	100		
h	Sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100	orang	100	orang	100	50.000.000	40.355.000	81	100		
3	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>prosentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi saat masa tanggap darurat bencana</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>1.902.698.650</b>	<b>1.703.043.315</b>	<b>90</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	Dokumen	1	Dokumen	100	389.569.100	345.956.506	89	100		
b	Sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	130	Orang	130	Orang	100	947.394.000	834.920.293	88	100		
c	Sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	130	Orang	130	Orang	100	499.863.550	472.525.216	95	100		
d	Sub kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	laporan	1	laporan	100	65.872.000	49.641.300	75	100		
4	<b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase organisasi kebencanaan yang terlibat dalam penataan sistem penanggulangan bencana</b>	<b>10</b>	persen	<b>10</b>	persen	<b>100</b>	<b>156.134.000</b>	<b>94.868.800</b>	61	100		
a	Sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	100	18.610.000	17.025.800	91	100		
b	Sub kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	Dokumen	1	Dokumen	100	36.674.000	31.072.000	85	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c	Sub kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	100.850.000	46.771.000	46	100		
		<b>JUMLAH</b>						<b>9.372.530.870</b>	<b>7.673.482.157</b>	<b>82</b>			

## URUSAN : SOSIAL

## OPD : DISSOSP3APPKB

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>7.435.895.801</b>	<b>6.205.398.269</b>	<b>83</b>			
1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>212.000.000</b>	<b>210.374.150</b>	<b>99</b>			
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	9	Dokumen	100	212.000.000	210.374.150	99	100		
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.383.530.418</b>	<b>4.211.151.323</b>	<b>78</b>			
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	Orang	33	Orang	103	5.368.530.418	4.196.194.323	78	100		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100	5.000.000	5.000.000	100	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100	10.000.000	9.957.000	100	100		
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>345.300.000</b>	<b>341.452.866</b>	<b>99</b>			
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	5.300.000	5.299.500	100	100		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	100	65.000.000	63.403.549	98	100		
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	5.000.000	4.000.000	80	100		
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	6	Paket	100	33.000.000	32.744.500	99	100		
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	24	Dokumen	100	2.000.000	1.440.000	72	100		
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28	Laporan	28	Laporan	100	80.000.000	79.935.950	100	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Laporan	120	Laporan	100	155.000.000	154.629.367	100	100		
<b>4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>316.200.000</b>	<b>290.942.000</b>	<b>92</b>			
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	Unit	9	Unit	100	316.200.000	290.942.000	92	100		
<b>5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>484.065.383</b>	<b>470.441.998</b>	<b>97</b>			
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100	1.700.000	1.296.000	76	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	90.000.000	86.833.430	96	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	392.365.383	382.312.568	97	100		
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>694.800.000</b>	<b>681.035.932</b>	<b>98</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	Unit	40	Unit	100	229.800.000	225.858.526	98	100		
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	100	395.000.000	385.472.406	98	100		
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terhabilitasi	25	Unit	25	Unit	100	70.000.000	69.705.000	100	100		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas</b>	<b>97,5</b>	<b>%</b>	<b>96,54</b>	<b>%</b>	<b>99</b>	<b>2.238.350.000</b>	<b>2.145.432.592</b>	<b>96</b>			
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>96,54</b>	<b>%</b>	<b>99</b>	<b>2.238.350.000</b>	<b>2.145.432.592</b>	<b>96</b>			
a	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26	Orang	26	Orang	100	647.000.000	641.340.852	99	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
b	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Lembaga	7	Lembaga	140	1.570.350.000	1.487.044.840	95	100		
c	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Sertifikat	6	Sertifikat	120	21.000.000	17.046.900	81	100		
III	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti</b>	<b>66</b>	<b>%</b>	<b>86,01</b>	<b>%</b>	<b>130</b>	<b>2.024.517.000</b>	<b>1.618.649.789</b>	<b>80</b>			
1	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>	<b>30</b>	<b>%</b>	<b>30</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.688.511.000</b>	<b>1.301.635.687</b>	<b>77</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2750	orang	2750	orang	100	792.387.000	520.709.428	66	100		
b	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	5	Orang	100	1.480.000	1.480.000	100	100		
c	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	5	Orang	100	1.480.000	1.480.000	100	100		
d	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Lembaga	2	Lembaga	100	875.204.000	764.069.009	87	100		
e	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	10	Orang	100	15.000.000	10.937.250	73	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
f	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	5	Orang	100	1.480.000	1.480.000	100	100		
g	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	20	Orang	80	1.480.000	1.480.000	100	100		
<b>2</b>	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>	<b>35</b>	<b>%</b>	<b>65</b>	<b>%</b>	<b>186</b>	<b>336.006.000</b>	<b>317.014.102</b>	<b>94</b>			
a	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	111	Orang	222	17.500.000	15.648.100	89	100		
b	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	111	Orang	222	312.586.000	295.446.002	95	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
c	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	5	Orang	100	1.480.000	1.480.000	100	100		
d	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	5	Orang	100	1.480.000	1.480.000	100	100		
e	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	5	Orang	100	1.480.000	1.480.000	100	100		
f	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	5	Orang	100	1.480.000	1.480.000	100	100		
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)</b>	<b>89</b>	<b>%</b>	<b>136,35</b>	<b>%</b>	<b>153</b>	<b>9.628.648.804</b>	<b>8.822.412.684</b>	<b>92</b>			
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PMKS Fakir Miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>135,97</b>	<b>%</b>	<b>170</b>	<b>9.628.648.804</b>	<b>8.822.412.684</b>	<b>92</b>			
a	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	735000	Orang	112894	Orang	15	80.000.000	75.749.184	95	100		
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60000	Keluarga	239335	Keluarga	399	95.750.000	87.364.000	91	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
c	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60000	Keluarga	239335	Keluarga	399	9.427.898.804	8.639.942.500	92	100		
d	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	Orang	600	Orang	60	25.000.000	19.357.000	77	100		
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>200.275.000</b>	<b>66.414.300</b>	<b>33</b>			
1	<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase korban bencana yang telah mendapat bantuan perlindungan sosial</b>	<b>31</b>	<b>%</b>	<b>49,23</b>	<b>%</b>	<b>159</b>	<b>177.000.000</b>	<b>45.331.500</b>	<b>26</b>			
a	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	130	Orang	199	Orang	153	30.000.000	1.480.000	5	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
b	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	130	Orang	0	Orang	0	30.000.000	-	-	100		
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Unit	1	Unit	10	30.000.000	23.364.500	78	100		
d	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	130	Orang	199	Orang	153	67.000.000	13.307.000	20	100		
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	130	Orang	199	Orang	153	20.000.000	7.180.000	36	100		
<b>2</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Taruna Siaga yang diberdayakan</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>78</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>23.275.000</b>	<b>21.082.800</b>	<b>91</b>			
a	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	39	Orang	78	23.275.000	21.082.800	91	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VI	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>169.000.000</b>	<b>115.111.579</b>	<b>68</b>			
1	<b>Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi</b>	<b>32</b>	<b>%</b>	<b>44</b>	<b>%</b>	<b>138</b>	<b>169.000.000</b>	<b>115.111.579</b>	<b>68</b>			
a	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100	24.000.000	22.501.922	94	100		
b	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	Makam	1	Makam	100	145.000.000	92.609.657	64	100		
		<b>JUMLAH</b>						<b>21.696.686.605</b>	<b>18.973.419.213</b>	<b>87</b>			

**URUSAN : TENAGA KERJA**

**DISPERINA KER**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	87,00	%	70,00	%	80,46	<b>5.000.000</b>	2.743.200	54,86			
<b>1</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan atau review tersusun	100	%	100,00	%	100,00	<b>5.000.000</b>	2.743.200	54,86			
a	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00	5.000.000	2.743.200	54,86	100		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	12,00	%	12,48	%	104,00	<b>10.367.336.270</b>	6.659.207.673	64,23			
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	95,83	%	85,33	%	89,04	<b>10.297.336.270</b>	6.600.654.673	64,10			
a	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	23600	Orang	10.815	Orang	45,83	10.297.336.270	6.600.654.673	64,10	100		
<b>2</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Persentase LPK yang terakreditasi</b>	<b>13,04</b>	%	12,41	%	95,17	<b>25.000.000</b>	16.508.500	66,03			
a	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30	Lembaga	29,00	Lembaga	96,67	25.000.000	16.508.500	66,03	100		
<b>3</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perusahaan yang menerapkan pengukuran produktivitas tenaga kerja</b>	<b>4,03</b>	%	4,68	%	116,13	<b>45.000.000</b>	42.044.500	93,43			



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00	45.000.000	42.044.500	93,43	100		
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	22,50	%	14,05	%	62,44	<b>3.520.000.000</b>	3.309.251.730	94,01			
1	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	<b>100</b>	%	100,00	%	100,00	<b>2.980.000.000</b>	2.814.919.490	94,46			
a	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200	orang	200,00	orang	100,00	80.000.000	24.978.000	31,22	100		
b	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	50	orang	100,00	orang	200,00	100.000.000	67.874.800	67,87	100		
c	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	300	Orang	298,00	Orang	99,33	2.800.000.000	2.722.066.690	97,22	100		
2	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Presentase penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)</b>	<b>2</b>	%	<b>5,51</b>	%	275,50	<b>425.000.000</b>	<b>393.842.500</b>	92,67			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500	orang	1927,00	orang	77,08	25.000.000	23.603.000	94,41	100		
b	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	320	orang	272,00	orang	85,00	400.000.000	370.239.500	92,56	100		
3	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Indonesia (TKI) yang mendapat sertifikat</b>	<b>100</b>	%	100,00	%	100,00	<b>100.000.000</b>	89.741.740	89,74			
a	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20	orang	20,00	orang	100,00	100.000.000	89.741.740	89,74	100		
4	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase notifikasi TKA</b>	<b>60</b>	%	0,00	%	-	<b>15.000.000</b>	10.748.000	71,65		Karena belum ada perda retribusi Kabupaten Klaten Maka pemda klaten belum berhak menarik retribusi atas notifikasi TKA	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16	Perusahaan	16,00	Perusahaan	100,00	15.000.000	10.748.000	71,65	100		
IV	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan</b>	<b>100</b>	%	100,00	%	100,00	<b>323.000.000</b>	196.884.350	60,95			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>	<b>21</b>	%	6,20	%	29,52	<b>57.000.000</b>	35.292.000	61,92			
a	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	200	Perusahaan	184,00	Perusahaan	92,00	32.000.000	18.172.000	56,79	100		
b	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4	Laporan	4,00	Laporan	100,00	25.000.000	17.120.000	68,48	100		
2	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perusahaan yang dilakukan pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4,7</b>	%	5,63	%	119,79	<b>266.000.000</b>	161.592.350	60,75			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4	Perkara	4,00	Perkara	100,00	69.000.000	59.655.200	86,46	100		
b	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	20	Perkara	9,00	Perkara	45,00	17.000.000	4.475.000	26,32	100		
c	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	20	Asosiasi /S	20,00	Asosiasi/ S	100,00	10.000.000	7.245.500	72,46	100		
d	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2	Lembaga	3,00	Lembaga	150,00	100.000.000	58.724.400	58,72	100		
e	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	61000	Orang	55.565	Orang	91,09	70.000.000	31.492.250	44,99	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>14.215.336.270</b>	<b>10.168.086.953</b>	<b>71,53</b>			

URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DISSOSP3APPKB

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD</b>	<b>0,6</b>	<b>%</b>	<b>2,18</b>	<b>%</b>	<b>363</b>	<b>77.450.000</b>	<b>73.107.817</b>	<b>94,39</b>			
1	<b>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perangkat daerah menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>47.700.000</b>	<b>44.982.467</b>	<b>94,30</b>			
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100	25.000.000	22.820.567	91,28	100		
b	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Perangkat Daerah	20	Perangkat Daerah	100	22.700.000	22.161.900	97,63	100		
2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase organisasi masyarakat aktif dalam Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>32</b>	<b>%</b>	<b>32</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>24.750.000</b>	<b>23.125.350</b>	<b>93,44</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Organisasi	15	Organisasi	100	24.750.000	23.125.350	93,44	100		
3	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan yang aktif</b>	<b>30</b>	<b>%</b>	<b>35</b>	<b>%</b>	<b>117</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>			
a	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10	%	15	%	150	5.000.000	5.000.000	100,00	100		
II	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.720.000</b>	<b>37,20</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten /Kota yang tertangani sesuai standar</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.720.000</b>	<b>37,20</b>			
a	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15	Orang	15	Orang	100	10.000.000	3.720.000	37,20	100		
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.061.000.000</b>	<b>1.042.421.056</b>	<b>98,25</b>			
1	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>35</b>	<b>%</b>	<b>35</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.061.000.000</b>	<b>1.042.421.056</b>	<b>98,25</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	52	Perangkat Daerah	52	Perangkat Daerah	100	276.000.000	274.728.628	99,54	100		
b	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Laporan	2	Laporan	100	785.000.000	767.692.428	97,80	100		
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak</b>	<b>46,2</b>	<b>%</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>108</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.995.100</b>	<b>99,95</b>			
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase OPD yang menyajikan data gender dan anak</b>	<b>55</b>	<b>%</b>	<b>44</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.995.100</b>	<b>99,95</b>			
a	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Dokumen	20	Dokumen	100	10.000.000	9.995.100	99,95	100		
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase desa/kelurahan layak anak</b>	<b>76,3</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>131</b>	<b>395.800.000</b>	<b>373.299.497</b>	<b>94,32</b>			



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase OPD, Ormas/LSM/PT, dunia usaha yang telah melaksanakan kegiatan responsif PUHA</b>	<b>30</b>	<b>%</b>	<b>30</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>253.000.000</b>	<b>236.358.997</b>	<b>93,42</b>			
a	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	52	Organisasi	52	Organisasi	100	223.000.000	207.359.597	92,99	100		
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Dokumen	20	Dokumen	100	30.000.000	28.999.400	96,66	100		
2	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat penguatan dan pengembangan</b>	<b>65</b>	<b>%</b>	<b>65</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>142.800.000</b>	<b>136.940.500</b>	<b>95,90</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	2	Dokumen	100	115.800.000	109.945.000	94,94	100		
b	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Dokumen	10	Dokumen	100	27.000.000	26.995.500	99,98	100		
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.996.400</b>	<b>99,98</b>			
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah Ramah Anak ( Mempunyai Kebijakan anti kekerasan di Sekolah)	32	%	32	%	100	15.000.000	14.996.400	99,98			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Perangkat Daerah	4	Perangkat Daerah	100	15.000.000	14.996.400	99,98	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>1.569.250.000</b>	<b>1.517.539.870</b>	<b>96,70</b>			

## URUSAN : PANGAN

## DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>82</b>	<b>%</b>	<b>82</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>31.629.287.038</b>	<b>28.086.751.569</b>	<b>88,80</b>	<b>100</b>		
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>54.000.000</b>	<b>52.176.400</b>	<b>96,62</b>	<b>100</b>		
a	<i>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	12	dokumen	12	dokumen	100	40.000.000	38.323.400	95,81	100		
b	<i>Evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	7	laporan	7	laporan	100	14.000.000	13.853.000	98,95	100		
2	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>29.710.789.739</b>	<b>26.259.284.335</b>	<b>88,38</b>	<b>100</b>		
a	<i>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	276	orang/bulan	276	orang/bulan	100	29.570.789.739	26.119.294.335	88,33	100		-
b	<i>Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	4	dokumen	4	dokumen	100	140.000.000	139.990.000	99,99	100		
3	<b>Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>35.000.000</b>	<b>31.523.798</b>	<b>90,07</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8	dokumen	8	dokumen	100	35.000.000	31.523.798	90,07	100		
<b>4</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>42.500.000</b>	<b>26.560.000</b>	<b>62,49</b>	<b>100</b>		
a	Bimbingan teknis implementasi peraturan per Undang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35	orang	35	orang	100	42.500.000	26.560.000	62,49	100	Penambahan anggaran di APBD Perubahan banyak yang dialokasikan untuk honor narasumber tetapi tidak dapat terserap keseluruhan	
<b>5</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>82</b>	<b>%</b>	<b>91</b>	<b>204.625.320</b>	<b>198.162.257</b>	<b>96,84</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	paket	16	paket	100	20.000.000	19.624.000	98,12	100		
b	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65	paket	65	paket	100	18.300.000	17.390.000	95,03	100		
c	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14	paket	14	paket	100	51.325.320	48.250.800	94,01	100		
d	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	laporan	60	laporan	100	40.000.000	38.540.000	96,35	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
e	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	laporan	100	laporan	100	75.000.000	74.357.457	99,14	100		
6	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>40.000.000</b>	<b>39.783.000</b>	<b>99,46</b>	<b>100</b>		
a	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	unit	40	unit	100	40.000.000	39.783.000	99,46	100		
7	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>907.371.979</b>	<b>865.830.642</b>	<b>95,42</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	100	10.000.000	9.999.000	99,99	100		
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	100	200.000.000	172.440.671	86,22	100		
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	100	697.371.979	683.390.971	98,00	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara	90	%	90	%	100	635.000.000	613.431.137	96,60	100		
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	300	unit	300	unit	100	100.000.000	89.613.450	89,61	100		
b	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	unit	5	unit	100	500.000.000	490.912.787	98,18	100		
c	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	40	unit	40	unit	100	35.000.000	32.904.900	94,01	100		
II	<b><u>PENGLOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</u></b>	<b><u>Ketersediaan pangan utama/beras</u></b>	275.720	Ton	286.141	Ton	103,78	1.650.000.000	1.617.682.750	98,04	100		
1	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang disediakan	47,83	%	47,83	%	100	1.650.000.000	1.617.682.750	98,04	100		
a	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	2	Unit	2	Unit	100	1.650.000.000	1.617.682.750	98,04	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
III	<b>PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>ketersediaan energi</b>	3.045	K.kal/kapita/hari	2.862	K.kal/kapita/hari	93,99	314.000.000	296.447.395	94,41	100		
		<b>ketersediaan protein</b>	85,5	gram/kapita/hari	79,41	gram/kapita/hari	92,88						
1	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan</b>	<b>Persentase kelompok wanita tani yang mendapatkan pendampingan penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya</b>	33,33	%	33,33	%	100	264.000.000	255.301.800	96,71	100		
a	<i>Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal</i>	<i>Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia</i>	1	laporan	1	laporan	100	124.000.000	120.742.400	97,37	100		
b	<i>Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan</i>	<i>Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan</i>	3	dokumen	3	dokumen	100	32.500.000	32.500.000	100,00	100		
c	<i>Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan</i>	<i>Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan</i>	4	unit	4	unit	100	32.500.000	30.309.900	93,26	100		
d	<i>Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia</i>	<i>Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan</i>	1	unit	1	unit	100	75.000.000	71.749.500	95,67	100		
2	<b>Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase koordinasi Dewan Ketahanan pangan daerah yang diselenggarakan</b>	100	%	100	%	100	10.000.000	9.500.000	95,00	100		
a	<i>Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota</i>	1	laporan	1	laporan	100	10.000.000	9.500.000	95,00	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</b>	<b>Persentase pelaku usaha pengolahan pangan lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka Pencapaian Target Konsumsi Pangan</b>	25	%	25	%	100	40.000.000	31.645.595	79,11	100		
a	<i>Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal</i>	<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	2	laporan	2	laporan	100	40.000.000	31.645.595	79,11	100	Efisiensi belanja perjalanan dinas karena perjalanan ke DKI Jakarta mendapat pembiayaan dari Bapanas	
IV	<b><u>PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</u></b>	<b><u>persentase penanganan daerah rawan pangan</u></b>	12	%	10,25	%	85,42	50.000.000	41.690.600	83,38	100		
1	<b>Penanganan Kerawanan Pangan kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah lokasi daerah rawan pangan yang tertangani</b>	6	lokasi	8	lokasi	133,33	50.000.000	41.690.600	83,38	100		
a	<i>Koordinasi dan sinkronisasi penangananan kerawanan pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota</i>	1	laporan	1	laporan	100	30.000.000	27.890.800	92,97	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	dokumen	1	dokumen	100	20.000.000	13.799.800	69,00	100	Aktivitas kegiatan terbatas hanya penyaluran cadangan pangan saja pada daerah yang terkena bencana maupun rawan bencana karena stock masih banyak sehingga tidak ada pengadaan cadangan pangan	
V	<b>PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman</b>	<b>84</b>	<b>%</b>	<b>81</b>	<b>%</b>	<b>96,43</b>	<b>35.000.000</b>	<b>33.599.900</b>	<b>96,00</b>	<b>100</b>		
1	<b>Pelaksanaan Pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase produsen pangan segar dan pangan olahan yang mendapatkan pembinaan pengawasan keamanan pangan segar</b>	<b>40</b>	<b>%</b>	<b>40</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>35.000.000</b>	<b>33.599.900</b>	<b>96,00</b>	<b>100</b>		
a	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota yang Dibina	1	dokumen	1	dokumen	100	35.000.000	33.599.900	96,00	100		
	<b>TOTAL</b>							<b>33.678.287.038</b>	<b>30.076.172.214</b>	<b>89,30</b>			

**URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13.189.245.698</b>	<b>12.055.892.515</b>				
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>121.000.000</b>	<b>108.420.650</b>				
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	2	dokumen	2	dokumen	100	60.000.000	55.189.700	92	100,00		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	dokumen	1	dokumen	100	61.000.000	53.230.950	87	100,00		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10.710.945.778</b>	<b>9.840.369.275</b>				
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132	orang	131	orang	99,2424242	10.660.945.778	9.794.434.775	91,87	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13.189.245.698</b>	<b>12.055.892.515</b>				
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12	bulan	12	bulan	100	50.000.000	45.934.500	92	100		
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000</b>	<b>95.100.000</b>				
a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	orang	5	orang	100	100.000.000	95.100.000	95,10	100		
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>565.000.000</b>	<b>519.660.337</b>				
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	unit	10	unit	100	46.835.400	46.833.950	100	100		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	unit	10	unit	100,00	140.000.000	134.831.500	96,31	100		
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	eksemplar	6	eksemplar	100	70.000.000	52.870.500	75,53	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13.189.245.698</b>	<b>12.055.892.515</b>				
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	eksemplar	7	eksemplar	100	18.164.600	18.164.600	100	100		
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70	kali	85	kali	121,428571	105.000.000	85.453.000	81	100		
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	kali	120	kali	120	185.000.000	181.506.787	98	100		
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>340.000.000</b>	<b>331.250.000</b>				
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	5	unit	166,666667	340.000.000	331.250.000	97	100		
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>634.886.920</b>	<b>501.348.202</b>				
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	eksemplar	1000	eksemplar	100	7.500.000	7.475.000	99,67	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13.189.245.698</b>	<b>12.055.892.515</b>				
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarJumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	bulan	12	bulan	100	130.000.000	65.369.536	50	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	orang	12	orang	100,00	497.386.920	428.503.666	86	100		
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>717.413.000</b>	<b>659.744.051</b>				
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	unit	15	unit	100	326.943.000	283.726.051	87	100		
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	2	unit	100	255.470.000	253.708.000	99	100		
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	15	unit	150	135.000.000	122.310.000	91	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	100	%	100	13.189.245.698	12.055.892.515				
II	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	%	100	%	100	724.322.000	648.895.779				
1	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	Presentase Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	67	%	67	%	100	324.322.000	279.558.815				
a	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang tersusun	1	dokumen	1	dokumen	100	125.000.000	104.350.500	83,48	100		
b	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	1	dokumen	1	dokumen	100	199.322.000	175.208.315	87,90	100		
2	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	presentase dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang tersusun	100	%	100	%	100	400.000.000	369.336.964				
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/kota yang tersusun	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/kota yang tersusun	1	dokumen	2	dokumen	200	400.000.000	369.336.964	92,33	100		
III	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Cakupan pemantauan kualitas air	100	%	100	%	100	321.843.920	269.425.197				
		Cakupan pemantauan kualitas udara	100	%	100	%	100						
		Presentase kampung iklim yang terbentuk	40	%	40	%	100						
1	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Persentase peantauan pengujian kualitas air dan udara yang dilakukan	100	%	100	%	100	239.768.000	213.945.079				

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13.189.245.698</b>	<b>12.055.892.515</b>				
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	2	dokumen	2	dokumen	100	169.768.000	152.191.604	90	100		
b	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1	dokumen	1	dokumen	100	70.000.000	61.753.475	88	100		
2	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>82.075.920</b>	<b>55.480.118</b>				
a	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisai informasi peringatan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	laporan	1	dokumen	100	82.075.920	55.480.118	68	100		
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase RTH publik yang terkelola dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>6.747.040.080</b>	<b>6.417.737.229</b>				
1	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>6.747.040.080</b>	<b>6.417.737.229</b>				



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13.189.245.698</b>	<b>12.055.892.515</b>				
a	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	11,346	ha	11,346	ha	100	6.647.040.080	6.330.281.444	95	100		
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	0,25	ha	0,25	ha	<b>100</b>	80.000.000	70.321.435				
b	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	2	orang	2	orang	<b>100</b>	20.000.000	17.134.350	86	100		
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>60.000.000</b>	<b>32.363.200</b>				
<b>1</b>	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>Presentase Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang tertangani</b>	<b>70</b>	<b>%</b>	<b>70</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>40.000.000</b>	<b>22.233.000</b>				
a	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10	dokumen	10	dokumen	100	20.000.000	13.335.500	66,68	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13.189.245.698</b>	<b>12.055.892.515</b>				
b	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10	laporan	10	laporan	100	20.000.000	8.897.500	44	100		
2	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terlaksana</b>	60	%	0	%	0	20.000.000	10.130.200			Ijin pengumpulan Limbah B3 dikelola oleh Provinsi	
a	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10	dokumen	0	dokumen	0	20.000.000	10.130.200	51	100	*Tidak terlaksananya kegiatan di sebabkan belum adanya regulasi / payung hukum dalam kerjasama penanganan pengumpulan limbah b3	akan diusulkan regulasi dalam pengumpulan limbah B3
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota</b>	<b>65</b>	<b>%</b>	<b>63,33</b>	<b>%</b>	<b>97,4307692</b>	<b>89.152.000</b>	<b>71.856.883</b>				

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13.189.245.698</b>	<b>12.055.892.515</b>				
1	<b>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase usaha dan/kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi</b>	<b>5</b>	<b>%</b>	<b>5</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>89.152.000</b>	<b>71.856.883</b>				
a	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30	dokumen	30	dokumen	100	30.000.000	19.408.700	65	100		
b	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi	25	laporan	25	laporan	100	39.152.000	35.419.433	90	100		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	10	dokumen	10	dokumen		20.000.000	17.028.750	85	100		
VII	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>178.897.000</b>	<b>105.011.000</b>				
		<b>Persentase saka kalpataru yang dibina</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>						

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	100	%	100	13.189.245.698	12.055.892.515				
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga yang dilakukan	100	%	100	%	100	178.897.000	105.011.000				
a	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	5	lembaga	8	lembaga	160	30.000.000	20.807.500				
b	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10	dokumen	16	dokumen	160	148.897.000	84.203.500	57	100		
VIII	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat/Sekolah /Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	3	orang	3	orang	100	590.000.000	526.500.300				
		Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	100	%	100	%	100						
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup	3	jenis	2	jenis	66,6666667	590.000.000	526.500.300				

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100	%	100	%	100	13.189.245.698	12.055.892.515				
a	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH penghargaan lingkungan hidup	3	entitas	2	entitas	66,6666667	590.000.000	526.500.300	89	100		
IX	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	100	%	100	%	100	39.661.000	21.833.975				
1	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang terselesaikan	100	%	100	%	100	39.661.000	21.833.975				
a	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindak lanjuti/ditangani	20	dokumen	20	dokumen	100	19.661.000	13.322.425				

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>13.189.245.698</b>	<b>12.055.892.515</b>				
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	umlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	20	dokumen	20	dokumen	100	20.000.000	8.511.550				
IX	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani</b>	<b>76,32</b>	%	<b>72,62</b>	%	<b>95,15</b>	<b>20.082.256.164</b>	<b>18.095.304.787</b>				
		<b>Persentase jumlah sampah yang berkurang</b>	<b>28</b>	%	<b>29,64</b>	%	<b>105,86</b>						
1	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani</b>	<b>76</b>	%	<b>72,62</b>	%	<b>95,5526316</b>	<b>20.082.256.164</b>	<b>18.095.304.787</b>				
a	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	29000	ton/tahun	79000	ton/tahun	272,413793	9.062.109.830	8.696.849.397	95,97	100	Tidak terlaksananya pengadaan tanah uruk untuk TPA Troketon dikarenakan tidak di temui kesepakatan harga antara penyedia dan pejabat pengadaan di sistem nego e-katalog	Di tahun anggaran 2024 akan diadakan pengadan di awal tahun

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13.189.245.698</b>	<b>12.055.892.515</b>				
b	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10	kelompok	10	kelompok	100	1.344.339.989	1.219.871.908	90,74	100		
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2	dokumen	1	dokumen	50	92.700.000	80.379.148	86,71	100		
d	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5	unit	5	unit	100	9.583.106.345	8.098.204.334	84,51	100		
		<b>Jumlah</b>						<b>42.022.417.862</b>	<b>38.244.820.865</b>	<b>91,01</b>			

**URUSAN : Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

**DISDUKCAPIL**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>9.543.452.836</b>	<b>8.245.004.410</b>	<b>86,39</b>	<b>100</b>		
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>16.000.000</b>	<b>15.335.600</b>	<b>95,85</b>	<b>100</b>		
a	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	6	Dokumen	100	5.000.000	4.844.000	96,88	100		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Laporan	7	Laporan	100	6.000.000	5.756.000	95,93	100		
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	Laporan	100	5.000.000	4.735.600	94,71	100		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.259.217.251</b>	<b>4.449.030.358</b>	<b>84,59</b>	<b>100</b>		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	Orang/bulan	35	Orang/bulan	92,11	5.236.297.251	4.426.110.358	84,53	100	Plt. Kadinas, Sekretaris dan Kabid PIKAK kosong	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	Dokumen	100	22.920.000	22.920.000	100,00	100		
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>354.180.000</b>	<b>277.852.900</b>	<b>78,45</b>	<b>100</b>		
a	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	506	Orang	506	Orang	100	244.000.000	172.924.900	70,87	100		
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	86	Orang	86	Orang	100	110.180.000	104.928.000	95,23	100		
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.385.633.000</b>	<b>2.150.946.996</b>	<b>90,16</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	9.373.000	8.472.500	90,39	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	100	2.173.350.000	1.944.316.350	89,46	100		
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	4.000.000	4.000.000	100,00	100		
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	14.350.000	11.539.600	80,42	100		
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	Dokumen	4	Dokumen	100	4.560.000	4.560.000	100,00	100		
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75	Laporan	75	Laporan	100	30.000.000	28.433.000	94,78	100		
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Laporan	90	Laporan	100	150.000.000	149.625.546	99,75	100		
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>713.408.098</b>	<b>679.832.050</b>	<b>95,29</b>	<b>100</b>		
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	31	unit	31	unit	100	713.408.098	679.832.050	95,29	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>581.214.487</b>	<b>538.453.991</b>	<b>92,64</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100	3.908.049	2.647.000	67,73	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	194.250.438	193.826.000	99,78	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	383.056.000	341.980.991	89,28	100		
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>233.800.000</b>	<b>133.552.515</b>	<b>57,12</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	unit	31	unit	100	92.680.000	92.585.015	99,90	100		
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90	unit	90	unit	100	141.120.000	40.967.500	29,03	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
II	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Perekaman KTP Elektronik</b>	<b>99,75</b>	<b>%</b>	<b>98,90</b>	<b>%</b>	<b>99,15</b>	<b>647.910.000</b>	<b>628.310.068</b>	<b>96,97</b>	<b>100</b>		
		<b>Cakupan kepemilikan KK</b>	<b>99,9</b>	<b>%</b>	<b>99,97</b>	<b>%</b>	<b>100,07</b>				<b>100</b>		
		<b>Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA</b>	<b>67,2</b>	<b>%</b>	<b>68,81</b>	<b>%</b>	<b>102,40</b>				<b>100</b>		
1	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Dokumen surat pindah datang penduduk</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>634.980.000</b>	<b>617.274.768</b>	<b>97,21</b>	<b>100</b>		
		<b>Persentase ke-valid-an data kependudukan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan KK, KTP, KIA</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
a	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5	Dokumen	5	Dokumen	100	607.856.000	591.240.568	97,27	100		
b	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5	Laporan	5	Laporan	100	17.124.000	16.455.200	96,09	100		
c	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2	Dokumen	2	Dokumen	100	10.000.000	9.579.000	95,79	100		
2	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>12.930.000</b>	<b>11.035.300</b>	<b>85,35</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	Laporan	4	Laporan	100	6.930.000	5.765.300	83,19	100		
b	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12	Laporan	12	Laporan	100	6.000.000	5.270.000	87,83	100		
III	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran.</b>	<b>98,94</b>	<b>%</b>	<b>99,12</b>	<b>%</b>	<b>100,18</b>	<b>432.810.000</b>	<b>412.120.230</b>	<b>95,22</b>	<b>100</b>		
		<b>Cakupan penerbitan akta kematian</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
		<b>Cakupan penerbitan akta perkawinan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
		<b>Cakupan penerbitan akta perceraian</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
		<b>Cakupan penerbitan akta pengesahan anak</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
		<b>Cakupan penerbitan pengangkatan anak</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
1	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Jumlah dan jenis dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>427.860.000</b>	<b>407.980.230</b>	<b>95,35</b>	<b>100</b>		
a	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6	dokumen	6	dokumen	100	427.860.000	407.980.230	95,35	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	100	%	100	%	100	4.950.000	4.140.000	83,64	100		
a	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12	Laporan	12	Laporan	100	4.950.000	4.140.000	83,64	100		
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase ketersediaan database kependudukan</b>	100	%	100	%	100	106.209.000	99.782.900	93,95	100		
		<b>Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama</b>	22	%	96,08	%	436,73				100		
1	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Persentase Jumlah OPD yang bekerja sama dalam pemanfaatan data</b>	100	%	94,12	%	94,12	17.054.000	15.157.800	88,88	100		
		<b>Persentase Jumlah Inovasi pelayanan</b>	100	%	100	%	100				100		
		<b>Persentase jumlah perjanjian kerjasama</b>	100	%	94,12	%	94,12				100		
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	dokumen	12	dokumen	100	9.619.000	7.982.500	82,99	100		
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5	dokumen	5	dokumen	100	7.435.000	7.175.300	96,51	100		
2	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	100	%	100	%	100	4.155.000	4.050.000	97,47	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1	dokumen	1	dokumen	100	4.155.000	4.050.000	97,47	100		
<b>3</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>70.000.000</b>	<b>68.750.000</b>	<b>98,21</b>	<b>100</b>		
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	laporan	12	laporan	100	70.000.000	68.750.000	98,21	100		
<b>4</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>15.000.000</b>	<b>11.825.100</b>	<b>78,83</b>	<b>100</b>		
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	Laporan	1	Laporan	100	15.000.000	11.825.100	78,83	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
V	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Ketersediaan profil kependudukan tahunan</b>	100	%	100	%	100	53.882.000	51.527.000	95,63	100		
1	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>	<i>Jumlah Jenis Dokumen Profil Kependudukan Tersusun</i>	2	<i>jenis</i>	2	<i>jenis</i>	100	53.882.000	51.527.000	95,63	100		
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	dokumen	1	dokumen	100	53.882.000	51.527.000	95,63	100		
		<b>Jumlah</b>						<b>10.784.263.836</b>	<b>9.436.744.608</b>	<b>87,50</b>			



**URUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
DISPERMASDES**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.386.987.801</b>	<b>3.701.713.131</b>	<b>84,38</b>	<b>100</b>		
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.707.694.933</b>	<b>3.045.807.786</b>	<b>82,15</b>	<b>100</b>		
<b>a</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	Orang	24	Orang	<b>92,31</b>	3.707.694.933	3.045.807.786	82,15	92		
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>182.069.000</b>	<b>177.211.980</b>	<b>97,33</b>	<b>100</b>		
<b>a</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	<b>100</b>	2.980.000	2.362.500	79,28	100		
<b>b</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	<b>100</b>	14.550.000	10.609.600	72,92	100		
<b>c</b>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	<b>100</b>	31.815.000	31.815.000	100,00	100		
<b>d</b>	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2	Dokumen	<b>100</b>	2.724.000	2.724.000	100,00	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40	Laporan	40	Laporan	100	30.000.000	29.963.000	99,88	100		
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	60	Laporan	100,00	100.000.000	99.737.880	99,74	100		
3	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>		100	%	100	%	100,00	110.000.000	104.708.000		100		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	6	Unit	100,00	110.000.000	104.708.000	95,19	100		
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	100%	%	100	%	100	121.095.868	116.011.335	95,80	100		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	4	Laporan	100,00	2.000.000	1.894.000	94,70	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	40.000.000	38.975.359	97,44	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	Laporan	15	Laporan	100	79.095.868	75.141.976	95,00	100		
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara</b>	100%	%	100	%	100	266.128.000	257.974.030	96,94	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	unit	21	unit	100	85.056.000	82.173.683	96,61	100		
b	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1	unit	1	unit	100	75.000.000	71.827.323	95,77	100		
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	15	unit	15	unit	100	106.072.000	103.973.024	98,02	100		
II	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>140</b>	<b>%</b>	<b>140</b>	<b>36.529.300</b>	<b>36.175.556</b>		<b>140</b>		
	<b>Fasilitasi Kerja sama Antar Desa</b>	<b>Prosentase desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>140</b>	<b>%</b>	<b>140</b>	<b>36.529.300</b>	<b>36.175.556</b>		<b>140</b>		
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	36.529.300	36.175.556	99,03	100		
II	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase BUMDes berkembang dan Maju</b>	<b>15,86</b>	<b>%</b>	<b>14,28</b>	<b>%</b>	<b>90,04</b>	<b>5.523.371.125</b>	<b>5.299.850.041</b>	95,95	<b>92</b>		
		<b>Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>7,29</b>	<b>%</b>	<b>12,19</b>	<b>%</b>	<b>167,22</b>	<b>5.523.371.125</b>	<b>5.299.850.041</b>	95,95	<b>167</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3.693.137.725	3.648.900.724	98,80	100		
b	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	2	Dokumen	2	Dokumen	100	50.347.300	30.682.000	60,94	100		
c	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	10.000.000	9.409.450	94,09	200		
d	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	246	Orang	345	Orang	140,24	256.991.000	248.535.000	96,71	140		
e	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2	Dokumen	2	Dokumen	100	120.000.000	119.873.620	99,89	100		
f	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	1	Laporan	1	Laporan	100	800.000.000	713.078.400	89,13	100		
g	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	50.895.100	49.809.620	97,87	100		
h	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	28	Dokumen	28	Dokumen	100	17.500.000	12.638.000	72,22	168		
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	363	Orang	363	Orang	100	162.500.000	137.889.200	84,85	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	150	Desa/kel	153	Desa/kel	102	350.000.000	323.799.427	92,51	2214		
i	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	12.000.000	5.234.600	43,62	100		
III	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase PKK aktif</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.600.065.600</b>	<b>1.559.592.368</b>	<b>97,47</b>	<b>100</b>		
		<b>Persentase Posyandu aktif</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
		<b>Prosentase Posyantek aktif</b>	<b>29,41</b>	<b>%</b>	<b>29,41</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
1	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.600.065.600</b>	<b>1.559.592.368</b>	<b>97,47</b>	<b>100</b>		
		<b>Persentase Posyantek yang dilakukan pembinaan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
		<b>Persentase Kelompok Pelestarian Adat Istiadat yang terfasilitasi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
		<b>Persentase posyandu yang dilakukan pembinaan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen hasil penataan , pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	1	Dokumen	1	Dokumen	100	16.000.000	8.521.050	53,26	100		
b	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang taruna) Lembaga adat desa/keluarahan dan masyarakat Hukum adat yang di tingkatkan kapasitasnya	4	lembaga	4	lembaga	100	1.003.700.000	975.982.622	97,24	100		
d	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	Laporan	3	Laporan	100	35.000.000	32.586.300	93,10	100		
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	Laporan	1	Laporan	100	40.000.000	37.515.516	93,79	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
f	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	Dokumen	1	Dokumen	100	505.365.600	504.986.880	99,93	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>11.546.953.826</b>	<b>10.597.331.096</b>	<b>91,78</b>			

**URUSAN : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
DISSOSP3APPKB**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase ketersediaan data pembangunan berwawasan kependudukan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.022.470.000</b>	<b>963.479.616</b>	<b>94</b>			
		<b>Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan</b>	<b>85,71</b>	<b>%</b>	<b>85,71</b>	<b>%</b>	<b>100</b>						
1	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Persentase kesesuaian kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>85</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.999.800</b>	<b>100</b>			
a	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	2	Dokumen	2	Dokumen	100	5.000.000	4.999.800	100	100		
2	<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen Data kependudukan dan KB tersusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.017.470.000</b>	<b>958.479.816</b>	<b>94</b>			
a	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	2.500.000	2.500.000	100	100		
b	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12	Laporan	12	Laporan	100	64.200.000	63.100.200	98	100		
c	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	4	Dokumen	4	Dokumen	100	474.970.000	468.199.168	99	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
d	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	14	Laporan	14	Laporan	100	349.800.000	336.043.000	96	100		
e	Pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2	Dokumen	2	Dokumen	100	126.000.000	88.637.448	70	100		
II	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Angka pemakaian kontrasepsi/CPR</b>	<b>72</b>	<b>%</b>	<b>65,88</b>	<b>%</b>	<b>91,5</b>	<b>7.708.145.000</b>	<b>6.272.314.113</b>	<b>81</b>			
		<b>Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmetneed)</b>	<b>15,45</b>	<b>%</b>	<b>12,54</b>	<b>%</b>	<b>119</b>						
1	<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase kecamatan yang dilakukan Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Banga Kencana)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.331.918.000</b>	<b>1.269.806.379</b>	<b>95</b>			
a	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10	Organisasi	10	Organisasi	100	206.368.000	190.576.499	92	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4	Dokumen	4	Dokumen	100	150.000.000	140.594.700	94	100		
c	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3	Laporan	3	Laporan	100	338.000.000	337.995.000	100	100		
d	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	24	Laporan	25	Laporan	104,17	557.550.000	521.840.180	94	100		
e	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4	Laporan	4	Laporan	100	80.000.000	78.800.000	99	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terdayaguna</b>	100	%	70	%	70	1.112.000.000	1.094.636.800	98			
a	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5	Organisasi	5	Organisasi	100	310.000.000	307.545.500	99	100		
b	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	401	Orang	4089	Orang	1019,70	802.000.000	787.091.300	98	100		
3	<b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP</b>	43	%	48	%	112	4.201.227.000	2.924.279.034	70			
a	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan	12	Laporan	100	99.600.000	46.340.900	47	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2700	Orang	2700	Orang	100	2.787.204.000	1.649.876.300	59	100		
c	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	15	Laporan	8	Laporan	53,33	10.000.000	2.800.000	28	100		
d	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7	Unit	7	Unit	100	1.215.923.000	1.147.213.750	94	100		
e	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3	Laporan	3	Laporan	100	43.500.000	34.926.000	80	100		
f	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	290	Orang	290	Orang	100	25.000.000	24.995.000	100	100		
g	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5	Laporan	5	Laporan	100	20.000.000	18.127.084	91	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Kampung KB yang dilakukan pembinaan	82	%	80	%	97,56	1.063.000.000	983.591.900	93			
a	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1	Dokumen	1	Dokumen	100	9.000.000	8.999.900	100	100		
b	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	71	kampung	71	kampung	100	1.054.000.000	974.592.000	92	100		
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB</b>	<b>83</b>	<b>%</b>	<b>79,48</b>	<b>%</b>	<b>96</b>	<b>6.715.200.000</b>	<b>6.289.639.828</b>	<b>94</b>			
		<b>Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB</b>	<b>75,92</b>	<b>%</b>	<b>88,48</b>	<b>%</b>	<b>117</b>						
		<b>Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB</b>	<b>65,38</b>	<b>%</b>	<b>62,90</b>	<b>%</b>	<b>96</b>						
		<b>Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB</b>	<b>63,79</b>	<b>%</b>	<b>73,43</b>	<b>%</b>	<b>115</b>						

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	75	%	75	%	100	6.709.200.000	6.283.689.928	94			
a	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20	Unit	20	Unit	100	360.000.000	232.820.000	65	100		
b	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2913	Orang	2913	Orang	100	6.117.300.000	5.825.015.400	95	100		
c	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	24	Kelompok	24	Kelompok	100	189.400.000	183.976.800	97	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
d	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	Laporan	1	Laporan	100	42.500.000	41.877.728	99	100		
2	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>presentase linsek/ormas/mitra yang telah berperan dalam kegiatan BKB,BKR,BKL dan UPPKS</b>	<b>40</b>	<b>%</b>	<b>40</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.949.900</b>	<b>99</b>			
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	Organisasi	1	Organisasi	100	6.000.000	5.949.900	99	100		
		<b>JUMLAH</b>						<b>15.445.815.000</b>	<b>13.525.433.557</b>	<b>87,57</b>			

**URUSAN : PERHUBUNGAN  
DINAS PERHUBUNGAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>99,14</b>	<b>%</b>	<b>94,30</b>	<b>%</b>	<b>95,12</b>	<b>37.026.543.081</b>	<b>36.070.897.377</b>	<b>97,42</b>	<b>100</b>		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100	%	100	%	100	20.000.000	20.000.000	100,00	100		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	8	dokumen	8	dokumen	100	20.000.000	20.000.000	100,00	100		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	%	100	%	100	5.305.135.081	4.807.288.084	90,62	100		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	48	orang/bin	48	orang/bl n	100	5.230.255.081	4.732.408.084	90,48	100		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12	bulan	12	bulan	100	74.880.000	74.880.000	100,00	100		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100	%	100	%	100	195.000.000	181.024.900	92,83	100		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150	paket	150	paket	100	195.000.000	181.024.900	92,83	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>684.457.000</b>	<b>659.736.266</b>	<b>96,39</b>	<b>100</b>		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12	paket	12	paket	100	35.000.000	34.833.000	99,52	100		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	84	paket	84	paket	100	150.000.000	142.674.500	95,12	100		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	17	paket	17	paket	100	140.000.000	132.298.400	94,50	100		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	dokumen	12	dokumen	100	6.910.000	6.821.700	98,72	100		
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	12	laporan	12	laporan	100	75.000.000	73.920.000	98,56	100		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	laporan	36	laporan	100	277.547.000	269.188.666	96,99	100		
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>94</b>	%	<b>92</b>	%	<b>97,87</b>	<b>1.167.000.000</b>	<b>1.099.747.449</b>	<b>94,24</b>	<b>100</b>		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	13	unit	13	unit	100	753.000.000	707.301.249	93,93	100		
2	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	28	unit	28	unit	100	114.000.000	109.123.400	95,72	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	36	unit	36	unit	100	300.000.000	283.322.800	94,44	100		
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>28.554.221.000</b>	<b>28.268.160.390</b>	<b>99,00</b>	<b>100</b>		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	12	laporan	12	laporan	100	5.000.000	5.000.000	100,00	100		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12	laporan	12	laporan	100	26.101.000.000	25.969.621.856	99,50	100		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	12	laporan	12	laporan	100	2.448.221.000	2.293.538.534	93,68	100		
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.100.730.000</b>	<b>1.034.940.288</b>	<b>94,02</b>	<b>100</b>		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	36	unit	36	unit	100	560.730.000	504.353.233	89,95	100		
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur Terpelihara	50	unit	50	unit	100	25.000.000	24.450.000	97,80	100		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi / terpelihara	1	unit	1	unit	100	400.000.000	391.548.055	97,89	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya/terpelihara	21	unit	21	unit	100	115.000.000	114.589.000	99,64	100		
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase kecelakaan lalu lintas</b>	<b>0,70</b>	<b>%</b>	<b>0,49</b>	<b>%</b>	<b>142,86</b>	<b>17.768.702.000</b>	<b>16.809.564.992</b>	<b>94,60</b>	<b>100</b>		
1	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang</b>	<b>72,85</b>	<b>%</b>	<b>72,85</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>11.261.627.900</b>	<b>10.541.942.630</b>	<b>93,61</b>	<b>100</b>		
		<b>Persentase prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
		<b>Persentase Traffic light ATCS terbangun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan tersedia	606	unit	787	jenis	130	7.062.127.900	6.663.373.700	94,35	100		
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah jenis perlengkapan jalan terpelihara	8.920	unit	8.920	jenis	100	4.199.500.000	3.878.568.930	92,36	100		
2	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Persentase Terminal Type C sesuai standard yang dioperasikan</b>	<b>83</b>	<b>%</b>	<b>83</b>	<b>unit</b>	<b>100</b>	<b>200.000.000</b>	<b>190.766.479</b>	<b>95,38</b>	<b>100</b>		
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal tipe C terpelihara	1	unit	1	unit	100	200.000.000	190.766.479	95,38	100		
3	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Persentase kapling parkir yang terkola dengan baik</b>	<b>31</b>	<b>%</b>	<b>31</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.177.818.700</b>	<b>98,15</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan, penertiban dan pengawasan parkir	12	laporan	12	laporan	100	1.200.000.000	1.177.818.700	98,15	100		
<b>4</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase kepemilikan KIR Angkutan umum</b>	<b>87,84</b>	<b>%</b>	<b>87,84</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.437.891.000</b>	<b>1.382.113.950</b>	<b>96,12</b>	<b>100</b>		
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor tersedia	2	unit	2	unit	100	807.891.000	783.050.400	96,93	100		
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penguji kompeten yang terfasilitasi	67	orang	67	orang	100	175.000.000	151.470.200	86,55	100		
3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor tersedia	1	dokumen	1	dokumen	100	255.000.000	254.837.800	99,94	100		
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor terpelihara	13	unit	13	unit	100	200.000.000	192.755.550	96,38	100		
<b>5</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase rekayasa lalu lintas tertangani</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.011.583.100</b>	<b>2.936.389.660</b>	<b>97,50</b>	<b>100</b>		
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12	laporan	12	laporan	100	646.119.000	619.581.720	95,89	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah uji coba dan sosialisasi manajemen rekayasa terlaksana	10	dokumen	10	dokumen	100	160.000.000	157.206.300	98,25	100		
3	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penertiban Galian golongan C terlaksana	12	laporan	12	laporan	100	2.055.464.100	2.013.888.290	97,98	100		
4	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota terlaksana	12	kali	12	kali	100	150.000.000	145.713.350	97,14	100		
<b>6</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase dampak lalu lintas tertangani</b>	<b>82</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>121,95</b>	<b>45.000.000</b>	<b>38.888.800</b>	<b>86,42</b>	<b>100</b>		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah sidang dokumen andalalin terlaksana	18	laporan	18	laporan	100	30.000.000	24.584.000	81,95	100		
2	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah rekomendasi andalalin yang terawasi	18	laporan	18	laporan	100	15.000.000	14.304.800	95,37	100		
<b>7</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Persentase PPNS Perhubungan terpenuhi</b>	<b>60</b>	<b>%</b>	<b>60</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>346.000.000</b>	<b>304.466.273</b>	<b>88,00</b>	<b>100</b>		
1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah PPNS LLAJ	66	orang	66	orang	<b>100</b>	206.000.000	193.533.423	93,95	100		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor terlaksana	24	laporan	24	laporan	<b>100</b>	50.000.000	48.751.000	97,50	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal terlaksana	24	laporan	24	laporan	100	10.000.000	9.597.450	95,97	100		
4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan bermotor Kab /Kota	Jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas Jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan	2	laporan	2	laporan	100	60.000.000	33.129.800	55,22	100		
5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota terlaksana	12	laporan	12	laporan	100	20.000.000	19.454.600	97,27	100		
8	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan bus sekolah</b>	<b>26,67</b>	<b>%</b>	<b>26,67</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>246.600.000</b>	<b>218.152.300</b>	<b>88,46</b>	<b>100</b>		
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	10	unit	10	unit	100	246.600.000	218.152.300	88,46	100		
9	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Trayek Perkotaan yang aktif</b>	<b>18,75</b>	<b>%</b>	<b>18,75</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.330.000</b>	<b>93,30</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek Perkotaan yang aktif	1	dokumen	1	dokumen	100	10.000.000	9.330.000	93,30	100		
<b>10</b>	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Trayek pedesaan yang aktif</b>	<b>62,50</b>	<b>%</b>	<b>62,50</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.696.200</b>	<b>96,96</b>	<b>100</b>		
1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Trayek pedesaan yang aktif	1	dokumen	1	dokumen	100	10.000.000	9.696.200	96,96	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>54.795.245.081</b>	<b>52.880.462.369</b>	<b>96,51</b>			

**URUSAN : Komunikasi dan Informatika**

**DISKOMINFO**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>7.144.369.180</b>	<b>6.115.059.099</b>	<b>86</b>			
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun</i>	<i>100</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>75.025.000</i>	<i>71.867.100</i>	<i>96</i>			
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	100	66.500.000	64.505.000	97	100		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	Laporan	4	Laporan	100	4.500.000	4.172.100	93	100		
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	4	Laporan	100	4.025.000	3.190.000	79	100		
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu</i>	<i>100</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>3.911.876.835</i>	<i>3.037.972.529</i>	<i>78</i>			



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27	Orang/Bulan	27	Orang/Bulan	100	3.869.711.835	2.998.937.529	77	100		
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	1	Dokumen	100	25.475.000	23.955.000	94	100		
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	18	Laporan	100	12.515.000	12.062.000	96	100		
d	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	2	Dokumen	100	4.175.000	3.018.000	72	100		
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.971.632.935</b>	<b>1.941.338.800</b>	<b>98</b>			
a	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10000	Orang	10000	Orang	100	1.971.632.935	1.941.338.800	98	100		
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>195.120.000</b>	<b>184.006.452</b>	<b>94</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15	Paket	15	Paket	100	36.670.000	33.778.600	92	100		
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	15	Paket	15	Paket	100	20.000.000	16.824.600	84	100		
c	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10	Laporan	10	Laporan	100	39.750.000	35.645.000	90	100		
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29	Laporan	29	Laporan	100	98.700.000	97.758.252	99	100		
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>247.625.000</b>	<b>238.821.650</b>	<b>96</b>			
a	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	2	Unit	2	Unit	100	91.900.000	85.950.000	94	100		
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	21	Unit	21	Unit	100	155.725.000	152.871.650	98	100		
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>136.259.410</b>	<b>122.282.924</b>	<b>90</b>			
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100	4.000.000	3.637.800	91	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	6	Laporan	6	Laporan	100	50.000.000	37.960.721	76	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	82.259.410	80.684.403	98	100		
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>606.830.000</b>	<b>518.769.644</b>	<b>85</b>			
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	22	Unit	22	Unit	100	319.480.000	244.613.644	77	100		
b	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	100	189.500.000	183.774.000	97	100		
c	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	22	Unit	22	Unit	100	97.850.000	90.382.000	92	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
II	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Disampaikan Ke Masyarakat	100	Persen	100	Persen	100	6.291.116.075	5.979.964.264	95			
		Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan	36,36	Persen	36,36	Persen	100						
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Informasi Publik Yang Disampaikan Kepada Masyarakat	100	Persen	100	Persen	100	6.291.116.075	5.979.964.264	95			
a	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	2	Dokumen	2	Dokumen	100	4.865.000	3.366.300	69	100	Kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik bersifat dinamis sehingga diperlukan penyesuaian secara cepat	Melakukan percepatan dalam perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik
b	Monitoring Opini dan Aspirasi	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	1	Dokumen	1	Dokumen	100	20.305.000	17.561.550	86	100	Isu publik yang beredar di masyarakat sangat dinamis	Memetakan hasil monitoring untuk menentukan Isu Prioritas dan/atau Isu Terindikasi Krisis
c	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	1	Dokumen	100	585.165.200	505.632.100	86	100	Terbatasnya sumber daya manusia dalam memproduksi konten	Menambah sumber daya manusia untuk memproduksi konten

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
d	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan Media Komunikasi Publik	2	Dokumen	2	Dokumen	100	1.172.870.000	1.128.907.700	96	100	Terbatasnya media komunikasi publik yang dimiliki Pemerintah Daerah	Menambah jumlah media komunikasi publik pemerintah daerah
e	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	Dokumen	1	Dokumen	100	24.250.000	22.263.800	92	100	Pengelolaan informasi publik belum sesuai dengan standar	Melakukan sosialisasi terkait standar pelayanan informasi publik
f	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3	Dokumen	3	Dokumen	100	350.000.000	345.000.000	99	100		
g	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya	60	Orang	60	Orang	100	189.312.875	184.187.640	97	100	Pergantian sumber daya manusia di bidang komunikasi publik yang tidak diikuti dengan <i>transfer knowledge</i>	Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
h	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	2	Dokumen	2	Dokumen	100	3.944.348.000	3.773.045.174	96	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
III	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	72,22	Persen	75	Persen	103,849349	7.722.144.000	7.571.251.351	98			
		Persentase Penambahan Akses Internet Di Ruang Publik	75,00	Persen	100	Persen	133,333333						
		Persentase Penambahan Akses (Titik) Internet Di OPD Yang Disediakan Dinas Kominfo	62,75	Persen	100	Persen	159,36255						
1	<i>Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Di Jaringan Intra Pemerintah Atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo</i>	100	Persen	100	Persen	100	6.612.374.000	6.505.158.860	98			
a	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	75	Unit	75	Unit	100	6.612.374.000	6.505.158.860	98	100		
2	<i>Pengelolaan E - Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>	Persentase Layanan Publik Dan Administrasi Pemerintahan Yang Tercantum Dalam Dokumen Proses Bisnis Yang Telah Diimplementasikan Secara Elektronik (Layanan SPBE)	65	Persen	75	Persen	115,384615	1.109.770.000	1.066.092.491	96			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah Yang Dikelola	1	Unit	1	Unit	100	188.225.000	186.788.623	99	100		
b	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	15	Unit	15	Unit	100	464.230.000	453.049.235	98	100		
c	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	2	Dokumen	2	Dokumen	100	237.400.000	224.350.063	95	100		
d	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	100	219.915.000	201.904.570	92	100		
		<b>Jumlah</b>						<b>21.157.629.255,00</b>	<b>19.666.274.714,00</b>	<b>92,95</b>			

**URUSAN : KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>19.352.743.049</b>	<b>16.638.799.343</b>	<b>85,98</b>			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	45.400.000	42.109.550	92,75			
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	Dokumen	6	Dokumen	100,00	35.000.000	32.044.990	91,56	100		
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Laporan	5	Laporan	100	10.400.000	10.064.560	96,77	100		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji tunjangan ASN dan laporan keuangan tepat waktu	100	%	100	%	100	11.950.123.049	10.376.515.917	86,83			
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	115	orang/bln	115	orang/bln	100,00	11.886.123.049	10.322.393.217	86,84	100		
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	Dokumen	2	Dokumen	100	44.000.000	35.040.000	79,64	100		
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	100	20.000.000	19.082.700	95,41	100		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi	100	%	100	%	100	3.000.000	2.781.350	92,71			
a	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2	Laporan	2	Laporan	100	3.000.000	2.781.350	92,71	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah yang teradministrasi	100	%	100	%	100	5.000.000	4.715.700	94,31			
a	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	100	5.000.000	4.715.700	94,31	100		
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu yang terselesaikan	100	%	100	%	100	202.000.000	193.458.500	95,77			
a	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12	Dokumen	12	Dokumen	100	2.000.000	1.323.170	66,16	100		
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	700	Orang	700	Orang	100	200.000.000	192.135.330	96,07	100		
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah terpenuhi tepat waktu	100	%	100	%	100	632.000.000	587.113.990	92,90			
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	paket	2	paket	100	52.000.000	46.081.300	88,62	100		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	paket	2	paket	100	70.000.000	66.006.910	94,30	100		
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	2	paket	100	83.000.000	82.948.900	99,94	100		
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2	Dokumen	100	7.000.000	6.900.000	98,57	100		
e	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan tamu	30	Laporan	30	Laporan	100	70.000.000	68.235.060	97,48	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	60	Laporan	100,00	350.000.000	316.941.820	90,55	100		
7	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana tepat waktu	100	%	100	%	100	504.000.000	396.677.800	78,71			
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	4	unit	100	67.000.000	62.702.800	93,59	100		
b	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2	unit	2	unit	100	437.000.000	333.975.000	76,42	100		
8	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100	%	100	%	100	5.415.220.000	4.482.003.997	82,77			
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100	3.500.000	2.802.410	80,07	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	870.000.000	368.029.123	42,30	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	4.541.720.000	4.111.172.464	90,52	100		
9	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100	%	100	%	100	596.000.000	553.422.539	92,86			

No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58	unit	58	unit	100,00	258.000.000	241.457.644	93,59	100		
b	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	unit	10	unit	100	20.000.000	19.734.370	98,67	100		
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	unit	100	290.000.000	264.684.025	91,27	100		
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	unit	20	unit	100	28.000.000	27.546.500	98,38	100		
<b>II</b>	<b>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b>	Persentase Koperasi aktif	71,20	%	34,32	%	48,20	<b>70.000.000</b>	<b>66.765.055</b>	95,38			
		Persentase Koperasi yang patuh	25,90	%	34,32	%	132,51						
1	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Persentase koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten atau kota yang diperiksa dan terawasi	14,29	%	5,3	%	37,09	70.000.000	66.765.055	95,38			
a	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	unit usaha	100	unit usaha	100,00	70.000.000	66.765.055	95,38	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
III	<b>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</b>	Persentase pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	31,6	%	32,12	%	101,65	<b>200.000.000</b>	<b>194.788.260</b>	97,39			
1	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Pengurus dan manager koperasi yang dilatih	100	orang	100	orang	100,00	200.000.000	194.788.260	97,39			
a	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah sdm yang memahami pengetahuan perkoperasian	100	orang	100	orang	100,00	200.000.000	194.788.260	97,39	100,00		
IV	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro</b>	Persentase UMKM yang melakukan kemitraan	0,32	%	0,30	%	93,75	<b>1.242.170.000</b>	<b>1.191.900.475</b>	95,95			
		Pertumbuhan usaha mikro	0,14	%	0,14	%	100,00						
1	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	Persentase UMKM yang terbina	0,78	%	1,36	%	174,36	1.242.170.000	1.191.900.475	95,95			
a	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	160	unit usaha	160	unit usaha	100,00	42.000.000	38.099.900	90,71	95		
b	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	300	unit usaha	300	unit usaha	100,00	1.200.170.000	1.153.800.575	96,14	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
V	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/pendampingan	3,5	%	3,35	%	95,71	<b>50.000.000</b>	<b>42.644.880</b>	85,29			
1	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</i>	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi dan terdampingi	3,5	%	3,35	%	95,71	50.000.000	42.644.880	85,29			
a	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM serta desain dan teknologi	30	unit usaha	30	unit usaha	100,00	50.000.000	42.644.880	85,29	100		
		<b>Jumlah</b>						<b>20.914.913.049</b>	<b>18.134.898.013</b>	<b>86,71</b>			

**URUSAN : PENANAMAN MODAL**

**DPMPTSP**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	100	%	<b>93,55</b>	%	<b>93,55</b>	5.289.754.038	4.285.244.719	81			
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	100	%	100	%	<b>100</b>	157.403.500	149.860.500	95			
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusun	10	Dokumen	10	Dokumen	100	157.403.500	149.860.500	95	100		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	100	%	100	%	<b>100</b>	2.892.216.360	2.117.263.373	73			
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18	orang/bulan	14	orang/bulan	77,78	2.862.216.360	2.088.383.373	73	100		
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	11	dokumen	91,67	30.000.000	28.880.000	96	100		
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	100	%	97,56	%	<b>97,56</b>	22.530.000	21.884.000	97			
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40	Paket	37	Paket	92,50	22.530.000	21.884.000	97	100		
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	80	%	78,59	%	<b>98,24</b>	572.348.991	560.504.040	98			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	Paket	10	Paket	100	15.000.000	14.989.000	100	100		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	65	Paket	57	Paket	87,69	89.875.000	85.023.500	95	100		
c	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5	Paket	5	Paket	100	75.564.000	73.517.900	97	100		
d	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3	Paket	3	Paket	100	100.000.000	99.959.700	100	100		
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	Dokumen	3	Dokumen	100	14.800.000	10.934.000	74	100		
f	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	130	Laporan	127	Laporan	97,69	123.194.000	122.225.000	99	100		
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75	Laporan	74	Laporan	98,67	153.915.991	153.854.940	100	100		
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu</b>	80	%	66	%	<b>82,50</b>	717.959.400	583.763.964	81			
a	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	20	unit	17	unit	85,00	292.550.000	269.783.000	92	100		
b	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20	unit	16	unit	80,00	425.409.400	313.980.964	74	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6	<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah tepat waktu</b>	80	%	66,91	%	<b>83,64</b>	712.295.787	655.260.710	92			
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumah Laporan penyediaan surat menyurat	2000	Laporan	1500	Laporan	75,00	5.000.000	2.770.000	55	100	Sebagian surat menyurat menggunakan Srikandi	Penggunaan rencana anggaran kedepannya
b	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	209.950.000	176.579.114	84	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	27	Laporan	26	Laporan	96,30	497.345.787	475.911.596	96	100		
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Presentase Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah terpelihara</b>	80	%	72	%	<b>90,00</b>	215.000.000	196.708.132	91			
a	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas opsional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21	unit	20	unit	95,24	143.000.000	130.329.432	91	100		
b	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20	unit	19	unit	95,00	10.000.000	9.630.000	96	100		
c	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	unit	0	unit	-	-	-	-	-		
d	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara/ direhabilitasi	100	unit	89	unit	89,00	62.000.000	56.748.700	92	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
II	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Peningkatan Pengembangan iklim investasi</b>	80	%	76,89	%	<b>96,11</b>	288.990.450	277.769.685	96			
1	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/ Intensif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Presentase penetapan pemberian fasilitas/ intensif di dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah</b>	80	%	80	%	<b>100</b>	217.345.450	208.673.935	96			
a	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal	1	Dokumen	1	Dokumen	100	157.345.450	151.532.735	96	100		
b	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan berusaha di Daerah	1	Kegiatan Usaha	1	Kegiatan Usaha	100	60.000.000	57.141.200	95	100		
2	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</b>	<b>Presentase Peta Potensi Investasi yang disusun</b>	100	%	100	%	<b>100</b>	71.645.000	69.095.750	96			
a	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100	71.645.000	69.095.750	96	100		
III	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Potensi investasi yang siap ditawarkan</b>	80	%	80	%	<b>100</b>	156.599.070	153.299.820	98			
1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Presentasi Promosi investasi yang terlaksana</b>	80	%	80	%	<b>100</b>	156.599.070	153.299.820	98			
a	Pelaksanaan Kegiatan Promosi penanaman Modal daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	5	Dokumen	5	Dokumen	100	156.599.070	153.299.820	98	100		
IV	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal</b>	80	%	76,87	%	<b>96,09</b>	222.367.000	208.705.500	94			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Presentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	80	%	76,87	%	<b>96,09</b>	222.367.000	208.705.500	94			
a	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistim Pelayanan Perzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	4642	Pelaku usaha	4463	Pelaku usaha	96,14	92.050.000	88.752.000	96	100		
b	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal lintas daerah Kabupaten/Kota bagi pelaku usaha	12	Kegiatan Usaha	11	Kegiatan Usaha	91,67	80.317.000	73.711.000	92	100		
c	Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	50	Orang	46	Orang	92,00	50.000.000	46.242.500	92	100		
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Pengendalian Penanaman Modal</b>	80	%	80	%	<b>100</b>	574.650.000	538.264.500	94			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	<b>Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota</b>	80	%	80	%	100	574.650.000	538.264.500	94			
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	150	Kegiatan Usaha	150	Kegiatan Usaha	100	209.450.000	209.316.000	100	100		
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	150	Pelaku Usaha	150	Pelaku Usaha	100	200.000.000	180.840.000	90	100		
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	150	Kegiatan Usaha	150	Kegiatan Usaha	100	165.200.000	148.108.500	90	100		
VI	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTIM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase peningkatan pengelolaan data dan sistim informasi penanaman modal</b>	80	%	75	%	93,75	261.487.500	255.126.200	98			
1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Presentase updating data</b>	80	%	75	%	93,75	261.487.500	255.126.200	98			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	64	Dokumen	60	Dokumen	93,75	261.487.500	255.126.200	98	100		
		<b>Jumlah</b>						<b>6.793.848.058</b>	<b>5.718.410.424</b>	<b>84</b>			

**URUSAN : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
DISBUDPORAPAR**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</b>	tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,08	%	<b>1,67</b>	%	<b>155,0</b>	697.710.036	681.909.285	98			
		tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4,45		4,33		<b>97,4</b>						
1	<b>penyadaraan, pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Pemula, dan Pemuda Kader Kab/Kota</b>	Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader yang dibina	20	%	20	%	<b>100</b>	630.225.036	614.499.285	98			
a	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan Kapasitas daya saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kab/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	20	orang	20	orang	<b>100</b>	12.371.000	12.371.000	100	100		
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan peningkatan Kapasitas daya saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Muda Pemula Kab/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	40	orang	40	orang	<b>100</b>	66.982.036	65.175.660	97	100		
c	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kab/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	5	Orang	5	Orang	<b>100</b>	42.495.500	41.681.125	98	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
d	Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, Advokasi, akses pengembangan diri penggunaan sarana dan prasarana tanpa Diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pengambilan keputusan Program strategis kepemudaan	Jumlah pemuda terpenuhi haknya melalui Perlindungan pemuda advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan sarpras tanpa deskriminasitif, patisipasi pemuda dalam proses perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan	50	orang	50	orang	100	90.129.250	86.487.250	96	100		
e	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1	dokumen	1	dokumen	100	50.642.750	48.942.750	97	100		
f	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	5	orang	5	orang	100	18.285.000	14.785.000	81	100		
g	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Sukarelawan pemuda	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	10	orang	70	orang	700	28.539.000	26.539.000	93	100		
h	Penyelenggaraan seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	10	orang	70	orang	700	320.780.500	318.517.500	99	100		
2	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase organisasi kepemudaan yg dikembangkan	20	%	20	%	100	67.485.000	67.410.000	100			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	30	orang	30	orang	100	17.485.000	17.410.000	100	100		
b	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1	dokumen	1	dokumen	100	50.000.000	50.000.000	100	100		
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan</b>	Persentase Atlet Berprestasi	4,29	%	53,07	%	<b>1237,07</b>	19.358.213.993	18.560.367.955	96			
<b>1</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab terlaksana	25	%	25	%	<b>100</b>	6.284.021.107	6.246.669.715	99			
a	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	1	unit	1	unit	100	8.587.500	8.334.500	97	100		
b	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	3	dokumen	2	dokumen	<b>66,666667</b>	5.856.450.000	5.856.450.000	100	100		
c	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	Unit	1	Unit	<b>100</b>	418.983.607	381.885.215	91	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase Penyelenggaraan Event OR Prestasi Tingkat Daerah	100	%	100	%	100	1.146.925.386	996.785.510	87			
a	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	dokumen	1	dokumen	100	850.000.000	715.238.750	84	90		
b	Penyelenggaraan kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1	dokumen	1	dokumen	100	145.370.386	131.214.760	90	100		
c	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	150	Orang	150	Orang	100	151.555.000	150.332.000	99	100		
3	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi</b>	Persentase Prestasi Olahraga	25	%	25	%	100	5.300.552.500	4.967.393.500	94			
a	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet Daerah yang Diseleksi	20	orang	20	orang	100	8.493.000	6.668.000	79	100		
b	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengatuan Dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1	pelatda	1	pelatda	100	7.878.000	7.303.000	93	100		
c	Pembinaan dan Pengembangan Atlet berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	25	orang	25	orang	100	7.878.000	5.069.000	64	100		
d	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang menerima Penghargaan	300	orang	300	orang	100	5.269.000.000	4.941.050.000	94	100		
e	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah data dan informasi sektoral olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	1	dokumen	1	dokumen	100	7.303.500	7.303.500	100	100		
4	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	Presentase Olahraga Rekreasi yang mendapatkan Pembinaan	25	%	25	%	100	6.626.715.000	6.349.519.230	96			



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	dokumen	1	dokumen	100	118.410.000	110.580.000	93	100		
b	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Jumlah Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai	2	unit	2	unit	100	6.500.000.000	6.230.968.730	96	100		
c	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	dokumen	1	dokumen	100	8.305.000	7.970.500	96	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>20.055.924.029</b>	<b>19.242.277.240</b>	<b>96</b>			

**URUSAN : STATISTIK  
DISKOMINFO**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Persentase Ketersediaan Statistik Sektoral Yang Memiliki Standar Data Dan Metadata Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia</b>	<b>40</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>152.105.000</b>	<b>130.389.322</b>	<b>86</b>			
1	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Ketersediaan Data Sektoral</b>	<b>75</b>	<b>Persen</b>	<b>75</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>152.105.000</b>	<b>130.389.322</b>	<b>86</b>			
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik Sektoral	1	Dokumen	1	Dokumen	100	52.105.000	46.797.520	90	100	Data yang dikumpulkan masih ada yang belum memiliki metadata	Melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah tentang penyusunan metadata
b	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	50	Orang	50	Orang	100	100.000.000	83.591.802	84	100	SDM yang mengelola data berubah-ubah	Menetapkan SDM pengelola data
		<b>Jumlah</b>						<b>152.105.000</b>	<b>130.389.322</b>	<b>86</b>			

## URUSAN : PERSANDIAN

## DISKOMINFO

No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi (E-Sign/Tanda Tangan Elektronik) Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	39,22	Persen	100	Persen	254,971953	388.642.000	368.003.216	95			
		Persentase Sistem Informasi Perangkat Daerah Yang Diamankan Dengan Sertifikat Elektronik	38,00	Persen	38,00	Persen	100						
1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Diamankan	30	Persen	30	Persen	100	388.642.000	368.003.216	95			
a	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	24	Laporan	24	Laporan	100	199.842.000	186.689.416	93	100		
b	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15	Perangkat Daerah	69	Perangkat Daerah	460	188.800.000	181.313.800	96	100		
		Jumlah						388.642.000	368.003.216	95			

## URUSAN : KEBUDAYAAN

## DISBUDPARPORA

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	100	%	<b>100</b>	6.615.474.503	5.751.267.229	87	100		
<b>1</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100	%	100	%	<b>100</b>	149.200.000	133.422.518	89	100		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	10	dokumen	<b>100</b>	149.200.000	133.422.518	89	100		
<b>2</b>	<b>Administrasi keuangan daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	%	100	%	<b>100</b>	4.979.754.503	4.168.601.302	84	100		
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45	orang/bul an	39	orang/bu lan	<b>86,67</b>	4.979.754.503	4.168.601.302	84	100		
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100	%	100	%	<b>100</b>	359.324.000	357.042.838	99	100		
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	63	paket	63	paket	<b>100</b>	55.000.000	54.439.450	99	100		
b	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9	paket	9	paket	<b>100</b>	33.000.000	32.967.000	100	100		
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	365	dokumen	365	dokumen	<b>100</b>	6.350.000	6.124.000	96	100		
d	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah laporan fasilitasi	36	laporan	36	laporan	<b>100</b>	34.974.000	34.005.000	97	100		
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	160	laporan	160	laporan	<b>100</b>	230.000.000	229.507.388	100	100		
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	100	%	90	%	<b>90</b>	262.496.000	256.696.158	98	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11	unit	12	unit	<b>109,09</b>	262.496.000	256.696.158	98	100		
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	100	%	89	%	<b>89</b>	423.700.000	405.854.498	96	100		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2	laporan	2	laporan	<b>100</b>	3.500.000	3.492.000	100	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	12	laporan	<b>100</b>	220.200.000	204.194.168	93	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	63	laporan	63	laporan	<b>100</b>	200.000.000	198.168.330	99	100		
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara	100	%	88	%	<b>88</b>	441.000.000	429.649.915	97	100		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24	unit	24	unit	<b>100</b>	296.000.000	286.397.955	97	100		
b	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50	unit	50	unit	<b>100</b>	145.000.000	143.251.960	99	100		
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	persentase adat dan ritus yang dilestarikan	25	%	25	%	<b>100</b>	5.462.851.722	4.838.121.257	89	94,17		
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota</b>	Persentase Komunitas Budaya yang Dilegalkan	100	%	100	%	<b>100</b>	1.151.521.472	1.037.334.075	90	95		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Kemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5	Obyek	9	Obyek	180	1.055.845.000	968.018.455	92	100		
b	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25	orang	72	orang	288	95.676.472	69.315.620	72	90		
<b>2</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Kesenian Tradisional yang dilindungi	100	%	100	%	100	4.311.330.250	3.800.787.182	88	93,33		
a	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	obyek	1	obyek	100	3.916.559.950	3.436.190.182	88	95		
b	Pembinaan Sumber daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	laporan	1	laporan	100	350.000.000	350.000.000	100	100		
c	Pemberian Penghargaan kepada pihak yang Berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	2	sertifikat	7	sertifikat	350	44.770.300	14.597.000	33	85		
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	persentase pelaku seni tradisional yang kompeten	40	%	38	%	95	500.980.200	408.398.480	82	71,67		
<b>1</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelaku seni tradisional yang terbina	100	%	75	%	75	500.980.200	408.398.480	82	71,67		
a	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	25	orang	50	orang	200	64.728.100	33.316.000	51	75		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Stadardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenial Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	15	setifikat	0	setifikat	0	43.430.600	-	-	40	tidak dapat terserap dikarenakan (pelaku seni pedalangan) yang akan diajukan untuk sertifikasi Skema dari LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Keraton jadwal kegiatannya padat dan tidak menentu (Surat Tanggapan dari Pepadi Nomor :003/PPD/XI/2023 tanggal, 15 November 2023)	Perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi kompetensi profesi bagi pelaku seni budaya
c	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya	2	lembaga	2	lembaga	100	392.821.500	375.082.480	95	100		
<b>VI</b>	<b>Program Pembinaan Sejarah</b>	persentase pembinaan sejarah	35	%	35	%	100	106.096.200	103.336.160	97	100		
<b>1</b>	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota</b>	Persentase Jumlah Masyarakat yang dibina tentang Sejarah Lokal	100	%	100	%	100	106.096.200	103.336.160	97	100		
a	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan	40	orang	88	orang	220	40.414.600	39.964.050	99	100	peserta yang mengikuti lomba karya tulis ilmiah sejarah lokalmelibihi yang sudah ditargetkan	Penambahan Anggaran
b	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	2	unit	2	unit	100	19.725.000	18.414.700	93	100		
c	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap data dan Informasi Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat	7	dokumen	7	dokumen	100	45.956.600	44.957.410	98	100		
<b>IV</b>	<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	17	%	16	%	94,12	208.050.758	167.240.740	80	95		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	100	%	23	%	<b>23</b>	65.183.157	27.663.360	42	45	Tim Ahli Cagar Budaya dari Prv jateng dan Tacb Kab Sukoharjo blm bisa memenuhi permohonan bantuan sidang rekomendasi penetapan Cagar Budaya	Kabupaten klaten pada tahun 2024 membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Sendiri
a	Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang didaftarkan	11	obyek	3	obyek	<b>27,27</b>	65.183.157	27.663.360	42	45	Tim Ahli Cagar Budaya dari Prv jateng dan Tacb Kab Sukoharjo blm bisa memenuhi permohonan bantuan sidang rekomendasi penetapan Cagar Budaya	Kabupaten klaten pada tahun 2024 membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Sendiri
2	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	100	%	100	%	<b>100</b>	142.867.601	139.577.380	98	100		
a	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi	10	obyek	10	obyek	<b>100</b>	98.288.144	96.510.580	98	100		
b	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan	3	obyek	3	obyek	<b>100</b>	44.579.457	43.066.800	97	100		
		<b>JUMLAH</b>						<b>12.893.453.383</b>	<b>11.268.363.866</b>	<b>87</b>			



**URUSAN : PERPUSTAKAAN**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Pembinaan Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	51.962	Eksemplar	51.377	Eksemplar	99	365.863.000	334.314.959	91,38	100		
		Persentase perpustakaan yang dibina	25	%	34,78	%	139						
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pembinaan dan monitoring perpustakaan Desa dan sekolah	10	%	10	%	100	113.667.000	110.483.602	97	100		
a	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management )	1	Layanan	1	Layanan	100	5.000.000	4.629.500	93	100		
b	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dibina, dimonitor dan dievaluasi	36	Perpustakaan	37	Perpustakaan	103	27.875.000	25.714.750	92	100		
c	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan desa/sekolah dan rumah baca masyarakat dibina dan dimonitor	30	Perpustakaan	30	Perpustakaan	100	10.000.000	9.770.550	98	100		
d	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan peningkatan kapasitas	180	Orang	260	Orang	144	5.000.000	4.981.850	100	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
e	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah penambahan koleksi buku/ bahan pustaka	585	Eksemplar	587	Eksemplar	100	62.792.000	62.397.952	99	100		
f	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	25	Eksemplar	27	Eksemplar	108	3.000.000	2.989.000	100	100		
<b>2</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan baca untuk masyarakat yang jauh dari jangkauan perpustakaan</b>	<b>10</b>	<b>%</b>	<b>10</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>252.196.000</b>	<b>223.831.357</b>	<b>89</b>	<b>100</b>		
a	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	400	Lokus	447	Lokus	112	198.336.000	177.508.657	89	100		
b	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1	Perpustakaan	1	Perpustakaan	100	53.860.000	46.322.700	86	100		
<b>Total</b>								<b>365.863.000</b>	<b>334.314.959</b>	<b>91</b>	<b>100</b>		

**URUSAN : KEARSIPAN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.953.651.924</b>	<b>4.333.665.585</b>	<b>87</b>	<b>100</b>		
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>31.000.000</b>	<b>30.552.600</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	7	Dokumen	100	22.500.000	22.273.300	99	100		
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	4	Laporan	100	8.500.000	8.279.300	97	100		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.759.903.813</b>	<b>3.189.314.777</b>	<b>85</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	Orang/bulan	26	Orang/bulan	100	3.735.903.813	3.165.404.777	85	100		
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	Dokumen	3	Dokumen	100	24.000.000	23.910.000	100	100		
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>178.404.111</b>	<b>167.704.099</b>	<b>94</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	16	Paket	100	12.000.000	11.537.500	96	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket	15	Paket	100	7.000.000	6.923.300	99	100		
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket	25	Paket	100	32.845.000	31.131.200	95	100		
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	5	Paket	100	5.000.000	4.729.800	95	100		
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	Laporan	30	Laporan	100	50.000.000	49.940.000	100	100		
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan	25	Laporan	100	69.180.000	61.071.299	88	100		
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	Dokumen	500	Dokumen	100	2.379.111	2.371.000	100	100		
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>463.800.000</b>	<b>446.016.809</b>	<b>96</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	Laporan	500	Laporan	100	5.000.000	5.000.000	100	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	150.000.000	133.359.581	89	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	Laporan	14	Laporan	100	308.800.000	307.657.228	100	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	100	%	100	520.544.000	500.077.300	96	100		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	Unit	27	Unit	100	177.555.000	174.175.800	98	100		
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terhabilitasi/terpelihara	2	Unit	2	Unit	100	24.825.000	23.319.000	94	100		
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	126	Unit	125	Unit	99	318.164.000	302.582.500	95	100	Horizontal filling baru tersedia pada bulan Januari 2024 sehingga tidak dapat dibelanjakan	Pendataan ulang kebutuhan prioritas yang mendukung tugas dan fungsi Dispersip untuk disusun pada Anggaran Perubahan 2024
II	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang diakuisisi	100	%	100	%	100	212.209.000	203.843.696	96	100		
		Persentase pengawasan kearsipan internal	100	%	117,65	%	118						
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan OPD yang dibina Tata Kelola kearsipannya	10	%	10	%	100	185.359.000	177.295.456	96	100		
a	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	322	Berkas	322	Berkas	100	85.583.000	83.779.416	98	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Laporan	60	Laporan	100	99.776.000	93.516.040	94	100		
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jumlah arsip inaktif yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun dan arsip statis milik OPD yang diakuisisi</b>	<b>10</b>	<b>%</b>	<b>10</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>16.850.000</b>	<b>16.679.840</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
a	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	20	Arsip	38	Arsip	190	16.850.000	16.679.840	99	100		
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.868.400</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	45	Pengguna	101	Pengguna	224	10.000.000	9.868.400	99	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
III	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Arsip Usul Musnah	60	Meter lari	17	%	28	147.415.000	144.109.742	98	100	Karena target akhir periode Renstra s.d tahun 2026 sebesar 60 Meter Lari, maka apabila dibagi selama 5 tahun jadi target pertahun sebesar 12 Meter Lari dan realisasi pemusnahan arsip akan diakumulasi mulai tahun 2021 - 2026.	Pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun akan dilaksanakan setiap tahun sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
		Persentase arsip yang dialihmediakan	25	%	37,96	%	152						
1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase Arsip kategori musnah yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun dimusnahkan	5	%	5	%	100	40.125.000	39.432.500	98	100		
a	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	250	Arsip	481	Arsip	192	24.175.000	23.543.000	97	100		
b	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	400	Berkas	627	Berkas	157	15.950.000	15.889.500	100	100		
2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota yang terlindungi dan terselamatkan	10	%	10	%	100	35.540.000	34.892.000	98	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	2500	Arsip	2088	Arsip	84	35.540.000	34.892.000	98	100	1) Pada Triwulan I, Program Inovasi Titip Bandaku dilaksanakan di wilayah Desa Sidorejo dan Tegalmulyo. Masyarakat di wilayah desa tersebut sangat antusias untuk menitipkan berkasnya di Dispersip sehingga pada Triwulan I, jumlah arsip yang dititipkan melebihi target awal yang ditetapkan. 2) Pada Triwulan IV, Program Titip Bandaku dilaksanakan di Desa Balerante. Masyarakat di wilayah Desa Balerante memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat Desa Sidorejo dan Tegalmulyo, sehingga jumlah arsip pada wilayah bencana yang dialihmediakan sehingga capaian	Tim Titip Bandaku melakukan jemput bola dengan mengunjungi rumah penduduk di wilayah Desa Balerante, melakukan koordinasi secara intensif kepada perangkat desa setempat agar ikut mensosialisasikan adanya program Titip Bandaku pada wilayah tersebut kepada masyarakat.
3	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Kenaikan Jumlah Arsip Terakuisisi	5	%	5	%	100	7.100.000	7.088.500	100	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	8	Daftar	8	Daftar	100	4.100.000	4.096.000	100	100		
b	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	250	Arsip	250	Arsip	100	3.000.000	2.992.500	100	100		
<b>4</b>	<b>Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Autentikasi Arsip statis Kabupaten/Kota yang telah dialih media</b>	<b>10</b>	<b>%</b>	<b>10</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>50.380.000</b>	<b>49.222.492</b>	<b>98</b>	<b>100</b>		
a	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	25	Arsip	25	Arsip	100	50.380.000	49.222.492	98	100		
<b>5</b>	<b>Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang</b>	<b>Persentase Jumlah arsip yang dinyatakan hilang dan diumumkan dalam Daftar Pencarian Arsip</b>	<b>1</b>	<b>%</b>	<b>1</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>14.270.000</b>	<b>13.474.250</b>	<b>94</b>	<b>100</b>		
a	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	1	Daftar	1	Daftar	100	14.270.000	13.474.250	94	100		
<b>Total</b>								<b>5.313.275.924</b>	<b>4.681.619.023</b>	<b>88</b>	<b>100</b>		

**URUSAN : PERTANAHAN**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan</b>	100	%	100	%	100,00	40.000.000	1.856.500	4,64	100,00		
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus sengketa tanah garapan terselesaikan	100	%	5	%	5,00	40.000.000	1.856.500	4,64	100,00		
a	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	15.000.000	600.000	4,00	100,00		
b	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Berita Acara	0	Berita Acara	0,00	25.000.000	1.256.500	5,03	100,00		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu</b>	100	%	100	%	100,00	5.782.000.000	5.193.541.020	89,82	100,00		
1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah yang dilakukan	100	%	100	%	100,00	5.782.000.000	5.193.541.020	89,82	100,00		
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	5.782.000.000	5.193.541.020	89,82	100,00		
<b>III</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>Persentase tanah milik pemerintah daerah yang terfasilitasi pensertifikatannya</b>	50	%	50	%	100,00	50.000.000	20.636.800	41,27	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sertifikat yang terfasilitasi pensertifikatannya (masyarakat)	100	%	100	%	100,00	50.000.000	20.636.800	41,27	100,00		
a	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	25.000.000	6.335.000	25,34	100,00		
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	25.000.000	14.301.800	57,21	100,00		
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun</b>	100	%	100	%	100,00	55.000.000	15.017.175	27,30	100,00		
1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sertifikat yang terfasilitasi pensertifikatannya (tanah pemda)	100	%	100	%	100,00	55.000.000	15.017.175	27,30	100,00		
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan	100,00	30.000.000	10.900.300	36,33	100,00		
b	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	25.000.000	4.116.875	16,47	100,00		
<b>TOTAL</b>								<b>5.927.000.000</b>	<b>5.231.051.495</b>	<b>88,26</b>			

**URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Produksi perikanan tangkap</b>	<b>547</b>	<b>Ton</b>	<b>370,45</b>	<b>Ton</b>	<b>67,72</b>	<b>25.000.000</b>	<b>22.520.180</b>	<b>90,08</b>	<b>100</b>		
1	<b>Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>cakupan bina kelompok nelayan</b>	<b>36</b>	<b>%</b>	<b>29</b>	<b>%</b>	<b>80,56</b>	<b>25.000.000</b>	<b>22.520.180</b>	<b>90,08</b>	<b>100</b>		
a	<i>Pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil</i>	<i>Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya</i>	2	kelompok	2	kelompok	100	25.000.000	22.520.180	90,08	100		
II	<b>PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Produksi perikanan budidaya</b>	<b>30.039</b>	<b>Ton</b>	<b>30.461,15</b>	<b>Ton</b>	<b>101,41</b>	<b>1.185.400.000</b>	<b>1.100.052.220</b>	<b>92,80</b>	<b>100</b>		
1	<b>Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil</b>	<b>Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan</b>	<b>7</b>	<b>%</b>	<b>7</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000</b>	<b>98.027.400</b>	<b>98,03</b>	<b>100</b>		
a	<i>Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil</i>	<i>Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas</i>	17	kelompok	17	kelompok	100	100.000.000	98.027.400	98,03	100		
2	<b>Pengelolaan Pembudidayaan ikan</b>	<b>Cakupan kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan</b>	<b>38,8</b>	<b>%</b>	<b>38,8</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.085.400.000</b>	<b>1.002.024.820</b>	<b>92,32</b>	<b>100</b>		
a	<i>Penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	21	Unit	21	Unit	100	810.400.000	733.845.550	90,55	100		
b	<i>Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	1	Unit	1	Unit	100	85.000.000	84.937.270	99,93	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	150	orang	150	orang	100	190.000.000	183.242.000	96,44	100		
III	<b>PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Cakupan tebar benih ikan/restocking perairan umum</b>	<b>23</b>	<b>%</b>	<b>23</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>30.000.000</b>	<b>27.600.000</b>	<b>92,00</b>	<b>100</b>		
1	Pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	jumlah lokasi penebaran benih ikan diperairan umum	3	lokasi	6	lokasi	200	30.000.000	27.600.000	92,00	100		
a	Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	2	dokumen	2	dokumen	100	30.000.000	27.600.000	92,00	100		
IV	<b>PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>jumlah produk olahan ikan</b>	<b>1.191.958</b>	<b>Kg</b>	<b>1.544.976</b>	<b>Kg</b>	<b>129,62</b>	<b>70.000.000</b>	<b>60.198.500</b>	<b>86,00</b>	<b>100</b>		
1	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Cakupan Bina Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	40	%	52	%	130	70.000.000	60.198.500	86,00	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	4	unit usaha	5	unit usaha	125	70.000.000	60.198.500	86,00	100	Terdapat satu item barang yang diserahkan kepada masyarakat ( <i>cool box</i> ) yang tidak direalisasikan karena harga satuan lebih tinggi daripada standar harga	
	<b>TOTAL</b>							<b>1.310.400.000</b>	<b>1.210.370.900</b>	<b>92,37</b>			

**URUSAN : PARIWISATA**

**DISEBUDPORAPAR**

No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	Persentase Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Terkelola	74	%	74	%	<b>100</b>	8.449.540.883	7.712.881.737	91	100		
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota</b>	Persentase Desa Wisata yang terbentuk	72	%	70	%	<b>97,22</b>	150.000.000	147.854.700	99	100		
a	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5	lokasi	6	lokasi	<b>120</b>	30.000.000	27.981.200	93	100		
b	Perencanaan Pengembangan daya tarik wisata Kab/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	1	dokumen	1	dokumen	<b>100</b>	10.000.000	10.000.000	100	100		
c	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan,berkembang, pemantapan,revitalisas i)	7	lokasi	7	lokasi	<b>100</b>	90.000.000	89.891.500	100	100		
d	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	50	dokumen	50	dokumen	<b>100</b>	20.000.000	19.982.000	100	100		
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	3	lokasi	3	lokasi	<b>100</b>	205.000.000	193.489.000	94	100		
a	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	2	dokumen	2	dokumen	<b>100</b>	10.000.000	9.992.300	100	100		
b	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten /kota	500	laporan	500	laporan	<b>100</b>	195.000.000	183.496.700	94	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Persentase Destinasi Pariwisata yang terkelola	83	%	83	%	100	8.024.540.883	7.306.002.337	91	100		
a	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	1	dokumen	3	dokumen	300	300.000.000	295.254.355	98	100		
b	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan,Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2	lokasi	2	lokasi	100	20.000.000	16.916.500	85	100		
c	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota yang tersedia dan terpelihara	7	unit	7	unit	100	7.438.308.883	6.744.060.982	91	100		
d	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	laporan	2	laporan	100	241.232.000	234.592.000	97	100		
e	Penerapan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten / kota	6	lokasi	6	lokasi	100	25.000.000	15.178.500	61	100		
4	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Usaha Pariwisata Terbina	60	%	60	%	100	70.000.000	65.535.700	94	100		
a	Penyediaan layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	22	dokumen	21	dokumen	95,45	45.000.000	43.386.400	96	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1	laporan	1	laporan	100	25.000.000	22.149.300	89	100		
II	<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	Tingkat Intensitas promosi pariwisata	70	%	70	%	100	2.354.742.000	2.261.185.120	96	100		
1	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota</b>	Jumlah Konten Pemasaran Pariwisata yang dirilis	442	konten	438	konten	99,10	2.354.742.000	2.261.185.120	96	100		
a	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	12	dokumen	12	dokumen	100	307.200.000	306.477.520	100	100		
b	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	1	laporan	1	laporan	100	1.959.027.000	1.876.247.600	96	100		
c	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kab/Kota baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten / kota, baik dalam dan luar negeri	4	dokumen	4	dokumen	100	28.515.000	23.460.000	82	100		
d	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama dan kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri	5	dokumen	5	dokumen	100	60.000.000	55.000.000	92	100		
III	<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi hki (Hak Kekayaan Intelektual)	15	orang	15	orang	100	29.746.000	29.246.000	98	100		
1	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	1	sektor	1	sektor	100	29.746.000	29.246.000	98	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen hasil pencatatan atas hak cipta cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif, serta pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif	15	dokumen	15	dokumen	100	24.746.000	24.246.000	98	100		
b	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	1	dokumen	1	dokumen	100	5.000.000	5.000.000	100	100		
<b>IV</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	Persentase SDM pariwisata yang kompeten	30	%	30	%	100	2.477.113.000	2.385.063.554	96	100		
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	Jumlah SDM Pariwisata Bersertifikasi	475	orang	400	orang	84,21	2.477.113.000	2.385.063.554	96	100		
a	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	300	orang	300	orang	100	33.983.000	32.982.900	97	100		
b	Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan	200	orang	4	orang	2	2.413.130.000	2.323.030.654	96	100		
c	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	30	orang	30	orang	100	30.000.000	29.050.000	97	100		
		<b>JUMLAH</b>						<b>13.311.141.883</b>	<b>12.388.376.411</b>	<b>93</b>			

## URUSAN : PERTANIAN

## DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar</b>	67,01	Ku/Ha	68,81	Ku/Ha	102,69	7.181.575.600	6.139.399.621	85,49	100		
		<b>Produktivitas cabe</b>	9,06	Ku/Ha	13,29	Ku/Ha	146,69						
		<b>Produktivitas tembakau rajangan</b>	12,21	Ku/Ha	21,8	Ku/Ha	178,54						
		<b>Produktivitas tembakau asepan</b>	9,86	Ku/Ha	28	Ku/Ha	283,98						
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<b>Produksi padi</b>	459.885	Ton	481.599	Ton	104,72	6.419.975.600	5.460.758.051	85,06	100		
		<b>Produksi jagung</b>	101.554	Ton	99.310	Ton	97,79						
		<b>Produksi kedele</b>	1.061	Ton	1.779	Ton	167,67						
		<b>Produksi cabe</b>	636,92	Ton	2.858	Ton	448,72						
		<b>Produksi tembakau rajangan</b>	1.640	Ton	824,73	Ton	50,29						
		<b>Produksi tembakau asepan</b>	2.335	Ton	1985,33	Ton	85,02						
a	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	18	laporan	18	laporan	100	3.950.729.600	3.192.321.150	80,80	100		
b	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12	laporan	12	laporan	100	2.469.246.000	2.268.436.901	91,87	100		
2	<b>Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan benih unggul padi berlabel di ATP Kabupaten Klaten</b>	15	%	17	%	113,33	761.600.000	678.641.570	89,11	100		
a	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3	VUB	3	VUB	100	500.000.000	448.117.750	89,62	100		
b	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2	dokumen	2	dokumen	100	261.600.000	230.523.820	88,12	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
II	<b>PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/ fungsional</b>	38	%	37	%	97,37	5.898.100.000	5.807.823.278	98,47	100		
		<b>Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian</b>	42	%	38	%	90,48						
		<b>Jumlah Populasi ternak ruminansia besar dan kecil</b>	288.384	%	211.529	%	73,35						
1	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah luasan LP2B/KP2B</b>	32.000	Ha	32.000	Ha	100	116.000.000	112.904.000	97,33	100		
a	<i>Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan/LCP2B</i>	<i>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola</i>	1	dokumen	0	dokumen	0	75.000.000	73.291.500	97,72	100		
b	<i>Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B</i>	<i>Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B</i>	1	dokumen	1	dokumen	100	21.000.000	21.000.000	100,00	100		
c	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya</i>	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>	4	laporan	4	laporan	100	20.000.000	18.612.500	93,06	100		
2	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun dan direhabilitasi</b>	47,26	%	47,26	%	100	5.232.000.000	5.149.440.420	98,42	100		
a	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</i>	<i>Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara</i>	46	unit	46	unit	100	4.232.000.000	4.205.009.920	99,36	100		
b	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya</i>	<i>Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	1	unit	1	unit	100	1.000.000.000	944.430.500	94,44	100		
3	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peternak ruminansia besar dan ruminansia kecil yang mendapatkan fasilitas pengelolaan bibit ternak</b>	38,72	%	38,55	%	99,56	550.100.000	545.478.858	99,16	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit ternak dan Rumpun/Galur ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1	laporan	1	laporan	100	550.100.000	545.478.858	99,16	100		
III	<b><u>PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</u></b>	<b><u>Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular</u></b>	<b>22</b>	<b>%</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>227,27</b>	<b>1.453.300.000</b>	<b>1.359.268.072</b>	<b>93,53</b>	<b>100</b>		
1	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Cakupan pelayanan vaksinasi/penanggulangan PHM dan zoonosis</b>	<b>91</b>	<b>%</b>	<b>83,41</b>	<b>%</b>	<b>91,66</b>	<b>130.000.000</b>	<b>114.474.350</b>	<b>88,06</b>	<b>100</b>		
a	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5	laporan	5	laporan	100	130.000.000	114.474.350	88,06	100		
2	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan hewan, IB dan penanganan gangguan reproduksi</b>	<b>88</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>113,64</b>	<b>717.300.000</b>	<b>645.787.570</b>	<b>90,03</b>	<b>100</b>		
a	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12	laporan	12	laporan	100	717.300.000	645.787.570	90,03	100		
3	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Cakupan pelayanan usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan</b>	<b>40</b>	<b>%</b>	<b>40</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>531.000.000</b>	<b>526.743.002</b>	<b>99,20</b>	<b>100</b>		
a	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	12	laporan	12	laporan	100	486.000.000	483.214.720	99,43	100		
b	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	10	laporan	10	laporan	100	45.000.000	43.528.282	96,73	100		
4	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>	<b>Persentase ternak ruminansia besar yang dipotong dirumah potong hewan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>107,69</b>	<b>%</b>	<b>107,69</b>	<b>75.000.000</b>	<b>72.263.150</b>	<b>96,35</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	12	laporan	12	laporan	100	75.000.000	72.263.150	96,35	100		
<b>IV</b>	<b><u>PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</u></b>	<b><u>Cakupan penanganan gangguan OPT dan potensi bencana pertanian lainnya</u></b>	<b>60</b>	<b>%</b>	<b>60</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>546.700.000</b>	<b>531.389.377</b>	<b>97,20</b>	<b>100</b>		
<b>1</b>	<b><u>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</u></b>	<b><u>Persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT</u></b>	<b>60</b>	<b>%</b>	<b>60</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>546.700.000</b>	<b>531.389.377</b>	<b>97,20</b>	<b>100</b>		
a	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10000	Ha	10000	Ha	100	244.200.000	235.922.400	96,61	100		
b	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	1000	Ha	1000	Ha	100	225.000.000	220.684.705	98,08	100		
c	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1000	Ha	1000	Ha	100	77.500.000	74.782.272	96,49	100		
<b>V</b>	<b><u>PENYULUHAN PERTANIAN</u></b>	<b><u>Persentase kelompok tani madya dan utama</u></b>	<b>9,13</b>	<b>%</b>	<b>8</b>	<b>%</b>	<b>87,62</b>	<b>946.500.000</b>	<b>875.874.280</b>	<b>92,54</b>	<b>100</b>		
<b>1</b>	<b><u>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</u></b>	<b><u>jumlah kelompok tani kelas pemula</u></b>	<b>1.055</b>	<b>poktan</b>	<b>1.132</b>	<b>poktan</b>	<b>107,30</b>	<b>946.500.000</b>	<b>875.874.280</b>	<b>92,54</b>	<b>100</b>		
	<b><u>jumlah kelompok tani kelas lanjut</u></b>	<b>535</b>	<b>poktan</b>	<b>583</b>	<b>poktan</b>	<b>108,97</b>							
	<b><u>jumlah kelompok tani kelas madya</u></b>	<b>135</b>	<b>poktan</b>	<b>135</b>	<b>poktan</b>	<b>100</b>							
	<b><u>jumlah kelompok tani kelas utama</u></b>	<b>9</b>	<b>poktan</b>	<b>9</b>	<b>poktan</b>	<b>100</b>							
a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	26	unit	26	unit	100	150.000.000	127.853.680	85,24	100		
b	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	unit	200	unit	100	497.500.000	450.088.000	90,47	100		
c	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	25	unit	25	unit	100	299.000.000	297.932.600	99,64	100		
<b>TOTAL</b>								<b>16.026.175.600</b>	<b>14.713.754.628</b>	<b>91,81</b>	<b>100</b>		

## URUSAN : PERDAGANGAN

## DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLATEN

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pendapatan Retribusi Pasar	6.921.294.864	Rp	7.793.234.744	Rp	112,60	4.475.000.000	4.392.016.692	98,15			
		Persentase pasar rakyat/tradisional terrevitalisasi	46	%	44	%	95,65						
		Persentase PKL yang terbina	51,4	%	61,35	%	119,36						
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1	Unit	1	Unit	100,00	3.930.000.000	3.888.714.492	98,95			
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1	Unit	1	Unit	100,00	3.420.000.000	3.383.223.742	98,92	100,00		
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi	51	Unit	51	Unit	100,00	510.000.000	505.490.750	99,12	100,00		
2	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pengelola Sarana distribusi perdagangan yang dibina	1250	Orang	1042	Orang	83,36	545.000.000	503.302.200	92,35			
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	230.000.000	211.869.350	92,12	100,00		
2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	315.000.000	291.432.850	92,52	100,00		
II	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Kinerja Pupuk	96	%	85	%	88,54	1.002.000.000	989.735.100	98,78			
		Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting ( 18 bapokting )	6	%	5,56	%	92,59						
		Persentase pasar yang diawasi	100	%	100	%	100,00						

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase kestabilan lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting ( 18 bapokting ) yang terjaga</b>	<b>6</b>	%	<b>5,56</b>	%	<b>92,59</b>	<b>150.000.000</b>	<b>142.779.050</b>	<b>95,19</b>			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Laporan	12	Laporan	100,00	150.000.000	142.779.050	95,19	100,00		
2	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali</b>	<b>18</b>	<b>Jenis</b>	<b>18</b>	<b>Jenis</b>	<b>100,00</b>	<b>822.000.000</b>	<b>819.840.200</b>	<b>99,74</b>			
1	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	Laporan	5	Laporan	100,00	822.000.000	819.840.200	99,74	100,00		
3	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pupuk dan pestisida bersubsidi yang terawasi</b>	<b>96</b>	%	<b>85,06</b>	%	<b>88,60</b>	<b>30.000.000</b>	<b>27.115.850</b>	<b>90,39</b>			
1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5	Laporan	5	Laporan	100,00	30.000.000	27.115.850	90,39	100,00		
III	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	Jumlah komoditas yang mampu ekspor	2	Jenis	2	Jenis	100,00	50.000.000	43.686.125	87,37			



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Event pameran yang terselenggara	5	Even	3	Even	60,00	50.000.000	43.686.125	87,37			
1	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	3	Pelaku usaha	1	Pelaku usaha	33,33	30.000.000	28.304.335	94,35	33,33		
2	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	15	Pelaku usaha	50	Pelaku usaha	333,33	20.000.000	15.381.790	76,91	333,33		
<b>IV</b>	<b>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang</b>	<b>70</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>107,14</b>	<b>36.600.000</b>	<b>35.466.513</b>	<b>96,90</b>			
1	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	UTTP metrologi yang terlaksana	8500	obyek	6762	obyek	79,55	36.600.000	35.466.513	96,90			
1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera	25	Unit	25	Unit	100,00	36.600.000	35.466.513	96,90	100,00		
<b>V</b>	<b>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri</b>	<b>14</b>	<b>org</b>	<b>22</b>	<b>org</b>	<b>157,14</b>	<b>245.000.000</b>	<b>204.031.409</b>	<b>83,28</b>			
1	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Event pameran yang terlaksana	7	Kali	3	Kali	42,86	245.000.000	204.031.409	83,28			
1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	8	UMKM	15	UMKM	187,50	245.000.000	204.031.409	83,28	187,50		
		<b>Jumlah</b>						<b>5.808.600.000</b>	<b>5.664.935.839</b>	<b>97,53</b>			

**URUSAN : PERINDUSTRIAN**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	<b>100,00</b>	%	100,00	<b>6.718.106.615</b>	<b>5.537.410.505</b>	82,43			
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100	%	<b>100,00</b>	%	100,00	<b>18.000.000</b>	<b>10.544.200</b>	58,58			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3,00	Dokumen	100,00	3.000.000	2.935.600	97,85	100		
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	4,00	Dokumen	100,00	4.000.000	3.955.400	98,89	100		
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Dokumen	7,00	Dokumen	100,00	11.000.000	3.653.200	33,21	100		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	100,00	<b>4.215.818.393</b>	<b>3.670.368.453</b>	87,06			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang	30,00	Orang	100,00	4.204.818.393	3.661.466.353	87,08	100		
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12,00	Dokumen	100,00	4.000.000	3.836.900	95,92	100		
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	12,00	Dokumen	100,00	3.000.000	2.794.800	93,16	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15	Dokumen	10,00	Dokumen	66,67	4.000.000	2.270.400	56,76	100		
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	100,00	<b>288.000.000</b>	<b>210.629.038</b>	73,14			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Unit	0,00	Unit	-	8.500.000	0	0,00	0		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	unit	3,00	unit	150,00	16.000.000	14.085.000	88,03	100		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	unit	3,00	unit	100,00	16.000.000	8.448.200	52,80	100		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	eksemplar	2,00	eksemplar	100,00	19.500.000	3.959.800	20,31	100		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	eksemplar	36,00	eksemplar	75,00	8.000.000	5.430.000	67,88	100		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	Kali	26,00	Kali	86,67	50.000.000	40.018.000	80,04	100		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170	Kali	143,00	Kali	84,12	170.000.000	138.688.038	81,58	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	%	<b>108,33</b>	%	108,33	<b>971.288.222</b>	<b>793.726.500</b>	81,72			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	unit	2,00	unit	100,00	755.500.000	661.500.000	87,56	100		
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	unit	4,00	unit	100,00	40.000.000	39.400.000	98,50	100		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18	unit	10,00	unit	55,56	175.788.222	92.826.500	52,81	100		
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	%	<b>96,30</b>	%	100,00	<b>383.000.000</b>	<b>203.974.548</b>	53,26			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	6,00	Laporan	50,00	20.000.000	1.938.654	9,69	100		
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Laporan	7,00	Laporan	46,67	95.000.000	626.500	0,66	100		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Orang	11,00	Orang	91,67	268.000.000	201.409.394	75,15	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	100	%	55,36	%	55,36	842.000.000	648.167.766	76,98			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	unit	8,00	unit	53,33	206.000.000	87.801.958	42,62	100		
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	Unit	0,00	Unit	-	11.000.000	0	0,00	0		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1,00	unit	100,00	550.000.000	538.394.278	97,89	100		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	unit	12,00	unit	60,00	75.000.000	21.971.530	29,30	100		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	21,44	%	18,97	%	88,48	10.648.678.000	7.755.603.900	72,83			
1	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase IKM yang terkoordinasi</b>	10,01	%	11,75	%	117,38	10.648.678.000	7.755.603.900	72,83			
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2	IKM	2,00	IKM	100,00	2.896.000.000	406.512.350	14,04	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2	lokasi	2,00	lokasi	100,00	1.195.178.000	1.085.500.000	90,82	100		
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	IKM	2,00	IKM	100,00	6.486.500.000	6.208.367.050	95,71	100		
4	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	IKM	1,00	IKM	100,00	71.000.000	55.224.500	77,78	100		
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2,00	%	3,03	%	151,50	<b>50.000.000</b>	25.434.000	50,87			
1	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUL, IUKI dan IPKI Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase IKM yang sudah berizin</b>	12,68	%	18,31	%	144,40	<b>50.000.000</b>	25.434.000	50,87			
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	1,00	Dokumen	100,00	50.000.000	25.434.000	50,87	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>17.416.784.615</b>	<b>13.318.448.405</b>	<b>76,47</b>			

**URUSAN : TRANSMIGRASI**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigrasi	80,00	%	100,00	%	125,00	<b>56.000.000</b>	32.074.850	57,28			
1	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase transmigran yang lolos seleksi</b>	87,00	%	100,00	%	114,94	<b>56.000.000</b>	32.074.850	57,28			
a	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1	KK	1,00	KK	100,00	11.000.000	7.418.850	67,44	100		
b	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100	KK	81,00	KK	81,00	45.000.000	24.656.000	54,79	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>56.000.000</b>	<b>32.074.850</b>	<b>57,28</b>			

**URUSAN : FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN  
INSPEKTORAT**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>11.801.873.820</b>	<b>9.620.939.513</b>	81,52	<b>100</b>		
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	<b>100</b>	%	118	%	<b>118,18</b>	<b>45.320.000</b>	<b>18.465.700</b>	40,75	<b>100</b>		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	<b>100</b>	10.200.000	6.206.100	60,84	100		
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	<b>100</b>	3.060.000	330.500	10,8	100		
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	<b>100</b>	6.060.000	600.000	9,9	100		
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	<b>100</b>	3.000.000	-	-	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100	3.000.000	606.000	20,2	100		
f	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	4	Laporan	100	20.000.000	10.723.100	53,62	100		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat waktu	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>8.946.140.665</b>	<b>7.515.626.696</b>	84,01	<b>100</b>		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	orang/bulan	56	orang/bulan	<b>84,85</b>	8.852.603.665	7.455.458.696	84,22	100	Adanya ASN yang pensiun/mutasi/promosi	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	Dokumen	<b>100</b>	75.537.000	59.932.000	79,34	100		
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	<b>100</b>	3.000.000	-	-	100		
d	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	<b>100</b>	3.000.000	-	-	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100	3.000.000	118.000	3,93	100		
f	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Dokumen	4	Dokumen	100	3.000.000	118.000	3,93	100		
g	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	16	Laporan	16	Laporan	100	3.000.000	-	-	100		
h	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	<b>Dokumen</b>	12	<b>Dokumen</b>	100	3.000.000	-	-	100		
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	<b>100</b>	%	100	%	<b>100</b>	<b>42.310.733</b>	<b>28.948.001</b>	68,42	<b>100</b>		
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210	Paket	267	Paket	<b>127,14</b>	39.310.733	28.830.001	73,34	100		
b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	<b>Dokumen</b>	4	<b>Dokumen</b>	<b>100</b>	3.000.000	118.000	3,93	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat waktu</b>	<b>100</b>	%	112	%	<b>111,97</b>	<b>810.620.900</b>	<b>517.987.741</b>	63,9	<b>100</b>		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	180	Paket	290	Paket	<b>161,11</b>	40.000.000	13.687.400	34,22	100		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3000	Paket	3079	Paket	<b>102,63</b>	80.000.000	36.201.850	45,25	100		
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22	Paket	20	Paket	<b>90,91</b>	39.320.100	20.407.657	51,9	100		
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	450	Paket	590	Paket	<b>131,11</b>	24.300.800	13.087.300	53,86	100		
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	65000	Paket	72470	Paket	<b>111,49</b>	100.000.000	53.076.500	53,08	100		
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	302	Dokumen	262	Dokumen	<b>86,75</b>	17.000.000	9.594.000	56,44	100		
g	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	180	Laporan	700	Laporan	<b>388,89</b>	100.000.000	71.878.500	71,88	100		
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	193	Laporan	<b>193</b>	400.000.000	298.954.534	74,74	100		
i	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	Dokumen	100	Dokumen	<b>100</b>	10.000.000	1.100.000	11	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	100	%	126	%	125,92	626.694.138	526.325.000	83,98	100		
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	0	25.000.000	18.200.000	72,8	100		
b	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	Unit	20	Unit	250	86.664.000	84.400.000	97,39	100		
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	Unit	14	Unit	100	300.000.000	245.935.000	81,98	100		
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit	9	Unit	60	215.030.138	177.790.000	82,68	100		
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	100	%	100	%	100	627.787.384	523.203.553	83,34	100		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100	20.400.000	11.806.200	57,87	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	258.000.000	189.671.776	73,52	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	349.387.384	321.725.577	92,08	100		
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	103	%	102,78	703.000.000	490.382.822	69,76	100		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	27	Unit	108	350.000.000	273.077.422	78,02	100		
b	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	32	Unit	32	Unit	100	3.000.000	2.900.000	96,67	100		
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	14	Unit	100	150.000.000	31.007.000	20,67	100		
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100	200.000.000	183.398.400	91,7	100		
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	100 100 100 100	% % % %	110.9 110.9 110.9 571.43	% % % %	110.9 110.9 110.9 571.43	931.606.972	653.632.850	70,16	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	<b>100</b>	%	110	%	<b>110,09</b>	<b>660.816.868</b>	<b>467.716.950</b>	70,78	<b>100</b>		
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Laporan	4	Laporan	<b>100</b>	56.100.000	44.923.100	80,08	100		
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8	Laporan	8	Laporan	<b>100</b>	66.372.000	40.708.500	61,33	100		
c	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	53	<b>Laporan</b>	<b>96</b>	<b>Laporan</b>	<b>181,13</b>	84.028.000	64.131.500	76,32	100		
d	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	223	Laporan	213	Laporan	<b>95,52</b>	199.316.868	146.738.500	73,62	100		
e	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	54	Laporan	56	Laporan	<b>103,7</b>	135.000.000	93.694.800	69,4	100		
f	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	<b>100</b>	20.000.000	11.860.000	59,3	100		
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	Dokumen	4	Dokumen	<b>100</b>	100.000.000	65.660.550	65,66	100		
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	Persentase aduan/kerugian daerah yang di tindaklanjuti	<b>100</b>	%	524	%	<b>524,37</b>	<b>270.790.104</b>	<b>185.915.900</b>	68,66	<b>100</b>		
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	Laporan	5	Laporan	<b>250</b>	36.458.604	16.665.800	45,71	100		
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5	Laporan	32	Laporan	<b>640</b>	234.331.500	169.250.100	72,23	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
III	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 4 Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah khusus	<b>100</b> <b>100</b> <b>100</b> <b>100</b>	% % % % %	164 164 164 164 137.09	% % % % %	164 164 164 164 137.09	<b>3.140.321.034</b>	<b>2.470.556.462</b>	78,67	<b>100</b>		
1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan	<b>100</b>	%	144	%	<b>143,81</b>	<b>1.491.260.639</b>	<b>1.268.962.783</b>	85,09	<b>100</b>		
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	rekomendasi	2	rekomendasi	<b>200</b>	764.030.639	699.866.600	91,6	100		
b	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2	rekomendasi	2	rekomendasi	<b>100</b>	727.230.000	569.096.183	78,26	100		
2	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Nilai MCP Korsupgah KPK	<b>68</b>	nilai	N/A	nilai	<b>92</b>	<b>1.649.060.395</b>	<b>1.201.593.679</b>	72,87	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	50	Perangkat Daerah	82	Perangkat Daerah	164	384.450.000	188.365.000	49	100		
b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51	Perangkat Daerah	51	Perangkat Daerah	100	374.340.000	278.086.000	74,29	100		
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100	586.626.000	474.493.336	80,89	100		
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8	<b>Perangkat Daerah</b>	12	<b>Perangkat Daerah</b>	150	303.644.395	260.649.343	85,84	100		
	<b>JUMLAH</b>							<b>15.873.801.826</b>	<b>12.745.128.825</b>	<b>80,29</b>			



**URUSAN : FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN  
BAPPEDALITBANG KABUPATEN KLATEN**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>6.304.692.631</b>	<b>5.110.144.947</b>				
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>267.000.000</b>	<b>256.425.000</b>				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	100	26.000.000	24.380.000	94	100		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100	10.000.000	9.373.600	94	100		
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	4	Laporan	100	231.000.000	222.671.400	96	100		
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu Kinerja SKPD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.954.909.631</b>	<b>3.858.732.029</b>				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	Orang/Bulan	32	Orang/Bulan	100	4.941.259.631	3.851.328.629	78	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	1	Dokumen	100	9.010.000	3.010.500	33	100		
3	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40	Dokumen	40	Dokumen	100	4.640.000	4.392.900	95	100		
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>513.618.000</b>	<b>471.016.388</b>				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1	Paket	1	Paket	100	15.000.000	14.921.510	99	100		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	2	Paket	2	Paket	100	25.000.000	24.832.200	99	100		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	1	Paket	1	Paket	100	15.000.000	14.938.900	100	100		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	2	Paket	2	Paket	100	15.000.000	14.466.500	96	100		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	36	Dokumen	36	Dokumen	100	7.000.000	6.300.000	90	100		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	100	70.000.000	59.917.500	86	100		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100	366.618.000	335.639.778	92	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	100	%	100	%	100	58.105.000	51.891.300				
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	5	Unit	100	1.250.000	1.250.000	100	100		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	5	Unit	100	56.855.000	50.641.300	89	100		
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	100	%	100	%	100	110.000.000	86.089.020				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100	10.000.000	9.998.900	100	100		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	43.000.000	33.971.660	79	100		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	57.000.000	42.118.460	74	100		
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	100	%	100	%	100	401.060.000	385.991.210				

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	34	Unit	100	260.000.000	250.016.210	96	100		
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	Unit	25	Unit	100	20.600.000	19.160.000	93	100		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100	84.570.000	81.905.000	97	100		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	Unit	25	Unit	100	35.890.000	34.910.000	97	100		
II	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.655.044.065</b>	<b>1.423.393.266</b>	<b>86</b>			
		<b>Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD</b>	<b>78</b>	<b>%</b>	<b>84,89</b>	<b>%</b>	<b>109</b>						
1	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan berlaku</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.090.044.065</b>	<b>921.618.350</b>	<b>85</b>			
1	Analisis Kondisi Daerah Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	Dokumen	1	Dokumen	100	117.600.000	105.548.000	90	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	100	50.000.000	45.474.500	91	100		
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita Acara	1	Berita Acara	100	91.684.000	34.949.800	38	100		
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	Berita Acara	3	Berita Acara	100	24.069.360	9.600.900	40	100		
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Berita Acara	1	Berita Acara	100	100.000.000	88.065.300	88	100		
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	5010	Usulan	5010	Usulan	100	15.000.000	8.276.900	55	100		
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	Dokumen	2	Dokumen	100	691.690.705	629.702.950	91	100		
2	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase data dan informasi yang terakomodir didalam Sistem Informasi berbasis elektronik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>200.000.000</b>	<b>180.495.900</b>	<b>90</b>			
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	60	Masukan	60	Masukan	100	200.000.000	180.495.900	90	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersusun	100	%	100	%	100	365.000.000	321.279.016	88			
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3	Laporan	3	Laporan	100	250.000.000	212.777.436	85	100		
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Laporan	4	Laporan	100	115.000.000	108.501.580	94	100		
III	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100	%	82,18	%	82	1.412.500.000	1.341.636.916	95			
		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	%	86,44	%	86						
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Presentase Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang terkoordinasikan	100	%	100	%	100	650.000.000	621.338.476	96			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	2	Dokumen	100	50.000.000	48.501.250	97	100		
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	36	Perangkat Daerah	36	Perangkat Daerah	100	50.000.000	48.267.851	97	100		
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	36	Laporan	36	Laporan	100	25.000.000	23.970.994	96	100		
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	2	Laporan	2	Laporan	100	150.000.000	143.873.400	96	100		
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	2	Dokumen	100	50.000.000	47.056.500	94	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5	Perangkat Daerah	5	Perangkat Daerah	100	50.000.000	48.641.081	97	100		
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5	Perangkat Daerah	5	Perangkat Daerah	100	25.000.000	24.144.300	97	100		
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2	Laporan	2	Laporan	100	250.000.000	236.883.100	95	100		
<b>2</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Presentase Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang terkoordinasikan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>428.000.000</b>	<b>402.936.890</b>	<b>94</b>			
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	2	Dokumen	100	112.000.000	102.506.594	92	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	Perangkat Daerah	5	Perangkat Daerah	100	20.000.000	18.283.800	91	100		
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	Perangkat Daerah	5	Perangkat Daerah	100	35.000.000	34.455.200	98	100		
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2	Laporan	2	Laporan	100	180.000.000	177.757.044	99	100		
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada Bidang Perekonomian	2	Dokumen	2	Dokumen	100	50.000.000	40.719.272	81	100		
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1	Perangkat Daerah	1	Perangkat Daerah	100	5.000.000	8.075.950	162	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1	Perangkat Daerah	1	Perangkat Daerah	100	12.000.000	11.442.130	95	100		
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2	Laporan	2	Laporan	100	14.000.000	9.696.900	69	100		
<b>3</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase Perencanaan Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>334.500.000</b>	<b>317.361.550</b>	<b>95</b>			
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	2	Dokumen	100	66.000.000	62.858.090	95	100		
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	Perangkat Daerah	3	Perangkat Daerah	100	20.000.000	19.787.750	99	100		
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	Perangkat Daerah	3	Perangkat Daerah	100	15.000.000	14.591.514	97	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	Laporan	2	Laporan	100	10.000.000	6.847.200	68	100		
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	2	Dokumen	100	88.500.000	83.883.436	95	100		
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1	Perangkat Daerah	1	Perangkat Daerah	100	20.000.000	19.675.200	98	100		
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1	Perangkat Daerah	1	Perangkat Daerah	100	15.000.000	13.372.360	89	100		
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	Laporan	1	Laporan	100	100.000.000	96.346.000	96	100		
<b>J U M L A H</b>								<b>9.372.236.696</b>	<b>7.875.175.129</b>	<b>84</b>			

**URUSAN : FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BPKPAD</b>													
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>27.032.339.504</b>	<b>23.672.567.491</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	-	-
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>31.214.000</b>	<b>24.551.750</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	-	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	100	15.607.000	12.408.300	80	100	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100	15.607.000	12.143.450	78	100	-	-
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>19.889.272.754</b>	<b>17.403.414.211</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	-	-
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87	Orang/bulan	87	Orang/bulan	100	19.779.448.754	17.295.084.211	87	100	-	-
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Dokumen	2	Dokumen	100	109.824.000	108.330.000	99	100	-	-
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>200.000.000</b>	<b>198.820.245</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	-	-
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100	200.000.000	198.820.245	99	100	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.218.499.000</b>	<b>1.916.229.040</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	-	-
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	100	30.000.000	29.901.000	100	100	-	-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	100	70.000.000	67.085.900	96	100	-	-
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	100	21.000.000	20.667.700	98	100	-	-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	100	70.000.000	61.670.100	88	100	-	-
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8	Dokumen	8	Dokumen	100	5.000.000	2.640.000	53	100	-	-
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	100	160.000.000	139.412.000	87	100	-	-
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100	1.738.600.000	1.481.951.220	85	100	-	-
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000	Dokumen	2000	Dokumen	100	123.899.000	112.901.120	91	100	-	-
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.216.683.750</b>	<b>2.987.479.505</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	33	Unit	33	Unit	100	2.782.830.000	2.573.899.505	92	100	-	-
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	100	15.000.000	14.940.000	100	100	-	-
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16	Unit	16	Unit	100	418.853.750	398.640.000	95	100	-	-
<b>6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>355.670.000</b>	<b>348.172.015</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	-	-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	4	Laporan	100	5.500.000	5.050.000	92	100	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	190.000.000	186.820.000	98	100	-	-
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	160.170.000	156.302.015	98	100	-	-
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.121.000.000</b>	<b>793.900.725</b>	<b>71</b>	<b>100</b>	-	-
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	unit	100	unit	100	990.000.000	664.185.725	67	100	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	unit	50	unit	100	6.000.000	6.000.000	100	100	-	-
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	unit	100	50.000.000	49.000.000	98	100	-	-
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70	unit	70	unit	100	75.000.000	74.715.000	100	100	-	-
II	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>765.714.530.507</b>	<b>738.772.703.863</b>	<b>96,48</b>	<b>100,00</b>	-	-
		<b>Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>						
		<b>Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah</b>	<b>84,5</b>	<b>%</b>	<b>90,51%</b>	<b>%</b>	<b>107,12%</b>						
1	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tepat waktu sesuai Surat Edaran Bupati</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>Dokumen</b>	<b>100</b>	<b>2.591.204.000</b>	<b>2.381.836.541</b>	<b>91,92</b>	<b>100,00</b>	-	-
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	2	Dokumen	100	192.812.000	186.702.600	96,83	100,00	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	52	Dokumen	52	Dokumen	100	192.812.000	181.784.100	94,28	100,00	-	-
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52	Dokumen	52	Dokumen	100	30.740.000	26.175.300	85,15	100,00	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52	Dokumen	52	Dokumen	100	35.316.000	32.502.350	92,03	100,00	-	-
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52	Dokumen	52	Dokumen	100	7.085.000	6.855.500	96,76	100,00	-	-
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	2	Dokumen	2	Dokumen	100	11.025.000	10.271.250	93,16	100,00	-	-
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	2	Dokumen	100	637.474.000	553.743.600	86,87	100,00	-	-
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	2	Dokumen	100	738.940.000	656.531.841	88,85	100,00	-	-
9	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120	Orang	120	Orang	100	745.000.000	727.270.000	97,62	100,00	-	-
2	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah</b>	<b>84,5</b>	<b>%</b>	<b>90,51%</b>	<b>%</b>	<b>107,12%</b>	<b>877.306.000</b>	<b>694.669.725</b>	<b>79,18</b>	<b>100,00</b>	-	-
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	100	55.000.000	42.905.720	78,01	100,00	-	-



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	6	Dokumen	6	Dokumen	100	19.000.000	13.243.600	69,70	100,00	-	-
3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	Dokumen	12	Dokumen	100	72.500.000	44.488.859	61,36	100,00	-	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	laporan	12	laporan	100	67.306.000	63.764.800	94,74	100,00	-	-
5	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2	Dokumen	2	Dokumen	100	75.000.000	66.901.550	89,20	100,00	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	7	Dokumen	7	Dokumen	100	100.000.000	92.793.031	92,79	100,00	-	-
7	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2	Dokumen	2	Dokumen	100	22.000.000	15.133.700	68,79	100,00	-	-
8	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	158	Orang	158	Orang	100	466.500.000	355.438.465	76,19	100,00	-	-
<b>3</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.455.668.000</b>	<b>1.438.277.213</b>	<b>98,81</b>	<b>100,00</b>	-	-
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3	Laporan	3	Laporan	100	65.577.000	64.702.600	98,67	100,00	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dokumen	2	Dokumen	100	100.000.000	99.090.000	99,09	100,00	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	1	Dokumen	100	53.440.000	52.761.105	98,73	100,00	-	-
4	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	100	551.651.000	538.853.508	97,68	100,00	-	-
5	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	102	Orang	102	Orang	100	685.000.000	682.870.000	99,69	100,00	-	-
4	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase penyaluran belanja transfer ke desa (DD, ADD, Bankeusus)</b>	<b>99</b>	<b>%</b>	99,70	<b>%</b>	<b>100,70264</b>	<b>760.790.352.507</b>	<b>734.257.920.384</b>	<b>96,51</b>	<b>100,00</b>	-	-
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2	Laporan	2	Laporan	100	718.074.784.808	715.543.653.121	99,65	100,00	-	-
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	Laporan	12	Laporan	100	21.382.536.680	657.130.800	3,07	100,00	-	-
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4	Laporan	4	Laporan	100	21.333.031.019	18.057.136.463	84,64	100,00	-	-
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang teregistrasi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.450.656.645</b>	<b>3.075.552.741</b>	<b>89,13</b>	<b>100,00</b>	-	-
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian registrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.450.656.645</b>	<b>3.075.552.741</b>	<b>89,13</b>	<b>100,00</b>	-	-
1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	Dokumen	2	Dokumen	100	322.344.000	189.692.300	58,85	100,00	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	100	102.570.000	97.023.400	94,59	100,00	-	-
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3	Laporan	3	Laporan	100	650.000.000	511.643.936	78,71	100,00	-	-
4	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3	Laporan	3	Laporan	100	30.000.000	11.616.000	38,72	100,00	-	-
5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10	Dokumen	10	Dokumen	100	1.566.261.345	1.500.522.600	95,80	100,00	-	-
6	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	Laporan	2	Laporan	100	79.900.000	78.167.000	97,83	100,00	-	-
7	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	930	Orang	930	Orang	100	699.581.300	686.887.505	98,19	100,00	-	-
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Rasio PAD</b>	<b>10,5</b>	<b>%</b>	<b>12,68%</b>	<b>%</b>	<b>120,72%</b>	<b>5.335.430.200</b>	<b>4.901.685.866</b>	<b>91,87</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Rasio PAD</b>	<b>10,5</b>	<b>%</b>	<b>12,68%</b>	<b>%</b>	<b>120,72%</b>	<b>5.335.430.200</b>	<b>4.901.685.866</b>	<b>91,87</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Laporan	12	Laporan	100	908.153.100,00	813.039.850	89,53	100,00	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	8	Unit	8	Unit	100	970.980.000,00	954.005.600	98,25	100,00	-	-
3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	12	Laporan	100	328.700.000,00	303.723.700	92,40	100,00	-	-
4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	Laporan	12	Laporan	100	456.163.852,00	427.440.395	93,70	100,00	-	-
5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12	Layanan	12	Layanan	100	1.472.065.900,00	1.376.899.881	93,54	100,00	-	-
6	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	100	1.118.851.348,00	959.209.440	85,73	100,00	-	-
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	100	61.300.000,00	50.412.550	82,24	100,00	-	-
8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	12	Laporan	100	19.216.000,00	16.954.450	88,23	100,00		
	<b>TOTAL</b>							<b>801.532.956.856</b>	<b>770.422.509.961</b>	<b>96,12</b>			

**URUSAN : KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>6.064.859.550</b>	<b>5.559.214.623</b>	<b>91,66</b>	<b>100</b>		
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>5.388.240.300</b>	<b>4.900.217.109</b>	<b>90,94</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	Orang/Bulan	<b>41,00</b>	Orang/Bulan	100,00	5.358.240.300	4.870.297.109	90,89	<b>100</b>		
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	<b>12,00</b>	Dokumen	100,00	30.000.000	29.920.000	99,73	<b>100</b>		
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>402.699.250</b>	<b>401.741.560</b>	<b>99,76</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	<b>60,00</b>	Paket	100,00	43.199.250	42.555.050	98,51	<b>100</b>		
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	<b>6,00</b>	Paket	100,00	57.000.000	56.995.800	99,99	<b>100</b>		
c	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1250	Laporan	<b>1250,00</b>	Laporan	100,00	90.000.000	89.755.000	99,73	<b>100</b>		
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222	Laporan	<b>222,00</b>	Laporan	100,00	212.500.000	212.435.710	99,97	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	%	<b>100,00</b>	%	<b>100,00</b>	<b>99.920.000</b>	<b>91.790.000</b>	91,86	<b>100</b>		
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	<b>4</b>	Unit	<b>4,00</b>	Unit	<b>100,00</b>	99.920.000	91.790.000	91,86	<b>100</b>		
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>100</b>	%	<b>100,00</b>	%	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>980.000</b>	<b>49,00</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4350	Unit	<b>4350,00</b>	Unit	100,00	2.000.000	980.000	49,00	<b>100</b>		
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</b>	<b>85</b>	%	<b>100,00</b>	%	<b>117,65</b>	<b>172.000.000</b>	<b>164.485.954</b>	95,63	<b>100</b>		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19	Unit	<b>19,00</b>	Unit	100,00	75.000.000	68.065.454	90,75	<b>100</b>		
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	95	Unit	<b>95,00</b>	Unit	100,00	97.000.000	96.420.500	99,40	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
II	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi</b>	<b>80</b>	%	<b>84,36</b>	%	<b>105,45</b>	2.420.118.500	2.026.232.639	84,54	<b>100</b>		
		<b>Persentase Kinerja ASN bernilai baik</b>	<b>100</b>	%	<b>115,12</b>	%	<b>115,12</b>						
		<b>Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan</b>	<b>100</b>	%	<b>92,31</b>	%	<b>92,31</b>						
		<b>Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah</b>	<b>95</b>	%	<b>90,02</b>	%	<b>94,76</b>						
1	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase terpenuhinya Calon ASN yang sesuai Formasi</b>	<b>80</b>	%	<b>84,36</b>	%	<b>105,45</b>	<b>843.817.100</b>	<b>700.744.193</b>	<b>83,04</b>	<b>100</b>		
		<b>Persentase ASN yang pensiun tepat waktu</b>	<b>100</b>	%	<b>83,43</b>	%	<b>83,43</b>				<b>100</b>		
		<b>Persentase Data ASN yang terkelola dengan baik</b>	<b>94</b>	%	<b>115,12</b>	%	<b>122,47</b>				<b>100</b>		
a	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	653	Dokemen	551,00	Dokemen	84,38	542.026.550	404.836.531	74,69	100		
b	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	682	Dokemen	569,00	Dokemen	83,43	57.456.650	54.919.000	95,58	100		
c	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	1,00	Lembaga	100,00	7.724.500	7.300.000	94,50	100		
d	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	Dokemen	3,00	Dokemen	100,00	47.757.200	46.349.312	97,05	100		
e	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9000	Dokemen	10361,00	Dokemen	115,12	188.852.200	187.339.350	99,20	100		
2	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase ASN yang ditempatkan sesuai Kualifikasi dan kompetensinya</b>	<b>75</b>	%	<b>98,82</b>	%	<b>131,76</b>	<b>480.980.079</b>	<b>388.371.043</b>	<b>80,75</b>	<b>100</b>		
		<b>Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang terselesaikan tepat waktu</b>	<b>95</b>	%	<b>99,47</b>	%	<b>104,71</b>				<b>100</b>		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	510	Dokemen	504,00	Dokemen	98,82	280.000.000	223.261.253	79,74	100		
b	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1310	Dokemen	1303,00	Dokemen	99,47	200.980.079	165.109.790	82,15	100		
<b>3</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase ASN yang telah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>194,12</b>	<b>%</b>	<b>242,65</b>	<b>779.868.321</b>	<b>649.870.088</b>	<b>83,33</b>	<b>100</b>		
		<b>Persentase Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Ijin penggunaan Gelar ASN yang terselesaikan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>113,50</b>	<b>%</b>	<b>113,50</b>				<b>100</b>		
a	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment center	306	Dokemen	594,00	Dokemen	194,12	691.509.600	569.378.758	82,34	100		
b	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	200	Orang	227,00	Orang	113,50	41.057.179	37.487.290	91,31	100		
c	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300	Orang	599,00	Orang	199,67	47.301.542	43.004.040	90,91	100		
<b>4</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase Sasaran Kerja Pegawai yang di nilai dan di evaluasi</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>115,12</b>	<b>%</b>	<b>127,91</b>	<b>315.453.000</b>	<b>287.247.315</b>	<b>91,06</b>	<b>100</b>		
		<b>Persentase Kasus Pelanggaran disiplin dan perceraian yang terselesaikan</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>92,31</b>	<b>%</b>	<b>115,39</b>				<b>100</b>		
a	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9000	Dokumen	10361,00	Dokumen	115,12	39.752.500	38.710.275	97,38	100		
b	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	80	Laporan	450,00	Laporan	562,50	28.073.500	21.541.250	76,73	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	9	Laporan	2,00	Laporan	22,22	210.000.000	194.472.790	92,61	100		
d	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	4	Dokumen	10,00	Dokumen	250,00	16.370.000	13.286.000	81,16	100		
e	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	51	Laporan	51,00	Laporan	100,00	21.257.000	19.237.000	90,50	100		
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>217,93</b>	<b>%</b>	<b>272,41</b>	<b>4.094.671.100</b>	<b>3.994.352.650</b>	<b>98</b>	<b>100</b>		
<b>1</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Persentase ASN yang mengikuti Bintek/Diklat Teknis</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>347,00</b>	<b>%</b>	<b>433,75</b>	<b>1.562.012.650</b>	<b>1.522.894.600</b>	<b>97</b>	<b>100</b>		
a	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	<b>360</b>	<b>Orang</b>	<b>1250,00</b>	<b>Orang</b>	347,22	1.562.012.650	1.522.694.600	97	<b>100</b>		
<b>2</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Persentase ASN yang mengikuti Diklat Jabatan</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>80,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>2.532.658.450</b>	<b>2.471.458.050</b>	<b>98</b>	<b>100</b>		
a	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	950	Dokumen	842,00	Dokumen	88,63	2.532.658.450	2.471.458.050	97,58	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>12.579.649.150</b>	<b>11.579.799.912</b>	<b>92,05</b>			

**URUSAN : FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**BAPPEDALITBANG KABUPATEN KLATEN**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.</b>	<b>59,4</b>	%	<b>54,5</b>	%	<b>91,8</b>	<b>1.410.000.000</b>	<b>1.276.154.751</b>	<b>91</b>			
		<b>Pertumbuhan inovasi perangkat daerah</b>	<b>15</b>	%	<b>14,9</b>	%	<b>99,3</b>						
1	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Persentase penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang terlaksana</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>510.000.000</b>	<b>459.435.671</b>	<b>90</b>			
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	Dokumen	1	Dokumen	100	440.000.000	390.814.329	89	100		
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1	Dokumen	1	Dokumen	100	38.000.000	36.829.500	97	100		
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen data kelitbangan dan peraturan yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100	32.000.000	31.791.842	99	100		
2	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>		<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>380.000.000</b>	<b>351.391.060</b>	<b>92</b>			
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pariwisata yang terlaksana	1	Dokumen	1	Dokumen	100	300.000.000	287.201.460	96	100		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	Dokumen	1	Dokumen	100	40.000.000	39.389.000	98	100		
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja yang terlaksana	1	Dokumen	1	Dokumen	100	40.000.000	24.800.600	62	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>3</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Presentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlaksana</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>170.000.000</b>	<b>156.738.620</b>	<b>92</b>			
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang terlaksana	1	Dokumen	1	Dokumen	100	130.000.000	117.468.620	90	100		
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1	Dokumen	1	Dokumen	100	40.000.000	39.270.000				
<b>4</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang terlaksana</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>350.000.000</b>	<b>308.589.400</b>	<b>88</b>			
	Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen	1	Dokumen	100	280.000.000	266.431.500	95	100		
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Hasil-Hasil Kelitbangan yang tersosialisasi dan terdiseminasi	1	Dokumen	1	Dokumen	100	50.000.000	36.897.900	74	100		
	Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang terfasilitasi	1	HAKI	1	HAKI	100	20.000.000	5.260.000	26	100		
		<b>Jumlah</b>						<b>1.410.000.000</b>	<b>1.276.154.751</b>	<b>90,51</b>			

**URUSAN : FUNGSI PENUNJANG SEKRETARIAT DPRD**

**SEKRETARIAT DPRD**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>42.674.809.023</b>	<b>40.190.710.365</b>	<b>94,18</b>	<b>100</b>		
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>20.000.000</b>	<b>15.588.350</b>	<b>77,94</b>	<b>100</b>		-
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	9	Dokumen	9	Dokumen	100	20.000.000	15.588.350	77,94	100		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.909.795.892</b>	<b>3.357.412.011</b>	<b>85,87</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	39	orang	39	orang	100	3.811.209.892	3.270.945.961	85,82	100		
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	12	Dokumen	12	Dokumen	100	98.586.000	86.466.050	87,71	100		
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>795.194.000</b>	<b>694.830.825</b>	<b>87,38</b>	<b>100</b>		-
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10	Unit	10	Unit	100	12.935.000	12.766.215	98,70	100		
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor tersedia	7	Unit	7	Unit	100	19.450.000	1.016.250	5,22	92		
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	35000	eksemplar	35000	eksemplar	100	34.470.000	21.415.500	62,13	92		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	450	eksemplar	450	eksemplar	100	82.866.000	66.239.500	79,94	85		
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	85	kali	85	kali	100	177.939.000	142.812.000	80,26	95		
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25	kali	25	kali	100	467.534.000	450.581.360	96,37	98		
<b>4</b>	<b>Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.286.428.000</b>	<b>1.138.737.460</b>	<b>88,52</b>	<b>100</b>		-
a	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	111	Unit	111	Unit	100	617.035.000	549.631.460	89,08	100		
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	18	Unit	18	Unit	100	669.393.000	589.106.000	88,01	100		
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>1.609.962.131</b>	<b>1.339.134.642</b>	<b>83,18</b>	<b>100</b>		-
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	8.000	eksemplar	8.000	eksemplar	100	34.536.000	28.451.150	82,38	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik yang terbayar	12	bulan	12	bulan	100	400.216.131	292.347.240	73,05	100		
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	85	unit	85	unit	100	274.551.000	199.099.700	72,52	100		
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum terbayar	35	orang	35	orang	100	900.659.000	819.236.552	90,96	100		
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.806.742.000</b>	<b>1.362.751.621</b>	<b>75,43</b>	<b>100</b>		-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	1	unit	1	unit	100	48.350.000	39.894.140	82,51	100		
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	22	unit	22	unit	100	355.850.000	308.379.569	86,66	100		
c	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	40	unit	40	unit	100	61.319.000	32.280.000	52,64	95		
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya ter rehabilitasi/ terpelihara	3	unit	3	unit	100	818.206.000	676.977.409	82,74	100		
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	14	unit	14	unit	100	523.017.000	305.220.503	58,36	92		
<b>7</b>	<b>Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase capaian Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>31.568.654.000</b>	<b>31.182.445.050</b>	<b>98,78</b>	<b>100</b>		-
a	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan	50	orang	50	orang	100	31.194.430.000	30.865.846.750	98,95	100		
b	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut DPRD	200	stel	200	stel	100	320.364.000	290.880.000	90,80	100		
c	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Medical Check Up DPRD	50	orang	50	orang	100	53.860.000	25.718.300	47,75	90		
<b>8</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase DPRD terlayani administrasinya</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.678.033.000</b>	<b>1.099.810.406</b>	<b>65,54</b>	<b>100</b>		-
a	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah fasilitasi Fraksi DPRD	7	fraksi	7	fraksi	100	66.320.000	24.576.200	37,06	90		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Risalah Rapat Paripurna DPRD yang tersusun	48	dokumen	48	dokumen	100	1.114.567.000	808.389.992	72,53	98		
		Jumlah Pablik Hearing/dialog dengan Tokoh Masyarakat/Agama yang dilaksanakan	75	kegiatan	75	kegiatan	100						
c	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Jenis Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	8	jenis	8	jenis	100	497.146.000	266.844.214,00	53,68	96		
<b>II</b>	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>53,8</b>	<b>%</b>	<b>71,733333</b>	<b>26.057.245.021,00</b>	<b>23.129.886.737,00</b>	<b>88,77</b>			
		<b>Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>						
		<b>Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>						
<b>1</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disahkan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.977.438.000,00</b>	<b>5.596.607.948,00</b>	<b>93,63</b>	<b>100</b>		
a	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dibahas dan tersusun	20	dokumen	20	dokumen	100	692.710.000,00	655.129.800,00	94,57	100		
b	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	13	Raperda	7	Raperda	75	5.204.728.000,00	4.871.228.148,00	93,59	95		
c	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah kajian perundang-undangan yang dilaksanakan	6	dokumen	-	dokumen	100	80.000.000,00	70.250.000,00	87,81	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>2</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.464.688.000,00</b>	<b>1.303.122.765,00</b>	<b>88,97</b>	<b>100</b>		
a	Pembahasan APBD	Jumlah frekuensi pembahasan APBD	6	kali	6	kali	100	1.464.688.000,00	1.303.122.765,00	88,97	100		
<b>3</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase OPD Penyelenggaraan Pemerintahan terawasi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>6.547.300.000,00</b>	<b>6.110.234.056,00</b>	<b>93,32</b>	<b>100</b>		
a	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang diawasi	16	OPD	16	OPD	100	1.876.924.000,00	1.728.177.358,00	92,07	100		
b	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang diawasi	7	OPD	7	OPD	100	1.570.769.000,00	1.479.351.030,00	94,18	100		
c	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat terawasi	5	OPD	5	OPD	100	1.513.590.000,00	1.360.375.600,00	89,88	100		
d	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian terawasi	6	OPD	6	OPD	100	1.586.017.000,00	1.542.330.068,00	97,25	100		
<b>4</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Anggota DPRD yang diberikan peningkatan kapasitas</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.797.294.000,00</b>	<b>2.898.019.119,00</b>	<b>76,32</b>	<b>100</b>		
a	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah peserta bimbingan teknis DPRD	600	orang	600	orang	100	2.999.916.000,00	2.185.950.371,00	72,87	98		
b	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah jenis publikasi dan dokumentasi Dewan	15	jenis	15	jenis	100	498.378.000,00	417.565.748,00	83,78	98		
c	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia	7	orang	7	orang	100	299.000.000,00	294.503.000,00	98,50	100		
<b>5</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase reses yang dilaksanakan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.852.475.800,00</b>	<b>4.195.607.451,00</b>	<b>86,46</b>	<b>100</b>		
a	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD tersusun	3	dokumen	3	dokumen	100	30.000.000,00	2.247.500,00	7,49	95		
b	Pelaksanaan reses	Jumlah reses yang dilaksanakan	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100	4.822.475.800,00	4.193.359.951,00	86,95	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>6</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>348.645.000,00</b>	<b>181.857.900,00</b>	<b>52,16</b>	<b>100</b>		
a	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik DPRD tersusun	-	dokumen	-	dokumen	100	-	-	-	-		
b	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah pengawasan pelaksanaan Kode Etik DPRD	6	kali	6	kali	100	348.645.000,00	181.857.900,00	52,16	95		
<b>7</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase DPRD terfasilitasi Tugasnya</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.069.404.221,00</b>	<b>2.844.437.498,00</b>	<b>92,67</b>	<b>100</b>		
a	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD yang dilaksanakan	12	Kali	12	Kali	100	189.389.021,00	133.876.312,00	70,69	97		
b	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah frekuensi fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	13	Kali	13	Kali	100	1.112.818.200,00	1.001.415.376,00	89,99	100		
c	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah frekuensi fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	15	Kali	15	Kali	100	1.767.197.000,00	1.709.145.810,00	96,72	100		
<b>Jumlah</b>								<b>68.732.054.044</b>	<b>63.320.597.102</b>	<b>92,13</b>			

**URUSAN : FUNGSI PENUNJANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**BADAN KESEBANGPOL**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditunjang	100	persen	100	persen	100	3.747.156.626	3.242.031.893	100	100		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji tunjangan ASN dan penyelesaian	100	persen	100	persen	100	3.093.254.602	2.629.939.740	85,02	100		
a	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	39	orang/bulan	17	orang/bulan	43,58974359	2.999.474.314	2.543.006.316	85	100	adanya silpa anggaran gaji dan TPP karena danya pegawai yang pensiun	perlu adanya koordinasi dengan bagian anggaran
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN THL Administrasi Terbayar	12	Dokumen	12	Dokumen	100	93.780.288	86.933.424	93	100		
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100	persen	100	persen	100	215.853.100	197.194.281	91,36	100		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6	Paket	6	Paket	100	3.000.000	2.934.000	98	100		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	28	Paket	28	Paket	100	32.000.000	26.406.151	83	100		
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	24	Paket	24	Paket	100	15.603.100	12.932.800	83	100		
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	48	Dokumen	48	Dokumen	100	2.000.000	1.500.000	75	90	Bahan Bacaan sudah terpenuhi	
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Kunjungan Tamu terfasilitas	24	Laporan	24	Laporan	100	33.250.000	27.969.000	84	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	54	Laporan	54	Laporan	100	130.000.000	125.452.330	97	87	Adanya Efisiensi anggaran dalam pembelian tiket pesawat dan sewa hotel serta biaya taksi	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	persen	100	persen	100	120.000.000	117.038.165	98	92		
a	Penyediaan Jasa Surat Mer	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	750	Laporan	750	Laporan	100	2.000.000	1.996.000	100	76	kegiatan surat menyurat sudah terpenuhi	lebih di kroscek lagi dalam merencanakan anggaran
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	36	Laporan	36	Laporan	100	36.000.000	33.530.376	93	100	Tidak terlaksananya penambahan daya listrik karena setelah diperbaiki listrik mencukupi	lebih di kroscek lagi dalam merencanakan anggaran
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	12	Laporan	12	Laporan	100	82.000.000	81.511.789	99	100	Honor thl sudah terbayar	lebih di kroscek lagi dalam merencanakan anggaran
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	persen	100	persen	100	318.048.924	297.859.707	94	100		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	Unit	7	Unit	100	148.048.924	137.006.707	93	100		
b	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	4	Unit	4	Unit	100	5.000.000	4.280.000	86	100		
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	100	160.000.000	151.400.000	95	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	Unit	5	Unit	100	10.000.000	5.173.000	52	100		
II	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan	4	persen	3,97	persen	99,25	196.400.000	141.715.100	72	100	Adanya efisiensi terkait honor narasumber, tempat acara dan sewa alat sound	
		Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh	4	persen	4	persen	100						
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan	100	persen	100	persen	100	196.400.000	141.715.100	72	100		
a	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yang disusun	1	dokumen	1	dokumen	100	5.000.000	1.900.000	38	100		
b	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	200	orang	200	orang	100	191.400.000	139.815.100	73	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
III	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya politik</b>	Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu didukung pemerintah daerah	65	persen	100	persen	100	28.697.779.500	28.463.386.200	99	100		
		Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan	4	persen	2,17	persen	54,25					Jumlah Pemilih pemula meningkat sementara anggaran tidak mencukupi untuk mencapai target	Bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu untuk mengadakan kegiatan pendidikan politik
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Politik di daerah yang dilaksanakan pemilih dalam pemilu	100	persen	100	persen	100	28.697.779.500	28.463.386.200	99	100		
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300	orang	300	orang	100	28.697.779.500	28.463.386.200	99	100	Adanya Efisiensi dalam honor narasumber internal OPD	
IV	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan masyarakat yang dibina dan diawasi di daerah	100	persen	100	persen	100	1.282.225.500	1.278.636.750	100	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan	100	persen	100	persen	100	1.282.225.500	1.278.636.750	100	100		
a	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200	orang	200	orang	100	1.282.225.500	1.278.636.750	100	100		
V	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa terbentuk ekonomi sosial dan budaya yang dibina dan dikembangkan di daerah	67	persen	100	persen	100	89.750.000	74.185.250	83	100	Adanya efisiensi terkait honor narasumber, tempat acara dan sewa alat sound	
		Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar	12	persen	19,79	persen	164,9166667						
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase Kebijakan teknis pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, dan Budaya	100	persen	100	persen	100	89.750.000	74.185.250	83	100		
a	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2	dokumen	1	dokumen	50	5.000.000	1.663.500	33	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	200	orang	200	orang	100	80.000.000	63.189.750	79	100	Adanya Efisiensi dalam honor narasumber internal OPD	
b	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	orang	40	orang	40	4.750.000	4.522.000	95	100		
c	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	12	laporan	12	laporan	100	5.000.000	4.810.000	96	100		
VI	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	80-	persen	100	persen	100	1.956.002.500	1.751.358.599	90	100		
		Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	100	persen	100	persen	100						
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	100	persen	100	persen	100	1.956.002.500	1.751.358.599	90	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	orang	100	orang	100	247.500.000	164.800.199	67	100	Adanya Efisiensi dalam honor narasumber internal OPD	
a	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana</i>	12	dokumen	12	dokumen	100	1.708.502.500	1.586.558.400	93	100		
<b>Jumlah</b>								<b>35.969.314.126</b>	<b>34.951.313.792</b>	<b>97</b>			

URUSAN : PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BAGIAN UMUM</b>													
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100	42.691.376.456	36.484.894.520	85	<b>100</b>		
		<b>Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		100				<b>100</b>		
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100	53.587.000	29.020.000	54	<b>100</b>		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		dokumen		dokumen							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	6	dokumen	100	53.587.000	29.020.000	54	100		
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100	20.008.617.656	16.622.066.651	83	<b>100</b>		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		Orang		Orang							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140	orang/bulan	140	orang/bulan	100	19.748.377.656	16.385.632.300	83	100		
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu		bulan		bulan							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28	dokumen	28	dokumen	100	141.000.000	135.529.750	96	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun		dokumen		dokumen							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400	dokumen	400	dokumen	100	89.240.000	87.622.101	98	100		
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		dokumen		dokumen							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1	laporan	100	30.000.000	13.282.500	44	100		
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah pada sekretariat daerah teradministrasi dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100	10.000.000	6.021.000	60	<b>100</b>		
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun		dokumen		dokumen							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16	laporan	16	laporan	100	10.000.000	6.021.000	60	100		
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100	10.000.000	6.852.000	69	<b>100</b>		
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Administrasi Kepegawaian		dokumen		dokumen							
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	dokumen	5	dokumen	100	10.000.000	6.852.000	69	100		
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100	4.920.100.000	4.306.490.520	88	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia		unit		unit							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75	paket	75	paket	100	300.000.000	261.342.812	87	100		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia		unit		unit							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	66	paket	66	paket	100	250.000.000	238.553.100	95	100		
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia		unit		unit							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	paket	3	paket	100	100.000.000	85.244.848	85	100		
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor tersedia		unit		unit							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	paket	2	paket	100	235.000.000	186.363.050	79	100		
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia		eksempla r		eksempla r							
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	12	paket	100	200.000.000	186.435.800	93	100		
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia		eksempla r		eksempla r							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	dokumen	6	dokumen	100	42.000.000	41.874.945	100	100		
g	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi		kali		kali							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600	laporan	600	laporan	100	2.823.100.000	2.585.530.502	92	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kali		Kali							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	laporan	300	laporan	100	970.000.000	721.145.463	74	100		
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100	1.088.034.800	919.149.700	84	<b>100</b>		
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		unit		unit							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		unit	-	unit		-	-				
b	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		unit		unit							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	unit	9	unit	100	356.313.000	324.945.700	91	100		
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan Pengadaan sarana dan prasara pendukung gedung kantor/bangunan lainnya		unit		unit							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	637	unit	637	unit	100	731.721.800	594.204.000	81	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	100	7.324.500.000	6.425.494.174	88	<b>100</b>		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim		eksemplar		eksemplar							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	2	laporan	100	95.000.000	71.440.834	75	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar		bulan		bulan							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	4	laporan	100	2.298.500.000	1.932.841.059	84	100		
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		unit		unit							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	500	laporan	500	laporan	100	1.480.000.000	1.472.597.500	99	100		
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		Orang		Orang							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	laporan	3	laporan	100	3.451.000.000	2.948.614.781	85	100		
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	100	2.931.790.000	2.577.871.410	88	<b>100</b>		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar		unit		unit							

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9	unit	9	unit	100	409.500.000	388.109.058	95	100		
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		unit		unit							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46	unit	46	unit	100	1.300.000.000	1.152.209.541	89	100		
c	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara		unit		unit							
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	236	unit	236	unit	100	80.000.000	77.210.000	97	100		
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit		unit							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	5	unit	100	950.000.000	791.344.551	83	100		
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit		unit							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	110	unit	110	unit	100	192.290.000	168.998.260	88	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	100	%	100	%	100	2.794.747.000	2.167.163.590	78	100		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		bulan		bulan							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	orang/bulan	12	orang/bulan	100	174.747.000	168.402.604	96	100		
b	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan		stel		stel							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	paket	6	paket	100	150.000.000	142.775.000	95	100		
c	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Orang		Orang							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	orang	2	orang	100	175.000.000	165.070.533	94	100		
d	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersedia		bulan		bulan							
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48	orang/bulan	48	orang/bulan	100	2.295.000.000	1.690.915.453	74	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
10	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah	100	%	100	%	100	3.550.000.000	3.424.765.475	96	100		
a	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		bulan		bulan							
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10	paket	10	paket	100	2.260.000.000	2.204.677.584	98	100		
b	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang tersedia		bulan		bulan							
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9	paket	9	paket	100	1.290.000.000	1.220.087.891	95	100		
c	Penyediaan Kebutuhan Rumah Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitasi kegiatan pelantikan		kegiatan		kegiatan							
		Jumlah fasilitasi kegiatan pelantikan	-	kegiatan		kegiatan		-					
<b>JUMLAH</b>								<b>42.691.376.456</b>	<b>36.484.894.520</b>	<b>85</b>			

URUSAN : PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KLATEN</b>													
<b>I</b>	<b>Program Administrasi Umum</b>	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatian Setda yang Sesuai SOP	100	%	100	%	100	4.366.200.000	4.048.349.107	93	100		
		Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Terlaksana Dengan Baik	100	%	100	%	100						
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	100	%	100	199.393.000	197.890.641	99	100		
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62	Paket	62	Paket	100	40.000.000	39.150.420	98	100		
b	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedia	10	Paket	10	Paket	100	35.000.000	34.569.000	99	100		
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72	Dokumen	72	Dokumen	100	7.203.000	7.202.400	100	100		
d	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	12	Laporan	12	Laporan	100	10.000.000	9.937.000	99	100		
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	Laporan	190	Laporan	106	107.190.000	107.031.821	100	100		
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100	%	100	%	100	83.707.000	77.178.429	92	100		
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	2	Unit	100	25.000.000	23.804.429	95	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	3	Unit	150	58.707.000	53.374.000	91	100		
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100	%	100	%	100	125.000.000	116.655.373	93	100		
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	2	Laporan	100	125.000.000	116.655.373	93	100		
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100	%	100	%	100	153.760.000	151.478.308	99	100		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	10	Unit	100	153.760.000	151.478.308	99	100		
5	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Sesuai Dengan SOP	100	%	100	%	100	3.804.340.000	3.505.146.356	92	100		
a	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	360	Laporan	360	Laporan	100	478.580.000	451.195.918	94	100		
b	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang Sesuai Dengan SOP	560	Laporan	560	Laporan	100	2.414.260.000	2.173.251.055	90	100		
c	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Tugas Pimpinan yang Sesuai SOP	1750	Laporan	1750	Laporan	100	911.500.000	880.699.383	97	100		
		<b>Jumlah</b>						<b>4.366.200.000</b>	<b>4.048.349.107</b>	97			

URUSAN : PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BAGIAN ORGANISASI</b>													
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	658.920.000	636.433.580	96,59			
		Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>						
		Persentase perangkat daerah yang kelebagaannya dievaluasi	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>						
<b>1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	124.963.000	124.560.610	99,68			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43	Paket	43	Paket	<b>100</b>	12.000.000	11.630.900	96,92	100		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	20	Paket	<b>100</b>	6.072.000	6.071.800	100,00	100		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen	36	Dokumen	<b>100</b>	3.084.000	3.084.000	100,00	100		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	6	Laporan	<b>100</b>	2.807.000	2.774.000	98,82	100		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52	Laporan	52	Laporan	<b>100</b>	101.000.000	100.999.910	100,00	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	%	100	%	100	1.237.000	1.236.000	99,92			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200	Laporan	200	Laporan	100	1.237.000	1.236.000	99,92	100		
3	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	100	%	100	44.220.000	40.518.496	91,63			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unit	5	unit	100	39.880.000	36.178.496	90,72	100		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	5	unit	100	4.340.000	4.340.000	100,00	100		
4	<b>Penataan Organisasi</b>	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun	100	%	100	%	100	488.500.000	470.118.474	96,24			
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5	Dokumen	5	Dokumen	100	136.900.209	131.366.378	95,96	100		
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	Laporan	3	Laporan	100	125.335.148	120.894.513	96,46	100		
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5	Dokumen	5	Dokumen	100	210.399.943	202.153.583	96,08	100		
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	Dokumen	3	Dokumen	100	15.864.700	15.704.000	98,99	100		
		<b>Jumlah</b>						<b>658.920.000</b>	<b>636.433.580</b>	<b>96,59</b>			

## URUSAN : PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

## SEKRETARIAT DAERAH

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA</b>													
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>98.660.000</b>	<b>98.161.630</b>	<b>99,5</b>	100		
1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>38.000.000</b>	<b>37.774.500</b>	<b>99,4</b>	100		
a	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13	Paket	13	Paket	100	10.000.000	9.803.500	98,0	100	-	-
b	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	Paket	3	Paket	100	12.000.000	11.972.500	99,8	100	-	-
c	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20	Laporan	20	Laporan	100	16.000.000	15.998.500	100,0	100	-	-
2	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>60.660.000</b>	<b>60.387.130</b>	<b>99,6</b>	100		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5	Unit	5	Unit	100	50.680.000	50.412.130	99,5	100		
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13	Unit	13	Unit	100	-	-	-	-		
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13	Unit	13	Unit	100	9.980.000	9.975.000	99,9	100		
II	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase BLUD yang Mendapatkan Pembinaan Teknis</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.922.000.000</b>	<b>2.524.601.859</b>	<b>86,4</b>	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		<b>Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang Terlaksana Sesuai dengan Ketentuan</b>	100	%	100	%	100						
		<b>Persentase pertumbuhan setoran bagian laba BUMD kepada Pemerintah Daerah</b>	5	%	14,76	%	295						
		<b>Persentase rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi daerah yang ditindaklanjuti</b>	100	%	100	%	100						
		<b>Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan</b>	5	%	-69,71	%	-1394,2					Realisasi pertumbuhan jumlah usaha Mikro lebih kecil dari tahun n-1 karena secara umum kondisi ekonomi melambat atau mengalami penurunan.	Mengoptimalkan koordinasi dan Sosialisasi tentang Percepatan Akses Keuangan
1	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian tepat waktu</b>	100	%	100	%	100	2.377.000.000	2.242.189.608	94,3	100		
a	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	39	Dokumen	39	Dokumen	100	90.000.000	80.278.054	89,2	100		
b	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	Laporan	1	Laporan	100	197.000.000	171.316.000	87,0	100		
c	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan ekonomi Mikro Kecil	1	Dokumen	1	Dokumen	100	2.090.000.000	1.990.595.554	95,2	100		
2	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan</b>	100	%	100	%	100	545.000.000	282.412.251	51,8	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja.	3	Dokumen	3	Dokumen	100	485.000.000	248.663.251	51,3	100	Beberapa kegiatan paket meeting di luar daerah dilaksanakan secara daring karena menyesuaikan jadwal dari sekretariat Provinsi	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan antar OPD di Kab. Klaten
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	2	Dokumen	2	Dokumen	100	60.000.000	33.749.000	56,2	100	Kewenangan Kebijakan terkait SDA (Sumber Daya Alam) ada di Pemerintah Provinsi juga Pemerintah Pusat.	Mengoptimalkan Koordinasi anatar OPD dan dengan Pemerintah Provinsi juga Pemerintah Pusat.
<b>Jumlah</b>								<b>3.020.660.000</b>	<b>2.622.763.489</b>	<b>86,8</b>			



## URUSAN : PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

## SEKRETARIAT DAERAH

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## BAGIAN HUKUM

<b>I</b>	<b>PROGRAM ADMNITRASI UMUM</b>	<b>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>503.580.000</b>	<b>479.602.109</b>	<b>95</b>	<b>100</b>		
1	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>200.000.000</b>	180.979.550	<b>90</b>	<b>100</b>		
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>600</b>	<b>orang</b>	<b>600</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>200.000.000</b>	180.979.550	<b>90</b>	<b>100</b>		
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>120.900.000</b>	<b>120.137.806</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	40	paket	40	paket	<b>100</b>	7.000.000	6.738.200	<b>96</b>	<b>100</b>		
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6	paket	6	paket	<b>100</b>	5.600.000	5.595.100	<b>100</b>	<b>100</b>		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	360	dokumen	360	dokumen	<b>100</b>	1.800.000	1.800.000	<b>100</b>	<b>100</b>		
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	15	laporan	15	laporan	<b>100</b>	5.000.000	4.826.000	<b>97</b>	<b>100</b>		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	50	laporan	50	laporan	<b>100</b>	100.000.000	99.948.206	<b>100</b>	<b>100</b>		
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	350	dokumen	350	dokumen	<b>100</b>	1.500.000	1.230.300	<b>82</b>	<b>100</b>		
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>128.980.000</b>	<b>127.160.000</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
0	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	0	UNIT	0	UNIT		-					
8	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	5	UNIT	5	UNIT	<b>100</b>	1.500.000	1.462.000	<b>97</b>	<b>140</b>		
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5	UNIT	5	UNIT	<b>100</b>	127.480.000	125.698.000	<b>99</b>	<b>140</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	100	%	100	53.700.000	51.324.753	96	100		
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	4	UNIT	4	UNIT	100	43.350.000	41.274.753	95	100		
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	6	UNIT	6	UNIT	100	10.350.000	10.050.000	97	100		
II	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	100	%	100	%	100	1.583.920.000	1.516.410.642	96	111		
		Persentase kasus Hukum yang menimpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum	100	%	160	%	160				111		
4	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	100	%	100	%	100	1.583.920.000	1.516.410.642	96	111		
		Prosentase kasus hukum yang menimpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum	100	%	100	%	100				111		
		Persentase produk hukum yang diinformasikan	100	%	100	%	100				100		
12	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	600	dokumen	600	dokumen	100	615.000.000	598.621.378	97	100		
13	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	14	Kasus	12	Kasus	86	583.920.000	558.247.446	96	100	Sampai Akhir Tahun 2023 terdapat 12 kasus permasalahan hukum yang dimohonkan untuk pendampingan bantuan Hukum	untuk tahun 2023 target belum terpenuhi karena sampai bulan desember 2023 tidak ada permohonan bantuan hukum bagi opd dan desa
14	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan/ atau dipublikasikan	600	DOKUMEN	600	DOKUMEN	100	385.000.000	359.541.818	93	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>2.087.500.000</b>	<b>1.996.012.751</b>	<b>96</b>			

## URUSAN : PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

## SEKRETARIAT DAERAH

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	100	%	100	%	100	284.527.000	212.360.040	75	100		
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100	%	100	%	100	2.000.000	1.907.900	95	100		
a	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2	Laporan	2	Laporan	100	2.000.000	1.907.900	95	100		
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum</b>	100	%	100	%	100	155.867.000	95.955.648	62	100		
a	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	Dokumen	12	Dokumen	100	1.476.000	1.476.000	100	100		
b	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100	154.391.000	94.479.648	61	100		
3	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara</b>	100	%	100	%	100	38.400.000	32.710.000	85	100		
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Unit	4	Unit	100	38.400.000	32.710.000	85	100		
4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara</b>	100	%	100	%	100	88.260.000	81.786.492	93	100		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5	Unit	5	Unit	100	72.760.000	68.086.492	94	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13	Unit	13	Unit	100	15.500.000	13.700.000	88	100		
<b>II</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Urusan Pemerintah Daerah Bagian Pembangunan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>708.626.550</b>	<b>568.768.290</b>	<b>80</b>	<b>100</b>		
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase Administrasi Pembangunan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>708.626.550</b>	<b>568.768.290</b>	<b>80</b>	<b>100</b>		
a	Fasilitasi Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Dokumen	4	Dokumen	100	19.788.800	13.726.750	69	100		
b	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Laporan	1	Laporan	100	285.513.200	253.628.540	89	100		
c	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	Laporan	4	Laporan	100	403.324.550	301.413.000	75	100		
		<b>JUMLAH</b>						<b>993.153.550</b>	<b>781.128.330</b>	<b>79</b>	<b>100</b>		

## URUSAN : PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

## SEKRETARIAT DAERAH

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>													
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>241.553.000</b>	<b>216.501.410</b>	<b>89,63</b>			
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.030.000</b>	<b>3.030.000</b>	<b>100,00</b>			
a	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	dokumen	1	dokumen	100	3.030.000	3.030.000	100,00	100		
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>76.403.000</b>	<b>65.901.984</b>	<b>86,26</b>			
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	4	paket	100	10.045.000	8.634.800	85,96	100		
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	2	paket	100	8.000.000	7.676.140	95,95	100		
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	dokumen	3	dokumen	100	3.500.000	3.480.100	99,43	100		
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8	laporan	8	laporan	100	12.000.000	5.755.000	47,96	100	termasuk anggaran	
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	laporan	100	42.858.000	40.355.944	94,16	100		
3	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000</b>	<b>92.802.600</b>	<b>92,80</b>			
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	unit	2	unit	100	10.000.000	4.000.000	40,00	100	Efisiensi anggaran	
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	unit	8	unit	100	90.000.000	88.802.600	98,67	100		
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.491.300</b>	<b>74,57</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	100	2.000.000	1.491.300	74,57	100		
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>60.120.000</b>	<b>53.275.526</b>	<b>88,62</b>			
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unit	5	unit	100	45.120.000	39.536.026	87,62	100		
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21	unit	21	unit	100	15.000.000	13.739.500	91,60	100		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>924.367.000</b>	<b>563.591.453</b>	<b>60,97</b>			
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>924.367.000</b>	<b>563.591.453</b>	<b>60,97</b>			
a	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	dokumen	12	dokumen	100	678.680.000	411.022.437	60,56	100	Kegiatan yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan PMK No. 67 Tahun 2023	
b	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	dokumen	12	dokumen	100	100.730.000	73.666.236	73,13	100		
c	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200	orang	120	orang	60	144.957.000	78.902.780	54,43	100	Jumlah peserta pembinaan dan advokasi tidak sesuai dengan perencanaan (target)	
	<b>TOTAL</b>							<b>1.165.920.000</b>	<b>780.092.863</b>	<b>66,91</b>			

URUSAN : PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>													
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP</b>	100	persen	100	persen	100	692.850.000	556.049.477	80	80		
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	100	persen	-	persen	-	-	-	-	-		
	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honor KPA,PPTKA,PPA SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu	0	dokumen	-	dokumen	-	-	-	-	-		
2	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	100	persen	100	persen	100	143.005.000	104.447.650	73	100		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	47	paket	47	paket	100	20.000.000	17.333.250	87	100		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	2	paket	2	paket	100	17.695.000	17.694.900	100	100		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	3	dokumen	3	dokumen	100	3.084.000	2.832.000	92	83		
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	42	laporan	42	laporan	100	39.750.000	14.006.500	35	100		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	laporan	84	laporan	140	62.476.000	52.581.000	84	100		
3	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	100	persen	100	persen	100	53.000.000	50.940.000	96	100		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	8	unit	8	unit	100	38.000.000	36.000.000	95	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3	unit	3	unit	100	15.000.000	14.940.000	100	100		
4	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>439.215.000</b>	<b>360.182.262</b>	<b>82</b>	<b>100</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	20	laporan	-	laporan	-	1.440.000	-	-	95		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	48	laporan	48	laporan	100	320.000.000	253.343.942	79	90		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	26	laporan	26	laporan	100	18.460.000	7.525.000	41	95		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	12	laporan	12	laporan	100	99.315.000	99.313.320	100	92		
5	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>57.630.000</b>	<b>40.479.565</b>	<b>70</b>	<b>100</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak,dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	6	unit	6	unit	100	57.630.000	40.479.565	70	95		
II	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan</b>	100	persen	79	persen	79	<b>9.323.034.000</b>	<b>7.364.339.172</b>	79	79		
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan</b>	100	persen	79	persen	79	<b>9.323.034.000</b>	<b>7.364.339.172</b>	79	79		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah terlaksananya pendampingan rohani, atau hari besar keagamaan kepala daerah Forkompimda, Eksekutif, ASN, Tokoh agama, Majelis taklim dan kegiatan Qori/Qoriah, Hafid/Hafifidzah, Organisasi Keagamaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Pelayanan Jamaah Haji, Operasional Masjid Pemda dan Fasilitasi Bantuan Tempat Ibadah	23	dokumen	23	dokumen	100	7.425.000.000	5.658.041.672	76	98	Ada Kegiatan yang tidak dapat di laksanakan di karenakan adanya kesamaan dengan OPD lain/efisiensi anggaran	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka melaksanakan kegiatan
2	Pelaksanaan Kebijakan ,Evaluasi,dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah terlaksananya kebijakan, evaluasi dan kesejahteraan sosial terkoordinasi	28	dokumen	28	dokumen	100	1.819.250.000	1.642.420.000	90	78	Ada 2 Lembaga/ormas yang tidak dapat terealisasi belanja hibahnya karena tidak memenuhi administrasi	Koordinasi dengan lembaga/ormas dan mengadakan verifikasi
3	Pelaksanaan Kebijakan ,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah terlaksananya kebijakan, evaluasi dan kesejahteraan masyarakat terkoordinasi	5	dokumen	5	dokumen	100	78.784.000	63.877.500	81	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>10.015.884.000</b>	<b>7.920.388.649</b>	<b>79,08</b>			

**URUSAN : PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>													
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP</b>	100	%	100	%	100	270.767.000	247.220.930	91,3			
<b>I</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	100	%	100	%	100	185.508.500	177.901.052	95,9			
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33	paket	33	paket	100	15.000.000	14.119.600	94,1	100		
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	3	paket	100	20.000.000	19.951.500	99,8	100		
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1.143	dokumen	1143	dokumen	100	4.560.000	4.238.000	92,9	100		
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	laporan	27,00	laporan	180	35.000.000	34.705.100	99,2	100		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	laporan	60	laporan	120	110.948.500	104.886.852	94,5	100		
<b>II</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	100	%	100,00	%	100	15.432.500	15.400.000	99,8			
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	unit	1	unit	100	3.500.000	3.500.000	100,0	100		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	1	unit	100	11.932.500	11.900.000	99,7	100		
<b>III</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	100	%	100	%	100	69.826.000	53.919.878	77,2			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unit	5	unit	100	47.506.000	32.988.378	69,4	100		
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	unit	8	unit	100	3.980.000	3.800.000	95,5	100		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	26	unit	26	unit	100	18.340.000	17.131.500	93,4	100		
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana</b>	100	%	100	%	100	548.143.000	517.249.665	94,4			
		<b>Persentase KECAMATAN mencapai KATEGORI "WASANA"</b>	30,77	%	57,692308	%	187						
<b>I</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yang terlaksana</b>	100	%	100	%	100	451.143.000	432.170.865	95,8			
		<b>Persentase administrasi Kewilayahan yang terkelola</b>	100	%	100	%	100						
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4	dokumen	4	dokumen	100	15.000.000	14.788.500	98,6	100		
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	dokumen	4	dokumen	100	200.700.000	191.395.365	95,4	100		
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	dokumen	5	dokumen	100	235.443.000	225.987.000	96,0	100		
<b>II</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi kerjasama yang terlaksana</b>	100	%	100	%	100	97.000.000	85.078.800	87,7			
1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15	Dokumen	33	Dokumen	220	75.000.000	69.408.300	92,5	100		
2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1	Dokumen	1	Dokumen	100	10.000.000	5.300.500	53,0	100		
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2	Laporan	2	Laporan	100	12.000.000	10.370.000	86,4	100		
	<b>JUMLAH</b>							<b>818.910.000</b>	<b>764.470.595</b>	<b>93,4</b>			

**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN WONOSARI**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase Urusan Pemerintah di Wilayah Kecamatan Wonosari yang ditunjang</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.892.533.088</b>	<b>2.404.631.410</b>	<b>83</b>	<b>100</b>		
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.797.000</b>	<b>88</b>	<b>100</b>		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	6	Dokumen	100	5.000.000	4.821.000	96	100		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100	5.000.000	3.976.000	80	100		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.419.647.008</b>	<b>1.966.491.342</b>	<b>81</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	orang/Bulan	16	orang/Bulan	100	2.400.647.008	1.952.279.842	81	100		
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	dokumen	1	dokumen	100	13.000.000	9.090.000	70	100		
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4	Laporan	4	Laporan	100	3.000.000	2.513.500	84	100		
d	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	1	dokumen	100	3.000.000	2.608.000	87	100		
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>71.352.160</b>	<b>70.106.910</b>	<b>98</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	unit	15	unit	100	7.490.160	7.438.500	99	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	100	6.000.000	5.866.500	98	100		
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	6	Paket	100	6.000.000	5.940.000	99	100		
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	12	laporan	100	10.000.000	9.851.000	99	100		
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	laporan	100	41.862.000	41.010.910	98	100		
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>42.533.920</b>	<b>42.100.000</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	unit	3	unit	100	4.000.000	3.950.000	99	100		
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	unit	5	unit	100	38.533.920	38.150.000	99	100		
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>165.000.000</b>	<b>151.868.013</b>	<b>92</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	1	laporan	100	15.000.000	7.565.000	50	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	100	27.000.000	23.255.293	86	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	123.000.000	121.047.720	98	100		
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>184.000.000</b>	<b>165.268.145</b>	<b>90</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	<b>8</b>	<b>unit</b>	<b>8</b>	<b>unit</b>	<b>100</b>	<b>51.000.000</b>	<b>36.159.420</b>	<b>71</b>	<b>100</b>		
b	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	<b>3</b>	<b>unit</b>	<b>3</b>	<b>unit</b>	<b>100</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>96</b>	<b>100</b>		
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	<b>10</b>	<b>unit</b>	<b>10</b>	<b>unit</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.186.000</b>	<b>92</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	4	unit	100	11.000.000	10.500.000	95	100		
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	3	unit	100	10.000.000	9.976.000	100	100		
f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	3	unit	100	100.000.000	97.526.725	98	100		
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.766.750</b>	<b>95</b>	<b>100</b>		
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.766.750</b>	<b>95</b>	<b>100</b>		
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	dokumen	1	dokumen	100	5.000.000	4.766.750	95	100		
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>93</b>	<b>%</b>	<b>93</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>351.510.280</b>	<b>332.675.005</b>	<b>95</b>	<b>100</b>		
1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>351.510.280</b>	<b>332.675.005</b>	<b>95</b>	<b>100</b>		
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga	6	Lembaga	100	12.000.000	10.529.000	88	100		
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	100	339.510.280	322.146.005	95	100		
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>109.400.000</b>	<b>105.630.000</b>	<b>97</b>	<b>100</b>		
1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi ketentrman dan ketertiban umum yang dilakukan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100.400.000</b>	<b>97.067.000</b>	<b>97</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	100	93.400.000	90.569.000	97	100		
b	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	laporan	1	laporan	100	7.000.000	6.498.000	93	100		
<b>2</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.563.000</b>	<b>95</b>	<b>100</b>		
a	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	1	Laporan	100	9.000.000	8.563.000	95	100		
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.405.000</b>	<b>94</b>	<b>100</b>		
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.405.000</b>	<b>94</b>	<b>100</b>		
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25	orang	25	orang	100	5.000.000	4.779.000	96	100		
c	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	laporan	1	laporan	100	5.000.000	4.626.000	93	100		
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu</b>	<b>94</b>	<b>%</b>	<b>94</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>71.500.000</b>	<b>63.340.000</b>	<b>89</b>	<b>100</b>		
		<b>Prosentase Desa Tertib Administrasi</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	%	100	%	100	71.500.000	63.340.000	89	100		
a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	dokumen	1	dokumen	100	10.000.000	7.221.000	72	100		
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	dokumen	1	dokumen	100	17.500.000	17.231.000	98	100		
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	dokumen	1	dokumen	100	10.000.000	9.627.000	96	100		
d	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	dokumen	1	dokumen	100	5.000.000	4.030.000	81	100		
e	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	dokumen	1	dokumen	100	19.000.000	17.018.000	90	100		
f	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	1	dokumen	1	dokumen	100	5.000.000	4.446.000	89	100		
9	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	1	laporan	1	laporan	100	5.000.000	3.767.000	75	100		
		<b>JUMLAH</b>						<b>3.439.943.368</b>	<b>2.920.448.165</b>	<b>85</b>			



**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN MANISRENGGO**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.746.945.896</b>	<b>2.291.685.962</b>	<b>83</b>	<b>100</b>		
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.996.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	7	Dokumen	100	3.000.000	2.998.000	<b>100</b>	100		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100	2.000.000	1.998.400	<b>100</b>	100		
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase pembayaran gaji, tunjangan, ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.067.475.936</b>	<b>1.652.789.432</b>	<b>80</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang/Bulan	19	Orang/Bulan	100	2.062.475.936	1647796432	<b>80</b>	100	Kekosongan ASN Di OPD dan 4 Orang Pensiun Pada Tahun 2024	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Dokumen	2	Dokumen	100	3.000.000	2995700	<b>100</b>	100		
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	4	Laporan	100	2.000.000	1997300	<b>100</b>	100		
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>154.958.580</b>	<b>148.660.150</b>	<b>96</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	7	Paket	100	6.000.000	5916000	<b>99</b>	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27	Paket	27	Paket	100	39.892.580	38924150	98	100		
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	100	8.000.000	7975000	100	100		
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	24	Laporan	100	45.050.000	44625000	99	100		
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	20	Laporan	100	56.016.000	51220000	91	100		
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>110.191.000</b>	<b>89.950.000</b>	<b>82</b>	<b>100</b>		
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	4	Unit	100	10.000.000	9.800.000	98	100		
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	3	Unit	100	100.191.000	80.150.000	80	100	Efisiensi Anggaran Dalam Pengadaan Barang	
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>124.860.380</b>	<b>119.000.720</b>	<b>95</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200	Laporan	200	Laporan	100	3.000.000	2992000	100	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	18.800.000	17238220	92	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	5	Laporan	100	103.060.380	98770500	96	100		
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>284.460.000</b>	<b>276.289.260</b>	<b>97</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	3	Unit	100	48.880.000	43719760	89	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	5	Unit	100	11.580.000	11320000	98	100		
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100	220.000.000	217262000	99	100		
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	6	Unit	100	4.000.000	3987500	100	100		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100	%	100	%	100	2.000.000	2.000.000	100	100		
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	Laporan	100	2.000.000	2.000.000	100	100		
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>67.540.000</b>	<b>66.965.600</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	100	%	100	67.540.000	66.965.600	99	100		
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16	Lembaga	16	Lembaga	100	5.000.000	4939800	99	100		
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16	Laporan	16	Laporan	100	62.540.000	62025800	99	100		
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>147.000.000</b>	<b>146.102.700</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100	%	100	%	100	142.000.000	141.134.500	99	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16	Laporan	16	Laporan	100	140.000.000	139.136.000	99	100		
b	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16	Laporan	16	Laporan	100	2.000.000	1.998.500	100	100		
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100	%	100	%	100	5.000.000	4.968.200	99	100		
a	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16	Laporan	16	Laporan	100	5.000.000	4.968.200	99	100		
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.942.400</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100	%	100	%	100	7.000.000	6.942.400	99	100		
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35	Orang	35	Orang	100	3.500.000	3.473.700	99	100		
b	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	Laporan	16	Laporan	100	3.500.000	3.468.700	99	100		
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi	95,00	%	95,00	%	100	198.730.000	174.154.850	88	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	97,00	%	97,00	%	100						
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100	%	100	%	100	198.730.000	174.154.850	<b>88</b>	100		
a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16	Dokumen	16	Dokumen	100	5.000.000	4.965.000	<b>99</b>	100		
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16	Dokumen	16	Dokumen	100	1.550.000	1.534.200	<b>99</b>	100		
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16	Dokumen	16	Dokumen	100	2.560.000	2.529.800	<b>99</b>	100		
d	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	Dokumen	16	Dokumen	100	18.300.000	17.563.100	<b>96</b>	100		
f	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	16	Dokumen	16	Dokumen	100	2.000.000	1.979.500	<b>99</b>	100		
g	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2	Dokumen	2	Dokumen	100	500.000	499.500	<b>100</b>	100		
h	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16	Dokumen	16	Dokumen	100	168.820.000	145.083.750	<b>86</b>	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>3.169.215.896</b>	<b>2.687.851.512</b>	<b>85</b>			

URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN DELANGGU

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>2.573.604.302</b>	<b>2.202.869.008</b>	<b>85,59</b>	<b>100</b>		
2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.999.765</b>	<b>99,99</b>	<b>100</b>		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah tersusun	8	Dokumen	8	Dokumen	<b>100</b>	2.000.000	2.000.000	100,00	100		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	<b>100</b>	2.000.000	1.999.765	99,99	100		
2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pembayaran Gaji, tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>2.084.014.072</b>	<b>1.720.372.447</b>	<b>82,55</b>	<b>100</b>		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang	14	Orang	<b>100</b>	2.075.014.072	1.711.449.547	82,48	100	dari BPKD	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	1	Dokumen		5.000.000	4.999.500				
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5	Dokumen	5	dokumen	<b>100</b>	1.500.000	1.499.900	99,99	100		
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	<b>100</b>	2.500.000	2.423.500				
2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>88.440.230</b>	<b>88.014.809</b>	<b>99,52</b>	<b>100</b>		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	unit	3	unit	<b>100</b>	15.813.830	15.546.309	98,31	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	100	7.453.000	7.452.280	99,99	100		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	100	6.850.000	6.825.000	99,64	100		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	24	Dokumen	100	3.932.400	3.930.400				
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	100	23.500.000	23.369.820	99,45	100		
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100	30.891.000	30.891.000	100,00	100		
2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>85.970.000</b>	<b>85.451.400</b>	<b>99,40</b>	<b>100</b>		
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	4	unit	100	85.970.000	85.451.400	99,40	100		
2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>175.523.000</b>	<b>171.589.828</b>	<b>97,76</b>	<b>100</b>		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100	5.000.000	4.945.200	98,90	100		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	30.000.000	29.842.984	99,48	100		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	140.523.000	136.801.644	97,35	100		
2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tepelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>135.657.000</b>	<b>133.440.759</b>	<b>98,37</b>	<b>100</b>		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	8	unit	100	53.830.000	53.080.759	98,61	90		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	unit	100	70.877.000	69.538.000	98,11	100		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	unit	8	unit	100	4.120.000	4.050.000				
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	3	unit	100	6.830.000	6.772.000	99,15	100		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>6.817.000</b>	<b>6.795.400</b>	<b>99,68</b>	<b>100</b>		
202	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>6.817.000</b>	<b>6.795.400</b>	<b>99,68</b>	<b>100</b>		
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	Jenis	100	6.817.000,00	6.795.400,00	99,68	100		
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>105,26</b>	<b>154.010.900</b>	<b>147.752.250</b>	<b>95,94</b>	<b>100</b>		
2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>154.010.900</b>	<b>147.752.250</b>	<b>95,94</b>	<b>100</b>		
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Lembaga Kemasyarakatan	5	Lembaga Kemasyarakatan	100	61.245.000	55.262.300	90,23	100		
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	100	92.765.900	92.489.950	99,70	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAB UMUM</b>	<b>PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN</b>	<b>96</b>	%	<b>100</b>	%	<b>104,17</b>	<b>273.646.000</b>	<b>272.919.250</b>	<b>99,73</b>	<b>100</b>		
2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</b>	<b>2</b>	%	<b>2</b>	%	<b>100</b>	<b>100.646.000</b>	<b>100.610.300</b>	<b>99,96</b>	<b>100</b>		
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	<b>100</b>	83.000.000	82.982.500	99,98	100		
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	1	Laporan	<b>100</b>	17.646.000	17.627.800	99,90	100		
2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>173.000.000</b>	<b>172.308.950</b>	<b>99,60</b>	<b>100</b>		
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	1	Laporan	<b>100</b>	173.000.000	172.308.950	99,60	100		
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI</b>	<b>96</b>	%	<b>100</b>	%	<b>104,17</b>	<b>7.584.500</b>	<b>7.550.200</b>	<b>99,55</b>	<b>100</b>		
2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>7.584.500</b>	<b>7.550.200</b>	<b>99,55</b>	<b>100</b>		
1	Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50	Orang	50	Orang	<b>100</b>	7.584.500	7.550.200	99,55	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PERSENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU</b>	<b>97</b>	%	<b>100</b>	%	<b>103,09</b>	<b>60.995.000</b>	<b>60.794.550</b>	<b>99,67</b>	<b>100</b>		
		<b>Persentase Desa tertib administrasi</b>	<b>95</b>	%	<b>100</b>	%	<b>105,26</b>						
2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>60.995.000</b>	<b>60.794.550</b>	<b>99,67</b>	<b>100</b>		
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16	Dokumen	16	Dokumen	<b>100</b>	5.000.000	4.980.400	99,61	100		
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16	Dokumen	16	Dokumen	<b>100</b>	14.995.000	14.957.150	99,75	100		
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16	Dokumen	16	Dokumen	<b>100</b>	3.000.000	2.990.800	99,69	100		
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	Dokumen	16	Dokumen	<b>100</b>	20.000.000	19.942.900	99,71	100		
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16	Dokumen	16	Dokumen	<b>100</b>	13.000.000	12.950.500	99,62	100		
6	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	<b>100</b>	5.000.000	4.972.800	99,46	100		
		<b>Jumlah</b>						<b>3.076.657.702</b>	<b>2.698.680.658</b>	<b>87,71</b>	<b>100</b>		

**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN BAYAT**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.394.362.847</b>	<b>1.897.790.202</b>	<b>79,26</b>			
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.892.000</b>	<b>2.807.000</b>	<b>97,06</b>			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	4	Dokumen	4	Dokumen	<b>100</b>	1.892.000	1.810.000	95,67	100		
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	4	Dokumen	4	Dokumen	<b>100</b>	1.000.000	997.000	99,70	100		
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.984.399.184</b>	<b>1.548.362.080</b>	<b>78,03</b>			
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	15	Orang	15	Orang	<b>100</b>	1.982.059.184	1.546.305.280	78,02	100		
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	5	Dokumen	5	Dokumen	<b>100</b>	2.340.000	2.056.800	87,90	100		
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>99.395.495</b>	<b>64.894.000</b>	<b>65,29</b>			
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	15	Unit	15	Unit	<b>100</b>	2.900.000	1.762.500	60,78	100		
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	5	Unit	5	Unit	<b>100</b>	11.670.395	10.246.500	87,80	100		
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	8.300	Eksemplar	8.300	Eksemplar	<b>100</b>	7.794.100	7.380.000	94,69	<b>100</b>		
1.3.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitas	100	Kali	100	Kali	<b>100</b>	21.200.000	15.065.000	71,06	100		
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370	Kali	370	Kali	<b>100</b>	55.831.000	30.440.000	54,52	100		
<b>1.4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>73.558.000</b>	<b>72.805.000</b>	<b>98,98</b>			
1.4.1	Pengadaan Mebel	<b>Jumlah Pengadaan Mebel</b>	<b>30</b>	<b>Unit</b>	<b>30</b>	<b>Unit</b>	<b>100</b>	23.000.000	22.700.000	98,70	100		
1.4.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2	Unit	2	Unit	<b>100</b>	50.558.000	50.105.000	99,10	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>146.397.240</b>	<b>135.596.741</b>	92,62			
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	850	Eksemplar	850	Eksemplar	100	6.000.000	5.153.750	85,90	100		
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12	Unit	12	Unit	100	22.000.000	15.826.271	71,94	100		
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	7	Orang	7	Orang	100	118.397.240	114.616.720	96,81	100		
1.6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>87.720.928</b>	<b>73.325.381</b>	83,59			
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	9	Unit	9	Unit	100	47.050.000	37.660.381	80,04	100		
1.6.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	30	Unit	30	Unit	100	8.000.000	7.465.000	93,31	100		
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	2	Unit	2	Unit	100	3.290.000	2.053.000	62,40	100		
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1	Unit	1	Unit	100	26.380.928	24.147.000	91,53	100		
1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1	Unit	1	Unit	100	3.000.000	2.000.000	66,67	100		
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.695.300</b>	92,38			
2.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.695.300</b>	92,38			
2.1.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	15	Jenis	15	Jenis	100	4.000.000	3.695.300	92,38	100		
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>95</b>	%	<b>93</b>	%	<b>98</b>	<b>60.076.000</b>	<b>40.929.600</b>	68,13			
3.1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>93</b>	%	<b>93</b>	%	<b>100</b>	<b>60.076.000</b>	<b>40.929.600</b>	68,13			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	18	Desa	18	Desa	100	14.319.000	12.565.000	87,75	100		
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	18	Desa	18	Desa	100	45.757.000	28.364.600	61,99	100		
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	99	<b>256.969.000</b>	<b>220.239.000</b>	85,71			
<b>4.1</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100	<b>84.969.000</b>	<b>82.760.000</b>	97,40			
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	7	Kegiatan	7	Kegiatan	100	78.356.000	77.400.000	98,78	100		
4.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100	6.613.000	5.360.000	81,05	100		
<b>4.2</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Presentase koordinasi penegakan perundang undangan yang dilakukan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>172.000.000</b>	<b>137.479.000</b>	<b>79,93</b>	<b>100</b>		
4.2.1	Koordinasi /Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi / Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	172.000.000	137.479.000	79,93	100		
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Presentase Penyelesaian Gangguan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100	<b>9.162.000</b>	<b>6.863.500</b>	74,91	<b>100</b>		
<b>5.1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	100	9.162.000	6.863.500	74,91	<b>100</b>		
5.1.1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan ( Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan ( Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100	9.162.000	6.863.500	74,91	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	98	%	95	%	97	107.444.000	53.616.800	49,90				
		Persentase desa tertib adminitrasi	97	%	94	%	97							
6.1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	100	<b>107.444.000</b>	<b>53.616.800</b>	<b>49,90</b>				
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18	Desa	18	Desa	100	8.530.000	6.570.000	77,02	100			
6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	18	Desa	18	Desa	100	11.896.000	6.600.000	55,48	100			
6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18	Desa	18	Desa	100	6.138.000	5.680.000	92,54	100			
6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	Desa	18	Desa	100	22.886.000	5.789.600	25,30	100			
6.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	18	Rekomendasi	18	Rekomendasi	100	1.146.000		-	100		kegiatan yang melibatkan BPD tidak terserap karena tidak ada kegiatan dengan BPD. Jika melibatkan dengan BPD biasanya dengan Kepala Desa dan ternyerah di Kegiatan yang lain.	
6.1.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	18	Desa	18	Desa	100	56.848.000	28.977.200	50,97	100			
			<b>Jumlah</b>					<b>2.832.013.847</b>	<b>2.223.134.402</b>	<b>78,50</b>				

URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN CEPER

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>2.913.506.768</b>	<b>2.413.161.606</b>	83	100		
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100</b>	%	100	%	<b>100</b>	<b>10.032.307</b>	<b>3.050.500</b>	30	100		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	4	Dokumen	4	Dokumen	<b>100</b>	5.000.000	2.750.500	55	100	Rapat koordinasi dilaksanakan dengan rapat koordinasi internal yang lain sehingga ada penghematan dalam belanja Makmin nya	akan dibentuk tim penyusunan laporan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja an Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	<b>100</b>	5.032.307	300.000	6	100	Rapat koordinasi dilaksanakan dengan rapat koordinasi internal yang lain sehingga ada penghematan dalam belanja Makmin nya	akan dibentuk tim penyusunan laporan
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	%	100	%	<b>100</b>	<b>2.486.959.911</b>	<b>2.118.880.351</b>	85	100		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	18	Orang	18	Orang	<b>100</b>	2.471.959.911	2.108.400.351	85	100		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	bulan	12	bulan	<b>100</b>	10.000.000	10.000.000	100	100		
3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	<b>100</b>	5.000.000	480.000	10	83	Rapat koordinasi dilaksanakan dengan rapat koordinasi internal yang lain sehingga ada penghematan dalam belanja Makmin nya	akan dibentuk tim penyusunan laporan

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	100	%	100	%	100	100.662.000	84.102.800	84	100		
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	1	Paket	100	16.550.000	3.967.500	24	100	Karena kondisi gedung kantor masih menyewa dan gedung tidak terlalu luas sehingga tidak banyak melakukan penggantian lampu serta peralatan listrik lainnya	pindah ke gedung baru
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	paket	1	paket	100	4.000.000	3.123.000	78	100		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	eksemplar	1	eksemplar	100	4.000.000	3.854.500	96	100		
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	24	Laporan	100	20.000.000	14.530.000	73	100		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	Laporan	12	Laporan	100	56.112.000	58.627.800	104	100		
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	100	%	75	%	75	36.367.500	31.200.000	86	85		
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2	unit	2	unit	100	36.367.500	31.200.000	86	100		
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	100	%	100	%	100	163.500.050	108.981.955	67	100		
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	100	6.000.000	2.020.000	34	100	penggunaan ATK khususnya kertas terjadi penghematan karena sekarang semua kegiatan surat menyurat dan administrasi yang lain menggunakan srikandi	



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	60.000.000	10.357.635	17	100	Terjadi penghematan dalam penggunaan daya listrik, karena kondisi kantor sementara (sewa gedung kantor) tidak memerlukan banyak lampu, peralatan listrik lainnya dan AC ruangan hanya 1 unit	pindah ke gedung baru
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18	Laporan	12	Laporan	67	97.500.050	96.604.320	99	67		
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	%	100	%	<b>100</b>	<b>115.985.000</b>	<b>66.946.000</b>	58	100		
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	7	Unit	7	Unit	100	19.750.000	10.751.000	54	100	Kondisi kendaraan yang masih bagus sehingga tidak banyak memerlukan service besar	
11	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Terpelihara	30	unit	30	unit	100	10.000.000	7.920.000	79	100		
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100	86.235.000	48.275.000	56	100	Pemeliharaan digunakan untuk menyewa gedung kantor yang di targetkan 1 tahun, akan tetapi hanya terealisasi 7 bulan, serta untuk biaya pindahan kantor ke gedung yg baru	pindah ke gedung baru
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publiknya (PATEN)</b>	<b>100</b>	%	100	%	<b>100</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.983.500</b>	99	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	%	100	%	<b>100</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.983.500</b>	99	100		
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	Laporan	<b>100</b>	2.000.000	1.983.500	99	100		
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>95</b>	%	95	%	<b>100</b>	<b>166.885.500</b>	<b>164.670.140</b>	99	100		
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>100</b>	%	100	%	<b>100</b>	<b>166.885.500</b>	<b>164.670.140</b>	99	100		
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan		Laporan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	<b>100</b>	166.885.500	164.670.140	99	100		
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>96</b>	%	100	%	<b>104</b>	<b>120.000.000</b>	<b>116.448.900</b>	97	104		
1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>100</b>	%	100	%	<b>100</b>	<b>166.885.500</b>	<b>164.670.140</b>	99	100		
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	<b>100</b>	166.885.500	164.670.140	99	100		
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>96</b>	%	100	%	<b>104</b>	<b>120.000.000</b>	<b>116.448.900</b>	97	104		
1	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</b>	<b>100</b>	%	75	%	<b>75</b>	<b>90.000.000</b>	<b>87.900.000</b>	98	75		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	Laporan	9	Laporan	75	90.000.000	87.900.000	98	75		
2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>30.000.000</b>	<b>28.548.900</b>	<b>95</b>	<b>50</b>		
2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100	30.000.000	28.548.900	95	100		
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.824.000</b>	<b>47</b>	<b>96</b>		
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.824.000</b>	<b>47</b>	<b>100</b>		
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	130	Orang	75	Orang	58	4.000.000	1.024.000	26	58	Belanja maknif yang tidak bisa di cairkan semuanya karena kondisi kantor yg masih menyewa sehingga kecamatan tidak menyelenggarakan Forum konsultasi publik	pindah ke gedung baru
2	Penanganan konflik Sosial sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	1	Laporan	100	2.000.000	1.800.000	90	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	97	%	<b>100</b>	<b>279.280.010</b>	<b>257.646.000</b>	92	100		
1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	97	%	<b>97</b>	<b>279.280.010</b>	<b>257.646.000</b>	92	97		
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	Dokumen	12	Dokumen	<b>100</b>	175.192.450	161.991.000	92	100		
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	Dokumen	12	Dokumen	<b>100</b>	15.700.000	12.450.000	79	100		
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Dokumen	12	Dokumen	<b>100</b>	17.680.000	14.680.000	83	100		
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18	Desa	18	Desa	<b>100</b>	70.707.560	68.525.000	97	100		
		<b>Jumlah</b>						<b>3.487.672.278</b>	<b>2.956.734.146</b>	<b>84,78</b>			

## URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

## KECAMATAN CAWAS

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	%	100	%	100	2.422.393.203	1.950.906.547	80,5363285			
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	%	5	%	100	4.000.000	3.693.100	92,3275			
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	5	Dokumen	100	2.000.000	1.969.100	98,455	100		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2	Laporan	100	2.000.000	1.724.000	86,2	100		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100	%	100	%	100	1.949.871.703	1.507.168.526	77,2957792			
a	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21	Orang/Bulan	13	Orang/Bulan	61,9047619	1.936.911.703	1.494.239.526	77,1454643	100		
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	Dokumen	100	10.000.000	9.990.000	99,9	100		
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	4	Laporan	100	2.960.000	2.939.000	99,2905405	100		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100	%	100	%	100	131.663.000	125.573.800	95,3751623			
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	15	Paket	100	6.640.000	6.640.000	100	100		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	10.000.000	9.997.800	99,978	100		
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	3	Paket	100	8.000.000	8.000.000	100	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	12	Dokumen	100	1.492.000	1.216.000	81,5013405	100		
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	100	45.600.000	45.560.000	99,9122807	100		
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100	59.931.000	54.160.000	90,3705928	100		
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia	100	%	100	%	100	117.270.000	116.520.000	99,36			
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1	Paket	1	Paket	100	31.400.000	30.900.000	98,41	100		
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan SKPD	9	Unit	9	Unit	100	85.870.000	85.620.000	99,71	100		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia	100	%	100	%	100	185.599.500	167.533.121	90,27			
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100	4.162.000	4.162.000	100,00	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	37.800.000	19.765.473	52,29	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	Laporan	7	Laporan	100	143.637.500	143.605.648	99,98	100		
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100	%	100	%	100	33.989.000	30.418.000	89,49			
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	8	Unit	100	18.414.000	15.297.000	83,07	100		
b	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Terpelihara	11	Unit	11	Unit	100	1.525.000	1.525.000	100,00	100		
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	10	Unit	10	Unit	100	7.170.000	7.100.000	99,02	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	3	Unit	3	Unit	100	2.000.000	1.996.000	99,80	100		
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	3	Unit	3	Unit	100	4.880.000	4.500.000	92,21	100		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	100	%	100	%	100	3.119.000	3.086.000	98,94			
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100	%	100	%	100	3.119.000	3.086.000	98,94			
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3	Jenis	3	Jenis	100	3.119.000	3.086.000	98,94	100		
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	95	%	100	%	105,2631579	78.099.134	75.449.200	96,61			
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	95	%	100	%	105	78.099.134	75.449.200	96,61			
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga Kemasyarakatan	6	Lembaga Kemasyarakatan	100	8.350.000	7.539.400	90,29	100		
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20	Laporan	20	Laporan	100	69.749.134	67.909.800	97,36	100		
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	96	%	100	%	104,1666667	109.705.000	109.670.800	99,97			
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	96	%	100	%	104,1666667	99.705.000	99.704.800	100,00			
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8	Laporan	8	Laporan	100	89.705.000	89.704.800	100,00	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	2	Laporan	100	10.000.000	10.000.000	100,00	100		
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan	96	%	100	%	104	10.000.000	9.966.000	99,66			
a	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9	Laporan	9	Laporan	100	10.000.000	9.966.000	99,66	100		
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</b>	96	%	100		104,1666667	170.000.000	153.739.800	90,44			
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	96	%	100		104	170.000.000	153.739.800	90,44			
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650	Orang	650	Orang	100	165.000.000	151.247.300	91,67	100		
b	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20	Laporan	20	Laporan	100	5.000.000	2.492.500	49,85	100		
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu</b>	95	%	96,29	%	101,3578947	98.986.500	80.490.050	81,31			
		<b>Persentase desa tertib adminitrasi</b>	97	%	100	%	103,09						
1	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	95	%	100	%	105,26	98.986.500	80.490.050	81,31			



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20	Dokumen	20	Dokumen	100,00	4.100.000	4.040.000	98,54	100		
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	Dokumen	20	Dokumen	100	4.216.000	4.127.500	97,90	100		
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	Dokumen	20	Dokumen	100,00	5.100.000	5.099.800	100,00	100		
d	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20	Dokumen	20	Dokumen	100	2.000.000	2.000.000	100,00	100		
e	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20	Dokumen	20	Dokumen	100	20.000.000	10.499.800	52,50	100		
f	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20	Dokumen	20	Dokumen	100	5.000.000	4.999.800	100,00	100		
g	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20	Dokumen	20	Dokumen	100	5.700.000	-	-	100		
h	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20	Dokumen	20	Dokumen	100	48.870.500	45.723.250	93,56	100		
i	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	20	Dokumen	20	Dokumen	100,00	2.000.000	2.000.000	100,00	100		
j	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	20	Dokumen	20	Dokumen	100	2.000.000	1.999.900	100,00	100		
			<b>Jumlah</b>					<b>2.882.302.837</b>	<b>2.373.342.397</b>	<b>82,34</b>			

**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN GANTIWARNO**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	2.296.137.763	1.864.101.688	81	100		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun	100	%	100	%	<b>100</b>	5.000.000	4.672.800	93	100		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	4	Dokumen	<b>100</b>	3.000.000	2.992.000	100	100		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	<b>100</b>	2.000.000	1.680.800	84	100		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	98	%	98	%	<b>100</b>	1.870.112.763	1.468.181.834	79	100		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	Orang/bulan	13	Orang/bulan	<b>100</b>	1.855.112.763	1.454.272.834	78	100		
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	1	Dokumen	<b>100</b>	12.000.000	10.980.000	92	100		
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	4	Laporan	<b>100</b>	3.000.000	2.929.000	98	100		
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	98	%	100	%	<b>102,040816</b>	102.784.000	97.482.600	95			
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	<b>100</b>	5.000.000	4.993.250	100	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	100	13.000.000	12.852.750	99	100		
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	6	Paket	100	4.500.000	4.191.800	93	100		
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen	0	-	-	-	-		
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	Laporan	7	Laporan	100	20.000.000	19.926.000	100	100		
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	Laporan	17	Laporan	100	60.284.000	55.518.800	92	100		
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100	%	100	%	100	53.577.000	53.265.000	99	100		
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	3	Unit	100	30.400.000	30.400.000	100	100		
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	Unit	9	Unit	100	23.177.000	22.865.000	99	100		
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	100	%	100	%	100	164.999.000	161.342.454	98	100		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	2	Laporan	100	999.000	998.375	100	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	22.000.000	18.491.525	84	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	142.000.000	141.852.554	100	100		
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	83,3333333	%	83,3333333	99.665.000	79.157.000	79	83		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	9	Unit	100	60.000.000	45.352.000	76	100		
b	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	Unit	0	Unit	0	1.985.000	-	-			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	4	Unit	100	5.000.000	3.905.000	78	100		
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100	26.430.000	26.000.000	98	100		
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	100	3.250.000	3.000.000	92	100		
f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit	7	Unit	100	3.000.000	900.000	30	100		
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)</b>	100	%	100	%	100	5.000.000	4.909.900	98	100		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	97	%	100	%	103,092784	5.000.000	4.909.900	98	100		
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	Laporan	100	5.000.000	4.909.900	98	100		
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF</b>	95	%	99,009901	%	104,220948	72.965.648	72.360.900	99	100		
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	97	%	100	%	103,092784	72.965.648	72.360.900	99	100		
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga Kemasyarakatan	6	Lembaga Kemasyarakatan	100	15.000.000	14.480.000	97	100		
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	6	Laporan	100	57.965.648	57.880.900	100	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN</b>	96	%	100	%	<b>104,166667</b>	109.500.000	109.389.700	100	100		
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	presentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	98	%	100	%	<b>102,040816</b>	94.500.000	94.468.000	100	100		
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	<b>100</b>	87.000.000	87.000.000	100	100		
b	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6	Laporan	6	Laporan	<b>100</b>	7.500.000	7.468.000	100	100		
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Koordinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan	97	%	100	%	<b>103,092784</b>	15.000.000	14.921.700	99	100		
a	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	1	Laporan	<b>100</b>	15.000.000	14.921.700	99	100		
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI</b>	96	%	100	%	<b>104,166667</b>	171.500.000	166.238.725	97	100		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	96	%	100	%	<b>104,166667</b>	171.500.000	166.238.725	97	100		
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650	Orang	650	Orang	<b>100</b>	170.000.000	165.068.925	97	100		
b	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	1	Laporan	<b>100</b>	1.500.000	1.169.800	78	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PERSENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU</b>	95	%	100	%	<b>105,263158</b>	94.200.000	93.037.750	99	100		
		Persentase desa tertib administrasi	97	%	100	%	<b>103,092784</b>	94.200.000	93.037.750	-			
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	98	%	82,5	%	<b>84,1836735</b>	94.200.000	93.037.750	99	100		
a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3	Dokumen	3	Dokumen	<b>100</b>	6.500.000	6.439.500	99	100		
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	<b>100</b>	9.000.000	8.905.000	99	100		
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	Dokumen	3	Dokumen	<b>100</b>	6.000.000	5.981.900	100	100		
d	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	Dokumen	4	Dokumen	<b>100</b>	20.000.000	19.894.550	99	100		
e	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	<b>100</b>	1.500.000	1.270.000	85	100		
f	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	Dokumen	7	Dokumen	<b>100</b>	48.000.000	47.447.700	99	100		
g	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5	Dokumen	5	Dokumen	<b>100</b>	1.700.000	1.599.900	94	100		
h	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	<b>100</b>	1.500.000	1.499.200	100	100		
<b>TOTAL</b>								<b>2.749.303.411</b>	<b>2.310.038.663</b>	<b>84</b>			

**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN JOGONALAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	100	Persen	100,00	2.336.794.818	1.926.340.532	82,44	100,00		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100	Persen	100	Persen	100,00	6.000.000	5.902.000	98,37	100,00		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	3.000.000	2.951.000	98,37	100,00		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP Tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	3.000.000	2.951.000	98,37	100,00		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	Persen	100	Persen	100,00	1.823.334.513	1.447.691.287	79,40	100,00		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	17	Orang	12	Orang	70,59	1.819.334.513	1.443.694.287	79,35	100,00	Jumlah ASN belum terpenuhi sesuai target	Mengajukan permohonan penambahan ASN ke BKD setda Klaten
C	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Tersusun	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	4.000.000	3.997.000	99,93	100,00		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan adminitrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Persen	100	Persen	100,00	121.471.800	115.883.700	95,40	100,00		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	10	Unit	10	Unit	100,00	7.891.000	5.655.000	71,66	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	20	Unit	20	Unit	100,00	15.000.000	14.930.500	99,54	100,00		
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	2	Eksemplar	2	Eksemplar	100,00	4.008.800	4.008.000	99,98	100,00		
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	1	Eksemplar	1	Eksemplar	100,00	1.500.000	1.437.800	95,85	100,00		
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	12	Kali	12	Kali	100,00	21.253.000	19.494.400	91,73	100,00		
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Kali	7	Kali	35,00	71.819.000	70.358.000	97,97	100,00		
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah Tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>81.042.505</b>	<b>80.008.000</b>	<b>98,72</b>	<b>100,00</b>		
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	4	Unit	4	Unit	100,00	59.400.000	59.400.000	100,00	100,00		
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5	Unit	5	Unit	100,00	21.642.505	20.608.000	95,22	100,00		
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>137.000.000</b>	<b>117.466.145</b>	<b>85,74</b>	<b>100,00</b>		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	750	Eksemplar	750	Eksemplar	100,00	6.000.000	5.300.500	88,34	100,00		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terbayar	12	Bulan	12	Bulan	100,00	13.000.000	10.410.005	80,08	100,00		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	6	Orang	6	Orang	100,00	118.000.000	101.755.640	86,23	100,00		
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>167.946.000</b>	<b>159.389.400</b>	<b>94,91</b>	<b>100,00</b>		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	7	Unit	7	Unit	100,00	47.100.000	39.904.400	84,72	100,00		
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	8	Unit	8	Unit	100,00	7.550.000	6.235.000	82,58	100,00		
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1	Unit	1	Unit	100,00	113.296.000	113.250.000	99,96	100,00		
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100	Persen	100	Persen	100,00	3.000.000	2.987.300	99,58	100,00		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100	Persen	100	Persen	100,00	3.000.000	2.987.300	99,58	100,00		
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2	Jenis	2	Jenis	100,00	3.000.000	2.987.300	99,58	100,00		
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	95	Persen	95	Persen	100,00	119.621.580	112.229.500	93,82	100,00		
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	Persen	100	Persen	100,00	119.621.580	112.229.500	93,82	100,00		
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	18	Dokumen	18	Dokumen	100,00	51.643.000	44.569.300	86,30	100,00		
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	18	Dokumen	18	Dokumen	100,00	67.978.580	67.660.200	99,53	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96	Persen	96	Persen	100,00	119.026.750	103.604.700	87,04	100,00		
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	95	Persen	95	Persen	100,00	119.026.750	103.604.700	87,04	100,00		
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	12	Kegiatan	12	Kegiatan	100,00	107.336.750	92.055.300	85,76	100,00		
b	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Jenis Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Jenis	2	Jenis	100,00	11.690.000	11.549.400	98,80	100,00		
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96	Persen	93,75	Persen	97,66	168.226.000	160.058.700	95,15	100,00		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100	Persen	100	Persen	100,00	168.226.000	160.058.700	95,15	100,00		
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100,00	163.226.000	155.081.800	95,01	100,00		
b	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18	Dokumen	18	Dokumen	100,00	5.000.000	4.976.900	99,54	100,00		
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	97	Persen	91,67	Persen	94,51	104.262.300	94.738.200	90,87	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Persentase desa tertib administrasi	95	Persen	80	Persen	84,21				100,00		
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100	Persen	100	Persen	100,00	104.262.300	94.738.200	90,87	100,00		
a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18	Dokumen	18	Dokumen	100,00	19.000.000	13.502.600	71,07	100,00		
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18	Dokumen	18	Dokumen	100,00	6.000.000	5.954.000	99,23	100,00		
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendatagunaan Aset Desa	18	Dokumen	18	Dokumen	100,00	4.000.000	3.981.000	99,53	100,00		
d	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	Dokumen	18	Dokumen	100,00	4.000.000	3.930.000	98,25	100,00		
e	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	8.000.000	7.958.700	99,48	100,00		
f	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	18	Dokumen	18	Dokumen	100,00	5.000.000	4.974.900	99,50	100,00		
g	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18	Dokumen	18	Dokumen	100,00	58.262.300	54.437.000	93,43	100,00		
		<b>Jumlah</b>						<b>2.850.931.448</b>	<b>2.399.958.932</b>	<b>84,18</b>			

**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN JUWIRING**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	<b>100</b>	%	96	%	96	2.507.530.641	1.857.343.065	74	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	%	100	%	100	2.022.854.580	1.446.336.410	71	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19	orang/bu lan	19	orang/bu lan	100	2.022.854.580	1.446.336.410	71	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100	%	100	%	100	165.000.000	140.118.230	85	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
a	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	1170	orang	1170	orang	100	165.000.000	140.118.230	85	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	%	89	%	89	133.330.000	108.408.800	81	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Kantor	30	paket	30	paket	100	6.000.000	5.804.000	97	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
b	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36	paket	36	paket	100	4.080.000	4.079.800	100	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
c	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	58	laporan	48	laporan	83	75.750.000	59.190.000	78	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	laporan	50	laporan	83	47.500.000	39.335.000	83	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	%	100	%	100	145.806.700	130.495.625	89	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat terkirim	12	laporan	12	laporan	100	10.187.700	10.007.900	98	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24	laporan	24	laporan	100	41.433.400	26.302.125	63	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	12	laporan	100	94.185.600	94.185.600	100	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100	%	89	%	89	40.539.361	31.984.000	79	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11	unit	11	unit	100	25.000.000	21.829.000	87	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8	unit	6	unit	75	15.539.361	10.155.000	65	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik	100	%	100	%	100	4.296.500	2.836.500	66	100	anggaran tersedia di TW akhir dimana PPTKnya pensiun	kegiatan tetap dilaksanakan sesuai time schedule
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kecamatan	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik(PATEN)	100	%	100	%	100	4.296.500	2.836.500	66	100	anggaran tersedia di TW akhir dimana PPTKnya pensiun	kegiatan tetap dilaksanakan sesuai time schedule
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah	3	laporan	3	laporan	100	4.296.500	2.836.500	66	100	anggaran tersedia di TW akhir dimana PPTKnya pensiun	kegiatan tetap dilaksanakan sesuai time schedule
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	95	%	95	%	100	136.874.000	102.638.000	75	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang terkoordinasi dalam kegiatan pemberdayaan	100	%	100	%	100	136.874.000	102.638.000	75	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi masyarakat dalam forum murenbangdes	5	lembaga kemasyarakatan	5	lembaga kemasyarakatan	100	18.527.000	17.132.000	92	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	5	laporan	5	laporan	100	118.347.000	85.506.000	72	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	96	%	96	%	100	96.360.000	90.870.000	94	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100	%	100	%	100	96.360.000	90.870.000	94	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	laporan	12	laporan	100	96.360.000	90.870.000	94	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96	%	40	%	42	2.875.000	750.000	26	100	anggaran tersedia di TW akhir dimana PPTKnya pensiun	kegiatan tetap dilaksanakan sesuai time schedule
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100	%	42	%	42	2.875.000	750.000	26	100	anggaran tersedia di TW akhir dimana PPTKnya pensiun	kegiatan tetap dilaksanakan sesuai time schedule
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (bimtek,sosialisasi,konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	120	orang	50	orang	42	2.875.000	750.000	26	100	anggaran tersedia di TW akhir dimana PPTKnya pensiun	kegiatan tetap dilaksanakan sesuai time schedule

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	98	%	98	%	100	58.758.000	51.766.800	88	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
		Persentase desa tertib administrasi	97	%	97	%	100				100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintah desa yang dilakukan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	100	%	100	%	100	58.758.000	51.766.800	88	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	38	dokumen	38	dokumen	100	13.658.000	12.098.000	89	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	1	dokumen	1	dokumen	100	23.100.000	18.801.300	81	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	19	dokumen	19	dokumen	100	2.000.000	1.692.500	85	100	merupakan kegiatan rutin dan anggaran sdh tersedia	
d	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	3	dokumen	3	dokumen	100	20.000.000	19.175.000	96	100	anggaran sdh tersedia	
		<b>Jumlah</b>						<b>2.806.694.141</b>	<b>2.106.204.365</b>	<b>75</b>			

**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN KALIKOTES**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>2.665.696.808</b>	<b>2.218.013.213</b>	<b>83</b>	<b>100</b>		
<b>a</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>2.321.619.422</b>	<b>1.886.944.382</b>	<b>81</b>	<b>100</b>		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	18	orang	18	orang	100	2.304.519.422	1.869.844.382	81	100		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	12	dokumen	100	17.100.000	17.100.000	100	100		
<b>b</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>120.110.498</b>	<b>119.494.432</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	2	paket	100	3.000.000	2.960.157	99	100		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	2	paket	100	16.800.498	16.528.675	98	100		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	2	paket	100	17.000.000	16.994.600	100	100		
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	12	laporan	100	26.159.000	26.008.000	99	100		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	laporan	100	57.151.000	57.003.000	100	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>b</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>71.377.000</b>	<b>68.545.000</b>	<b>96</b>	<b>100</b>		
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	unit	5	unit	100	37.895.000	35.845.000	95	100		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2	unit	2	unit	100	33.482.000	32.700.000	98	100		
<b>c</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>94.469.888</b>	<b>90.665.474</b>	<b>96</b>	<b>100</b>		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	100	2.694.000	2.566.500	95	100		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	100	13.970.000	10.497.860	75	100		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	100	77.805.888	77.601.114	100	100		
<b>d</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>58.120.000</b>	<b>52.363.925</b>	<b>90</b>	<b>-</b>		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	unit	10	unit	100	42.830.000	37.259.000	87	100		
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	unit	10	unit	0	3.260.000	3.100.000	95	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	unit	100	10.000.000	9.974.925	100	100		
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	unit	8	unit	100	2.030.000	2.030.000	100	100		
2	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Lembaga Masyarakat Aktif</b>	<b>95</b>	<b>Persen</b>	<b>95</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>65.000.000</b>	<b>64.898.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
a	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>65.000.000</b>	<b>64.898.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	laporan	7	laporan	100	65.000.000	64.898.100	100	100		
3	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan</b>	<b>96</b>	<b>Persen</b>	<b>96</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>92.400.000</b>	<b>85.552.050</b>	<b>93</b>	<b>100</b>		
a	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
1	Koordinasi/Sinergitas dengan Peraturan Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3	laporan	3	laporan	100	3.000.000	3.000.000	100	100		
b	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Umum</b>	<b>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>89.400.000</b>	<b>82.552.050</b>	<b>92</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	laporan	12	laporan	100	86.400.000	79.612.500	92	100		
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	laporan	1	laporan	100	3.000.000	2.939.550	98	100		
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</b>	<b>96</b>	<b>Persen</b>	<b>96</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>168.000.000</b>	<b>150.771.900</b>	<b>90</b>	<b>100</b>		
a	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>168.000.000</b>	<b>150.771.900</b>	<b>90</b>	<b>100</b>		
1	Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6500	orang	6500	orang	100	168.000.000	150.771.900	90	100		
5	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa tertib administrasi</b>	<b>97</b>	<b>Persen</b>	<b>97</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>63.000.000</b>	<b>58.247.820</b>	<b>92</b>	<b>100</b>		
a	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu</b>	<b>95</b>	<b>Persen</b>	<b>95</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>63.000.000</b>	<b>58.247.820</b>	<b>92</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		<b>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>58.247.820</b>	<b>-</b>	<b>100</b>		
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7	dokumen	7	dokumen	100	16.500.000	16.195.500	98	100		
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7	dokumen	7	dokumen	100	2.500.000	2.499.000	100	100		
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	dokumen	7	dokumen	100	44.000.000	39.553.320	90	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>3.054.096.808</b>	<b>2.577.483.083</b>	<b>84,3942823</b>			

**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN KARANGANOM**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>2.156.465.226</b>	<b>1.608.246.488</b>	<b>75</b>			
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>8.760.000</b>	<b>7.725.900</b>	<b>88</b>	100		
1.1.1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6	Dokumen	6	Dokumen	100	4.760.000	4.699.900	99	100		
1.1.2	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	6	Laporan	6	Laporan	100	4.000.000	3.026.000	76	100		
1.2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>1.658.289.226</b>	<b>1.194.856.821</b>	<b>72</b>			
1.2.1	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	12	orang	12	orang	100	1.649.962.226	1.187.463.821	72	100		
1.2.3	3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksana Tugas ASN Terpenuhi Administrasinya	12	laporan	12	laporan	100	4.506.000	4.440.000	99	100		
1.2.4	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Tersusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Tersusun	5	laporan	5	laporan	100	2.240.000	1.794.000	80	100		
1.2.5	5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	1	dokumen	100	1.581.000	1.159.000	73	100		
1.3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>111.835.400</b>	<b>79.493.100</b>	<b>71</b>			
1.3.1	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	5	paket	5	paket	100	2.000.000	1.696.000	85	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	16	paket	16	paket	100	12.297.400	11.629.600	95	100		
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	5	paket	5	paket	100	4.000.000	3.320.000	83	100		
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	2	dokumen	100	2.000.000	1.975.500	99	100		
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	300	laporan	300	laporan	100	30.052.000	29.922.000	100	100		
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	laporan	60	laporan	100	61.486.000	30.950.000	50	100		
<b>1.4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>105.200.000</b>	<b>103.170.000</b>	<b>98</b>			
1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	4	unit	4	unit	100	17.200.000	16.870.000	98	100		
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	4	unit	4	unit	100	88.000.000	86.300.000	98	100		
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>134.557.360</b>	<b>99.870.582</b>	<b>74</b>			
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	650	laporan	600	laporan	92,30769231	4.300.000	4.300.000	100	100		
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12	laporan	12	laporan	100	33.000.000	19.524.206	59	100		
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	3	laporan	3	laporan	100	97.257.360	76.046.376	78	100		
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>presentasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>137.823.240</b>	<b>123.130.085</b>	<b>89</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.6.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	9	unit	9	unit	100	51.160.000	38.285.845	75	100		
1.6.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	9	unit	9	unit	100	2.620.000	1.890.000	72	100		
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	9	unit	9	unit	100	10.000.000	9.820.000	98	100		
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	10	unit	10	unit	100	29.219.000	28.320.000	97	100		
1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	10	unit	10	unit	100	6.550.000	6.540.000	100	100		
1.6.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	2	unit	2	unit	100	38.274.240	38.274.240	100	100		
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>54.805.000</b>	<b>48.959.400</b>				
2.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</b>	<b>1</b>	<b>kegiatan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>54.805.000</b>	<b>48.959.400</b>				
2.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100	54.805.000	48.959.400	89	100		
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>242.206.347</b>	<b>239.570.750</b>	<b>99</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</b>	<b>19</b>	<b>lbkmsy</b>	<b>19</b>	<b>lbkmsy</b>	<b>100</b>	<b>242.206.347</b>	<b>239.570.750</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
3.1.1	<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan</b>	<b>19</b>	<b>lbkmsy</b>	<b>19</b>	<b>lbkmsy</b>	<b>100</b>	<b>242.206.347</b>	<b>239.570.750</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>103,092784</b>	206.821.587	204.209.250	99	99		
3.1.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<b>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>103,092784</b>	35.384.760	35.361.500	100	100		
<b>4</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>100</b>	<b>148.550.000</b>	<b>134.841.900</b>	<b>91</b>	<b>100</b>		
4.1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>100</b>	<b>143.550.000</b>	<b>133.671.900</b>	<b>93</b>	<b>100</b>		
4.1.2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<b>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	130.420.000	121.280.900	93	93		
4.1.3	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	1	Laporan	100	13.130.000	12.391.000	94	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4.2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Prosentase kelurahan / desa yang melaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>103,092784</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>23</b>	<b>23</b>		
4.3.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<b>Jumlah Kelurahan/Desa yang terkoordinasi Tata Pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	5.000.000	1.170.000	23	23		
5	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>100</b>	<b>39.540.000</b>	<b>35.639.600</b>	<b>90</b>	<b>100</b>		
5.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>100</b>	<b>39.540.000</b>	<b>35.639.600</b>	<b>90</b>	<b>100</b>		
5.1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<b>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Persentase desa tertib administrasi</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>102,040816</b>	34.540.000	31.142.900	90	90		
5.1.3	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	<b>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>105,263158</b>	5.000.000	4.496.700	90	90		
5.1.4	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>100</b>	<b>137.092.000</b>	<b>127.721.700</b>	<b>93</b>	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5.1.5	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	137.092.000	127.721.700	93	100		
5.1.6	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	5.965.000	5.938.000	100	100		
5.1.7	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	5.801.000	5.533.700	95	100		
5.1.8	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	41.445.000	37.230.000	90	100		
5.1.9	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	5.036.000	4.136.000	82	100		
5.1.10	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	19	rekomendasi	19	rekomendasi	100	40.545.000	40.480.000	100	100		
5.1.11	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	19	desa	19	desa	100	8.000.000	7.073.000	88	100		
5.1.12	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	19	desa	19	desa	100	-	-	-	-		
5.1.13	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	19	desa	19	desa	100	5.795.000	5.066.000	87	100		
5.1.13	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	19	desa	19	desa	100	19.005.000	18.555.000	100	100		
5.1.14	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang tertangani ketentraman dan ketertiban umum	19	desa	19	desa	100	5.500.000	3.710.000	90	100		
	<b>TOTAL</b>							<b>2.778.658.573</b>	<b>2.194.979.838</b>	<b>78,99</b>			

**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN KARANGDOWO**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.650.332.934</b>	<b>2.278.371.057</b>	<b>85,97</b>			
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.988.000</b>	<b>99,70</b>			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	5	Dokumen	100	2.000.000	1.994.000	99,70	100		
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100	2.000.000	1.994.000	99,70	100		
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.248.691.934</b>	<b>1.894.723.290</b>	<b>84,26</b>			
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18	Orang/Bulan	18	Orang/Bulan	100	2.245.691.934	1.891.735.290	84,24	100		
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	18	Laporan	100	3.000.000	2.988.000	99,60	100		
1.3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>129.000.000</b>	<b>128.430.000</b>	<b>99,56</b>			
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	3.000.000	3.000.000	100,00	100		
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	10.000.000	9.870.000	98,70	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	10.000.000	9.975.000	99,75			
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	12	Dokumen	100	1.500.000	1.500.000	100,00	100		
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	100	29.500.000	29.315.000	99,37	100		
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100	75.000.000	74.770.000	99,69	100		
<b>1.4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100.641.000</b>	<b>93.556.500</b>	<b>92,96</b>			
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan SKPD	10	Unit	10	Unit	100	100.641.000	93.556.500	92,96	100		
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>126.000.000</b>	<b>120.800.267</b>	<b>95,87</b>			
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100	3.000.000	2.973.000	99,10	100		
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	23.000.000	20.258.627	88,08	100		
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	100.000.000	97.568.640	97,57	100		
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>42.000.000</b>	<b>36.873.000</b>	<b>87,79</b>			
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	8	Unit	100	20.000.000	14.913.000	74,57	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	100	10.000.000	9.960.000	99,60	100		
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	3	Unit	100	12.000.000	12.000.000	100,00	100		
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>96,00</b>			
2.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>96,00</b>			
2.1.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	100	5.000.000	4.800.000	96,00	100		
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>105,26</b>	<b>359.000.000</b>	<b>348.876.300</b>	<b>97,18</b>			
3.1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>105,26</b>	<b>359.000.000</b>	<b>348.876.300</b>	<b>97,18</b>			
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19	Lembaga Kemasyarakatan	19	Lembaga Kemasyarakatan	100,00	15.000.000	13.606.900	90,71	100		
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	100	344.000.000	335.269.400	97,46	100		
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>104,17</b>	<b>126.000.000</b>	<b>120.567.500</b>	<b>95,69</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4.1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>126.000.000</b>	<b>120.567.500</b>	<b>95,69</b>			
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	100	96.000.000	91.290.000	95,09	100		
4.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	Laporan	12	Laporan	100	30.000.000	29.277.500	97,59	100		
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</b>	<b>96</b>	%	<b>100</b>	%	<b>104,17</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.499.000</b>	<b>94,99</b>			
5.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.499.000</b>	<b>94,99</b>			
5.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40	Orang	40	Orang	<b>100</b>	10.000.000	9.499.000	94,99	100		
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu</b>	<b>97</b>	%	<b>100</b>	%	<b>103,09</b>	<b>68.500.000</b>	<b>56.884.500</b>	<b>83,04</b>			
		<b>Persentase desa tertib adminitrasi</b>	<b>95</b>	%	<b>100</b>	%	<b>105,26</b>						
6.1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>68.500.000</b>	<b>56.884.500</b>	<b>83,04</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19	Dokumen	19	Dokumen	100	5.000.000	4.496.000	89,92	100		
6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19	Dokumen	19	Dokumen	100	5.000.000	4.383.500	87,67	100		
6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19	Dokumen	19	Dokumen	100	5.000.000	4.950.000	99,00	100		
6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19	Dokumen	19	Dokumen	100	10.000.000	9.942.500	99,43	100		
6.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	Dokumen	4	Dokumen	100	28.500.000	27.622.500	96,92	100		
6.1.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19	Dokumen	19	Dokumen	100	15.000.000	5.490.000	36,60	100		
<b>Jumlah</b>								<b>3.218.832.934</b>	<b>2.818.998.357</b>	<b>87,58</b>			

**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN KARANGNONGKO**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	82	%	82	<b>2.476.937.886</b>	<b>2.036.849.109</b>	<b>82</b>	<b>82</b>		
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	100	%	99	%	99	<b>9.000.000</b>	<b>8.931.000</b>	<b>99</b>	<b>99</b>		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dokumen	14	Dokumen	100	5.000.000	4.995.000	100	100		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2	Laporan	100	4.000.000	3.936.000	98	100		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	%	81	%	81	<b>2.087.260.886</b>	<b>1.684.841.049</b>	<b>81</b>	<b>81</b>		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang/Bulan	17	Orang/Bulan	77	2.082.880.273	1.680.711.049	81	81		
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22	Dokumen	22	Dokumen	100	1.000.000	1.000.000	100	100		
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	18	Laporan	100	2.000.000	2.000.000	100	100		
d	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1.380.613	1.130.000	82	82		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	93	%	93	<b>97.246.000</b>	<b>90.747.500</b>	<b>93</b>	<b>95</b>		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	12	paket	100	6.320.000	5.995.000	95	95		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	paket	10	paket	100	16.600.000	16.550.000	100	100		
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	3	paket	100	10.000.000	9.802.500	98	98		
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1.200.000	1.200.000	100	100		
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	100	12.000.000	12.000.000	100	100		
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	Laporan	180	Laporan	100	51.126.000	45.200.000	88	93		
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100	<b>9.350.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>99</b>	<b>97</b>		
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	1	Unit	100	9.350.000	9.300.000	99	97		
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	100	%	100	%	100	<b>124.081.000</b>	<b>102.807.560</b>	<b>83</b>	<b>83</b>		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750	Laporan	750	Laporan	100	3.000.000	2.940.000	98	98		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	36.000.000	18.339.080	51	51		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	4	Laporan	100	85.081.000	81.528.480	96	96		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100	%	100	%	100	150.000.000	140.222.000	93	93		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	10	Unit	100	15.000.000	13.367.000	89	89		
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	5	Unit	100	3.000.000	2.250.000	75	75		
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100	115.000.000	110.635.000	96	96		
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100	5.000.000	3.270.000	65	65		
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	5	Unit	100	12.000.000	10.700.000	89	89		
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100	%	97	%	97	7.000.000	6.800.000	97	97		
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100	%	100	%	100	7.000.000	6.800.000	97	97		
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	Laporan	100	7.000.000	6.800.000	97	97		
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	95	%	92	%	97	80.000.000	73.842.000	92	92		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase desa yang terkoordinasi dalam kegiatan pemberdayaan	100	%	100	%	100	80.000.000	73.842.000	92	92		
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	14	Desa	14	Desa	100	10.000.000	9.372.000	94	94		
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14	Laporan	14	Laporan	100	70.000.000	64.470.000	92	92		
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>101</b>	<b>180.000.000</b>	<b>175.330.000</b>	<b>97</b>	<b>97</b>		
1	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase koodinasi penegakan perundangundangan yang dilakukan	100	%	100	%	100	70.000.000	65.375.000	93	93		
a	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14	Laporan	14	Laporan	100	70.000.000	65.375.000	93	93		
2	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>110.000.000</b>	<b>109.955.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	100	100.000.000	99.955.000	100	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	2	Laporan	100	10.000.000	10.000.000	100	100		
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>99</b>	<b>%</b>	<b>103,125</b>	<b>176.000.000</b>	<b>171.664.850</b>	<b>98</b>	<b>98</b>		
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang Diselenggarakan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>176.000.000</b>	<b>171.664.850</b>	<b>98</b>	<b>98</b>		
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50	Orang	50	Orang	100	175.000.000	170.914.850	98	98		
b	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	1	Laporan	100	1.000.000	750.000	75	100		
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa tertib administrasi	95	%	86	%	90,52631579	75.500.000	69.155.000	92	92		
		Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	97	%	97	%	100	75.500.000	69.155.000	92	92		
1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	%	100	%	100	75.500.000	69.155.000	92	92		
a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14	Dokumen	14	Dokumen	100	5.000.000	5.000.000	100	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14	Dokumen	14	Dokumen	100	1.000.000	1.000.000	100	100		
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14	Dokumen	14	Dokumen	100	2.000.000	1.800.000	90	90		
d	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14	Dokumen	14	Dokumen	100	5.000.000	5.000.000	100	100		
e	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14	Dokumen	14	Dokumen	100	19.500.000	19.355.000	99	99		
f	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	umlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	14	Dokumen	14	Dokumen	100	4.500.000	4.500.000	100	100		
g	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	4.500.000	2.500.000	56	56		
h	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14	Dokumen	14	Dokumen	100	30.000.000	26.000.000	87	87		
i	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1	Dokumen	1	Dokumen	100	2.000.000	2.000.000	100	100		
j	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	3	Laporan	100	2.000.000	2.000.000	100	100		
		<b>Jumlah</b>						<b>2.995.437.886</b>	<b>2.533.640.959</b>	<b>84,58</b>			

**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN KEBONARUM**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.562.573.720</b>	<b>2.261.039.612</b>	<b>88,23</b>	<b>94,58</b>		
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.749.900</b>	<b>87,50</b>	<b>90,00</b>		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4 Dokumen	4	4 Dokumen	100	1.000.000	749.900	74,99	80,00		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	2	2 Laporan	2	2 Laporan	100	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00		
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	7 Desa	100 %	7 Desa	100	1.892.632.472	1.606.153.489	84,86	92,50		
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	15 Orang	15	15 Orang	100	1.891.632.472	1.605.153.489	84,86	85,00		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2 Laporan	2	2 Laporan	100	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00		
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	%	100 %	%	100	202.825.648	200.658.140	98,93	99,67		
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	15 Paket	15	15 Paket	100	2.000.000	1.998.750	99,94	100,00		
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	35 Paket	35	35 Paket	100	26.674.648	26.674.640	100,00	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3 Paket	3	3 Paket	100	4.000.000	3.973.750	99,34	100,00		
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2 Dokumen	2	2 Dokumen	100	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00		
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	350	350 Laporan	350	350 Laporan	100	70.300.000	70.291.000	99,99	100,00		
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1 Laporan	1	1 Laporan	100	98.851.000	96.720.000	97,84	98,00		
<b>2</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.899.000</b>	<b>98,99</b>	<b>99,00</b>		
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	4 unit	4	4 unit	100	10.000.000	9.899.000	98,99	99,00		
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>117.185.600</b>	<b>109.814.768</b>	<b>93,71</b>	<b>89,00</b>		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	5 Laporan	5	5 Laporan	100	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2 Laporan	2	2 Laporan	100	22.000.000	14.629.168	66,50	67,00		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5 Laporan	5	5 Laporan	100	94.185.600	94.185.600	100,00	100,00		
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Tepelihara</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>337.930.000</b>	<b>332.764.315</b>	<b>98,47</b>	<b>97,33</b>		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	11 Unit	11	11 Unit	100	53.950.000	49.784.315	92,28	92,00		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	4 Unit	4	4 Unit	100	48.280.000	48.280.000	100,00	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4 Unit	4	4 Unit	100	235.700.000	234.700.000	99,58	100,00		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)</b>	100 %	%	100 %	%	100	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	%	100 %	%	100	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00		
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	2 Laporan	2	2 Laporan	100	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00		
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF</b>	95 %	%	95 %	%	100	105.800.000	105.797.000	100,00	96,67		
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	%	100 %	%	100	105.800.000	105.797.000	100,00	90,00		
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6 Lembaga	6	6 Lembaga	100	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00		
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	7 Laporan	7	7 Laporan	100	99.800.000	99.797.000	100,00	100,00		
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN</b>	96 %	%	96 %	%	100	89.400.000	89.400.000	100,00	100,00		
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100 %	%	100 %	%	100	89.400.000	89.400.000	100,00	100,00		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7	7 Laporan	7	7 Laporan	100	86.400.000	86.400.000	100,00	100,00		
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7	7 Laporan	7	7 Laporan	100	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00		
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>198.100.000</b>	<b>181.900.000</b>	<b>91,82</b>	<b>80,00</b>		
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>198.100.000</b>	<b>181.900.000</b>	<b>91,82</b>	<b>80,00</b>		
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	210	210 Orang	210	210 Orang	100	198.100.000	181.900.000	91,82	92,00		
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu</b>	<b>96 %</b>	<b>%</b>	<b>96 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>32.750.000</b>	<b>32.663.200</b>	<b>99,73</b>	<b>99,20</b>		
		Persentase desa tertib administrasi	96 %	%	96 %	%	100	32.750.000	32.663.200	99,73	99,20		
<b>1</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>96 %</b>	<b>%</b>	<b>96 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>32.750.000</b>	<b>32.663.200</b>	<b>99,73</b>	<b>80,00</b>		
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7	7 Dokumen	7	7 Dokumen	100	12.750.000	12.750.000	100,00	100,00		
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	7 Dokumen	7	7 Dokumen	100	1.000.000	990.000	99,00	99,00		

No	Uraian Prog/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7	7 Dokumen	7	7 Dokum en	100	1.000.000	990.100	99,01	99,00		
4	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	4 Dokumen	4	4 Dokum en	100	17.000.000	16.943.000	99,66	99,00		
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7	7 Dokumen	7	7 Dokum en	100	1.000.000	990.100	99,01	99		
		<b>Jumlah</b>						<b>2.989.623.720</b>	<b>2.671.799.812</b>	<b>89,37</b>			

URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN KEMALANG

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>2.265.107.515</b>	<b>1.788.245.289</b>	<b>78,95</b>	<b>100,00</b>		
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.942.000</b>	<b>99,03</b>	<b>100,00</b>		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dokumen	7	dokumen	100,00	3.000.000	2.955.000	98,50	100,00		
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	4	dokumen	100,00	3.000.000	2.987.000	99,57	100,00		
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>1.909.180.315</b>	<b>1.456.429.744</b>	<b>76,29</b>	<b>100,00</b>		
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	orang/bulan	14	orang/bulan	100,00	1.868.910.315	1.417.888.494	75,87	100,00		
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	20	dokumen	20	dokumen	100,00	38.000.000	36.325.500	95,59	100,00		
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	laporan	4	laporan	100,00	1.000.000	945.750	94,58	100,00		
d.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1.270.000	1.270.000	100,00	100,00		
<b>3.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>98.408.400</b>	<b>97.571.200</b>	<b>99,15</b>	<b>100,00</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	paket	10	paket	100,00	2.000.000	1.848.000	92,40	100,00		
c.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19	paket	19	paket	100,00	8.500.000	8.281.200	97,43	100,00		
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30	paket	30	paket	100,00	6.500.000	6.500.000	100,00	100,00		
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah barang cetakan dan peraturan	10	paket	10	paket	100,00	1.592.400	1.560.000	97,97	100,00		
f.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10	laporan	10	laporan	100,00	30.000.000	29.962.000	99,87	100,00		
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	laporan	100,00	49.816.000	49.420.000	99,21	100,00		
<b>4.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>65.657.800</b>	<b>64.055.600</b>	<b>97,56</b>	<b>100,00</b>		
a.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	unit	3	unit	100,00	37.000.000	36.600.000	98,92	100,00		
b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	3	unit	100,00	28.657.800	27.455.600	95,80	100,00		
<b>5.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>69.500.000</b>	<b>58.666.625</b>	<b>84,41</b>	<b>100,00</b>		
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	100,00	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00		
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	4	laporan	100,00	27.000.000	17.796.625	65,91	100,00		
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	jasa	5	jasa	100,00	41.000.000	39.370.000	96,02	100,00		
<b>5.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>116.361.000</b>	<b>105.580.120</b>	<b>90,73</b>	<b>100,00</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	unit	13	unit	100,00	33.361.000	26.494.620	79,42	100,00		
b.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah yang dipelihara	2	dokumen	2	dokumen	100,00	32.000.000	31.051.000	97,03	100,00		
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	3	unit	100,00	6.000.000	5.641.000	94,02	100,00		
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	2	unit	100,00	45.000.000	42.393.500	94,21	100,00		
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>5.950.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>98,32</b>	<b>100,00</b>		
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>5.950.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>98,32</b>	<b>100,00</b>		
a.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	laporan	2	laporan	<b>100,00</b>	5.950.000	5.850.000	98,32	100,00		
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>95,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>105,26</b>	<b>80.658.200</b>	<b>79.771.500</b>	<b>98,90</b>	<b>100,00</b>		
<b>1.</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Prosentase lembaga masyarakat yang aktif</b>	<b>95,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>105,26</b>	<b>80.658.200</b>	<b>79.771.500</b>	<b>98,90</b>	<b>100,00</b>		
a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13	Lembaga Kemasyarakatan	13	Lembaga Kemasyarakatan	100,00	13.000.000	12.334.000	94,88	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	laporan	7	laporan	100,00	67.658.200	67.437.500	99,67	100,00		
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>96,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>104,17</b>	<b>134.175.000</b>	<b>130.165.000</b>	<b>97,01</b>	<b>100,00</b>		
<b>1.</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Prosentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>96,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>104,17</b>	<b>134.175.000</b>	<b>130.165.000</b>	<b>97,01</b>	<b>100,00</b>		
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Kecamatan	13	Kegiatan	13	Kegiatan	100,00	131.175.000	127.165.000	96,94	100,00		
2.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13	laporan	13	laporan	100,00	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00		
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</b>	<b>96,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>104,17</b>	<b>175.500.000</b>	<b>171.766.425</b>	<b>97,87</b>	<b>100,00</b>		
<b>1.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</b>	<b>96,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>104,17</b>	<b>175.500.000</b>	<b>171.766.425</b>	<b>97,87</b>	<b>100,00</b>		
a.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55	orang/kegiatan	55	orang/kegiatan	100,00	171.000.000	167.271.425	97,82	100,00		
b.	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2	laporan	2	laporan	100,00	4.500.000	4.495.000	99,89	100,00		
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa tertib administrasi</b>	<b>95,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>105,26</b>	<b>72.726.874</b>	<b>72.549.000</b>	<b>99,76</b>	<b>100,00</b>		
		<b>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan</b>	<b>95,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>105,26</b>						

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa tertib administrasi</b>	<b>95,00</b>	%	<b>100,00</b>	%	<b>105,26</b>	<b>72.726.874</b>	<b>72.549.000</b>	<b>99,76</b>	<b>100,00</b>		
a.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13	dokumen	13	dokumen	100,00	6.500.000	6.460.000	99,38	100,00		
b.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13	dokumen	13	dokumen	100,00	17.000.000	17.000.000	100,00	100,00		
c.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	dokumen	13	dokumen	100,00	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00		
d.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13	dokumen	13	dokumen	100,00	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00		
e.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	dokumen	2	dokumen	100,00	12.900.000	12.860.000	99,69	100,00		
f.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	1	Rekomen dasi	1	rekomen dasi	100,00	4.826.874	4.750.000	98,41			
g.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13	dokumen	13	dokumen	100,00	15.000.000	14.979.000	99,86	100,00		
h.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	13	dokumen	13	dokumen	100,00	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00		
i.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3	laporan	3	laporan	100,00	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00		
<b>TOTAL</b>								<b>2.734.117.589</b>	<b>2.248.347.214</b>	<b>82,23</b>			

URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN NGAWEN

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	%	100	%	100	2.328.626.601	1.997.047.342	86	100		
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	%	100	%	100	1.894.130.001	1.584.041.399	84	100		
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang	15	Orang	107	1.894.130.001	1.584.041.399	84	100		
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	100	%	100	148.000.000	144.776.800	98	100		
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	10.000.000	9.742.500	97	100		
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	13.000.000	12.416.500	96	100		
1.2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	100	15.000.000	14.636.800	98	100		
1.2.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	1	Laporan	100	55.000.000	54.611.000	99	100		
1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	2	Laporan	100	55.000.000	53.370.000	97	100		
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	%	100	%	100	32.500.000	29.880.000	92	100		
1.3.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	Unit	15	Unit	100	32.500.000	29.880.000	92	100		
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	100	%	100	%	100	118.996.600	109.392.357	92	100		
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100	2.000.000	1.721.000	86	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	15.407.600	9.119.513	59	100	Penyesuaian dengan Kebutuhan Listrik yang digunakan	Penyesuaian Penganggaran terkait dengan penggunaan dan Tarif bayar Listrik
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	101.589.000	98.551.844	97	100		
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	100	%	100	135.000.000	128.956.786	96	100		
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	4	Unit	133	30.000.000	27.391.286	91	100		
1.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100	85.000.000	82.520.000	97	100		
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	10	Unit	10	Unit	100	20.000.000	19.045.500	95	100		
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Masyarakat yang terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>9.916.000</b>	<b>9.378.500</b>	<b>95</b>	<b>100</b>		
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100	%	100	%	100	9.916.000	9.378.500	95	100		
2.1.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	Laporan	100	9.916.000	9.378.500	95	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Lembaga Masyarakat Aktif</b>	<b>86</b>	%	<b>86</b>	%	<b>100</b>	<b>95.000.000</b>	<b>93.680.000</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	100	%	100	95.000.000	93.680.000	99	100		
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	39	Lembaga Kemasyarakatan	39	Lembaga Kemasyarakatan	100	10.000.000	9.286.000	93	100		
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13	Laporan	13	Laporan	100	85.000.000	84.394.000	99	100		
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>374.388.000</b>	<b>371.168.650</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi penegakan Perundang-Undangan yang Dilakukan	100	%	100	%	100	269.891.000	267.532.650	99	100		
4.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	1	Laporan	100	269.891.000	267.532.650	99	100		
4.2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilakukan	100	%	100	%	100	104.497.000	103.636.000	99	100		
4.2.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	100	94.497.000	94.406.000	100	100		

No	Uraian Prog/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4.2.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	2	Laporan	200	10.000.000	9.230.000	92	100		
<b>5</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Potensi Konflik Sosial di Kecamatan yang tertangani</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>105</b>	<b>2.975.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang Diselenggarakan	100	%	100	%	100	2.975.000	2.950.000	99	100		
5.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50	Orang	50	Orang	100	2.975.000	2.950.000	99	100		
<b>6</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa Tertib Administrasi</b>	<b>86</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>116</b>	<b>106.372.500</b>	<b>95.280.200</b>	<b>90</b>	<b>100</b>		
		<b>Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>105</b>						
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	%	100	%	100	106.372.500	95.280.200	90	100		
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13	Dokumen	13	Dokumen	100	20.000.000	18.703.000	94	100		
6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13	Dokumen	13	Dokumen	100	20.000.000	17.340.000	87	100		
6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	Dokumen	13	Dokumen	100	9.373.000	9.235.000	99	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13	Dokumen	13	Dokumen	100	15.000.000	14.004.500	93	100		
6.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	6.999.500	6.835.500	98	100		
6.1.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13	Dokumen	13	Dokumen	100	35.000.000	29.162.200	83	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>2.917.278.101</b>	<b>2.569.504.692</b>	<b>88</b>			

**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN PEDAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.111.354.019</b>	<b>1.797.155.660</b>	<b>85,12</b>	<b>100</b>		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100	%	100	%	100	38.000.000	37.924.600	99,80	100		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	100	23.000.000	22.953.350	99,80	100		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21	Laporan	21	Laporan	100	15.000.000	14.971.250	99,81	100		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	%	100	%	100	1.746.462.345	1.447.842.346	82,90	100		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/Bulan	12	Orang/Bulan	100	1.746.462.345	1.447.842.346	82,90	100		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	100	%	100	111.000.674	110.924.706	99,93	100		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	25.000.000	24.997.400	99,99	100		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	10.000.674	9.997.306	99,97	100		
c	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100	76.000.000	75.930.000	99,91	100		
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	%	100	%	100	60.891.000	60.677.000	99,65	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	6	Unit	100	60.891.000	60.677.000	99,65	100		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	%	100	%	100	140.000.000	124.875.158	89,20	100		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100	5.000.000	4.990.400	99,81	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	17.000.000	9.802.138	57,66	100	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Telah Terbayarkan, Kelebihan Anggaran Terjadi Karena Persiapan Pembangunan Gedung Kantor di alihkan menggunakan anggaran dari DPUPR.	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	118.000.000	110.082.620	93,29	100		
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	100	%	100	15.000.000	14.911.850	99,41	100		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	2	Unit	100	15.000.000	14.911.850	99,41	100		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.979.900</b>	<b>99,60</b>	<b>100</b>		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100	%	100	%	100	5.000.000	4.979.900	99,60	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	Laporan	100	5.000.000	4.979.900	99,60	100		
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>105</b>	<b>186.999.000</b>	<b>179.740.300</b>	<b>96,12</b>	<b>100</b>		
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	100	%	100	186.999.000	179.740.300	96,12	100		
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Lembaga Kemasyarakatan	5	Lembaga Kemasyarakatan	100	60.000.000	53.761.350	89,60	100		
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	100	126.999.000	125.978.950	99,20	100		
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>94</b>	<b>314.000.000</b>	<b>309.736.800</b>	<b>98,64</b>	<b>100</b>		
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100	%	100	%	100	149.000.000	147.910.050	99,27	100		
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	100	128.000.000	127.001.700	99,22	100		
b	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	1	Laporan	100	21.000.000	20.908.350	99,56	100		
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100	%	100	%	100	165.000.000	161.826.750	98,08	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13	Laporan	13	Laporan	100	165.000.000	161.826.750	98,08	100		
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Desa</b>	<b>Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>104</b>	<b>88.000.000</b>	<b>85.785.350</b>	<b>97,48</b>	<b>100</b>		
		<b>Persentase Desa tertib administrasi</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>					<b>100</b>		
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	%	100	%	100	88.000.000	85.785.350	97,48	100		
a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14	Dokumen	14	Dokumen	100	5.000.000	4.831.900	96,64	100		
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14	Dokumen	14	Dokumen	100	3.000.000	2.991.800	99,73	100		
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14	Dokumen	14	Dokumen	100	3.000.000	2.080.800	69,36	100		
d	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	Dokumen	2	Dokumen	100	50.000.000	49.683.950	99,37	100		
e	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	14	Dokumen	14	Dokumen	100	5.000.000	4.302.900	86,06	100		
e	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14	Dokumen	14	Dokumen	100	22.000.000	21.894.000	99,52	100		
	<b>JUMLAH</b>							<b>2.705.353.019</b>	<b>2.377.398.010</b>	<b>87,88</b>			



**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN POLANHARJO**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	96	%	96	<b>2.429.449.821</b>	<b>2.068.956.316</b>	85	100		
<b>1</b>	<b>Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100	%	100	%	100	<b>6.000.000</b>	5.936.000	99	100		
	Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4	Dokumen	4	Dokumen	100	2.000.000	1.961.000	98	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	2	Laporan	2	Laporan	100	4.000.000	3.975.000	99	100		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	100	%	100	%	100	<b>2.017.478.921</b>	1.663.085.652	82	100		
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18	orang/bulan	18	orang/bulan	100	2.016.339.921	1.661.954.652	82	100		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	orang/bulan	4	orang/bulan	100	1.139.000	1.131.000	99	100		
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	100	%	100	%	100	<b>120.128.400</b>	119.280.650	99	100		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Kantor	10	paket	10	paket	100	8.000.000	7.995.600	100	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Kantor	2	paket	2	paket	100	15.000.000	14.984.900	100	100		
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5500	paket	5500	paket	100	9.000.000	8.840.450	98	100		
d	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Dokumen	2	paket	100	3.032.400	2.779.700	92	100		
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	450	Laporan	450	laporan	100	35.000.000	34.980.000	100	100		
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10	Laporan	10	laporan	100	50.096.000	49.700.000	99	100		
4	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	%	100	laporan	100	<b>82.442.500</b>	80.350.000	97	100		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	6	laporan	100	82.442.500	80.350.000	97	100		
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	100	%	100	%	100	<b>153.400.000</b>	151.575.910	99	100		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat terkirim	12	Laporan	12	laporan	100	6.000.000	5.949.550	99	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	12	laporan	100	26.400.000	25.156.570	95	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6	Laporan	6	laporan	100	121.000.000	120.469.790	100	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	100	%	100	%	100	<b>50.000.000</b>	48.728.104	97	100		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11	unit	11	unit	100	30.000.000	28.863.104	96	100		
b	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang	56	unit	56	unit	100	5.000.000	4.965.000	99	100		
c	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	unit	5	unit	100	10.000.000	10.000.000	100	100		
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	10	unit	100	5.000.000	4.900.000	98	100		
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik	100	%	100	%	100	<b>15.458.000</b>	15.423.000	100	100		
1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik	100	%	100	%	100	10.500.000	10.494.000	100	100		
a	<b>Koordinasi sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait.</b>	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik	18	Laporan	18	%	100	10.500.000	10.494.000	100	100		
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kecamatan	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik(PATEN)	100	%	100	%	100	4.958.000	4.929.000	99	100		
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah	2	laporan	2	laporan	100	4.958.000	4.929.000	99	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	95	%	95	%	100	<b>213.123.161</b>	212.909.600	100	100		
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang terkoordinasi dalam kegiatan pemberdayaan	100	%	100	%	100	<b>213.123.161</b>	212.909.600	100	100		
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi masyarakat dalam forum murenbangdes	18	lembaga kemasyarakatan	18	lembaga kemasyarakatan	100	15.000.000	14.818.100	99	100		
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	18	laporan	18	laporan	100	198.123.161	198.091.500	100	100		
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	96	%	96	%	100	101.400.000	101.399.900	100	100		
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100	%	100	%	100	101.400.000	101.399.900	100	100		
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18	laporan	18	laporan	100	86.400.000	86.400.000	100	100		
b	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	laporan	2	laporan	100	15.000.000	14.999.900	100	100		
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	97	%	97	%	100	175.177.000	171.417.800	98	100		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100	%	100	%	100	175.177.000	171.417.800	98	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (bimtek,sosialisasi,konsultasi ) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	18	orang	18	orang	100	171.677.000	167.972.800	98	100		
b	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (bimtek,sosialisasi,konsultasi ) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	18	Laporan	18	Laporan	100	3.500.000	3.445.000	98	100		
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	98	%	98	%	100	<b>94.040.000</b>	<b>93.874.000</b>	100	100		
		Persentase desa tertib administrasi	97	%	97	%	100						
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintah desa yang dilakukan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	100	%	100	%	100	94.040.000	93.874.000	100	100		
a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	18	dokumen	18	dokumen	100	8.000.000	7.993.000	100	100		
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrsi tata pemerintahan desa	18	dokumen	18	dokumen	100	26.000.000	25.970.000	100	100		
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	18	dokumen	18	dokumen	100	9.000.000	8.957.000	100	100		
d	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	18	dokumen	18	dokumen	100	8.000.000	7.984.000	100	100		
e	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	1	dokumen	1	dokumen	100	10.000.000	9.964.000	100	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
f	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	18	dokumen	18	dokumen	100	30.000.000	29.966.000	100	100		
g	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	1	dokumen	1	dokumen	100	1.520.000	1.520.000	100	100		
h	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaandi Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	1	Laporan	1	Laporan	100	1.520.000	1.520.000	100	100		
		<b>JUMLAH</b>						<b>3.028.647.982</b>	<b>2.663.980.616</b>	<b>88</b>			

URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN PRAMBANAN

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100,00</b>	%	<b>100,00</b>	%	<b>100,00</b>	<b>2.919.029.227</b>	<b>2.516.643.378</b>	<b>86,22</b>	<b>100,00</b>		
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100,00</b>	%	<b>100,00</b>	%	<b>100,00</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.308.400</b>	<b>92,32</b>	<b>100,00</b>		
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	4	dokumen	100,00	6.000.000	5.723.400	95,39	100,00		
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	4	dokumen	100,00	3.000.000	2.585.000	86,17	100,00		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100,00</b>	%	<b>100,00</b>	%	<b>100,00</b>	<b>2.335.732.227</b>	<b>1.978.832.269</b>	<b>84,72</b>	<b>100,00</b>		
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	orang/bulan	18	orang/bulan	78,26	2.331.232.227	1.974.619.769	84,70	100,00		
b.													
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	laporan	4	laporan	100,00	4.000.000	3.718.500	92,96	100,00		
d.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	1	dokumen	100,00	500.000	494.000	98,80	100,00		
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100,00</b>	%	<b>100,00</b>	%	<b>100,00</b>	<b>166.000.000</b>	<b>142.863.200</b>	<b>86,06</b>	<b>100,00</b>		
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	paket	9	paket	100,00	9.000.000	8.797.000	97,74	100,00		
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19	paket	19	paket	100,00	26.000.000	22.415.000	86,21	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30	paket	30	paket	100,00	8.000.000	7.631.700	95,40	100,00		
d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	laporan	10	laporan	100,00	15.000.000	14.969.000	99,79	100,00		
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	laporan	100,00	108.000.000	89.050.500	82,45	100,00		
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>145.241.000</b>	<b>142.127.000</b>	<b>97,86</b>	<b>100,00</b>		
a.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	paket	5	paket	100,00	54.500.000	53.275.000	97,75	100,00		
b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	unit	6	unit	100,00	90.741.000	88.852.000	97,92	100,00		
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>166.426.000</b>	<b>159.397.859</b>	<b>95,78</b>	<b>100,00</b>		
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	laporan	10	laporan	100,00	4.000.000	3.865.500	96,64	100,00		
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	4	laporan	100,00	27.426.000	21.742.759	79,28	100,00		
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	laporan	5	laporan	100,00	135.000.000	133.789.600	99,10	100,00		
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>96.630.000</b>	<b>85.114.650</b>	<b>88,08</b>	<b>100,00</b>		
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	unit	11	unit	100,00	54.630.000	48.319.650	88,45	100,00		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	2	unit	100,00	35.000.000	31.672.000	90,49	100,00		
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19	unit	19	unit	100,00	7.000.000	5.123.000	73,19	100,00		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.738.000</b>	<b>93,45</b>	<b>100,00</b>		
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.738.000</b>	<b>93,45</b>	<b>100,00</b>		
a.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	laporan	2	laporan	100,00	4.000.000	3.738.000	93,45	100,00		
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>95,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>105,26</b>	<b>70.000.000</b>	<b>63.287.500</b>	<b>90,41</b>	<b>100,00</b>		
<b>1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Prosentase lembaga masyarakat yang aktif</b>	<b>95,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>105,26</b>	<b>70.000.000</b>	<b>63.287.500</b>	<b>90,41</b>	<b>100,00</b>		
a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16	Lembaga Kemasyar akatan	16	Lembaga Kemasyar akatan	100,00	20.000.000	18.488.500	92,44	100,00		
b.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan	4	laporan	100,00	50.000.000	44.799.000	89,60	100,00		
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>96,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>104,17</b>	<b>106.000.000</b>	<b>104.756.200</b>	<b>98,83</b>	<b>100,00</b>		
<b>1</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.688.000</b>	<b>94,80</b>	<b>100,00</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2	laporan	2	laporan	100,00	6.000.000	5.688.000	94,80	100,00		
<b>2</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Prosentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>96,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>104,17</b>	<b>100.000.000</b>	<b>99.068.200</b>	<b>99,07</b>	<b>100,00</b>		
a.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Kecamatan	12	laporan	12	laporan	100,00	95.000.000	94.425.000	99,39	100,00		
b.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	4	laporan	100,00	5.000.000	4.643.200	92,86	100,00		
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</b>	<b>96,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>104,17</b>	<b>183.000.000</b>	<b>177.718.500</b>	<b>97,11</b>	<b>100,00</b>		
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</b>	<b>96,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>104,17</b>	<b>183.000.000</b>	<b>177.718.500</b>	<b>97,11</b>	<b>100,00</b>		
a.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	55	orang/kegiatan	55	orang/kegiatan	100,00	180.000.000	174.848.500	97,14	100,00		
b.	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2	laporan	2	laporan	100,00	3.000.000	2.870.000	95,67	100,00		
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa tertib administrasi</b>	<b>95,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>105,26</b>	<b>20.000.000</b>	<b>18.770.500</b>	<b>93,85</b>	<b>100,00</b>		
		<b>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan</b>	<b>95,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>105,26</b>	<b>95.528.000</b>	<b>89.196.200</b>	<b>93,37</b>	<b>100,00</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa tertib administrasi</b>	<b>95,00</b>	%	<b>100,00</b>	%	<b>105,26</b>	<b>115.528.000</b>	<b>107.966.700</b>	<b>93,46</b>	<b>100,00</b>		
a.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2	dokumen	2	dokumen	100,00	5.000.000	4.634.000	92,68	100,00		
b.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	dokumen	2	dokumen	100,00	15.000.000	14.136.500	94,24	100,00		
c.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	dokumen	2	dokumen	100,00	4.000.000	3.732.000	93,30	100,00		
d.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	dokumen	3	dokumen	100,00	2.000.000	1.878.000	93,90	100,00		
e.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	dokumen	2	dokumen	100,00	18.000.000	16.903.200	93,91	100,00		
f.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3	dokumen	3	dokumen	100,00	67.000.000	62.513.000	93,30	100,00		
g.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	3	dokumen	3	dokumen	100,00	2.000.000	1.875.000	93,75	100,00		
h.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2	laporan	2	laporan	100,00	2.528.000	2.295.000	90,78	100,00		
<b>Jumlah</b>								<b>3.397.557.227</b>	<b>2.974.110.278</b>	<b>87,54</b>			

**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN TRUCUK**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100%	2.382.533.293	1.997.445.504	84%			
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100	%	100	%	100%	5.000.000	4.626.400	93%			
<b>a</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	4	dokumen	100%	2.000.000	1.946.600	97%	100		
<b>b</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	laporan	1	laporan	100%	3.000.000	2.679.800	89%	100		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu	100	%	100	%	100%	1.754.901.481	1.411.831.446	80%			
<b>a</b>	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah orang yang Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	13	laporan	13	laporan	100%	1.751.901.481	1.406.786.246	80%	100		
<b>b</b>	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4	laporan	4	laporan	100%	3.000.000	2.577.400	86%	100		
<b>c</b>	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	1	dokumen	100%	2.500.000	2.467.800	99%	100		
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100%	84.246.000	65.398.300	78%			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	paket	5	paket	100%	5.000.000	4.903.000	98%	100		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	3	paket	100%	5.400.000	4.943.000	92%	100		
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	3	paket	100%	4.000.000	3.912.300	98%	100		
d	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36	dokumen	36	dokumen	100%	1.740.000	1.740.000	100%	100		
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	laporan	6	laporan	100%	17.490.000	17.390.000	99%	100		
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	laporan	100%	50.616.000	32.510.000	64%	100	Kurangnya Perjalanan Dinas Luar Kota dan Dalam Kota tidak bisa maksimal atau tidak sesuai rencana	
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	%	100	%	100%	267.545.500	264.550.000	99%			
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	unit	7	unit	100%	113.150.000	110.810.000	98%	100		
b	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	2	unit	2	unit	100%	154.395.500	153.740.000	100%	100		
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase jasa penunjang umum pemerintah di kecamatan yang tersedia	100	%	100	%	100%	171.100.000	162.550.580	95%			
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	100%	4.000.000	3.736.800	93%	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	100%	30.200.000	25.324.684	84%	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	laporan	7	laporan	100%	136.900.000	133.489.096	98%	100		
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100	%	100	%	100%	97.240.312	88.488.778	91%			
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13	unit	13	unit	100%	52.730.000	47.698.778	90%	100		
b	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	unit	2	unit	100%	9.554.300	9.272.000	97%	100		
c	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	2	unit	2	unit	100%	27.806.012	26.598.000	96%	100		
d	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	10	unit	10	unit	100%	7.150.000	4.920.000	69%	100		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100	%	100	%	100%	4.180.000	3.819.300	91%			
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</b>	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100	%	100	%	100%	4.180.000	3.819.300	91%	100		
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	10	laporan	10	laporan	100%	4.180.000	3.819.300	91%	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	98	%	98	%	100%	136.471.135	121.946.000	89%			
1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Desa yang terkoordinasi dalam kegiatan pemberdayaan	100	%	100	%	100%	136.471.135	121.946.000	89%			
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Forum Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	90	lembaga kemasyar akatan	87	lembaga kemasyar akatan	97%	14.000.000	13.605.100	97%	100		
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	18	desa	18	desa	100%	122.471.135	108.340.900	88%	100		
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Prosentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100	%	100	%	100%	269.581.000	252.032.900	93%			
1	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Prosentase Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100	%	100	%	100%	172.000.000	160.680.900	93%			
a	Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Dan/atau Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	laporan	1	laporan	100%	172.000.000	160.680.900	93%	100		
2	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	100	%	100	%	100%	97.581.000	91.352.000	94%			
a	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12	laporan	12	laporan	100%	89.730.000	83.640.500	93%	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	3	laporan	3	laporan	100%	7.851.000	7.711.500	98%	100		
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase potensi konflik sosial di kecamatan yang ditangani	96	%	100	%	104%	8.875.000	8.730.300	98%			
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang Diselenggarakan	100	%	100	%	100%	8.875.000	8.730.300	98%			
a	Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	4	orang	4	orang	100%	8.875.000	8.730.300	98%	100		
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Tertib Administrasi, Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	97	%	100	%	103%	109.181.500	91.327.100				
		Persentase Desa tertib administrasi	95	%	100	%	105%						
<b>1</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase Pemerintahan Desa yang Dilakukan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	%	100	%	100%	109.181.500	91.327.100	84%			
a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	18	dokumen	18	dokumen	100%	4.924.000	4.806.800	98%	100		
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18	dokumen	18	dokumen	100%	4.515.000	3.901.400	86%	100		



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	18	dokumen	18	dokumen	100%	3.440.000	3.333.800	97%	100		
d	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	18	dokumen	18	dokumen	100%	10.000.000	8.707.300	87%	100		
e	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3	dokumen	3	dokumen	100%	23.000.000	20.106.700	87%	100		
f	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	18	dokumen	18	dokumen	100%	63.302.500	50.471.100	80%	100		
		<b>JUMLAH</b>						<b>2.910.821.928</b>	<b>2.475.301.104</b>	85%			

**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN TULUNG**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.519.064.202</b>	<b>1.983.390.392</b>	<b>78,74</b>			
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.331.450</b>	<b>3.321.600</b>	<b>99,70</b>			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5	Dokumen	5	Dokumen	100	1.681.250	1.681.100	100	100		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1.650.200	1.640.500	99	100		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.135.017.487</b>	<b>1.691.908.794</b>	<b>79</b>			
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang/Bulan	19	Orang/Bulan	100	2.132.663.487	1.689.767.294,00	79	100		
4	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	Laporan	20	Laporan	100	1.354.000	1.159.000	86	100		
5	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1.000.000	982.500	98	100		
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>106.122.000</b>	<b>65.576.950</b>	<b>62</b>			
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Paket	2	Paket	100	10.000.000	6.566.950	66	100		
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	100	25.850.000	25.400.000	98	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100	70.272.000	33.610.000	48	100		
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>59.750.000</b>	<b>58.425.000</b>	<b>98</b>			
9	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	Unit	1	Unit	100	26.500.000	25.250.000	95	100		
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	8	Unit	8	Unit	100	33.250.000	33.175.000	100	100		
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>164.223.265</b>	<b>143.345.048</b>	<b>87</b>			
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	2	Laporan	100	5.576.000	5.482.500	98	100		
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang terbayar	1	Laporan	1	Laporan	100	24.000.000	17.432.248	73	100		
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6	Laporan	6	Laporan	100	134.647.265	120.430.300	89	100		
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah yang Terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>50.620.000</b>	<b>20.813.000</b>	<b>41</b>			
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	6	Unit	6	Unit	100	47.780.000	18.208.000	38	100		
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	4	Unit	100	2.840.000	2.605.000	92	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>1.837.400</b>	<b>1.836.800</b>	<b>100</b>			
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>1.837.400</b>	<b>1.836.800</b>	<b>100</b>			
16	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	100	1.837.400	1.836.800,00	100	100		
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>95</b>	%	<b>100</b>	%	<b>105</b>	<b>103.102.070</b>	<b>95.148.570,00</b>	<b>92</b>			
1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>103.102.070</b>	<b>95.148.570</b>				
17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga Kemasyarakatan	6	Lembaga Kemasyarakatan	100	14.481.070	14.313.570	99	100		
18	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	5	Laporan	100	88.621.000	80.835.000	91	100		
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>96</b>	%	<b>100</b>	%	<b>104</b>	<b>85.375.500</b>	<b>80.915.000</b>	<b>95</b>			
1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>80.393.750</b>	<b>76.440.500</b>	<b>95</b>			
19	Sinergitas dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah	12	Laporan	12	Laporan	100	78.702.250	74.749.000	95	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
20	Harminisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	1	Laporan	100	1.691.500	1.691.500	100	100		
2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	4.981.750	4.474.500				
21	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	1	Laporan	100	4.981.750	4.474.500	90	100		
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>104</b>	<b>208.236.200</b>	<b>198.792.339</b>	<b>95</b>			
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>208.236.200</b>	<b>198.792.339</b>	<b>95</b>			
22	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	695	Orang	695	Orang	100	198.236.200	189.698.589	96	100		
23	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani sesuai ketentuan Perundang-Undangan	1	Laporan	1	Laporan	100	10.000.000	9.093.750	91	100		
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>103</b>	<b>109.137.015</b>	<b>105.551.350</b>	<b>97</b>			
		<b>Persentase desa tertib administrasi</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>105</b>						

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	%	100	%	100	109.137.015	105.551.350	97			
24	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peaaraturan Kepala Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	4.090.000	3.763.000	92	100		
25	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintah Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	5.180.000	4.271.500	82	100		
26	Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Deesa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	2.000.000	1.799.850	90	100		
27	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1.747.950	1.350.000	77	100		
28	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	21.000.000	19.891.500	95	100		
29	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1.416.215	1.112.500	79	100		
30	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Dokumen	1	Dokumen	100	72.514.000	72.353.000	100	100		
31	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1.188.850	1.010.000	85	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>3.026.752.387</b>	<b>2.465.634.451</b>	<b>81</b>			

**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN WEDI**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.823.761.390</b>	<b>2.513.543.719</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	-	-
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.997.250</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	-	-
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4	Dokumen	4	Dokumen	1	7.000.000	5.998.000	86	86	-	-
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100	1.000.000	999.250	100	100	-	-
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.209.726.029</b>	<b>1.934.396.109</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	-	-
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	Orang/bulan	18	Orang/bulan	86	2.207.726.029	1.932.396.109	88	88	-	-
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	4	Laporan	100	2.000.000	2.000.000	100	100	-	-
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>78.028.361</b>	<b>69.582.700</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	-	-
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	3.000.000	2.997.500	100	100	-	-
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	100	14.637.361	14.635.200	100	100	-	-
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	6	Paket	100	4.500.000	4.500.000	100	100	-	-
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3.100.000	3.000.000	97	97	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	Laporan	7	Laporan	100	8.700.000	8.700.000	100	100	-	-
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100	44.091.000	35.750.000	81	81	-	-
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>109.714.000</b>	<b>107.348.300</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	-	-
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	unit	12	unit	100	20.000.000	19.859.900	99	100	-	-
b	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18	unit	18	unit	100	89.714.000	87.488.400	98	98	-	-
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>145.003.000</b>	<b>134.650.724</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	-	-
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	2	Laporan	100	1.000.000	168.000	17	25	-	-
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	21.600.000	15.240.714	71	71	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	122.403.000	119.242.010	97	97	-	-
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Tepelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>273.290.000</b>	<b>260.568.636</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	-	-
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	10	Unit	100	50.690.000	49.296.036	97	97	-	-
b	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Unit	3	Unit	100	1.800.000	1.760.000	98	98	-	-
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	5	Unit	100	3.600.000	3.570.000	99	100	-	-
d	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2	Unit	2	Unit	100	210.000.000	198.742.600	95	95	-	-



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	8	Unit	100	7.200.000	7.200.000	100	100	-	-
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN LAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Masyarakat Yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.999.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.999.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	Laporan	100	3.000.000	2.999.500	100	100	-	-
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Masyarakat Aktif</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>107.400.000</b>	<b>107.398.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>107.400.000</b>	<b>107.398.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga Kemasyarakatan	6	Lembaga Kemasyarakatan	100	36.400.000	36.399.000	100	100	-	-
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	6	Laporan	100	71.000.000	70.999.700	100	100	-	-
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>157.715.000</b>	<b>157.682.650</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>150.715.000</b>	<b>150.684.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	100	128.000.000	127.969.400	100	100	-	-
b	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	Laporan	12	Laporan	100	22.715.000	22.715.000	100	100	-	-
2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koodinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.998.250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
b	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	1	Laporan	100	7.000.000	6.998.250	100	100	-	-
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Potensi Konflik Sosial Di Kecamatan Yang Tertangani</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>96</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>20.500.000</b>	<b>20.489.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang diselenggarakan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>20.500.000</b>	<b>20.489.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan ( Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi ) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang	100	Orang	100	15.000.000	14.990.000	100	100	-	-
b	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	1	Laporan	100	5.500.000	5.499.500	100	100	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan Tepat Waktu</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>238.597.000</b>	<b>229.728.000</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	-	-
		<b>Persentase Desa Tertib Administrasi</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>238.597.000</b>	<b>229.728.000</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	-	-
1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>238.597.000</b>	<b>229.728.000</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	-	-
a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	Dokumen	2	Dokumen	100	5.645.000	5.645.000	100	100	-	-
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	6.000.000	6.000.000	100	100	-	-
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	Dokumen	3	Dokumen	100	6.500.000	6.499.800	100	100	-	-
d	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	Dokumen	4	Dokumen	100	8.000.000	7.999.500	100	100	-	-
e	Fasilitasi pemilihan kepala desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	Dokumen	2	Dokumen	100	19.355.000	19.354.900	100	100	-	-
f	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	Dokumen	7	Dokumen	100	193.097.000	184.228.800	95	95	-	-
		<b>Jumlah</b>						<b>3.350.973.390</b>	<b>3.031.842.069</b>	<b>90,48</b>			

URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN													
KECAMATAN KLATEN TENGAH													
No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>5.993.520.058</b>	<b>5.074.221.290</b>	<b>84,66</b>			
1.1	<b>Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Perencanaan, Penggabungan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.992.000</b>	<b>99,60</b>			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	4	Dokumen	100	1.000.000	997.000	99,70	100		
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100	1.000.000	995.000	99,50	100		
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</b>	<b>100</b>	%	<b>95,5</b>	%	<b>95,5</b>	<b>5.650.773.058</b>	<b>4.735.620.157</b>	<b>83,80</b>			
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40	Orang/ Bulan	38	Orang/ Bulan	95,0	5.649.861.679	4.734.715.907	83,80	100		
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	4	Laporan	4	Laporan	100	911.379	904.250	99,22	100		
1.3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>95.991.000</b>	<b>95.776.651</b>	<b>99,78</b>			
1.3.1	Penyediaan Komponen In	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	5.000.000	4.944.500	98,90	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	15.000.000	14.879.350	99,20	100		
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	2.500.000	2.500.000	100,00			
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	Laporan	2	Laporan	100	33.600.000	33.600.000	100,00	100		
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100	39.891.000	39.852.801	99,90	100		
<b>1.4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>97,14</b>			
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan SKPD	1	Unit	1	Unit	100	3.500.000	3.400.000	97,14	100		
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>161.506.000</b>	<b>157.852.742</b>	<b>97,74</b>			
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	3	Laporan	100	45.000.000	42.347.362	94,11	100		
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	116.506.000	115.505.380	99,14	100		
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>79.750.000</b>	<b>79.579.740</b>	<b>99,79</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	6	Unit	120	25.000.000	24.999.760	100,00	100		
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	4	Unit	80	8.500.000	8.475.000	99,71	100		
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	Unit	1	Unit	100	42.750.000	42.604.980	99,66	100		
1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	3	Unit	3	Unit	100	3.500.000	3.500.000	100,00	100		
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.455.200</b>	<b>98,21</b>			
<b>2.1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.455.200</b>	<b>98,21</b>			
2.1.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	100	2.500.000	2.455.200	98,21	100		
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>105,26</b>	<b>129.300.000</b>	<b>128.730.300</b>	<b>99,56</b>			
<b>3.1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>105,26</b>	<b>74.300.000</b>	<b>74.176.800</b>	<b>99,83</b>			
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	Laporan	100	74.300.000	74.176.800	99,83	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.2	<b>Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>95</b>	%	<b>100</b>	%	<b>105,26</b>	<b>55.000.000</b>	<b>54.553.500</b>	<b>99,19</b>			
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Lembaga Kemasyarakatan	5	Lembaga Kemasyarakatan	100,00	55.000.000	54.553.500	99,19	100		
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>96</b>	%	<b>100</b>	%	<b>104,17</b>	<b>92.500.000</b>	<b>92.484.500</b>	<b>99,98</b>			
4.1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>90.000.000</b>	<b>89.984.500</b>	<b>99,98</b>			
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	100	87.500.000	87.492.500	99,99	100		
4.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	1	Laporan	100	2.500.000	2.492.000	99,68	100		
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00</b>			
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	2	Laporan	200	2.500.000	2.500.000	100,00	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96	%	100		104,17	36.677.500	36.479.500	99,46				
5.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100	%	100		100	36.677.500	36.479.500	99,46				
5.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40	Orang	40	Orang	100	36.677.500	36.479.500	99,46	100			
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	97	%	100	%	103,09	132.755.000	129.697.250	97,70				
		Persentase desa tertib adminitrasi	95	%	100	%	105,26							
6.1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	%	100	%	100	132.755.000	129.697.250	97,70				
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3	Dokumen	3	Dokumen	100	38.985.000	37.873.000	97,15	100			
6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	Dokumen	9	Dokumen	100	5.000.000	4.997.250	99,95	100			
6.1.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9	Dokumen	9	Dokumen	100	88.770.000	86.827.000	97,81	100			
			<b>Jumlah</b>						<b>6.387.252.558</b>	<b>5.464.068.040</b>	85,55			



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>KELURAHAN TONGGALAN</b>													
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	%	<b>100,00</b>	%	<b>100,00</b>	<b>264.270.000</b>	<b>250.544.871</b>	<b>94,81</b>			
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	100,00	%	100,00	38.202.400	37.071.150	97,04			
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	paket	30	paket	100,00	11.800.000	10.797.000	91,50	100,00		
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.000	paket	3.000	paket	100,00	3.000.000	2.999.950	100,00	100,00		
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	12	dokumen	100,00	1.592.400	1.590.200	99,86	100,00		
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	12	laporan	100,00	6.810.000	6.804.000	99,91	100,00		
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	laporan	100	laporan	100,00	15.000.000	14.880.000	99,20	100,00		
<b>2</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	%	<b>100,00</b>	%	<b>100,00</b>	<b>94.270.000</b>	<b>90.137.000</b>	<b>95,62</b>			
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	unit	4	unit	100,00	94.270.000	90.137.000	95,62	100,00		
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	%	<b>100,00</b>	%	<b>100,00</b>	<b>123.600.000</b>	<b>115.725.221</b>	<b>93,63</b>	<b>100,00</b>		
a	Penyediaan Komponen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	12	bulan	100,00	4.400.000	2.702.501	61,42	100,00		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	laporan	6	orang	100,00	119.200.000	113.022.720	94,82	100,00		
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>8.197.600</b>	<b>7.611.500</b>	<b>92,85</b>	<b>100,00</b>		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	unit	1	unit	100,00	2.997.600	2.827.000	94,31	100,00		
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	2	unit	100,00	5.200.000	4.784.500	92,01	100,00		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prersentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>435.730.000</b>	<b>404.011.700</b>	<b>92,72</b>	<b>100,00</b>		
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>435.730.000</b>	<b>404.011.700</b>	<b>92,72</b>	<b>100,00</b>		
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	1	kegiatan	100,00	6.256.500	6.119.000	97,80	100,00		
b	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	Unit	5	unit	100,00	183.000.000	179.782.000	98,24	100,00		
c	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/O rmas	4	lembaga	100,00	246.473.500	218.110.700	88,49	100,00		
	<b>Jumlah</b>							<b>700.000.000</b>	<b>654.556.571</b>	93,51	<b>100,00</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>KELURAHAN BUNTALAN</b>													
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>204.903.960</b>	<b>198.619.886</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>		
1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>25.674.350</b>	<b>25.289.100</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>		
a	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Paket	2	Paket	100%	3.924.350	3.749.100	96%	100%		
b	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100%	240.000	180.000	75%	100%		
c	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12	Paket	12	Paket	100%	360.000	360.000	100%	100%		
d	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	4	Kali	4	Kali	100%	6.150.000	6.120.000	100%	100%		
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	1	kali	1	kali	100%	15.000.000	14.880.000	99%	100%		
2	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>67.050.000</b>	<b>66.500.000</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>		
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	Paket	1	Paket	100%	67.050.000	66.500.000	99%	100%		
3	<b>Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>110.757.610</b>	<b>106.258.786</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>		
a	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100%	10.027.340	8.684.924	87%	100%		
b	Penyedia Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	5	Laporan	100%	100.730.270	97.573.862	97%	100%		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	100	%	100%	1.422.000	572.000	40%	100%		
a	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	1	Unit	100%	1.422.000	572.000	40%	100%		
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	100	%	100	%	100%	670.096.040	651.781.786	97%	100%		
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan	100	%	100	%	100%	8.459.760	8.044.500	95%	100%		
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga	4	Lembaga	100%	8.459.760	8.044.500	95%	100%		
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan	100	%	100	%	100%	661.636.280	643.737.286	97%	100%		
a	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan diperbaiki	1	Paket	1	Paket	100%	370.000.000	357.515.086	97%	100%		
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga yang di berdayakan	4	Lembaga	4	Lembaga	100%	291.636.280	286.222.200	98%	100%		
<b>JUMLAH :</b>								<b>875.000.000</b>	<b>850.401.672</b>	<b>97%</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>KELURAHAN KABUPATEN</b>													
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	%	<b>100,00</b>	%	<b>100,00</b>	<b>229.400.000</b>	<b>226.910.235</b>	98,91			
1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum</i>	100	%	100	%	<b>100%</b>	<b>43.772.016</b>	<b>42.932.200</b>	<b>98%</b>		<b>tidak ada</b>	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia</i>	30	Unit	30	Unit	<b>100%</b>	10.497.016	10.185.200	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>tidak ada</b>	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia</i>	10.000	Lembar	10.000	Lembar	<b>100%</b>	3.000.000	3.000.000	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>tidak ada</b>	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Tersedia</i>	12	bulan	12	bulan	<b>100%</b>	2.000.000	1.792.000	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>tidak ada</b>	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	<i>Jumlah Kunjungan Tamuh Terfasilitasi</i>	8	kali	8	kali	<b>100%</b>	13.275.000	13.075.000	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>tidak ada</b>	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan</i>	1	kali	1	kali	<b>100%</b>	15.000.000	14.880.000	<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>tidak ada</b>	
2	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b><i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tersedia</i></b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100%</b>	<b>50.100.000</b>	<b>49.950.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>tidak ada</b>	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia</i>	3	Unit	1	Unit	<b>33%</b>	50.100.000	49.950.000	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>tidak ada</b>	
3	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100	%	100	%	<b>100%</b>	<b>130.675.984</b>	<b>129.483.035</b>	<b>99%</b>		<b>tidak ada</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar</i>	3	rekening	3	rekening	<b>100%</b>	11.500.000	10.314.051	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>tidak ada</b>	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar</i>	6	THL	6	THL	<b>100%</b>	119.175.984	119.168.984	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>tidak ada</b>	

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	100	%	100	%	100%	4.852.000	4.545.000	94%		tidak ada	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar</i>	1	Unit	1	Unit	100%	2.212.000	2.000.000	90%	100%	tidak ada	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara</i>	3	enis	3	enis	100%	2.640.000	2.545.000	96%	100%	tidak ada	
II	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Persentase lembaga masyarakat aktif</i>	100	%	100	%	100%	545.600.000	529.704.037	97%		tidak ada	
1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<i>Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan</i>	100	%	100	%	100%	545.600.000	529.704.037	97%		tidak ada	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	<i>Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</i>	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	11.000.000	10.887.000	99%	100%	tidak ada	
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun</i>	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%	306.000.000	296.569.912	97%	100%	tidak ada	
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang dilakukan Pembinaan</i>	5	lembaga kemasyarakatan	5	lembaga kemasyarakatan	100%	228.600.000	222.247.125	97%	100%	tidak ada	
		<b>Jumlah</b>						<b>775.000.000</b>	<b>756.614.272</b>	<b>97,63</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>KELURAHAN KLATEN</b>													
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>246.469.140</b>	<b>242.547.401</b>	<b>98</b>			
1	<b>Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)</b>	<b>Presentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan-Kelurahan) tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100.721.602</b>	<b>99.788.100</b>	<b>99</b>			
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	40	unit	40	unit	100	8.666.302	8.536.800	98,51	100		
b	Penyediaan Barang Cetak dan ;Penggadaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	16.685	eksemplar	16.685	eksemplar	100	3.255.300	3.255.300	100,00	100		
c	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang terfasilitasi	11	kali	11	kali	100	11.400.000	11.400.000	100,00	100		
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi & Konsultasi yang dilaksanakan	100	persen	100	persen	100	15.000.000	14.880.000	99,20	100		
e	Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terfasilitasi	6	Unit	6	Unit	100	62.400.000	61.716.000	99	100		
2	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>140.762.538</b>	<b>138.240.471</b>	<b>98</b>			
a	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi , Sumber daya Air , dan Listrik yang terbayar	12	bulan	12	bulan	100	10.000.000	7.563.395	75,63	100		
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor terbayar	7	Orang	7	orang	100	130.762.538	130.677.076	100	100		
3	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Barang Milik Daerah yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>4.985.000</b>	<b>4.518.830</b>	<b>91</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpelihara dan Pajaknya terbayar	1	unit	1	unit	100	2.225.000	1.758.830	79,05	100		
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	3	unit	3	unit	100	2.760.000	2.760.000	100,00	100		
II	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PRESENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>453.530.860</b>	<b>435.310.672</b>	96			
1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Presentase Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	453.530.860	435.310.672	96			
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah desa yang dilakukan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	1	kegiatan	1	kegiatan	100	5.345.000	5.320.000	99,53	100		
b	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terfasilitasi	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100	187.450.000	182.102.992	97,15	100		
c	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga masyarakat yang dilakukan pembinaan	5	lembaga	5	lembaga	100	260.735.860	247.887.680	97	100		
		<b>Jumlah</b>						<b>700.000.000</b>	<b>677.858.073</b>	<b>96,84</b>			



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>KELURAHAN MOJAYAN</b>													
No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>190.840.000</b>	<b>184.920.492</b>				
1	<b>Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)</b>	<b>Presentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan-Kelurahan) tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	24.541.000	24.254.500				
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3	paket	3	paket	100	3.782.000	3.643.800	96	<b>100</b>		
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggadaan yang tersedia	1	paket	1	paket	100	2.024.000	2.008.700	99	<b>100</b>		
c	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1	dokumen	1	Persen	100	360.000	360.000	100			
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang terfasilitasi	9	kali	9	kali	100	3.375.000	3.362.000	100	<b>100</b>		
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi & Konsultasi yang dilaksanakan	2	laporan	2	laporan	100	15.000.000	14.880.000	99	<b>100</b>		
2	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>28.700.000</b>	<b>28.500.000</b>				
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	20	unit	20	unit	100	12.000.000	11.900.000	99			
b	Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terfasilitasi	1	unit	1	unit	100	16.700.000	16.600.000	99	<b>100</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	136.411.500	131.143.992				
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	paket	3	paket	100	1.033.464	1.005.200				
b	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi , Sumber daya Air , dan Listrik yang terbayar	12	laporan	12	laporan	100	14.610.000	12.331.524	84	<b>100</b>		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	orang	6	orang	100	120.768.036	117.807.268	98	<b>100</b>		
4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Barang Milik Daerah yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	1.187.500	1.022.000				
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpelihara dan Pajaknya terbayar	1	unit	1	unit	100	1.187.500	1.022.000	86	<b>100</b>		
II	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PRESENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>509.160.000</b>	<b>503.519.690</b>				
2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Presentase Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	509.160.000	503.519.690				
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah desa yang dilakukan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	5	lembaga	5	lembaga	100	10.000.000	9.401.500	94	<b>100</b>		
b	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terfasilitasi	2	unit	2	unit	100	183.000.000	179.031.600	98	<b>100</b>		
c	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga masyarakat yang dilakukan pembinaan	7	lembaga	7	lembaga	100	316.160.000	315.086.590	100	<b>100</b>		
		<b>Jumlah</b>						<b>700.000.000</b>	<b>688.440.182</b>	<b>98,35</b>			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
<b>Kelurahan Bareng</b>													
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase urusan pemerintahan di wilayah Kelurahan Bareng</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	146.358.012	133.755.516	<b>91%</b>			
1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Prosentase Perkantoran yang terlayani	100	%	100	%	<b>100%</b>	<b>33.506.800</b>	<b>32.478.900</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>		
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	30	unit	30	unit	100	7.550.000	6.722.200	89	90		
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Cetakan dan Penggandaan yng tersedia	1	lembar	1	lembar	100	2.356.800	2.356.700	100	95		
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan perundang-undangan yang t teersedia	12	bulan	12	bulan	100	1.000.000	920.000	92	95		
d	Fasilitas Kunjungan Tam	Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan	15	kali	15	kali	100	7.600.000	7.600.000	100	100		
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	kali	1	kali	100	15.000.000	14.880.000	99	100		
3	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase Jasa penunjang urusan pemerintah di kelurahan bareng yang tersedia						108.901.212	99.854.616				
a	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Rekening	3	rekening	3	rekening	100	10.000.000	4.242.696	42	95	tagihan internet tidak terpakai karena sudah ada dari keminfo	
b	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Administari Kantor , Jasa Tenaga Kebersihan yang tersedia	5	thl	5	thl	100	98.901.212	95.611.920	97	97		
4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	prosentase barang milik daerah terpelihara	100	%	100	%	<b>100%</b>	<b>3.950.000</b>	<b>1.422.000</b>	<b>36%</b>	<b>100%</b>		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1	unit	1	unit	100	3.950.000	1.422.000	36	95		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KEMASYAKARATAN</b>	prosentase pemberdayaan kelurahan di wilayah kelurahan bareng yang terkoordinasi	100	%	100	%	<b>100%</b>	<b>553.641.988</b>	<b>502.902.639</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>		
1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Prosentase masyarakat yang terkoordinasikan	100	%	100	%	<b>100%</b>	<b>553.641.988</b>	<b>502.902.639</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>		
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	jumlah Koordinasi Musrenbangkel	2	kegiatan	2	kegiatan	100	7.672.663	7.672.500	100	100		
b	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	1	kegiatan	1	kegiatan	100	273.000.000	257.150.000	94	94		
c	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga masyarakat di kelurahan yang di berdayakan	6	lembaga kemasyarakatan	6	lembaga kemasyarakatan	100	272.969.325	238.080.139	87	87		
	<b>JUMLAH</b>							<b>700.000.000</b>	<b>636.658.155</b>	<b>91</b>			

**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN KLATEN UTARA**

	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah di Kecamatan</b>	100	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>3.629.019.727</b>	<b>3.141.107.954</b>	<b>86,56</b>	<b>100</b>		
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100	%	100	%	100	<b>11.000.000</b>	<b>10.889.700</b>	<b>99,00</b>	100		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	4	Dokumen	4	Dokumen	100	8.000.000	7.968.400	<b>99,61</b>	100		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2	Laporan	100	3.000.000	2.921.300	<b>97,38</b>	100		
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pembayaran gaji, tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan keuangan tepat waktu	100	%	100	%	100	<b>3.150.509.550</b>	<b>2.673.590.921</b>	<b>84,86</b>	100		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28	orang/bulan	28	orang/bulan	100	3.150.509.550	2.673.590.921	<b>84,86</b>	<b>100</b>		
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Administrasi umum Perangkat daerah tepat waktu	100	%	100	%	100	<b>72.899.000</b>	<b>72.807.450</b>	<b>99,87</b>	100		
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50	paket	50	paket	100	15.000.000	14.982.650	<b>99,88</b>	100		
b	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2	paket	2	paket	100	6.000.000	5.999.900	<b>100,00</b>	100		
c	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Laporan	36	Laporan	100	15.000.000	14.944.900	<b>99,63</b>	100		
d	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	24	Laporan	100	36.899.000	36.880.000	<b>99,95</b>	<b>100</b>		
4	<b>Pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu</b>	100	%	100	%	100	<b>104.227.000</b>	<b>101.570.000</b>	<b>97,45</b>	100		

	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	7	unit	7	unit	100	104.227.000	101.570.000	97,45	100		
5	<b>Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	%	100	%	100	176.000.177	175.274.383	99,59	100		
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan	2	Laporan	100	44.140.337	43.414.543	98,36	100		
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	131.859.840	131.859.840	100,00	100		
6	<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100	%		%		114.384.000	106.975.500	93,52	100		
a	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12	unit	12	unit	100	10.000.000	6.109.500	61,10	100		
b	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel Terpelihara	36	unit	36	unit	100	4.630.000	4.620.000	99,78	100		
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	unit	100	99.754.000	96.246.000	96,48	100		
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100	%	100	%	100	10.000.000	9.787.200	97,87	100		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100	%	100	%	100	10.000.000	9.787.200	97,87	100		
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	Laporan	100	10.000.000	9.787.200	97,87	100		
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	95	%	95	%	100	116.576.000	116.210.400	99,69	100		
1	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	100	%	100	116.576.000	116.210.400	99,69	100		

	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8	Lambaga	8	Lambaga	100	5.000.000	4.976.800	<b>99,54</b>	<b>100</b>		
b	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	100	111.576.000	111.233.600	<b>99,69</b>	100		
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	98	%	<b>98</b>	%	<b>100</b>	<b>120.000.000</b>	<b>117.498.000</b>	<b>97,92</b>	100		
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100	%	100	%	<b>100</b>	120.000.000	117.498.000	<b>97,92</b>	100		
a	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	100	120.000.000	117.498.000	<b>97,92</b>	100		
<b>V</b>	<b>PEOGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase potensi konflik sosial di Kecamatan yang tertangani	96	%	<b>96</b>	%	<b>100</b>	<b>165.000.000</b>	<b>156.541.800</b>	<b>94,87</b>	<b>100</b>		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	97	%	97	%	<b>100</b>	165.000.000	156.541.800	<b>94,87</b>	100		
a	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek,, sosialisasi, konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650	orang	650	orang	100	165.000.000	156.541.800	<b>94,87</b>	100		
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa tertib administrasi	95	%	<b>95</b>	%	<b>100</b>	<b>26.000.000</b>	<b>25.894.600</b>	<b>99,59</b>	100		
		Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	<b>96</b>	%	<b>96</b>	%	<b>100</b>						

	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	%	100	%	100	26.000.000	25.894.600	99,59	100		
a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	Dokumen	6	Dokumen	100	10.000.000	9.940.100	99,40	100		
b	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8	Dokumen	8	Dokumen	100	3.000.000	2.984.000	99,47	100		
c	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6	Dokumen	6	Dokumen	100	13.000.000	12.970.500	99,77	100		
<b>Jumlah</b>								<b>4.066.595.727</b>	<b>3.567.039.954</b>	<b>87,72</b>	100		
<b>KELURAHAN BARENGLOR</b>													
No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	209.135.000	207.134.877	99	100		
1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>presentase penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100	persen	100	persen	100	37.592.500	37.090.000	99	100		
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23	paket	23	Paket	100	10.000.000	9.807.500	98	100		
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	3	paket	100	3.000.000	2.785.000	93	100		
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	dokumen	3	dokumen	100	3.102.500	3.101.500	100	100		
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	laporan	6	laporan	100	6.490.000	6.459.000	100	100		
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	laporan	20	laporan	100	15.000.000	14.937.000	100	100		



	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100	persen	100	persen	100	22.000.000	21.600.000	98	100		
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	unit	100	22.000.000	21.600.000	98	100		
3	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100	persen	100	persen	100	143.112.500	142.155.377	99	100		
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	100	10.000.000	9.045.537	90	100		
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	Orang	8	Orang	100	133.112.500	133.109.840	100	100		
4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100	persen	100	persen	100	6.430.000	6.289.500	98	100		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	unit	100	3.950.000	3.874.500	98	100		
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	4	unit	100	2.480.000	2.415.000	97	100		
II	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	100	Persen	100	persen	100	490.865.000	483.884.074	99	100		
1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	100	persen	100	persen	100	490.865.000	483.884.074	99	100		
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	lembaga	1	lembaga	100	1.590.000	1.584.000	100	100		

	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	2	unit	100	183.000.000	176.956.300	97	100		
c	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas/ Ormas	10	pokmas	100	306.275.000	305.343.774	100	100		
<b>JUMLAH</b>								<b>700.000.000</b>	<b>691.018.951</b>	<b>98,72</b>			
<b>KELURAHAN GERGUNUNG</b>													
No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>185.140.244</b>	<b>180.766.578,00</b>	<b>97,64</b>	<b>100</b>		
1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>20.589.384</b>	<b>20.023.100,00</b>	<b>97,25</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	jenis	3	jenis	100	195.000	193.000	98,97	100		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	jenis	6	jenis	100	2.086.000	1.912.900,00	91,70	100		
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	jenis	2	jenis	100	423.384	139.200,00	32,88	100		
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	2	jneis	2	jenis	100	1.825.000	1.824.000,00	99,95	100		
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	kali	12	kali	60	1.060.000	954.000,00	90,00	100		
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	1	laporan	100	15.000.000	15.000.000,00	100,00	100		

	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>127.800.350</b>	<b>125.121.978,00</b>	<b>97,90</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Komponen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	bulan	12	bulan	100	14.000.000	11.417.658,00	81,55	100		
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	orang	6	orang	100	113.800.350	113.704.320,00	99,92	100		
3	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>36.750.510</b>	<b>35.621.500,00</b>	<b>96,93</b>	<b>100</b>		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terpelihara dan pajaknya terbayar	1	unit	1	unit	100	750.000	655.500,00	87,40	100		
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	unit	100	35.000.510	34.016.000,00	97,19	100		
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	10	unit	100	1.000.000	950.000,00	95,00	100		
II	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prersentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>789.859.756</b>	<b>779.704.092,00</b>	<b>98,71</b>	<b>100</b>		
1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>789.859.756</b>	<b>779.704.092,00</b>	<b>98,71</b>	<b>100</b>		
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	kegiatan	1	kegiatan	100	6.000.000	5.969.000,00	99,48	100		

	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	unit	3	unit	100	498.027.800	490.328.000,00	98,45	100		
c	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	lembaga	10	lembaga	100	285.831.956	283.407.092,00	99,15	100		
		<b>Jumlah</b>						<b>975.000.000</b>	<b>960.470.670</b>	<b>92,94</b>	<b>100</b>		

**URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN KLATEN SELATAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.692.325.473</b>	<b>2.332.807.582</b>	<b>87</b>	<b>100</b>	-	-
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.042.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	14	Dokumen	14	Dokumen	100	1.000.000	995.000	100	100	-	-
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	100	1.050.000	1.047.500	100	100	-	-
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.367.787.473</b>	<b>2.017.349.595</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	-	-
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	Orang	14	Orang	100	2.367.787.473	2.017.349.595	85	100	-	-
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>68.121.500</b>	<b>67.812.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	Paket	10	Paket	100	4.000.000	3.993.400	100	100	-	-
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	100	11.000.000	10.970.000	100	100	-	-
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100	4.000.000	3.999.900	100	100	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen	36	Dokumen	100	2.000.000	2.000.000	100	100	-	-
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Laporan	36	Laporan	100	12.350.000	12.349.000	100	100	-	-
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	24	Laporan	100	34.771.500	34.500.000	99	100	-	-
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>86.445.500</b>	<b>86.094.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	3	Unit	100	86.445.500	86.094.500	100	100	-	-
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>113.524.540</b>	<b>106.763.187</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	-	-
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	16.000.000	9.505.827	59	100	Realisasi anggaran listrik rendah karena adanya efisiensi pemakaian listrik, sedangkan untuk anggaran air ada kekurangan anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan penatausahaan	Untuk tahun mendatang diupayakan untuk menyusun anggaran perubahan dengan lebih cermat
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100	97.524.540	97.257.360	100	100	-	-
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>54.396.460</b>	<b>52.745.500</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9	Unit	9	Unit	100	15.000.000	13.560.500	90	100	-	-
b	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6	Unit	6	Unit	100	5.000.000	4.895.000	98	100	-	-
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	3	Unit	100	5.000.000	4.990.000	100	100	-	-
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100	21.446.460	21.350.000	100	100	-	-
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	5	Unit	100	5.000.000	5.000.000	100	100	-	-
f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	5	Unit	100	2.950.000	2.950.000	100	100	-	-
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publiknya (PATEN)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.587.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publiknya (PATEN)</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.587.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	Laporan	100	1.590.000	1.587.400	100	100	-	-
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>105</b>	<b>84.200.000</b>	<b>83.969.200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>84.200.000</b>	<b>83.969.200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Lembaga Kemasyarakatan	12	Lembaga Kemasyarakatan	100	8.000.000	7.858.900	98	100	-	-
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	100	76.200.000	76.110.300	100	100	-	-
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>96</b>	%	<b>100</b>	%	<b>104</b>	<b>102.403.000</b>	<b>102.353.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>96</b>	%	<b>100</b>	%	<b>104</b>	<b>89.400.000</b>	<b>89.368.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	100	86.400.000	86.400.000	100	100	-	-
b	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12	Laporan	12	Laporan	100	3.000.000	2.968.000	99	100	-	-
2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>13.003.000</b>	<b>12.985.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
a	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	Laporan	5	Laporan	100	13.003.000	12.985.000	100	100	-	-



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Potensi Konflik Sosial di Kecamatan yang Tertangani</b>	<b>97</b>	%	<b>100</b>	%	<b>103</b>	<b>171.899.000</b>	<b>170.138.900</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	-	-
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</b>	100	%	100	%	100	171.899.000	170.138.900	99	100	-	-
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650	Orang	650	Orang	100	171.899.000	170.138.900	99	100	-	-
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa tertib administrasi</b>	<b>95</b>	%	<b>100</b>	%	<b>105</b>	<b>91.000.000</b>	<b>90.909.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
		<b>Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu</b>	<b>97</b>	%	<b>100</b>	%	<b>103</b>					-	-
1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Prosentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>91.000.000</b>	<b>90.909.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-
a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	Dokumen	12	Dokumen	100	6.000.000	5.995.000	100	100	-	-
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	Dokumen	12	Dokumen	100	12.000.000	11.952.000	100	100	-	-
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Dokumen	12	Dokumen	100	2.280.000	2.272.500	100	100	-	-
d	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Dokumen	12	Dokumen	100	3.000.000	2.993.500	100	100	-	-
e	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3	Desa	3	Desa	100	17.820.000	17.814.900	100	100	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
f	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	Dokumen	12	Dokumen	100	6.000.000	5.997.400	100	100	-	-
g	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3	Dokumen	3	Dokumen	100	7.900.000	7.895.000	100	100	-	-
h	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Dokumen	12	Dokumen	100	26.000.000	25.996.800	100	100	-	-
i	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	12	Dokumen	12	Dokumen	100	5.000.000	4.997.000	100	100	-	-
j	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	12	Laporan	100	5.000.000	4.995.800	100	100	-	-
<b>JUMLAH</b>								<b>3.143.417.473</b>	<b>2.781.765.982</b>	<b>88</b>	<b>100</b>		
<b>KELURAHAN GAYAMPRI</b>													
No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10/9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	100%	<b>273.748.100</b>	<b>263.372.588</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>	-	-
1	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	100%	<b>69.113.100</b>	<b>67.197.400</b>	<b>97,23%</b>	<b>100%</b>	-	-
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	Paket	10	Paket	100%	4.000.000	3.987.500	99,69%	100%	-	-
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	34	Paket	34	Paket	100%	9.596.500	8.752.800	91,21%	100%	-	-
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6	Paket	6	Paket	100%	3.000.000	2.920.100	97,34%	100%	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	1.851.600	1.848.000	99,81%	100%	-	-
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	13	Paket	13	Paket	100%	5.000.000	4.994.000	99,88%	100%	-	-
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70	Laporan	70	Laporan	100%	26.165.000	25.315.000	96,75%	100%	-	-
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	3	Laporan	100%	19.500.000	19.380.000	99,38%	100%	-	-
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>72.482.000</b>	<b>69.924.000</b>	<b>96,47%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	Unit	7	Unit	100%	72.482.000	69.924.000	96,47%	100%	-	-
<b>3</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>110.556.550</b>	<b>106.823.188</b>	<b>96,62%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, S	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	3	Laporan	100%	11.977.000	8.861.764	73,99%	100%	-	-
b	Penyediaan Jasa Layanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100%	98.579.550	97.961.424	99,37%	100%	-	-
<b>4</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>		<b>1</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>21.596.450</b>	<b>19.428.000</b>	<b>89,96%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	1	Unit	48%	3.950.000	1.913.000	48,43%	100%	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	Unit	8	Unit	100%	8.400.000	8.375.000	99,70%	100%	-	-
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	Unit	11	Unit	99%	9.246.450	9.140.000	98,85%	100%	-	-
												-	-
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN</b>	<b>Persentase Lembaga Masyarakat Aktif</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1</b>	<b>%</b>	<b>98%</b>	<b>576.251.900</b>	<b>562.468.382</b>	<b>97,61%</b>	<b>100%</b>	-	-
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>98%</b>	<b>576.251.900</b>	<b>562.468.382</b>	<b>97,61%</b>	<b>100%</b>	-	-
a	Pembangunan Sarana dan Prasara Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	Paket	4	Paket	98%	333.000.000	326.308.000	97,99%	100%	-	-
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	6	Pokmas / Ormas	97%	243.251.900	236.160.382	97,08%	100%	-	-
	<b>JUMLAH</b>							<b>850.000.000</b>	<b>825.840.970</b>	<b>97,16%</b>			

URUSAN : KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KECAMATAN JATINOM

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	2.679.238.905	2.091.430.842	78,06			
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100	%	100	%	<b>100</b>	8.000.000	7.157.400	89,47			
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	7	Dokumen	<b>100</b>	5.000.000	4.344.500	87	100		
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4	Laporan	<b>100</b>	3.000.000	2.812.900	94	100		
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	%	100	%	<b>100</b>	2.410.388.206	1.838.276.908	76,26			
a	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	orang/bulan	16	orang/bulan	<b>88,89</b>	2.405.388.206	1.833.741.358	76	100		
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18	Dokumen	16	Dokumen	<b>88,89</b>	2.000.000	1.563.050	78	100		
c	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4	Laporan	4	Laporan	<b>100</b>	1.500.000	1.500.000	100	100		
d	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18	Dokumen	18	Dokumen	<b>100</b>	1.500.000	1.472.500	98	100		
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	100	%	<b>100</b>	49.000.000	44.404.000	91			
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	3	Paket	<b>100</b>	1.000.000	985.500	99	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	100	3.000.000	2.557.000	85	100		
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	100	1.000.000	940.000	94	100		
d	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen	36	Dokumen	100	1.000.000	851.000	85	100		
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	24	Laporan	100	3.000.000	2.972.500	99	100		
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100	40.000.000	36.098.000	90	100		
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	%	100	%	100	45.000.000	44.950.000	100			
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	3	Unit	100	15.000.000	15.000.000	100	100		
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	3	Unit	100	30.000.000	29.950.000	100	100		
<b>5</b>	<b>Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	%	100	%	100	120.519.119	113.815.954	94,44			
a	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100	3.500.000	3.133.000	90	100		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan	24	Laporan	100	22.833.519	16.497.354	72	100		
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan	24	Laporan	100	94.185.600	94.185.600	100	100		
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang Tepelihara	100	%	100	%	100	46.331.580	42.826.580	92			
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	9	Unit	100	5.000.000	1.575.000	32	100		

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	11	Unit	11	Unit	100	1.000.000	1.000.000	100	100		
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	10	Unit	100	40.331.580	40.251.580	100	100		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100	%	100	%	100	20.000.000	19.572.000	97,86			
<b>1</b>	<b>Penyeleggaraan Urusan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100	%	100	%	100	20.000.000	19.572.000	97,86			
a	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	Laporan	100	20.000.000	19.572.000	98	100		
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	95	%	100	%	105,26	322.891.000	304.573.299	94,33			
<b>1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	100	%	100	321.891.000	303.883.299	94,41			
a	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17	Lembaga Kemasyarakan	17	Lembaga Kemasyarakan	100	299.891.000	282.215.299	94	100		
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17	Laporan	17	Laporan	100	22.000.000	21.668.000	98	100		
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan	100	%	100	%	100	1.000.000	690.000	69,00			
a	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas/Ormas	1	Pokmas/Ormas	100	1.000.000	690.000	69	100		
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96	%	100	%	104,17	140.000.000	137.392.730	98,14			
<b>1</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100	%	100	%	100	105.000.000	102.407.730	98			

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24	Laporan	24	Laporan	100	80.000.000	77.750.000	97	100		
b	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	2	Laporan	100	25.000.000	24.657.730	99	100		
<b>2</b>	<b>Koordinasi penerapan dan peningkatan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100	%	100	%	100	35.000.000	34.985.000	99,96			
a	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	1	Laporan	100	35.000.000	34.985.000	99,96	100		
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96	%	100	%	104,17	219.000.000	213.807.260	98			
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100	%	100	%	100	219.000.000	213.807.260	97,63			
a	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	53	Orang	53	Orang	100	189.000.000	184.471.800	98	100		
b	Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	1	Laporan	100	30.000.000	29.335.460	98	100		
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	97	%	100	%	103,09	70.650.000	66.892.130				
		Persentase desa tertib administrasi	95	%	100	%	105,26						



No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	%	100	%	100	70.650.000	66.892.130	94,68			
a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17	Dokumen	17	Dokumen	100	10.000.000	9.176.730	92	100		
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17	Dokumen	17	Dokumen	100	2.400.000	2.175.000	91	100		
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17	Dokumen	17	Dokumen	100	3.500.000	3.475.000	99	100		
d	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	17	Dokumen	17	Dokumen	100	10.000.000	9.699.900	97	100		
e	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17	Dokumen	17	Dokumen	100	17.750.000	17.380.500	98	100		
f	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan fungsi BPD	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	17	Dokumen	17	Dokumen	100	20.000.000	18.930.000	95	100		
g	Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	100	2.000.000	1.900.000	95	100		
h	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18	Dokumen	18	Dokumen	100	5.000.000	4.155.000	83	100		
		<b>JUMLAH</b>						<b>3.451.779.905</b>	<b>2.833.668.261</b>	<b>82</b>			
<b>KELURAHAN JATINOM</b>													
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>275.863.000</b>	<b>271.019.884</b>	<b>98,24</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>37.500.000</b>	<b>37.426.400</b>	<b>99,80</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	30	Jenis	30	Jenis	100	19.000.000	18.990.600	99,95	100	-	-
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	1	Jenis	1	Jenis	100	5.000.000	4.999.800	100,00	100	-	-
c	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Paket	1	Paket	100	13.500.000	13.436.000	99,53	100	-	-
<b>2</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>63.610.000</b>	<b>62.600.000</b>	<b>98,41</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	Unit	6	Unit	100	26.750.000	26.300.000	98,32	100	-	-
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	3	Unit	100	36.860.000	36.300.000	98,48	100	-	-
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>153.308.000</b>	<b>150.153.484</b>	<b>97,94</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	4	Jenis	4	Jenis	100	22.308.000	20.016.764	89,73	100	-	-
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedia	6	Orang	6	Orang	100	131.000.000	130.136.720	99,34	100	-	-
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>21.445.000</b>	<b>20.840.000</b>	<b>97,18</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	1	Unit	1	Unit	100	1.550.000	1.440.000	92,90	100	-	-

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%) (6:4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%) (10:9) x 100	Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1	Paket	1	Paket	100	19.895.000	19.400.000	97,51	100	-	-
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat aktif</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>424.137.000</b>	<b>417.720.958</b>	<b>98,49</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Warga Desa/Kelurahan yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>424.137.000</b>	<b>417.720.958</b>	<b>98,49</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2	Lembaga Kemasyarakatan	2	Lembaga Kemasyarakatan	100	7.950.000	7.949.900	100,00	100	-	-
b	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	Unit	4	Unit	100	193.000.000	187.569.508	97,19	100	-	-
c	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	Pokmas /Ormas	7	Pokmas /Ormas	100	223.187.000	222.201.550	99,56	100	-	-
		<b>Jumlah</b>						<b>700.000.000</b>	<b>688.740.842</b>	<b>98,39</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

**TINGKAT KESESUAIAN INDIKATOR KEGIATAN TERHADAP INDIKATOR PROGRAM**

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>							
<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>							
<b>DINAS PENDIDIKAN</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1	100	8	100	100	Sangat tinggi
2	Program Pengelolaan Pendidikan	11	100,78	15	105,25	95,8	Sangat tinggi
3	Program Pengembangan Kurikulum	3	100	2	101,00	99	Sangat tinggi
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	3	101,42	1	95,81	105,9	Sangat tinggi
5	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	1	100	1	100	100	Sangat tinggi
<b>TK NEGERI PEMBINA</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1	100	2	100	100	Sangat tinggi
2	Program Pengelolaan Pendidikan	1	102,63	2	102,56	100,07	Sangat tinggi
<b>SD NEGERI</b>							
1	Program Pengelolaan Pendidikan	3	101,40	2	99,20	102	Sangat tinggi
<b>SMP NEGERI</b>							
1	Program Pengelolaan Pendidikan	3	100,72	1	100,00	101	Sangat tinggi
<b>SPNF SKB Cawas</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1	100	4	100	100	Sangat tinggi
2	Program Pengelolaan Pendidikan	7	101,86	2	100,00	102	Sangat tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>URUSAN KESEHATAN</b>							
<b>DINAS KESEHATAN</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	100	8	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	29	142,52	26	107,39	132,71	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	2	94,12	3	100	94,12	Sangat Tinggi
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	2	90,87	6	100	90,87	Tinggi
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	116,13	3	98,3	118,14	Sangat Tinggi
<b>RSUD BAGAS WARAS</b>							
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	2	100	100	Sangat tinggi
<b>PUSKESMAS</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	94	1	94	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	100	2	100	100,00	Sangat Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							
	<b>DPU dan PR</b>						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	100	8	100	100,00	Sangat tinggi
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1	100,00	3	108	92,59	Sangat tinggi
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	97,66	1	97,24	100,43	Sangat tinggi
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1	100	1	100	100,00	Sangat tinggi
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	96,62	1	100	96,62	Sangat tinggi
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1	100,03	1	102,15	97,92	Sangat tinggi
7	Program Penataan Bangunan Gedung	2	160,03	1	100	160,03	Sangat tinggi
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2	100,00	1	100	100,00	Sangat tinggi
9	Program Penyelenggaraan Jalan	2	107,91	1	100,04	107,87	Sangat tinggi
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1	83	6	91,5	90,71	Tinggi
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3	100,24	4	93,75	106,92	Sangat tinggi
<b>URUSAN PERWASKIM</b>							
	<b>DINAS PERWASKIM</b>						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	9	100	100	Sangat tinggi
2	Program Pengembangan Perumahan	2	100	6	100	100	Sangat tinggi
3	Program Kawasan Permukiman	1	100	3	80,95	123,53	Sangat tinggi
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1	99,55	1	100	99,55	Sangat tinggi
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	2	100	1	100	100	Sangat tinggi
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1	0	1	5	0	Sangat rendah

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>							
<b>SATPOL PP dan DAMKAR</b>							
1	Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	7	100	100	Sangat tinggi
2	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4	101,12	5	100	101,12	Sangat tinggi
3	Prgram Pencegahan, Penggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3	86,22	4	99,5	86,65	Tinggi
<b>BPBD</b>							
1	Program Penunjang urusan pemerintahan	1	100	6	100	100	Sangat Tinggi
2	program Penanggulangan Bencana	4	100	4	100	100	Sangat Tinggi
<b>Urusan Sosial</b>							
<b>DISSOSP3APPKE</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	6	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemberdayaan Sosial	1	99	1	99	100	Sangat Tinggi
3	Program Rehabilitasi Sosial	1	130	1	100	130	Sangat Tinggi
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1	153	1	170	90	Tinggi
5	Program Penanganan Bencana	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>							
<b>Urusan Tenaga Kerja</b>							
<b>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>							
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1	80,46	1	100,00	80,46	Tinggi
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	104	3	100,11	103,89	Sangat Tinggi
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	1	62,44	4	118,88	52,52	Rendah
4	Program Hubungan Industrial	1	100	2	74,66	133,94	Sangat Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 – 90,99%), Sedang (66 – 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
	<b>DISSOSP3APPKB</b>						
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	363	3	105,7	344	Sangat Tinggi
2	Program Perlindungan Perempuan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	1	108	1	80	135	Sangat Tinggi
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1	131	2	100	131	Sangat Tinggi
6	Program Perlindungan Khusus Anak	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
<b>Urusan Pangan</b>							
	<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>						
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	8	98,89	101,12	Sangat Tinggi
2	Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1	103,78	1	100	103,78	Sangat Tinggi
3	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2	93,43	3	100,00	93,43	Sangat Tinggi
4	Penanganan Kerawanan Pangan	1	85,42	1	133	64,06	Rendah
5	Pengawasan Keamanan Pangan	1	96,43	1	100	96,43	Sangat Tinggi



No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 – 90,99%), Sedang (66 – 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>							
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	7	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1	100	2	100	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3	100	2	100	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	1	100	1	100	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1	100	1	100	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	97,4	1	100	97,43	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2	100	1	100	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2	133	1	66,7	199,50	Sangat Tinggi
9	Program Pengelolaan Persampahan	2	100,5	1	95,6	105,18	Sangat Tinggi
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1	100	1	100	100,00	Sangat Tinggi
<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>							
<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	7	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pendaftaran Penduduk	3	100,54	4	100	100,54	Sangat Tinggi
3	Program Pencatatan Sipil	6	100,3	2	100	100,3	Sangat Tinggi
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	268,4	6	98,04	273,77	Sangat Tinggi
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 – 90,99%), Sedang (66 – 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	5	100	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1	140	1	140	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2	95,02	1	167,22	56,82	Rendah
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3	100	4	100,00	100,00	Sangat Tinggi
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan KB</b>							
<b>DISSOSP3APPKB</b>							
1	Program Pengendalian Penduduk	2	100	2	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2	105,15	4	102,9	102,19	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4	106	2	100	106	Sangat Tinggi
<b>Urusan Perhubungan</b>							
<b>Dinas Perhubungan</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	95,12	7	99,7	95	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1	142,86	12	102	140,06	Sangat Tinggi
<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>							
<b>Diskominfo</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	7	100	100	Sangat Tinggi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	7	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3	132,18	2	107,69	122,74	Sangat Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>							
	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan</b>						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	100	9	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	2	90,36	1	37,09	243,62	Sangat Tinggi
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1	101,65	1	100	101,65	Sangat Tinggi
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	2	96,88	1	174,36	55,56	Remdah
5	Program Pengembangan UMKM	1	95,71	1	95,71	100,00	Sangat Tinggi
<b>Urusan Penanaman Modal</b>							
	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1	93,55	7	93,13	100,45	Sangat Tinggi
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	96,11	2	100	96,11	Sangat Tinggi
3	Program Promosi Penanaman Modal	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	96,09	1	96,09	100	Sangat Tinggi
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistim Informasi Penanaman Modal	1	93,75	1	93,75	100	Sangat Tinggi
<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>							
	<b>Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata</b>						
1	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	2	252,4	2	100	252,4	Sangat Tinggi
2	Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1	1237	4	100	1237	Sangat Tinggi
<b>Urusan Statistik</b>							
	<b>Diskominfo</b>						
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>Urusan Persandian</b>							
<b>Diskominfo</b>							
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2	177,48	1	100	177,48	Sangat Tinggi
<b>Urusan Kebudayaan</b>							
<b>Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	100	6	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengembangan Kebudayaan	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1	95	1	75	127	Sangat Tinggi
4	Program Pembinaan Sejarah	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1	94,12	2	61,5	153	Sangat Tinggi
<b>Urusan Perpustakaan</b>							
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>							
1	Program Pembinaan Perpustakaan	2	119	2	100	119	Sangat Tinggi
<b>Urusan Kearsipan</b>							
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	5	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengelolaan Arsip	2	109	3	100	109	Sangat Tinggi
3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	2	90	5	100	90	Tinggi
<b>URUSAN PERTANAHAN</b>							
<b>DINAS PERWASKIM</b>							
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1	100	1	5	2.000	Sangat tinggi
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1	100	1	100	100	Sangat tinggi
3	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	1	100	1	100	100	Sangat tinggi
4	Program Penatagunaan Tanah	1	100	1	100	100	Sangat tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 – 90,99%), Sedang (66 – 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>URUSAN PILIHAN</b>							
<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>							
	<b>Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan</b>						
1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	1	67,72	1	81	83,60	Tinggi
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	101,41	2	100	101,41	Sangat Tinggi
3	Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	1	100	1	200	50,00	Sangat Rendah
4	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	129,62	1	130	99,71	Sangat Tinggi
<b>Urusan Pariwisata</b>							
	<b>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga</b>						
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	100	4	99,3	100,70	Sangat Tinggi
2	Program Pemasaran Pariwisata	1	100	1	99,10	100,91	Sangat Tinggi
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	100	1	84,21	118,75	Sangat Tinggi
<b>Urusan Pertanian</b>							
	<b>Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan</b>						
1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4	177,97	7	152,51	116,69	Sangat Tinggi
2	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3	87,06	3	99,85	87,19	Tinggi
3	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	227,27	4	103,25	220,12	Sangat Tinggi
4	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	100	1	100	100,00	Sangat Tinggi
5	Penyuluhan Pertanian	1	87,62	4	104,07	84,19	Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 – 90,99%), Sedang (66 – 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>Urusan Perdagangan</b>							
<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan</b>							
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3	109,2	2	91,68	119,11	Sangat Tinggi
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3	93,71	3	93,73	99,98	Sangat Tinggi
3	Program Pengembangan Ekspor	1	100	1	60	166,67	Sangat Tinggi
4	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1	107,14	1	79,55	134,68	Sangat Tinggi
5	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1	157,14	1	42,86	366,64	Sangat Tinggi
<b>Urusan Perindustrian</b>							
<b>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>							
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1	88,48	1	117,38	75,38	Sedang
2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1	151,5	1	144,40	104,92	Sangat tinggi
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	6	89,89	111,25	Sangat tinggi
<b>Urusan Transmigrasi</b>							
<b>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>							
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1	125,00	1	114,94	108,75	Sangat Tinggi
<b>URUSAN PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIA DAERAH</b>							
<b>Bagian Organisasi</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3	100	4	100	100	Sangat Tinggi
<b>Bagian Umum</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	10	100	100	Sangat Tinggi
<b>Bagian Hukum</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	4	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2	130	2	100	130	Sangat Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	4	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
<b>Bagian Kesra</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	4	100	100	sangat tinggi
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	79	1	79	100	sangat tinggi
<b>Bagian Pengadaan Barang/Jasa</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	5	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
<b>Bagian Pemerintahan</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	3	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2	144	3	100	144	Sangat Tinggi
<b>Bagian Prokopim</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2	100	5	100	100	Sangat Tinggi
<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	2	100	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	5	-159,8	2	100,00	-159,80	Sangat Rendah
<b>Urusan Penunjang Pengawasan</b>							
<b>Inspektorat</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	7	108,41	92,24	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5	203,006	2	317,23	63,99	Rendah
3	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	5	158,618	2	139,87	113,40	Sangat Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>Urusan Penunjang Perencanaan</b>							
	<b>Bappedalitbang</b>						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	6	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2	104	3	100	104	Sangat Tinggi
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2	84,00	3	100	84	Tinggi
<b>Urusan Penunjang Keuangan</b>							
	<b>BPKPAD</b>						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	100,00	7	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3	102,00	4	101,95	100,05	Sangat Tinggi
3	Program Pengeloaan Barang Milik Daerah	1	100,00	1	100,00	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	120,72	1	120,72	100,00	Sangat Tinggi
<b>Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>							
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	1	100	5	104	97	Sangat Tinggi
2	Program Kepegawaian Daerah	4	101,91	7	127,47	80	Tinggi
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	272,41	2	266,88	102	Sangat Tinggi
<b>Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan</b>							
	<b>Bappedalitbang</b>						
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	95,54	4	100	95,54	Sangat Tinggi
<b>Urusan Penunjang Sekretariat DPRD</b>							
	<b>Sekretariat DPRD</b>						
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	8	100	100	sangat tinggi
2	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	3	90,57	7	100	91	sangat tinggi



No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>URUSAN : FUNGSI PENUNJANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>							
<b>BADAN KESBANGPOL</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	100	4	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2	99,63	1	100	99,63	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya politik	2	77,125	1	100	77,125	Tinggi
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2	132,45	1	100	132,45	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2	100	1	100	100	Sangat Tinggi
<b>Urusan Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan</b>							
<b>KECAMATAN BAYAT</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1	80	6	100	80	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Daerah Pelayanan Publik	1	72	1	100	72	Sedang
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	90	1	100	90	Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1	99	1	100	99	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1	78	1	100	78	Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>KECAMATAN CAWAS</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	100	6	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	105,26	1	105,26	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	104,17	2	100	104,17	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	104,17	1	100	104,17	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	104,18	1	100	104,18	Sangat Tinggi
<b>KECAMATAN CEPER</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	100	6	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	104	2	88	118,18	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100	1	97	103	Sangat tinggi
<b>KECAMATAN DELANGGU</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	6	100	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	1	100	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	105,26	1	100	105,26	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	104,17	2	100	104,17	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	1	104,17	1	100	104,17	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	104,18	1	100	104,18	Sangat Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 – 90,99%), Sedang (66 – 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>KECAMATAN GANTIWARNO</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1	100,0	6	97,56	102,50	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Daerah Pelayanan Publik	1	100,0	1	103,09	97,00	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	104,2	1	103,09	101,09	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	104,2	2	102,57	101,56	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1	104,2	1	104,17	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	2	104,2	1	82,91	125,65	Sangat Tinggi
<b>KECAMATAN JATINOM</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1	100	6	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Daerah Pelayanan Publik	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	105,26	2	100	105	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	104,17	2	100	104	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	2	104,18	1	100	104	Sangat Tinggi
<b>KELURAHAN JATINOM</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1	100%	4	100%	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100%	1	100%	100	Sangat Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>KECAMATAN JOGONALAN</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1	100%	6	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100%	1	100%	100%	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100%	1	100%	100%	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100%	1	100%	100%	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	97,66%	1	100%	97,66%	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	89,36%	1	100%	91,67%	Sangat Tinggi
<b>KECAMATAN JUWIRING</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1	96	5	96	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	95	1	100	95	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	96	1	100	96	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	40	1	42	95	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	98	1	100	97,5	Sangat Tinggi

<b>KECAMATAN KALIKOTES</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1	100	5	100%	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	105	1	100%	105	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	90	2	100%	90	Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	104	1	100%	104	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	108	1	100%	108	Sangat Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>KECAMATAN KARANGANOM</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1	100	6	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100,00	1	100,00	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	103,09	1	103,09	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	103,00	1	100	103,00	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	103,65	1	100	103,65	Sangat Tinggi
<b>KECAMATAN KARANGDOWO</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	6	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1	105,26	1	105,26	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	104,17	1	100	104,17	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	104,17	1	100	104,17	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	104,17	1	100	104,17	Sangat Tinggi
<b>KECAMATAN KARANGNONGKO</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1	82	6	95,5	86	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Daerah Pelayanan Publik	1	97	1	100	97	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	97	1	100	97	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	101	2	100	101	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1	103	1	100	103	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>KECAMATAN KEBONARUM</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100 %	6	100 %	100 %	sangat tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1	100 %	1	100 %	100 %	sangat tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1	100 %	1	100 %	100 %	sangat tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	100 %	1	100 %	100 %	sangat tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	100 %	1	100 %	100 %	sangat tinggi
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100 %	1	100 %	100 %	sangat tinggi
<b>KECAMATAN KEMALANG</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100,00	6	100	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1	100,00	1	100	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1	105,26	1	105,26	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	104,17	1	104,17	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	104,17	1	104,17	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	105,26	1	105,26	100,00	Sangat Tinggi
<b>KECAMATAN MANSIRENGGO</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota	1	100	6	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	100	1	100	100	Sangat Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>KECAMATAN NGAWEN</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100%	5	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100%	1	100%	100%	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	1	100%	1	100%	100%	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100%	2	100%	100%	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	105%	1	100%	105%	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	110,5%	1	100%	110,5%	Sangat Tinggi
<b>KECAMATAN PEDAN</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	6	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	100	1	100	100	Sangat Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 – 90,99%), Sedang (66 – 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>KECAMATAN POLANHARJO</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	96	6	100	96	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	100	1	100	98	Sangat Tinggi
<b>KECAMATAN PRAMBANAN</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	100,00	6	100	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100,00	1	100	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	105,26	1	105,26	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	104,17	2	102,08	102,05	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	104,17	1	104,17	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	105,26	1	105,26	100,00	Sangat Tinggi
<b>KECAMATAN TRUCUK</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	100	6	100	100	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	104	1	100	104	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	104	1	100	104	Sangat Tinggi



No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>KECAMATAN TULUNG</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	100	6	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	105	1	100	105	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	104	2	100	104	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	104	1	100	104	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	104	1	100	104	Sangat Tinggi
<b>KECAMATAN WEDI</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	100	6	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	100	1	100	100	Sangat Tinggi
<b>KECAMATAN WONOSARI</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	6	100	100	Sangat tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1	100	1	100	100	Sangat tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1	100	1	100	100	Sangat tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	100	2	100	100	Sangat tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	100	1	100	100	Sangat tinggi
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	100	1	100	100	Sangat tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>KECAMATAN KLATEN SELATAN</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	6	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	105	1	100	105	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	104	2	102	101,96	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	103	1	100	103	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	104	1	100	104	Sangat Tinggi
<b>KELURAHAN GAYAMPRI</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	4	98	102,04	Sangat Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	98	1	98	100,00	Sangat Tinggi
<b>KECAMATAN KLATEN TENGAH</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	6	99	101	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	105,26	2	105	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	104,17	2	100	104,17	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	104,17	1	100	104,17	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	104,18	1	100	104,18	Sangat Tinggi
<b>KELURAHAN BUNTALAN</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	100	4	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	2	100	100	Sangat Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 – 90,99%), Sedang (66 – 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>KELURAHAN KABUPATEN</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	4	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
<b>KELURAHAN KLATEN</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1	100	3	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
<b>KELURAHAN MOJAYAN</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1	100	4	100	100	Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	1	100	100	Tinggi
<b>KELURAHAN TONGGALAN</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	4	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
<b>KELURAHAN BARENG</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	3	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan Sangat Tinggi ( $\geq 91\%$ ), Tinggi (76 - 90,99%), Sedang (66 - 75,99%), Rendah (51-65,99%), sangat rendah ( $\leq 50,99\%$ )
1	2	3	4	5	6	7 = (4:6)*100	8
<b>KECAMATAN KLATEN UTARA</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	6	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2	100	1	100	100	Sangat Tinggi
<b>KELURAHAN BARENG LOR</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	4	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
<b>KELURAHAN GERGUNUNG</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	100	3	100	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	1	100	100,00	Sangat Tinggi

Klaten, 13 Maret 2024



BUPATI KLATEN

Hj. SRI MULYANI, S.M., M.Si